



GUBERNUR KALIMANTAN BARAT
PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
NOMOR 6 TAHUN 2024

TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
TAHUN 2025-2045

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2024 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 204, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6780);
6. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
dan
GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA PANJANG DAERAH TAHUN 2025-2045.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Provinsi Kalimantan Barat.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Barat.
4. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional yang selanjutnya disingkat RPJPN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
5. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Gubernur.

BAB II
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 2

- (1) Perencanaan Pembangunan Daerah periode Tahun 2025-2045 tertuang dalam RPJPD Tahun 2025-2045.
- (2) RPJPD Tahun 2025-2045 disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. Bab I Pendahuluan;
 - b. Bab II Gambaran Umum Kondisi Daerah;
 - c. Bab III Permasalahan dan Isu Strategis;
 - d. Bab IV Visi dan Misi Daerah;
 - e. Bab V Arah Kebijakan dan Sasaran Pokok; dan
 - f. Bab VI Penutup.
- (3) Rincian RPJPD Tahun 2025-2045 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 3

Tahapan RPJPD Tahun 2025-2045 sebagai berikut:

- a. Tahap Pertama Tahun 2025-2029;
- b. Tahap Kedua Tahun 2030-2034;
- c. Tahap Ketiga Tahun 2035-2039; dan
- d. Tahap Keempat Tahun 2040-2045.

Pasal 4

RPJPD Tahun 2025-2045 bertujuan untuk memberikan arah sekaligus menjadi acuan bagi Pemerintah Daerah, masyarakat, dan dunia usaha dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan Daerah sesuai dengan visi, misi, dan arah pembangunan Daerah.

Pasal 5

- (1) Visi RPJPD Tahun 2025-2045 adalah Kalimantan Barat Maju, Sejahtera, dan Berkelanjutan;
- (2) Misi RPJPD Tahun 2025-2045 meliputi:
 - a. transformasi sosial;
 - b. transformasi ekonomi;
 - c. transformasi tata kelola;
 - d. keamanan daerah tangguh, demokrasi substansial dan stabilitas ekonomi makro daerah;
 - e. ketahanan sosial budaya dan ekologi;
 - f. pembangunan kewilayahan yang merata dan berkeadilan;
 - g. dukungan sarana prasarana yang ramah lingkungan; dan
 - h. kesinambungan pembangunan untuk mengawal Kalimantan Barat maju, Sejahtera, dan berkelanjutan.

Pasal 6

- (1) RPJPD Tahun 2025-2045 menjadi pedoman dalam penyusunan RPJMD yang memuat visi, misi, dan program Gubernur.
- (2) RPJPD Tahun 2025-2045 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun dengan memperhatikan RPJPN Tahun 2025-2045.

BAB III PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 7

- (1) Gubernur melalui perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJPD Tahun 2025-2045.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB IV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- (1) Perencanaan Jangka Menengah yang telah ditetapkan sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan ditetapkan RPJMD yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (2) Perencanaan Tahunan yang telah ditetapkan sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan dilakukannya perubahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Pasal 9

- (1) Perubahan RPJPD dapat dilakukan apabila:
 - a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan Daerah yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. terjadi perubahan yang mendasar.
- (2) Dalam rangka efektivitas, perubahan RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b tidak dapat dilakukan apabila sisa masa berlaku RPJPD kurang dari 7 (tujuh) tahun.
- (3) Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, mencakup terjadinya bencana alam, goncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah, atau perubahan kebijakan nasional.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 3) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 24 September 2024
Pj. GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

ttd

HARISSON

Diundangkan di Pontianak
pada tanggal 24 September 2024
Pj. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT,

ttd

MOHAMMAD BARI

LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2024 NOMOR 6

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT : 6-227/ 2024

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum



Abussamah, S.STP.,M.AP.
Pembina Tk. I (IV/b)
19820416 200012 1 001

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KALIMANTAN BARAT
NOMOR 6 TAHUN 2024

TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
TAHUN 2025-2045

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan penyusunan rencana Pembangunan yang mendukung koordinasi antar pelaku Pembangunan, menjamin terciptanya integritas, sinkronisasi dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintahan, menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta mengoptimalkan peran serta Masyarakat. Hal lain yang perlu mendapat perhatian adalah menjamin penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan. Dalam rangka mewujudkan amanat tersebut, maka perencanaan pembangunan di daerah disusun dalam tahapan baik dalam jangka Panjang, menengah maupun tahunan.

Dalam rangka pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, serta dengan memperhatikan beberapa peraturan pelaksanaannya mengamanatkan bahwa Pemerintah Daerah diwajibkan untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebagai rencana tahunan.

RPJPD sebagai penjabaran visi, misi, arah kebijakan dan sasaran pokok pembangunan Daerah untuk 20 (dua puluh) tahun yang akan dicapai dalam kurun waktu Tahun 2025-2045. Tujuan, sasaran, dan program pembangunan yang ditetapkan dalam RPJPD harus selaras dengan RPJPN. Penetapan sasaran dan program-program pembangunan yang ditetapkan dalam RPJPD disesuaikan dengan prediksi kemampuan sumber daya dan dana serta hasil (keluaran dan dampak) yang ingin dicapai dari pelaksanaan program tersebut yang ditetapkan secara indikatif. Keluaran dan dampak yang tercantum dalam dokumen rencana ini merupakan indikasi yang hendak dicapai dan bersifat tidak kaku, dapat disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dan dimuat dalam RPJMD dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

RPJPD Tahun 2025-2045 merupakan perspektif masa depan Daerah tentang apa yang ingin dicapai dalam masa 20 (dua puluh) tahun ke depan melalui visi:

“Kalimantan Barat Maju, Sejahtera dan Berkelanjutan”

Dalam upaya mencapai perspektif masa depan tersebut secara terencana, terarah dan terukur serta dapat mengantisipasi kebutuhan pembangunan Daerah dalam kurun waktu 20 (dua puluh) tahun ke depan, maka disusunlah RPJPD Tahun 2025-2045.

Adapun maksud dari penyusunan Peraturan Daerah tentang RPJPD Tahun 2025-2045 adalah sebagai pedoman dalam penyusunan RPJMD di lingkungan Pemerintah Daerah dan prioritas pembangunan daerah, strategi, arah kebijakan, program, indikator kinerja, sasaran, lokasi, total kebutuhan, target kinerja dan indikasi pendanaan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT NOMOR 6

LAMPIRAN RANCANGAN PERDA

TENTANG RPJPD
TAHUN 2025-2045



2045

**"KALIMANTAN BARAT MAJU,
SEJAHTERA, DAN
BERKELANJUTAN**





Kalimantan Barat 2045:

**Maju, Sejahtera, dan
Berkelanjutan**

© Bappeda Provinsi Kalimantan Barat

Alamat : Jl. Jenderal Ahmad Yani Gedung Pelayanan
Terpadu Lantai 3,
Komplek Kantor Gubernur Kalimantan Barat
Pontianak, 78124 Pontianak

Telepon : 082150861900

Pol-el : bappeda@kalbarprov.go.id

KATA SAMBUTAN

Puji dan syukur kami ucapkan kepada Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas karunianya, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat telah menyelesaikan “Rancangan Akhir RPJPD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2025-2045”. Tentu saja, dokumen ini bukanlah akhir, tetapi sebuah awal perjalanan kita membangun Kalimantan Barat selama 20 tahun ke depan.

Jika kita mundur kembali dalam 20 tahun ke belakang, kita patut berterima kasih dan bangga kepada para pemimpin dan berbagai pihak yang telah berkomitmen dan berkontribusi positif terhadap pembangunan Kalimantan Barat di segala bidang dan mengangkat derajat masyarakat untuk mendapatkan taraf hidup yang lebih baik. Kalimantan Barat hari ini, adalah Kalimantan Barat yang telah bertransformasi dan berdaya saing. Dalam hal ini, kita tidak boleh berpuas diri dan terus melakukan instropeksi diri terhadap setiap capaian pembangunan dan melangkah maju, menyesuaikan perkembangan zaman dan teknologi, serta konsistensi terhadap rencana pembangunan.

RPJPD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2025-2045 disusun berdasarkan 4 (empat) pendekatan, yaitu: Teknokratis, Partisipatif, Politis dan Perpaduan antara Bottom-Up dan Top-Down. Melalui tahapan dan proses yang berkesinambungan, semua pemikiran strategis dari berbagai pihak dapat ditampung dan diolah sedemikian rupa untuk, secara komprehensif, menentukan arah kebijakan pembangunan Kalimantan Barat. Lewat sebuah pantun, izinkan kami menyampaikan cita-cita sekaligus visi-misi terhadap masa depan Kalimantan Barat tercinta:

Menembus Batas Lintasi Cakrawala.

Dimana Langit Bertingkat Memadu Mimpi dan Harapan.

Kita Bergerak Menuju Indonesia Emas 2045.

Kalimantan Barat yang Maju, Sejahtera dan Berkelanjutan.

**“Kalimantan Barat Maju, Sejahtera, dan
Berkelanjutan”**

Semoga, Tuhan yang Maha Kuasa berkenan terhadap rencana pembangunan yang telah kita buat. Semesta mendukung terhadap implementasi program/kegiatan pembangunan. Pemerintah Pusat-Daerah serta para pemangku kepentingan dan masyarakat juga bahu-membahu dan bersinergi untuk menggerakkan roda-roda pembangunan demi apa yang kita cita-cita kelak.



Pontianak, Mei 2024
Pj. Gubernur Kalimantan Barat,

HARRISON

KATA PENGANTAR

Kalimantan Barat adalah provinsi yang memiliki luas 147.307,00 Km² (7,53% luas Indonesia) dan merupakan provinsi terbesar keempat setelah Papua, Kalimantan Timur dan Kalimantan Tengah. Untuk mewujudkan Kalimantan Barat Tangguh 2045 tidak terlepas dari visi Maju, Sejahtera dan Berkelanjutan. Segala upaya pembangunan harus dilakukan untuk mewujudkan visi tersebut yang dituangkan dalam RPJPD Tahun 2025-2045.

Di dalam Menyusun RPJPD 2025-2045, Bappeda Provinsi Kalimantan Barat memulainya dengan Rancangan Awal RPJPD, yang disampaikan untuk mendapatkan masukan dari seluruh pemangku kepentingan, yang kemudian disempurnakan menjadi Rancangan Akhir RPJPD 2025-2045. Dokumen ini meliputi seluruh aspek pembangunan dimulai dengan menggambarkan hasil pembangunan yang telah dicapai selama kurun waktu dua dekade terakhir. Meskipun telah banyak kemajuan yang dicapai, Kalimantan Barat masih terjebak sebagai salah satu provinsi berpendapatan rendah yang diwarnai dengan tingkat kemiskinan tinggi serta kesenjangan antar kelompok pendapatan. Kalimantan Barat ke depan juga menghadapi tantangan baru yang harus diantisipasi terutama pergeseran demografi, perubahan teknologi yang begitu cepat, serta perubahan politik dan ekonomi. Untuk menjawab tantangan-tantangan tersebut, Kalimantan Barat harus mengoptimalkan modal dasar yang dimiliki meliputi kependudukan, modal manusia, modal sosial dan budaya serta kekuatan sumber daya alam.

“Kalimantan Barat Maju, Sejahtera, dan Berkelanjutan”

Pembangunan 20 (dua puluh) tahun ke depan harus menggunakan paradigma baru. Reformasi saja tidak akan cukup, Kalimantan Barat harus melakukan transformasi secara menyeluruh berlandaskan kolaborasi seluruh elemen pemangku kepentingan dalam mendorong kemajuan Kalimantan Barat. Pencapaian visi Maju, Sejahtera dan Berkelanjutan 2025-2045 dituangkan dalam 8 (delapan) misi agenda pembangunan, yaitu 1). Transformasi Sosial, 2). Transformasi Ekonomi, 3). Transformasi Tata Kelola, 4). Supermasi Hukum, Stabilitas dan Kepemimpinan Indonesia, 5). Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi, 6). Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkeadilan, serta 8). Kestinambungan Pembangunan.

Pada akhirnya misi tersebut harus menjadi acuan seluruh elemen pemangku kepentingan untuk bergotong royong mewujudkan Kalimantan Barat Tangguh 20245 sebagai Provinsi yang Maju, Sejahtera dan Berkelanjutan.



Pontianak, Mei 2024

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Provinsi Kalimantan Barat,

Dra. MAHMUDAH, M.M

DAFTAR ISI

KATA SAMBUTAN.....	i
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xviii
BAB I PENDAHULUAN.....	I-1
1.1. LATAR BELAKANG	I-1
1.2. Dasar Hukum	I-2
1.3. Hubungan Antara RPJD dan Dokumen Pembangunan Lainnya	I-4
1.3.1. Hubungan Antara RPJPD dan RPJPN	I-4
1.3.2. Hubungan Antara RPJPD, RPJPM, RKPD, Renstra PD, dan Renja PD	I-5
1.3.3. Hubungan Antara RPJPD Provinsi Kalimantan Barat dan RTRW Provinsi Kalimantan Barat.....	I-6
1.3.4. Hubungan Antara RPJPD Provinsi Kalimantan Barat dan KLHS RPJPD Provinsi Kalimantan Barat.....	I-6
1.4. Maksud dan Tujuan.....	I-6
1.5. Sistematika Penulisan.....	I-7
BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH.....	II-1
2.1. ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI	II- 1
2.1.1. Geografi.....	II-1
2.1.1.1. Luas dan Batas Wilayah.....	II-1
2.1.1.2. Letak dan Kondisi Geografis	II-3
2.1.1.3. Topografi	II-3
2.1.1.4. Geologi	II-5
2.1.1.5. Hidrologi	II-5
2.1.1.6. Klimatologi.....	II-5
2.1.1.7. Penggunaan Lahan	II-6
2.1.1.8. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	II-9
2.1.2. Demografi.....	II-10
2.2. ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT	II-14
2.2.1. Kesejahteraan Ekonomi	II-14
2.2.1.1. Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	II-15
2.2.1.2. Produk Domestik Regional Per Kapita (PDRB/Kapita)	II-17
2.2.1.3. Nilai Tukar Petani (NTP)	II-18
2.2.1.4. Angka Kemiskinan.....	II-19
2.2.1.5. Tingkat Pengangguran	II-20
2.2.1.6. Rasio Gini.....	II-21
2.2.1.7. Indeks Williamson	II-22
2.2.1.8. Laju Inflasi	II-22

**“Kalimantan Barat Maju, Sejahtera, dan
Berkelanjutan”**

2.2.1.9.	Indeks Pembangunan Manusia.....	II-23
2.2.2.	Kesejahteraan Sosial Budaya	II-24
2.2.2.1.	Kesehatan	II-25
2.2.2.2.	Kesejahteraan Keluarga	II-28
2.3.	ASPEK DAYA SAING	II-35
2.3.1.	Daya Saing Ekonomi Daerah	II-35
2.3.1.1.	Daya Saing Sektoral.....	II-35
2.3.1.2.	Daya Saing Wilayah	II-36
2.3.1.3.	Daya Saing Digital.....	II-37
2.3.2.	Daya Saing SDM.....	II-38
2.3.2.1.	Pendidikan.....	II-38
2.3.2.2.	Ketegakerjaan	II-42
2.3.3.	Daya Saing Fasilitas/Infrastruktur di Daerah.....	II-43
2.3.3.1.	Energi dan Kelistrikan	II-44
2.3.3.2.	Infrastruktur Jalan.....	II-49
2.3.3.3.	Irigasi.....	II-51
2.3.3.4.	Air Bersih.....	II-53
2.3.3.5.	Sanitasi.....	II-59
2.3.3.6.	Persampahan	II-64
2.3.3.7.	Perumahan dan Permukiman.....	II-65
2.3.3.8.	Informasi dan Komunikasi	II-66
2.3.3.9.	Pendidikan.....	II-68
2.3.3.10.	Kesehatan	II-68
2.3.3.11.	Kebencanaan	II-71
2.3.4.	Daya Saing Iklim Investasi	II-76
2.3.4.1.	Kemudahan Investasi.....	II-81
2.3.4.2.	Keamanan Investasi.....	II-84
2.3.4.3.	Daya Saing Daerah	II-85
2.4.	ASPEK PELAYANAN UMUM.....	II-86
2.4.1.	Fokus Layanan Urusan Pemerintah Wajib.....	II-86
2.4.1.1.	Pendidikan.....	II-86
2.4.1.2.	Kesehatan	II-89
2.4.1.3.	Perumahan dan Kawasan Pemukiman	II-90
2.4.1.4.	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	II-94
2.4.1.5.	Sosial.....	II-99
2.4.1.6.	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat.....	II-103
2.4.1.7.	Tenaga Kerja.....	II-107
2.4.1.8.	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.....	II-108
2.4.1.9.	Pangan	II-110
2.4.1.10.	Pertanahan.....	II-111
2.4.1.11.	Lingkungan Hidup	II-112
2.4.1.12.	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	II-115
2.4.1.13.	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	II-118
2.4.1.14.	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	II-119
2.4.1.15.	Perhubungan.....	II-120
2.4.1.16.	Komunikasi dan Informatika	II-122

2.4.1.17.	Koperasi dan Usaha Kecil. Menengah	II-123
2.4.1.18.	Penanaman Modal	II-125
2.5.	Evaluasi Hasil RPJPD Tahun 2005-2025	II-126
2.5.1.	Indeks Pembangunan Manusia.....	II-127
2.5.1.1.	Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)	II-128
2.5.1.2.	Angka Harapan Lama Sekolah (HLS).....	II-128
2.5.1.3.	Angka Usia Harapan Hidup.....	II-129
2.5.1.4.	Pengeluaran Per kapita.....	II-129
2.5.2.	Angka Kemiskinan.....	II-130
2.5.3.	Angka Pengangguran.....	II-131
2.5.4.	Pertumbuhan Ekonomi.....	II-132
2.5.5.	Pendapatan Per Kapita / PDRB Per Kapita	II-133
2.5.6.	Ketimpangan Pendapatan.....	II-134
2.6.	Tren Demografi dan Kebutuhan Sarana Prasarana Pelayanan Publik.....	II-135
2.6.1.	Analisis proyeksi kependudukan per lima tahun	II-135
2.6.1.1.	Jumlah Total Penduduk 2025-2045	II-135
2.6.1.2.	Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur 2025-2045.....	II-136
2.6.2.	Proyeksi Kebutuhan Sarana dan Prasarana	II-137
2.6.2.1.	Listrik dan Gas	II-140
2.6.2.2.	Jalan dan Peningkatan Aksesibilitas dan Konektivitas Antar Wilayah dan Antara Pusat Pertumbuhan	II-142
2.6.2.3.	Irigasi.....	II-155
2.6.2.4.	Sarana Air Minum dan Sanitasi Layak	II-155
2.6.2.5.	Perumahan Layak	II-158
2.6.2.6.	Sarana Pendidikan	II-162
2.6.2.7.	Sarana Kesehatan.....	II-164
2.6.2.8.	Persampahan	II-169
2.6.2.9.	Sarana Informasi dan Komunikasi	II-171
2.6.2.10.	Sarana Mitigasi Kebencanaan	II-172
2.7.	Pengembangan Pusat Pertumbuhan Wilayah	II-173
BAB III PEMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS		III-1
3.1.	PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DI KALIMANTAN BARAT	III-1
3.1.1.	Degradasi Lingkungan Hidup dan Ancaman Perubahan Iklim.....	III-1
3.1.2.	Rendahnya Daya Saing SDM	III-3
3.1.3.	Tata Kelola Pemerintahan yang Belum Responsif Terhadap Dinamika dan Tuntutan Pelayanan Publik	III-6
3.1.4.	Kurangnya Konektivitas, Aksesibilitas dan Pemerataan Pembangunan.....	III-8
3.1.5.	Kualitas Kehidupan Masyarakat Masih Perlu Ditingkatkan.....	III-11
3.1.6.	Rendahnya Dukungan Terhadap Transformasi Ekonomi Berkelanjutan	III-15
3.2.	ISU STRATEGIS PEMBANGUNAN DI KALIMANTAN BARAT	III-16
3.2.1.	Penelaahan Isu Strategis dan Dokumen Perencanaan Pembangunan.....	III-16
3.2.2.	Isu – Isu Global, Nasional dan Regional	III-17
3.2.2.1.	Perkembangan Demografi dan Urbanisasi Global.....	III-17
3.2.2.2.	Perubahan Geopolitik dan Geoekonomi	III-17
3.2.2.3.	Perkembangan Teknologi	III-18

“Kalimantan Barat Maju, Sejahtera, dan Berkelanjutan”

3.2.2.4.	Perubahan Iklim, Penurunan Daya Tampung dan Daya Dukung Lingkungan	III-19
3.2.2.5.	Perpindahan Ibu Kota Negara Ke Pulau Kalimantan	III-20
3.2.3.	Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional	III-22
3.2.3.1.	Berdaulat	III-23
3.2.3.2.	Maju	III-23
3.2.3.3.	Berkelanjutan	III-23
3.2.4.	Isu-Isu Strategis Dalam Daerah	III-25
3.2.4.1.	Lingkungan Hidup dan Perubahan Iklim	III-25
3.2.4.2.	SDM Berdaya Saing	III-27
3.2.4.3.	Tata Kelola Pemerintah	III-29
3.2.4.4.	Konektivitas dan Aksesibilitas Pemerataan Pembangunan	III-30
3.2.4.5.	Transformasi Ekonomi Berkelanjutan (Ekonomi Hijau dan Ekonomi Biru)	III-32
3.2.4.6.	Kualitas Kehidupan Masyarakat	III-33
BAB IV	VISI DAN MISI	IV-1
4.1.	VISI	IV-1
4.1.1.	Sasaran Visi	IV-2
4.1.2.	Kalimantan Barat Maju	IV-3
4.1.3.	Kalimantan Barat Sejahtera	IV-4
4.1.4.	Kalimantan Barat Berkelanjutan	IV-4
4.2.	MISI	IV-4
4.2.1.	Transformasi Sosial	IV-4
4.2.2.	Transformasi Ekonomi	IV-5
4.2.3.	Transformasi Tata Kelola	IV-5
4.2.4.	Keamanan Daerah Tangguh, Demokrasi Substansial dan Stabilitas Ekonomi Makro Daerah	IV-6
4.2.5.	Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi	IV-6
4.2.6.	Pembangunan Kewilayahan Yang Merata dan Berkeadilan	IV-6
4.2.7.	Dukungan Sarana Prasarana Berkualitas Yang Ramah Lingkungan	IV-6
4.2.8.	Kesinambungan Pembangunan Untuk Mengawal Indonesia Emas	IV-7
4.2.9.	Penyelarasan Misi RPJPN dan RPJPD Provinsi Kalimantan Barat	IV-11
4.3.	17 ARAH PEMBANGUNAN KALIMANTAN BARAT 2025-2045	IV-11
4.4.	INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN KALIMANTAN BARAT TAHUN 2025-2045	IV-13
BAB V	ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN POKOK	V-1
5.1.	ARAH KEBIJAKAN	V-1
5.1.1.	Arah Kebijakan Periode 2025-2029: Perkuatan Pondasi Transformasi	V-1
5.1.2.	Arah Kebijakan Periode 2030-2034: Akselerasi Transformasi	V-1
5.1.3.	Arah Kebijakan Periode 2035-2039: Ekspansi Global	V-2
5.1.4.	Arah Kebijakan Periode 2040-2045: Perwujudan Indonesia Emas	V-3
5.2.	SASARAN POKOK	V-6
5.2.1.	Arah Pembangunan Daerah	V-10
5.2.2.	Arah Kebijakan Transformasi	V-13
5.2.2.1.	Arah Kebijakan Transformasi Periode 2025-2029: Perkuatan Pondasi Transformasi	V-13
5.2.2.2.	Arah Kebijakan Periode 2030-2034: Akselerasi Transformasi	V-14

**“Kalimantan Barat Maju, Sejahtera, dan
Berkelanjutan”**

5.2.2.3.	Arah Kebijakan Transformasi Periode 2035-2039: Ekspansi Global	V-16
5.2.2.4.	Arah Kebijakan Transformasi Periode 2040-2045: Perwujudan Indonesia Emas.....	V-17
5.2.2.5.	Indikator Utama Pembangunan Daerah.....	V-48
5.3.	PEMBANGUNAN WILAYAH MENUJU KALIMANTAN BARAT MAJU, SEJAHTERA, DAN BERKELANJUTAN	V-56
5.3.1.	KLUSTER 1 PONTIANAK-KUBU RAYA-MEMPAWAH	V-57
5.3.1.1.	Analisis Potensi dan Posisi Relatif Ekonomi Sektoral Kluster 1.....	V-57
5.3.1.2.	Highlight Arah Kebijakan Pengembangan Wilayah Kluster 1	V-59
5.3.2.	KLUSTER 2 SINGKAWANG-SAMBAS-BENGKAYANG	V-61
5.3.2.1.	Analisis Potensi dan Posisi Relatif Ekonomi Sektoral Kluster 2.....	V-61
5.3.2.2.	Highlight Arah Kebijakan Pengembangan Wilayah Kluster 2	V-63
5.3.3.	KLUSTER 3 LANDAK-SANGGAU-SEKADAU.....	V-64
5.3.3.1.	Analisis Potensi dan Posisi Relatif Ekonomi Sektoral Kluster 3.....	V-64
5.3.3.2.	Highlight Arah Kebijakan Pengembangan Wilayah Kluster 3	V-67
5.3.4.	KLUSTER 4 SINTANG-MELAWI-KAPUAS HULU.....	V-68
5.3.4.1.	Analisis Potensi dan Posisi Relatif Ekonomi Sektoral Kluster 4.....	V-68
5.3.4.2.	Highlight Arah Kebijakan Pengembangan Wilayah Kluster 4	V-71
5.3.5.	KLUSTER 5 KETAPANG – KAYONG UTARA	V-72
5.3.5.1.	Analisis Potensi dan Posisi Relatif Ekonomi Sektoral Kluster 5.....	V-72
5.3.5.2.	Highlight Arah Kebijakan Pengembangan Wilayah Kluster 5	V-73
BAB VI PENUTUP		VI-1
6.1.	KAIDAH PELAKSANAAN.....	VI-1
6.2.	KONSISTENSI PERENCANAAN PENDANAAN	VI-1
6.2.1.	Keterkaitan RPJPD dengan Perencanaan Pembangunan Pemerintah Pusat dan Kabupaten/Kota.....	VI-1
6.2.2.	Penerapan Prinsip Kerangka Kerja Logis Dalam Perencanaan Pembangunan...	VI-3
6.2.2.1.	Skema Pendanaan dan Penganggaran	VI-5
6.2.2.2.	Kerangka Pengendalian → Termasuk Manajemen Resiko.....	VI-5
6.2.3.	Sistem Insentif.....	VI-9
6.2.4.	Mekanisme Perubahan	VI-9
6.2.5.	Komunikasi Publik	VI-9
6.3.	PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN.....	VI-10
6.4.	KESIMPULAN	VI-12

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1	Jumlah Kecamatan dan Jumlah Kelurahan/Desa di Kalimantan Barat Tahun 2022.....	II-1
Tabel 2. 2	Perkembangan Unsur Iklim di Provinsi Kalimantan Barat.....	II-6
Tabel 2. 3	Penggunaan Tanah Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2022 (Ha).....	II-7
Tabel 2. 4	Perkembangan Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL), dan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) di Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2017-2022.....	II-10
Tabel 2. 5	Jumlah dan Kepadatan Penduduk Per Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2022.....	II-10
Tabel 2. 6	Jumlah Penduduk Kalimantan Barat Menurut Kelompok Usia Tahun 2018-2022	II-11
Tabel 2. 7	Laju Pertumbuhan Penduduk Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat....	II-12
Tabel 2. 8	Penduduk Provinsi Kalimantan Barat Menurut Agama Tahun 2022	II-13
Tabel 2. 9	Kondisi Rumah Ibadah di Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2022.....	II-13
Tabel 2. 10	PDRB Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2022.....	II-15
Tabel 2. 11	Distribusi PDRB Kalimantan Barat Sisi Pengeluaran Tahun 2013-2022 (%).....	II-15
Tabel 2. 12	Distribusi PDRB Provinsi Kalimantan Barat Sisi Produksi Tahun 2013-2022 (%)	II-16
Tabel 2. 13	PDRB Per Kapita (Ribu Rupiah) Kabupaten/Kota 2013-2022.....	II-17
Tabel 2. 14	Jumlah Penduduk Miskin (Ribu Jiwa) Menurut Kabupaten/Kota	II-19
Tabel 2. 15	Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten/Kota 2012-2023	II-20
Tabel 2. 16	Indeks Williamson Kalimantan Barat 2018-2022.....	II-21
Tabel 2. 17	Laju Inflasi di Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2022.....	II-23
Tabel 2. 18	Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2022	II-24
Tabel 2. 19	Angka Harapan Hidup Per Kabupaten di Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019-2022 .	II-28
Tabel 2. 20	DTKS Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat	II-29
Tabel 2. 21	PPKS Terdata dan Ditangani	II-30
Tabel 2. 22	PPKS Terdata dan Ditangani	II-30
Tabel 2. 23	Kondisi PSKS Tahun 2020-2023	II-32
Tabel 2. 24	Alokasi Bantuan PKH Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020-2023	II-34
Tabel 2. 25	Jumlah Keluarga Penerima Bantuan Iuran (PBI) JKN Tahun 2022/2023	II-35
Tabel 2. 26	Tabel Indeks Daya Saing Digital Kalimantan Barat.....	II-38

“Kalimantan Barat Maju, Sejahtera, dan Berkelanjutan”

Tabel 2. 27	Jumlah Guru Sekolah di Kalimantan Barat Tahun 2020-2022	II-39
Tabel 2. 28	Jumlah Penduduk Usia Sekolah di Kalimantan Barat Tahun 2020-2022.....	II-39
Tabel 2. 29	Angka Melek Aksara Kalimantan Barat Tahun 2018-2022.....	II-39
Tabel 2. 30	Angka Melek Aksara Per Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2022	II-40
Tabel 2. 31	Angka Rata-Rata Lama Sekolah Per Kabupaten di Kalimantan Barat Tahun 2018-2022	II-40
Tabel 2. 32	Angka Harapan Lama Sekolah Per Kabupaten di Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2022	II-41
Tabel 2. 33	Angka Pendidikan yang Ditamatkan di Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2021.....	II-41
Tabel 2. 34	Persentase Penduduk Bekerja Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2022	II-42
Tabel 2. 35	Penduduk 15 Tahun Ke Atas Yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan di Provinsi Kalimantan Barat Agustus 2018-2022	II-43
Tabel 2. 36	Indeks Infrastruktur di Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2022	II-44
Tabel 2. 37	Tabel Pembangkit Listrik Eksisting	II-46
Tabel 2. 38	Rasio Elektrifikasi (RE) di Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2022	II-47
Tabel 2. 39	Status Desa/Kelurahan Yang Berlistrik di Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2022.....	II-48
Tabel 2. 40	Tabel Distribusi Persentase Rumah Tangga Menurut Kabupaten/Kota dan Sumber Penerangan Tahun 2022	II-48
Tabel 2. 41	Perkembangan Kondisi Jalan Provinsi di Kalimantan Barat Tahun 2017-2022	II-49
Tabel 2. 42	Jenis Permukaan Jalan Tahun 2021	II-49
Tabel 2. 43	Kondisi Daerah Irigasi Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2022.....	II-50
Tabel 2. 44	Kondisi Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2022.....	II-51
Tabel 2. 45	Kondisi Irigasi Rawa di Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2022	II-51
Tabel 2. 46	Kondisi Irigasi Permukaan di Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2022	II-52
Tabel 2. 47	Kondisi Irigasi Tambak di Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2022	II-52
Tabel 2. 48	Data Rumah Tangga Pengguna Air Bersih di Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2022....	II-53
Tabel 2. 49	Cakupan Pelayanan Perpipaan Kabupaten/Kota se-Kalimantan Barat Tahun 2023	II-53
Tabel 2. 50	Distribusi Persentase Rumah Tangga Menurut Kabupaten/Kota dan Sumber Air Minum Tahun 2022.....	II-55
Tabel 2. 51	Persentase Rumah Tangga Yang Memiliki Akses Terhadap Layanan Sumber Air Minum Layak Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2018-2022.....	II-56
Tabel 2. 52	GAP TPB 6 Air Bersih.....	II-57
Tabel 2. 53	Pelayanan Sanitasi Kabupaten/Kota Tahun 2022.....	II-59

“Kalimantan Barat Maju, Sejahtera, dan Berkelanjutan”

Tabel 2. 54	Persentase Rumah Tangga Yang Memiliki Akses Terhadap Layanan Sanitasi Menurut Kabupaten/Kota 2018-2022.....	II-60
Tabel 2. 55	Distribusi Persentase Rumah Tangga Menurut Kabupaten/Kota dan Penggunaan Fasilitas Tempat Buang Air Besar, Tahun 2022.....	II-60
Tabel 2. 56	Perkembangan Kondisi Pelayanan Sistem Air Limbah, Sistem Drainase Skala Kota, Persampahan Sesuai Standar Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2022.....	II-61
Tabel 2. 57	Gap TPB 6 Sanitasi Layak (Sanitasi dan Air Limbah).....	II-62
Tabel 2. 58	Pengelolaan Sampah di Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019-2022 (data SISP, 2023).....	II-64
Tabel 2. 59	Penanganan Rumah Tidak Layak Huni.....	II-65
Tabel 2. 60	Data Penanganan RTLH di Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2023.....	II-65
Tabel 2. 61	Rekap Jangkauan Telekomunikasi Desa di Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2023...	II-66
Tabel 2. 62	Jumlah Sekolah SD, SMP dan SMA serta Setingkatnya Tahun 2022	II-67
Tabel 2. 63	Jumlah Puskesmas per 500.000 dan Puskesmas Keliling menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2022	II-68
Tabel 2. 64	Jumlah Desa/Kelurahan Yang Memiliki Sarana Kesehatan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019-2021	II-69
Tabel 2. 65	Frekuensi Kejadian Bencana di Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2022.....	II-70
Tabel 2. 66	Kejadian Bencana di Kabupaten/Kota se-Kalimantan Barat Tahun 2018-2022.....	II-71
Tabel 2. 67	Luas Areal Terbakar Akibat Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten/Kota se-Kalimantan Barat Tahun 2005-2022.....	II-71
Tabel 2. 68	Jumlah Korban Bencana di Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2022	II-72
Tabel 2. 69	Potensi Bencana di Provinsi Kalimantan Barat	II-72
Tabel 2. 70	Potensi Bahaya di Provinsi Kalimantan Barat	II-72
Tabel 2. 71	Potensi Penduduk Terpapar Akibat Bencana di Provinsi Kalimantan Barat	II-73
Tabel 2. 72	Indeks Risiko Bencana di Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2022	II-73
Tabel 2. 73	Pembentukan Desa Tangguh Bencana di Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2022	II-75
Tabel 2. 74	Panjang Jalan Menurut Kabupaten/Kota dan Kondisi Jalan di Provinsi Kalimantan Barat.....	II-80
Tabel 2. 75	Perkembangan Indeks Demokrasi Kalimantan Barat 2012-2022	II-83
Tabel 2. 76	Indeks Kerukunan Umat Beragama Kalimantan Barat.....	II-84
Tabel 2. 77	Skor IDSD Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2022	II-84
Tabel 2. 78	Perkembangan Angka Putus Sekolah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 - 2022....	II-85

“Kalimantan Barat Maju, Sejahtera, dan Berkelanjutan”

Tabel 2. 79	Perkembangan Angka Partisipasi Kasar Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019-2022 (%).....	II-86
Tabel 2. 80	Penduduk Usia 16-18 Tahun dan Penduduk yang Bersekolah di Sekolah Menengah Berdasarkan Kabupaten di Kalimantan Barat 2021	II-86
Tabel 2. 81	Perkembangan Angka Partisipasi Murni Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2022 .	II-87
Tabel 2. 82	Perkembangan Angka Partisipasi Murni Kabupaten Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2022	II-87
Tabel 2. 83	Perkembangan Angka Kematian Ibu (AKI), Angka Kematian Bayi (AKB) dan Angka Kematian Balita (AKABA) Provinsi Kalimantan Barat	II-88
Tabel 2. 84	Kondisi Perumahan Pemukiman di Provinsi Kalimantan Barat.....	II-89
Tabel 2. 85	Perkembangan Kondisi Bidang Cipta Karya di Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2022	II-89
Tabel 2. 86	Pelayanan Sanitasi Kabupaten/Kota Tahun 2022.....	II-90
Tabel 2. 87	Data Rumah Tangga Pengguna Air Bersih di Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2022....	II-90
Tabel 2. 88	Penanganan Rumah Tidak Layak Huni.....	II-91
Tabel 2. 89	Kondisi Jalan dan Jembatan di Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2022.....	II-92
Tabel 2. 90	Kondisi Jalan Tahun 2020 - 2022	II-93
Tabel 2. 91	Kondisi Daerah Irigasi di Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2022	II-94
Tabel 2. 92	Kondisi Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2022.....	II-94
Tabel 2. 93	Kondisi Irigasi Rawa di Kalbar Tahun 2018-2022	II-95
Tabel 2. 94	Kondisi Irigasi Permukaan di Kalbar Tahun 2018-2022	II-95
Tabel 2. 95	Kondisi Irigasi Tambak di Kalbar Tahun 2018-2022.....	II-95
Tabel 2. 96	Kondisi Pekerjaan Umum Bidang Sumber Daya Air Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2022	II-96
Tabel 2. 97	Penanganan Pantai Kritis	II-96
Tabel 2. 98	Sarana Sosial di Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2022.....	II-97
Tabel 2. 99	Sarana Sosial di Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2022.....	II-98
Tabel 2. 100	Perkembangan Jumlah PMKS Tahun 2018-2022	II-99
Tabel 2. 101	Anak Terlantar yang dibina di Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2022.....	II-100
Tabel 2. 102	Data Sebaran Penyandang Disabilitas di Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2022	II-100
Tabel 2. 103	Anak Terlantar Baru Penerima Bantuan (2022)	II-100
Tabel 2. 104	Perkembangan Kondisi Aparatur Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2018-2022	II-101
Tabel 2. 105	Indeks Risiko Bencana Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020, 2021 dan 2022	II-102

“Kalimantan Barat Maju, Sejahtera, dan Berkelanjutan”

Tabel 2. 106	Jumlah Prasarana dan Sarana Tanggap Bencana Tahun 2018-2022	II-104
Tabel 2. 107	Perkembangan Kondisi Urusan Tenaga Kerja di Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2022	II-104
Tabel 2. 108	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat Agustus 2021-2022	II-105
Tabel 2. 109	Jumlah Penduduk 15 Tahun Keatas Menurut Kegiatan Terbanyak dan Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat Agustus 2021-2022	II-105
Tabel 2. 110	Perkembangan Kondisi Urusan Tenaga Kerja di Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021-2022	II-106
Tabel 2. 111	Indeks Pembangunan Gender dan Indeks Pemberdayaan Gender (2018-2022)	II-106
Tabel 2. 112	Indeks Pembangunan Gender Kabupaten/Kota se-Kalimantan Barat (2021-2022)	II-107
Tabel 2. 113	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Regional Kalimantan.....	II-107
Tabel 2. 114	Perkembangan Indikator Kinerja Pembangunan Urusan Pangan Tahun 2018-2022	II-108
Tabel 2. 115	Perkembangan Konsumsi Energi dan Protein serta Skor PPH Tahun 2018-2022	II-108
Tabel 2. 116	Ketersediaan Beras (Ton) Per Kab/Kota se-Kalimantan Barat Tahun 2018-2022	II-108
Tabel 2. 117	Rasio Ketersediaan Pangan dan Konsumsi Per Kabupaten/Kota Se Kalimantan Barat Tahun 2018-2022	II-109
Tabel 2. 118	Perkembangan Redistribusi Tanah dan Sertifikat Hak Atas Tanah di Provinsi Kalimantan Barat 2017-2022	II-109
Tabel 2. 119	Perkembangan Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKLT) dan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2022	II-111
Tabel 2. 120	Proyeksi Jumlah Timbulan Sampah Per Hari di Provinsi Kalimantan Barat	II-111
Tabel 2. 121	TPA dan Sistem Operasi di Provinsi Kalimantan Barat.....	II-112
Tabel 2. 122	Jumlah Penduduk Memiliki E-KTP	II-112
Tabel 2. 123	Jumlah Penduduk Telah Memiliki Akte Kelahiran	II-113
Tabel 2. 124	Jumlah Penduduk Memiliki E-KTP	II-113
Tabel 2. 125	Jumlah Penduduk Telah Memiliki Akte Kelahiran	II-114
Tabel 2. 126	Jumlah Penduduk Telah Memiliki Kartu Keluarga.....	II-114
Tabel 2. 127	Perkembangan Desa Menurut Status di Kalimantan Barat Tahun 2018-2022	II-115
Tabel 2. 128	Data Desa Tertinggal Berdasarkan Indeks Desa Membangun (IDM) Kalimantan Barat Tahun 2022.....	II-115
Tabel 2. 129	Prevalensi Pemakaian Kontrasepsi di Kalimantan Barat	II-119
Tabel 2. 130	Sebaran Terminal di Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2022.....	II-120
Tabel 2. 131	Sarana Perhubungan Darat Kabupaten/Kota	II-121

“Kalimantan Barat Maju, Sejahtera, dan Berkelanjutan”

Tabel 2. 132	Jumlah Desa Terlayani Telepon Seluler dan Internet Serta Jumlah BTS Tahun 2019-2021	II-122
Tabel 2. 133	Perkembangan Koperasi Tahun 2018-2021 Provinsi Kalimantan Barat	II-123
Tabel 2. 134	Perkembangan Indikator Kinerja Pembangunan Urusan Koperasi dan UKM Tahun 2019-2022	II-123
Tabel 2. 135	Rencana dan Realisasi Kumulatif Perkembangan Investasi PMDN di Kalimantan Barat Tahun 2018-2022	II-125
Tabel 2. 136	Capaian Indikator Kinerja Makro Pembangunan di Provinsi Kalimantan Barat Tahun Berjalan 2022	II-125
Tabel 2. 137	Capaian Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Kalimantan Barat Tahun Berjalan (2022)	II-127
Tabel 2. 138	Capaian Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Kalimantan Barat Berdasarkan Komponen Pembentuk Tahun Berjalan (2022)	II-128
Tabel 2. 139	Capaian Angka Kemiskinan Provinsi Kalimantan Barat berdasarkan Komponen Pembentuk Tahun Berjalan (2022)	II-129
Tabel 2. 140	Capaian Angka Pengangguran Provinsi Kalimantan Barat Tahun Berjalan (2022)	II-130
Tabel 2. 141	Capaian Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Kalimantan Barat Tahun Berjalan (2022)	II-131
Tabel 2. 142	Capaian PDRB Per Kapita Provinsi Kalimantan Barat Tahun Berjalan (2022)	II-132
Tabel 2. 143	Capaian Ketimpangan Pendapatan Provinsi Kalimantan Barat Tahun Berjalan (2022)	II-134
Tabel 2. 144	Evaluasi Pencapaian RPJMD Periode 2005-2025 Provinsi Kalimantan Barat	II-134
Tabel 2. 145	Proyeksi Pertumbuhan Penduduk Tahun 2025-2045	II-134
Tabel 2. 146	Proyeksi Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur 2025-2045 (Ribu Jiwa)	II-135
Tabel 2. 147	Proyeksi Kebutuhan Daya Listrik di Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2025-2045	II-140
Tabel 2. 148	Dukungan Infrastruktur Transportasi Jalan Untuk Pengembangan Pusat-Pusat Pertumbuhan Ekonomi dan Pusat-Pusat Produksi Bahan Baku Hingga Tahun 2045	II-143
Tabel 2. 149	Pengembangan Jaringan Prasarana Transportasi Provinsi Kalimantan Barat	II-149
Tabel 2. 150	Proyeksi Kebutuhan Air Bersih di Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2025-2045	II-155
Tabel 2. 151	Proyeksi Air Limbah Kalimantan Barat Tahun 2025-2045	II-156
Tabel 2. 152	Proyeksi Produksi Limbah Greywater (Liter/Hari)	II-156
Tabel 2. 153	Proyeksi Jumlah Kebutuhan Rumah di Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2025-2045 ...	II-158
Tabel 2. 154	Proyeksi Jumlah Kebutuhan Rumah Sederhana di Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2025-2045	II-158
Tabel 2. 155	Proyeksi Jumlah Kebutuhan Rumah Menengah di Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2025-2045	II-159

“Kalimantan Barat Maju, Sejahtera, dan Berkelanjutan”

Tabel 2. 156	Proyeksi Jumlah Kebutuhan Rumah Mewah di Kalimantan Barat 2025-2045.....	II-160
Tabel 2. 157	Proyeksi Kebutuhan Penambahan Rumah di Kalimantan Barat Tahun 2025 - 2045	II-160
Tabel 2. 158	Proyeksi Kebutuhan TK/ PAUD dan Taman Bacaan di Kalimantan Barat Tahun 2025-2045	II-161
Tabel 2. 159	Proyeksi Kebutuhan SD di Kalimantan Barat tahun 2025-2045.....	II-162
Tabel 2. 160	Proyeksi Kebutuhan SMP di Kalimantan Barat Tahun 2025-2045.....	II-162
Tabel 2. 161	Proyeksi Kebutuhan SMA di Kalimantan Barat tahun 2025-2045.....	II-163
Tabel 2. 162	Proyeksi Jumlah Kebutuhan Puskesmas di Kalimantan Barat 2025-2045	II-163
Tabel 2. 163	Proyeksi Jumlah Kebutuhan Puskesmas Pembantu di Kalimantan Barat Tahun 2025-2045	II-164
Tabel 2. 164	Proyeksi Jumlah Kebutuhan Klinik Bersalin/ Rumah Bersalin di Kalimantan Barat 2025-2045	II-165
Tabel 2. 165	Proyeksi Jumlah Kebutuhan Posyandu di Kalimantan Barat 2025-2045	II-166
Tabel 2. 166	Proyeksi Jumlah Kebutuhan Balai Pengobatan/Poliklinik di Kalimantan Barat 2025-2045	II-167
Tabel 2. 167	Proyeksi Jumlah Kebutuhan Balai Apotek di Kalimantan Barat 2025-2045.....	II-167
Tabel 2. 168	Proyeksi Timbulan Sampah di Kalimantan Barat 2025-2045	II-168
Tabel 2. 169	Proyeksi Kebutuhan bak Sampah Skala RW di Kalimantan Barat 2025-2045	II-168
Tabel 2. 170	Proyeksi Kebutuhan bak Sampah Skala Kelurahan di Kalimantan Barat 2025-2045	II-169
Tabel 2. 171	Proyeksi Kebutuhan bak Sampah Skala Kecamatan di Kalimantan Barat 2025-2045	II-169
Tabel 2. 172	Persentase Penduduk Daerah Perkotaan menurut Provinsi, 2010-2035.....	II-170
Tabel 2. 173	Proyeksi Jangkauan Telekomunikasi Desa di Prov Kalbar tahun 2025 - 2045.....	II-171
Tabel 3. 1	Perumusan Isu Strategis Daerah	III-35
Tabel 4. 1	Perumusan Visi RPJPD Provinsi Kalimantan Barat	IV-1
Tabel 4. 2	Penyelarasan Provinsi Kalimantan Barat	IV-1
Tabel 4. 3	Sasaran Visi Provinsi Kalimantan Barat	IV-3
Tabel 4. 4	Perumusan dan Penjelasan Misi RPJPD Provinsi Kalimantan Barat.....	IV-8
Tabel 4. 5	Penyelarasan Misi RPJP Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2025-2045 dan RPJP Nasional Tahun 2025-2045	IV-11
Tabel 4. 6	Penyelarasan 17 Arah (Tujuan) Pembangunan RPJP Daerah Tahun 2025-2045 dengan RPJP Nasional Tahun 2025-2045	IV-12
Tabel 4. 7	Penerjemahan 45 (Empat Puluh Lima) Indikator Utama Pembangunan Nasional ke Daerah	IV-14
Tabel 5. 1	Arah Kebijakan RPJPD.....	IV-4
Tabel 5. 2	Sasaran Pokok	IV-7

Tabel 5. 3 Arah Kebijakan Transformasi dalam Rancangan RPJP Daerah Provinsi
Kalimantan Barat Tahun 2025-2045..... IV-19

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1	Hubungan Antar Dokumen RPJPD dan Dokumen Perencanaan Pembangunan Lainnya	I-5
Gambar 2. 1	Peta Batas Administrasi Provinsi Kalimantan Barat	II-2
Gambar 2. 2	Peta Topografi Provinsi Kalimantan Barat	II-4
Gambar 2. 3	Piramida Penduduk Provinsi Kalimantan Barat Berdasarkan Umur Tahun 2022 Semester II	II-11
Gambar 2. 4	Grafik Perkembangan Ekonomi Kalimantan Barat 1990-2022	II-14
Gambar 2. 5	PDRB Per Kapita (Ribuan Rupiah) Kalimantan Barat 2013-2022	II-17
Gambar 2. 6	Perkembangan NTP Kalimantan Barat 2013-2023	II-18
Gambar 2. 7	Angka Kemiskinan (%) Kalimantan Barat Tahun 2013-2023	II-19
Gambar 2. 8	Tingkat Pengangguran Terbuka Kalimantan Barat 2013-2023	II-20
Gambar 2. 9	Perkembangan Rasio Gini Kalimantan Barat Tahun 2013-2023	II-21
Gambar 2. 10	Laju Inflasi 3 Kota/Kabupaten di Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2022	II-23
Gambar 2. 11	Perkembangan IPM Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2022	II-24
Gambar 2. 12	Gizi Balita Tahun 2019-2022	II-25
Gambar 2. 13	Prevalensi Stunting	II-26
Gambar 2. 14	Angka Kematian Ibu Tahun 2018-2022	II-27
Gambar 2. 15	Angka Harapan Hidup Provinsi Kalimantan Barat	II-28
Gambar 2. 16	Posisi Relatif Ekonomi Sektoral di Provinsi Kalimantan Barat	II-36
Gambar 2. 17	Posisi Relatif Ekonomi Kewilayahan Kabupaten/Kota Tahun 2023	II-37
Gambar 2. 18	Persentase Penduduk Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama dan Kegiatan Formal/Informal Agustus 2020 – Agustus 2022	II-42
Gambar 2. 19	Pengembangan Sistem Tenaga Listrik di Provinsi Kalimantan Barat	II-45
Gambar 2. 20	Grafik Kejadian Bencana di Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2009-2019	II-70
Gambar 2. 21	Peta Bahaya dan Risiko Bencana Banjir di Provinsi Kalimantan Barat	II-76
Gambar 2. 22	Peta Bahaya dan Risiko Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan Kalimantan Barat	II-78
Gambar 2. 23	Prevelensi Balita Stunting di Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2022	II-88
Gambar 2. 24	Peta Indeks Risiko Bencana di Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018	II-103
Gambar 2. 25	Angka Ketergantungan Kalimantan Barat 2015-2022 dan Proyeksi 2025-2045	II-136
Gambar 2. 26	Proyeksi Kebutuhan Sarana dan Prasarana Listrik, Jalan, Irigasi, Air Bersih dan Sanitasi	II-138

**“Kalimantan Barat Maju, Sejahtera, dan
Berkelanjutan”**

Gambar 2. 27	Koridor Ekonomi Utara Kalbar	II-145
Gambar 2. 28	Koridor Ekonomi Selatan	II-147
Gambar 2. 29	Rencana Pusat Kegiatan Wilayah	II-176
Gambar 2. 30	Sebaran Pusat Kegiatan di Provinsi Kalimantan Barat.....	II-177
Gambar 2. 31	Sebaran Pusat Kegiatan di Provinsi Kalimantan Barat.....	II-17
Gambar 5. 1	Analisis Posisi Relatif Ekonomi Sektoral	V-57
Gambar 5. 2	Analisis Posisi Relatif Ekonomi Sektoral Kota Pontianak	V-58
Gambar 5. 3	Analisis Posisi Relatif Ekonomi Sektoral Kab. Kubu Raya	V-59
Gambar 5. 4	Analisis Posisi Relatif Ekonomi Sektoral Kab. Mempawah	V-59
Gambar 5. 5	Kluster 1 (Kota Pontianak – Kab. Kubu Raya – Kab. Mempawah).....	V-60
Gambar 5. 6	Analisis Posisi Relatif Ekonomi Sektoral Kota Singkawang	V-62
Gambar 5. 7	Analisis Posisi Relatif Ekonomi Sektoral Kabupaten Bengkayang	V-62
Gambar 5. 8	Analisis Posisi Relatif Ekonomi Sektoral Kabupaten Sambas.....	V-63
Gambar 5. 9	Kluster 2 (Kota Singkawang – Kab. Bengkayang – Kab. Sambas)	V-64
Gambar 5. 10	Analisis Posisi Relatif Ekonomi Sektoral Kabupaten Landak	V-65
Gambar 5. 11	Analisis Posisi Relatif Ekonomi Sektoral Kabupaten Sanggau.....	V-66
Gambar 5. 12	Analisis Posisi Relatif Ekonomi Sektoral Kabupaten Sekadau	V-66
Gambar 5. 13	Kluster 3 (Kab. Landak – Kab. Sanggau – Kab. Sekadau).....	V-67
Gambar 5. 14	Analisis Posisi Relatif Ekonomi Sektoral Kabupaten Sintang	V-69
Gambar 5. 15	Analisis Posisi Relatif Ekonomi Sektoral Kabupaten Melawi.....	V-70
Gambar 5. 16	Analisis Posisi Relatif Ekonomi Sektoral Kabupaten Kapuas Hulu	V-70
Gambar 5. 17	Kluster 4 (Kab. Sintang – Kab. Melawi – Kab. Kapuas Hulu)	V-71
Gambar 5. 18	Analisis Posisi Relatif Ekonomi Sektoral Kabupaten Kayong Utara	V-72
Gambar 5. 19	Kluster 5 (Kabupaten Ketapang – Kabupaten Kayong Utara)	V-73
Gambar 6. 1	Kerangka Pengendalian RPJPD 2025-2045	VI-7

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Tujuan pembangunan nasional sebagaimana termuat dalam alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah mencerdaskan kehidupan bangsa, menciptakan kesejahteraan umum, melindungi seluruh tumpah darah Indonesia dan membantu melaksanakan ketertiban dunia dan perdamaian abadi. Untuk mewujudkan hal tersebut diperlukan keterpaduan pembangunan baik pada level nasional maupun daerah. Sejalan dengan hal tersebut, melalui dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang baik pada level nasional maupun daerah telah disusun visi, misi, tujuan, sasaran serta arah kebijakan pembangunan sebagai pedoman dalam melaksanakan pembangunan selama periode 20 (dua puluh) tahun. RPJPN sendiri merupakan landasan perencanaan pembangunan nasional yang menggantikan peran Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) pasca dilakukannya perubahan atas Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Selama kurun beberapa tahun ke belakang, Indonesia terus tumbuh dan berkembang sejalan dengan perkembangan kemajuan negara-negara lain di dunia. Perkembangan kemajuan tersebut tentunya telah dirancang dan disusun melalui perencanaan jangka panjang nasional atau RPJPN Tahun 2005-2025. Hal yang sama juga terjadi pada level

pemerintahan daerah. Sejalan dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, mengamanatkan bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, Pemerintah Daerah berkewajiban salah satunya menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD).

Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sebagai bagian dari pemerintahan daerah tingkat provinsi dalam kurun waktu beberapa tahun ke belakang terus berupaya mewujudkan tujuan pembangunan nasional melalui pembangunan yang didasari atas perencanaan jangka panjang daerah. Sinkronisasi dan harmonisasi antara RPJPD dan RPJPN selalu menjadi perhatian dalam setiap penyusunan perencanaan pembangunan setiap tahunnya. Hal ini sebagaimana amanat pasal 263 ayat 2 Undang-Undang 23 Tahun 2014 menyebutkan bahwa RPJPD merupakan penjabaran dari visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan Daerah jangka panjang untuk 20 (dua puluh) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPN dan rencana tata ruang wilayah.

RPJPD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2005-2025 sendiri yang telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 akan berakhir masa berlakunya. Hal ini juga sejalan dengan akan berakhirnya masa

berlaku RPJPN Tahun 2005-2025. Sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 pasal 18 ayat 1 setiap daerah diamanatkan untuk menyusun Rancangan Akhir RPJPD paling lambat 1 (satu) tahun sebelum RPJPD periode sebelumnya berakhir.

Sehingga hal ini mendasari dilakukannya penyusunan Rancangan Akhir RPJPD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2025-2045 sebagai bagian keberlanjutan dari pelaksanaan RPJPD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2025 – 2045 serta bagian yang saling terintegrasi dari mewujudkan visi Indonesia Emas 2045 sebagaimana termuat dalam rancangan RPJPN Tahun 2025-2045.

Sesuai dengan amanat Pasal 7 hingga Pasal 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, penyusunan RPJPD ini menggunakan 4 (empat) pendekatan. Keempat pendekatan tersebut adalah pendekatan teknokratis, pendekatan partisipatif, pendekatan politis, dan pendekatan perpaduan antara Bottom-Up dengan Top-Down Planning. Adapun secara

substansi, penyusunan dokumen RPJPD menggunakan pendekatan holistik-tematik, yaitu mempertimbangkan keseluruhan unsur atau bagian atau kegiatan Pembangunan sebagai satu kesatuan faktor potensi, tantangan, hambatan dan/atau permasalahan yang saling berkaitan satu dengan lainnya. Pendekatan berikutnya yaitu integratif, menyatukan beberapa kewenangan ke dalam satu proses terpadu dan fokus yang jelas dalam Upaya pencapaian tujuan pembangunan daerah. Selanjutnya pendekatan spasial, yaitu mempertimbangkan dimensi keruangan dalam perencanaan. Keseluruhan proses tersebut kemudian dirumuskan ke dalam dokumen Rancangan Akhir RPJPD yang termuat dalam kesatuan dokumen berikut, kemudian selanjutnya akan menjadi bahan pembahasan bersama dengan DPRD Provinsi Kalimantan Barat serta para pemangku kepentingan pembangunan sebelum ditetapkan menjadi RPJPD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2025-2045 melalui Peraturan Daerah.

1.2. Dasar Hukum

Penyusunan Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2025-2045, didasarkan pada beberapa peraturan perundangan sebagai berikut:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah

- diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6780);
 6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 7. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6780);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 590);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
16. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 6) Sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 5);
17. Peraturan Gubernur Nomor 133 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021 Nomor 133);
18. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025 - 2045.
19. Surat Edaran Bersama Nomor 600.1/176/SJ, Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penyelarasan RPJPD dengan RPJPN Tahun 2025-2045.

1.3. Hubungan Antara RPJD dan Dokumen Pembangunan Lainnya

1.3.1. Hubungan Antara RPJD dan RPJPN

Undang-Undang 25 Tahun 2004 pasal 9 ayat 1 menyatakan bahwa RPJP Daerah memuat visi, misi, dan arah pembangunan Daerah yang mengacu pada RPJP Nasional. Selain itu, sesuai dengan pasal 263 ayat 2 Undang-Undang 23 Tahun 2014 menyebutkan bahwa RPJD merupakan penjabaran dari visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan Daerah jangka panjang untuk 20 (dua puluh) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPN salah satunya. Hal ini menekankan keselarasan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan daerah dan nasional.

Penyusunan RPJD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2025-2045 mengacu kepada RPJP Nasional Tahun 2025-2045, serta selaras dengan konsep-konsep yang dimuat dalam RPJPN. Dua puluh tahun mendatang Indonesia maupun Kalimantan Barat, harus bekerja keras untuk mewujudkan Indonesia Emas dan Kalimantan Barat, Maju, Sejahtera Berkelanjutan, dalam mencapai pembangunan ini diperlukan transformasi dasar yaitu transformasi sosial, ekonomi, dan tata kelola pemerintahan. Konsep transformasi sosial, ekonomi, dan tata kelola pemerintahan secara rinci digambarkan pada BAB IV dan BAB V dalam dokumen ini.

1.3.2. Hubungan Antara RPJD, RPJMD, RKPD, Renstra PD, dan Renja PD

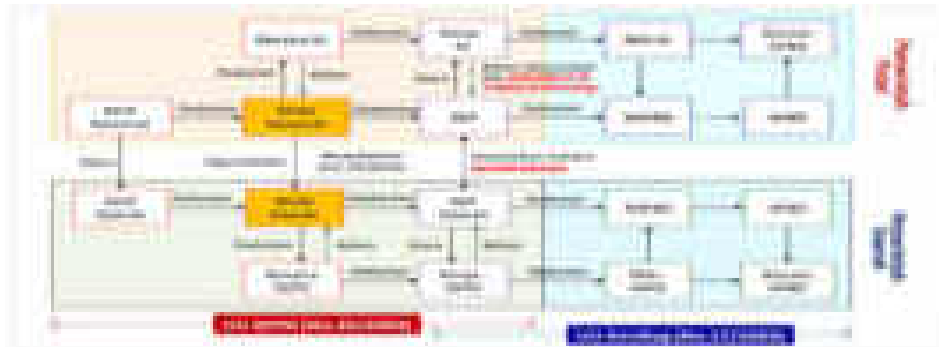
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJD) Provinsi Kalimantan Barat 2025-2045 yang memuat visi, misi dan arah kebijakan pembangunan daerah selama 20 tahun ke depan merupakan pedoman bagi penyusunan RPJMD. RPJMD merupakan dokumen rencana pembangunan daerah 5 (lima) tahunan yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, arah kebijakan dan program pembangunan daerah. Penyusunan RPJMD Provinsi Kalimantan Barat setiap periodenya berpedoman pada arah kebijakan pembangunan tahap I, II, III dan IV RPJD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2025-245. Sementara itu, RPJMD menjadi pedoman bagi penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra- PD). Renstra-PD merupakan

rencana kerja 5 (lima) tahunan yang menjabarkan perencanaan kerja dan kinerja tahunan perangkat daerah untuk menunjang pencapaian visi, misi dan sasaran pembangunan jangka menengah sebagaimana termuat dalam RPJMD serta penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi. Penjabaran rencana tahunan perangkat daerah termuat dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) setiap tahun selama 5 (lima) tahun.

Selanjutnya, RPJMD sebagai dokumen perencanaan pembangunan lima tahunan dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai perencanaan tahunan daerah. RKPD menjadi acuan bagi setiap perangkat daerah dalam menyusun Renja PD.

Dalam pelaksanaannya di tahunan, RPJMD Rancangan APBD setiap tahun selama 5 (lima) melalui RKPD menjadi dasar penyusunan tahun.

Gambar 1. 1 Hubungan Antar Dokumen RPJPD dan Dokumen Perencanaan Pembangunan Lainnya



1.3.3. Hubungan Antara RPJPD Provinsi Kalimantan Barat dan RTRW Provinsi Kalimantan Barat

Penyusunan RPJPD Provinsi Kalimantan Barat berpedoman pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Kalimantan Barat 2014-2034, yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 10 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2014-2034. Tetapi pada tahun 2020, RTRW Kalimantan Barat tahun 2014-2034 sedang dalam proses revisi hingga saat ini, sehingga dalam

penyusunan RPJPD Tahun 2025-2045 mengikuti perkembangan Revisi RTRW Provinsi Kalimantan Barat, termasuk perubahan terhadap substansi dan integrasi dengan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Kalimantan Barat. Hal ini dilakukan untuk menyelaraskan visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan dengan struktur dan pola pemanfaatan ruang Revisi RTRW dan RPJPD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2025-2045.

1.3.4. Hubungan Antara RPJPD Provinsi Kalimantan Barat dan KLHS RPJPD Provinsi Kalimantan Barat

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program. KLHS RPJPD ini

merupakan kajian yang memastikan bahwa pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar pembangunan dengan memperhatikan potensi dampak pembangunan terhadap kelestarian lingkungan melalui penyusunan rekomendasi perbaikan berupa antisipasi, mitigasi, adaptasi dan/atau kompensasi program dan kegiatan.

1.4. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rancangan Akhir RPJPD Provinsi Kalimantan Barat 2025-2045 adalah memberikan arah pembangunan jangka panjang daerah Provinsi Kalimantan Barat 20 (dua puluh) tahun kedepan yang holistik-tematik, integratif dan berbasis spasial berdasarkan hasil capaian pembangunan, permasalahan dan isu strategis pembangunan.

Sementara itu, tujuan yang ingin dicapai dari penyusunan Rancangan Akhir RPJPD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2025-2045, yaitu:

1. Menelaah capaian kinerja pembangunan daerah Provinsi Kalimantan Barat selama periode 2005-2022;

2. Merumuskan permasalahan pembangunan daerah berdasarkan capaian kinerja pembangunan daerah provinsi selama periode 2005-2022;
3. Merumuskan isu-isu strategis pembangunan untuk dua puluh tahun kedepan dengan mempertimbangkan perkembangan kebijakan nasional dan karakteristik daerah;
4. Merumuskan visi, misi, tujuan, sasaran, dan arah kebijakan pembangunan selama 20 (dua) puluh tahun kedepan;
5. Menetapkan sasaran pokok pembangunan selama periode 20 (dua puluh) tahun kedepan;

1.5. Sistematika Penulisan

Dokumen Rancangan Akhir RPJPD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2025-2045 disusun berdasarkan sistematika yang tercantum dalam Pasal 20 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 sebagai berikut:

BAB 1 : Pendahuluan

Bab ini memuat latar belakang penyusunan dokumen; dasar hukum penyusunan; hubungan antar dokumen perencanaan pembangunan daerah; maksud dan tujuan penyusunan dokumen; serta sistematika penulisan.

BAB 2 : Gambaran Umum dan Kondisi Daerah

Bab ini memuat gambaran umum tentang kondisi daerah berdasarkan hasil evaluasi

RPJPD 2005-2025 sebagai salah satu pertimbangan dalam perumusan kebijakan RPJPD yang meliputi: aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, dan aspek daya saing daerah. Selain itu juga memuat rincian proyeksi dinamika demografi dan kebutuhan sarana prasarana per lima tahun sampai dengan tahun 20245 serta memuat penjelasan pembangunan pusat pertumbuhan wilayah.

BAB 3 : Permasalahan dan Isu Strategis

Bab ini memuat rumusan permasalahan daerah berdasarkan hasil analisis terhadap data evaluasi capaian kinerja pembangunan serta memuat isu- isu pembangunan terkini di daerah.

BAB 4 : Visi dan Misi Daerah

Bab ini memuat penjabaran visi dan misi daerah berdasarkan permasalahan dan isu strategis yang secara terukur dan spesifik yang akan dicapai sampai dengan akhir periode serta selaras dengan visi dan misi Indonesia Emas 2045.

BAB 5 : Arah Kebijakan dan Sasaran Pokok

Bab ini memuat tentang Arah Kebijakan pembangunan jangka panjang untuk menjelaskan keterhubungan Sasaran Pokok

dengan pentahapan pembangunan dilakukan pada tiap lima tahun selama 4 periode. Sasaran Pokok dinyatakan dalam kuantifikasi terhadap indikator kinerja hingga akhir periode RPJPD.

BAB 6 : Penutup

Bab ini memuat penjelasan tentang ketentuan perencanaan menjelang akhir periode perencanaan RPJPD serta menjelaskan kaidah pelaksanaan RPJPD dalam RPJMD empat periode ke depan.

2.1. ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI

2.1.1. Geografi

2.1.1.1. Luas dan Batas Wilayah

Luas wilayah Kalimantan Barat sebesar 147.307 Km² atau 1,13 kali luas Pulau Jawa dan termasuk provinsi terbesar kedua setelah Provinsi Kalimantan Tengah (153.564,50 Km²), dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

1. Bagian barat berbatasan dengan Selat Karimata.
2. Bagian utara berbatasan langsung dengan Sarawak (Malaysia Timur) dan Provinsi Kalimantan Timur.
3. Bagian selatan berbatasan dengan Provinsi Kalimantan Tengah serta Laut Jawa.
4. Bagian timur berbatasan dengan Provinsi Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur.

Secara administratif Provinsi Kalimantan Barat terdiri dari 14 (empat belas) kabupaten/kota yaitu dua belas kabupaten dan dua kota. empat belas kabupaten/kota ini terbagi dalam 174 kecamatan dan 2.148 kelurahan/desa. Dilihat dari posisinya, desa di Kalimantan Barat yang terletak di tepi pantai atau desa pesisir sebanyak 162 desa dan desa non pesisir 1.986 desa, sebagaimana pada tabel berikut ini. Pengelompokan desa berdasarkan posisi letak merujuk pada karakteristik yang berbeda desa pesisir dan non pesisir) desa pedalaman dan perbatasan. Pendekatan pembangunan yang lebih sesuai dengan posisi letak geografis desa diharapkan memberi hasil yang lebih optimal.

Tabel 2. 1 Jumlah Kecamatan dan Jumlah Kelurahan/Desa di Kalimantan Barat Tahun 2023

Kabupaten/Kota	Jumlah Kecamatan	Desa Tepi Laut (Pesisir)	Desa Non Pesisir	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Sambas	19	36	157	193
Bengkayang	17	10	114	124
Landak	13	-	156	156
Mempawah	9	28	39	67

Kabupaten/Kota	Jumlah Kecamatan	Desa Tepi Laut (Pesisir)	Desa Non Pesisir	Jumlah
Sanggau	15	-	175	175
Ketapang	20	34	228	262
Sintang	14	-	407	407
Kapuas Hulu	23	-	282	282
Sekadau	7	-	87	87
Melawi	11	-	169	169
Kayong Utara	6	21	22	43
Kubu Raya	9	23	105	128
Kota Pontianak	6	-	29	29
Kota Singkawang	5	10	16	26
Kalimantan Barat	174	162	1.986	2.148

Sumber: BPS, Termasuk Unit Pemukiman Transmigrasi (UPT)

**“Kalimantan Barat Maju, Sejahtera,
dan Berkelanjutan”**

Gambar 2. 1 Peta Batas Administrasi Provinsi Kalimantan Barat



2.1.1.2. Letak dan Kondisi Geografis

Kalimantan Barat secara geografis terletak pada posisi 2°05' LU - 3°05' LS dan 108°30' - 114°10' BT. Secara dimensi kewilayahan, Kalimantan Barat dapat dibagi menjadi 3 (tiga) dimensi wilayah, yakni wilayah pesisir dan kepulauan, wilayah pedalaman dan wilayah perbatasan antar negara.

Untuk wilayah pesisir dan kepulauan terdiri atas Kabupaten dan Kota yang berada di wilayah pesisir yakni Kota Pontianak, Kota Singkawang, Kabupaten Sambas, Kabupaten Mempawah, Kabupaten Bengkayang, Kabupaten Kubu Raya, Kabupaten Ketapang, dan Kabupaten Kayong Utara. Sedangkan

untuk wilayah pedalaman terdiri atas Kabupaten Kapuas Hulu, Kabupaten Sintang, Kabupaten Melawi, Kabupaten Kabupaten Sekadau, Sanggau, Kabupaten Landak dan Kabupaten Ketapang.

Sementara itu, untuk dimensi wilayah perbatasan antara negara merupakan wilayah yang berbatasan langsung dengan Malaysia di sebelah utara yakni terdiri atas Kabupaten Sambas, Kabupaten Bengkayang, Kabupaten Sanggau, Kabupaten Sintang dan Kabupaten Kapuas Hulu.

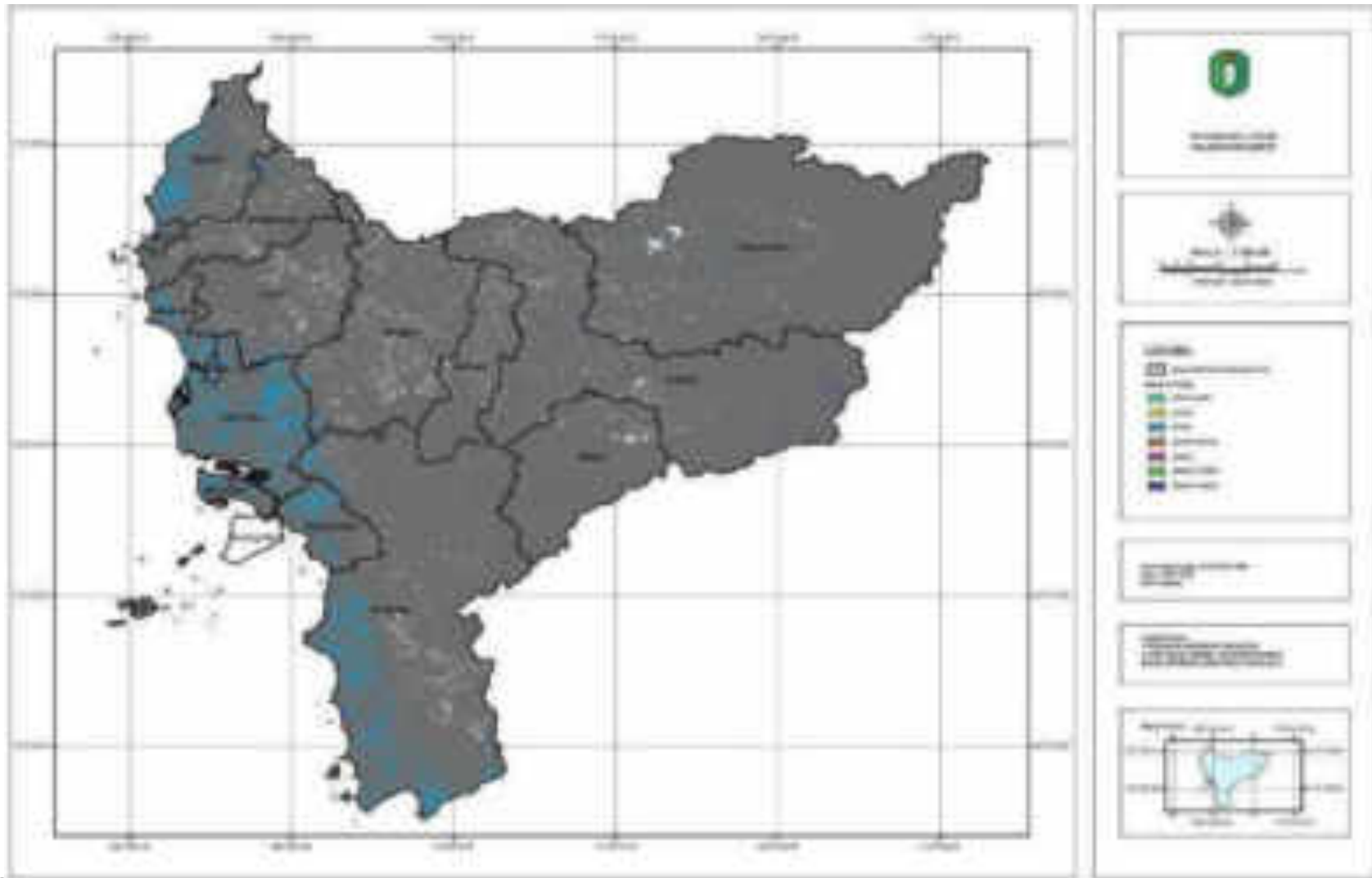
2.1.1.3. Topografi

Topografi Provinsi Kalimantan Barat dianalisis dari aspek ketinggian lahan dan kemiringan lahan. Secara umum, daratan Kalimantan Barat merupakan dataran rendah, sedikit berbukit yang menghampar dari barat ke timur di sepanjang Lembah Sungai Kapuas serta Laut Natuna/Selat Karimata, sepanjang daerah dataran berawa-rawa bercampur gambut dan hutan mangrove. Wilayah daratan diapit oleh pegunungan Kalingkang/Kapuas Hulu di bagian utara dan Pegunungan Schwaner di bagian Selatan sepanjang perbatasan dengan Provinsi Kalimantan Tengah. Dipengaruhi oleh daratan rendah yang amat luas, maka ketinggian gunung-gunung di Kalimantan Barat relatif rendah dan non aktif, adapun gunung yang paling tinggi adalah gunung

Batu Raya di Kec. Ambalau Kab. Sintang dengan ketinggian 2.278 meter dari permukaan laut dan terendah adalah gunung Cabang dengan ketinggian 103 meter di Kec. Pulau Maya Karimata Kab. Kayong Utara.

Sekitar 29,21 persen atau 4.287.880 Ha wilayah Provinsi Kalimantan Barat berada pada kelas lereng <2 persen atau cenderung landai. Sementara itu, sekitar 33,34 persen atau 4.894.333 Ha berada pada kelas lereng 2-15 persen atau cenderung bergelombang. Sedangkan 21,31 persen atau 3.127.844 Ha wilayah Provinsi Kalimantan Barat berada pada kelas lereng 15-40 persen atau cenderung curam dan sekitar 16,15 persen atau 2.370.643 Ha wilayah Provinsi Kalimantan Barat berada pada kelas lereng >40 persen atau cenderung sangat curam.

Gambar 2. 2 Peta Topografi Provinsi Kalimantan Barat



2.1.1.4. Geologi

Dilihat dari tekstur tanahnya, sebagian besar daerah Kalimantan Barat memiliki jenis tekstur tanah Sedang yakni seluas sekitar 6.714.126 Ha, sementara sekitar 3.439.943 Ha merupakan jenis tekstur tanah halus, sekitar 2.762.006 Ha merupakan jenis tekstur tanah kasar, 1.543.752 Ha merupakan jenis tekstur tanah Gambut dan 220.873 Ha merupakan jenis tekstur tanah rawa. Sementara itu dilihat dari kandungan tanah,

sebesar 5.806.633 Ha memiliki kandungan tanah Kuarter. Sedangkan 3.102.464 Ha memiliki kandungan tanah Carboniferous jenis Efusif, dan 1.468.680 Ha memiliki kandungan tanah intrusif dan plutonik asam. Beberapa wilayah lainnya memiliki kandungan tanah Naegon, Kapur, Jura, Trias, Permokarbon Trias Atas, dan beberapa jenis Carboniferous lainnya.

2.1.1.5. Hidrologi

Daerah Aliran Sungai di Kalimantan Barat cukup banyak, akan tetapi terdapat 3 (tiga) DAS terbesar diantaranya yakni DAS Kapuas, DAS Pawan dan DAS Jelai. Kalimantan Barat merupakan provinsi yang dijuluki daerah “Seribu Sungai”, julukan ini selaras dengan kondisi geografis Kalimantan Barat yang memiliki ratusan sungai besar dan kecil yang diantaranya dapat dan sering dilayari serta merupakan urat nadi dan jalur utama sarana transportasi daerah pedalaman, walaupun prasarana jalan darat

telah menjangkau sebagian besar kecamatan.

Sungai besar utama dan terpanjang di Indonesia adalah Sungai Kapuas yaitu 1.086 km (daerah yang dilalui adalah Kabupaten Kapuas Hulu, Kab. Sintang, Kab. Sanggau, Kab. Sekadau, dan Kota Pontianak). Selanjutnya Kalimantan Barat memiliki Danau Sentarum dengan luas (117.500 hektar) dan Danau Luar I (5.400 hektar). Kedua danau ini berlokasi di Kabupaten Kapuas Hulu

2.1.1.6. Klimatologi

Wilayah Kalimantan Barat secara geografis dilintasi garis khatulistiwa dan beriklim tropis dengan dua musim, yaitu musim panas dan musim hujan. Suhu udara Daerah relatif panas dengan kelembaban udara yang tinggi. Berdasarkan catatan empiris tahun 2023 suhu maksimum di Kalimantan Barat mencapai 34,80 °C dan minimum 21,20 °C. Kecepatan angin maksimum mencapai 33,00 m/detik dengan tekanan udara maksimum 1.014,50 mbar. Jumlah curah hujan selama tahun 2023 sebanyak 2.430,00 mm.

Terjadi penurunan curah hujan pada tahun 2022 sebesar 3.040,00 mm. Jumlah hari hujan selama tahun 2023 adalah 198 hari dan penyinaran matahari sebanyak 5,80 persen. Data perkembangan unsur iklim disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2. 2 Perkembangan Unsur Iklim di Provinsi Kalimantan Barat

Unsur Iklim <i>Climate Elements</i>	2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Suhu/ <i>Temperature</i> (°C)					
Minimum/ <i>Minimum</i>	21,40	22,20	21,40	21.90	21.20
Rata-rata/ <i>Average</i>	28,93	28,90	28,90	27.60	29.11
Maksimum/ <i>Maximum</i>	34,40	34,40	34,60	34.20	34.80
Kelembaban/ <i>Humidity</i> (%)					
Minimum/ <i>Minimum</i>	40,00	48,00	49,00	71.00	45.00
Rata-rata/ <i>Average</i>	78,48	80,00	79,00	83,00	79.71
Maksimum/ <i>Maximum</i>	99,00	100,00	98,00	95,00	100,00
Kecepatan Angin (m/det) <i>Wind Velocity</i> (m/sec)					
Minimum/ <i>Minimum</i>	<i>calm</i>	<i>calm</i>	<i>calm</i>	<i>Calm</i>	<i>calm</i>
Rata-rata/ <i>Average</i>	1,76	1,34	3,10	5.60	3.23
Maksimum/ <i>Maximum</i>	14,39	12,34	18,00	15.90	33.00
Tekanan Udara (mbar) <i>Atmospheric Pressure</i> (mbar)					

Unsur Iklim <i>Climate Elements</i>	2019	2020	2021	2022	2023
Minimum/ <i>Minimum</i>	1 003,90	1 001,10	1 003,70	1007.50	1003.00
Rata-rata/ <i>Average</i>	1 009,77	1 009,20	1 009,10	1010.30	1009.55
Maksimum/ <i>Maximum</i>	1 015,70	1 014,90	1 015,00	1014.00	1014.50
Jumlah Curah Hujan (mm) <i>Number of Precipitation (mm)</i>	3 036,60	3 673,40	2 918,2	3057,00	2430.70
Jumlah Hari Hujan (hari) <i>Number of Rainy Days (day)</i>	191	242	208	239,00	198.00
Penyinaran Matahari () <i>Duration of Sunshine ()</i>	45,23	65,00	67,50	54,00	5.80

Catatan: *calm adalah kecepatan angin mendekati nol/Calm is wind velocity close to zero

Sumber: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Stasiun Klimatologi Kelas II Kalbar

2.1.1.7. Penggunaan Lahan

Penggunaan lahan di Provinsi Kalimantan Barat berdasarkan data dari Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Barat tahun 2023 yang terdapat dalam Kalimantan Barat Dalam Angka 2024, menunjukkan bahwa lahan terbesar masih didominasi oleh hutan lebat dengan luas 4.607.194,85 Ha diikuti dengan hutan belukar seluas 3.050.069,12 Ha. Sedangkan pemanfaatan lahan untuk perkebunan besar adalah seluas 1.149.340,69 Ha, kebun campuran 616.853,53 dan industri pertanian 291,41 Ha. Pada tahun 2023 pemanfaatan lahan untuk Kawasan perumahan adalah sebesar 12.816,13 Ha dan untuk Kawasan perkampungan sebesar 82.905,93 Ha. Total luas penggunaan tanah di Provinsi Kalimantan Barat pada tahun 2023 adalah 14.735.083,38 Ha. Penggunaan lahan di Provinsi Kalimantan Barat pada tahun 2023 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.3 Penggunaan Tanah Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2023 (Ha)

Kabupaten/ Kota	Kampung	Perumahan	Emplasemen	Pelabuhan	Bandar Udara	Kuburan/ Makam
1	2	3	4	5	6	7
Kabupaten Sambas	8.306,59	1.973,86	3.492,16	3,02	10,32	84,04
Kabupaten Bengkayang	7.023,54	256,59	1.842,56	25,20	7,89	4,26
Kabupaten Landak	4.148,09	290,69	-	-	-	-
Kabupaten Mempawah	1.240,03	20,10	0,01	9,33		3,57
Kabupaten Sanggau	16.806,79	890,11	-	-	-	-
Kabupaten Ketapang	8.968,96	1.220,65	1.715,84	10,89	28,10	13,65
Kabupaten Sintang	11.469,15	1.313,63	1.373,31	20,66	157,95	2,47
Kabupaten Kapuas Hulu	3.920,23	629,84	392,87	0,89	7,37	-
Kabupaten Sekadau	2.576,85	328,60	1.350,22	8,93	-	5,66
Kabupaten Melawi	4.014,43	807,76	2.800,12	-	5,19	-
Kabupaten Kayong Utara	2.389,97	122,50	154,12	11,12	-	15,72

Kabupaten/ Kota	Kampung	Perumahan	Emplasemen	Pelabuhan	Bandar Udara	Kuburan/ Makam
1	2	3	4	5	6	7
Kabupaten Kubu Raya	9.475,67	2.163,27	-	12,23	21,41	-
Kota Pontianak	131,69	2.227,57	-	17,88	-	7,48
Kota Singkawang	2.433,93	570,94	147,09	0,10	-	160,74
Kalimantan Barat	82.905,93	12.816,13	13.268,31	120,23	238,24	297,58

Lanjutan.....

Kabupaten/Kota	Sarana Olah Raga	Industri Pertanian	Tegalan/ Ladang	Kebun Campuran	Kebun Buah buahan	Perkebunan Besar
1	8	9	10	11	12	13
Kabupaten Sambas	0,79	-	17.776,01	71.047,14	3,14	21.591,46
Kabupaten Bengkayang	-	-	12.066,42	27.699,53	327,85	16.258,40
Kabupaten Landak	-	-	4.930,17	79.889,65	-	62.629,70
Kabupaten Mempawah	-	0,82	2.223,98	28.255,77	-	11.528,12
Kabupaten Sanggau	-	-	8.698,62	119.798,22	-	72.903,89

Kabupaten/Kota	Sarana Olah Raga	Industri Pertanian	Tegalan/ Ladang	Kebun Campuran	Kebun Buah buahan	Perkebunan Besar
1	8	9	10	11	12	13
Kabupaten Ketapang	30,81	38,87	23.616,14	57.287,19	-	490.335,09
Kabupaten Sintang	3,68	-	35.020,53	81.081,59	-	23.850,59
Kabupaten Kapuas Hulu	2,86	-	15.044,69	40.229,16	-	59.963,75
Kabupaten Sekadau	-	-	10.028,09	44.182,65	-	17.824,21
Kabupaten Melawi	-	-	11.056,24	27.378,57	-	14.463,89
Kabupaten Kayong Utara	4,83	7,03	4.144,36	4.241,64	-	43.351,12
Kabupaten Kubu Raya	-	-	19.683,05	61.306,25	8,35	77.697,52
Kota Pontianak	50,76	0,16	1.895,55	416,48	-	-
Kota Singkawang	23,42	242,85	2.261,70	2.590,67	-	1.457,06
Kalimantan Barat	117,15	289,73	168.445,55	645.404,50	339,34	913.854,79

Lanjutan...

Kabupaten/Kota	Industri Non Pertanian	Pertambangan	Sawah Irigasi	Sawah Non Irigasi	Hutan Belukar	Hutan Sejenis
1	14	15	16	17	18	19
Kabupaten Sambas	581,22	-	38.242,60	6.725,77	83.469,12	-
Kabupaten Bengkayang	434,76	-	2.683,76	5.964,22	204.129,12	-
Kabupaten Landak	79,37	-	9.396,79	17.790,85	231.386,32	1,52
Kabupaten Mempawah	102,88	5,17	3.700,80	6.707,66	24.186,62	5.240,43
Kabupaten Sanggau	141,70	-	4.247,29	17.380,56	345.026,33	4.505,00
Kabupaten Ketapang	926,27	129,30	14.912,80	5.598,98	547.157,83	205.794,07
Kabupaten Sintang	2.903,64	-	1.259,78	8.236,20	579.055,53	17,00
Kabupaten Kapuas Hulu	168,53	-	717,74	5.751,70	385.900,20	-
Kabupaten Sekadau	635,41	0,39	1.023,61	6.073,79	176.886,29	-
Kabupaten Melawi	435,28	-	600,96	1.734,51	262.206,16	-
Kabupaten Kayong Utara	54,33	0,97	6.603,10	2.385,72	35.301,76	42.611,14

Kabupaten/Kota	Industri Non Pertanian	Pertambangan	Sawah Irigasi	Sawah Non Irigasi	Hutan Belukar	Hutan Sejenis
1	14	15	16	17	18	19
Kabupaten Kubu Raya	612,80	15,02	12.268,66	16.364,93	72.159,48	31.537,20
Kota Pontianak	88,50	-	41,06	142,51	38,28	-
Kota Singkawang	338,60	-	2.189,71	334,71	14.098,35	-
Kalimantan Barat	7.503,29	150,86	97.888,65	101.192,10	2.961.001,40	289.706,35

Lanjutan...

Kabupaten/Kota	Hutan Rawa	Kolam	Perkebunan Rakyat	Padang Rumput	Semak	Hutan Lebat
1	20	21	22	23	24	25
Kabupaten Sambas	53.203,70	-	51.479,04	-	128.295,74	70.290,65
Kabupaten Bengkayang	7.152,85	-	58.771,39	19,98	74.322,75	113.770,63
Kabupaten Landak	13.372,24	-	253.995,65	-	78.671,55	78.354,91
Kabupaten Mempawah	34.730,91	-	50.991,07	17,92	17.816,33	4.662,55
Kabupaten Sanggau	30.365,56	-	328.806,19	542,56	158.719,73	108.528,00

Kabupaten/Kota	Hutan Rawa	Kolam	Perkebunan Rakyat	Padang Rumput	Semak	Hutan Lebat
1	20	21	22	23	24	25
Kabupaten Ketapang	180.869,88	26,39	166.743,74	1.536,62	304.249,73	806.284,56
Kabupaten Sintang	24.202,85	-	95.549,72	1.187,29	329.089,80	932.718,15
Kabupaten Kapuas Hulu	440.901,79	-	36.169,71	287,10	228.942,96	1.818.469,04
Kabupaten Sekadau	9.445,53	-	78.274,38	191,83	162.377,78	73.590,63
Kabupaten Melawi	10.897,15	-	25.550,41	3.001,59	197.223,95	426.930,25
Kabupaten Kayong Utara	40.251,28	0,51	19.153,98	-	49.757,61	145.833,23
Kabupaten Kubu Raya	280.928,70	21,55	117.677,71	44,52	104.784,89	17.793,17
Kota Pontianak	-	-	9,35	24,70	2.187,07	-
Kota Singkawang	2.245,14	133,65	2.999,09	-	9.002,44	9.969,07
Kalimantan Barat	1.128.567,59	182,10	1.286.171,44	6.854,11	1.845.442,33	4.607.194,85

Lanjutan...

Kabupaten/Kota	Tambak	Rawa	Sungai	Danau/Telaga
1	26	27	28	29
Kabupaten Sambas	6.073,07	2.732,99	15.960,85	100,78
Kabupaten Bengkayang	681,67	1.699,92	2.705,93	70,49
Kabupaten Landak	38,44	243,06	2.976,98	0,46
Kabupaten Mempawah	22,38	167,59	313,17	-
Kabupaten Sanggau	35,02	2.166,16	15.612,70	80,80
Kabupaten Ketapang	3.342,08	58.281,08	17.046,78	314,37
Kabupaten Sintang	1.356,75	6.549,63	22.348,32	54,98
Kabupaten Kapuas Hulu	297,17	17.556,66	33.759,85	26.064,75
Kabupaten Sekadau	588,69	5.931,50	6.584,37	110,42
Kabupaten Melawi	1.485,40	2.390,20	7.149,24	60,31
Kabupaten Kayong Utara	92,68	4.706,29	3.540,30	20,11
Kabupaten Kubu Raya	3.546,51	868,96	19.507,96	3,88
Kota Pontianak	-	-	738,42	-
Kota Singkawang	198,30	379,22	348,01	3,76
Kalimantan Barat	17.758,14	103.673,26	148.592,87	26.885,11

Lanjutan...

Kabupaten/Kota	Waduk/ Bendungan	Tanah Rusak	Tanah Penggunaan Lainnya	Jumlah (Ha)
1	30	31	32	33
Kabupaten Sambas	358,77	4.422,71	8.027,00	594.252,52
Kabupaten Bengkayang	171,11	6.878,58	3.888,80	548.858,19
Kabupaten Landak	11,45	3.798,14	1.064,99	843.071,03
Kabupaten Mempawah	-	549,80	55,64	192.552,64
Kabupaten Sanggau	0,67	4.633,62	5.332,95	1.245.222,49
Kabupaten Ketapang	360,32	32.249,71	104.361,37	3.033.452,05
Kabupaten Sintang	136,25	13.632,99	23.878,96	2.196.471,41
Kabupaten Kapuas Hulu	17,89	4.713,71	11.920,96	3.131.831,44
Kabupaten Sekadau	285,36	2.754,55	2.952,03	604.011,76
Kabupaten Melawi	76,96	5.898,14	6.084,62	1.012.251,34
Kabupaten Kayong Utara	82,79	170,10	5.965,50	410.973,84
Kabupaten Kubu Raya	-	38,34	6.753,06	855.295,06
Kota Pontianak	-	-	3.803,45	11.820,91
Kota Singkawang	17,25	1.914,60	958,29	55.018,69

Kalimantan Barat	1.518,82	81.655,00	185.047,62	14.735.083,38
-------------------------	-----------------	------------------	-------------------	----------------------

2.1.1.8. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)

IKLH sebagai indikator pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia merupakan perpaduan antara konsep IKL dan konsep EPI. IKLH dapat digunakan untuk menilai kinerja program perbaikan kualitas lingkungan hidup. IKLH juga dapat digunakan sebagai bahan informasi dalam mendukung proses pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Kriteria yang digunakan untuk menghitung IKLH adalah:

- (1) Kualitas Air, yang diukur berdasarkan parameter-parameter TSS, DO, BOD, COD, Total Fosfat, Fecal Coli, dan Total Coliform;
- (2) Kualitas udara, yang diukur berdasarkan parameter-parameter: SO₂ dan NO₂; dan (3)
- Kualitas tutupan lahan yang diukur berdasarkan luas tutupan lahan dan dinamika vegetasi. Perkembangan indeks kualitas lingkungan hidup di Kalimantan Barat tahun 2017-2022 ditampilkan pada tabel berikut:

Tabel 2. 4 Perkembangan Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL), dan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) di Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2017-2023

No	Uraian	Tahun					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	73,09	65,92	70,07	72,96	71,90	73,73
2	Indeks Kualitas Air (IKA)	55,8	50,00	51,67	54,36	55,52	52,97
3	Indeks Kualitas Air Laut (IKAL)	--	-	73,25	77,83	63,30	83,52
4	Indeks Kualitas Udara (IKU)	87,9	90,07	88,88	90,71	90,90	92,03

5	Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	64,19	NA	54,22	59,35	59,05*)	60,62*)
---	--------------------------------------	-------	----	-------	-------	----------	---------

Sumber: Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Kalimantan, KLHK Tahun 2017-2023

*) merupakan capaian nilai Indeks Kualitas Lahan (IKL)

Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 27 Tahun 2021 tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup bahwa Indeks Kualitas Lahan (IKL) merupakan hasil gabungan perhitungan Indeks Kualitas Ekosistem Gambut (IKEG) dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL).

2.1.2. Demografi

2.1.2.1. Kepadatan Penduduk

Berdasarkan data Agregat Kependudukan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil jumlah penduduk Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2023 berjumlah sekitar 5.557.277 jiwa, dimana 51,40 persen atau 2.856.503 jiwa laki-laki dan 48,60 persen atau 2.700.774 jiwa perempuan. Dengan luas wilayah 147.037 Km² maka kepadatan penduduk Kalimantan Barat tahun 2023 adalah 38 jiwa per kilometer persegi. Dilihat dari sebaran penduduk, pada tahun 2023 Kota Pontianak merupakan daerah dengan tingkat kepadatan tertinggi yaitu 5.751 jiwa per Km² Kapuas Hulu merupakan kabupaten dengan tingkat kepadatan penduduk terendah yakni sebesar 9 jiwa per Km².

Tabel 2. 5 Jumlah dan Kepadatan Penduduk Per Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat
Tahun 2023

NO	KABUPATEN/KOTA	PENDUDUK			LUAS WILAYAH	KEPADATAN
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH		
1	SAMBAS	330.821	314.777	645.598	5.938	109
2	MEMPAWAH	159.409	152.166	311.575	1.935	161
3	SANGGAU	256.645	237.399	494.044	12.452	40
4	KETAPANG	300.036	278.945	578.981	30.019	19
5	SINTANG	227.959	212.653	440.612	22.026	20
6	KAPUAS HULU	139.342	132.242	271.584	31.318	9
7	BENGKAYANG	152.200	140.901	293.101	5.489	53
8	LANDAK	215.566	194.009	409.575	8.431	49
9	SEKADAU	114.725	106.608	221.333	5.979	37
10	MELAWI	110.012	103.310	213.322	10.123	21
11	KAYONG UTARA	65.753	62.203	127.956	4.110	31
12	KUBU RAYA	319.106	305.966	625.072	8.549	73
13	KOTA PONTIANAK	339.890	339.928	679.818	118	5.751
14	KOTA SINGKAWANG	125.039	119.667	244.706	550	445

NO	KABUPATEN/KOTA	PENDUDUK			LUAS WILAYAH	KEPADATAN
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH		
	JUMLAH	2.856.503	2.700.774	5.557.277	147.037	38

Sumber Luas Wilayah : Kepmendagri Nomor 100.1.1-6117 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2023.

2.1.2.2. Penduduk Berdasarkan Usia

Perkembangan terakhir jumlah penduduk Kalimantan Barat tahun 2023 pada usia produktif dari usia 25 tahun sampai dengan 50 tahun masih cukup dominan hal ini memberi dampak terhadap kondisi demografi wilayah Kalimantan Barat yang sering disebut sebagai bonus demografi. Namun demikian bonus demografi ini tidak tidaklah secara otomatis membawa keuntungan bagi Daerah, tantangannya adalah pilihan kebijakan diambil Daerah dalam rangka perluasan lapangan pekerjaan penduduk usia produktif.

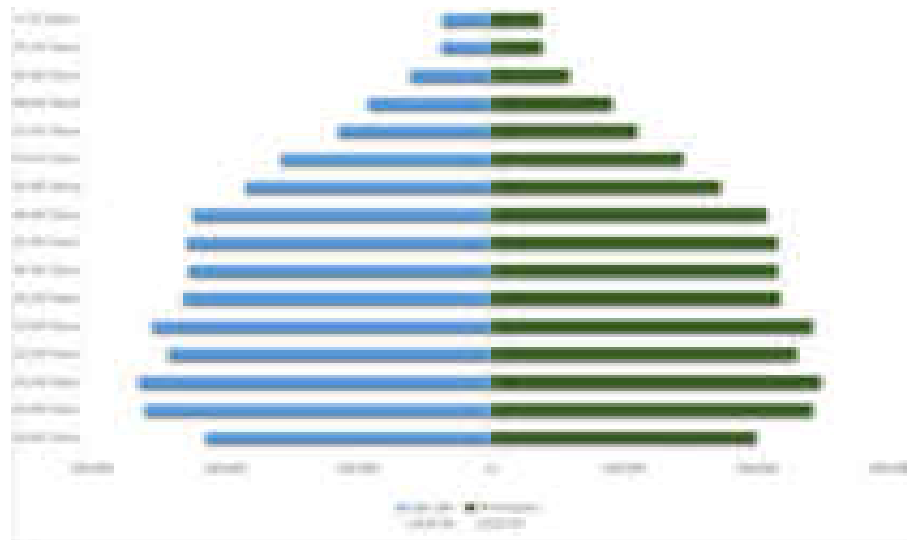
Tabel 2. 6 Jumlah Penduduk Kalimantan Barat Menurut Kelompok Usia Tahun 2018-2023

Kel Usia	2018	2019	2020	2021	2022	2023
00-04 Tahun	376.856	390.585	387.857	394.683	413.460	412.244
05-09 Tahun	497.658	506.517	508.237	505.463	501.884	499.519
10-14 Tahun	496.883	500.347	502.828	505.686	512.971	517.824
15-19 Tahun	523.779	524.301	511.570	494.612	472.089	457.241
20-24 Tahun	470.261	473.302	485.634	486.067	495.627	509.445
25-29 Tahun	464.781	449.671	447.578	445.120	448.517	451.795
30-34 Tahun	476.844	462.908	461.988	444.348	442.937	438.691
35-39 Tahun	473.027	463.567	459.426	461.626	444.196	444.246
40-44 Tahun	393.432	400.792	419.209	413.513	430.400	439.484
45-49 Tahun	335.324	334.079	341.405	357.413	357.651	364.601
50-54 Tahun	265.698	277.408	287.110	288.928	302.101	307.216
55-59 Tahun	219.261	223.298	221.237	226.488	224.073	236.525
60-64 Tahun	162.522	167.662	179.456	176.517	183.157	185.842
65-69 Tahun	109.994	116.296	110.347	117.528	119.078	129.998
70-74 Tahun	72.118	73.189	72.497	72.542	75.488	80.137
>=75 Tahun	84.376	76.108	75.931	76.408	73.522	82.469
Total	5.422.814	5.440.030	5.472.310	5.466.942	5.497.151	5.557.277

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Prov. Kalbar 2023

Gambar 2. 3 Piramida Penduduk Provinsi Kalimantan Barat Berdasarkan Umur Tahun 2022

Semester II



Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Prov. Kalbar

Tabel 2. 1 Angka Ketergantungan Penduduk Kalimantan Barat Tahun 2018-2023

Kab/Kota	Angka Ketergantungan Menurut Kabupaten/Kota				
	2019	2020	2021	2022	2023
Kalimantan Barat	49.95	44.87	44.7	44.56	44.78
Sambas	56.77	48.34	48.19	48.07	48.23
Bengkayang	55.42	46.28	46.11	45.97	45.38
Landak	56.2	45.25	45.08	44.93	45.42
Mempawah	52.12	45.49	45.43	45.39	45.56
Sanggau	46.49	41.73	41.54	41.39	42.63
Ketapang	45.78	40.85	40.67	40.52	40.69
Sintang	50.43	46.37	46.19	46.03	45.95
Kapuas Hulu	47.53	44.6	44.36	44.16	44.06
Sekadau	48.88	44.25	44.09	43.96	44.4
Melawi	47.33	40.08	39.7	39.56	40.7
Kayong Utara	54.22	45.42	45.24	45.1	44.4
Kubu Raya	50.94	45.74	45.56	45.41	45.35
Kota Pontianak	43.41	45.01	44.89	44.79	44.84
Kota Singkawang	53.61	49.53	49.39	49.29	49.68

2.1.2.3. Laju Pertumbuhan Penduduk

Dalam 2 tahun terakhir dari 2020 sampai 2022 laju pertumbuhan penduduk Kalimantan Barat rerata per tahun 1,33 persen per tahun. Laju pertumbuhan tinggi diatas 2 persen berasal dari Kabupaten Ketapang, 2,11 persen, Bengkayang 2,08 persen, Kayong Utara 2,03 persen. Sementara itu 3 kab/kota dengan kontribusi terbesar terhadap jumlah

penduduk Kalimantan Barat tahun 2022 berasal dari Kota Pontianak 12,25 persen, Kabupaten Sambas 11,66 persen dan Kubu Raya 11,19 persen. Tiga kab/kota dengan kepadatan tertinggi per kilometer persegi pada tahun 2022 adalah Kota Pontianak 6.247 penduduk, Kota Singkawang 477

penduduk dan Kabupaten Mempawah 242

penduduk

Tabel 2. 7 Laju Pertumbuhan Penduduk Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat

Kab/Kota	Laju Pertumbuhan (%)		Kepadatan/Km ²	Share (%) Thdp Prov
	2010-2020	2020-2022	2022	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Sambas	2,34	1.62	100	11.66
Mempawah	2,48	1.76	242	5.62
Sanggau	1,67	0.96	38	8.93
Ketapang	2,84	2.11	18	10.47
Sintang	1,40	0.69	20	7.89
Kapuas Hulu	1,25	0.54	9	4.85
Bengkayang	2,80	2.08	54	5.29
Landak	1,83	1.11	41	7.37
Sekadau	1,49	0.77	40	3.96
Melawi	2,40	1.68	20	3.82
Kayong Utara	2,75	2.03	28	2.34
Kubu Raya	1,91	1.2	88	11.19
Pontianak	1,68	0.96	6247	12.25
Singkawang	2,27	1.55	477	4.37
Kalimantan Barat	2,04	1.33	37	100,00

Sumber: BPS tahun 2022.

2.1.2.4. Penduduk Berdasarkan Agama

Komposisi penduduk menurut agama diperlukan sebagai dasar untuk merencanakan penyediaan sarana dan prasarana peribadatan. Secara umum terdapat lima agama di Kalimantan Barat,

yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha, dan Konghucu.

Berdasarkan data dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Kalimantan Barat tahun 2022 penduduk Kalimantan Barat berjumlah 5.497.151 seperti dalam tabel

dibawah ini. Mayoritas penduduk Kalimantan Barat beragama Islam atau 60,41 persen, penganut agama Katolik 22,11 persen.

Sedangkan penganut Kristen 11,62 persen, penganut Konghucu 0,29 persen, Hindu 0,05 persen, dan Budha 5.51 persen.

Tabel 2. 8 Penduduk Provinsi Kalimantan Barat Menurut Agama Tahun 2022

No	Agama	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Islam	1,693,363	1,627,356	3,320,719	60.41
2.	Kristen	332,132	306,825	638,957	11.62
3.	Katolik	632,139	583,134	1,215,273	22.11
4.	Hindu	1,477	13	2,777	0.05
5.	Budha	158.308	144.365	302.673	5.51
6.	Konghucu	8,371	7,438	15,809	0.29
7.	Aliran Kepercayaan	497	446	943	0.02
	Total	2,826,287	2,670,864	5,497,151	100

Sumber: Dinas Dukcapil Kalimantan Barat, Tahun 2022.

Untuk memfasilitasi kehidupan umat beragama, terdapat rumah ibadah. Rumah ibadah tersebut ada dalam kondisi baik, rusak

ringan, dan rusak parah. Lebih jelasnya jumlah dan keadaan rumah ibadah di Kalimantan Barat seperti tabel berikut:

Tabel 2. 9 Kondisi Rumah Ibadah di Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2022

No	Agama	Kondisi Rumah Ibadah			Jumlah
		Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	-(6)
1.	Islam	2947	2431	1989	7367
2.	Katolik	2801	1936	865	5602
3.	Kristen	3000	450	660	4110
4.	Khonghucu	39	23	15	77
5.	Hindu	-	15	1	16
6.	Budha	519	317	180	1016

Sumber: Kanwil Kemenag Kalbar

2.2. ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

Gambaran kondisi aspek kesejahteraan masyarakat di Kalimantan Barat diuraikan

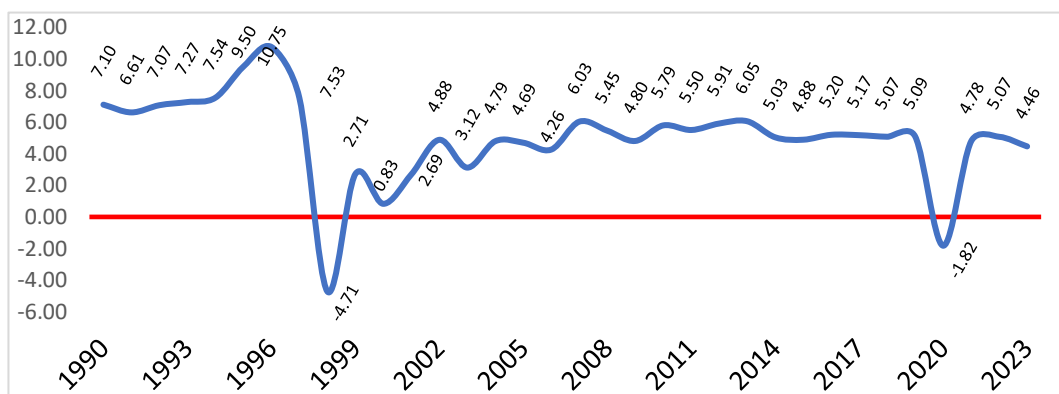
dalam fokus kesejahteraan ekonomi dan fokus kesejahteraan sosial sebagai berikut.

2.2.1. Kesejahteraan Ekonomi

Kesejahteraan secara umum tidak dapat hanya diukur dari persoalan ekonomi namun pertumbuhan ekonomi merupakan suatu indikator dari dampak kebijakan pembangunan secara keseluruhan. Pertumbuhan ekonomi merupakan kontribusi dari pertumbuhan berbagai macam sektor

ekonomi, yang secara tidak langsung menggambarkan tingkat perubahan ekonomi. Bagi daerah, indikator ini penting untuk mengetahui keberhasilan pembangunan yang telah dicapai dan berguna untuk menentukan arah pembangunan dimasa yang akan datang.

Gambar 2. 4 Grafik Perkembangan Ekonomi Kalimantan Barat 1990-2023



Sumber: BPS Kalbar 2024 (data diolah)

Secara umum, dalam rata-rata selama kurun setiap 10 tahun sejak tahun 1990 hingga 2020, periode 1990-1999 ekonomi Kalimantan Barat tumbuh diatas 6 persen, pada periode 2000-2009 cenderung tumbuh melambat 4 persen, sementara pada periode 2010-2019 kembali tumbuh diatas 5 persen. Ini artinya pertumbuhan ekonomi Kalimantan

Barat dalam kondisi yang stabil atau normalnya adalah diatas 5 persen per tahunnya bila merujuk kondisi terdekat dalam 10 tahun kebelakang. Hingga di tahun 2020 terkontraksi 1,82 persen karena dampak pandemi covid, namun kembali bangkit ke level normal pertumbuhan 4 persen hingga sekarang.

2.2.1.1. Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu wilayah/regional dalam suatu periode tertentu

adalah data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. PDRB

pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu negara tertentu, atau

merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi.

Tabel 2. 10 PDRB Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019-2023

Indikator	2019	2020	2021	2022	2023
PDRB ADHB (miliar Rupiah)	212.150	214.002	231.321	255.797	274.469
PDRB ADHK 2010 (miliar Rupiah)	137.243	134.743	141.212	148.369	154.981
Pertumbuhan Ekonomi Kalbar (%)	5,09	-1,82	4,80	5,07	4,46
Nasional (%)	5,02	-2,07	3,69	5,31	5,05

Sumber: BPS Kalbar 2024 (data diolah)

Peningkatan PDRB ADHK Kalimantan Barat dibandingkan tahun sebelumnya menggambarkan pertumbuhan ekonomi yang terjadi. Pertumbuhan ekonomi tersebut mencerminkan adanya peningkatan produksi barang dan jasa yang sudah bebas dari pengaruh harga (pertumbuhan riil). Pada tahun 2018 perekonomian Kalimantan Barat tumbuh 5,07 persen nyaris sama dengan pertumbuhan di tahun 2019, dan saat adanya dampak pandemi covid ekonomi Kalimantan Barat berkontraksi 1,82 persen. Hingga tahun 2022 pertumbuhan ekonomi kembali normal yaitu sama dengan pertumbuhan di tahun

2018, meskipun posisinya belum dapat melampaui pertumbuhan ekonomi nasional. Kondisi eksisting struktur PDRB Kalimantan Barat hingga tahun 2022, pada sisi pengeluaran secara rata-rata distribusi terbesar adalah komponen Konsumsi Rumah Tangga (53,49%) dan Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) (32,62%). Komponen Ekspor sejak tahun 2018 yang menyumbang 12,08 persen cenderung meningkat tahun 2022 menjadi 21,48 persen. Tentu ini mencerminkan adanya kenaikan produksi barang yang dihasilkan pada sektor produksi yaitu pertanian dan pertambangan.

Tabel 2. 11 Distribusi PDRB Kalimantan Barat Sisi Pengeluaran Tahun 2014-2023 (%)

Komponen	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Rata-rata
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	56,16	55,19	55,10	54,54	53,02	52,21	52,05	49,50	48,65	49,16	52,56
Pengeluaran Konsumsi LNPRT	1,18	1,11	1,08	1,15	1,22	1,29	1,29	1,21	1,20	1,30	1,20

**“Kalimantan Barat Maju, Sejahtera,
dan Berkelanjutan”**

Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	12,91	13,17	11,77	11,60	11,49	11,72	12,20	11,88	10,43	10,88	11,80
Pembentukan Modal Tetap Bruto	34,05	34,81	34,10	33,70	32,77	32,34	31,22	30,23	29,59	31,99	32,48
Perubahan Inventori	1,35	1,29	0,27	-1,29	- 0,14	0,42	- 3,57	- 3,32	-4,32	-0,37	-0,97
Ekspor Barang dan Jasa	8,42	5,94	5,47	7,66	9,71	10,29	12,48	13,85	17,33	11,90	10,30
Dikurangi Impor barang dan Jasa	6,67	7,24	5,94	5,54	6,33	6,93	4,60	3,04	2,23	2,59	5,11
Net Ekspor Antar Daerah	- 7,38	- 4,26	- 1,84	- 1,82	- 1,74	- 1,35	- 1,07	- 0,31	-0,64	-2,27	-2,27
PDRB	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Sumber: BPS Kalbar 2024 (data diolah)

Sementara itu pada sisi produksi, kontribusi PDRB dari sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan menjadi penyumbang terbesar yaitu rata-rata 20,62 persen, diikuti oleh sektor Industri Pengolahan (16,24%) dan sektor Perdagangan (14,04%). Dalam kurun

10 tahun pergeseran struktur dari sektor Pertanian, Kehutanan, dan perikanan hanya berubah dibawah 2 persen saja, sedangkan sektor lainnya bergeser dibawah satu persen saja, ini artinya tidak terjadi pergeseran struktur PDRB secara signifikan.

Tabel 2. 12 Distribusi PDRB Provinsi Kalimantan Barat Sisi Produksi Tahun 2014-2023 (%)

Kategori Lapangan Usaha (Seri 2010)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Rata - Rata
Pertanian, Hut dan Perikanan	21,56	20,54	20,22	20,30	20,18	20,09	20,91	21,28	21,10	5.36	20.62
Pertambangan dan Penggalian	4,79	4,90	5,61	5,45	5,63	5,73	6,97	6,95	6,56	15.36	5.80
Industri Pengolahan	16,48	15,78	16,11	16,15	16,12	16,36	16,20	16,44	16,46	0.13	16.15
Pengadaan Listrik, Gas	0,06	0,08	0,09	0,10	0,11	0,11	0,12	0,12	0,12	0.12	0.10
Pengadaan Air/Pengelolaan	0,13	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	12.7	0.12

Kategori Lapangan Usaha (Seri 2010)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Rata - Rata
Sampah/Limbah & Daur Ulang											
Konstruksi	12,21	13,10	12,44	12,80	12,52	12,31	12,25	12,85	12,53	14,38	12,57
Perdagangan Besar/Eceran, Rep. Mobil & Sepeda Motor	14,51	14,81	14,47	14,13	14,01	14,20	13,22	12,80	13,70	4,67	14,02
Transportasi dan Pergudangan	4,30	4,40	4,53	4,58	4,78	4,71	3,89	3,43	4,26	2,15	4,36
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2,31	2,38	2,37	2,32	2,38	2,42	2,01	2,05	2,09	4,13	2,25
Informasi dan Komunikasi	3,30	3,36	3,43	3,70	3,75	3,80	4,12	4,11	4,01	3,32	3,77
Jasa Keuangan	3,63	3,56	3,64	3,69	3,78	3,45	3,40	3,43	3,34	2,68	3,52
Real Estate	3,04	3,01	2,96	2,88	2,90	2,86	2,88	2,72	2,52	0,44	2,85
Jasa Perusahaan	0,45	0,47	0,46	0,44	0,44	0,44	0,41	0,38	0,40	6,5	0,43
Administrasi Pem, Han/JamSos	6,29	6,67	6,94	6,94	6,98	7,06	7,34	6,85	6,36	3,45	6,79
Jasa Pendidikan	4,42	4,30	4,20	4,02	3,94	3,91	3,49	3,39	3,34	2,69	3,85
Jasa Kesehatan & Keg Sosial	1,49	1,51	1,45	1,40	1,40	1,43	1,84	2,37	2,35	0,83	1,79
Jasa Lainnya	1,03	1,01	0,99	0,98	0,98	1,01	0,81	0,71	0,76	5,36	0,91

**“Kalimantan Barat Maju, Sejahtera,
dan Berkelanjutan”**

Kategori Lapangan Usaha (Seri 2010)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Rata - Rata
PDRB	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

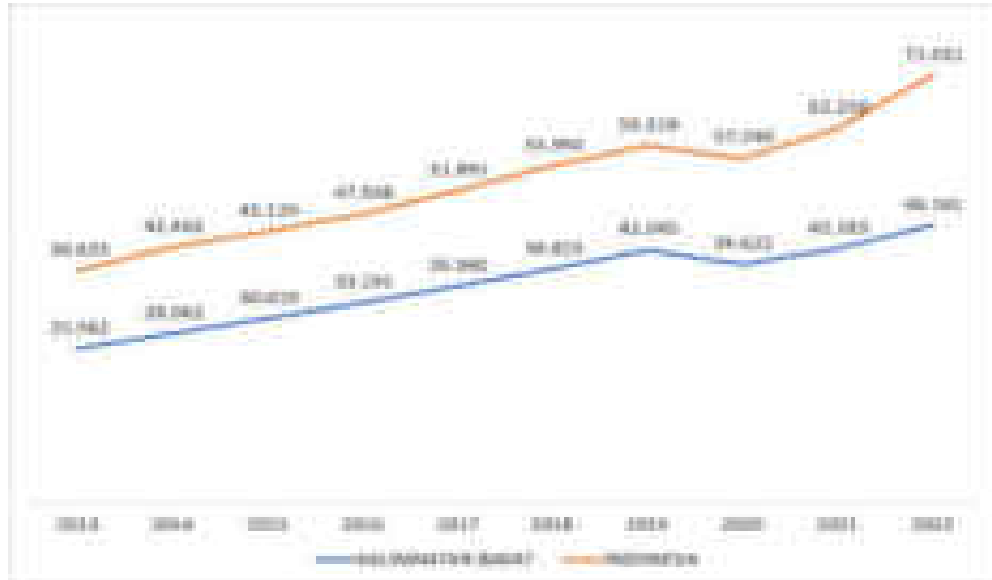
Sumber: BPS Kalbar 2024 (data diolah)

2.2.1.2. Produk Domestik Regional Per Kapita (PDRB/Kapita)

PDRB per kapita Kalimantan Barat setiap tahun mengalami peningkatan dengan rata-rata kenaikan diatas 2 juta rupiah per tahun sejak tahun 2013 sebesar Rp. 25,5 juta menjadi Rp. 46,16 juta hingga tahun 2022,

tetapi masih berada dibawah rata-rata nasional yang sudah mencapai Rp. 71,03 juta. Pada tahun 2020 saat terjadi pandemi covid sempat turun tapi dapat kembali naik ke level yang sama sebelum pandemi.

Gambar 2. 5 PDRB Per Kapita (Ribu Rupiah) Kalimantan Barat 2013-2023



Sumber: BPS Kalbar 2023 (data diolah)

Adapun daerah dengan pendapatan perkapita diatas rata-rata Provinsi Kalimantan Barat adalah Kota Pontianak yaitu sebesar Rp 66,17 juta, Kabupaten Ketapang sebesar Rp 57,97 juta, Kabupaten Kubu Raya sebesar

Rp 56,69 juta, Kota Singkawang sebesar Rp 49,41 juta, Kabupaten Sanggau sebesar Rp 48,37 juta dan Kabupaten Kapuas Hulu sebesar Rp. 47,79 juta.

Tabel 2. 13 PDRB Per Kapita (Ribu Rupiah) Kabupaten/Kota 2013-2023

Kab/Kota	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Sambas	25.420	27.976	30.447	33.052	35.645	38.322	32.814	34.948	38,085	40,425
Bengkayang	23.893	25.663	27.695	29.909	31.831	33.867	30.285	32.029	35,057	37,281
Landak	19.031	20.823	22.589	24.372	26.181	27.953	27.009	28.956	31.314	33.087

Kab/Kota	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Mempawah	20.19 9	22.51 1	24.77 3	26.98 9	29.10 0	31.40 6	28.33 7	29.72 0	32.23 9	34,254
Sanggau	29.41 0	31.51 9	34.29 1	36.91 9	39.05 0	40.74 4	41.08 9	44.37 6	47.95 5	48.675
Ketapang	34.39 4	36.86 9	41.27 1	45.43 8	49.60 3	53.60 7	49.25 2	53.30 2	58.66 2	59.940
Sintang	23.78 4	25.77 3	27.85 1	30.11 2	32.39 4	35.05 7	34.91 8	37.17 3	40.09 8	42.344
Kapuas Hulu	26.53 7	28.69 7	31.32 0	34.07 0	36.40 1	38.77 4	40.67 1	43.63 5	47.05 6	50.079
Sekadau	20.39 6	22.43 6	24.58 2	26.88 6	29.34 7	31.91 0	31.04 9	33.50 6	36.35 5	38.714
Melawi	17.32 0	18.72 5	20.12 6	21.54 7	23.09 1	24.68 0	22.92 1	24.33 2	26.20 9	27,743
Kayong Utara	24.36 4	26.61 1	29.39 0	31.98 9	34.23 3	36.66 9	33.23 6	35.26 8	38.14 3	40.464
Kubu Raya	30.92 9	34.64 2	38.09 6	42.10 4	46.14 3	50.23 9	47.47 4	50.77 2	56.01 5	59.951
Kota Pontianak	41.91 6	45.95 0	49.35 5	53.29 5	56.56 9	59.85 9	57.15 7	60.56 9	66.16 4	70,892
Kota Singkawang	33.01 5	36.10 5	38.87 9	41.86 4	44.24 1	45.88 6	43.07 9	45.72 6	49,22 9	52.412
Kalimantan Barat	28.06 2	30.61 9	33.19 1	35.98 5	38.81 5	41.85 1	39.52 5	42.28 3	46.09 2	48.089

Sumber: BPS Kalbar 2024

2.2.1.3. Nilai Tukar Petani (NTP)

Nilai Tukar Petani (NTP) merupakan salah satu indikator yang berguna untuk mengukur tingkat kesejahteraan petani dengan mengukur kemampuan tukar produk (komoditas) yang dihasilkan/dijual petani dibandingkan dengan barang/jasa yang dibutuhkan petani baik untuk proses produksi

(usaha) maupun untuk konsumsi rumah tangga. Jika NTP lebih besar dari 100 maka periode tersebut relatif lebih baik dibandingkan dengan periode tahun dasar, sebaliknya jika NTP lebih kecil dari 100 berarti terjadi penurunan daya beli petani.

Gambar 2. 6 Perkembangan NTP Kalimantan Barat 2013-2023



Sumber: BPS Kalbar 2023 (data diolah)

Selama kurun 10 tahun NTP di Kalimantan Barat cenderung meningkat hingga pada tahun 2022 mencapai nilai tertinggi 141,4 dan tahun 2023 mengalami penurunan 2,4 menjadi 139,0. Kalau secara sub sektor pertanian maka NTP Perkebunan Rakyat adalah yang paling tinggi diantara sub sektor lainnya. Ini artinya nilai surplus dari hasil produksi sub sektor pertanian lebih tinggi

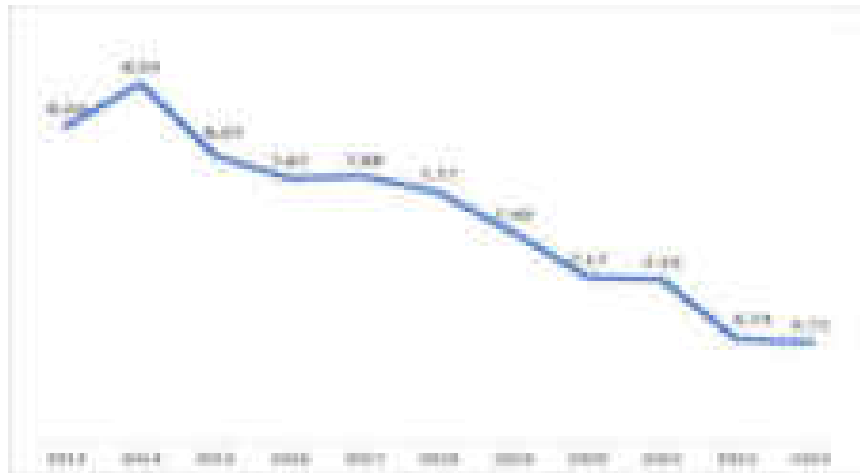
2.2.1.4. Angka Kemiskinan

Kinerja penurunan angka kemiskinan Kalimantan Barat pada periode 2013-2023 menunjukkan hasil yang cukup signifikan, yaitu dari 8,24 persen pada tahun 2013

daripada subsektor Peternakan, Pangan, Hortikultura dan Perikanan. Sejak tahun 2019 NTP subsektor Tanaman Pangan mengalami penurunan, sedangkan sub sektor Hortikultura mengalami kenaikan nilai NTP diatas 100.

menjadi 6,71 persen pada tahun 2023. Berdasarkan data BPS, sebagian besar penduduk miskin berada di kawasan pedesaan.

Gambar 2. 7 Angka Kemiskinan (%) Kalimantan Barat Tahun 2013-2023



Sumber: BPS Kalbar 2023 (data diolah)

Penurunan persentase penduduk miskin di Kalimantan Barat sebesar 0,15 persen per tahunnya dan penurunan jumlah penduduk miskin berjumlah 11,75 ribu jiwa sejak tahun 2012 hingga tahun 2023. Komposisi

penduduk miskin di kabupaten/kota di Kalimantan Barat hingga tahun 2023 yang tertinggi adalah Kabupaten Ketapang (50 ribu jiwa), sedangkan terendah adalah Kabupaten Kayong Utara dengan jumlah 10,8 ribu jiwa.

Tabel 2. 14 Jumlah Penduduk Miskin (Ribu Jiwa) Menurut Kabupaten/Kota

Kabupaten/Kota	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Ketapang	53,5	58,8	54,2	55,4	53,1	54,3	54,9	53,8	53,5	53,0	49,9	50,0
Landak	42,6	49,5	48,5	48,5	44,6	44,8	43,7	43,2	42,4	42,0	38,7	38,9
Sambas	45,3	51,2	49,3	49,3	44,9	45,4	45,5	43,8	41,4	41,5	37,7	38,7
Sintang	32,5	39,0	35,7	36,8	40,4	41,5	42,7	40,3	39,2	39,4	36,8	35,5
Kota Pontianak	33,4	32,8	30,9	31,6	34,1	33,2	31,8	31,5	30,7	30,1	29,6	29,9
Kubu Raya	32,8	32,1	29,5	28,4	27,8	29,5	28,9	27,4	25,9	25,5	24,4	25,3

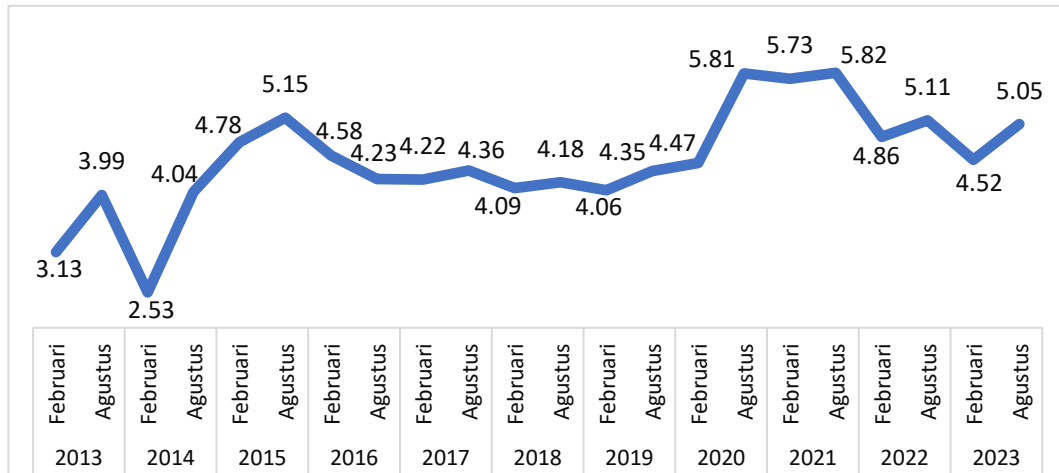
Kabupaten/Kota	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Melawi	22,6	26,0	24,0	24,6	25,1	25,3	26,2	25,7	25,3	25,5	24,6	24,2
Sanggau	18,7	20,4	19,7	20,3	20,3	20,6	21,6	21,4	21,2	21,7	21,7	23,3
Kapuas Hulu	23,2	26,4	24,3	23,7	24,5	24,0	24,8	25,2	23,9	24,0	23,4	22,6
Bengkayang	15,2	18,4	16,9	16,5	18,0	18,5	17,9	17,7	17,1	16,9	16,0	16,9
Pontianak	13,7	15,6	15,0	13,9	14,6	15,3	14,6	14,0	13,2	13,8	14,3	14,2
Sekadau	11,1	13,2	12,1	12,6	12,0	12,7	12,3	12,3	11,9	12,7	11,9	12,1
Kota Singkawang	10,4	13,0	12,0	11,9	11,2	11,6	11,2	10,9	10,2	11,0	10,8	11,1
Kayong Utara	10,2	11,1	9,9	10,4	10,9	10,8	11,1	11,2	10,9	10,7	10,5	10,8
KALIMANTAN BARAT	365,1	407,3	381,9	383,7	381,4	387,4	387,1	378,4	366,8	367,9	350,3	353,4

Sumber: BPS Kalbar 2023

2.2.1.5. Tingkat Pengangguran

Dinamika Tingkat Pengangguran Terbuka di Kalimantan Barat sejak tahun 2014 dalam angka 4,04 persen (Agustus) hingga tahun 2023 naik menjadi 5,05 persen (Agustus) yang telah cenderung menurun sejak kenaikan tertinggi 5,81 persen pada tahun 2020.

Gambar 2. 8 Tingkat Pengangguran Terbuka Kalimantan Barat 2013-2023



Sumber: BPS Kalbar 2023 (data diolah)

Adapun pada level kabupaten/kota, terdapat lima kabupaten/kota yang relatif lebih tinggi dari rata-rata Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Kalimantan Barat yaitu Kota Pontianak, Singkawang, Mempawah, Kubu Raya, dan Ketapang. Sejak tahun 2014

hingga tahun 2023 hanya Kota Pontianak dan Singkawang yang mengalami kenaikan TPT secara signifikan dan kenaikan tertinggi yaitu di atas 8 persen. Kota Pontianak dari 5,35 persen menjadi 8,92 persen meski telah menurun sejak tahun 2020.

Tabel 2. 15 Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten/Kota 2014-2023

Kabupaten/Kota	2014	2015	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Kota Pontianak	7,05	9,44	9,36	10,21	9,06	12,36	12,38	9,92	8,92
Kota Singkawang	8,22	6,12	8,08	7,75	6,31	8,78	9,16	8,63	8,51
Mempawah	5,57	7,12	6,72	6,79	5,11	7,55	7,71	7,48	7,33
Kubu Raya	6,18	6,11	5,91	4,94	5,50	7,14	7,02	6,87	6,76
Ketapang	2,06	4,29	3,97	3,17	4,39	7,30	6,94	6,71	6,57
Sambas	3,70	4,85	4,24	3,30	3,48	3,71	3,97	5,08	5,04

Kabupaten/Kota	2014	2015	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Sanggau	3,25	5,13	3,27	2,42	3,00	3,52	3,45	3,76	3,86
Kayong Utara	4,08	3,76	5,00	3,86	3,89	3,71	3,78	3,10	3,04
Bengkayang	3,74	3,15	2,40	2,36	2,66	3,91	4,42	2,84	2,92
Sintang	3,06	2,48	1,93	2,28	3,10	4,50	3,95	2,97	2,92
Melawi	2,46	3,03	2,11	3,05	2,39	2,70	2,66	1,95	2,46
Sekadau	0,31	2,97	0,64	2,75	3,04	3,39	2,92	1,33	2,29
Landak	3,43	5,81	2,03	2,23	2,69	3,38	3,22	1,78	2,24
Kapuas Hulu	2,02	3,00	2,21	1,54	2,43	4,02	4,18	2,21	2,19
Kalimantan Barat	4,04	5,15	4,36	4,18	4,35	5,81	5,82	5,11	5,05

Sumber: BPS Kalbar 2023 (data diolah)

2.2.1.6. Rasio Gini

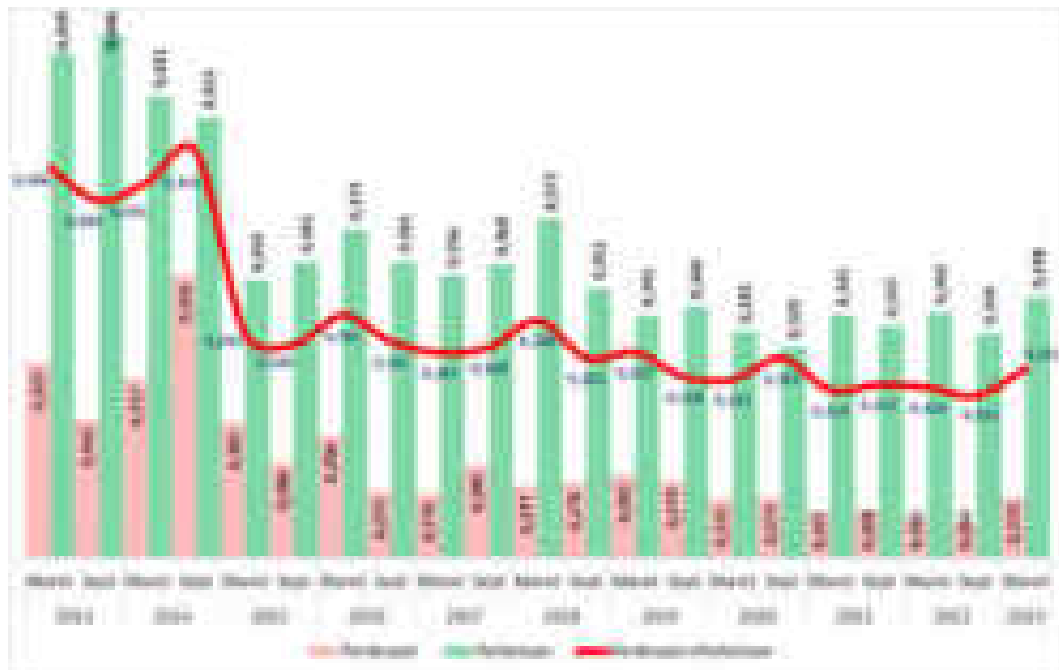
Rasio Gini menunjukkan tingkat ketimpangan pendapatan penduduk secara menyeluruh. Nilai Rasio Gini berkisar antara 0 sampai 1. Semakin nilainya mendekati 1, maka tingkat ketimpangan diasumsikan semakin tinggi. Kondisi ketimpangan pengeluaran Kalimantan Barat dari tahun ke tahun

berfluktuatif dan trennya mengalami penurunan. Tahun 2022 sudah mencapai 0,314 termasuk dalam kategori ketimpangan sedang. Berdasarkan daerah tempat tinggal, ketimpangan di pedesaan lebih rendah dibanding di perkotaan, sejak tahun 2016 daerah pedesaan termasuk dalam kategori

**“Kalimantan Barat Maju, Sejahtera,
dan Berkelanjutan”**

ketimpangan rendah sedangkan di perkotaan cenderung dalam kategori ketimpangan sedang.

Gambar 2. 9 Perkembangan Rasio Gini Kalimantan Barat Tahun 2013-2023



Sumber: BPS Kalbar 2023 (data diolah)

2.2.1.7. Indeks Williamson

Ketimpangan ekonomi di Kalimantan Barat berdasarkan Indeks Williamson selama tahun 2018-2023 cenderung berfluktuatif.

Tabel 2. 16 Indeks Williamson Kalimantan Barat 2018-2022

Tahun	Indeks Williamson	Kategori
2018	0,255	Ketimpangan Rendah
2019	0,250	Ketimpangan Rendah
2020	0,253	Ketimpangan Rendah
2021	0,255	Ketimpangan Rendah
2022	0,259	Ketimpangan Sedang

Tahun	Indeks Williamson	Kategori
2023	0,258	Ketimpangan Sedang

Sumber: Data PDRB 2023 diolah

Pada tahun 2020 saat masa pandemi covid ketimpangan antar wilayah di Kalimantan Barat malah justru menurun, walaupun laju pertumbuhan ekonomi berkontraksi. Hal ini sejalan dengan angka gini rasio di Kalimantan Barat pada tahun 2020 juga mengalami penurunan yang cukup signifikan dan merupakan penurunan tertinggi selama lima tahun terakhir. Dan pada tahun 2023 angka gini rasio menurun dibanding tahun sebelumnya, sejalan dengan indeks

Williamson yang menurun menjadi 0,258. Indeks Williamson Kalimantan barat mengalami kenaikan pada tahun 2023 dalam tingkat ketimpangan antar wilayahnya termasuk dalam kategori sedang. Ketimpangan ini terjadi karena masing-masing kabupaten/kota memiliki sumber daya dalam dan infrastruktur yang berbeda-beda dimana hal tersebut menghasilkan pendapatan yang besar juga bagi daerah yang memilikinya.

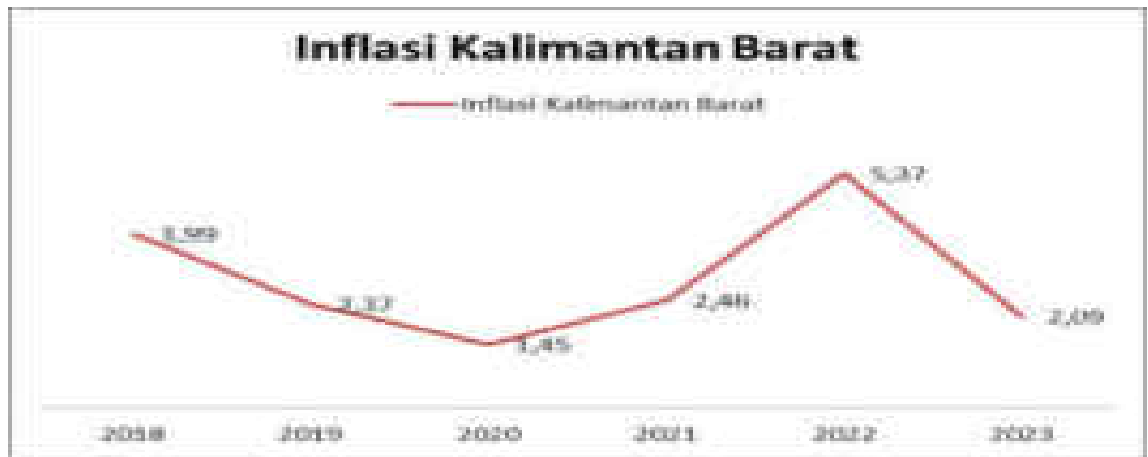
2.2.1.8. Laju Inflasi

Laju Inflasi merupakan kecenderungan naiknya harga barang dan jasa pada umumnya yang berlangsung secara terus menerus. Jika harga barang dan jasa di dalam negeri meningkat, maka inflasi mengalami kenaikan. Naiknya harga barang dan jasa tersebut menyebabkan turunnya nilai uang. Dengan demikian, inflasi dapat juga diartikan sebagai penurunan nilai uang terhadap nilai barang dan jasa secara umum. Untuk mengendalikan laju inflasi, Pemerintah Kalimantan Barat sudah membentuk Forum Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) yang diketuai oleh Sekretaris Daerah dan

beranggotakan Instansi Vertikal seperti BPS, Bank Indonesia, serta seluruh PD terkait. Forum TPID melakukan koordinasi dan komunikasi secara intensif, untuk menjaga agar inflasi dapat dikendalikan, dan ketersediaan pangan tetap terjaga dengan harga terjangkau.

Laju inflasi Kalimantan Barat diukur dari laju inflasi ibu kota provinsi yakni laju inflasi Kota Pontianak. Selama periode 2018-2022 laju inflasi Kota Pontianak cukup terkendali. Pada tahun 2018 inflasi Kota Pontianak sebesar 3.99 persen turun menjadi 2.37 persen pada tahun 2019.

Gambar 2. 10 Laju Inflasi 3 Kota/Kabupaten di Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2023



Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Barat, Tahun 2023.

Tabel 2. 17 Laju Inflasi di Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2023

Kab /Kota	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Sintang			4,68	1,88	6,5	2,02
Kota Pontianak	3,99	2 ,64	2,11	1,16	6,35	2,09
Kota Singkawang	3,18	1,08	2,72	2,65	5,96	1,74

Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Barat, Tahun 2023.

2.2.1.9. Indeks Pembangunan Manusia

Keberhasilan pembangunan sumber daya manusia dapat dilihat dari berbagai aspek pembangunan, salah satunya melalui pendekatan indeks pembangunan manusia (IPM) yang merupakan indikator penting untuk mengukur capaian pembangunan kualitas hidup manusia. IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil

pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan dan pendidikan yang layak. Pencapaian pembangunan manusia diukur dengan memperhatikan tiga aspek esensial yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak. IPM merupakan indikator yang digunakan untuk

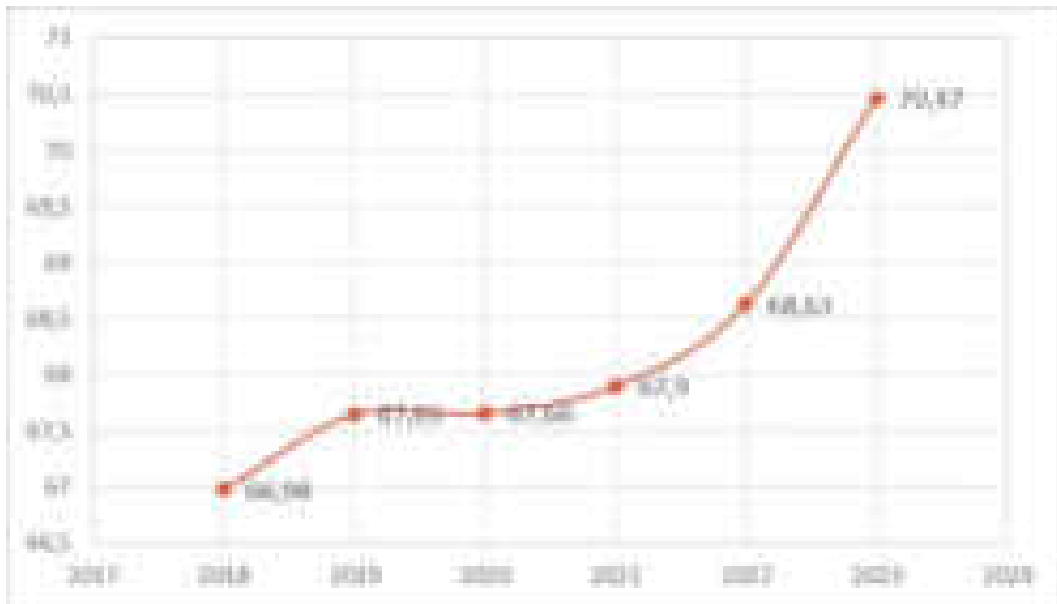
**“Kalimantan Barat Maju, Sejahtera,
dan Berkelanjutan”**

melihat perkembangan pembangunan dalam jangka panjang.

Untuk melihat kemajuan pembangunan manusia, terdapat dua aspek yang perlu diperhatikan, yaitu kecepatan dan status pencapaian. Selama periode 2018-2022, IPM Provinsi Kalimantan Barat terus mengalami peningkatan, bahkan tahun ketika kondisi

Covid-19 dalam kondisi memuncak. Pada tahun 2018 IPM Kalimantan Barat sebesar 66,98 poin menjadi 70,47 poin pada tahun 2023 atau meningkat 5,2 persen atau 3,49 poin selama 5 tahun. Meskipun terus mengalami peningkatan, status pembangunan manusia di Provinsi Kalimantan Barat masih berstatus sedang.

Gambar 2. 11 Perkembangan IPM Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2023



Tabel 2. 18 Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2023

No	Wilayah	Tahun					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(9)
	Kalimantan Barat	66.98	67.65	67.66	67.90	68,63	69,41
1	Sambas	66.61	67.02	67.03	67.10	67,95	68.69
2	Bengkayang	66.85	67.57	67.87	68.04	68,74	69,53
3	Landak	65.45	65.96	65.98	66.21	67,17	68.14
4	Mempawah	64.90	65.50	65.74	66.03	66,94	67,92
5	Sanggau	65.15	65.67	65.77	66.20	66.91	67,77
6	Ketapang	66.41	67.16	67.17	67.43	67,92	68,68
7	Sintang	66.07	66.70	66.88	66.93	67,86	68,67
8	Kapuas Hulu	65.03	65.65	65.69	65.75	66,70	67,67
9	Sekadau	63.69	64.34	64.76	64.93	65,58	66,33
10	Melawi	65.05	65.54	65.55	65.87	66,81	67,76
11	Kayong Utara	61.82	62.66	62.68	62.90	63,81	64,79
12	Kubu Raya	67.23	67.76	67.95	68.16	68,91	69,6

13	Kota Pontianak	78.56	79.35	79.44	79.93	80,48	81,03
14	Kota Singkawang	71.08	71.72	71.94	72.11	72,89	73,39

Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Barat, Tahun 2024

2.2.2. Kesejahteraan Sosial Budaya

Kesejahteraan Sosial Budaya digambarkan melalui indikator pendidikan, kesehatan, pertahanan, dan ketenagakerjaan.

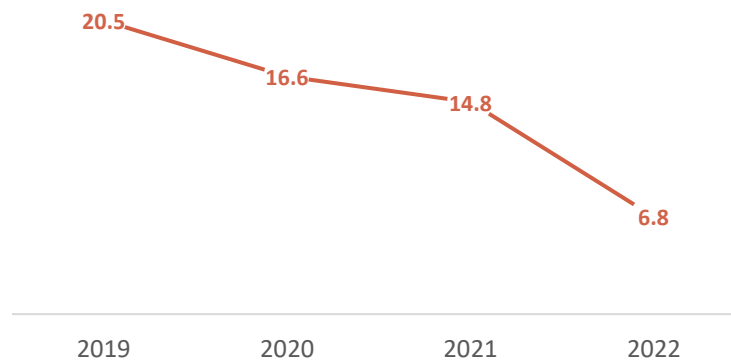
2.2.2.1. Kesehatan

1. Prevalensi Balita Gizi Kurang

Status Gizi merupakan suatu indikator yang sangat penting untuk menilai status indikator Derajat Kesehatan Masyarakat. Gizi buruk adalah suatu istilah teknis yang umumnya dipakai oleh kalangan gizi, kesehatan dan kedokteran. Gizi buruk adalah bentuk terparah dari proses terjadinya kekurangan gizi menahun. Anak balita sehat atau kurang gizi secara sederhana dapat diketahui

dengan membandingkan antara berat badan menurut umurnya dengan rujukan (standar) yang telah ditetapkan. Apabila berat badan menurut umur sesuai dengan standar, anak disebut gizi baik. Kalau sedikit di bawah standar disebut gizi kurang. Apabila jauh di bawah standar dikatakan gizi buruk. Gizi buruk yang disertai dengan tanda-tanda klinis disebut marasmus atau kwashiorkor.

Gambar 2. 12 Gizi Balita Tahun 2019-2022



Sumber: Profil Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat

Gambar diatas merupakan gambaran penyebaran prevalensi balita gizi kurang di Kalimantan Barat dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2022. Pada tahun 2015 prevalensi gizi kurang berada pada kisaran 20,5% dari total balita yang ada di Kalimantan

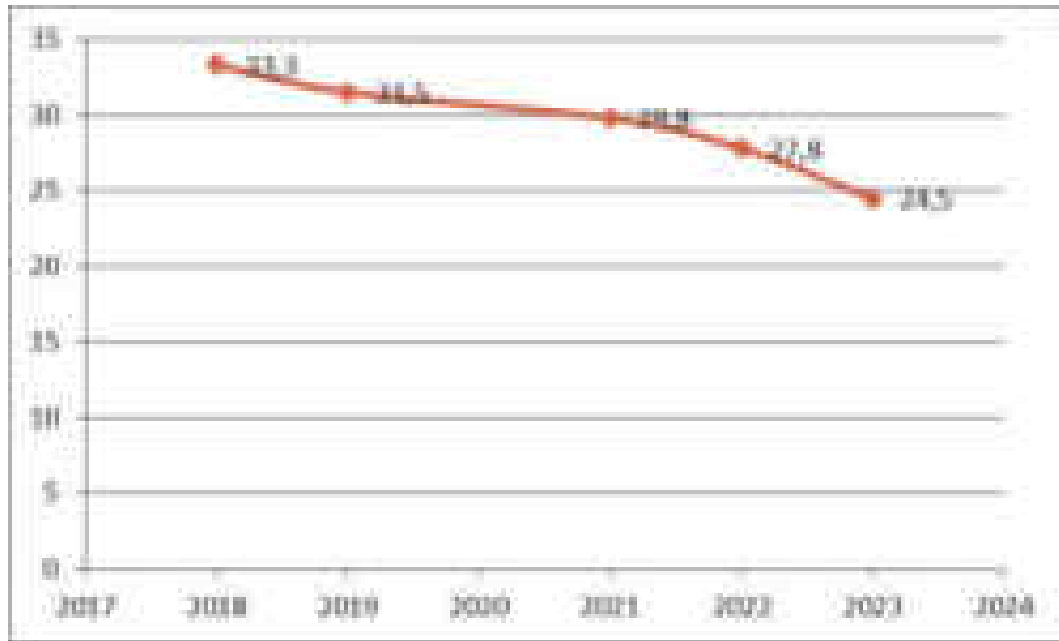
Barat tetapi pada tahun 2022 mengalami penurunan yang sangat signifikan menjadi 6,8% yang artinya selama masa 4 tahun kasus gizi kurang mengalami penurunan sebesar 13,7%.

2. Prevalensi Stunting

Status gizi masyarakat dapat diukur melalui beberapa indikator, diantaranya adalah bayi dengan Berat Badan Lahir Rendah (BBLR), status gizi balita, wanita usia subur Kurang Energi Kronik (KEK). Status gizi merupakan suatu indikator yang sangat penting untuk menilai status indikator Derajat Kesehatan Masyarakat. Gizi buruk adalah suatu istilah teknis yang umumnya dipakai oleh kalangan gizi, kesehatan dan kedokteran. Gizi buruk adalah bentuk terparah dari proses terjadinya kekurangan gizi menahun. Anak balita sehat atau kurang gizi secara sederhana dapat diketahui dengan membandingkan antara berat badan menurut umurnya dengan rujukan (standar) yang telah ditetapkan. Apabila berat badan menurut umur sesuai dengan standar, anak disebut gizi baik. Kalau sedikit di bawah standar disebut gizi kurang. Apabila jauh di bawah standar dikatakan gizi buruk. Gizi buruk yang disertai dengan tanda-tanda klinis disebut marasmus atau kwashiorkor. Anak kurang gizi pada tingkat ringan dan atau sedang tidak selalu diikuti dengan gejala sakit.

Indikator status gizi berdasarkan indeks Tinggi Badan/Umur (TB/U) memberikan indikasi masalah gizi yang sifatnya kronis sebagai akibat dari keadaan yang berlangsung lama. Misalnya: kemiskinan, perilaku hidup tidak sehat, dan asupan makanan kurang dalam jangka waktu lama sejak usia bayi sehingga mengakibatkan anak menjadi pendek. Indikator status gizi berdasarkan indeks Berat Badan/Tinggi Badan (BB/TB) memberikan indikasi masalah gizi yang sifatnya akut sebagai akibat dari peristiwa yang terjadi dalam waktu yang tidak lama (singkat). Misalnya: terjadi wabah penyakit dan kekurangan makan (kelaparan) yang mengakibatkan anak menjadi kurus. Indikator BB/TB dan IMT/U dapat digunakan untuk identifikasi kurus dan gemuk. Masalah kurus dan gemuk pada umur dini dapat berakibat pada risiko berbagai penyakit degeneratif pada saat dewasa (Teori Barker). Masalah gizi akut-kronis adalah masalah gizi yang memiliki sifat masalah gizi akut dan kronis. Sebagai contoh adalah anak yang kurus dan pendek.

Gambar 2. 13 Prevalensi Stunting



Sumber: Data Surveilans Gizi berdasar hasil E-PPGBM

Berdasarkan hasil laporan Program Gizi Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2023 seperti pada gambar diatas dapat kita lihat bahwa Prevalensi Stunting di Provinsi Kalimantan Barat sudah mengalami penurunan dimana sebelumnya berada pada tahun 2018 berada pada angka 33,3 dan

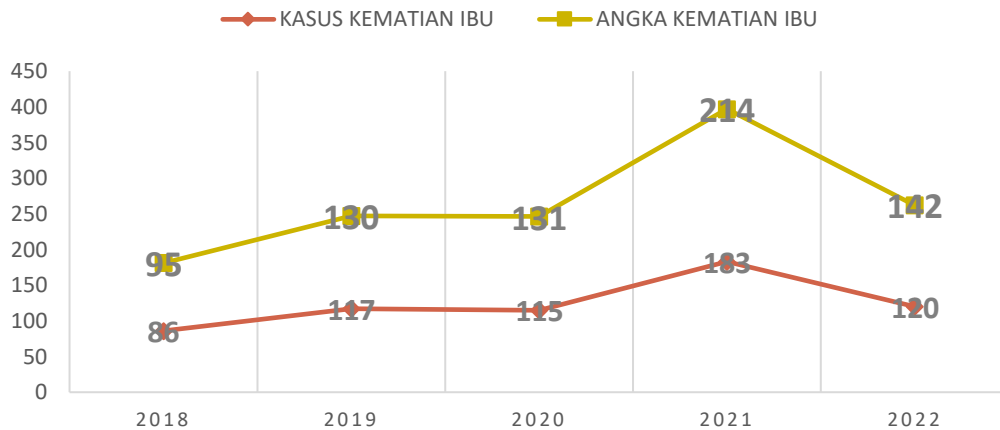
3. Angka Kematian Ibu

Informasi mengenai tingginya Angka Kematian Ibu (AKI) bermanfaat untuk pengembangan program peningkatan kesehatan reproduksi, terutama pelayanan kehamilan dan membuat kehamilan yang aman, bebas resiko tinggi (Making Pregnancy Safer), program peningkatan jumlah kelahiran

pada tahun 2023 menjadi 24,5 Walaupun angka yang didapat ini masih jauh dari target nasional tetapi setidaknya penurunan kasus sudah terjadi akibat dari dampak intervensi yang sudah diberikan.

yang dibantu oleh tenaga kesehatan, penyiapan sistem rujukan dalam penanganan komplikasi kehamilan, penyiapan keluarga dan suami siaga dalam menyongsong kelahiran yang semuanya bertujuan untuk mengurangi kasus kematian ibu dan meningkatkan derajat kesehatan reproduksi.

Gambar 2. 14 Angka Kematian Ibu Tahun 2018-2022



Sumber: Profil Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat

Dari gambar diatas terlihat bahwa angka kematian ibu di Provinsi Kalimantan Barat 5 tahun terakhir cenderung fluktuatif, meskipun jika dilihat dari 2 tahun terakhir ada kecenderungan penurunan, yaitu 214 per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2021 menjadi 142 per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2022.

Angka Kematian Ibu (AKI) yang tinggi merupakan permasalahan kesehatan di negara-negara berkembang dan merupakan salah satu indikator pelayanan kesehatan masyarakat. Lebih dari 90 persen kematian

4. Angka Usia Harapan Hidup

Usia harapan hidup Kalimantan Barat, bila dibandingkan dengan rata-rata nasional, masih berada dibawah capaian secara nasional. Namun, pergerakan usia harapan hidup per tahun menunjukkan kinerja yang

ibu terjadi di negara berkembang (WHO, 2017). AKI Indonesia masih tinggi, menurut hasil Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS) 2015 yaitu 305 per 100.000 kelahiran hidup. Angka ini masih jauh dari yang tercantum pada TPB Tujuan 3 yaitu untuk memastikan kehidupan yang sehat dan mempromosikan kesejahteraan bagi semua individu pada semua usia dan untuk mengurangi AKI secara global menjadi kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2030 (United Nations, 2015).

meningkat. Angka usia harapan hidup tahun 2023 mencapai 71.32 tahun meningkat 0,30 tahun bila dibandingkan kondisi tahun 2022 sebesar 71.02 tahun.

Gambar 2. 15 Angka Harapan Hidup Provinsi Kalimantan Barat



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Barat 2023, diolah

Angka Harapan Hidup tertinggi dicapai oleh Kabupaten Bengkayang sebesar 74,20 tahun, sedangkan Angka Harapan Hidup yang terendah terdapat di Kabupaten Kayong Utara, yaitu 69.22 tahun. Berikut tabel angka harapan hidup di Kalimantan Barat.

Tabel 2. 19 Angka Harapan Hidup Per Kabupaten di Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019-2023

Kabupaten/Kota	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Kalimantan Barat	70.56	70.69	70.76	71.02	71.32
Sambas	68.83	68.93	69.08	69.39	69.76
Bengkayang	73.67	73.83	73.84	74,00	74.20
Landak	72.70	72.84	73.04	73,39	73.77
Mempawah	70.90	71.04	71.18	71,47	71.74
Sanggau	71.35	71.42	71.42	71,58	71.77

Kabupaten/Kota	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Ketapang	71.01	71.10	71.11	71,27	71.45
Sintang	71.62	71.71	71.84	72,12	72.41
Kapuas Hulu	72.44	72.52	72.53	72,69	72.88
Sekadau	71.65	71.84	72.05	72,39	72.74
Melawi	72.88	72.97	72.98	73,14	73.32
Kayong Utara	68.11	68.28	68.48	68,82	69.22
Kubu Raya	70.43	70.59	70.69	70,95	71.26
Kota Pontianak	72.80	72.96	73.12	73,46	73.87
Kota Singkawang	71.85	72.06	72.18	72,46	72.81

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Barat 2023

2.2.2.2. Kesejahteraan Keluarga

1. Kesejahteraan Sosial

Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Barat mengalami peningkatan sebanyak 383.896 keluarga pada tahun 2021 jika dibandingkan pada jumlah pada tahun 2020 dimana pada tahun 2020 berjumlah 457.288 keluarga dan pada tahun 2021 DTKS berjumlah sebanyak 841.184 Keluarga. Namun pada tahun 2022

jumlah DTKS mengalami penurunan jumlah sebanyak 14.021 Keluarga dimana pada tahun 2022 jumlah DTKS sebanyak 827,163 Keluarga dan pada tahun 2023 jumlah DTKS meningkat Kembali sebanyak 1.206 Keluarga jika dibandingkan dengan jumlah pada tahun 2022.

Tabel 2. 20 DTKS Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat

No.	Keterangan	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
1	2	3	4	5
1	Kab. Sambas			
	Jumlah Individu	232.281	237,277	231,661
	Jumlah Keluarga	84.044	85,481	81,393
2	Kab. Mempawah			
	Jumlah Individu	163.108	162,957	163,396
	Jumlah Keluarga	54.146	52,498	52,791
3	Kab. Sanggau			
	Jumlah Individu	179.631	180,198	174,009
	Jumlah Keluarga	179.631	67,899	65,414
4	Kab. Ketapang			
	Jumlah Individu	189.823	190,634	245,611
	Jumlah Keluarga	71.470	70,85	101,651
5	Kab. Sintang			
	Jumlah Individu	225.110	233,169	219,491
	Jumlah Keluarga	80.400	82,438	76,292
6	Kab. Kapuas Hulu			
	Jumlah Individu	124.199	123,716	111,17

No.	Keterangan	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
1	2	3	4	5
	Jumlah Keluarga	46.193	44,915	41,186
7	Kab. Bengkayang			
	Jumlah Individu	133.865	138,967	136,894
	Jumlah Keluarga	49.849	46,69	46,723
8	Kab. Landak			
	Jumlah Individu	309.661	310,636	300,252
	Jumlah Keluarga	96.691	92,287	89,613
9	Kab. Sekadau			
	Jumlah Individu	116.101	115,44	96,607
	Jumlah Keluarga	38.805	37,387	32,103
10	Kab. Melawi			
	Jumlah Individu	94.488	95,204	92,737
	Jumlah Keluarga	37.122	36,381	35,738
11	Kab. Kayong Utara			
	Jumlah Individu	75.095	74,992	73,64
	Jumlah Keluarga	25.814	24,835	24,745
12	Kab. Kubu Raya			

No.	Keterangan	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
1	2	3	4	5
	Jumlah Individu	292.229	295,459	294,504
	Jumlah Keluarga	101.122	98,209	99,289
13	Kota Pontianak			
	Jumlah Individu	172.244	173,31	154,372
	Jumlah Keluarga	58.712	59,052	53,616
14	Kota Singkawang			
	Jumlah Individu	89.823	89,929	87,417
	Jumlah Keluarga	28.880	28,241	27,815
Jlm	Individu	2.397.658	2.421.888	2.381.761
	Keluarga	841184	827,163	828.369

Sumber : Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Barat

2. Persentase PPKS yang Memperoleh Bantuan Sosial

Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 29 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 16 tahun 2017 Tentang Standar Nasional Sumber Daya Manusia Penyelenggara Kesejahteraan Sosial, Penyandang masalah kesejahteraan sosial merupakan perorangan, keluarga, kelompok, dan atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan

hidupnya baik jasmani, rohani, maupun sosial secara memadai dan wajar.

Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial adalah perorangan, keluarga, kelompok, dan/atau Masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga memerlukan pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani dan rohani maupun sosial secara memadai dan wajar. Adapun

penanganan Pemerlu pelayanan
Kesejahteraan Sosial (PPKS) di Provinsi
Kalimantan Barat adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 21 PPKS Terdata dan Ditangani

Tahun	Jumlah PPKS Terdata	Jumlah Penanganan	Persentase
2021	235.580	173.067	73%
2022	189.839	186.362	98%

Sumber: Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Barat

Penanganan PPKS dari jumlah yang terdata belum seluruhnya dapat ditangani. Berdasarkan data pada tahun 2021 penanganan terlaksana sebesar 73% dan pada tahun 2022 penanganan meningkat menjadi 98%. Adapun berdasarkan jenis penanganan dan jumlah Pemerlu pelayanan Kesejahteraan sosial (PPKS) pada tahun 2021, 2022 dan pada tahun 2023 sesuai dengan pada tabel di bawah ini:

Tabel 2. 22 PPKS Terdata dan Ditangani

No	Uraian	2021		2022		2023	
		PPKS Terdata	Penanganan	PPKS Terdata	Penanganan	PPKS Terdata	Penanganan
1	2	3	4	5	6		
1.	Anak Balita Telantar	9					
2.	Anak Terlantar	1727	14	250	250	5.735	390
3.	Anak yang Berhadapan dengan Hukum	291		18	18		11
4.	Anak Jalanan	346					

No	Uraian	2021		2022		2023	
		PPKS Terdata	Penangan	PPKS Terdata	Penangan	PPKS Terdata	Penangan
1	2	3	4	5	6		
5.	Anak dengan Kedisabilitas (ADK)	792					
6.	Anak yang Menjadi Korban Tindak Kekerasan atau Diperlakukan Salah						
7.	Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus	53					
8.	Lanjut Usia Terlantar / dalam panti	420	420	3727	250	1.863	
9.	Penyangg Disabilitas	4626	564	802	802	392	392
10.	Tuna Susila	214					
11.	Gelandangan	133				35	35
12.	Pengemis	5					
13.	Pemulung	84					
14.	Kelompok Minoritas						

No	Uraian	2021		2022		2023	
		PPKS Terdata	Penangan	PPKS Terdata	Penangan	PPKS Terdata	Penangan
1	2	3	4	5	6		
15.	Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan (BWBLP)	687					
16.	Orang dengan HIV/AIDS (ODHA)	1838					
17.	Korban Penyalahgunaan NAPZA	716		40	40		
18.	Korban Trafficking / Pekerja Migran Bermasalah Sosial (PMBS)	14		963	963	407	407
19.	Korban Tindak Kekerasan	141					
20.	Penanganan/Pemulangan Orang Terlantar			263	263		
21.	Korban Bencana Alam	169328	169328	182264	182264	181.270	800
22.	Korban Bencana Sosial	69					
23.	Perempuan Rawan Sosial Ekonomi	40411					

No	Uraian	2021		2022		2023	
		PPKS Terdata	Penangan	PPKS Terdata	Penangan	PPKS Terdata	Penangan
1	2	3	4	5	6		
24.	Fakir Miskin	201	201	1512	1512	911.424 KK	
25.	Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis	277					
26.	Keluarga berumah tidak layak huni	2552					
27.	Komunitas Adat Terpencil	10646	2540			231	40
		235580	173067	189839	186362		

Sumber : Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Barat

Pendataan PPKS terbagi dalam 27 jenis dimana pada setiap jenis sudah diatur kewajiban penanganan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal yang harus dilakukan oleh pemerintah di tiap tingkatan baik Pemerintah Pusat, Pemerintah

Provinsi maupun Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Adapun upaya penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) pada tahun 2022 mengalami penurunan jumlah pendataan sebanyak 45.741, namun mengalami peningkatan dalam jumlah penanganan sebanyak 13.295 penanganan jika dibandingkan dengan pendataan dan penanganan pada tahun 2021.

3. Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)

PSKS adalah perorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang dapat berperan serta untuk menjaga, menciptakan,

mendukung, dan memperkuat penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Adapun perkembangan PSKS di Provinsi
Kalimantan Barat sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2. 23 Kondisi PSKS Tahun 2020-2023

No.	Jenis	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	56	6
1	Karang Taruna	529	754	754	754
2	Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS)	201	201	201	201
3	Pekerja Sosial Masyarakat (PSM)	1718	1718	1718	1718
4	Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK)	174	174	174	174
5	Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	14	14	14	14
6	Taruna Siaga Bencana (TAGANA)	522	522	522	529
7	Pelopor Perdamaian	45	45	45	45
8	Sistem Layanan Rujukan Terpadu (SLRT)	8	8	10	13
9	Corporate Social Responsibility (CSR)	114	114	114	114
10	Pelopor Perdamaian	43	43	43	45
11	Peksos				

No.	Jenis	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	56	6
12	Pekerja Sosial Profesional (PSP)/Fungsional				
13	Penyuluh Sosial Fungsional				
14	Penyuluh Sosial Masyarakat				
15	PPNS*	2	2	2	2
16	SDM PKH	761	720	653	628
17	Puskesmas	16	16	16	16
Jumlah		4147	4331	4266	4253

Sumber : Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Barat

4. Perlindungan dan Jaminan Sosial

Perlindungan sosial adalah upaya pemerintah untuk memberikan dukungan kepada masyarakat dalam menghadapi situasi yang dapat menimbulkan kerentanan atau guncangan dalam kehidupan mereka. Tujuannya adalah mencegah, mengurangi, dan menangani risiko serta tantangan yang dihadapi oleh semua warga negara. Sedangkan jaminan sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak. Sistem Jaminan Sosial Nasional yang Penerima bantuan PKH dari tahun 2022 sampai dengan tahun 2023 dalam kondisi yang tidak tetap seperti pada tahun 2021

meliputi jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan pensiun, jaminan hari tua, dan jaminan kematian bagi seluruh penduduk melalui iuran wajib pekerja. Adapun bantuan sosial merupakan skema perlindungan sosial yang sifatnya non-kontribusi sehingga masyarakat tidak perlu membayar iuran. Program non-kontribusi dari bantuan sosial di antaranya: Program Keluarga Harapan (PKH). Adapun sebaran penerima manfaat di Kabupaten/Kota dapat dilihat pada Tabel 2.24

mengalami peningkatan jumlah sebanyak 11.943 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dibandingkan pada tahun 2020 serta

mengalami penurunan jumlah nominal bantuan sebesar Rp.7.176.487.000,-. Jika dibandingkan kondisi pada tahun 2022 atas kondisi 2021, jumlah penerima bantuan PKH berkurang sebanyak 10.169 KPM namun jumlah nominal bantuan meningkat sebanyak Rp. 60.874.900.000,- dan pada tahun 2023 jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) berkurang sebanyak 21.084 keluarga dan mengalami penurunan nominal bantuan sebesar Rp. 62.561.100.596,-

Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan adalah Iuran program jaminan kesehatan bagi fakir miskin dan orang tidak mampu yang dibayar oleh pemerintah. Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan yang selanjutnya disebut PBI Jaminan Kesehatan adalah fakir miskin

dan orang tidak mampu sebagai peserta program Jaminan Kesehatan. Adapun peserta PBI JKN di Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2023 sebanyak 1.712.215 jiwa dan dinyatakan aktif. Jika dibandingkan dengan jumlah penduduk di Kalbar pada tahun yang sama yaitu sebesar 5.525.789 (sumber data; Dinas Dukcapil Provinsi Kalimantan Barat semester 1 tahun 2023) atau sebesar 30.98 % dari jumlah penduduk dan jika dibandingkan dengan jumlah penduduk miskin di Kalbar pada tahun yang sama yaitu sebanyak 353,35 jiwa maka jumlah PBI JKN sebanyak 1,712,215 jiwa sudah memberikan bantuan untuk seluruh penduduk miskin dan memperluas cakupan pada warga rentan miskin.

Tabel 2. 24 Alokasi Bantuan PKH Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020-2023

NO	KAB/KOTA	TOTAL BANTUAN 2020		TOTAL BANTUAN 2021		TOTAL BANTUAN 2022		TOTAL BANTUAN 2023	
		KPM	NOMINAL	KPM	NOMINAL	KPM	NOMINAL	KPM	NOMINAL
1	Bengkayang	7.718	25.559.322.000	10.037	26.764.750.000	10.011	32.225.225.000	9.196	29.268.404.483
2	Kapuas Hulu	10.177	24.266.308.000	10.678	24.479.250.000	9.011	26.844.500.000	7.150	21.988.056.959
3	Kayong Utara	4.266	13.514.706.000	5.127	13.610.175.000	5.710	16.497.725.000	5.380	16.417.333.333
4	Ketapang	20.239	52.554.955.000	18.047	45.078.500.000	16.611	47.690.800.000	13.044	41.101.513.322
5	Kota Pontianak	9.960	30.413.578.000	12.531	31.758.675.000	10.836	35.025.975.000	9.922	29.368.283.356
6	Kota Singkawang	5.291	17.096.875.000	6.692	18.766.825.000	7.082	22.669.625.000	6.594	19.962.248.007
7	Kubu Raya	20.172	52.892.989.000	20.645	54.487.300.000	20.258	62.123.425.000	17.967	58.719.916.618
8	Landak	23.682	63.604.860.000	23.528	63.078.275.000	21.626	71.785.850.000	19.555	63.317.606.538

“Kalimantan Barat Maju, Sejahtera, dan Berkelanjutan”

9	Melawi	9.841	26.446.421.000	9.268	22.182.200.000	7.583	21.474.725.000	6.391	19.065.100.048
10	Mempawah	8.371	28.093.634.000	9.647	27.662.750.000	9.686	30.635.875.000	9.378	28.235.928.501
11	Sambas	20.470	61.776.443.000	22.327	61.379.350.000	23.537	72.192.625.000	21.521	60.666.549.174
12	Sanggau	8.460	22.249.318.000	9.721	22.451.125.000	9.477	28.869.200.000	8.372	26.673.133.171
13	Sekadau	5.568	15.511.698.000	6.796	15.547.225.000	7.001	21.715.375.000	5.414	18.400.089.314
14	Sintang	20.074	53.450.980.000	21.188	53.009.200.000	17.634	51.379.575.000	15.095	45.385.236.580
JUMLAH		174.289	487.432.087.000	186.232	480.255.600.000	176.063	541.130.500.000	154.979	478.569.399.404

Sumber : Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Barat

Tabel 2. 25 Jumlah Keluarga Penerima Bantuan Iuran (PBI) JKN Tahun 2022/2023

No.	Keterangan	Tahun 2022		Tahun 2023	
		Jumlah	Satuan	Jumlah	Satuan
1	2	3	4	5	6
1	Kab. Sambas	n/a	Jiwa	180,999	Jiwa
2	Kab. Mempawah	n/a	Jiwa	100,758	Jiwa
3	Kab. Sanggau	n/a	Jiwa	84,661	Jiwa
4	Kab. Ketapang	n/a	Jiwa	201,616	Jiwa
5	Kab. Sintang	n/a	Jiwa	157,080	Jiwa
6	Kab. Kapuas Hulu	n/a	Jiwa	79,106	Jiwa
7	Kab. Bengkayang	n/a	Jiwa	91,390	Jiwa
8	Kab. Landak	n/a	Jiwa	215,305	Jiwa
9	Kab. Sekadau	n/a	Jiwa	57,761	Jiwa
10	Kab. Melawi	n/a	Jiwa	83,233	Jiwa
11	Kab. Kayong Utara	n/a	Jiwa	40,073	Jiwa
12	Kab. Kubu Raya	n/a	Jiwa	211,524	Jiwa
13	Kota Pontianak	n/a	Jiwa	129,974	Jiwa
14	Kota Singkawang	n/a	Jiwa	78,735	Jiwa
	Jumlah			1,712,215	Jiwa/Aktif

Sumber: Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Barat

2.3. ASPEK DAYA SAING

2.3.1. Daya Saing Ekonomi Daerah

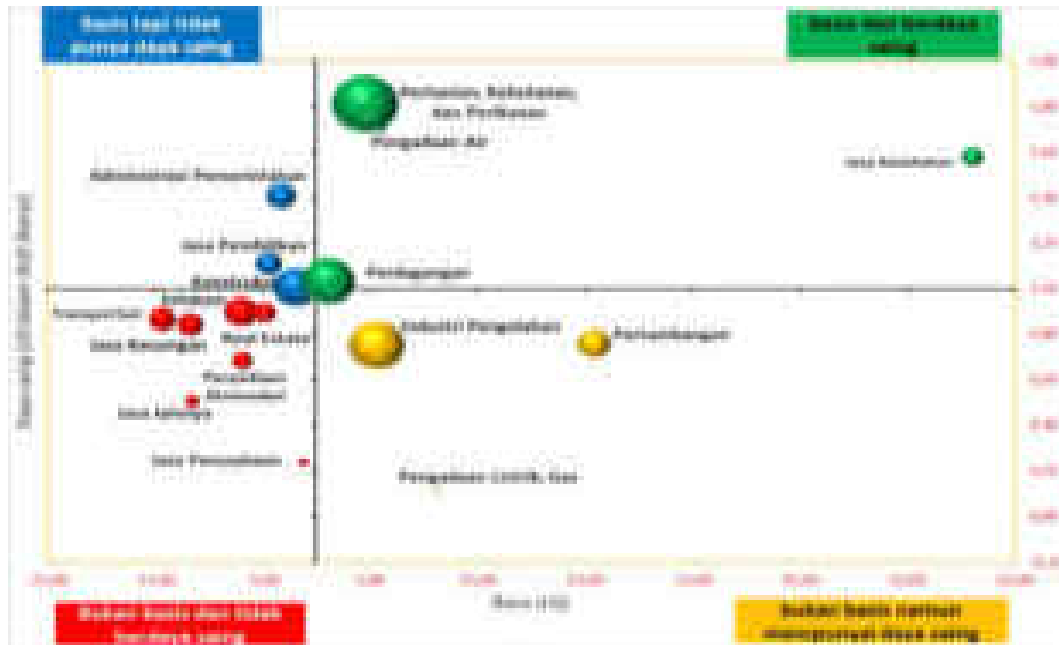
2.3.1.1. Daya Saing Sektoral

Daya saing ekonomi daerah tergambarkan dari keunggulan komparatif dan kompetitif sektor PDRB yang juga mempertimbangkan besaran nilainya dalam perekonomian daerah. Secara sektoral, hanya dua sektor yang mempunyai keunggulan komparatif (sektor basis) dan keunggulan kompetitif (daya saing) di lingkup nasional yaitu sektor Pertanian dan sektor Perdagangan, juga berkontribusi cukup besar dalam PDRB, artinya kedua sektor tersebut merupakan Sektor Unggulan karena sudah mampu memenuhi kebutuhan Kalimantan Barat

sendiri dan dapat bersaing di daerah lain dalam lingkup nasional.

Ada tiga sektor yang bukan sebagai sektor basis namun mempunyai daya saing yaitu Pertambangan/Penggalan, Industri Pengolahan dan Pengadaan Listrik dan Gas. Untuk sektor Industri Pengolahan sangat berpeluang berubah menjadi sektor basis mengingat kontribusinya yang hampir sama dengan sektor Perdagangan, dan sektor Pertambangan dapat pula tumbuh pesat dalam beberapa tahun kedepan hingga menjadi sektor unggulan bila kontribusinya bisa setara dengan sektor Perdagangan.

Gambar 2. 16 Posisi Relatif Ekonomi Sektoral di Provinsi Kalimantan Barat



Sumber: Tim KEMD Bappeda Kalbar 2023

Keterangan:

- Pengolahan data PDRB ADHK Kalimantan Barat dan PDRB seluruh Indonesia 2018 s/d 2022 untuk LQ
- Pengolahan data PDRB ADHK Kalimantan Barat 2018 dan 2022 untuk Shift Share Analysis
- Ukuran bola besar hingga kecil adalah besaran nilai PDRB ADHK lapangan usaha tahun 2022

2.3.1.2. Daya Saing Wilayah

Secara kewilayahan, ketimpangan ekonomi wilayah masih menjadi permasalahan dalam pembangunan ekonomi di Kalimantan Barat. Berdasarkan Tipologi Klassen tergambar pola dan struktur pertumbuhan ekonomi masing-masing daerah pada 14 Kabupaten/Kota di

Kalimantan Barat yang menyebar dan berkelompok, menandakan bahwa kondisi kemajuan ekonomi kabupaten/kota di Kalimantan Barat belum merata dan mengalami ketimpangan namun tidak signifikan.

Gambar 2. 17 Posisi Relatif Ekonomi Kewilayahan Kabupaten/Kota Tahun 2023



Sumber : Tim KEMD Bappeda Kalbar 2023

Keterangan : Tipologi Klassen Laju Pertumbuhan Ekonomi dan PDRB per kapita Kabupaten/Kota 2018 s/d 2022

Kabupaten Kubu Raya dan Ketapang termasuk dalam kuadran daerah yang maju dan tumbuh pesat, sedangkan Kota Pontianak, Singkawang, Kabupaten Kapuas Hulu dan Sanggau berada dalam kuadran yang Potensial atau masih dapat berkembang pesat. Meskipun demikian, Kota Pontianak merupakan wilayah yang aktivitas ekonominya cukup merata, sedangkan Kabupaten Kayong Utara dan Melawi tidak merata aktivitas ekonominya. Sementara itu, Kabupaten Mempawah, Bengkayang,

Sekadau dan Kayong Utara dalam kuadran Maju tapi tertekan yang artinya pertumbuhan ekonominya yang sudah cukup tinggi namun PDRB per kapitanya masih rendah. Ada empat kabupaten berada pada kuadran relatif tertinggal yaitu Kabupaten Melawi, Landak, Sintang dan Sambas yang memang dari segi pertumbuhan ekonomi lebih lambat dari kabupaten/kota lainnya dan nilai PDRB yang juga rendah sedangkan jumlah penduduknya lebih banyak.

2.3.1.3. Daya Saing Digital

Dalam laporan East Ventures-Digital Competitiveness Index (EV-DCI) 2023 yang mengukur dan memetakan daya saing digital

di seluruh wilayah Indonesia, indeks Daya Saing Digital Kalimantan Barat menempati peringkat 20, meningkat 12 posisi

dibandingkan tahun 2022 yang berada di peringkat 32 dan berada peringkat provinsi menengah.

Tabel 2. 26 Tabel Indeks Daya Saing Digital Kalimantan Barat

Tahun	2020	2021	2022	2023
Peringkat	21	31	32	20
Skor	31,4	34,2	38,2	43,9

Sumber: East Ventures – Digital Competitiveness Index 2023

Pilar Penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi menyumbang skor terbesar. Tingginya skor pilar ini didukung oleh peningkatan Rasio Penduduk yang Mengakses Internet dengan Handphone. Dalam mendorong perkembangan ekosistem digital, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat berkolaborasi dengan Kementerian BUMN melaksanakan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (Gernas BBI) Kalimantan Barat tahun 2022. Di dalamnya terdapat pendampingan terkait prosedur ekspor, perluasan akses pemasaran, dan business matching antara pelaku usaha dan BUMN. Kegiatan ini melibatkan 1.900 UMKM mitra Rumah BUMN dan membantu 30 UMKM bergabung di Platform Digital UMKM. Pemerintah provinsi memperluas elektronifikasi transaksi belanja dan

pendapatan, di antaranya penggunaan QRIS dan implementasi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) secara online. Relawan TIK Kalimantan Barat menyelenggarakan berbagai aktivitas seperti pemberdayaan Pandu Digital dan Festival TIK untuk mensosialisasikan penggunaan akses internet. Transaksi e-commerce meningkat sejak tahun 2019, dengan pembelian produk terbanyak berasal dari kategori fesyen.

Sektor lapangan usaha secara rata-rata sejak tahun 2019 hingga tahun 2022 yang terbesar dalam transaksi *e-commerce* yaitu sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor sebesar 49,01 persen, Penyediaan Akomodasi makanan dan minuman sebesar 15,53 persen dan Industri Pengolahan sebesar 14,95 persen.

2.3.2. Daya Saing SDM

2.3.2.1. Pendidikan

1. Jumlah Penduduk Usia Sekolah

Gambaran umum tentang akses penduduk terhadap berbagai jenjang dan jenis

pendidikan di Kalimantan Barat serta ketersediaan guru sekolah di Kalimantan

Barat disajikan pada tabel di bawah ini. Pada tabel tersebut, jumlah guru sekolah di Kalimantan Barat untuk kurun waktu 2020/2021 terbanyak adalah pada jenjang SMP/MTs sederajat yaitu sebanyak 20.252 guru dan pada kurun waktu 2021/2022 meningkat menjadi 20.887 guru. Sementara itu jumlah penduduk usia sekolah di

Kalimantan Barat pada kurun waktu 2020/2021 terbanyak adalah pada jenjang SD/MI sederajat sejumlah 644.985 orang namun pada kurun waktu 2021/2022 turun menjadi 630.888 orang. Pada jenjang Sekolah Dasar memiliki jumlah yang paling banyak dibanding dengan jenjang sekolah lainnya.

Tabel 2. 27 Jumlah Guru Sekolah di Kalimantan Barat Tahun 2020-2022

Jenjang Pendidikan	Jumlah	
	2020/2021	2021/2022
(1)	(2)	(3)
TK/PAUD	4312	4219
SD/MI sederajat	7596	8235
SMP/MTs sederajat	20.252	20.887
SMA/MA sederajat	7.857	7.413

Sumber : BPS Kalbar, 2022

Tabel 2. 28 Jumlah Penduduk Usia Sekolah di Kalimantan Barat Tahun 2020-2022

Jenjang Pendidikan	Keterangan	Jumlah	
		2020/2021	2021/2022
(1)	(2)	(3)	(4)
TK/PAUD	Usia 3-6 tahun	39.557	36.721
SD/MI sederajat	Usia 7-12 tahun	644.985	630.888

SMP/MTs sederajat	Usia 13-15 tahun	280.080	277.012
SMA/MA sederajat	Usia 16-18 tahun/SMK	78.963	84.346
	Bersekolah di SMA/MA sederajat	156.274	154.861

Sumber : BPS Kalbar, 2022

2. Angka Melek Aksara

Angka melek aksara berdasarkan BPS yaitu persentase penduduk usia 15 tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis serta mengerti sebuah kalimat sederhana dalam hidupnya sehari-hari. Angka melek aksara merepresentasikan tingkat kemampuan membaca dan menulis, yang berkorelasi dengan tingkat pendidikan masyarakat pada

umumnya. Korelasi yang didapatkan dari perhitungan persentase ini adalah semakin besar nilai angka melek aksara maka semakin banyak masyarakat yang mampu membaca dan menulis. Tabel berikut menyajikan angka melek aksara di Kalimantan Barat tahun 2018-2022.

Tabel 2. 29 Angka Melek Aksara Kalimantan Barat Tahun 2018-2022

N o	Indikator	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022	Pertumbuh an
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Angka Melek Aksara	Persen	92,58	93,21	93,41	93,41	93,96	0,59

Sumber: BPS *) dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Prov Kalbar**)

Angka melek aksara Provinsi Kalimantan Barat menunjukkan tren positif, dengan pertumbuhan rata-rata per tahunnya sebesar 0.59 persen pada periode 2018-2022.

Dengan terus meningkatnya angka melek huruf selama 4 tahun ini mengindikasikan adanya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pendidikan yang lebih baik.

Tabel 2. 30 Angka Melek Aksara Per Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2022

Kab/Kota	Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas Melek Aksara (Persen)				
	2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(5)
Kalimantan Barat	91.66	93.21	93.41	93.41	93.96
Sambas	90.62	93.00	91.44	94.31	93.61
Bengkayang	92.69	93.12	93.5	92.93	94.74
Landak	92.27	93.63	92.64	92.93	93.04
Mempawah	91.65	91.67	92.79	92.48	92.74
Sanggau	93.24	91.63	94.81	93.34	93.34
Ketapang	91.58	95.16	95.15	94.08	92.52
Sintang	93.53	93.44	92.75	89.98	92.18
Kapuas Hulu	92.20	94.63	93.52	93.13	93.31
Sekadau	91.88	91.92	92.93	93.36	93.92
Melawi	84.71	91.13	90.87	93.08	90.68
Kayong Utara	92.17	88.14	85.39	87.52	88.71
Kubu Raya	96.68	91.59	89.56	92.06	92.96

Kab/Kota	Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas Melek Aksara (Persen)				
	2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(5)
Kota Pontianak	91.77	96.67	97.26	97.99	97.95
Kota Singkawang	92.58	91.05	92.35	91.99	95.38

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Prov Kalbar (Data BPS 2022)

3. Angka Rata-Rata Lama Sekolah

Angka rata-rata lama sekolah merupakan rata-rata jumlah tahun yang dibutuhkan oleh penduduk usia 15 tahun ke atas untuk menempuh semua jenis pendidikan formal yang pernah dijalani. Indikator rerata lama sekolah ini dihitung dari variabel pendidikan tertinggi yang ditamatkan dan tingkat

pendidikan yang sedang dijalankan. Angka rata-rata lama sekolah menunjukkan seberapa lama penduduk mengenyam pendidikan di bangku sekolah. Semakin cepat atau mendekati ideal waktu yang dibutuhkan untuk lulus, maka kualitas pendidikan semakin baik.

Tabel 2. 31 Angka Rata-Rata Lama Sekolah Per Kabupaten di Kalimantan Barat Tahun 2018-2022

Kab/Kota	Angka Rata-Rata Lama Sekolah				
	2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Kalimantan Barat	7.12	7.31	7.37	7.45	7,59
Sambas	6.68	6.70	6.71	6.72	6,74
Bengkayang	6.27	6.53	6.76	6.80	7,00
Landak	7.09	7.10	7.11	7.12	7,15

Mempawah	6.63	6.82	7.03	7.04	7,17
Sanggau	6.94	6.95	7.15	7.39	7,41
Ketapang	7.04	7.26	7.31	7.46	7,48
Sintang	6.74	6.89	7.07	7.08	7,36
Kapuas Hulu	7.25	7.47	7.52	7.53	7,59
Sekadau	6.58	6.60	6.83	6.85	7,12
Melawi	6.66	6.67	6.76	6.91	7,18
Kayong Utara	5.86	6	6.01	6.02	6,21
Kubu Raya	6.81	6.82	6.83	7.00	7,02
Kota Pontianak	9.90	10.14	10.17	10.43	10,44
Kota Singkawang	7.57	7.72	7.89	7.90	8,19

Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Barat, Tahun 2022

4. Angka Harapan Lama Sekolah

Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. HLS dapat digunakan

untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang. Angka rata-rata lama sekolah menunjukkan seberapa lama penduduk mengenyam pendidikan di bangku sekolah.

Tabel 2. 32 Angka Harapan Lama Sekolah Per Kabupaten di Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2022

Kab/Kota	Angka Harapan Lama Sekolah				
	2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
KALIMANTAN BARAT	12,55	12,58	12.60	12.6 5	12,6 6
Sambas	12,52	12,60	12.61	12.6 3	12,7 0
Bengkayang	12,01	12,08	12.09	12.1 0	12,1 4
Landak	12,37	12,39	12.40	12.4 3	12,4 4
Mempawah	12,31	12,33	12.39	12.6 5	12,8 7
Sanggau	11,54	11,56	11.57	11.5 9	11,6 5
Ketapang	11,77	11,79	11.80	11.8 1	11,9 5
Sintang	11,98	12,02	12.03	12.0 4	12,2 9
Kapuas Hulu	12,03	12,04	12.05	12.0 8	12,1 4
Sekadau	11,56	11,57	11.88	11.8 9	11,9 0
Melawi	11,13	11,15	11.16	11.1 7	11,1 8

Kab/Kota	Angka Harapan Lama Sekolah				
	2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Kayong Utara	11,79	11,81	11.82	11.8 4	11,9 5
Kubu Raya	13,59	13,64	13.82	13.8 7	13,8 8
Kota Pontianak	14,81	14,99	15.00	15.0 1	15,0 2
Kota Singkawang	12,87	12,89	12.90	12.9 1	12,9 2

Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Barat, Tahun 2022

5. Angka Pendidikan yang Ditamatkan

Indikator angka pendidikan yang ditamatkan merupakan perhitungan persentase masyarakat yang menyelesaikan jenjang pendidikan tertentu pada tahun tertentu. Dengan mengetahui angka rata-rata pendidikan tertinggi yang ditamatkan, maka dapat diketahui tingkat partisipasi dan pendidikan masyarakat pada jenjang pendidikan tersebut. Sehingga dapat disusun program atau bentuk intervensi lain untuk

meningkatkan angka pendidikan yang ditamatkan pada jenjang pendidikan tertentu. Pada indikator ini, semakin tinggi tingkat pendidikan yang ditamatkan, maka semakin baik pula kualitas pendidikan penduduknya yang juga menggambarkan kemajuan suatu daerah, dalam hal ini Provinsi Kalimantan Barat. Berikut Tabel 2.30 menunjukkan angka pendidikan yang ditamatkan di Provinsi Kalimantan Barat tahun 2018-2021.

Tabel 2. 33 Angka Pendidikan yang Ditamatkan di Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2021

Status Pendidikan	Persentase Penduduk 7-24 tahun menurut Pendidikan yang ditamatkan			
	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

Tidak/ Belum Pernah Sekolah	0.62	0,89	0,71	0,97
SD/MI/Paket A	38.00	38,11	37,37	35,96
SLTP/MTs/Paket B	14.10	13,82	14,03	13,63
SMU/SMK/MA/Paket C	12.85	13,27	13,34	13,63
Diploma I s.d Universitas	4.58	4,64	5,44	6,47
Jumlah yang Masih Sekolah	69.52	69,84	70,18	69,69
Tidak Bersekolah Lagi	29.86	29,25	29,11	29,35

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat, Tahun 2021

2.3.2.2. Ketegakerjaan

1. Rasio Penduduk yang Bekerja

Rasio penduduk yang bekerja merupakan perbandingan antara jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas yang bekerja dengan angkatan kerja. Rasio ini menggambarkan hubungan antara angkatan kerja dengan kemampuan penyerapan tenaga kerja atau bisa disebut sebagai gambaran permintaan tenaga kerja.

Dari Tabel dapat diketahui bahwa jumlah penduduk yang bekerja setiap tahun fluktuatif. Berdasarkan data pada tabel tersebut pada akhir tahun 2022 dapat disimpulkan bahwa 94.89 dari angkatan kerja yang ada memperoleh pekerjaan sedangkan sisanya masih mencari kerja atau belum mendapatkan pekerjaan

Tabel 2. 34 Persentase Penduduk Bekerja Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2023

URAIAN	Tahun					
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Persentase penduduk yang bekerja (%)	95.74	95.55	94.19	94.18	94.89	94,95

Sumber: BPS Prov. Kalbar Tahun 2024

Gambar 2. 18 Persentase Penduduk Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama dan Kegiatan Formal/Informal Agustus 2020 – Agustus 2023



Sumber: BPS Prov. Kalbar Tahun 2024

Berdasarkan status pekerjaan utama dapat diperoleh gambaran tentang pekerja Formal dan pekerja Informal. Dari tujuh kategori status pekerjaan utama, pekerja Formal terdiri dari yang berstatus berusaha dibantu buruh tetap/dibayar dan kategori

buruh/karyawan. Sedangkan pekerja Informal adalah yang berstatus berusaha sendiri, bekerja dibantu buruh tidak tetap, pekerja bebas di pertanian, pekerja bebas non pertanian, dan pekerja tidak dibayar.

Tabel 2. 35 Penduduk 15 Tahun Ke Atas Yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan di Provinsi Kalimantan Barat Agustus 2018-2023

Status Pekerjaan Utama di Provinsi Kalimantan Barat Agustus 2018-Agustus 2022	Status Pekerjaan (Agustus)					
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
FORMAL						
~ Berusaha Sendiri	454,906	360,900	554,334	547,975	606,150	623,168

Status Pekerjaan Utama di Provinsi Kalimantan Barat Agustus 2018-Agustus 2022	Status Pekerjaan (Agustus)					
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
~ Berusaha dibantu Buruh Tidak Tetap/Buruh Tidak Dibayar	416,748	324,357	451,24 5	423,567	428,806	402,614
INFORMAL						
~ Berusaha dibantu Buruh Tetap	69,429	39,182	82,733	82,236	81,665	88,293
~ Buruh/Karyawan/ Pegawai	881,446	467,783	882,91 6	948,874	102983 6	1.030.46 5
~ Pekerja Bebas Pertanian	120,077	47,137	86,125	84,081	81,934	94.194
~ Pekerja Bebas Non Pertanian		44,591	90,301	114,656	85,707	100,248
~ Pekerja Keluarga/tak Dibayar	404,275	326,350	462,72 8	434,110	381,10 1	436.263
Total	2,346,88 1	1,610,30 0	2,610,38 2	2,635,4 96	2,695,2 00	2.775.24 5

Sumber: Kalbar Dalam Angka Tahun 2024

2.3.3. Daya Saing Fasilitas/Infrastruktur di Daerah

Sarana dan prasarana wilayah adalah fasilitas dan infrastruktur yang dibangun dan dikelola oleh pemerintah daerah untuk mendukung kegiatan masyarakat dan pembangunan daerah. Sarana dan prasarana

wilayah meliputi bidang pekerjaan umum, perumahan, perhubungan, komunikasi dan informatika, energi dan sumberdaya mineral, pariwisata, penataan ruang dan lingkungan hidup. Sarana dan prasarana wilayah sangat

penting untuk meningkatkan potensi dan kesejahteraan daerah. Dengan adanya sarana dan prasarana wilayah yang memadai, masyarakat dapat melakukan aktivitas dengan lancar, nyaman, dan aman. Sarana dan prasarana wilayah juga dapat menarik investasi, pariwisata, dan kerjasama antar daerah. Selain itu, sarana dan prasarana wilayah juga berperan dalam mencegah kesenjangan dan ketimpangan antar sektor dan antar wilayah.

Daya saing fasilitas infrastruktur di Kalimantan Barat dapat dilihat dari indeks infrastruktur Kalimantan Barat. Indeks infrastruktur merupakan gabungan dari beberapa sektor atau bidang, baik itu perumahan dan permukiman, Bina Marga, Sumber Daya Air maupun energi listrik. Indeks infrastruktur merupakan salah cermin dari pada kondisi daya saing daerah, semakin daya saing tinggi maka kondisi infrastruktur akan semakin baik, namun apabila daya saing rendah maka kondisi infrastrukturnya semakin terbatas.

Kondisi infrastruktur Kalimantan Barat pada dasarnya masih relatif terbatas, baik di sektor jalan dan jembatan, air bersih, sanitasi, energi listrik, sumber daya air, serta infrastruktur pendukung lainnya. Berdasarkan hasil kajian dan penelitian Asia Competitiveness Institute Lee Kuan Yew School of Public Policy National University of Singapore, bahwa Daya Saing Kualitas Hidup dan Pembangunan Infrastruktur Provinsi Kalimantan Barat pada tahun 2023 menduduki peringkat 31 dari 34 Provinsi di Indonesia. Kondisi tersebut disebabkan oleh terbatasnya penyediaan infrastruktur, yang mana akan berpengaruh dalam upaya penyelesaian beberapa permasalahan, baik itu penurunan angka kemiskinan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, peningkatan kesejahteraan masyarakat serta peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur. Untuk mengetahui kondisi indeks infrastruktur di Kalimantan Barat, berikut capaian indeks infrastruktur Kalimantan Barat dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2023:

Tabel 2. 36 Indeks Infrastruktur di Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2023

NO	INDIKATOR KINERJA	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	Indeks Infrastruktur	56,6 1	67,4 3	67,28	67,00	69,59	68,86
1	Rasio Elektrifikasi	83,0 0	98,6 8	92,00	93,00	99,58	99,86

NO	INDIKATOR KINERJA	2018	2019	2020	2021	2022	2023
2	Persentase Panjang Jalan Provinsi Kondisi Mantap	49,7 1	56,8 1	60,05	66,94	72,28	61,60
3	Persentase irigasi Provinsi dalam kondisi baik	46,7 6	53,7 9	53,68	55,84	56,90	63,63
4	Persentase rumah tangga berakses air minum	55,2 0	66,6 2	65,32	68,79	68,79	68,79
5	Persentase rumah tangga berakses sanitasi	48,3 8	61,2 3	63,79	50,42	50,42	50,42

Sumber: Bappeda Prov. Kalbar Tahun 2024

2.3.3.1. Energi dan Kelistrikan

Sistem tenaga listrik di Kalimantan Barat terdiri dari satu sistem interkoneksi 150 kV Khatulistiwa dan beberapa sistem isolated. Sistem interkoneksi 150 kV meliputi Kota Pontianak, Kota Singkawang, Kabupaten Kubu Raya, Kabupaten Mempawah, Kabupaten Sambas, Kabupaten Bengkayang, Kabupaten Landak hingga sebagian Kabupaten Sanggau dan Sekadau. Sistem isolated terdiri atas Sistem Sintang, Sistem Nanga Pinoh (Kab. Melawi), Sistem Putussibau (Kab. Kapuas Hulu), Sistem Ketapang (Kab. Ketapang dan Kab. Kayong Utara), dan sistem isolated tersebar lainnya. Sistem Khatulistiwa saat ini terinterkoneksi dengan Sarawak melalui transmisi 275 kV Bengkayang (Kalimantan Barat) – Mambong (Sarawak). Interkoneksi Kalbar-Sarawak ini berdampak pada penurunan biaya pokok produksi dengan menggunakan pembangkit BBM dan meningkatkan keandalan Sistem

Khatulistiwa dalam upaya memenuhi kebutuhan tenaga listrik sampai pembangunan proyek pembangkit non BBM di Kalimantan Barat selesai. Suplai daya sebesar 230 MW dari Sarawak beroperasi 100 MW pada saat beban dasar dan tambahan 130 MW pada saat beban puncak. Sebagai antisipasi kekurangan daya jangka pendek telah dibangun Mobile Power Plant (MPP) 3x100 MW Pontianak. MPP dapat direlokasi jika daya dari pembangkit pada Sistem Khatulistiwa sudah mencukupi. PLTU Parit Baru (FTP2) 2x50 MW juga turut berkontribusi terhadap perkuatan suplai daya pembangkit di Sistem Khatulistiwa

Untuk sistem isolated kecil tersebar, sebagian besar pasokan listriknya masih bersumber dari pembangkit berbahan bakar minyak dengan jam operasi pelayanan masih dibawah 24 jam. Sistem-sistem ini sebagian besar kedepannya akan terinterkoneksi

**“Kalimantan Barat Maju, Sejahtera,
dan Berkelanjutan”**

dengan Sistem Khatulistiwa. Pengembangan transmisi di Kalimantan Barat akan diarahkan ke Selatan dan ke Timur dengan jaringan 150 kV. Sistem Khatulistiwa direncanakan akan terinterkoneksi dengan Sistem Kalseltengtim pada tahun 2023 melalui Sukamara

(Kalimantan Tengah), sehingga terbentuk sistem interkoneksi Kalimantan. Komposisi pembangkit eksisting PLN, excess dan juga IPP di sistem tenaga listrik Kalimantan Barat sampai tahun 2022.

Gambar 2. 19 Pengembangan Sistem Tenaga Listrik di Provinsi Kalimantan Barat

**“Kalimantan Barat Maju, Sejahtera,
dan Berkelanjutan”**



Tabel 2. 37 Tabel Pembangkit Listrik Eksisting

Pembangkit	Sistem	Jumlah Unit	Total Kapasitas (MW)	Daya Mampu Netto (MW)	DMP Tertinggi 1 tahun Terakhir (MW)
PLN					
PLTD	Khatulistiwa	18	90,0	59,0	59,0
	Sanggau	5	6,0	4,2	4,2
	Sekadau	7	7,7	4,9	4,9
	Sintang	11	12,9	7,5	7,5
	Putussibau	11	13,0	8,8	8,8
	Ketapang	12	23,0	14,3	14,3
	Balai Karangan	5	4,0	2,0	2,0
	Nanga Tayap	3	1,2	0,1	0,1
	Air Upas	3	2,8	2,1	2,1
	Kota Baru	1	0,3	0,3	0,3
	Semitau	9	6,2	3,7	3,7
	Tepuai	3	4,0	3,0	3,0
	Badau	5	3,5	2,1	2,1

Pembangkit	Sistem	Jumlah Unit	Total Kapasitas (MW)	Daya Mampu Netto (MW)	DMP Tertinggi 1 tahun Terakhir (MW)
	Padang Tikar	11	5,9	2,7	2,7
PLTG	Khatulistiwa	1	34,0	30,0	30,0
PLTU	Khatulistiwa	2	100,0	80,0	80,0
	Sanggau	2	14,0	12,6	12,6
	Sintang	3	21,0	21,0	21,0
	Ketapang	2	20,0	20,0	20,0
Jumlah PLN		114	369,5	278,3	278,3
IPP (Independent Power Producer)					
PLTBm	Khatulistiwa	1	15,0	10,0	10,0
PLTG	Khatulistiwa	2	100,0	100,0	100,0
PLTU	Khatulistiwa	1	100,0	100,0	100,0
Jumlah IPP		4	215,0	210,0	210,0
Excess					
PLTM	Balai Karangan	1	1,2	1,2	1,2

Pembangkit	Sistem	Jumlah Unit	Total Kapasitas (MW)	Daya Mampu Netto (MW)	DMP Tertinggi 1 tahun Terakhir (MW)
	Sajingan	1	0,8	0,8	0,8
	Badau	1	0,4	0,4	0,4
PLTBm	Khatulistiwa	1	7,0	5,0	5,0
	Ketapang	1	7,0	5,0	5,0
Jumlah Excess		5	16,4	12,4	12,4
Import					
PLTA	Khatulistiwa	1	230	140	140
Jumlah Impor		1	230	140	140
Sewa					
PLTD	Sanggau	12	12,0	12,0	12,0
	Sekadau	8	8,0		
	Sintang	9	9,0	9,0	9,0
	Nanga Pinoh	8	8,0	8,0	8,0
	Ketapang	10	10,0	10,0	10,0
	Balai Karangan	2	2,0	2,0	2,5

Pembangkit	Sistem	Jumlah Unit	Total Kapasitas (MW)	Daya Mampu Netto (MW)	DMP Tertinggi 1 tahun Terakhir (MW)
	Air Upas	4	3,5	3,5	3,5
	Nanga Tayap	6	6,0	6,0	6,0
	Kota Baru	2	1,0	1,0	1,5
Jumlah Sewa		61,0	59,5	51,5	52,5
JUMLAH TOTAL		185,0	890,4	692,2	693,2

Sumber: RUPTL 2021 -2030

Rasio Elektrifikasi. Rasio elektrifikasi (RE) merupakan perbandingan antara jumlah rumah tangga yang memiliki akses terhadap listrik, baik yang disalurkan dari PT. Perusahaan Listrik Negara (PLN) maupun dari sumber lain, dengan jumlah rumah tangga pada satuan wilayah tertentu, dalam hal ini Provinsi Kalimantan Barat. Rasio

elektrifikasi total Kalimantan Barat pada akhir tahun 2022 sebesar 99,58 persen (RE PLN: 93,82), sedangkan RE total Kalimantan Barat pada akhir tahun 2021 sebesar 99,12 (RE PLN: 93,04. Rasio elektrifikasi Kalimantan Barat berdasarkan kabupaten/kota dirinci lebih lanjut dalam tabel berikut:

Tabel 2. 38 Rasio Elektrifikasi (RE) di Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2022

NO.	KAB/ KOTA	2018		2019		2020		2021		2022		2023	
		RE PLN	RE TOT AL	RE PLN	RE TOT AL	RE PLN	RE TOT AL	RE PLN	RE TOT AL	RE PLN	RE TOT AL	RE PLN	RE TOT AL
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)		
1	Mempawah	100,00	100,00	100,00	100,00	100	100	99,37	99,99	99,39	99,99		

NO.	KAB/ KOTA	2018		2019		2020		2021		2022		2023	
		RE PLN	RE TOT AL	RE PLN	RE TOT AL	RE PLN	RE TOT AL	RE PLN	RE TOT AL	RE PLN	RE TOT AL	RE PLN	RE TOT AL
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)		
2	Landak	51, 81	61, 31	56, 07	65, 04	89. 65	100	88. 85	99. 99	89, 74	99. 99		
3	Kubu Raya	100 ,00	100 ,00	100 ,00	100 ,00	100	100	99. 11	99. 99	98. 99	99. 99		
4	Pontiana k	100 ,00	100 ,00	100 ,00	100 ,00	100	100	99. 98	99. 99	99. 88	99. 99		
5	Sambas	85, 49	88, 34	100 ,00	100 ,00	100	100	98. 49	99. 99	98. 12	99. 99		
6	Bengkay ang	65, 88	77, 11	78, 04	89, 57	87. 91	97. 82	90. 09	99. 57	91. 09	99. 99		
7	Singkaw ang	100 ,00	100 ,00	100 ,00	100 ,00	100	100	99. 12	99. 99	98. 87	99. 99		
8	Sanggau	65, 03	80, 83	73, 27	89, 02	82. 35	95. 81	83. 85	96. 93	86. 38	98. 51		
9	Sintang	62, 84	76, 09	70, 21	83, 17	83. 97	97. 87	84. 33	97. 52	86. 67	99. 13		
10	Kapuas Hulu	63, 04	74, 16	72, 84	83, 39	88. 12	99. 68	89. 10	99. 99	89. 67	99. 99		
11	Sekadau	53, 97	67, 00	68, 65	82, 78	81. 24	93. 78	84. 32	96. 51	86. 69	98. 20		
12	Melawi	60, 29	72, 44	67, 56	79, 68	80. 86	97. 03	83. 77	99. 24	85. 09	99. 99		

NO.	KAB/ KOTA	2018		2019		2020		2021		2022		2023	
		RE PLN	RE TOT AL	RE PLN	RE TOT AL	RE PLN	RE TOT AL	RE PLN	RE TOT AL	RE PLN	RE TOT AL	RE PLN	RE TOT AL
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)		
13	Ketapang	74, 17	88, 00	77, 64	89, 85	85. 41	95. 46	86. 73	96. 27	89. 31	98. 43		
14	Kayong Utara	74, 37	77, 14	85, 54	88, 24	96. 15	98. 43	97. 75	99. 96	97. 87	99. 99		
Kalimantan Barat		87, 21	87, 22	91, 17	98, 68	93, 07	99, 49	93, 04	99, 12	93, 82	99, 58		99,8 4

Sumber: Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Barat, 2022

Persentase Desa dan Rumah Tangga yang Menggunakan Listrik. Jika pada tahun 2022 Rasio elektrifikasi Kalbar telah mencapai 99,58 %, pada Tahun 2022 jumlah desa/kelurahan yang sudah berlistrik PLN di Provinsi Kalimantan Barat sebanyak 1706 desa/kelurahan atau mencapai 79.53%. Sedangkan desa berlistrik non-PLN sebanyak 350 Desa atau sebesar 16,32%, dan masih terdapat desa belum berlistrik sebanyak 86

desa atau sebesar 4,15% % yang banyak tersebar di beberapa kabupaten pedalaman, contohnya di Kabupaten Sintang. Kapuas Hulu dan Ketapang. Berdasarkan hal tersebut Pemerintah, pemerintah daerah dan swadaya masyarakat cukup berperan dalam peningkatan persentase Rumah Tangga yang menggunakan listrik selain PT. PLN. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 39 Status Desa/Kelurahan Yang Berlistrik di Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2022

KABUPATE N / KOTA	JUMLAH DESA/ KEL	BERLISTR IK PLN	BERLIST RIK NONPLN/ PEMDA/ ESDM/ KOMUNA L	LTSH E	BERLISTR IK NONPLN SWADAY A	BELUM BERLISTRI K/ GELAP GULITA
Kota Pontianak	29	29	0	0	0	0
Kubu Raya	123	117	4	0	2	0
Mempawah	67	67	0	0	0	0
Landak	156	135	7	7	0	7
Kota Singkawang	26	26	0	0	0	0
Sambas	195	195	0	0	0	0
Bengkayang	124	98	15	0	4	7
Sanggau	169	157	3	0	1	8
Sekadau	94	77	0	0	5	12
Melawi	169	109	3	14	16	27
Sintang	406	225	64	21	81	15
Kapuas Hulu	282	226	19	2	30	5
Ketapang	262	207	33	0	15	7

Kayong Utara	43	38	1	0	3	1
TOTAL	2.145	1.706	149	44	157	89
PERSENTASE TOTAL		79,53	6,95	2,05	7,32	4,15
PERSENTASE SUMBER LISTRIK PLN & NON PLN		79,53	16,32			4,15

Sumber: Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Barat, 2023 (Data LISDES Update 14 Maret 2023)

Berdasarkan sumber penerangan Rumah tangga, maka masih terdapat Rumah tangga yang belum menggunakan listrik untuk penerangannya, dimana Kabupaten Landak, Melawi dan Sintang masih diatas 5 % menggunakan penerangan non listrik.

Tabel 2. 40 Tabel Distribusi Persentase Rumah Tangga Menurut Kabupaten/Kota dan Sumber Penerangan Tahun 2023

NO	KABUPATEN/ KOTA	LISTRIK PLN	LISTRIK NON-PLN	BUKAN LISTRIK	JUMLAH
1	Sambas	99,34	0,48	0,19	100,00
2	Bengkayang	92,97	4,28	2,75	100,00
3	Landak	90,35	4,18	5,47	100,00
4	Mempawah	99,95	0,05	-	100,00
5	Sanggau	90,43	8,05	1,52	100,00
6	Ketapang	88,50	9,14	2,37	100,00
7	Sintang	71,68	23,00	5,32	100,00
8	Kapuas Hulu	89,82	7,08	3,10	100,00
9	Sekadau	74,86	20,82	4,31	100,00

NO	KABUPATEN/ KOTA	LISTRIK PLN	LISTRIK NON-PLN	BUKAN LISTRIK	JUMLAH
10	Melawi	84,81	8,77	6,43	100,00
11	Kayong Utara	87,86	11,42	0,72	100,00
12	Kubu Raya	93,78	6,22	-	100,00
13	Pontianak	100,00	-	-	100,00
14	Singkawang	99,21	0,72	0,07	100,00
Kalimantan Barat		91,19	6,79	2,02	100,00

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Barat, diolah dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (KDA 2023)

2.3.3.2. Infrastruktur Jalan

Jalan merupakan salah satu instrumen penunjang dalam proses pembangunan, meningkatkan ekonomi rakyat, dan yang paling utama sebagai Jalur Transportasi bagi masyarakat, dan kondisi jalan yang ada sangat mempengaruhi itu semua. Kondisi jalan Provinsi dari tahun 2018 hingga tahun 2022 dalam kondisi mantap terus mengalami perbaikan dengan capaian dari 49,71% menjadi 72,82 %, sedang capaian tahun 2023 mengalami penurunan menjadi 61,60%.

Penurunan tersebut disebabkan adanya perubahan kriteria dalam penilaian kondisi jalan mantap. Berdasarkan hasil verifikasi dari Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Kalimantan Barat, kondisi jalan dengan jenis permukaan kerikil yang sebelumnya masuk katagori mantap, mulai tahun 2023, masuk katagori tidak mantap, sehingga hal tersebut berdampak pada penurunan capaian indikator program penyelenggaraan jalan.

Tabel 2. 41 Perkembangan Kondisi Jalan Provinsi di Kalimantan Barat Tahun 2017-2023

N o	Indikator	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)

1	Panjang Jalan Provinsi Dalam Kondisi Mantap	Kilometer	1.282,18	762,98	871,847	921,72	1027,50	1,109.35	942,74
2	Panjang Jalan Provinsi	Kilometer	1.534,75	1.534,75	1,534,75	1.534,75	1,534,75	1,534,75	1,530,40
3	Persentase Jalan Provinsi Dalam Kondisi Mantap	Persen	83,54	49,71	56,81	60,06	66,95	72,28	61,60

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Barat, 2024

Panjang jalan yang berstatus jalan provinsi di wilayah Provinsi Kalimantan Barat pada tahun 2023 mencapai 1.530,40 km. Adapun untuk jenis permukaannya, jalan yang sudah di aspal mencapai 962,70 km (62,91 %) jalan yang jenis permukaannya beton mencapai 20,945 km (1,37%), dan jalan yang masih kerikil/ tanah mencapai 289,835 km (18,94%), untuk jalan yang jenis permukaannya masih tanah dan belum tembus mencapai 256,92

km (16,79%) sedangkan jalan yang dalam kondisi baik mencapai 727,04 km (47,51%), jalan dalam kondisi sedang mencapai 215,70 km (14,09%), jalan dalam kondisi rusak ringan mencapai 582,60 km (38,07%) dan jalan dalam kondisi rusak berat mencapai 5,06 km (0,33%). Kemantapan jalan provinsi pada tahun 2023 mencapai 61,60 dan jalan tidak mantap provinsi mencapai 38,40. Berikut tabel jenis dan kondisi jalan di Kalimantan Barat Tahun 2023:

Tabel 2. 42 Jenis Permukaan Jalan Tahun 2023

N o.	Jenis permukaan	Panjang (km)	Persentase
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Aspal	962,70	62,91

N o.	Jenis permukaan	Panjang (km)	Persentase
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>
2	Beton	20,945	1,37
3	Kerikil	289,835	18,94
4	Tanah	256,92	16,79
	Total	1.530,40	100,0

Sumber: Kalbar Dalam Angka Tahun 2024

2.3.3.3. Irigasi

Persentase irigasi provinsi yang berada dalam kondisi baik pada tahun 2021 adalah sebesar 55,84 sedangkan pada tahun 2022 adalah sebesar 56,90. Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 14 /PRT/M/2015 Tentang Kriteria dan Penetapan Status Daerah Irigasi, jenis dan kriteria status Daerah Irigasi diklasifikasikan berdasarkan jenisnya, Daerah Irigasi terdiri dari:

- a. Daerah Irigasi Permukaan;
- b. Daerah Irigasi Air Bawah Tanah;
- c. Daerah Irigasi Rawa;
- d. Daerah Irigasi Pompa; dan
- e. Daerah Irigasi Tambak.

Selanjutnya berdasarkan kewenangannya, kriteria penetapan status Daerah Irigasi, yakni sebagai berikut:

- a. Kewenangan Pemerintah Pusat
 - Luasan > 3.000 Ha;
 - Lintas Negara;
 - Lintas Provinsi.
- b. Kewenangan Pemerintah Provinsi
 - Luasan 1.000 - 3.000 Ha;
 - Lintas Kabupaten/Kota.
- c. Kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota
 - Luasan < 1.000 Ha

Daerah Irigasi Provinsi. Luas Daerah Irigasi kewenangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat berdasarkan jenisnya, sebagaimana tercantum pada Tabel berikut:

Tabel 2. 43 Kondisi Daerah Irigasi Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2023

No.	Jenis Daerah Irigasi	Jumlah Daerah Irigasi	Luasan (Ha)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Daerah Irigasi Permukaan (D.I.)	12	6.765
2.	Daerah Irigasi Rawa (D.I.R.)	35	54.520
3.	Daerah Irigasi Tambak (D.I.T.)	1	1.350
Total		48	62.635

Sumber: Dinas PUPR Prov. Kalbar, Tahun 20224

**“Kalimantan Barat Maju, Sejahtera,
dan Berkelanjutan”**

Kondisi irigasi kewenangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat per Tahun 2023 berdasarkan jenisnya dapat dilihat di tabel berikut.

Tabel 2. 44 Kondisi Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2023

No.	Jenis Daerah Irigasi	Luas Areal (Ha)	Kondisi per Tahun 2023							
			Baik		Rusak Ringan		Rusak Sedang		Rusak Berat	
			(Ha)	(%)	(Ha)	(%)	(Ha)	(%)	(Ha)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1.	Daerah Irigasi Permukaan (D.I.)	6.765,00	2.654,14	39,23	1.361,00	20,12	329,00	4,86	2.420,86	35,79
2.	Daerah Irigasi Rawa (D.I.R.)	54.520,00	33.518,32	61,48	5.688,69	10,43	5.750,69	10,56	9.562,30	17,54
3.	Daerah Irigasi Tambak (D.I.T.)	1.350,00	675,00	50,00	202,50	15,00	67,50	5,00	405,00	30,00
Total		62.635	36.847,46	58,83	7.252,19	11,58	6.147,19	9,81	12.388,16	19,78

Sumber: Dinas PUPR Prov. Kalbar, Tahun 2024.

Catatan:

Kondisi baik: Tingkat kerusakan < 10

Kondisi rusak ringan: Tingkat kerusakan 10 – 20

Kondisi rusak sedang: Tingkat kerusakan 21 – 40

Kondisi rusak berat: Tingkat kerusakan > 40

Persentase irigasi provinsi dalam kondisi baik tahun 2023 sebesar 58,83%. Pengelolaan jaringan daerah Irigasi rawa, daerah jaringan irigasi permukaan dan daerah jaringan irigasi tambak di Kalimantan Barat mempunyai peranan yang strategis, mengingat jaringan

tersebut berperan dalam rangka untuk mendukung ketahanan pangan di Pulau Kalimantan, khususnya Kalimantan Barat, Secara umum luas jaringan irigasi pada tahun 2023 mencapai 62.635 ha dengan kondisi baik mencapai 36.847,46 ha (58,83%), kondisi rusak ringan mencapai 7.252,19 ha

(11,58%), kondisi rusak sedang mencapai 6.147,19 ha (9,81%) dan kondisi rusak berat mencapai 12.388,16 ha (19,78%).

Tabel 2. 45 Kondisi Irigasi Rawa di Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2023

No	Kondisi Daerah Irigasi Rawa	Capaian 2018 (Ha)	Capaian 2019 (Ha)	Capaian 2020 (Ha)	Capaian 2021 (Ha)	Capaian 2022 (Ha)	Capaian 2023 (Ha)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
1	Baik	28.784	30.407	30.018	31.325	32.475	33.518,32
2	Rusak Ringan	6.795	6.795	6.274	5.689	5.689	5.688,69
3	Rusak Sedang	6.860	6.860	6.800	6.620	6.518	5.750,69
4	Rusak Berat	12.082	10.459	11.428	10.887	9.838	9.563,30
	Jumlah	54.521	54.520	54.520	54.520	54.520	54.520

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2024

Luas jaringan irigasi rawa pada tahun 2023 mencapai 54.520 ha, dengan kondisi baik mencapai 33.518,32 ha, kondisi rusak ringan

mencapai 5.688,69ha, kondisi rusak sedang mencapai 5.750,69 ha dan kondisi rusak berat mencapai 9.563,30 ha.

Tabel 2. 46 Kondisi Irigasi Permukaan di Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2023

No	Kondisi Daerah Irigasi Permukaan	Capaian 2018 (Ha)	Capaian 2019 (Ha)	Capaian 2020 (Ha)	Capaian 2021 (Ha)	Capaian 2022 (Ha)	Capaian 2023 (Ha)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Baik	2.433	2.614	2.480	2.492,14	2.492,14	2.564,14
2	Rusak Ringan	2.404	2.404	1.397	1.397	1.397	1.361,00
3	Rusak Sedang	459	357	449	449	449	329,00
4	Rusak Berat	1.469	1.391	2.439	2.426,86	2.426,86	2.420,86
	Jumlah	6.765	6.765	6.765	6.765	6.765	6.765

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2024

Sedangkan luas jaringan daerah Irigasi Permukaan pada tahun 2023 mencapai 6.765 ha, dengan kondisi baik mencapai 2.564,14 ha, kondisi rusak ringan mencapai 1.361,00 ha, kondisi rusak sedang mencapai 329,00 ha dan kondisi rusak berat mencapai 2.420,86

ha dan untuk luas jaringan daerah irigasi tambak pada tahun 2023 mencapai 1.350 ha, dengan kondisi baik mencapai 675 ha, kondisi rusak ringan mencapai 202,50 ha, kondisi rusak sedang mencapai 67,50 ha dan kondisi rusak berat mencapai 405 ha.

Tabel 2. 47 Kondisi Irigasi Tambak di Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2023

No	Kondisi Daerah Irigasi Tambak	Capaian 2018 (Ha)	Capaian 2019 (Ha)	Capaian 2020 (Ha)	Capaian 2021 (Ha)	Capaian 2022 (Ha)	Capaian 2023 (Ha)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Baik	675	675	675	675	675	675

2	Rusak Ringan	203	202.5	203	202,50	202,50	202,50
3	Rusak Sedang	68	67.5	68	67,50	67,50	67,50
4	Rusak Berat	405	405	405	405	405	405
	Jumlah	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2024

2.3.3.4. Air Bersih

Air bersih merupakan salah satu kebutuhan yang sangat mendasar bagi kehidupan masyarakat baik untuk minum, maupun mencuci atau mandi serta untuk keperluan lain nya. Kebutuhan air bersih di Kalimantan Barat pada umumnya masih bersumber pada air sungai, air danau, dan air hujan. Kebutuhan air bersih di Kalimantan Barat pada umumnya disalurkan dan dikelola oleh

PDAM, maupun oleh masyarakat sendiri. Pelayanan air bersih kepada masyarakat di Kalimantan Barat belum sesuai dengan yang diharapkan oleh masyarakat, karena tidak semua wilayah di Kalbar dapat diakses oleh air bersih. Cakupan pelayanan air bersih di Kalimantan Barat pada tahun 2022 mencapai 55,28.

Tabel 2. 48 Data Rumah Tangga Pengguna Air Bersih di Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2022

No	Kabupaten / Kota	Total Jumlah Rumah Tangga (KK)	Σ JUMLAH RUMAH TANGGA PENGGUNA AIR BERSIH (PERPIPAAN DAN NON PERPIPAAN)	PERSENTASE AIR MINUM
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Sambas	125,981	74,971	59.51
2	Mempawah	87,545	55,789	63.73
3	Sanggau	144,195	73,545	51.00
4	Ketapang	182,934	128,045	70.00
5	Sintang	133,735	63,418	47.42
6	Kapuas Hulu	85,656	48,592	56.73
7	Bengkayang	81,651	50,184	61.46
8	Landak	101,071	22,412	22.17
9	Sekadau	52,413	38,861	74.14
10	Melawi	66,126	17,034	25.76
11	Kayong Utara	28,676	17,722	61.80
12	Kubu Raya	178,229	56,191	31.53
13	Kota Pontianak	160,713	143,166	89.08
14	Kota Singkawang	47,975	23,591	49.17

No	Kabupaten / Kota	Total Jumlah Rumah Tangga (KK)	Σ JUMLAH RUMAH TANGGA PENGGUNA AIR BERSIH (PERPIPAAN DAN NON PERPIPAAN)	PERSENTASE AIR MINUM
	JUMLAH	1,428,925	789,930	55.28

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2022

Selanjutnya, dilihat dari pelayanan perpipaan oleh PDAM di Kalimantan Barat tahun 2023, hampir seluruh wilayah kabupaten dan Kota kecuali Kota Pontianak yang telah mencapai 86,28% pelayanan perpipaan air bersih, kabupaten dan kota lainnya masih dibawah 30% cakupan pelayanan perpipaannya.

Tabel 2. 49 Cakupan Pelayanan Perpipaan Kabupaten/Kota se-Kalimantan Barat Tahun 2023

No	Nama BUMD Air Minum	Jumlah Penduduk Terlayani	Jumlah Penduduk	Persentase Cakupan	Wilayah Layanan
1	Perumdam Tirta Khatulistiwa Kota Pontianak	577.914	669.795	86,28	Kota Pontianak
2	Perumdam Tirta Senentang Kabupaten Sintang	36.594	433.614	8,44	Kabupaten Sintang
3	Perumdam Gunung Poteng Kota Singkawang	69.893	240.327	29,08	Kota Singkawang
4	Perumdam Tirta Raya Kabupaten Kubu Raya	59.828	611.223	9,79	Kabupaten Kubu Raya
5	Perumdam Tirta Pancur Aji Kabupaten Sanggau	46.547	492.629	9,45	Kabupaten Sanggau
6	Perumdam Tirta Muare Ulakan Kabupaten Sambas	37.402	640.838	5,84	Kabupaten Sambas

No	Nama BUMD Air Minum	Jumlah Penduduk Terlayani	Jumlah Penduduk	Persentase Cakupan	Wilayah Layanan
7	Perumdam Tirta Pawan Kabupaten Ketapang	48.495	575.817	8,42	Kabupaten Ketapang
8	Perumdam Tirta Bengkayang Kab. Bengkayang	36.072	290.588	12,41	Kab. Bengkayang
9	Perumdam Sirin Meragun Kabupaten Sekadau	29.533	217.468	13,58	Kabupaten Sekadau
10	Perumdam Tirta Melawi Kabupaten Melawi	30.505	209.958	14,53	Kabupaten Melawi
11	Perumdam Tirta Uncak Kapuas Kab. Kapuas Hulu	56.646	266.651	21,24	Kab. Kapuas Hulu
12	Perumdam Tirta Landak Kabuapten Landak	21.125	405.396	5,21	Kabupaten Landak
13	Perumdam Tirta Galaherang Kabupaten Mempawah	20.608	308.771	6,67	Kab. Mempawah
A	Jumlah Jiwa dilayani BUMD Air Minum	1.071.162			
B	Jumlah Penduduk Administratif Provinsi (BPS)	5.290.508	5.363.075		
C	Presentase cakupan (A/B)	20,25			

Berdasarkan Susenas 2023, Rumah tangga di Kalimantan Barat menggunakan sumber air minum yang beragam, baik di setiap

Kabupaten atau Kota, baik air yang berasal dari ledeng, Pompa Air dari sumber air, Dalam Kemasan baik gallon atau refill, Sumur

Terlindung, Sumur Tak Terlindung, Mata Air Terlindung, Mata Air Tak Terlindung, Air Permukaan, Air Hujan dan air Lainnya. Rumah Tangga di Kabupaten Sambas, Kabupaten Kubu Raya, Kabupaten Mempawah, kabupaten kayong Utara dan kota Pontianak lebih dominan menggunakan air hujan sebagai sumber air minum (diatas 60 persen). Penggunaan air ledeng (Piped water) paling tinggi di kabupaten Bengkayang, Kapuas Hulu dan Kota

Singkawang yaitu diatas 10%. Secara kumulatif, persentase rata-rata rumah tangga di Kalimantan Barat yang menggunakan air hujan sebesar 39,79%, air dalam kemasan sebesar 24,54%, Mata air terlindungi dan tidak terlindungi sebesar 13,94%, air sumur terlindungi dan tidak terlindungi sebesar 7,43%, air permukaan sebesar 6,34%, air pompa sebesar 4,21%, air ledeng adalah sebesar 3,68%, dan lainnya sebesar 0,01%.

Tabel 2. 50 Distribusi Persentase Rumah Tangga Menurut Kabupaten/Kota dan Sumber Air Minum Tahun 2022

Kabupaten/Kota	Leding 1	Pompa	Air Dalam Kemasan ²	Sumur Terlindung	Sumur Tak Terlindung	Mata Air Terlindung	Mata Air Tak Terlindung	Air Permukaan	Air Hujan	Lainnya	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Sambas	0,16	0,00	3,19	0,67	0,71	3,28	1,60	0,00	90,39	0,00	100,00
Bengkayang	21,34	5,92	5,54	8,20	5,13	23,39	8,00	1,79	20,70	0,00	100,00
Landak	0,00	6,21	22,98	2,54	0,44	16,00	20,78	4,62	26,42	0,00	100,00
Mempawah	0,00	5,10	13,41	1,24	0,76	4,66	6,05	1,18	67,60	0,00	100,00
Sanggau	1,51	6,27	34,31	3,15	1,16	28,70	4,52	4,34	16,05	0,00	100,00
Ketapang	0,56	9,43	26,86	21,85	13,69	6,52	4,91	5,38	10,81	0,00	100,00
Sintang	7,26	5,24	42,67	6,10	3,03	8,90	3,45	13,95	9,38	0,00	100,00

“Kalimantan Barat Maju, Sejahtera, dan Berkelanjutan”

Kabupaten/Kota	Leding 1	Pompa	Air Dalam Kemasan ²	Sumur Terlindung	Sumur Tak Terlindung	Mata Air Terlindung	Mata Air Tak Terlindung	Air Permukaan	Air Hujan	Lainnya	Jumlah
Kapuas Hulu	15,96	1,17	32,98	0,84	1,01	22,40	5,57	8,51	11,56	0,00	100,00
Sekadau	7,76	13,41	18,29	3,97	5,86	1,93	1,71	33,44	13,47	0,16	100,00
Melawi	3,93	4,86	30,85	7,89	1,19	1,54	7,73	39,08	2,92	0,00	100,00
Kayong Utara	0,00	0,00	7,10	0,17	0,00	30,43	0,00	0,00	62,30	0,00	100,00
Kubu Raya	0,00	0,13	10,65	0,00	0,00	1,61	0,00	0,22	87,38	0,00	100,00
Pontianak	0,65	0,12	39,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,17	0,00	100,00
Singkawang	10,93	2,86	36,46	1,69	0,52	4,48	3,29	0,00	39,77	0,00	100,00
Kalimantan Barat	3,86	4,12	24,54	4,70	2,73	9,45	4,47	6,34	39,79	0,01	100,00

Catatan/ Note:

1. Leding meteran dan leding eceran

2. Air kemasan bermerek dan air isi ulang

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Barat, diolah dari Survei Sosial Ekonomi Nasional, (KDA 2023)

Berdasarkan survei sosial ekonomi nasional tahun 2022, Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Layanan Sumber Air Minum Layak adalah sebesar 80,43 % dan menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan dalam 5 tahun terakhir dari 72,88% di tahun 2018. Namun demikian masih

menjadi perhatian utama untuk mencapai target 100% pada tahun 2030 sesuai target pencapaian SDG's, terutama untuk Kabupaten Melawi (48,52%), Sekadau (51,67%), Landak (65,11%), Ketapang (67,49%) dan Kabupaten Sintang (74,84%).

Tabel 2. 51 Persentase Rumah Tangga Yang Memiliki Akses Terhadap Layanan Sumber Air Minum Layak Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2018-2022

Kabupaten/Kota	2018	2019	2020	2021	2022
Sambas	94,95	93,90	95,49	95,60	97,09
Bengkayang	59,74	78,54	77,50	74,51	82,58
Landak	60,30	55,09	71,37	65,54	65,11
Mempawah	90,20	88,88	90,75	88,86	85,21
Sanggau	69,98	75,68	74,76	81,68	80,33
Ketapang	48,74	56,72	58,71	57,25	67,49
Sintang	47,40	55,56	56,09	52,13	74,84
Kapuas Hulu	62,50	78,97	81,38	77,00	68,56
Sekadau	53,07	52,39	56,34	48,85	51,67
Melawi	35,72	45,84	46,21	66,05	48,52
Kayong Utara	85,50	94,26	98,62	98,84	96,73
Kubu Raya	96,42	96,02	96,45	96,76	94,64
Kota Pontianak	96,68	96,83	95,19	96,30	97,22

**“Kalimantan Barat Maju, Sejahtera,
dan Berkelanjutan”**

Kota Singkawang	84,10	85,76	91,06	89,96	89,75
Kalimantan Barat	72,88	77,07	78,83	78,76	80,43

Catatan: Data 2018-2022 merupakan data revisi

Data menggunakan konsep sanitasi layak terbaru berdasarkan surat Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas Nomor 661/Dt.2.4/01/2022

Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Barat, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2022

Target tahun 2030 untuk indikator SDG's air minum yang aman di provinsi Kalimantan Barat adalah mencapai 100% proporsi populasi yang menggunakan sumber air minum yang dikelola dengan aman. Sumber air minum yang dikelola dengan aman adalah sumber air minum yang terlindung, berlokasi di dalam atau halaman rumah, tersedia setiap saat, dan memenuhi syarat kualitas air minum. Kondisi capaian SDG's air minum aman dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel 2. 52 GAP TPB 6 Air Bersih

No. Target/ Indikator	Target / Indikator	Target (Ringkasan Perpres 59 / 2017)	Capaian Tahun 2018	Capaian Tahun 2019	Capaian Tahun 2020	Capaian Tahun 2021	Capaian Tahun 2022	Gap	Kategori	Perangkat Daerah Pemangku Data	Perangkat Daerah yang Berkontribusi
6.1	Pada tahun 2030, mencapai akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua.										
6.1.1.(a)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak	Meningkat menjadi 100%	55,20%	60,75%	66,30%	68,79%	70,09%	-29,91%	B	PUPR	PERKIM
6.1.1.(b)	Kapasitas prasarana air baku untuk melayani rumah tangga, perkotaan dan industri, serta penyediaan air baku untuk pulau-pulau	Meningkat menjadi 118,6 m3/detik	2				22	-118,578	B	PUPR	PERKIM

“Kalimantan Barat Maju, Sejahtera, dan Berkelanjutan”

6.1.1.(c)	Proporsi populasi yang memiliki akses layanan sumber air minum aman dan berkelanjutan.	Meningkat menjadi 100%	55,20%	60,75%	66,30%	68,79%	70,09%	-29,91%	B	PUPR	PERKIM
------------------	--	------------------------	--------	--------	--------	--------	--------	---------	---	------	--------

Sumber: Laporan KLHS RPJPD 2025-2045

2.3.3.5. Sanitasi

Menurut World Health Organization (WHO), sanitasi adalah suatu usaha yang mengawasi beberapa faktor lingkungan fisik yang berpengaruh kepada manusia, terutama terhadap hal-hal yang mempengaruhi efek, merusak perkembangan fisik, kesehatan, dan kelangsungan hidup. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), sanitasi adalah usaha untuk membina dan menciptakan suatu keadaan yang baik di bidang kesehatan, terutama kesehatan masyarakat. Sanitasi dirancang untuk menjaga kesehatan manusia dengan menciptakan lingkungan bersih yang mencegah penularan penyakit. Menurut Perpres No 185 Tahun 2014 tentang Percepatan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi (PPAMS), sanitasi adalah segala upaya yang dilakukan untuk menjamin terwujudnya kondisi yang memenuhi persyaratan kesehatan melalui pembangunan sanitasi. Bila disimpulkan secara ringkas, sanitasi adalah setiap upaya untuk menjamin terwujudnya kondisi yang memenuhi persyaratan kesehatan

Sebuah sanitasi disebut layak apabila fasilitas ini memenuhi sejumlah syarat kesehatan tertentu. Dilansir dari Badan Pusat Statistik (BPS) dalam statistik Indonesia 2023, ada beberapa kriteria sanitasi disebut layak: Kloset menggunakan leher angsa Tempat pembuangan akhir tinja menggunakan tangki septik atau septic tank Tempat pembuangan akhir tinja ada instalasi/sistem pengolahan air

limbah (IPAL/ SPAL) Fasilitas sanitasi yang layak juga bisa digunakan oleh baik rumah tangga sendiri atau bersama dengan rumah tangga lain

Fasilitas sanitasi yang layak juga bisa digunakan oleh baik rumah tangga sendiri atau bersama dengan rumah tangga lain. Meski demikian, menurut Global Waters United States Agency for International Development, sanitasi tidak hanya sekadar toilet. Sanitasi mencakup sejumlah fasilitas, kebiasaan, dan pelayanan, guna mencegah penyakit yang disebabkan oleh kotoran manusia. Sedangkan fasilitas sanitasi mengacu pada infrastruktur yang didedikasikan untuk pembuangan, pengangkutan, atau pengolahan kotoran manusia dan limbah padat lainnya.

Sanitasi adalah perilaku manusia yang disengaja untuk membudayakan kebiasaan hidup bersih dan sehat untuk mencegah manusia terkontaminasi langsung dengan bahan-bahan kotor dan berbahaya dengan harapan bisa menjaga dan memperbaiki tingkat kesehatan manusia. sanitasi yang merupakan kebutuhan dasar Sumber Daya Manusia dalam menentukan kualitas. pentingnya optimalisasi peran dan fungsi provinsi guna mewujudkan akses sanitasi yang layak, aman, dan berkelanjutan agar dapat dijangkau oleh masyarakat secara keseluruhan. Kondisi pelayanan sanitasi di wilayah Provinsi Kalimantan Barat pada tahun 2022 mencapai 62,23. Adapun untuk

pelayanan sanitasi setiap kabupaten/kota
adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 53 Pelayanan Sanitasi Kabupaten/Kota Tahun 2022

No	Kabupaten / Kota	Total Jumlah Rumah Tangga (KK)	Σ Jumlah Rumah Tangga Bersanitasi (KK)	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Sambas	112,285	92,892	82.73
2	Mempawah	87,545	70,100	80.07
3	Sanggau	144,195	88,891	61.65
4	Ketapang	182,934	112,742	61.63
5	Sintang	133,735	90,498	67.67
6	Kapuas Hulu	85,656	39,170	45.73
7	Bengkayang	81,651	37,082	45.42
8	Landak	101,071	77,489	76.67
9	Sekadau	52,413	38,392	73.25
10	Melawi	66,126	5,061	7.65
11	Kayong Utara	28,955	17,662	61.00
12	Kubu Raya	180,348	117,390	65.09
13	Kota Pontianak	160,713	160,147	99.65
14	Kota Singkawang	47,975	45,195	94.21

No	Kabupaten / Kota	Total Jumlah Rumah Tangga (KK)	Σ Jumlah Rumah Tangga Bersanitasi (KK)	Capaian (%)
	JUMLAH	1,076,566	669,979	62.23

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2022

Berdasarkan Susenas 2023, Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Layanan Sanitasi Layak menurut Kabupaten/Kota dari tahun 2018 sampai dengan 2022 di Provinsi Kalimantan Barat menunjukkan bahwa Kabupaten Kapuas Hulu, Kabupaten Sanggau, Kabupaten Melawi, dan Kabupaten Landak masih di bawah 70 persen, sedangkan Kabupaten Sekadau,

Kabupaten Kubu Raya, Kabupaten Sintang, Kabupaten Ketapang, Kabupaten Kayong Utara, Kabupaten Mempawah dan Kabupaten Bengkayang berada diantara persentase 72,33 – 79,53 persen. Yang telah mendekati 100 persen adalah Kabupaten Sambas dan Kota Singkawang serta Kota Pontianak telah mencapai lebih dari 90%.

Tabel 2. 54 Persentase Rumah Tangga Yang Memiliki Akses Terhadap Layanan Sanitasi Menurut Kabupaten/Kota 2018-2022

Kabupaten/Kota	2018	2019	2020	2021	2022
Sambas	73,04	81,83	87,63	92,66	90,43
Bengkayang	56,02	77,76	80,33	82,17	79,53
Landak	21,75	46,88	51,22	62,85	66,00
Mempawah	55,95	74,71	82,16	83,95	79,44
Sanggau	39,15	62	70,12	70,34	64,98
Ketapang	55,35	76,68	82,51	75,46	74,10
Sintang	16,78	57,73	56,09	65,33	73,63
Kapuas Hulu	7,40	57,88	54,74	69,70	60,31
Sekadau	34,95	64,75	75,45	69,63	72,33
Melawi	41,11	61,70	67,95	71,62	65,50
Kayong Utara	53,31	62,90	63,19	71,34	77,87
Kubu Raya	71,24	72,98	77,89	75,74	73,52
Kota Pontianak	93,61	94,05	96,12	96,48	98,13
Kota Singkawang	89,19	89,91	88,38	92,21	93,70
Kalimantan Barat	53,97	72,08	75,81	78,39	77,41

Catatan: Data menggunakan konsep sanitasi layak terbaru berdasarkan surat Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas Nomor 661/Dt.2.4/01/2022

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Barat, diolah dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (KDA 2023)

Namun jika dilihat dari data persentase Rumah Tangga yang menggunakan fasilitas buang air besar menunjukan < 10 persen Rumah Tangga yang tidak ada fasilitas tersebut. Sehingga upaya peningkatan sanitasi layak bagi rumah tangga di provinsi Kalimantan Barat ditujukan untuk memperbaiki jenis kloset dan sistem

transportasi dan pengolahan limbah tersebut sehingga tidak menyebarkan penyakit dan mengkontaminasi lingkungan dan sumber air. Untuk mengetahui distribusi persentase Rumah Tangga yang menggunakan fasilitas buang air besar menurut Kabupaten/Kota di Kalimantan Barat dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 55 Distribusi Persentase Rumah Tangga Menurut Kabupaten/Kota dan Penggunaan Fasilitas Tempat Buang Air Besar, Tahun 2022

Kabupaten/ Kota	Sendiri	Bersama	MCK Komunal	MCK Umum	Tidak Menggunakan	Tidak Ada Fasilitas	Jumlah
Sambas	91,12	5,83	0,13	1,20	0,00	1,72	100,00
Bengkayang	83,92	2,24	0,10	0,15	0,57	13,02	100,00
Landak	75,73	1,48	0,00	0,14	0,00	22,66	100,00
Mempawah	86,34	0,89	0,00	0,25	0,26	12,26	100,00
Sanggau	79,06	0,98	0,00	1,51	0,00	18,45	100,00
Ketapang	84,30	2,87	0,39	0,55	0,47	11,43	100,00
Sintang	84,86	4,28	0,21	1,97	0,00	8,68	100,00
Kapuas Hulu	83,44	4,52	0,32	1,96	0,11	9,64	100,00
Sekadau	85,05	6,13	0,00	0,56	0,17	8,09	100,00
Melawi	74,02	18,39	0,00	5,44	0,00	2,15	100,00

Kabupaten/ Kota	Sendiri	Bersama	MCK Komunal	MCK Umum	Tidak Menggunakan	Tidak Ada Fasilitas	Jumlah
Kayong Utara	80,40	3,81	0,00	0,00	0,00	15,79	100,00
Kubu Raya	84,36	2,68	0,08	3,71	0,00	9,17	100,00
Pontianak	89,06	10,57	0,00	0,00	0,00	0,37	100,00
Kota Singkawang	93,09	1,32	0,00	1,01	0,00	4,58	100,00
Kalimantan Barat	84,44	4,67	0,11	1,33	0,11	9,34	100,00

Sistem air limbah, Drainase dan Persampahan di kawasan perkotaan yang masih memerlukan upaya yang kuat untuk meningkatkan pelayanannya. Dimana berdasarkan data Dinas PUPR Provinsi Kalbar Tahun 2022 dinyatakan Persentase Penduduk yang terlayani sistem Air Limbah yang memadai (sesuai standar) sebesar 62,23 %, dan Persentase Penduduk yang terlayani sistem Drainase skala kota sebesar 10,18% (2021) dan Persentase Penduduk yang terlayani Persampahan sesuai standar sebesar 18,44% (2021).

Tabel 2. 56 Perkembangan Kondisi Pelayanan Sistem Air Limbah, Sistem Drainase Skala Kota, Persampahan Sesuai Standar Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2022

No	Indikator	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022
1	Persentase Penduduk yang terlayani sistem Air Limbah yang memadai (sesuai standar)	%	47,5 2	61,2 3	61,8 2	50,4 2	62,2 3
2	Persentase Penduduk yang terlayani sistem Drainase skala kota	%		-	-	10,1 8	-

**“Kalimantan Barat Maju, Sejahtera,
dan Berkelanjutan”**

3	Persentase Penduduk yang terlayani Persampahan sesuai standar	%		-	-	18,4 4	-
---	---	---	--	---	---	-----------	---

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Barat, Tahun 2022

Untuk mengetahui target SDG's 2023 untuk Sanitasi Layak berupa sanitasi dan penangan air limbah dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 57 Gap TPB 6 Sanitasi Layak (Sanitasi dan Air Limbah)

No. Target/ Indikator	Target / Indikator	Target (Ringkasan Perpres 59 / 2017)	Capaian Tahun 2018	Capaian Tahun 2019	Capaian Tahun 2020	Capaian Tahun 2021	Capaian Tahun 2022	Gap	Kategori	Perangkat Daerah Pemangku Data	Perangkat Daerah yang Berkontribusi
6.2	Pada tahun 2030, mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan.										
6.2.1.(a)	Proporsi populasi yang memiliki fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air.	Meningkat					tidak dapat dihitung		C	PUPR	PERKIM
6.2.1.(b)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak.	Meningkat menjadi 100%	48,38%			65%		-165%	B	PUPR	PERKIM
6.2.1.(c)	Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM).	Meningkat menjadi 45.000 (skala nasional)	33,80%	54,80%	60,50%	65,50%	75%	tidak dapat dihitung	B	PUPR	DINKES

“Kalimantan Barat Maju, Sejahtera, dan Berkelanjutan”

6.2.1.(d)	Jumlah desa/kelurahan yang Open Defecation Free (ODF)/ Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS).	Meningkat	4,50%	8,30%	10,20%	10%		mening kat	B	PUPR	DINKES
6.2.1.(e)	Jumlah kabupaten/ kota yang terbangun infrastruktur air limbah dengan sistem terpusat skala kota, kawasan, dan komunal.	Meningkat menjadi 438 kabupaten/kota.					tidak dapat dihitung		C	PUPR	PERKIM
6.2.1.(f)	Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan air limbah terpusat.	Meningkat					tidak dapat dihitung		C	PUPR	PERKIM

2.3.3.6. Persampahan

Pengelolaan sampah perkotaan sangat penting dalam pencapaian target SDG's 2030, karena pengelolaan sampah yang berkelanjutan dapat memberikan dampak positif bagi lingkungan, sosial, ekonomi, dan kesehatan. Beberapa target SDG's yang terkait dengan pengelolaan sampah perkotaan adalah:

- Target 6.2: Menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua. Pengelolaan sampah yang baik dapat mencegah pencemaran air permukaan atau tanah, serta mengurangi risiko penularan penyakit akibat sampah.
- Target 11.6: Pada 2030, mengurangi dampak lingkungan perkotaan per kapita yang merugikan, termasuk dengan memberi perhatian khusus pada kualitas udara, termasuk penanganan sampah kota. Pengelolaan sampah yang baik dapat mengurangi emisi gas rumah kaca, dioksin,

dan polutan udara lainnya yang dihasilkan dari pembakaran atau pembuangan sampah.

- Target 12.5: Pada 2030, secara substansial mengurangi timbunan sampah melalui pencegahan, pengurangan, daur ulang, dan penggunaan kembali². Pengelolaan sampah yang baik dapat menerapkan prinsip 3R (reduce, reuse, recycle) untuk mengurangi jumlah sampah yang dihasilkan, memanfaatkan kembali sampah yang masih layak pakai, dan mendaur ulang sampah menjadi produk baru.
- Target 14.1: Pada 2025, mencegah dan mengurangi secara signifikan polusi laut dari segala sumber, termasuk sampah laut dan nutrien. Pengelolaan sampah yang baik dapat mencegah sampah, terutama sampah plastik, masuk ke laut dan mengganggu ekosistem laut.

Untuk mengetahui kondisi pengelolaan sampah di Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2012 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 58 Pengelolaan Sampah di Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019-2022 (data SISP, 2023)

Tahun	Kabupaten/Kota	Terserap (ton)	Penanganan Sampah (ton)	Persentase Penanganan (%)
2019	Kab. Bengkayang	37.153,18	5.781,49	15,55
2019	Kab. Kayan Paha	46.835,28	4.578,08	9,78
2019	Kab. Kutaiwang	93.023,25	18.407,75	19,82
2019	Kab. Mempawah	25.458,28	7.824,18	30,72
2019	Kab. Sambas	79.133,09	19.722,89	24,92
2019	Kab. Sanggau	65.815,89	1.6972,97	25,79
2019	Kota Pontianak	138.987,18	127.849,68	92,01
2019	Kab. Singkawang	94.500,79	18.489,40	19,57
2019	Kab. Sukadana	14.184,79	17.888,28	126,15
2019	Kab. Mempawah	26.148,28	7.824,18	29,92
2019	Kab. Sambas	100.187,28	91.128,28	90,97
2019	Kab. Sanggau	87.137,28	17.492,97	19,75
2019	Kota Pontianak	148.821,25	139.731,25	93,92
2019	Kota Singkawang	41.251,89	15.273,43	37,26
2021	Kab. Widiari	16.224,67	11.928,28	73,57
2021	Kab. Mempawah	40.212,89	31.718,28	78,88
2021	Kab. Sambas	101.248,28	11.888,28	11,74
2021	Kab. Sanggau	88.471,28	16.445,28	18,59
2021	Kota Pontianak	144.457,25	109.848,28	75,99
2021	Kota Singkawang	42.295,18	17.968,28	42,48
2022	Kab. Kayan Paha	48.661,81	9.822,78	20,19
2022	Kab. Mempawah	38.888,40	9.827,88	25,27
2022	Kab. Sambas	116.111,89	11.188,47	9,59
2022	Kab. Sanggau	89.847,28	18.277,28	20,23
2022	Kota Pontianak	146.748,71	107.888,71	73,47
2022	Kota Singkawang	44.297,89	17.482,15	39,46

Dari data diatas menunjukan pengelolaan sampah masih menjadi permasalahan utama di seluruh

Kabupaten dan Kota dimana persentase penanganan sampah menunjukan penurunan dan masih banyak Kabupaten di bawah 50%

penanganan sampah kecuali Kota Pontianak dan Kota Singkawang yang mencapai 73,47% dan 75,46% secara berurutan.

2.3.3.7. Perumahan dan Permukiman

Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 menghendaki bahwa perumahan dan kawasan permukiman adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas pembinaan, penyelenggaraan perumahan, penyelenggaraan kawasan permukiman, pemeliharaan dan perbaikan, pencegahan. Selain ketersediaan rumah, sampai dengan tahun 2023 masih terdapat

permasalahan rumah tidak layak huni. Rumah tidak layak huni adalah rumah yang tidak memenuhi standar kesehatan dan keamanan minimum untuk penghuninya. Rumah tidak layak huni dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti kerusakan struktural, kekurangan fasilitas sanitasi, atau ketersediaan air bersih yang tidak memadai. Pada tahun 2020-2022 penangan rumah tidak layak huni sebagai berikut:

Tabel 2. 59 Penanganan Rumah Tidak Layak Huni

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Tahun 2020	Jumlah RTLH Tahun 2020	Penanganan RTLH Tahun 2020-2022		
				2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Sambas	192.028	42.634	2.069	150	185
2	Mempawah	64.288	7.019	1.325	175	115
3	Sanggau	144.977	44.641	1.666	300	15
4	Ketapang	121.349	34.165	1.805	883	280
5	Sintang	68.985	17.604	2.984	3.516	801
6	Kapuas Hulu	59.928	14.099	2.815	50	1.980
7	Bengkayang	47.177	8.352	2.710	100	129
8	Landak	79.496	15.800	2.343	50	50
9	Sekadau	48.262	8.556	840	420	301
10	Melawi	56.433	11.019	2.059	624	373
11	Kayong Utara	25.985	4.904	1.052	100	140
12	Kubu Raya	136.423	6.618	2.380	2.932	1.444
13	Pontianak	149.937	859	1.478	409	367
14	Singkawang	54.192	1.475	1.659	51	25

	Jumlah	1.249.460	217.745	27.185	9.760	6.205
--	---------------	------------------	----------------	---------------	--------------	--------------

Sumber: Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Prov. Kalbar tahun 2022

Tabel 2. 60 Data Penanganan RTLH di Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2023

No	Kabupaten / Kota	Jumlah Rumah Tahun 2020	Jumlah Bantuan Penanganan RTLH TA. 2016 - 2022, sumber dana : APBD KemenPUPR dan APBD Prov. Kalbar & Kab/ Kota	RTLH Tahun 2023
1	Sambas	192.028	4.802	42.299
2	Mempawah	64.288	1.761	6.729
3	Sanggau	144.977	3.139	44.326
4	Ketapang	121.349	4.220	33.002
5	Sintang	68.985	8.777	13.287
6	Kapuas Hulu	59.928	9.002	12.069
7	Bengkayang	47.177	3.595	8.123
8	Landak	79.496	2.911	15.700
9	Sekadau	48.262	2.902	7.835
10	Melawi	56.433	4.579	10.022
11	Kayong Utara	25.985	2.169	4.664
12	Kubu raya	136.423	10.163	2.242
13	Pontianak	149.937	2.254	83
14	Singkawang	54.192	2.250	1.399

No	Kabupaten / Kota	Jumlah Rumah Tahun 2020	Jumlah Bantuan Penanganan RTLH TA. 2016 - 2022, sumber dana : APBD KemenPUPR dan APBD Prov. Kalbar & Kab/ Kota	RTLH Tahun 2023
	Provinsi	1.249.460	62.524	201.780

Sumber Data :

Koordinasi Dinas PKP Kab/Kota 2020 (Data jumlah RTLH di kunci di tahun 2020) , 2023

Data Penanganan Program BSPS didapat dari koordinasi Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Kalimantan 1

2.3.3.8. Informasi dan Komunikasi

Sarana dan prasarana informasi dan komunikasi (TIK) adalah segala sesuatu yang digunakan untuk mengolah, menyimpan, mengirim, dan menerima data atau informasi, seperti komputer, internet, telepon, radio, dan televisi. Sarana dan prasarana TIK memiliki manfaat yang sangat besar dalam pembangunan wilayah dan transformasi ekonomi, antara lain:

- Meningkatkan akses dan kualitas informasi bagi masyarakat, khususnya di daerah pedesaan, pedalaman dan daerah terpencil sehingga dapat meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kesejahteraan
- Meningkatkan konektivitas dan kolaborasi antara individu, organisasi, dan pemerintah, sehingga dapat memperluas jaringan sosial, kerjasama, dan partisipasi
- Meningkatkan efisiensi dan produktivitas dalam berbagai sektor usaha, seperti pertanian, pariwisata, kesehatan, dan

pendidikan, dengan memanfaatkan teknologi digital, seperti e-commerce, e-learning, e-health, dan e-government.

- Mendukung transformasi digital yang dapat meningkatkan daya saing, inovasi, dan kreativitas, serta mengurangi kesenjangan digital dan kemiskinan. Pembangunan sarana dan prasarana telekomunikasi dan komunikasi Program-program ini diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia.
- Kondisi sarana dan prasarana informasi dan komunikasi di Kalimantan Barat menunjukkan pada tahun 2023 masih terdapat 300 desa yang tidak terlayani internet, 831 desa yang masih dilayani dengan sinyal telepon seluler dengan sinyal lemah dan 80 desa masih tidak ada layanan jaringan seluler. Untuk lebih detail dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 61 Rekap Jangkauan Telekomunikasi Desa di Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2023

“Kalimantan Barat Maju, Sejahtera, dan Berkelanjutan”

NO	Nama Kabupaten	Jumlah Kecamatan	Jumlah Desa	Terdapat fasilitas internet di kantor kepala desa		Warga Desa memiliki akses internet		Sinyal telepon seluler / handphone di Desa		
				Ya	Tidak	Ya	Tidak	Sinyal Kuat	Sinyal Lemah	Tidak Ada Sinyal
1	SAMBAS	19	195	189	6	187	8	169	26	-
2	SANGGAU	15	163	137	26	146	17	79	83	4
3	KETAPANG	20	253	214	39	219	34	160	84	9
4	SINTANG	14	390	246	144	291	99	197	169	24
5	KAPUAS HULU	23	278	243	35	235	43	133	138	7
6	BENGKAYANG	17	122	74	48	91	31	56	58	8
7	LANDAK	13	156	92	64	122	34	55	92	9
8	SEKADAU	7	94	86	8	90	4	46	48	-
9	MELAWI	11	169	122	47	146	23	74	81	14
10	KAYONG UTARA	6	43	30	13	43	-	34	9	-
11	KUBU RAYA	9	123	111	12	120	3	83	38	2
12	MEMPAWAH	9	60	49	11	56	4	52	5	3
TOTAL		163	2046	1.593	453	1.746	300	1.138	831	80

Sumber: Diskominfo Prov. Kalbar, 2024

2.3.3.9. Pendidikan

Pembangunan sarana dan prasarana pendidikan penting dalam pembangunan daerah karena akan mendukung meningkatkan kualitas dan aksesibilitas pendidikan bagi masyarakat, serta mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. Sarana dan prasarana pendidikan meliputi segala fasilitas, peralatan, media, dan sumber belajar yang diperlukan untuk menunjang

proses pembelajaran yang efektif dan efisien. Sasaran SDG's 2030 untuk bidang pendidikan adalah menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata untuk semua orang, serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat. Kondisi Sarana pendidikan di Kalimantan Barat dapat dilihat dari tabel berikut.

Tabel 2. 62 Jumlah Sekolah SD, SMP dan SMA serta Setingkatnya Tahun 2023

No	Kabupaten/ Kota	SD/M		SMP/Mts		SMA/SMK/M A	
		2022	2023	2022	2023	2022	2023
1	Sambas	456	568	161	184	74	78
2	Mempawah	240	458	96	165	54	76
3	Sanggau	484	549	133	260	53	155
4	Ketapang	564	485	175	134	72	57
5	Sintang	469	474	144	147	65	70
6	Kapuas Hulu	426	471	119	118	42	65

7	Bengkayang	284	425	93	12 0	43	44
8	Landak	470	208	118	11 9	64	10 9
9	Sekadau	241	284	69	93	29	44
10	Melawi	266	265	124	12 5	42	43
11	Kayong Utara	115	242	48	68	21	30
12	Kubu Raya	545	242	252	10 0	152	55
13	Kota Pontianak	206	111	119	50	107	36
14	Kota Singkawang	111	117	47	50	36	23
Kalimantan Barat		4.877	4.89 9	1.698	1.733	854	885

Sumber: Dapodik Kemendikbud Tahun 2024 dan Data Emis Kanwil Kemenag Kalimantan Barat 2024

2.3.3.10. Kesehatan

Kesehatan merupakan kondisi kesejahteraan fisik, mental, dan bukan sekadar tidak adanya penyakit atau kelemahan. Sedangkan sarana dan prasarana kesehatan adalah fasilitas dan alat yang digunakan untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Sarana dan prasarana kesehatan penting untuk dibangun dan dikembangkan karena:

- Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat, terutama yang berada di daerah terpencil atau kurang berkembang dan semua masyarakat ke layanan kesehatan sesuai dengan kebutuhannya.
- Mendorong pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (SDG's) 2030, khususnya tujuan nomor 3 yaitu "menjamin hidup sehat

“Kalimantan Barat Maju, Sejahtera, dan Berkelanjutan”

dan mendorong kesejahteraan bagi semua usia”.

- Menghasilkan sumber daya manusia (SDM) yang sehat, produktif, dan berpotensi, yang merupakan aset dan motor pembangunan.

Yang pada kemudian akan menciptakan stabilitas ekonomi dan sosial, serta mengurangi kemiskinan dan ketimpangan.

Tabel 2. 63 Jumlah Puskesmas per 500.000 dan Puskesmas Keliling menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2023

Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk (jiwa)	Jumlah (Unit)			Jumlah Puskesmas per 500.000 penduduk
		Puskesmas	Puskesmas Pembantu	Puskesmas Keliling	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Kabupaten Sambas	648.181	28	89	48	151
Kabupaten Bengkayang	298.979	17	74	31	226
Kabupaten Landak	413.588	16	77	212	390
Kabupaten Mempawah	312.785	14	19	8	75
Kabupaten Sanggau	503.937	19	98	428	557
Kabupaten Ketapang	592.521	24	140	18	168
Kabupaten Sintang	438.022	20	103	4	169
Kabupaten Kapuas Hulu	262.404	23	105	35	293
Kabupaten Sekadau	219.724	12	74	-	209
Kabupaten Melawi	239.502	11	65	13	204
Kabupaten Kayong Utara	132.855	11	30	7	203
Kabupaten Kubu Raya	639.250	21	73	14	90

“Kalimantan Barat Maju, Sejahtera, dan Berkelanjutan”

Kabupaten/Kota		Jumlah Penduduk (jiwa)	Jumlah (Unit)			Jumlah Puskesmas per 500.000 penduduk
			Puskesmas	Puskesmas Pembantu	Puskesmas Keliling	
Kota Pontianak		675.468	23	4	4	23
Kota Singkawang		246 112	10	15	10	74
Kalimantan Barat	2023	5.623.328	249	966	852	196
	2022	5.220.211	248	937	1.155	224
	2021	5.162.937	247	777	607	158
	2020	5.134.760	246	951	615	176
	2019	5.069.127	246	935	571	173
	2018	5.001.664	244	924	190	136

Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat 2024 dan KDA 2024 (BPS Kalbar, 2024)

Fasilitas pelayanan kesehatan ini menyelenggarakan pelayanan kesehatan berupa pelayanan kesehatan untuk perorangan dan juga pelayanan kesehatan masyarakat. Fasilitas pelayanan masyarakat ini memiliki beberapa tingkat, fasilitas pelayanan tingkat pertama yang memberikan pelayanan kesehatan dasar, fasilitas pelayanan tingkat kedua yang

memberikan pelayanan kesehatan spesialisik, pelayanan kesehatan tingkat ketiga memberikan pelayanan kesehatan subspesialisik, dan yang berikut fasilitas pelayanan kesehatan tingkat kedua dan ketiga dapat memberikan pelayanan yang diberikan oleh fasilitas pelayanan kesehatan tingkat di bawahnya. Fasilitas pelayanan kesehatan tersebut sangat penting

*Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2025-2045*

“Kalimantan Barat Maju, Sejahtera, dan Berkelanjutan”

keberadaannya di setiap wilayah dan lokasi yang strategis sehingga mudah diakses oleh masyarakat sekitar. Untuk mengetahui kondisi

sarana kesehatan yang menjangkau desa di Kalimantan Barat dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 64 Jumlah Desa/Kelurahan Yang Memiliki Sarana Kesehatan Menurut Kabupaten/Kota di
Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019-2023

Kabupaten/ Kota	Rumah Sakit					Rumah Sakit Bersalin Hospital			Poliklinik			Puskesmas					Puskesmas pembantu					Apotik		
	20 19	20 20	20 21	20 22	20 23	20 19	20 20	20 21	20 19	20 20	20 21	20 19	20 20	20 21	20 22	20 23	20 19	20 20	20 21	20 22	20 21	20 19	20 20	20 21
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(22)	(23)	(24)
Sambas	3	4	4	4	4	-	-	-	27	28	28	27	28	28	28	28	63	68	76	90	89	14	20	22
Bengkayang	2	2	2	2	2	-	-	-	17	17	17	17	17	17	17	17	48	49	57	70	74	4	5	7
Landak	1	1	1	1	1	-	-	-	16	16	16	16	16	16	16	16	71	74	64	77	77	5	5	6
Mempawah	1	1	1	1	1	-	-	-	13	14	14	13	14	14	14	14	16	18	20	17	19	5	6	8
Sanggau	3	4	4	4	4	1	1	-	20	21	19	20	21	19	19	19	67	68	59	77	98	10	10	11

Kabupaten/ Kota	Rumah Sakit					Rumah Sakit Bersalin Hospital			Poliklinik			Puskesmas					Puskesmas pembantu					Apotik		
	20 19	20 20	20 21	20 22	20 23	20 19	20 20	20 21	20 19	20 20	20 21	20 19	20 20	20 21	20 22	20 23	20 19	20 20	20 21	20 22	20 21	20 19	20 20	20 21
Ketapang	2	2	3	3	3	1	1	1	22	26	24	22	26	24	24	24	11 3	13 8	14 3	13 4	14 0	14	16	22
Sintang	3	4	6	6	7	1	2	-	23	21	21	23	21	20	20	20	86	10 3	98	10 3	10 3	15	17	15
Kapuas Hulu	3	3	3	3	3	-	-	-	22	27	22	22	27	23	23	23	70	82	56	10 0	10 5	7	7	5
Sekadau	1	1	1	1	1	-	-	-	12	12	12	12	12	12	12	12	48	55	58	78	74	7	6	5
Melawi	3	3	4	4	4	-	-	-	11	11	11	11	11	11	11	11	38	49	43	70	65	5	6	7
Kayong Utara	1	1	1	1	1	-	-	-	9	9	11	9	9	10	11	11	23	26	26	27	30	3	4	5

“Kalimantan Barat Maju, Sejahtera, dan Berkelanjutan”

Kabupaten/ Kota	Rumah Sakit					Rumah Sakit Bersalin Hospital			Poliklinik			Puskesmas					Puskesmas pembantu					Apotik		
	20 19	20 20	20 21	20 22	20 23	20 19	20 20	20 21	20 19	20 20	20 21	20 19	20 20	20 21	20 22	20 23	20 19	20 20	20 21	20 22	20 21	20 19	20 20	20 21
Kubu Raya	2	3	4	4	4	3	3	2	19	20	20	19	20	20	20	21	65	69	68	73	73	12	11	14
Pontianak	9	10	14	16	15	2	3	2	21	21	20	21	21	23	23	23	9	5	6	4	4	26	27	27
Singkawang	3	3	7	6	7	1	1	1	9	9	9	9	9	10	10	10	18	18	20	18	15	12	12	13
Kalimantan Barat	37	42	55	56	57	9	11	6	24 1	25 2	24 4	24 1	25 2	24 7	24 8	22 94	73 5	82 2	79 4	93 8	96 6	13 9	15 2	16 7

Catatan: 1. Desa pada tabel ini termasuk Unit Pemukiman Transmigrasi (UPT) yang masih dibina oleh kementerian terkait di Provinsi Kalimantan Barat

Sumber: BPS, Pendataan Potensi Desa (Podes), KDA 2024, BPS Kalbar, 2024

2.3.3.11. Kebencanaan

Pengendalian kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup akibat pemanfaatan/ eksploitasi sumber daya alam yang belum optimal, memperparah dampak krisis planet (*triple planetary crises*) di Kalimantan Barat, yaitu perubahan iklim, hilangnya alam (keanekaragaman hayati), serta polusi dan limbah. Terus menurunnya luas lahan berhutan, rusaknya ekosistem alam daratan serta tingginya frekuensi dan intensitas hujan sebagai akibat dampak krisis iklim memperparah bencana banjir pada saat musim penghujan. Disisi lain, saat

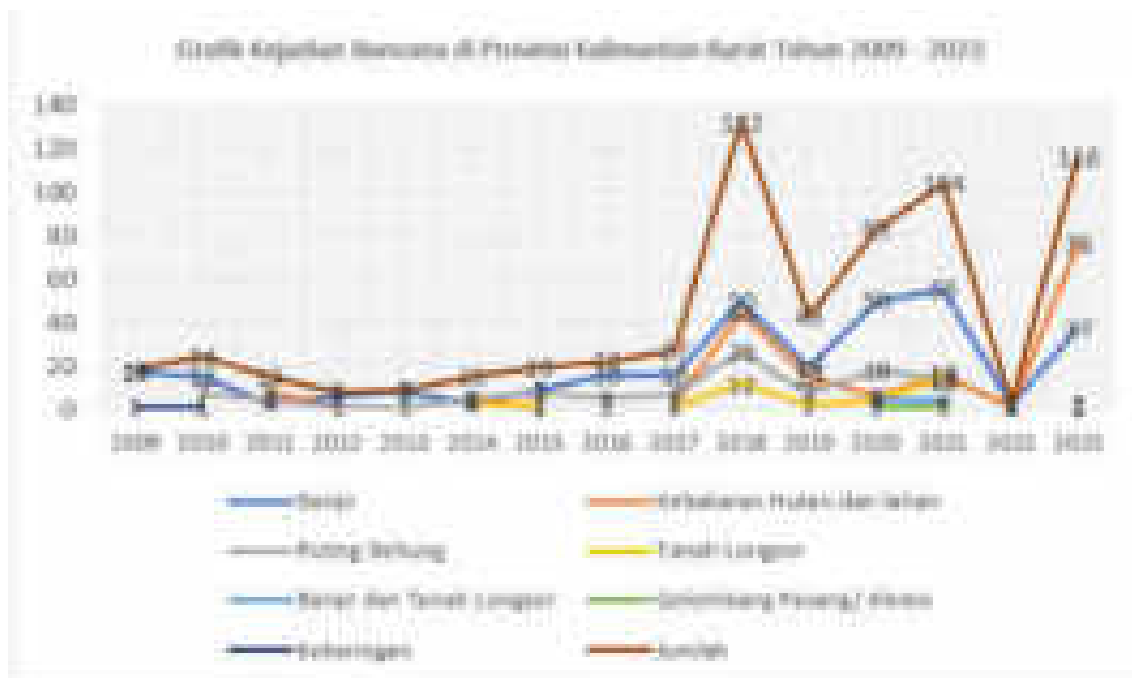
musim kemarau dimana hari hujan berkurang dengan intensitas curah hujan sedikit Kalimantan Barat terdampak krisis air bersih dan beresiko dilanda bencana kebakaran hutan dan lahan. Data kejadian bencana di Kalimantan Barat Tahun 2018 – 2023 menunjukkan bencana hidrometeorologi terutama kedua jenis bencana tersebut menjadi bencana dominan di Kalimantan Barat, diikuti bencana angin puting beliung akibat cuaca ekstrim dan bencana tanah longsor. Frekuensi kejadian bencana di Kalimantan Barat dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 65 Frekuensi Kejadian Bencana di Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2023

No.	Jenis Bencana	Tahun					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Banjir	49	19	50	55	2	10
2	Kebakaran Hutan dan lahan	44	15	6	16	1	22
3	Puting Beliung	26	7	18	13	0	0
4	Tanah Longsor	12	2	4	15	0	25
5	Banjir dan Tanah Longsor	0	0	4	4	0	0
6	Gelombang Pasang/ Abrasi	0	0	1	1	0	0
	Jumlah	131	43	83	104	3	57

Sumber : <https://dibi.bnpb.go.id/> 2024

Gambar 2. 20 Grafik Kejadian Bencana di Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2009-2023



Sumber : DIBI, 2024

sumber: kajian Resiko bencana Kalbar 2022 – 2026

Tabel 2. 66 Kejadian Bencana di Kabupaten/Kota se-Kalimantan Barat Tahun 2018-2023

No.	Kabupaten/ Kota	Jumlah	Meninggal	Hilang	Terluka	Menderita	Mengungsi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Sambas	17	0	0	0	55,064	4,406
2	Bengkayang	47	4	1	1	6,262	1,550
3	Landak	33	1	0	0	35,282	15,707
4	Mempawah	54	1	0	2	133,323	32,316
5	Sanggau	82	1	0	1	4,550	8,015
6	Ketapang	36	1	0	0	54,940	2,717
7	Sintang	26	3	1	0	27,424	5,351
8	Kapuas Hulu	38	0	0	0	67,054	2,566
9	Sekadau	29	0	0	0	1,838	2,964
10	Melawi	45	6	0	1	113,787	47,189
11	Kayong Utara	6	1	1	2	24,225	924
12	Kubu Raya	38	1	0	13	19,326	0
13	Kota Pontianak	13	0	0	0	58	10
14	Kota Singkawang	17	1	0	2	9,841	429
	Jumlah	481	20	3	22	552,974	124,144

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2025-2045

Sumber : <https://dibi.bnppb.go.id/> 2024

Tabel 2. 67 Luas Areal Terbakar Akibat Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten/Kota se-Kalimantan Barat Tahun 2018-2023

NO	KABUPATEN/KOTA	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	BENGKAYANG	1.612,00	1.320,00	1.233,00	478,00	701,00	2.777,91
2	KAPUAS HULU	603,00	1.291,00	208,00	245,00	269,00	2.188,97
3	KAYONG UTARA	7.139,00	14.677,00	0	74,00	565,00	6.351,25
4	KETAPANG	19.807,00	91.388,00	1.843,00	2.929,00	4.573,00	43.561,91
5	KOTA PONTIANAK	609,00	378,00	5,00	83,00	107,00	14,79
6	KOTA SINGKAWANG	61,00	547,00	0	31,00	263,00	712,16
7	KUBU RAYA	22.883,00	13.565,00	357,00	8.271,00	2.475,00	12.539,31
8	LANDAK	652,00	847,00	721,00	275,00	1.744,00	5.246,45
9	MELAWI	2.052,00	10.940,00	842,00	563,00	932,00	9.736,63
10	MEMPAWAH	0	0	881,00	1.959,00	3.343,00	2.582,63
11	PONTIANAK	2.942,00	3.032,00	0	0	0	0
12	SAMBAS	7.054,00	4.199,00	518,00	4.261,00	3.460,00	8.369,71
13	SANGGAU	752,00	2.572,00	462,00	622,00	2.196,00	7.490,48

14	SEKADAU	26,00	533,00	251,00	16,00	382,00	3.916,46
15	SINTANG	2.229,00	6.530,00	326,00	784,00	829,00	6.359,80
	TOTAL	68.421,0 0	151.819,0 0	7.647,0 0	20.591,0 0	21.839,0 0	111.848,4 6

Sumber Data: <https://sipongi.menlhk.go.id/> 2023

Adapun jumlah korban bencana alam selama periode 2018 – 2021 tercatat sebanyak 590.375 jiwa terdampak bencana terdiri dari : (1) sebanyak 16 orang meninggal, (2) sebanyak 2 orang dinyatakan hilang, (3) sebanyak 9 orang Selain bencana eksisting yang terjadi di Kalimantan Barat yang diketahui berdasarkan data sejarah kejadian bencana hingga saat ini, hasil kajian bencana Kalimantan Barat Tahun

terluka, (4) sebanyak 460.241 orang menderita dan (5) sebanyak 130,107 orang mengungsi, jumlah korban bencana dapat dilihat pada tabel berikut :

2022 – 2026 terdapat 13 (tiga belas) jenis bencana yang berpotensi terjadi di Kalimantan Barat antara lain:

Tabel 2. 69 Potensi Bencana di Provinsi Kalimantan Barat

No.	Jenis Bencana
1	Banjir
2	Banjir Bandang
3	Cuaca Ekstrem
4	Epidemi dan Wabah Penyakit
5	Gelombang Ekstrem dan Abrasi
6	Gempa Bumi
7	Kebakaran Hutan dan Lahan

No.	Jenis Bencana
8	Kegagalan Teknologi
9	Kekeringan
10	Likuefaksi
11	Pandemi COVID-19
12	Tanah Longsor
13	Tsunami

Sumber: Dokumen Kajian Risiko Bencana Kalimantan Barat Tahun 2022 - 2026, BNPB 2022

Adapun luasan potensi bahaya dan jumlah dan peta risiko atas bencana yang kemungkinan penduduk terpapar berdasarkan peta bahaya akan terjadi di Kalimantan Barat yaitu:

Tabel 2. 70 Potensi Bahaya di Provinsi Kalimantan Barat

No.	Kabupaten/Kota	Bahaya				
		Luas (Ha)				Kelas
		Rendah	Sedang	Tinggi	Total	
1	Bencana Banjir	3.635.923	2.240.128	1.464.330	7.340.381	Tinggi
2	Bencana Banjir Bandang	2.952	13.307	140.003	156.262	Tinggi
3	Bencana Cuaca Ekstrem	-	3.585.557	3.500.718	7.086.275	Tinggi
4	Bencana Gelombang Ekstrem dan Abrasi	23,490	4,735	10,516	38,741	Tinggi

No.	Kabupaten/Kota	Bahaya				
		Luas (Ha)				Kelas
		Rendah	Sedang	Tinggi	Total	
5	Bencana Gempa Bumi	14.706.189	-	-	14.706.189	Rendah
6	Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan	6.031.841	6.905.555	1.752.377	14.689.773	Tinggi
7	Bencana Kekeringan	439.896	10.330.200	3.935.051	14.705.147	Tinggi
8	Bencana Tanah Longsor	1.834.792	1.374.277	331.014	3.540.083	Tinggi
9	Bencana Akibat Kegagalan Teknologi	851	-	-	851	Rendah
10	Bencana Epidemik dan Wabah penyakit	1.312.061	13.052.432	311.788	14.676.281	Tinggi

Sumber: Dokumen Kajian Risiko Bencana Kalimantan Barat Tahun 2022 - 2026, BNPB 2022

Tabel 2. 71 Potensi Penduduk Terpapar Akibat Bencana di Provinsi Kalimantan Barat

No.	Jenis Bencana	Potensi Penduduk Terpapar (Jiwa)				Kelas
		Jumlah Penduduk Terpapar	Kelompok Rentan			
			Penduduk Umur Rentan	Penduduk Miskin	Penduduk Cacat	
1	Bencana Banjir	3.397.599	408.607	1.109.698	16.468	Tinggi
2	Bencana Banjir Bandang	177.787	20.085	68.253	1.180	Tinggi
3	Bencana Cuaca Ekstrem	3.172.053	381.175	1.063.718	15.713	Tinggi
4	Bencana Gelombang Ekstrem dan Abrasi	9.053	1.258	3.530	67	Tinggi
5	Bencana Gempa Bumi	3.844.310	454.779	1.296.082	19.594	Tinggi
6	Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan	-	-	-	-	-
7	Bencana Kekeringan	3.844.328	454.779	1.296.082	19.594	Tinggi
8	Bencana Tanah Longsor	45.228	4.994	22.854	390	Tinggi
9	Bencana Akibat Kegagalan Teknologi	7.351	852	2.306	51	Tinggi
10	Bencana Pandemi dan Wabah penyakit	3.841.391	454.388	1.294.995	19.572	Tinggi

Sumber: Dokumen Kajian Risiko Bencana Kalimantan Barat Tahun 2022 - 2026, BNPB 2022

Mendasarkan data kejadian bencana di Kalimantan Barat Tahun 2018 – 2022, menunjukkan bahwa kejadian bencana yang paling dominan dilaporkan adalah bencana

banjir, bencana kebakaran hutan dan lahan, bencana angin puting beliung dan bencana tanah longsor.

Kapasitas daerah dalam upaya penanggulangan bencana tercermin dalam Indeks Kapasitas Daerah – IKD dan Indeks Risiko Bencana pada masing-masing daerah. Indeks Risiko Bencana Indonesia Tahun 2022 yang menunjukkan bahwa wilayah Provinsi Kalimantan Barat termasuk dalam kelas risiko bencana sedang dengan skor 136,72. Terdapat 5 kabupaten/kota di wilayah

Kalimantan Barat yang masuk kategori risiko bencana tinggi yaitu Kabupaten Mempawah, Kabupaten Sambas, Kabupaten Kubu Raya, Kabupaten Kayong Utara dan Kota Singkawang, dan 9 kabupaten/kota termasuk kategori risiko bencana sedang, dengan skor risiko tertinggi adalah Kabupaten Mempawah.

Tabel 2. 72 Indeks Risiko Bencana di Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2023

Kode	Provinsi/ Kabupaten/ Kota	2018	2019	2020	2021	2022	2023
61	KALIMANTAN BARAT	138.49	138.49	138.49	138.69	136.72	138.92
61.01	Sambas	172.2	172.2	172.2	172.2	154.41	154.41
61.02	Mempawah	180.4	180.4	180.4	172.22	177.91	185.04
61.03	Sanggau	131.6	131.6	131.6	131.6	126.21	127.99
61.04	Ketapang	124.47	124.47	124.47	124.47	124.36	124.12
61.05	Sintang	123.26	123.26	123.26	123.26	133.2	133.2
61.06	Kapuas Hulu	129.23	129.23	129.23	139.42	135.91	135.12
61.07	Bengkayang	134.33	134.33	134.33	117.31	124.19	124.19
61.08	Landak	109.93	109.93	109.93	109.93	108.44	108.44
61.09	Sekadau	142	142	142	142	131.97	138.44
61.1	Melawi	132.4	132.4	132.4	132.4	132.4	132.4
61.11	Kayong Utara	168.4	168.4	168.4	167.26	150.57	161.39
61.12	Kubu Raya	168.4	168.4	168.4	168.4	168.4	168.4
61.71	Kota Pontianak	85.66	85.66	85.66	85.66	90.63	96.2
61.72	Kota Singkawang	145.82	145.82	145.82	155.47	155.47	155.47

Sumber: <https://dibi.bn timer.go.id/> 2024

PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH,

Menyadari kondisi Kalimantan Barat yang memiliki potensi bencana yang ada, mendorong pemerintah, swasta, masyarakat dan para pihak untuk melaksanakan upaya pengurangan risiko bencana melalui upaya peningkatan kemampuan masyarakat terdampak untuk mengelola dan menekan risiko terjadinya bencana baik dalam pencegahan dan mitigasi, kesiapsiagaan serta peringatan dini mengingat bencana alam dapat terjadi secara tiba-tiba.

Risiko bencana dapat terjadi karena kurangnya kesiapsiagaan dan kewaspadaan masyarakat dalam menghadapi bencana, oleh karena itu kesiapsiagaan merupakan tahapan yang strategis untuk mewujudkan ketahanan masyarakat dalam menghadapi bencana. Terdapat 2 (dua) potensi ancaman bencana dengan intensitas tinggi di Kalimantan Barat yaitu bencana banjir saat musim penghujan dan bencana kebakaran hutan dan lahan saat musim kemarau. Dari lebih kurang sebanyak 2.130

desa dan 99 kelurahan di Kalimantan Barat setidaknya terdapat 471 desa/kelurahan merupakan daerah rawan banjir dan 322 desa/kelurahan rawan kebakaran hutan dan lahan, selain tentunya bencana angin puting beliung/ cuaca ekstrim, bencana gelombang ekstrim/ abrasi, bencana tanah longsor dan bencana banjir bandang. Daerah rawan bencana banjir dan bencana kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Barat terlihat pada gambar peta berikut.

Dalam upaya memperkuat ketangguhan masyarakat, Kalimantan Barat menjalankan kebijakan memperkuat kawasan melalui pembentukan desa tangguh bencana sebagai salah satu upaya kesiapsiagaan dan pengurangan risiko bencana, sehingga desa

terdampak bencana akan memiliki kemampuan mandiri untuk beradaptasi dan menghadapi potensi ancaman bencana, serta memulihkan diri dengan segera dari dampak-dampak bencana yang merugikan. Indikator kunci desa tangguh bencana yaitu penguatan kualitas layanan dasar, penguatan pengelolaan risiko bencana termasuk di dalamnya adaptasi perubahan iklim melalui proses pemberdayaan masyarakat, sistem koordinasi dalam pengelolaan risiko bencana, penguatan sistem kesiapsiagaan untuk mendukung kegiatan tanggap darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana. Perkembangan pembentukan desa Tangguh bencana (destana) di Kalimantan Barat selama kurun waktu 2018 – 2022 sebagai berikut:

Tabel 2. 73 Pembentukan Desa Tangguh Bencana di Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2023

No.	Tahun	Desa Tangguh Bencana Yang Dibentuk per Tahun	Jumlah Desa Tangguh Bencana Yang Terbentuk
1	2018	5	21
2	2019	10	31
3	2020	20	51
4	2021	19	70
5	2022	20	90
6	2023	24*	114*

Sumber: BPBD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2024 (* data sementara)

2.3.4. Daya Saing Iklim Investasi

Investasi memiliki pengaruh ganda untuk jangka panjang (*long-term*). Pada satu sisi, investasi berpengaruh terhadap perkembangan produksi nasional suatu negara karena tersedianya stok modal yang menjadi faktor penting kelangsungan dunia usaha. Disisi lain, investasi berpengaruh pada permintaan agregat. Oleh karena itu, untuk

mencapai steady-state growth atau pertumbuhan ekonomi yang mantap diperlukan kondisi di mana para pelaku usahanya memiliki harapan dan pandangan yang cenderung stabil.

Terdapat 5 (lima) sektor potensial untuk berinvestasi di Kalimantan Barat, yaitu Sektor Tanaman Pangan/Pertanian, Perkebunan dan

Peternakan, Pariwisata, Pertambangan, Perindustrian dan Perdagangan serta Kelautan dan Perikanan. Pertumbuhan ekonomi yang diatas 5 persen dan stabilitas makroekonomi yang tetap terjaga, serta didukung fasilitas infrastruktur seperti Bandara Internasional dan Terminal Kijing yang diproyeksikan menjadi

kawasan pelabuhan internasional terbesar di Kalimantan dan akan menjadi salah satu pelabuhan hub di Indonesia, menjadikan Provinsi Kalimantan Barat layak dilirik sebagai sebuah wilayah yang cukup menjanjikan untuk berinvestasi.

Gambar 2. 21 Peta Bahaya dan Risiko Bencana Banjir di Provinsi Kalimantan Barat





Gambar 2. 22 Peta Bahaya dan Risiko Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan Kalimantan Barat





2.3.4.1. Kemudahan Investasi

1. Transportasi Darat Sedangkan jalan dengan kondisi rusak Infrastruktur jalan di Provinsi Kalimantan Barat sepanjang 412,07 Km dan rusak berat hanya sebagian besar (626,12 Km) dalam kondisi baik. 13,35 Km, tersebar di 9 (Sembilan) Sepanjang 483,23 Km dalam kondisi sedang. kabupaten/kota.

Tabel 2. 74 Panjang Jalan Menurut Kabupaten/Kota dan Kondisi Jalan di Provinsi Kalimantan Barat

Kabupaten/Kota	Kondisi Jalan (km)			
	Baik	Sedang	Rusak	Rusak Berat
Kabupaten Sambas	81,65	39,11	-	-
Kabupaten Bengkayang	9,53	31,19	45,48	4,10
Kabupaten Landak	95,65	59,82	12,62	0,10
Kabupaten Mempawah	-	-	-	-
Kabupaten Sanggau	44,88	53,14	49,98	1,30
Kabupaten Ketapang	138,12	96,64	137,85	1,20
Kabupaten Sintang	19,29	39,12	74,22	2,64
Kabupaten Kapuas Hulu	29,48	7,02	-	-
Kabupaten Sekadau	54,80	36,57	68,03	2,95
Kabupaten Melawi	46,01	31,96	23,01	1,06
Kabupaten Kubu Raya	32,45	34,78	0,78	-
Kabupaten Kayong Utara	36,88	12,19	-	-
Kota Pontianak	9,57	0,32	-	-

Kota Singkawang	27,82	41,39	0,10	-
Kalimantan Barat	626,12	483,23	412,07	13,35

Catatan: Jalan Kabupaten/Kota yang merupakan kewenangan Provinsi

Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Barat

2. Transportasi Laut

Transportasi laut di Provinsi Kalimantan Barat terutama ditopang oleh keberadaan 2 (dua) pelabuhan besar, yaitu Pelabuhan Dwikora di Pontianak dan Pelabuhan Kijing di Mempawah. Pelabuhan Dwikora merupakan akses transportasi laut terbesar kedua di Provinsi Kalimantan Barat, sebelum kemudian posisinya digantikan oleh Pelabuhan Kijing yang berada di Kabupaten Mempawah. Arus kapal- kapal peti kemas secara bertahap dipindahkan dari Pelabuhan Pontianak ke Kijing karena kapasitasnya yang memang lebih besar dan lengkap. Selain itu, pemindahan lalu lintas ke Pelabuhan Kijing juga perlu dilakukan karena kapasitas pelabuhan di Pontianak yang terbatas serta berada di tengah-tengah perkotaan, terlebih lagi saat ini dengan tingginya arus ekspor komoditas tambang dan perkebunan langsung dari Kalimantan Barat. Pelabuhan Kijing memang disiapkan untuk pengembangan jangka panjang. Selain kedua pelabuhan tersebut di atas, terdapat beberapa pelabuhan lain yaitu Pelabuhan Sintete di Sambas yang merupakan Pelabuhan Internasional dan Pelabuhan Laut yang terbuka untuk Perdagangan Luar Negeri, yang didukung oleh Instansi Bea dan Cukai, Imigrasi dan Karantina di dalam kawasan

Pelabuhan. Kemudian ada juga Pelabuhan Kendawangan di Ketapang yang merupakan pelabuhan Pengumpul yang memiliki kedalaman alur 3,8 mLWS dan dapat disandari kapal berukuran 1000 DWT, saat ini menjadi gerbang selatan ke wilayah Provinsi Kalimantan Barat. Adapun total Terminal Khusus yang beroperasi di wilayah kerja UPP Kendawangan sebanyak 13 Terminal dengan kunjungan kapal rata- rata sekitar 200-an kapal perbulannya. Pelabuhan yang dipadati aktivitas pelayaran tersebut, juga ramai dengan komoditas berupa CPO, bauksit dan alumina. Pelabuhan Kendawangan juga merupakan pelabuhan yang disinggahi kapal perintis KM Banda Naira dengan rute Ketapang-Semarang yang mengangkut penumpang dan barang.

3. Transportasi Udara

Bandar Udara Internasional di Kalimantan Barat adalah Bandar Udara Internasional Supadio. Bandara ini dikelola oleh PT. Angkasa Pura II. Luas Bandar Udara Internasional Supadio adalah 528 ha. Maskapai yang melayani penerbangan di Bandara Supadio Pontianak adalah Garuda Indonesia, Sriwijaya Air, NAM Air, Wings Air, Lion Air, Citilink, Super Air Jet dan Pelita Air. Sejak April 2024 statusnya berubah dari internasional menjadi domestic, berdasarkan Keputusan

Menteri Perhubungan Nomor 31/2024 mengenai Penetapan Bandar Udara Internasional sehingga Bandar Udara Supadio hanya melayani penerbangan domestik. Rata-rata Bandara Supadio(PNK) memiliki 18 penerbangan yang berangkat setiap hari. Beberapa rute penerbangan domestik populer dari Bandara Supadio (PNK) yaitu penerbangan dari Pontianak menuju Jakarta, Surabaya, Medan, Yogyakarta, Batam, , Ketapang, Balikpapan, Semarang. Selain Bandara Udara Supadio, terdapat 3 (tiga) bandar udara di Kabupaten Ketapang (Bandar Udara Rahadi Usman), Kabupaten Kapuas Hulu (Bandar Udara Pangsuma) dan Kabupaten Sintang (Bandar Udara Tebelian) yang melayani rute penerbangan lokal.

4. Pos Lintas Batas Negara

● PLBN Entikong

Jarak perjalanan Pontianak– Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Entikong 243 km ditempuh dalam 4- 5 jam. Jalan mulus tidak berlubang membantu kelancaran perjalanan dan kondisi jalan dengan lebar 7 meter (2 lajur tanpa median) membuat kendaraan bisa dipacu laju 100 km per jam. Mendekati Kawasan PLBN Entikong terbangun jalan empat lajur dengan median masing-masing memiliki dua lajur. PLBN Entikong adalah perjalanan Bus Antar Lintas Batas Negara (ALBN) berangkat dari terminal Sei Ambawang terletak di Kabupaten Kubu Raya menuju Kuching (Sarawak, Malaysia) dan Brunei Darussalam. Fasilitas Utama Terminal Barang Internasional (TBI) Entikong berupa kantor

terminal, jembatan timbang, gudang, area peti kemas, bengkel, juga tempat istirahat pengemudi dan masih ada fasilitas penunjang, seperti mushola, area parkir, dan kantin. Diberikan ruang pelayanan ekspor-impor, seperti ruang fasilitas pelayanan kepabeanan (bea cukai), ruang pelayanan karantina pertanian, ruang pelayanan karantina ikan, ruang pelayanan imigrasi, ruang pelayanan perbankan juga beberapa ruang penunjang operasional lainnya. Ada bangunan showcase untuk tempat pemajangan barang ekspor-impor 12 ruang luas 9 meter persegi.

Luas parkir kendaraan peti kemas 2.128 meter persegi menampung peti kemas ukuran 40 feet 24 unit kendaraan dan ukuran 20 feet 39 unit kendaraan peti kemas. Komoditi ekspor melalui TBI Entikong berupa komoditi pertanian, komoditi hewan juga komoditi perikanan. Komoditi pertanian, seperti CPO, buah langsung, arang kayu, bungkil kelapa, buah pisang, lada biji, kelapa bulat, gula merah, tebu, buah jeruk, asam keranji dan aquatic plant. Komoditi hewan yaitu kulit kambing, jangkrik, sarang burung walet, kambing kacang, ulat Hongkong dan daging kuda beku. Sedangkan komoditi perikanan yaitu ikan, udang dogol juga udang wangkang. Komoditi impor di PLBN Entikong belum ada, belum adanya MOU antara Negara Malaysia dan Indonesia mengenai komoditi impor diperbolehkan melalui perbatasan Tebedu–Entikong.

● PLBN Aruk

Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Aruk, merupakan bangunan representasi, simbol, dan kinerja pengelolaan perbatasan negara yang dibangun di Desa Sebunga, Kecamatan Sajingan Besar, Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat. PLBN Aruk dapat ditempuh kurang lebih 6 jam perjalanan darat dari Kota Pontianak (Ibukota Provinsi) dengan jarak tempuh kurang lebih 320 Km. Sementara dari pusat kota Kabupaten Sambas, PLBN Aruk dapat dijangkau kurang lebih 1,5 jam hingga 2 jam, dengan jarak kurang lebih 90 Km. PLBN Aruk memiliki luas 9,1 Ha, terhubung dengan Pintu Perbatasan Biawak di Serawak, Malaysia. PLBN Aruk menjadi tempat terpadunya pemeriksaan imigrasi, bea cukai, karantina pertanian dan ikan, serta karantina kesehatan bagi pelintas batas dari Indonesia ke Malaysia maupun sebaliknya. PLBN Aruk didesain tidak hanya untuk pelayanan lintas batas negara semata. Kedepannya, PLBN Aruk diproyeksikan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru di perbatasan negara. Selain

2.3.4.2. Keamanan Investasi

Kondisi keamanan dan situasi politik yang kondusif serta ketertiban masyarakat adalah merupakan pertimbangan masuknya investasi baik dalam dan luar negeri. Sebagai indikator yang dapat menjadi acuan hal tersebut adalah Indeks Demokrasi dan Indeks Kerukunan Umat Beragama sehingga dapat mencerminkan kedamaian daerah, ketentraman dan ketertiban serta kerukunan masyarakat.

layanan pelintas batas di Zona Inti, Pemerintah membangun Zona Penunjang yang dilengkapi dengan fasilitas seperti pasar wisata, wisma Indonesia, layanan perbankan, rumah ibadah, serta berbagai fasilitas layanan publik lainnya hingga ruang terbuka hijau.

• PLBN Nanga Badau

Butuh waktu sekitar 4 jam untuk tiba di Kawasan Badau, Perbatasan Indonesia dan Malaysia. Perbatasan ini sudah dilengkapi dengan berbagai fasilitas umum dan fasilitas pendukung lainnya seperti ATM, Mushola, penginapan dan Terminal menuju kota Putussibau atau ke Malaysia. Selain itu ada Bangunan Utama PLBN, Pos Lintas Kendaraan Pemeriksaan, Bangunan Pemeriksaan Kargo, Bangunan Utilitas, Monumen, Gerbang Kedatangan dan Keberangkatan dan bangunan lainnya. PLBN Badau juga sudah dilengkapi taman yang hijau dengan beraneka warna Bunga yang semakin mempercantik kawasan perbatasan Badau seluas 8,8 Hektar.

a. Indeks Demokrasi

Indeks demokrasi yang dikeluarkan Badan Pusat Statistik (BPS), bisa menjadi acuan investor dalam menanam modal pada suatu daerah. Sebab, dalam penentuan indeks demokrasi ada indikator keamanan daerah. Perkembangan Indeks Demokrasi Kalimantan Barat dalam 10 tahun ini berfluktuatif dan cenderung meningkat.

Tabel 2. 75 Perkembangan Indeks Demokrasi Kalimantan Barat 2012-2022

Aspek IDI	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Aspek Lembaga Demokrasi	92,4	97,5	98,4	96,8	83,3	97,2	93,9	92,6	96,8	81,15	91,35
Aspek Hak-Hak Politik	37,2	49,4	63,1	65,6	75,7	76,4	64	71,5	70,8	72,83	78,58
Aspek Kebebasan Sipil	76,2	58,6	85,8	68	65,5	60,9	73,1	68,7	77,7	68,46	75,23
Indeks Demokrasi	65,4	67,5	80,6	76,4	75,3	79,1	76,1	77,7	81,1	74,03	81,48

Sumber: BPS Kalbar 2023 (data diolah)

Pada tahun 2022 Indeks Demokrasi Provinsi Kalimantan Barat menempati urutan ke 8 (delapan) di Indonesia. Di pulau Kalimantan Indeks Demokrasi Provinsi Kalimantan Barat menempati urutan kedua setelah Provinsi Kalimantan Timur, diikuti oleh Provinsi Kalimantan Selatan pada kategori “tinggi” (nilai indeks >80), Provinsi Kalimantan Tengah dan Provinsi Kalimantan Utara pada kategori “sedang” (nilai indeks 60-80). Indeks Demokrasi

Kalimantan Barat sebesar 81.48, menunjukkan angka Indeks Demokrasi Kalimantan Barat pada kategori “tinggi” (nilai indeks >80).

b. Indeks Kerukunan Umat Beragama

Indeks Kerukunan Umat Beragama (KUB) dibangun dari beberapa variabel yaitu toleransi, kerja sama, dan kesetaraan, mencerminkan bahwa secara umum tingkat toleransi dan kondisi keagamaan daerah.

Tabel 2. 76 Indeks Kerukunan Umat Beragama Kalimantan Barat

Tahun	2018	2019	2020	2021	2022
Indeks	74,8	76,69	n/a	77,61	79,11

Sumber: Kementerian Agama 2023

Secara umum Indeks KUB Kalimantan Barat terus meningkat, sejak tahun 2018 sebesar 74,8 hingga tahun 2022 mencapai 79,11 masuk dalam peringkat 10 besar secara nasional. Hal ini tentu

mengindikasikan kondisi kerukunan umat beragama di Kalimantan Barat yang kondusif dengan toleransi tinggi sehingga memperkuat stabilitas daerah.

2.3.4.3. Daya Saing Daerah

Tingkat daya saing daerah Provinsi Kalimantan Barat berdasarkan Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) tahun 2022 memiliki skor IDSD di bawah skor nasional, yaitu 2,94. Ada dua pilar yang memiliki skor lebih tinggi dari nasional adalah pilar institusi dan pilar kesehatan. Ini tentunya masih memerlukan upaya-upaya dalam peningkatan skor 10 pilar lainnya agar dapat

menjadikan IDSD Kalimantan Barat menjadi lebih baik lagi atau menjadi diatas angka skor Nasional. Untuk kabupaten/kota yang tertinggi adalah Kota Pontianak (skor 3,37) dan terendah adalah Kabupaten Sekadau (skor 2,42) sedang Kota Singkawang memiliki skor yang sama dengan Provinsi Kalimantan Barat.

Tabel 2. 77 Skor IDSD Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2022

Kabupaten/ Kota	Lingkungan Pendukung				SDM		Pasar				Ekosistem Inovasi		Skor Idsd
	Pilar	Pilar	Pilar	Pilar	Pilar	Pilar	Pilar	Pilar	Pilar	Pilar	Pilar	Pilar	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Nasional*	4,14	2,91	3,57	3,05	3,76	3,73	2,68	3,73	2,66	1,31	5,00	2,62	3,26
Kalimantan Barat	4,40	2,54	3,20	3,05	3,83	3,24	2,36	3,39	2,07	0,56	5,00	1,60	2,94
Sambas	4,16	2,03	2,85	2,80	3,77	2,50	2,83	2,22	1,50	0,91	5,00	1,11	2,64

Kabupaten/ Kota	Lingkungan Pendukung				SDM		Pasar				Ekosistem Inovasi		Skor Idsd
	Pilar	Pilar	Pilar	Pilar	Pilar	Pilar	Pilar	Pilar	Pilar	Pilar	Pilar	Pilar	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Bengkayang	3,82	1,60	2,96	2,55	4,15	2,47	2,76	2,02	1,64	0,38	5,00	1,07	2,54
Landak	4,27	1,53	2,51	2,89	4,08	2,67	2,58	2,22	1,55	0,48	5,00	0,63	2,53
Mempawah	4,22	1,52	4,08	2,28	3,92	2,80	3,04	2,92	1,85	0,36	5,00	0,53	2,71
Sanggau	4,18	1,15	2,73	3,03	3,92	2,43	2,09	2,36	1,82	0,90	5,00	0,25	2,49
Ketapang	-	2,48	2,07	3,18	3,92	2,62	1,91	2,14	1,52	1,24	5,00	0,71	-
Sintang	4,03	2,15	2,08	2,87	4,00	2,41	2,89	2,30	1,77	0,64	5,00	1,00	2,60
Kapuas Hulu	4,32	2,26	2,01	2,96	4,00	2,70	2,37	2,19	1,72	0,43	5,00	0,60	2,55
Sekadau	4,22	1,48	2,00	2,63	4,00	2,37	2,60	2,25	1,83	0,29	5,00	0,39	2,42
Melawi	3,89	2,09	1,73	2,50	4,08	2,53	5,00	2,33	1,29	0,23	5,00	0,80	2,62
Kayong Utara	3,95	2,72	2,46	2,56	3,69	2,45	2,94	2,31	1,19	0,17	5,00	0,40	2,49
Kubu Raya	4,21	2,54	2,68	3,02	3,92	2,85	2,27	2,53	1,61	1,23	5,00	0,94	2,73
Pontianak	4,54	2,09	3,67	2,75	4,08	3,65	4,25	3,55	1,61	1,63	5,00	3,56	3,37
Singkawang	4,29	2,26	3,54	2,37	4,00	2,85	3,45	3,83	1,81	0,46	5,00	1,40	2,94

Keterangan:										
Pilar 1: Institusi			Pilar 5: Kesehatan		Pilar 9: Sistem keuangan					
Pilar 2: Infrastruktur			Pilar 6: Keterampilan		Pilar 10: Ukuran pasar					
Pilar 3: Adopsi TIK			Pilar 7: Pasar produk		Pilar 11: Dinamisme bisnis					
Pilar 4: Stabilitas ekonomi makro			Pilar 8: Pasar tenaga kerja		Pilar 12: Kapabilitas inovasi					

Sumber: BRIN 2023

2.4. ASPEK PELAYANAN UMUM

Pelayanan publik atau pelayanan umum merupakan segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang menjadi tanggungjawab Pemerintah

Daerah provinsi dan kabupaten/kota dalam upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan

2.4.2. Fokus Layanan Urusan Pemerintah Wajib

2.4.1.1. Pendidikan

Indikator kinerja dalam bidang pendidikan pada aspek pelayanan umum bidang pendidikan digambarkan melalui angka putus sekolah SD/MI, SMP/MTs.

1. Angka Putus Sekolah

Angka putus sekolah menunjukkan keadaan proporsi kelompok usia sekolah yang sudah tidak bersekolah lagi atau yang tidak menamatkan suatu jenjang pendidikan tertentu. Angka putus

sekolah tahun 2017 pada untuk jenjang Pendidikan yang merupakan kewenangan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat yaitu jenjang sekolah tingkat SMA/SMK/MA dimana pada tahun 2019 sebesar 255 murid dan naik pada tahun 2020 dan 2021 namun kemudian turun pada tahun 2022 yaitu 294 murid.

Tabel 2. 78 Perkembangan Angka Putus Sekolah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 - 2022

No	Bidang Urusan Indikator	Tahun			
		2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Angka Putus Sekolah SMA/MA	255	693	882	294

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat, Tahun 2021.

2. Angka Partisipasi Kasar

Angka Partisipasi Kasar (APK) menurut Badan Pusat Statistik (BPS) yaitu perbandingan antara rasio jumlah siswa, pada jenjang usia manapun, yang sedang sekolah di tingkat Pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tertentu. APK adalah indikator yang dianggap paling sederhana untuk mengukur daya serap penduduk usia sekolah di masing-masing jenjang

pendidikan. Pada APK, korelasinya yaitu semakin tinggi angka partisipasi kasar menunjukkan semakin besar jumlah siswa yang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan, walaupun dengan mengesampingkan aspek usia dari siswa yang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan. Tabel berikut menunjukkan APK pendidikan yang menjadi urusan wajib Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat tahun 2019-2022.

Tabel 2. 79 Perkembangan Angka Partisipasi Kasar Provinsi Kalimantan Barat
Tahun 2019-2022 (%)

No	Indikator	TAHUN				Pertumbuhan
		2019	2020	2021	2022	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/Paket C	82,49	84,51	85,21	84,79	-0,49

Sumber: BPS-Kalbar 2023, Susenas 2019-2022

Secara umum, dari tahun 2021-2022 terjadi penurunan APK pendidikan menengah sebesar -0,49 persen. Dengan demikian berarti minat penduduk usia pendidikan menengah untuk mendapatkan pendidikan menengah mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya.

Jumlah penduduk yang bersekolah di jenjang sekolah menengah dan penduduk usia 16- 18 tahun yang bersekolah di sekolah menengah pada setiap kabupaten/kota disajikan pada Tabel berikut

Tabel 2. 80 Penduduk Usia 16-18 Tahun dan Penduduk yang Bersekolah di Sekolah Menengah
Berdasarkan Kabupaten di Kalimantan Barat 2021

Kab/Kota	Penduduk Usia 16-18 tahun	Penduduk Bersekolah di Sekolah Menengah	Penduduk Usia 16-18 Bersekolah di Sekolah Menengah
(1)	(2)	(3)	(4)
KALIMANTAN BARAT	262.700	198.613	198.613
Sambas	24,850	18,002	13,550
Bengkayang	11,505	8,970	6,506
Landak	19,299	16,338	11,640
Mempawah	48,510	35,662	25,002
Sanggau	19,559	14,189	10,112
Ketapang	29,151	17,184	12,601
Sintang	19,702	15,428	10,938
Kapuas Hulu	11,443	8,986	6,505
Sekadau	8,796	7,500	5,144
Melawi	9,815	8,141	5,849
Kayong Utara	5,708	4,684	3,500
Kubu Raya	27,631	20,446	14,649
Kota Pontianak	11,360	9,823	7.128
Kota Singkawang	15,371	11,642	8,231

Sumber: APK dan APM PAUD, SD, SMP dan SMA Tahun Ajaran 2018/2021

3. Angka Partisipasi Murni

Tabel 2. 81 Perkembangan Angka Partisipasi Murni Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2022

No	INDIKATOR	TAHUN				
		2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C	57,70	65,27	64,50	64,97	65,36

Sumber: BPS Kalimantan Barat, Susenas 2010-2022

Tabel 2. 82 Perkembangan Angka Partisipasi Murni Kabupaten Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2022

Kab/Kota	Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/Paket C				
	2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(5)
KALIMANTAN BARAT	57,70	65,27	64,50	64,97	65,36
Sambas	59,30	67,41	63,35	69,55	69,08
Bengkayang	62,40	76,89	63,79	69,75	70,74
Landak	62,10	72,18	62,33	61,40	63,47
Mempawah	67,20	74,11	78,47	80,90	80,23
Sanggau	55,60	65,12	59,06	62,69	62,35
Ketapang	47,60	54,89	51,62	52,90	54,75
Sintang	59,00	69,26	67,34	70,87	67,71

Kapuas Hulu	57,90	67,80	64,43	66,68	67,32
Sekadau	63,50	76,47	71,78	71,69	73,10
Melawi	61,20	68,00	62,87	60,10	61,72
Kayong Utara	66,50	74,54	70,33	68,65	73,43
Kubu Raya	57,50	65,03	63,38	66,50	67,55
Kota Pontianak	55,80	58,40	71,50	63,63	63,21
Kota Singkawang	55,90	60,84	63,86	62,43	63,13

Sumber: *) BPS Kalbar 2023

2.4.1.2. Kesehatan

Pembangunan sektor kesehatan merupakan salah satu pembangunan yang sangat strategis untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan kesehatan di Kalimantan Barat telah menunjukkan pencapaian yang cukup positif. Terdapat 4 (empat) Indikator Kinerja Utama pada sektor kesehatan yang perlu dicapai, yang salah satunya yaitu Angka Harapan Hidup. Tiga indikator lainnya adalah Angka Kematian Bayi (AKB), Angka Kematian Ibu (AKI), dan Angka Kematian Balita (AKaBa) dengan kondisi faktual saat ini (tahun 2022) secara umum AKB Kalbar mengalami kenaikan yaitu mencapai 11 per 1.000 kelahiran hidup. Sementara untuk AKI di Kalbar pada tahun 2022 mengalami penurunan yang signifikan yaitu sebesar 85/100.000 kelahiran hidup dimana pada tahun sebelumnya berada di angka 214/100.000 kelahiran hidup.

Tabel 2. 83 Perkembangan Angka Kematian Ibu (AKI), Angka Kematian Bayi (AKB) dan Angka Kematian Balita (AKABA) Provinsi Kalimantan Barat

Indikator	2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Angka Kematian Ibu melahirkan per 100.000	95	130	131	214	85

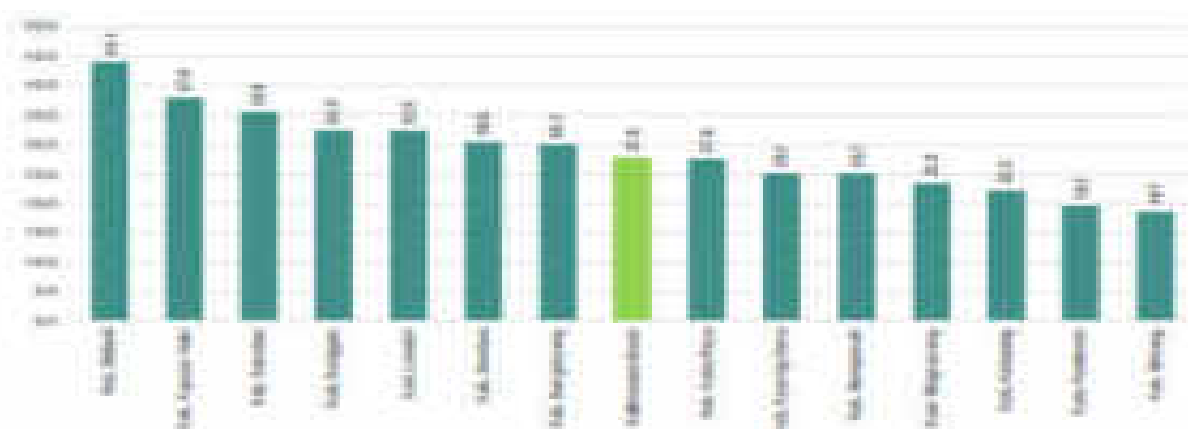
Kelahiran Hidup					
Angka Kematian Bayi per 1000 Kelahiran Hidup	7	7	8	8	11
Angka Kematian Balita per 1000 Kelahiran	8	7	9	NA	NA
Prevalensi Stunting	28,44	27,30	22,15	17,7	27.8
Prevalensi Penyakit Menular dan Tidak Menular	NA	NA	NA	7,76	3,45

Sumber: Dinas Kesehatan Prov. Kalbar, Tahun 2022

*Prevalensi Stunting Sumber Data Kemenkes RI 2022

a) Prevalensi Stunting

Gambar 2. 23 Prevalensi Balita Stunting di Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2022



Sumber Data: Kemenkes RI 2022

Prevalensi Stunting di Kalimantan Barat pada tahun 2022 mencapai 27.8, lebih tinggi daripada Prevalensi Balita Stunting Nasional sebesar 21,6 .Prevalensi balita stunting tertinggi di Kalimantan

Barat terdapat di Kabupaten Melawi yaitu sebesar 44,1 dan yang terendah di Kabupaten Sintang sebesar 18,7.

2.4.1.3. Perumahan dan Kawasan Pemukiman

Kondisi perumahan dan permukiman Provinsi Kalimantan Barat tahun 2021-2022 dijelaskan melalui indikator rumah layak huni. Capaian tahun 2022 menunjukkan indikator rumah layak

huni sebesar 60,74 persen jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya capaian tersebut lebih rendah yaitu sebesar 61,17 persen pada tahun sebelumnya.

Tabel 2. 84 Kondisi Perumahan Permukiman di Provinsi Kalimantan Barat

No	Indikator	Satuan	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(7)	(8)
1	Rumah yang layak huni	%	61,17	60,74

Sumber: Dinas Perumahan, Pemukiman dan Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Barat 2022.

Capaian tahun 2022 menunjukkan persentase penduduk yang terlayani sistem Air Limbah yang memadai (sesuai standar) adalah sebesar 62,23 persen mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya sebesar 50,42 persen. Sedangkan persentase penduduk yang berakses air minum pada tahun 2022 sebesar 55,28 persen menurun

dari kondisi tahun sebelumnya sebesar 68,79 persen. Sementara itu Panjang jalan permukiman perkotaan dan perdesaan yang telah dibangun pada tahun 2018 yakni 142.111 Kilometer yang tersebar di 14 (empat belas) Kabupaten/Kota di Kalimantan Barat.

Tabel 2. 85 Perkembangan Kondisi Bidang Cipta Karya di Provinsi Kalimantan Barat

Tahun 2018-2022

No	Indikator	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Persentase Penduduk yang berakses air minum	%	54,69	66,87	64,03	68,79	55,28
2	Persentase Penduduk yang terlayani sistem Air Limbah yang memadai (sesuai standar)	%	47,52	61,23	61,82	50,42	62,23
3	Persentase Penduduk yang terlayani sistem Drainase skala kota	%		-	-	10,18	-
4	Persentase Penduduk yang terlayani Persampahan sesuai standar	%		-	-	18,44	-

No	Indikator	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
5	Panjang Jalan Permukiman Perkotaan dan Perdesaan	km	142.111	253.000	-	-	-

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Barat, Tahun 2022

Sanitasi adalah perilaku manusia yang disengaja untuk membudayakan kebiasaan hidup bersih dan sehat untuk mencegah manusia terkontaminasi langsung dengan bahan-bahan kotor dan berbahaya dengan harapan bisa menjaga dan memperbaiki tingkat kesehatan manusia. Kondisi pelayanan sanitasi di wilayah Provinsi Kalimantan Barat pada tahun 2022 mencapai 62,23. Adapun untuk pelayanan sanitasi setiap kabupaten adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 86 Pelayanan Sanitasi Kabupaten/Kota Tahun 2022

No	Kabupaten / Kota	Total Jumlah Rumah Tangga (KK)	Σ Jumlah Rumah Tangga Bersanitasi (KK)	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Sambas	112,285	92,892	82.73
2	Mempawah	87,545	70,100	80.07
3	Sanggau	144,195	88,891	61.65
4	Ketapang	182,934	112,742	61.63
5	Sintang	133,735	90,498	67.67
6	Kapuas Hulu	85,656	39,170	45.73
7	Bengkayang	81,651	37,082	45.42
8	Landak	101,071	77,489	76.67

No	Kabupaten / Kota	Total Jumlah Rumah Tangga (KK)	Σ Jumlah Rumah Tangga Bersanitasi (KK)	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
9	Sekadau	52,413	38,392	73.25
10	Melawi	66,126	5,061	7.65
11	Kayong Utara	28,955	17,662	61.00
12	Kubu Raya	180,348	117,390	65.09
13	Kota Pontianak	160,713	160,147	99.65
14	Kota Singkawang	47,975	45,195	94.21
	JUMLAH	1,076,566	669,979	62.23

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2022

Air bersih merupakan salah satu kebutuhan yang sangat mendasar bagi kehidupan masyarakat baik untuk minum, maupun mencuci atau mandi serta untuk keperluan lainnya. Kebutuhan air bersih di Kalimantan Barat pada umumnya masih bersumber pada air sungai, air danau, dan air hujan. Kebutuhan air bersih di Kalimantan Barat pada umumnya disalurkan dan dikelola oleh

PDAM, maupun oleh masyarakat sendiri. Pelayanan air bersih kepada masyarakat di Kalimantan Barat belum sesuai dengan yang diharapkan oleh masyarakat, karena tidak semua wilayah di Kalbar dapat diakses oleh air bersih. Cakupan pelayanan air bersih di Kalimantan Barat pada tahun 2022 mencapai 55,28.

Tabel 2. 87 Data Rumah Tangga Pengguna Air Bersih di Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2022

No	Kabupaten / Kota	Total Jumlah Rumah Tangga (KK)	Σ JUMLAH RUMAH TANGGA PENGGUNA AIR BERSIH (PERPIPAAN DAN NON PERPIPAAN)	PERSENTASE AIR MINUM
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Sambas	125,981	74,971	59.51
2	Mempawah	87,545	55,789	63.73
3	Sanggau	144,195	73,545	51.00
4	Ketapang	182,934	128,045	70.00
5	Sintang	133,735	63,418	47.42
6	Kapuas Hulu	85,656	48,592	56.73
7	Bengkayang	81,651	50,184	61.46
8	Landak	101,071	22,412	22.17
9	Sekadau	52,413	38,861	74.14
10	Melawi	66,126	17,034	25.76
11	Kayong Utara	28,676	17,722	61.80
12	Kubu Raya	178,229	56,191	31.53
13	Kota Pontianak	160,713	143,166	89.08

No	Kabupaten / Kota	Total Jumlah Rumah Tangga (KK)	Σ JUMLAH RUMAH TANGGA PENGGUNA AIR BERSIH (PERPIPAAN DAN NON PERPIPAAN)	PERSENTASE AIR MINUM
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
14	Kota Singkawang	47,975	23,591	49.17
	JUMLAH	1,428,925	789,930	55.28

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2022

1. Jumlah Kabupaten Yang Tertangani Infrastruktur Jalan Permukiman Perdesaan Sesuai dengan Indeks Desa Membangun

Jumlah Kabupaten yang Tertangani Infrastruktur Jalan Permukiman Perdesaan sesuai dengan Indeks Desa Membangun pada tahun 2018 sebanyak 12 kabupaten dan untuk tahun 2019 dengan target sebanyak 12 kabupaten sudah tercapai.

2. Jumlah Permukiman Perkotaan Yang Tertangani Infrastrukturnya

Sudah mencapai target sebanyak 2 Kota dengan realisasi luas terbangun seluas 638 m² dalam bentuk jalan, drainase, lapangan *volley*, *play group*.

3. Rumah Tidak Layak Huni yang Tertangani

Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 menghendaki bahwa perumahan dan kawasan permukiman adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas pembinaan, penyelenggaraan perumahan, penyelenggaraan kawasan permukiman, pemeliharaan dan perbaikan, pencegahan. Dinas Perkim mempunyai tugas dan fungsi yang strategis, bagaimana penanganan perumahan dan kawasan permukiman yang kumuh, bagaimana penanganan rumah tidak layak huni dan bagaimana meningkatkan ketersediaan prasarana dan sarana serta utilitas. Pada tahun 2020-2022 penangan rumah tidak layak huni sebagai berikut:

Tabel 2. 88 Penanganan Rumah Tidak Layak Huni

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Tahun 2020	Jumlah RTLH Tahun 2020	Penanganan RTLH Tahun 2020-2022		
				2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Sambas	192.028	42.634	2.069	150	185
2	Mempawah	64.288	7.019	1.325	175	115
3	Sanggau	144.977	44.641	1.666	300	15
4	Ketapang	121.349	34.165	1.805	883	280
5	Sintang	68.985	17.604	2.984	3.516	801
6	Kapuas Hulu	59.928	14.099	2.815	50	1.980
7	Bengkayang	47.177	8.352	2.710	100	129
8	Landak	79.496	15.800	2.343	50	50
9	Sekadau	48.262	8.556	840	420	301
10	Melawi	56.433	11.019	2.059	624	373
11	Kayong Utara	25.985	4.904	1.052	100	140
12	Kubu Raya	136.423	6.618	2.380	2.932	1.444
13	Pontianak	149.937	859	1.478	409	367
14	Singkawang	54.192	1.475	1.659	51	25

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Tahun 2020	Jumlah RTLH Tahun 2020	Penanganan RTLH Tahun 2020-2022		
				2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Jumlah	1.249.460	217.745	27.185	9.760	6.205

Sumber: Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Prov. Kalbar tahun 2022

2.4.1.4. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kinerja pembangunan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang terus mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya. Capaian persentase panjang jalan provinsi dalam kondisi mantap meningkat dari 66,94 persen tahun 2021, menjadi 72,28 persen pada tahun 2022. Kondisi irigasi provinsi dalam kondisi baik juga mengalami peningkatan dari 55,84 persen tahun 2021, menjadi 56,90 persen pada tahun 2022. Sementara indikator persentase ketaatan terhadap rencana tata ruang juga mengalami Peningkatan dari 68 persen tahun 2021, menjadi 72 persen pada tahun 2022. Berikut disampaikan kondisi pekerjaan umum dan penataan ruang Provinsi Kalimantan Barat tahun 2018-2022.

1. Jalan dan Jembatan

Pada tahun 2021 kondisi Panjang jalan Provinsi dalam kondisi mantap yakni sebesar 66,94 persen dari total Panjang jalan provinsi sepanjang 1.534,75 Kilometer. Sedangkan dari hasil pembaharuan data yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Barat pada tahun 2022 kondisi Jalan Provinsi dalam kondisi mantap adalah 1181,60 Kilometer atau 72,28 persen. Untuk Jumlah Jembatan yang dikelola pada tahun 2022 yakni sebanyak 906 unit dengan total Panjang jembatan yakni 11.392,74 Meter.

Tabel 2. 89 Kondisi Jalan dan Jembatan di Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2023

No	Indikator	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Panjang Jalan Provinsi Dalam Kondisi Mantap	KM	762,98	871,85	921,61	1027,51	1109,31
2	Panjang Jalan Provinsi	KM	1.534,75	1.534,75	1.534,75	1.534,75	1.534,75
3	Persentase Jalan Provinsi Dalam Kondisi Mantap	%	49,71	56,81	60,05	66,94	72,28
4	Panjang Jembatan Provinsi	M	11.392,74	11.392,74	11.392,74	11.392,74	11.392,74
5	Jumlah Jembatan	Unit	906	906	906	906	906

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Barat, Tahun 2022.

a. Peningkatan Persentase Kemantapan Jalan

Panjang jalan yang berstatus jalan provinsi di wilayah Provinsi Kalimantan Barat pada tahun

2022 mencapai 72,28 persen dari 1.534,75 km.

Berikut tabel jenis dan kondisi jalan di Kalimantan Barat Tahun 2022:

Tabel 2. 90 Kondisi Jalan Tahun 2020 - 2022

No	Kondisi permukaan	Capaian Tahun 2020		Capaian Tahun 2021		Capaian Tahun 2022	
		Panjang (km)	Persentase	Panjang (km)	Persentase	Panjang (km)	Persentase
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Mantap	921,61	60,05	1027,51	66,95	1109,31	72,28
2	Tidak Mantap	616,13	39,95	507,25	33,05	425,43	27,72
	Total	1.534,74	100	1.534,74	100	1.534,74	100

Sumber: Dinas PUPR Prov. Kalbar Tahun 2022.

2. Sumber Daya Air

1) Jenis dan Kriteria Status Daerah Irigasi

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 14 /PRT/M/2015 Tentang Kriteria dan Penetapan Status Daerah Irigasi, jenis dan kriteria status Daerah Irigasi diklasifikasikan sebagai berikut:

Berdasarkan jenisnya, Daerah Irigasi terdiri dari:

- Daerah Irigasi Permukaan;
- Daerah Irigasi Air Bawah Tanah;
- Daerah Irigasi Rawa;
- Daerah Irigasi Pompa;

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2025-2045

e. Daerah Irigasi Tambak.

Kriteria penetapan status Daerah Irigasi, yakni sebagai berikut :

- Kewenangan Pemerintah Pusat
 - Luasan > 3.000 Ha;
 - Lintas Negara;
 - Lintas Provinsi.
- Kewenangan Pemerintah Provinsi
 - Luasan 1.000 - 3.000 Ha;
 - Lintas Kabupaten/Kota.
- Kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota
 - Luasan < 1.000 Ha.

2) Daerah Irigasi Provinsi

Luas Daerah Irigasi kewenangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat berdasarkan jenisnya, sebagaimana tercantum pada Tabel berikut

Tabel 2. 91 Kondisi Daerah Irigasi di Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2022

No.	Jenis Daerah Irigasi	Jumlah Daerah Irigasi	Luasan (Ha)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Daerah Irigasi Permukaan (D.I.)	12	6.765
2.	Daerah Irigasi Rawa (D.I.R.)	35	54.520
3.	Daerah Irigasi Tambak (D.I.T.)	1	1.350
Total		48	62.635

Sumber: Dinas PUPR Prov. Kalbar, Tahun 2022.

Kondisi irigasi diklasifikasikan, sebagai berikut :

- 1) Kondisi baik: Tingkat kerusakan < 10
- 2) Kondisi rusak ringan: Tingkat kerusakan 10 – 20
- 3) Kondisi rusak sedang: Tingkat kerusakan 21 – 40
- 4) Kondisi rusak berat: Tingkat kerusakan > 40

Kondisi irigasi kewenangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat per Tahun 2022 berdasarkan jenisnya diuraikan pada 2.48 di bawah.

Tabel 2. 92 Kondisi Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2022

No.	Jenis Daerah Irigasi	Luas Areal (Ha)	Kondisi per Tahun 2022							
			Baik		Rusak Ringan		Rusak Sedang		Rusak Berat	
			(Ha)	(%)	(Ha)	(%)	(Ha)	(%)	(Ha)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1.	Daerah Irigasi Permukaan (D.I.)	6.765,00	2.492,14	36,84	1.397,00	20,65	449,00	6,64	2.426,86	35,87

2.	Daerah Irigasi Rawa (D.I.R.)	54.520, 00	32.47 5	59,5 7	5.689, 00	10, 43	6.518	11, 96	9.838, 00	18,0 5
3.	Daerah Irigasi Tambak (D.I.T.)	1.350,0 0	675,0 0	50,0 0	202,5 0	15, 00	67,50	5,0 0	405,0 0	30,0 0
Total		62.635	35.64 2,14	56,9 0	7288, 50	11, 64	7034, 50	11, 23	12.66 9,86	20,2 3

Sumber: Dinas PUPR Prov. Kalbar.

Persentase irigasi provinsi dalam kondisi baik tahun 2022 sebesar 56,90. Pengelolaan jaringan daerah Irigasi rawa, daerah jaringan irigasi permukaan dan daerah jaringan irigasi tambak di Kalimantan Barat mempunyai peranan yang strategis, mengingat jaringan tersebut berperan dalam rangka untuk mendukung ketahanan pangan di Pulau Kalimantan, khususnya Kalimantan Barat, Secara umum luas jaringan irigasi pada tahun 2022 mencapai 62.635 ha dengan kondisi baik mencapai 35.642,14 ha (56,90), kondisi rusak ringan mencapai 7.288,50 (11,64), kondisi rusak sedang mencapai 7.034,50 (11,23) dan kondisi rusak berat mencapai 12.669,86 ha (20,23). Luas jaringan irigasi rawa pada tahun 2022 mencapai 54.520 ha, dengan

kondisi baik mencapai 32.475 ha, kondisi rusak ringan mencapai 5.689 ha, kondisi rusak sedang mencapai 6.518 ha dan kondisi rusak berat mencapai 9.838 ha. Sedangkan luas jaringan daerah Irigasi Permukaan pada tahun 2022 mencapai 6.765 ha, dengan kondisi baik mencapai 2.492,14 ha, kondisi rusak ringan mencapai 1.397 ha, kondisi rusak sedang mencapai 449 ha dan kondisi rusak berat mencapai 2.426,86 ha dan untuk luas jaringan daerah irigasi tambak pada tahun 2022 mencapai 1.350 ha, dengan kondisi baik mencapai 675 ha, kondisi rusak ringan mencapai 202,50 ha, kondisi rusak sedang mencapai 67,50 ha dan kondisi rusak berat mencapai 405 ha.

Tabel 2. 93 Kondisi Irigasi Rawa di Kalbar Tahun 2018-2022

No	Kondisi Daerah Irigasi Rawa	Capaian 2018 (Ha)	Capaian 2019 (Ha)	Capaian 2020 (Ha)	Capaian 2021 (Ha)	Capaian 2022 (Ha)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

1	Baik	28.784	30.407	30.018	31.325	32.475
2	Rusak Ringan	6.795	6.795	6.274	5.689	5.689
3	Rusak Sedang	6.860	6.860	6.800	6.620	6.518
4	Rusak Berat	12.082	10.459	11.428	10.887	9.838
	Jumlah	54.520	54.520	54.520	54.520	54.520

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2022

Tabel 2. 94 Kondisi Irigasi Permukaan di Kalbar Tahun 2018-2022

No	Kondisi Daerah Irigasi Permukaan	Capaian 2018 (Ha)	Capaian 2019 (Ha)	Capaian 2020 (Ha)	Capaian 2021 (Ha)	Capaian 2022 (Ha)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Baik	2.433	2.614	2.480	2.492,14	2.492,14
2	Rusak Ringan	2.404	2.404	1.397	1.397	1.397
3	Rusak Sedang	459	357	449	449	449
4	Rusak Berat	1.469	1.391	2.439	2.426,86	2.426,86
	Jumlah	6.765	6.765	6.765	6.765	6.765

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2022.

Tabel 2. 95 Kondisi Irigasi Tambak di Kalbar Tahun 2018-2022

No	Kondisi Daerah Irigasi Tambak	Capaian 2018 (Ha)	Capaian 2019 (Ha)	Capaian 2020 (Ha)	Capaian 2021 (Ha)	Capaian 2022 (Ha)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Baik	675	675	675	675	675
2	Rusak Ringan	203	202.5	203	202,5 0	202,50
3	Rusak Sedang	68	67.5	68	67,50	67,50
4	Rusak Berat	405	405	405	405	405
	Jumlah	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2022.

Indikator lainnya untuk sumber daya air digambarkan melalui Persentase peningkatan/pemeliharaan sungai sebagai pengendalian banjir, kapasitas tersedianya air

baku untuk memenuhi kebutuhan pokok dan berkurangnya persentase pantai kritis. Untuk capaian selama periode 2018-2022 digambarkan pada tabel berikut:

Tabel 2. 96 Kondisi Pekerjaan Umum Bidang Sumber Daya Air Provinsi Kalimantan Barat
Tahun 2018-2022

No	Indikator	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Persentase peningkatan/pemeliharaan sungai sebagai pengendalian banjir	%	46,7 6	50,6 4	51,1 8	52,77	53,0 2
2	Persentase peningkatan pengendalian banjir (sungai dan saluran) dalam kondisi baik	%	-	3,88	0,54	1,59	0.25
3	Kapasitas tersedianya air baku untuk memenuhi kebutuhan pokok	Liter/de ti k	2	2	-	-	-
4	Berkurangnya persentase pantai kritis	%	56,8 6	56,4 7	-	-	-

Sumber: Dinas PUPR Prov. Kalbar, Tahun 2022.

Persentase peningkatan/pemeliharaan sungai sebagai pengendalian banjir tahun 2022 sebesar 53,02 sedangkan capaian tahun 2021 sebesar 52,77. Capaian tahun 2019 tersebut telah mencapai target (target 2022 52,70). Persentase berkurangnya pantai kritis tahun 2018 sebesar 56,85 sedangkan tahun 2019 sebesar 56,47. Wilayah pesisir di Kalimantan Barat sebanyak 7 kabupaten/Kota yang meliputi Kabupaten Sambas, Kota Singkawang, Kabupaten Bengkayang, Kabupaten Mempawah,

Kabupaten Kubu Raya, Kabupaten Kayong Utara dan Kabupaten Ketapang. Adapun panjang pantai kritis di Kalimantan Barat pada tahun 2019 mencapai 59.530 m. Dari total panjang pantai kritis yang ada di Kalbar yang belum tertangani sampai tahun 2019 mencapai 33.619,41 meter, sedang yang sudah tertangani mencapai 25.910,59 meter. Sejak tahun 2020 sampai dengan 2022 pantai kritis tidak pernah lagi ditangani sehingga data tersebut masih sama dengan tahun 2019.

Tabel 2. 97 Penanganan Pantai Kritis

Uraian	Tahun 2018 (m)	Tahun 2019 (m)	Tahun 2020 (m)	Tahun 2021 (m)	Tahun 2022 (m)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Panjang Pantai Kritis (m)	59.530	59.530	59.530	59.530	59.530
Penanganan pantai kritis	0	224	224	224	224
Panjang Pantai Kritis Yang sudah ditangani	25.686,5 9	25.910,5 9	25.910,59	25.910,5 9	25.910,59

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2022.

Adapun capaian indikator kinerja Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang pada tahun 2021-2022 adalah sebagai berikut:

- a) Persentase Panjang Jalan Provinsi Kondisi Mantap pada tahun 2021 adalah sebesar 66,94 dan pada tahun 2022 persentase panjang jalan mantap meningkat menjadi sebesar 72,28.
- b) Persentase Irigasi Provinsi dalam Kondisi Baik pada tahun 2021 adalah sebesar 55,84 sedangkan pada tahun 2022 adalah sebesar 56,90
- c) Persentase peningkatan / pemeliharaan sungai sebagai pengendalian banjir pada tahun 2021 adalah sebesar 52,77 dan pada tahun 2022 meningkat menjadi 53,02
- d) Persentase Penduduk yang berakses air minum pada tahun 2021 adalah sejumlah 68,79 dan pada tahun 2022 juga sebesar 68,79

- e) Persentase Penduduk yang terlayani sistem air limbah yang memadai (sesuai standar) pada tahun 2021 adalah 50,42 dan pada tahun 2022 adalah 50,42
- f) Jumlah luasan bangunan Gedung yang dibangun dan ditata (m²) pada tahun 2021 adalah sebesar 29.643,24 dan pada tahun 2022 adalah sebesar 15.026,08
- g) Jumlah Luasan kawasan yang dibangun dan ditata (m²) pada tahun 2021 adalah sebesar 3.227,83 dan pada tahun 2022 meningkat menjadi 6.311,63
- h) Persentase Tenaga Kerja Ahli Konstruksi yang bersertifikat pada tahun 2021 adalah sebesar 75,11 dan pada tahun 2022 naik menjadi 78,56
- i) Persentase data yang tersedia di SIPJAKI tahun 2020 adalah sebesar 35,71 sedangkan untuk tahun 2021 dan 2022 data belum tersedia.

j) Persentase pelayanan mutu jasa konstruksi tahun 2020 adalah 78, sedangkan untuk tahun 2021 dan 2022 data belum tersedia

Tata Ruang pada tahun 2021 adalah sebesar 68 sedangkan pada tahun 2022 adalah sebesar 72

k) Persentase Ketaatan Terhadap Rencana

2.4.1.5. Sosial

1. Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan rehabilitasi

Fasilitas sosial disediakan untuk membantu masyarakat yang kurang beruntung. Pemerintah melalui Dinas Sosial menyediakan fasilitas yang dimaksud. Fasilitas yang disediakan oleh pemerintah Provinsi Kalimantan Barat berupa Panti Asuhan, Panti Asuhan Disabilitas, Panti Jompo, Rumah Singgah, Panti Sosial Anak, Panti Sosial Lanjut Usia, dan Rumah Rehabilitasi NAPZA.

Tabel 2. 98 Sarana Sosial di Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2022

No	Indikator	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022	Pertumbuhan Rata-Rata (Tahun)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Panti Asuhan Anak Berbasis Masyarakat	Unit	118	139	136	139	139	0,57
2	UPT Panti Sosial Anak	Unit	1	1	1	1	1	0
3	Panti Jompo Berbasis Masyarakat	Unit	4	9	10	10	10	1.1
4	UPT Panti Sosial Rehabilitasi Lanjut Usia	Unit	2	2	2	1	1	0

No	Indikator	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022	Pertumbuhan Rata-Rata (Tahun)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
5	Rumah Rehabilitasi NAPZA	Unit	5	5	5	5	5	400
Jumlah seluruh sarana sosial		Unit	130	156	154	156	156	80,13

Sumber: Dinas Sosial, Tahun 2022

Dapat dilihat dalam Tabel 2.56 bahwa dalam kurun waktu 2018-2019 jumlah sarana sosial di Provinsi Kalimantan Barat mengalami kenaikan. Sedangkan untuk tahun 2020 mengalami penurunan hingga pada tahun 2021-2022 kembali mengalami kenaikan sebesar 2. Berdasarkan data di atas pula, fasilitas sosial yang tersedia di Provinsi Kalimantan Barat terdiri

dari Panti sosial yang berbasis masyarakat dan panti sosial milik pemerintah daerah dengan status sebagai unit pelaksana teknis Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Barat. Tersedianya sarana sosial ini diharapkan dapat membantu bagi orang-orang yang kurang beruntung untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik.

Tabel 2. 99 Sarana Sosial di Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2022

No	Jenis Lembaga Kesejahteraan Sosial	Satuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Panti Asuhan Anak	Unit	139
2.	Panti Asuhan Disabilitas	Unit	6
3.	Panti Jompo	Unit	10
4.	Rumah Rehabilitasi NAPZA	Unit	5

No	Jenis Lembaga Kesejahteraan Sosial	Satuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)
5.	Rumah Singgah	Unit	1
6.	Panti Sosial Anak	Unit	1
7.	Panti Sosial Lanjut Usia	Unit	1
	Jumlah seluruh sarana sosial	Unit	163

Sumber: Dinas Sosial, Tahun 2022

2. PKMS yang Memperoleh Bantuan Sosial

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) adalah seseorang, keluarga atau kelompok masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan atau gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya sehingga tidak terpenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani, rohani, maupun sosial secara memadai dan wajar. Hambatan, kesulitan, atau gangguan

tersebut dapat berupa permasalahan-permasalahan sosial seperti kemiskinan, keterlantaran, kecacatan, ketunaan sosial, keterbelakangan, keterasingan/ketertinggalan, dan bencana alam maupun bencana sosial. PMKS yang memperoleh bantuan adalah proporsi jumlah PMKS yang memperoleh bantuan terhadap jumlah PMKS yang seharusnya menerima bantuan.

Tabel 2. 100 Perkembangan Jumlah PMKS Tahun 2018-2022

No	Indikator	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	PMKS yang memperoleh bantuan sosial	jiwa	1.532	2.196	2.796	3.396	3.996
2	Jumlah PMKS yang seharusnya Menerima bantuan	jiwa	1.532	2.196	2.796	3.396	3.996

3	PMKS yang memperoleh bantuan sosial	Persen	100	100	100	100	100
---	-------------------------------------	--------	-----	-----	-----	-----	-----

Sumber: Dinas Sosial, Tahun 2022

Pada Tabel di atas dapat dilihat bahwa, perkembangan jumlah PMKS yang memperoleh bantuan sosial dalam kurun waktu 2018-2022 mengalami kecenderungan meningkat dari tahun ke tahun sampai dengan 2022. Kenaikan bantuan sosial pada tahun 2018-2022 dikarenakan pada kurun waktu tersebut terjadi pandemi Covid19 yang memberikan dampak sosial yang signifikan bagi kesejahteraan masyarakat. Pada tahun 2018-2022, PMKS yang memperoleh bantuan sosial sebanyak 100 persen. Meningkatnya jumlah PMKS di Provinsi Kalimantan Barat periode 2018- 2022 mengindikasikan masih banyaknya masalah kesejahteraan sosial. Masalah ini menjadi tanggungjawab pemerintah melalui dinas-dinas terkait.

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) adalah seseorang, keluarga atau kelompok masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya sehingga tidak terpenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani,

rohani, maupun sosial secara memadai dan wajar. Hambatan, kesulitan, atau gangguan tersebut dapat berupa permasalahan-permasalahan sosial seperti kemiskinan, keterlantaran, kecacatan, ketunaan sosial, keterbelakangan, keterasingan/ketertinggalan, dan bencana alam maupun bencana sosial. PMKS yang memperoleh bantuan adalah proporsi jumlah PMKS yang memperoleh bantuan terhadap jumlah PMKS yang seharusnya menerima bantuan.

3. Cakupan Anak Terlantar yang Dibina

Sebagaimana yang tertera dalam Undang Undang Dasar 1945 pasal 34 ayat 1, bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Oleh karena itu, seluruh anak terlantar yang ada di Provinsi Kalimantan Barat seharusnya menjadi tanggungan dari pemerintah Provinsi Kalimantan Barat melalui dinas-dinas terkait. Berikut ini merupakan data jumlah anak terlantar yang dibina di Provinsi Kalimantan Barat tahun 2018-2022.

Tabel 2. 101 Anak Terlantar yang dibina di Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2022

No	Indikator	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022	Pertumbuhan Rata-Rata (Tahun)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Anak terlantar yang dibina	Jiwa	-	-	-	30	60	45

Sumber: Dinas Sosial, 2022.

Data pada Tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah anak terlantar yang dibina di Provinsi Kalimantan Barat dalam kurun waktu 2021-2022 cenderung mengalami peningkatan. Pada tahun 2021, jumlah anak terlantar yang dibina

sebanyak 30 jiwa dan terus mengalami peningkatan sehingga mencapai 60 jiwa pada tahun 2022. Sedangkan jumlah penyandang disabilitas di Provinsi Kalimantan Barat tersaji dalam tabel di bawah ini:

Tabel 2. 102 Data Sebaran Penyandang Disabilitas di Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2022

No	Kabupaten/Kota	Jumlah	Persen
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Sambas	165	
2	Bengkayang	384	3.94%
3	Landak	800	3.94%
4	Mempawah	83	8.57%
5	Sanggau	1874	19.24%
6	Ketapang	925	9.50%
7	Sintang	723	9.50%

8	Kapuas Hulu	469	9.50%
9	Sekadau	114	1.17%
10	Melawi	264	2.71%
11	Kayong Utara	400	4.11%
12	Kubu Raya	857	8.80%
13	Singkawang	505	5.19%
14	Pontianak	1,423	14.61%
JUMLAH		9738	100%

Sumber Data: Dinas Sosial, Provinsi Kalimantan Barat 2022

Berdasarkan data di atas sebaran penyandang disabilitas di Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2022 terbanyak di Kabupaten Sanggau yakni 1.874 orang (19,24%) disusul Kota Pontianak sebanyak 1.423 orang (14,61%) dan yang paling

sedikit terdapat di Kabupaten Sekadau yakni 114 orang (1,17%). Sementara itu anak terlantar baru penerima bantuan di Kalimantan Barat terlihat dalam tabel berikut:

Tabel 2. 103 Anak Terlantar Baru Penerima Bantuan (2022)

No	Kabupaten/Kota	Jumlah	Persen
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Sambas	25	0.92
2	Bengkayang	43	1.58
3	Landak	30	1.10
4	Mempawah	206	7.57

No	Kabupaten/Kota	Jumlah	Persen
(1)	(2)	(3)	(4)
5	Sanggau	37	1.36
6	Ketapang	35	1.29
7	Sintang	34	1.25
8	Kapuas Hulu	0	0.00
9	Sekadau	15	0.55
10	Melawi	70	2.57
11	Kayong Utara	2110	77.49
12	Kubu Raya	39	1.43
13	Singkawang	42	1.54
14	Pontianak	37	1.36
JUMLAH		2723	100.00

Sumber: Dinas Sosial, 2022

Berdasarkan data pada tabel di atas anak terlantar baru penerima bantuan terbanyak ada di Kabupaten Kayong Utara yakni sebanyak 2.110

anak atau 77.49 dari keseluruhan penerima bantuan baru pada tahun 2022 dengan jumlah anak sebanyak 2.723 anak.

2.4.1.6. Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

1. Keamanan dan Ketertiban Umum

Gambaran kondisi ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat sebagai pelaksanaan urusan wajib bidang pelayanan

dasar digambarkan melalui perkembangan jumlah aparatur pamong praja, aparatur linmas serta jumlah kasus unjuk rasa seperti termuat dalam tabel berikut:

Tabel 2. 104 Perkembangan Kondisi Aparatur Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2018-2022

<i>Variabel</i>	<i>Satuan</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
<i>Jumlah Aparat Pamong Praja</i>	Orang	110	101	113	114	110
<i>Jumlah Aparat Linmas</i>	Orang	19.528	22.652	-	-	-
<i>Jumlah Petugas Patroli Satpol PP</i>	Orang	93	84	-	-	-
<i>Jumlah Petugas Perlindungan Masyarakat</i>	Orang	12	12	-	-	-
<i>Jumlah Kasus Unjuk Rasa Bidang Politik</i>	Kasus	-	4	-	-	-
<i>Jumlah Kasus Unjuk Rasa Bidang Ekonomi</i>	Kasus	-	2	-	-	-
<i>Jumlah Kasus Unjuk Rasa Bidang Agama</i>	Kasus	-	-	-	-	-

Sumber : SIPD - Satuan Polisi Pamong Praja Prov. Kalbar dan Polda Kalbar 2022

2. Bencana

Kalimantan Barat dengan letak geografis yang berada di daerah tropis dan pada pertemuan dua samudera dan dua benua membuat wilayah ini rawan akan bencana banjir, tanah longsor, banjir bandang, kekeringan, cuaca ekstrim dan abrasi yang juga dapat memicu kebakaran hutan dan lahan. Upaya penanggulangan bencana yang

*Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2025-2045*

dilakukan perlu diawali dengan pemahaman risiko bencana yang ada melalui kajian risiko bencana yang ada, untuk kemudian dijadikan dasar perumusan berbagai upaya penanggulangan bencana.

Risiko Bencana merupakan perhitungan pada komponen bahaya (hazard), kerentanan (vulnerabilities), dan kapasitas (capacities) di

masing-masing provinsi dan kabupaten/kota. Komponen bahaya adalah fenomena alam yang dapat menyebabkan bencana seperti gempa bumi, letusan gunung api, tsunami, banjir, dan lainnya. Komponen kerentanan adalah (1) kondisi fisik, (2) sosial budaya, (3) Ekonomi, dan (4) lingkungan yang rentan terpapar bencana. Sementara komponen kapasitas adalah dari unsur ketahanan daerah seperti kelembagaan, kapasitas mitigasi. Indeks Risiko Bencana Indonesia merupakan penilaian tingkat risiko bencana di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.

Tingkat risiko bencana dihitung berdasarkan indeks bahaya, indeks kerentanan, dan indeks kapasitas di suatu daerah. Melalui informasi tingkat risiko bencana tersebut, para pelaku penanggulangan bencana dapat menentukan upaya prioritas di daerah masing-masing untuk meningkatkan kapasitas dalam melakukan upaya penanggulangan bencana.

Peningkatan kapasitas ini, pada akhirnya dapat menurunkan indeks risiko bencana di suatu daerah. Indeks Risiko Bencana Kalimantan Barat dapat dilihat pada Tabel di bawah ini.

Tabel 2. 105 Indeks Risiko Bencana Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018 - 2023

Kode	Provinsi/ Kabupaten/ Kota	2018	2019	2020	2021	2022	2023
61	KALIMANTAN BARAT	138.49	138.49	138.49	138.69	136.72	138.92
61.01	Sambas	172.2	172.2	172.2	172.2	154.41	154.41
61.02	Mempawah	180.4	180.4	180.4	172.22	177.91	185.04
61.03	Sanggau	131.6	131.6	131.6	131.6	126.21	127.99
61.04	Ketapang	124.47	124.47	124.47	124.47	124.36	124.12
61.05	Sintang	123.26	123.26	123.26	123.26	133.2	133.2
61.06	Kapuas Hulu	129.23	129.23	129.23	139.42	135.91	135.12
61.07	Bengkayang	134.33	134.33	134.33	117.31	124.19	124.19
61.08	Landak	109.93	109.93	109.93	109.93	108.44	108.44
61.09	Sekadau	142	142	142	142	131.97	138.44
61.1	Melawi	132.4	132.4	132.4	132.4	132.4	132.4
61.11	Kayong Utara	168.4	168.4	168.4	167.26	150.57	161.39
61.12	Kubu Raya	168.4	168.4	168.4	168.4	168.4	168.4
61.71	Kota Pontianak	85.66	85.66	85.66	85.66	90.63	96.2
61.72	Kota Singkawang	145.82	145.82	145.82	155.47	155.47	155.47

Sumber : Peta Indeks Resiko Bencana Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2023 (Sumber : IRBI 2023 BNPB)

Gambar 2. 24 Peta Indeks Risiko Bencana di Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018



3. Prasarana dan Sarana Tanggap Bencana

Kondisi Penanggulangan Bencana digambarkan melalui Prasarana dan Sarana Tanggap Bencana yang meliputi informasi ketersediaan sarana dan prasarana berupa kendaraan roda 2,

roda 4, roda >4, kapal penyelamat, alat komunikasi, peralatan kesehatan, mobil tangka air, MCK mobile, dan Perlengkapan pendukung hunian sementara. Informasi dimaksud secara terperinci ditampilkan pada tabel berikut:

Tabel 2. 106 Jumlah Prasarana dan Sarana Tanggap Bencana Tahun 2018-2022

Prasarana dan Sarana Tanggap Bencana	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Kendaraan Roda 2	Unit	6	6	6	6	6
Kendaraan Roda 4	Unit	5	5	5	6	6
Kendaraan Roda > 4	Unit	5	5	5	5	5
Kapal Penyelamat	Unit	4	4	4	4	4
Handy Talky	Unit	14	14	14	14	14
Mobil Ambulance	Unit	1	1	1	1	1
Mobil Tangki Air	Unit	1	1	1	1	1
MCK (Mandi Cuci Kakus) Mobile	Unit	1	1	1	1	1
Tenda Hunian Sementara	Unit	26	26	26	26	26
Dapur Umum	Unit	1	1	1	1	1
Generator	Unit	4	4	4	6	6

Sumber: SIPD – BPBD Prov. Kalbar.

2.4.1.7. Tenaga Kerja

Gambaran kondisi urusan tenaga kerja selain telah digambarkan sebelumnya melalui Tingkat pengangguran terbuka juga dapat diamati dari perkembangan jumlah balai latihan kerja, jumlah

pelatihan kerja jumlah tenaga kerja di luar negeri serta jumlah perusahaan yang mempekerjakan warga negara asing seperti termuat dalam tabel berikut:

Tabel 2. 107 **Perkembangan Kondisi Urusan Tenaga Kerja di Provinsi Kalimantan Barat**
Tahun 2018-2022

Variabel	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Jumlah Balai Latihan Kerja	Lembaga	7	7	7	7	7
Jumlah Peserta Balai Latihan Kerja	Orang	2000	2214	-	1988	2041
Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta Terakreditasi	Lembaga	11	5	6	6	6
Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta Belum Terakreditasi	Lembaga	49	54	42	49	54
Jumlah Tenaga Kerja di Luar Negeri**	Orang	-	-	-	-	-
1. Terdidik	Orang	1.814	1.421	-	-	-
2. Tidak Terdidik	Orang	N/A	N/A	-	-	-
Jumlah Kasus PMI di Luar Negeri	Kasus	906	198	-	-	-
Jumlah Perusahaan yang Mempekerjakan Warga Negara Asing	Perusahaan	57	40	-	-	-

Sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prov. Kalbar, Tahun 2022.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah tingkat partisipasi angkatan kerja dimana unturnya jumlah angkatan kerja dan jumlah penduduk yang bekerja diatas 15 tahun ke atas.

Dapat juga dikatakan bahwa TPAK sebagai perbandingan antara angkatan kerja dengan jumlah penduduk usia kerja. TPAK yang rendah menunjukkan kecilnya kesempatan kerja yang

tersedia bagi penduduk usia kerja. Sebaliknya angka TPAK yang tinggi menunjukkan besarnya kesempatan kerja yang tersedia.

Tabel 2. 108 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat
Agustus 2021-2022

Kabupaten/Kota	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja		
	2021	2022	+/-
(1)	(2)	(3)	(4)
Sambas	72,84	74,12	1,28
Bengkayang	70,16	69,95	-0,21
Landak	70,19	72,29	2,1
Mempawah	60,86	63,31	2,45
Sanggau	69,41	70,27	0,86
Ketapang	64,44	60,57	-3,87
Sintang	77,78	73,14	-4,64
Kapuas Hulu	72,35	77,68	5,33
Sekadau	71,98	74,31	2,33
Melawi	72,31	74,41	2,1
Kayong Utara	65,53	70,02	4,49
Kubu Raya	67,47	64,66	-2,81
Pontianak	61,94	64,82	2,88

Singkawang	64,31	68,86	4,55
Kalimantan Barat	68.65	68.30	-0.35

Sumber: BRS-BPS-Kalbar 2023

Tabel 2. 109 Jumlah Penduduk 15 Tahun Keatas Menurut Kegiatan Terbanyak dan Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat Agustus 2021-2022

Kab/Kota	Angkatan Kerja						Bukan Angk. Kerja	
	Bekerja		Pengangguran		Jumlah			
	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Sambas	278.708	282.918	11.534	15.143	290.242	298.061	108.222	104.085
Bengkayang	126.749	131.176	5.858	3.831	132.607	135.007	56.398	57.985
Landak	192.004	202.555	6.387	3.673	198.391	206.228	84.264	79.058
Mempawah	111.290	117.570	9.302	9.499	120.592	127.069	77.561	73.647
Sanggau	242.376	248.149	8.665	9.707	251.041	257.856	110.645	109.082
Ketapang	234.852	225.481	17.523	16.217	252.375	241.698	139.239	157.363
Sintang	234.184	224.629	9.625	6.899	243.809	231.528	69.659	85.388
Kapuas Hulu	140.523	156.483	6.128	3.535	146.651	160.018	56.047	45.974
Sekadau	105.744	112.073	3.179	1.513	108.923	113.586	42.405	39.275
Melawi	111.710	117.714	3.056	2.339	114.766	120.053	43.943	41.287
Kayong Utara	53.087	58.109	2.084	1.860	55.171	59.969	29.026	25.676

Kab/Kota	Angkatan Kerja						Bukan Angk. Kerja	
	Bekerja		Pengangguran		Jumlah			
	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Kubu Raya	273.284	266.217	20.633	19.643	293.917	285.860	141.677	156.234
Pontianak	277.910	303.616	39.251	33.452	317.161	337.068	194.903	182.933
Singawang	100.032	109.833	10.082	10.369	110.114	120.202	61.099	54.363
Kalbar	2.482.453	2.369.015	153.307	137.680	2.635.760	2.506.695	1.215.088	1.212.350

Sumber: BRS – BPS Kalbar, 2022

Tabel 2. 110 Perkembangan Kondisi Urusan Tenaga Kerja di Provinsi Kalimantan Barat
Tahun 2021-2022

<i>Variabel</i>	Satuan	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)
Jumlah Balai Latihan Kerja	Lembaga	7	7
Jumlah Peserta Balai Latihan Kerja	Orang	1988	2041
Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta Terakreditasi	Lembaga	6	6
Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta Belum Terakreditasi	Lembaga	49	54
Jumlah Tenaga Kerja di Luar Negeri**			
1. Terdidik	Orang	-	-

2. Tidak Terdidik	Orang	-	-
Jumlah Kasus TKI di Luar Negeri	Kasus	-	-
Jumlah Perusahaan yang Mempekerjakan Warga Negara Asing	Perusahaan	-	-

Sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prov. Kalbar, 2022.

2.4.1.8. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Indeks Pembangunan Gender (IPG) merupakan indeks pencapaian kemampuan dasar pembangunan manusia yang sama seperti IPM dengan memperhatikan ketimpangan gender. IPG digunakan untuk mengukur pencapaian dalam dimensi yang sama dan menggunakan indikator yang sama dengan IPM, namun lebih diarahkan untuk mengungkapkan ketimpangan antara laki-laki dan perempuan. Pada tahun 2022 IPG Kalimantan Barat sebesar 87,61 mengalami peningkatan 0,06 poin dibandingkan

kondisi 2021 sebesar 86,95. Sedangkan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) merupakan indikator yang menggambarkan partisipasi aktif perempuan dalam politik, ekonomi, dan pengambilan keputusan serta penguasaan sumber daya ekonomi. Capaian dari tahun 2021 hingga tahun 2022 mengalami peningkatan dari 71,14 pada tahun 2021 menjadi 73,18 pada tahun 2022. Akan tetapi capaian tersebut masih berada di bawah capaian nasional

Tabel 2. 111 Indeks Pembangunan Gender dan Indeks Pemberdayaan Gender (2018-2022)

Tahun	Indeks Pembangunan Gender (IPG)		Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	
	Kalimantan Barat	Indonesia	Kalimantan Barat	Indonesia
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2018	86,74	90,99	64,47	72,10
2019	86,81	91,07	68,07	75,24
2020	86,87	91,06	68,07	76,67
2021	86,95	91,27	71,14	76,26
2022	87,61	91,63	73,18	76,59

Sumber: Dinas PPPA Prov. Kalbar (Data BPS), Tahun 2022.

1. Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

IPG mengukur tingkat pencapaian kemampuan dasar yang sama seperti IPM yakni harapan hidup, tingkat pendidikan, dan pendapatan dengan memperhitungkan ketimpangan gender. IPG dapat digunakan untuk mengetahui kesenjangan pembangunan manusia antara laki-

laki dan perempuan. Apabila $IPG=IPM$ maka dikatakan tidak terjadi kesenjangan gender, tetapi sebaliknya bila $IPG < IPM$ maka terjadi kesenjangan gender. Sedangkan IDG merupakan indikator yang menggambarkan partisipasi aktif perempuan dalam politik, ekonomi, dan pengambilan keputusan serta penguasaan sumber daya ekonomi.

Tabel 2. 112 Indeks Pembangunan Gender Kabupaten/Kota se-Kalimantan Barat (2021-2023)

Provinsi/Kabupaten/Kota	Indeks Pembangunan Gender (IPG)		
	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)
NASIONAL	91.27	91.63	91.85
KALIMANTAN BARAT	86.95	87.61	88.06
Sambas	87.00	87.96	88.37
Bengkayang	82.79	82.86	83.68
Landak	88.44	88.83	89,45
Mempawah	87.80	88.53	88,90
Sanggau	81.19	82.14	82,66
Ketapang	88.60	89.12	89,46
Sintang	86.73	87.38	87,74
Kapuas Hulu	84.95	85.99	86,52

Provinsi/Kabupaten/Kota	Indeks Pembangunan Gender (IPG)		
	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)
Sekadau	82.72	83.40	84,07
Melawi	80.15	80.82	81,22
Kayong Utara	86.04	87.07	86,80
Kubu Raya	84.30	85.26	85,45
Kota Pontianak	94.01	94.10	94,65
Kota Singkawang	92.00	92.83	93,05

Sumber: BPS Nasional, data diolah.

Tabel 2. 113 Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Regional Kalimantan

IDG	TAHUN		
	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)
INDONESIA	75.57	76.26	76.90
Kalimantan Barat	68.07	71.14	73.05
Kalimantan Tengah	82.41	82.08	79.99
Kalimantan Selatan	74.48	74.58	75.97
Kalimantan Timur	65.54	66.64	68.96
Kalimantan Utara	64.31	61.70	58.86

Sumber: BPS Nasional, data diolah 2023

2.4.1.9. Pangan

Rata-rata konsumsi energi pada tahun 2022 mengalami penurunan yaitu sebesar 1892 Kal/Kap/hari sedangkan kenaikan terjadi pada rata-rata konsumsi protein yaitu mencapai 58,2 gram/Kap/hari dan Pola Pangan Harapan mengalami kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya yaitu sebesar 82.5 dibandingkan tahun 2021.

Tabel 2. 114 Perkembangan Indikator Kinerja Pembangunan Urusan Pangan Tahun 2018-2023

Indikator	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Indeks Ketahanan Pangan		n.a	55,17	71,13	71,32*	70,81	72.20
Jumlah Cadangan Beras	Ton	246,8	246,8	212,37 5	286,6 2	216,50	
Jumlah Cadangan Beras yang digunakan untuk Penanganan Bencana	Ton	n/a	n/a	126,37 5	270,1 19	n/a	
Total Kebutuhan Beras	Ton	570.1 94	577.9 46	604.13 8	567.9 78	516.73 6	

Sumber : Dinas ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Barat 2022,

* Data Sementara Olahan Indeks Badan Ketahanan Pangan

** Proyeksi Baseline Susenas 2020

Skor Pola Pangan Harapan (PPH)

Konsumsi pangan masyarakat terbagi menjadi konsumsi energi dan konsumsi protein. Pola Pangan Harapan (PPH) pada tahun 2022

mengalami kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya yaitu mencapai 82.5 dimana pada tahun 2021 hanya sebesar 76,7 sebagaimana digambarkan pada tabel berikut:

Tabel 2. 115 Perkembangan Konsumsi Energi dan Protein serta Skor PPH Tahun 2018-2023

INDIKATOR	SATUAN	2018	2019*	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)

Rata-Rata Konsumsi Energi	Kal/Kap/Hari	1.926	1.913	1908	1941	1892	
Angka Kecukupan Energi		91,7	91,1	90,9	92,4	90,1	
Rata-Rata Konsumsi Protein	Gram/Kap/Hari	55,8	56	55,6	57,2	58,2	58.63
Angka Kecukupan Protein		97,9	98,2	97,6	100,3	102,1	
Pola Pangan Harapan (PPH)		74,8	76,3	76,4	76,7	82,5	94.0
Total Kebutuhan Beras	Ton	570.194	577.946	604.138	567.978	516.73	

Sumber: Dinas ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Barat 2022

Ketersediaan beras sebagai salah satu konsumsi pangan utama masyarakat di Kalimantan Barat digambarkan pada tabel di bawah ini dimana ketersediaan beras yang paling tinggi berada di

Kabupaten Kubu Raya diikuti oleh Kab Sambas dan yang paling rendah adalah Kab Landak , sebagaimana yang terdapat pada tabel berikut:

Tabel 2. 116 Ketersediaan Beras (Ton) Per Kab/Kota se-Kalimantan Barat Tahun 2018-2022

No	Kabupaten	2018	2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Sambas	81.090	99.247	121.147,04	825.892	219.516	
2	Bengkayang	13.669	21.336	19.726,65	612.199	127.676	
3	Landak	47.440	60.536	75.712,86	40.845	22.920	
4	Mempawah	30.939	40.057	51.936,33	416.319	40.894	

No	Kabupaten	2018	2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
5	Sanggau	30.80 2	50.104	42.941,25	1.151.352	103.279	
6	Ketapang	36.63 1	64.061	70.326,74	367.834	49.112	
7	Sintang	9.416	21.055	13.399,19	530.435	202.195	
8	Kapuas Hulu	12.65 2	14.459	13.803,29	36.144	30.307	
9	Sekadau	12.98 9	20.276	18.214,01	56.363	37.391	
10	Melawi	2.416	6.881	5.702,48	220.440	36.239	
11	Kayong Utara	27.16 0	24.939	39.194,98	321.012	90.342	
12	Kubu Raya	54.41 2	68.539	72.468,02	410.028	686.561	
13	Kota Pontianak	507	278	419,36	326.956	254.310	
14	Kota Singkawang	5.975	7.244	8.111,27	138.943	37.211	

Sumber: Dinas ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Barat 2022

Tabel 2. 117 Rasio Ketersediaan Pangan dan Konsumsi Per Kabupaten/Kota
Se Kalimantan Barat Tahun 2018-2022

No	KAB/KOTA	2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Sambas	SURPLUS	SURPLUS	SURPLUS	SURPLUS	SURPLUS
2	Bengkayang	DEFISIT	DEFISIT	DEFISIT	SURPLUS	SURPLUS
3	Landak	SURPLUS	SURPLUS	SURPLUS	SURPLUS	SURPLUS
4	Mempawah	SURPLUS	SURPLUS	SURPLUS	SURPLUS	SURPLUS
5	Sanggau	DEFISIT	SURPLUS	DEFISIT	SURPLUS	SURPLUS
6	Ketapang	DEFISIT	SURPLUS	SURPLUS	SURPLUS	SURPLUS
7	Sintang	DEFISIT	DEFISIT	DEFISIT	SURPLUS	SURPLUS
8	Kapuas Hulu	DEFISIT	DEFISIT	DEFISIT	SURPLUS	SURPLUS
9	Sekadau	DEFISIT	SURPLUS	DEFISIT	SURPLUS	SURPLUS
10	Melawi	DEFISIT	DEFISIT	DEFISIT	SURPLUS	SURPLUS
11	Kayong Utara	SURPLUS	SURPLUS	SURPLUS	SURPLUS	SURPLUS
12	Kubu Raya	SURPLUS	SURPLUS	SURPLUS	SURPLUS	SURPLUS
13	Kota Pontianak	DEFISIT	DEFISIT	DEFISIT	SURPLUS	SURPLUS
14	Kota Singkawang	DEFISIT	DEFISIT	DEFISIT	SURPLUS	SURPLUS

Sumber: Dinas ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Barat 2022.

Pada tahun 2020 masih terdapat 8 kabupaten/kota yang mengalami defisit pada rasio ketersediaan pangan dan konsumsi, namun

pada tahun 2021 dan 2022 semua kab/kota sudah mengalami surplus.

2.4.1.10. Pertanian

Pada tahun 2018 terjadi peningkatan jumlah sertifikat hak atas tanah yang cukup signifikan, hal ini sejalan dengan program pemerintah untuk meningkatkan sertifikat hak atas tanah bidang.

Dari 14 Kabupaten/Kota se Kalimantan Barat,

Kabupaten Kubu Raya merupakan Kabupaten dengan Jumlah Bidang Sertifikat Hak Atas Tanah yang paling banyak yang telah diberikan yakni sebanyak 49.853 bidang.

Tabel 2. 118 Perkembangan Redistribusi Tanah dan Sertifikat Hak Atas Tanah di
Provinsi Kalimantan Barat 2017-2022

No	Wilayah	SERTIFIKAT HAK ATAS TANAH (BIDANG)					
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Kab. Sambas	10.011	12.363	49.724	4.870	1.130	1.000
2	Kab. Mempawah	12.692	4.757	43.862	4.026	6.477	2.000
3	Kab. Sanggau	9.883	2.285	34.564	2.946	13.384	1.900
4	Kab. Ketapang	14.256	10.086	64.853	2.350	8.650	2.720
5	Kab. Sintang	13.799	22.565	6.733	7.350	6.150	4.800
6	Kab. Kapuas Hulu	3.500	12.689	2.209	7.485	515	2.161
7	Kab. Bengkayang	4.000	16.979	2.872	5.370	6.130	4.004
8	Kab. Landak	14.500	21.246	9.270	9.000	3.048	2.500
9	Kab. Sekadau	3.902	12.278	2.954	900	13.490	900
10	Kab. Melawi	5.000	12.497	2.777	3.543	3.144	3.543
11	Kab. Kayong Utara	3.000	8.438	4.950	1.500	3.500	1.857

No	Wilayah	SERTIFIKAT HAK ATAS TANAH (BIDANG)					
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
12	Kab. Kubu Raya	20.671	49.853	11.214	2.500	3.500	NA
13	Kota Pontianak	2.000	17.914	640	NA	NA	NA
14	Kota Singkawang	16.195	16.927	1.613	NA	NA	NA
KALIMANTAN BARAT		12.079	133.409	277.809	51.840	69.118	27.385

Sumber: Kementerian Agraria dan Tata Ruang Kanwil Prov Kalbar, Tahun 2022

2.4.1.11. Lingkungan Hidup

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) sebagai ukuran indikator kualitas lingkungan hidup apakah dalam kondisi baik atau buruk. Informasi kualitas lingkungan meliputi kondisi kualitas air, kualitas udara dan kualitas tutupan lahan yang direpresentasikan melalui nilai Indeks Kualitas Udara (IKU), Indeks Kualitas Air (IKA) dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL).

Indeks Kualitas Air (IKA) diukur berdasarkan kualitas air atas parameter-parameter TSS, DO, BOD, COD, Total Fosfat, Fecal Coli dan Total Coliform, Indeks Kualitas Udara (IKU) diukur berdasarkan Kualitas Udara atas parameter SO₂ dan NO₂ sedangkan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) diukur berdasarkan Kualitas Tutupan Lahan sesuai luas tutupan lahan dan dinamika vegetasi.

Indeks Kualitas Air (IKA) ditentukan berdasarkan nilai dari Indeks Pencemaran. Nilai IKA berkisar antara 0 hingga 100. Nilai ideal adalah 100 merupakan gambaran kualitas air terbaik sedangkan 0 merupakan kondisi kualitas air terburuk. Nilai IKA dipengaruhi oleh : (1) penurunan beban pencemaran, (2) ketersediaan dan fluktuasi debit air yang dipengaruhi oleh perubahan fungsi lahan serta faktor cuaca lokal, iklim regional dan global, (3) penggunaan air, serta (4) tingkat erosi dan sedimentasi.

Indeks Kualitas Udara (IKU) adalah suatu nilai yang menunjukkan mutu atau tingkat kebaikan udara menurut sifat-sifat unsur pembentuknya. IKU merupakan gambaran atau nilai hasil transformasi parameter-parameter (indikator) individual polusi udara yang berhubungan menjadi suatu nilai sehingga mudah dimengerti

oleh masyarakat awam. Nilai IKU berkisar antara 0 sampai dengan 100. Nilai ideal adalah 100, yang menggambarkan kualitas terbaik. Sementara nilai 0 menggambarkan kualitas terburuk. Begitu juga dengan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL), nilai IKTL berkisar antara

100 hingga 0. Nilai 100 menggambarkan kondisi kualitas tutupan lahan terbaik, sedangkan nilai 0 merupakan kondisi tutupan lahan terburuk. Secara lengkap Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kalimantan Barat dapat dilihat sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2. 119 Perkembangan Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKLT) dan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2022

No	Uraian	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Indeks Kualitas Air (IKA)	55.80	50,00	51,67	54.36	55.52
2.	Indeks Kualitas Udara (IKU)	87,90	90,07	88,88	90.71	90.90
3	Indeks Kualitas Air Laut (IKAL)	-	-	73,25	77,83	63,30
4.	Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	64,19	59,76	54,22	59,35	59,05
5.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	73,09	65,92	70,07	72.96	71.90

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2022

IKLH dapat digunakan sebagai informasi dalam mendukung proses pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, selain itu IKLH dapat juga menggambarkan kondisi daya dukung dan daya tampung lingkungan. Capaian kinerja pengelolaan lingkungan hidup yang digambarkan melalui indeks kualitas air tahun 2022 adalah sebesar 55,52. Capaian kinerja pengelolaan lingkungan hidup yang digambarkan melalui

indeks kualitas udara tahun 2022 adalah sebesar 90,90

Disamping itu, peningkatan jumlah penduduk juga berbanding lurus dengan peningkatan jumlah sampah yang dihasilkan. Estimasi timbulan sampah berdasarkan teori sebesar 0,7 Kg/hari/orang memprediksi bahwa jumlah sampah Provinsi Kalimantan Barat mencapai 3.767 m3/hari. Selain itu permasalahan lain yang dihadapi dalam pengelolaan sampah adalah kondisi Tempat Pembuangan Akhir (TPA) masih

menggunakan sistem Open Dumping dan belum ada pengolahan lebih lanjut untuk penanganan masalah sampah tersebut. Sistem open dumping masih dapat dilakukan di Provinsi Kalimantan

Barat karena masih luasnya lahan di Kalimantan Barat. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 120 Proyeksi Jumlah Timbulan Sampah Per Hari di Provinsi Kalimantan Barat

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk (jiwa)	Timbulan Sampah (m³/hari)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Kab. Sambas	640,838	852,174
2	Kab. Mempawah	308,771	418,078
3	Kab. Sanggau	490,805	742,392
4	Kab. Ketapang	575,817	806,413
5	Kab. Sintang	433,614	661,390
6	Kab. Kapuas Hulu	266,651	414,374
7	Kab. Bengkayang	290,588	402,112
8	Kab. Landak	405,320	596,174
9	Kab. Sekadau	217,468	319,322
10	Kab. Melawi	209,958	328,477
11	Kab. Kayong Utara	128,684	177,438
12	Kab. Kubu Raya	614,910	913,462
13	Kota Pontianak	673,400	1.020,357
14	Kota Singkawang	240,327	350,498

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk (jiwa)	Timbulan Sampah (m ³ /hari)
(1)	(2)	(3)	(4)
Jumlah		5,497,151	8.002,662

Sumber: DRKPLH Prov. Kalbar 2022

Adapun untuk menampung sampah-sampah Kabupaten/kota dengan kondisi seperti tabel yang dihasilkan tersebut, telah tersedia tempat pembuangan akhir sampah (TPA) di 14

dibawah ini:

Tabel 2. 121 TPA dan Sistem Operasi di Provinsi Kalimantan Barat

No	TPA	Luas (Ha)	Kapasitas TPA (m ³ /hari)	Sistem Operasi TPA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Sukadana (Kab. Kayong Utara)	-	36,00	Open Dumping
2	Melawi	6,50	35,00	Open Dumping
3	Putussibau (Kab. Kapuas Hulu)	0,00	0,00	Open Dumping
4	Sekadau	4,50	34,00	Open Dumping
5	Sintang	6,00	96,25	Controlled Landfill
6	Bengkayang	10,00	20,80	Open Dumping
7	Tebedak (Kab. Landak)	6,60	300,00	Open Dumping
8	Sorat (Kab. Sambas)	13,00	72,00	Open Dumping
9	Bakau Besar (Kab Mempawah)	2,20	160,00	Open Dumping

10	Kubu Raya	4,00		<i>Open Dumping</i>
11	Batu Layang (Kota Pontianak)	26,60	1.373,03	<i>Controlled Landfill</i>
12	Sanggau	2,00	60,00	<i>Open Dumping</i>
13	Ketapang	9,00	60,00	<i>Controlled Landfill</i>
14	Wonosari (Kota Singkawang)	8,57	194,60	<i>Controlled Landfill</i>

Sumber: DRKPLH Prov. Kalbar 2022

2.4.1.12. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jumlah penduduk Kalimantan Barat yang telah melakukan perekaman E-KTP pada tahun 2023 adalah sebesar 3.774.162 orang, mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2018 sebesar 3,208,496 orang.

Tabel 2. 122 Jumlah Penduduk Memiliki E-KTP Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2023

Wilayah	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Kab. Sambas	Orang	394,208	410,084	435.283	446.039	427.150	444.004
Kab. Mempawah	Orang	170,482	178,272	190.635	199.060	190.230	197.870
Kab. Sanggau	Orang	272,338	288,073	310.396	324.824	313.827	326.168
Kab. Ketapang	Orang	299,243	319,177	343.876	360.077	352.616	369.215
Kab. Sintang	Orang	254,124	268,518	290.227	300.060	294.187	310.301
Kab. Kapuas Hulu	Orang	164,960	173,389	186.187	192.196	186.455	193.668
Kab. Bengkayang	Orang	152,543	159,392	174.904	182.186	175.056	182.466
Kab. Landak	Orang	236,319	245,179	260.340	273.728	265.112	275.260
Kab. Sekadau	Orang	134,071	140,410	148.961	155.182	150.469	156.279
Kab. Melawi	Orang	122,758	129,181	139.080	145.650	141.842	148.067
Kab. Kayong Utara	Orang	67,709	72,954	77.887	82.966	82.104	85.223
Kab. Kubu Raya	Orang	361,105	379,535	407.187	424.973	416.256	437.097
Kota Pontianak	Orang	433,708	447,380	470.435	487.728	464.438	477.973
Kota Singkawang	Orang	144,928	152,088	163.377	169.488	161.130	170.571
KALIMANTAN BARAT	Orang	3,208,496	3,363,632	3.598.775	3.744.157	3.620.872	3.774.162

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Prov. Kalbar, Tahun 2024

Sementara itu, untuk penduduk yang telah memiliki akte kelahiran pada tahun 2023 adalah 1.574.466 jiwa. Jumlah tertinggi berada di Kota Pontianak yakni sebanyak 196.799 jiwa yang telah memiliki akte kelahiran dan terendah di Kabupaten Kayong Utara sebesar 40.452 jiwa yang telah memiliki akte kelahiran.

Tabel 2. 123 Jumlah Penduduk Telah Memiliki Akta Kelahiran

Wilayah	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Kab. Sambas	Orang	246,000	276,352	188.257	182.527	186.760	192.244
Kab. Mempawah	Orang	111,671	99,689	69.795	72.261	77.483	84.749
Kab. Sanggau	Orang	129,167	153,451	111.996	112.882	121.247	128.545
Kab. Ketapang	Orang	227,077	238,711	181.998	164.500	164.277	169.108
Kab. Sintang	Orang	128,724	144,717	99.056	101.918	110.893	114.543
Kab. Kapuas Hulu	Orang	92,529	109,484	67.860	70.495	75.477	80.064
Kab. Bengkayang	Orang	44,790	53,979	46.318	50.629	58.500	70.404
Kab. Landak	Orang	130,761	146,044	103.623	110.715	116.282	123.678
Kab. Sekadau	Orang	79,757	87,527	55.383	54.201	56.567	60.228
Kab. Melawi	Orang	61,319	71,068	53.869	54.761	56.644	59.174
Kab. Kayong Utara	Orang	50,691	55,152	40.887	38.733	40.326	40.452
Kab. Kubu Raya	Orang	261,538	280,877	180.944	174.339	180.131	179.717
Kota Pontianak	Orang	362,877	395,735	195.832	188.262	191.590	196.799
Kota Singkawang	Orang	115,895	123,143	70.205	69.382	71.765	74.761
Kalimantan Barat	Orang	2,042,796	2,235,929	1.466.023	1.445.605	1.507.942	1.574.466

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Prov. Kalbar, Tahun 2024.

Jumlah Kepala Keluarga yang telah memiliki 1.727.159 KK meningkat dibandingkan kondisi
Kartu Keluarga pada tahun 2023 sebanyak pada tahun 2022 sebesar 1.660.046 KK.

Tabel 2. 124 Jumlah Penduduk Memiliki Kartu Keluarga

Wilayah	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Kab. Sambas	KK	176.939	178.807	186.728	189.520	192.277	199.169
Kab. Mempawah	KK	81.003	82.545	87.545	89.326	90.699	93.579
Kab. Sanggau	KK	134.408	136.132	143.950	145.674	147.874	153.222
Kab. Ketapang	KK	176.844	169.740	182.322	183.835	185.779	189.890
Kab. Sintang	KK	114.851	114.594	125.187	130.086	133.631	140.750
Kab. Kapuas Hulu	KK	76.367	77.615	81.756	83.973	85.656	89.346
Kab. Bengkayang	KK	74.481	75.895	80.328	81.651	83.015	86.194
Kab. Landak	KK	101.280	103.185	108.443	111.666	113.812	119.805
Kab. Sekadau	KK	59.980	60.427	62.793	64.267	65.475	68.529
Kab. Melawi	KK	67.431	66.657	71.128	66.126	65.528	68.137
Kab. Kayong Utara	KK	35.811	36.216	38.168	38.969	39.005	39.685
Kab. Kubu Raya	KK	162.109	163.446	176.489	180.348	184.202	194.188
Kota Pontianak	KK	185.653	186.646	195.544	199.215	201.614	209.036
Kota Singkawang	KK	63.275	65.008	68.220	69.846	71.479	75.629
Kalimantan Barat	KK	1.365.298	1.364.147	1.417.648	1.463.934	1.660.046	1.727.159

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Prov. Kalbar, Tahun 2024.

2.4.1.13. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Indeks Desa Membangun (IDM) merupakan Ketahanan Ekonomi dan Indeks Ketahanan
Indeks Komposit yang dibentuk berdasarkan Lingkungan.
yaitu Indeks Ketahanan Sosial, Indeks

Indeks Desa Mandiri

Tabel 2. 127 Perkembangan Desa Menurut Status di Kalimantan Barat Tahun 2018-2023

No	Status Desa	2018		2019		2020		2021		2022		2023	
		Jmlh	%	Jmlh	%	Jmlh	%	Jmlh	%	Jmlh	%	Jmlh	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1	Sangat Tertinggal	677	33.33	208	10.24	12	0.59	0	0	0	0	0	0
2	Tertinggal	928	45.69	781	38.45	566	27.87	280	13,79	94	4,62	16	0,78
3	Berkembang	372	18.32	767	37.76	907	44.66	910	44,81	802	39,49	606	29,62
4	Maju	53	2.61	188	9.26	332	16.35	456	22,45	549	27,03	547	26,74
5	Mandiri	1	0.05	87	4.28	214	10.54	385	18.96	586	28,85	877	42,86
Total		2031	100	2031	100	2031	100	2031	100	2031	100	2046	100

Sumber: idm.kemendesa.go.id .2018/2023, data diolah.

Kondisi terkini tahun 2023 status desa berdasarkan kriteria Indeks Desa Membangun (IDM) di Kalimantan Barat menunjukkan perbaikan yang signifikan. Pada tahun 2023 jumlah Desa Mandiri sebanyak 877 Desa atau 42,86 persen dari 2.046 Desa di Kalimantan Barat. Sedangkan Desa Maju dan Berkembang masing-masing meningkat menjadi 26,74 persen

(547 Desa) dan 29,62 persen (606 Desa). Sejak tahun 2022 tidak ada lagi Desa **Sangat Tertinggal** di Kalimantan Barat.

Namun jumlah Desa Tertinggal masih menjadi pekerjaan rumah Prov Kalimantan Barat tersisa 16 desa atau 0,78 persen dari jumlah desa yang ada sebagaimana digambarkan pada table berikut ini.

Tabel 2. 128 Data Desa Tertinggal Berdasarkan Indeks Desa Membangun (IDM) Kalimantan Barat Tahun 2023

NO	KABUPAT EN	KECAMA TAN	DESA	IKS	IKE	IKL	NILAI IDM	STATUS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	MEMPAW AH	SADANIANG	ANSIAP	0,748 6	0,316 7	0,666 7	0,5773	TERTING GAL
2	MEMPAW AH	SADANIANG	SUAK BARANGA N	0,708 6	0,3	0,666 7	0,5584	TERTING GAL
3	LANDAK	NGABANG	RASAN	0,742 9	0,416 7	0,533 3	0,5643	TERTING GAL
4	LANDAK	MENYUKE	SIDAN	0,6	0,45	0,666 7	0,5722	TERTING GAL
5	LANDAK	MENYUKE	BERINAN G MAYUN	0,685 7	0,35	0,533 3	0,523	TERTING GAL
6	LANDAK	MENYUKE	SUNGAI LUBANG	0,685 7	0,5	0,6	0,5952	TERTING GAL
7	LANDAK	MENYUKE	TA'AS	0,628 6	0,416 7	0,666 7	0,5706	TERTING GAL
8	LANDAK	MERANTI	MORO BETUNG	0,645 7	0,75	0,2	0,5319	TERTING GAL
9	LANDAK	MERANTI	AMPADI	0,68	0,483 3	0,533 3	0,5656	TERTING GAL
10	LANDAK	MERANTI	TAHU	0,537 1	0,45	0,8	0,5957	TERTING GAL
11	LANDAK	KUALA BEHE	SEHE LUSUR	0,668 6	0,333 3	0,6	0,534	TERTING GAL
12	LANDAK	KUALA BEHE	SEJOWET	0,651 4	0,366 7	0,666 7	0,5616	TERTING GAL

NO	KABUPAT EN	KECAMA TAN	DESA	IKS	IKE	IKL	NILAI IDM	STATUS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
13	LANDAK	JELIMPO	TEMAHAR	0,754 3	0,35	0,4	0,5014	TERTING GAL
14	LANDAK	JELIMPO	SEKAIS	0,685 7	0,283 3	0,666 7	0,5452	TERTING GAL
15	LANDAK	BANYUKE HULU	GAMANG	0,577 1	0,383 3	0,666 7	0,5424	TERTING GAL
16	KUBU RAYA	TERENTAN G	BETUAH	0,742 9	0,5	0,533 3	0,592 1	TERTING GAL

Sumber: idm.kemendesa.go.id 2022

2.4.1.14. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Prevalensi pemakaian kontrasepsi (CPR) adalah angka yang menunjukkan banyaknya Pasangan Usia Subur yang sedang memakai kontrasepsi pada saat pencacahan. Pada tahun 2022 CPR Kalimantan Barat sebesar 73,12 persen meningkat dibandingkan kondisi tahun 2021

sebesar 71,72 persen. Angka CPR tahun 2022 tertinggi berada di Kota Pontianak sebesar 80,99 persen. Sedangkan angka CPR terendah pada tahun 2022 berada di Kabupaten Kubu Raya sebesar 58,21 persen.

Tabel 2. 129 Prevalensi Pemakaian Kontrasepsi di Kalimantan Barat

No	Wilayah	Prevalensi Pemakaian Kontrasepsi (1)					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(7)
1	Mempawah	69,62	71,14	71,51	70,89	70,52	56,7
2	Sambas	69,36	69,40	69,62	71,38	71,43	60,9
3	Ketapang	70,76	72,48	71,71	76,23	79,84	57,1
4	Sanggau	82,87	77,74	73,52	72,33	73,12	63,9
5	Sintang	73,20	75,63	76,51	78,77	78,45	66,1
6	Kapuas Hulu	76,09	77,94	79,14	78,38	80,50	63,5
7	Pontianak	69,42	69,54	69,94	70,43	80,99	49,7
8	Singkawang	59,58	57,26	55,10	77,57	78,38	34,3
9	Bengkayang	N/A	71,79	73,95	69,66	71,47	57,6
10	Landak	71,15	72,36	74,55	69,48	69,60	69,2
11	Sekadau	71,13	62,98	67,00	76,48	77,66	61,5
12	Melawi	72,31	72,73	71,93	65,00	66,75	78,1
13	Kayong Utara	80,21	78,14	77,39	70,14	70,48	68,0
14	Kubu Raya	63,19	63,22	63,67	56,46	58,21	53,7

No	Wilayah	Prevalensi Pemakaian Kontrasepsi (1)					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(7)
	KALIMANTAN BARAT	71,02	70,86	70,93	71.72	73.12	59,5

Sumber: BKKBN Perwakilan Kalbar 2024

Persentase Fasilitas Perencanaan Program KB, KS, dan Dalduk

Penduduk harus menjadi titik sentral dalam pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan terencana di segala bidang untuk menciptakan perbandingan ideal antara perkembangan kependudukan dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan serta meningkatkan kualitas generasi mendatang untuk mensukseskan pembangunan. Terdapat dua hal utama yang perlu diperhatikan dalam membahas integrasi penduduk dan pembangunan. Pertama, bahwa penduduk tidak hanya diperlakukan sebagai objek tetapi juga subjek yang berpartisipasi penuh dalam pembangunan. Kedua, ketika penduduk memiliki peran sebagai subyek pembangunan, maka diperlukan upaya pemberdayaan untuk meningkatkan kapasitas penduduk dalam pembangunan. Hal ini menyangkut “pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas”.

TFR, mCPR, Unmet Need, ASFR, iBangga

Prevalensi kontrasepsi modern (mCPR) adalah proporsi Wanita kawin umur 15-49 tahun (PUS) yang sedang menggunakan kontrasepsi modern saat pengumpulan data dilakukan dengan tujuan untuk menunda, mengatur jarak kelahiran atau membatasi jumlah kelahiran dibandingkan dengan jumlah seluruh PUS. Metode ini meliputi

Metode Operasi Wanita (MOW)/steril Wanita, Metode Operasi Pria (MOP)/ Steril Pria, IUD/spiral/Alat Kontrasepsi Dalam Rahim (AKDR), Implant/Susuk, pil, kondom, dan Metode Amenore Laktasi (MAL). Di Provinsi Kalimantan Barat pemakaian kontrasepsi modern ini mengalami fluktuasi dimana pada tahun 2021 mengalami penurunan dari 63.1 menjadi 58.0 sementara pada tahun 2022 mengalami kenaikan menjadi 59.9 dan mengalami penurunan kembali pada tahun 2023 menjadi 59.2. Walaupun penggunaan kontrasepsi mengalami penurunan tidak memberikan dampak yang signifikan terhadap angka kelahiran Total (TFR) maupun Angka Kelahiran menurut Usia (ASFR). TFR Provinsi Kalimantan Barat mengalami penurunan dari tahun 2020 yakni 2.6 per WUS usia 15-49 tahun menjadi 2.18 per WUS usia 15-49 tahun pada tahun 2023 sedangkan ASFR mengalami fluktuasi dimana tahun 2021 mengalami penurunan dari 61 per 1000 wanita usia 15-19 tahun menjadi 31.2 per 1000 wanita usia 15-19 tahun dan mengalami kenaikan pada tahun 2022 menjadi 34.9 per 1000 wanita usia 15-19 tahun lalu mengalami kenaikan kembali pada tahun 2023 menjadi 34.9 per 1000 wanita usia 15-19 tahun. Sementara itu, persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need) di Provinsi Kalimantan Barat mengalami penurunan dari tahun 2020 dari 16.40 menjadi 11.1 pada tahun 2023. Unmet

Need adalah persentase wanita kawin 15-49 tahun (PUS) yang tidak ingin mempunyai anak (lagi) atau menjarangkan kelahiran berikutnya tetapi tidak menggunakan metode kontrasepsi apapun. Provinsi Kalimantan Barat Persentase

Unmet Need penjarangan kelahiran sebesar 3.6 persen dan persentase Unmet Need pembatasan kelahiran sebesar 7.5 persen. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari tabel di bawah ini:

Tabel 2. 2 mCPR, TFR, ASFR, Unmet Need, dan i-Bangga Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018 - 2023

Tahun	mCPR (%)	TFR (per WUS usia 15-49 tahun)	ASFR (kelahiran per 1000 wanita usia 15-19 tahun)	Unmet Need (%)	i-Bangga
2018	60.3	2.43	n/a	13.2	n/a
2019	61.42	2.49	n/a	8.7	n/a
2020	63.1	2.6	61	17.0	48.83
2021	58.0	2.4	31.2	16.40	51.32
2022	59.9	2.31	34.9	16.04	54.61
2023	59.2	2.18	31.1	11.1	60.40

Sumber : LKJ BKKBN

Indeks Pembangunan Keluarga (i-Bangga) merupakan ukuran program pembangunan keluarga yang ditunjukkan melalui dimensi ketentraman, kemandirian, dan kebahagiaan keluarga serta menggambarkan peran dan fungsi keluarga. I-Bangga di Provinsi Kalimantan Barat

mengalami kenaikan dari tahun 2020 sebesar 48.83 menjadi 60.40 pada tahun 2023. Dimana dimensi ketentraman sebesar 56.86, dimensi kemandirian 51.97, dan dimensi kebahagiaan 72.37.

2.4.1.15. Perhubungan

Terminal di Kalimantan Barat sebanyak 27 unit, yang tersebar di seluruh kabupaten/kota, baik itu tipe A, B dan C. Untuk tipe A sebanyak 1 (satu) unit yang terletak di Kabupaten Kubu Raya yaitu di Sei Ambawang, sedang tipe B sebanyak 25 (dua puluh lima) unit dan tipe c sebanyak 1 (satu) unit di Sei Pinyuh Kabupaten Mempawah. Sesuai

Undang-undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa terminal Tipe B merupakan kewenangan dari pada Pemerintah Provinsi, sehingga untuk pembangunan dan pemeliharaannya ditangani oleh Pemerintah Provinsi.

Tabel 2. 130 Sebaran Terminal di Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2023

No.	Kab/Kota	Terminal	Type
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Kota Pontianak	Batulayang	B
2	Kabupaten Kubu Raya	ALBN Sei Ambawang	A
		Sungai Durian	B
3	Kabupaten Mempawah	Mempawah	B
		Sei Pinyuh	C
		Jungkat	B
4	Kota Singkawang	Pasiran	B
		Beringin	B
5	Kabupaten Sambas	Sambas	B
		Kartiasa	B
		Aruk	B
		Pemangkat	B
6	Kabupaten Bengkayang	Bengkayang	B
		Seluas	B
7	Kabupaten Landak	Ngabang	B
8	Kabupaten Sanggau	Sosok	B
		Sanggau	B

No.	Kab/Kota	Terminal	Type
(1)	(2)	(3)	(4)
		Entikong	B
		Tayan	B
9	Kabupaten Sekadau	Lawang Kuari	B
		Sungai Ukoi	B
10	Kabupaten Sintang	Sungai Durian	B
		Tanjung Puri	B
11	Kabupaten Melawi	Sido Mulyo	B
12	Kabupaten Kapuas Hulu	Badau	B
13	Kabupaten Ketapang	Ketapang	B
14	Kabupaten Kayong Utara	Kayong Utara	B

Sumber: Dinas Perhubungan Prov. Kalbar, Tahun 2023

a. Persentase Ketersediaan Sarana Perhubungan Darat

Persentase ketersediaan sarana perhubungan darat tahun 2022 sebesar 56,85 sedangkan untuk capaian tahun 2022 sebesar 59,32. Sektor Perhubungan merupakan sektor yang mempunyai dan memegang peran sentral dalam menciptakan nilai tambah melalui penyelenggaraan perhubungan yang mampu mendorong perkembangan antar wilayah serta

meningkatkan konektivitas antar daerah. Kebijakan di bidang perhubungan Provinsi Kalimantan Barat, selain dimaksudkan untuk mendukung pergerakan penduduk dan angkutan barang terutama untuk wilayah pedalaman juga untuk memperlancar arus transportasi antar modal. Untuk itu perlu adanya sarana pendukung baik itu terminal, bandara, pelabuhan serta fasilitas keselamatan maupun armadanya.

Tabel 2. 131 Sarana Perhubungan Darat Kabupaten/Kota

No	Kabupaten / Kota	Terminal Tipe B	Pelabuhan	Bandar Udara
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Sambas	1	3 (Sintete, Pemangkat, Paloh/sekura)	
2	Mempawah			
3	Sanggau			
4	Ketapang		3 (Ketapang, Kendawangan, Sukaharja)	1 (Rahadi Usman)
5	Sintang	1		1 (Tebelian)
6	Kapuas Hulu	1		1 (Pangsuma)
7	Bengkayang			
8	Landak			
9	Sekadau			
10	Melawi	1		1 (Ng. Pinoh)
11	Kayong Utara		1 (Teluk Melano)	
12	Kubu Raya			1 (Supadio)
13	Pontianak		1 (Pontianak)	
14	Singawang		1 (singawang)	
	Jumlah	4	9	5

Sumber: Dinas Perhubungan Prov. Kalbar Tahun 2023.

2.4.1.16. Komunikasi dan Informatika

Dari data yang berhasil dikumpulkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat, pada tahun 2019 Jumlah Desa/Kelurahan di Kalimantan Barat yang telah terlayani telepon seluler sebanyak 1828 desa/kelurahan. Sedangkan untuk jumlah desa/kelurahan yang terlayani internet dari data yang berhasil

dikumpulkan diluar Kabupaten pada tahun 2019 adalah sebanyak 913 desa/kelurahan. Sementara itu, untuk Jumlah BTS yang ada di Kalimantan Barat pada tahun 2019 adalah sebanyak 8013 unit, dengan jumlah terbanyak berada di Kota Pontianak sebanyak 1419 BTS.

Tabel 2. 132 Jumlah Desa Terlayani Telepon Seluler dan Internet Serta
Jumlah BTS Tahun 2019-2023

Kabupaten/Kota	2019			2020			2021		
	Jumlah Desa/ Kelurahan Terlayani Telepon Seluler	Jumlah Desa/Kelurahan Terlayani Internet	Jumlah BTS	Jumlah Desa/ Kelurahan Terlayani Telepon Seluler	Jumlah Desa/Kelurahan Terlayani Internet	Jumlah BTS	Jumlah Desa/ Kelurahan Terlayani Telepon Seluler	Jumlah Desa/Kelurahan Terlayani Internet	Jumlah BTS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Kab. Sambas	190	148	768	192	157	768	193	170	768
Kab. Mempawah	56	40	519	57	52	519	57	55	519
Kab. Sanggau	151	40	835	152	109	835	156	129	835
Kab. Ketapang	229	131	1013	233	152	1013	240	182	1013
Kab. Sintang	331	111	606	348	191	606	365	222	606
Kab. Kapuas Hulu	249	143	356	253	157	356	260	181	356
Kab. Bengkayang	102	31	486	110	67	486	109	78	486
Kab. Landak	128	33	366	138	63	366	141	91	366
Kab. Sekadau	76	35	223	84	57	223	85	69	223
Kab. Melawi	108	47	108	118	86	108	129	113	108
Kab. Kayong Utara	43	20	120	43	37	120	43	37	120

Kab. Kubu raya	110	81	754	113	101	754	113	106	754
Kota Pontianak	29	29	1419	-	-	1419	-	-	1419
Kota Singkawang	26	26	440	-	-	440	-	-	440
Kalimantan Barat	1828	913	8013	-	-	8013	-	-	8013

Sumber: SIPD Dinas Komunikasi dan Informastika Prov. Kalbar, 2023.

2.4.1.17. Koperasi dan Usaha Kecil. Menengah

Kinerja pembangunan urusan Koperasi dan UMKM pada tahun 2019-2020 terdapat 2 (dua) indikator capaian kinerja pembangunan yaitu Persentase Koperasi Berkualitas dan Persentase Pelaku Usaha Mikro dan Kecil naik kelas. Tahun 2019 capaian kinerja indikator persentase koperasi berkualitas sebesar 23,85 dengan target sebesar 23,00 dan sudah melampaui target. Pada tahun 2020 mencapai sebesar 33,79 atau meningkat sebesar 41,68 dibanding tahun 2019. Jumlah Koperasi pada tahun 2020 sebanyak 4.998 unit dengan volume usaha sebanyak Rp. 9,44 Triliun dan lebih baik dari tahun sebelumnya sebesar Rp. 8,45 Triliun.

Pengukuran capaian pembangunan urusan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) pada tahun 2021 mengalami perubahan sejalan dengan pemutakhiran Permendagri nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan perubahan RPJMD Provinsi Kalimantan Barat nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Rencana

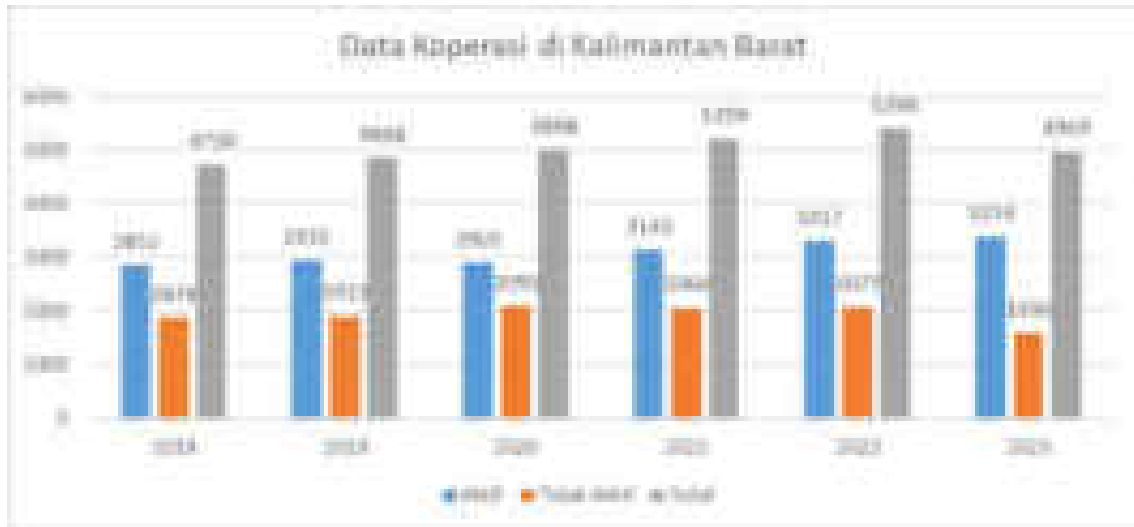
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2023. Sehingga capaian kinerja Urusan Koperasi dan UKM, belum dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya karena adanya perubahan indikator dan besaran target.

Perkembangan Volume Usaha Koperasi dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2023 menunjukkan peningkatan dari tahun ketahun. Pada tahun 2018 sebesar Rp. 7,67 Triliun, tahun 2019 sebesar Rp. 8,45 Triliun, pada tahun 2020 sebesar Rp. 9,44 Triliun, tahun 2021 sebesar Rp.9,56 Triliun, tahun 2022 sebesar Rp.10,73 Triliun dan tahun 2023 sebesar Rp.11,96 Triliun. Pada tahun 2021 indikator kinerja Koperasi menjadi persentase koperasi berkualitas target 27 dan dengan capaian sebesar 97 atau sebesar 26,28 dan target pada tahun 2022 sebesar 29 dengan capaian menjadi 29,58. Perkembangan koperasi aktif dari tahun 2018-2023 berfluktuasi, pada tahun 2020 mengalami perlambatan akibat dampak dari pandemi Covid-19, pada akhir 31 Desember 2021 menunjukkan peningkatan kembali dan lebih baik dari tahun-tahun

sebelumnya. Kondisi koperasi aktif dan koperasi tidak aktif juga menunjukan kondisi cenderung meningkat sampai tahun 2022, pada 2023

mengalami penurunan sebanding dengan penurunan jumlah koperasi sebagaimana gambar dibawah ini.

Tabel 2. 133 Perkembangan Koperasi Tahun 2018-2023 Provinsi Kalimantan Barat



Sumber data: Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kalbar 2023

Capaian kinerja indikator Persentase Pelaku Usaha Mikro dan Kecil Naik Kelas pada tahun 2021 sebesar 0,23 belum mampu mencapai target baik target 2019 sebesar 0,91 maupun target 2020 sebesar 1,82. Pada tahun 2021-2023 indikator capaian kinerja pembangunan urusan

Koperasi dan UMKM mengalami perubahan seiring dengan penyesuaian indikator berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 dengan indikator Persentase Volume Usaha Koperasi dan Persentase Pertumbuhan UMKM.

Tabel 2. 134 Perkembangan Indikator Kinerja Pembangunan Urusan Koperasi dan UKM Tahun 2019-2023

N O	Indikator Kinerja	2019		2020		2021		2022		2023	
		T	R	T	R	T	R	T	R	T	R
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Persentase Koperasi Berkualitas	23	23,85	25	35,67	27	26,28	29	29,79	31,	29,33

N O	Indikator Kinerja	2019		2020		2021		2022		2023	
		T	R	T	R	T	R	T	R	T	R
2	Persentase Pelaku Usaha Mikro, Kecil Naik kelas	0,91	0,23	1,82	0,16	-	-	-	-	-	-
3	Persentase Volume Usaha Koperasi (T)		-	-	-	11	13.14	12	12.30	13	11,47
4	Persentase Pertumbuhan UMKM	-	-	-	-	5	6.98	7	0.81	9	14,78
5	Persentase Koperasi Berkualitas	-	-	-	-	27	26.28	29	29.58	31	29,33

Keterangan: T = Target; R = Realisasi

Sumber: Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2023

Capaian kinerja Urusan Koperasi pada RPJMD dengan indikator persentase volume usaha koperasi tahun 2022 sebesar 12,30 persen, namun pada tahun 2023 mengalami perlambatan menjadi 11,47 %. Kondisi ini dipicu masih rendahnya Koperasi melakukan RAT dan berkurangnya jumlah Koperasi. Kinerja Renstra ditunjukkan dengan indikator persentase usaha kecil naik kelas target sebesar 0,24 dengan realisasi sebesar 0,22 tahun 2022 belum mencapai target, diakibatkan beberapa program yang belum mencapai target diantaranya

program pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil, dan usaha mikro. Kendala lain yang dihadapi adalah akibat bencana Covid-19 dan terjadinya refocusing sehingga pembiayaan tidak maksimal serta masih banyaknya bidang usaha pelaku UMKM yang terdampak covid belum pulih sepenuhnya. Indikator persentase koperasi berkualitas dengan capaian kinerja 97 dari target 27 atau sebesar 26,28. Kondisi ini akibat masih banyak Koperasi yang terkendala dalam pelaksanaan RAT secara virtual.

2.4.1.18. Penanaman Modal

Melalui penerapan otonomi daerah, diharapkan muncul pusat kekuatan baru di daerah dalam bidang ekonomi, sosial, dan politik. Akan tetapi pemerintah memiliki keterbatasan, oleh karena itu dibutuhkan peran swasta dimana salah satu aspeknya adalah dibidang investasi. Pemerintah berusaha mendorong pihak swasta untuk meningkatkan kegiatan penanaman modal. Pemerintah menetapkan kebijakan dasar

penanaman modal baik untuk swasta domestik (PMDN) maupun asing (PMA), tujuannya adalah untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi penanaman modal dan untuk mendorong pengembangan ekonomi potensial, meningkatkan lapangan kerja dan penguatan daya saing perekonomian. Pada tahun 2023 PMDN sebesar Rp. 15.382.424,00 Juta terjadi peningkatan investasi PMDN sebesar 163,94 persen dibandingkan dengan tahun 2022 sebesar Rp. 9.382.923,50 Juta.

Tabel 2. 135 Rencana dan Realisasi Kumulatif Perkembangan Investasi PMDN di Kalimantan Barat
Tahun 2018-2023

TAHUN	P M D N				
	REALISASI		TENAGA KERJA		
	JUMLAH PROYEK	INVESTASI (Rp. Juta)	INDONESIA	ASING	TOTAL
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2018	595	6.591.384,10	14.428	3	14.431
2019	1.110	7.695.834,20	11.563	21	11.584
2020	2.144	9.256.471,40	12813	39	12.852
2021	4.281	10.773.393,00	9828	16	9844
2022	4.488	9.382.923,50	16.581	3	16.584
2023	9.044	15.382.424,00	14.929	36	14.964
Pertumbuhan	201,52	163,94	90,04	1200,00	90,23

Sumber: Kalimantan Barat Dalam Angka 2021, 2022

Keterangan:

- Rencana investasi PMDN berdasarkan izin prinsip penanaman modal yang diterbitkan SPIPISE BKPMRI, DPMPTSP Provinsi dan DPMPTSP kabupaten/kota.
- Realisasi investasi berdasarkan LKPM yang diterima DPMPTSP Provinsi Kalimantan Barat.
- Investasi PMDN/PMA di luar investasi Migas, Perbankan, Lembaga Keuangan Non Bank, Asuransi, Sewa Guna Usaha Sektoral dan Industri Rumah Tangga.
- Nilai Investasi PMDN dalam Rp Juta.

Dukungan investasi yang bersumber dari PMA dengan tahun 2022 sebesar 745.466,90 (US\$ tahun 2023 sebesar 490.469,00 (US \$ ribu,) atau ribu).
menurun sebesar 66,79 persen dibandingkan

2.5. Evaluasi Hasil RPJPD Tahun 2005-2025

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2025-2045

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Barat merupakan arah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kalimantan Barat untuk jangka waktu dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2025 atau selama periode dua puluh tahun. Evaluasi dilakukan dengan membandingkan

indikator kinerja makro pembangunan di awal tahun perencanaan RPJPD yaitu tahun 2005 dibandingkan dengan tahun terakhir, namun dikarenakan evaluasi disusun pada tahun 2023 sehingga data yang tersedia (sumber BPS) sampai dengan tahun 2022.

Tabel 2. 136 Capaian Indikator Kinerja Makro Pembangunan di Provinsi Kalimantan Barat Tahun Berjalan 2022

No	Indikator Kinerja Makro	Capaian Kinerja Awal Periode Perencanaan (2005)	Capaian pada Tahun Berjalan (2022)	Pertumbuhan/Penurunan (%)	Keterangan
1	Indeks Pembangunan Manusia	66.2	68.63	7.33	2010-2022 Menggunakan Metode Baru
2	Angka Kemiskinan (P0)	14.24	6.73	-52.74	
3	Angka Pengangguran	8.13	5.11	-37.15	
4	Pertumbuhan Ekonomi	3.73	5.07	35.92	
5	Pendapatan Per Kapita (Rupiah)	8,566,175.88	46,161,328.88	538.88	2005-2010 (Tahun Dasar 2000) dan 2011 - 2022 (Tahun Dasar 2010)
6	Ketimpangan Pendapatan	0.292	0.314	7.50	
7	PDRB Per Kapita (Rupiah)	8,566,175.88	46,161,328.88	140.95	Untuk di daerah angkanya sama dengan Pendapatan Per Kapita

Sumber: BPS Kalimantan Barat

Berdasarkan table di atas diketahui bahwa indikator IPM, Angka Kemiskinan, Angka Pengangguran, Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Perkapita / PDRB Per Kapita menunjukkan perkembangan kearah yang lebih baik hanya indikator ketimpangan pendapatan atau indeks gini yang menunjukkan kinerja yang kurang baik, namun masih dikategorikan ketimpangan sedang dibanding tahun awal periode perencanaan dengan kategori ketimpangan rendah. Pertumbuhan ekonomi meningkat seiring dengan pendapatan perkapita yang juga meningkat lebih dari lima kali dibanding tahun awal perencanaan sehingga

mengindikasikan pembangunan bisa dinikmati oleh masyarakat dengan ekonomi yang terus menggeliat walaupun di tahun 2020 terjadi kontraksi ekonomi sebesar 1,82 Persen akibat pandemi namun Kalimantan Barat mampu bertahan dan mengembalikan pertumbuhan ekonominya dengan capaian sebesar 5.07 Persen di Tahun 2022.

Indikator Pendapatan Per Kapita dan PDRB Per Kapita berdasarkan data yang tersedia dari BPS diketahui adalah sama sehingga indikator yang dibahas pada laporan evaluasi ini hanya sebanyak 6 indikator dengan uraian sebagai berikut:

2.5.1. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau *Human Development Index* (HDI) merupakan indeks yang menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan dan sebagainya. IPM dibentuk oleh tiga aspek, meliputi aspek kesehatan melalui pengukuran angka harapan hidup saat lahir, pendidikan melalui pengukuran angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah, serta aspek hidup layak

melalui pengukuran kemampuan daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok yang dilihat dari rata-rata besarnya pengeluaran per kapita. Indeks Pembangunan Manusia merupakan indikator yang sangat penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup masyarakat dan menentukan peringkat atau level pembangunan suatu wilayah.

Tabel 2. 137 Capaian Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Kalimantan Barat
Tahun Berjalan (2022)

No	Indikator Kinerja Makro	Capaian Kinerja Awal Periode Perencanaan (2005)	Capaian pada Tahun Berjalan (2022)	Pertumbuhan / Penurunan (%)	Keterangan
1	Indeks Pembangunan Manusia	66.2	68.63	7.33	2010-2022 Menggunakan Metode Baru

Pada tahun 2010 Badan Pusat Statistik melakukan perubahan cara perhitungan Indeks Pembangunan Manusia sehingga rerata pertumbuhan dihitung dengan rata-rata pertumbuhan tahun 2009 dibanding dengan tahun 2005 kemudian capaian tahun 2022 dibanding tahun 2010 kemudian dibagi dua sehingga didapatlah angka pertumbuhan sebesar 7.33 persen.

Berdasarkan tabel 2.2 diketahui bahwa capaian Indikator Pembangunan Manusia pada tahun 2022 adalah sebesar 68,63 sehingga terjadi pertumbuhan sebesar 7.33 persen dibandingkan

2.5.1.1. Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)

Rata-Rata Lama Sekolah (*Mean Years School*) didefinisikan sebagai jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. Angka ini dapat digunakan untuk mengetahui kualitas pendidikan dalam suatu wilayah. Penduduk yang tamat Sekolah Dasar diperhitungkan lama sekolah selama 6

2.5.1.2. Angka Harapan Lama Sekolah (HLS)

Angka Harapan Lama Sekolah adalah lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Diasumsikan bahwa peluang anak tersebut akan tetap bersekolah pada umur-umur berikutnya sama dengan peluang penduduk yang bersekolah per jumlah penduduk untuk umur yang sama saat ini. Angka Harapan Lama

2.5.1.3. Angka Usia Harapan Hidup

Angka Usia Harapan Hidup didefinisikan sebagai rata-rata tahun hidup yang akan dijalani oleh seseorang yang telah berhasil mencapai umur tersebut dalam situasi kematian yang berlaku di

kinerja awal (2005) RPJPD Provinsi Kalimantan Barat, yang mengindikasikan bahwa Provinsi Kalimantan Barat sudah berhasil dalam upaya membangun kualitas hidup masyarakat dengan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan.

Indeks Pembangunan Manusia dibentuk dari tiga komponen, yaitu *komponen pendidikan* (rata-rata lama sekolah, harapan lama sekolah), *komponen kesehatan* (usia harapan hidup) dan *komponen daya saing* (pengeluaran per kapita), dengan penjelasan sebagai berikut:

(enam) tahun, tamat Sekolah Menengah Pertama (SMP) diperhitungkan lama sekolah selama 9 (sembilan) tahun, tamat Sekolah Menengah Atas (SMA) diperhitungkan lama sekolah selama 12 (dua belas) tahun tanpa memperhitungkan apakah pernah tinggal kelas atau tidak.

Sekolah dihitung untuk penduduk berumur 7 tahun ke atas, dimana angka tersebut dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak.

lingkungan masyarakatnya. Semakin tinggi kematian maka semakin rendah Angka Harapan Hidup. Angka Harapan Hidup dapat digunakan sebagai indikator pembangunan ekonomi.

Semakin tinggi Angka Harapan Hidup di suatu wilayah, maka semakin baik pembangunan ekonominya.

2.5.1.4. Pengeluaran Per kapita

Untuk mengukur dimensi hidup layak digunakan indikator kemampuan daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok yang dilihat dari rata-rata besarnya pengeluaran perkapita sebagai pendekatan pendapatan yang mewakili capaian pembangunan untuk hidup layak. Standar hidup yang layak digambarkan oleh pengeluaran per kapita disesuaikan yang ditentukan dari nilai pengeluaran per kapita dan

paritas daya beli (*Purchasing Power Parity-PPP*). Rata-rata pengeluaran per kapita setahun diperoleh dari Susenas. Rata-rata pengeluaran per kapita dibuat konstan/riil dengan tahun dasar 2012 = 100. Penghitungan PPP pada metode baru menggunakan 96 komoditas dimana 66 komoditas merupakan makanan dan 30 komoditas merupakan komoditas non makanan.

Tabel 2. 138 Capaian Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Kalimantan Barat Berdasarkan Komponen Pembentuk Tahun Berjalan (2022)

No	Indikator Kinerja Makro	Capaian Kinerja Awal Periode Perencanaan (2005)	Capaian pada Tahun Berjalan (2022)	Pertumbuhan /Penurunan (%)	Keterangan
1	Indek Pembangunan Manusia	66,20	68,63	7,33	2010-2022 Menggunakan Metode Baru
2	RLS	89,00	7,59	9,06	2010-2022 Menggunakan Metode Baru
3	HLS	6,61	12,66	11,59	2010-2022 Menggunakan Metode Baru
4	AHH	65,15	71,02	2,42	2010-2022 Menggunakan Metode Baru
5	PPP	609,5.6	9.355.00	12.81	2010-2022 Menggunakan Metode Baru

Berdasarkan tabel 2.138 diketahui bahwa persentase pertumbuhan komponen terbesar dari IPM adalah pada pengeluaran per kapita dimana pada tahun 2005 pengeluaran per kapita Kalimantan Barat sebesar enam ratus sembilan ribu lima ratus enam puluh rupiah (Rp. 609.560,00) meningkat sebesar Sembilan juta tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah (Rp.9.355.000,00). Untuk usia harapan hidup masyarakat Kalimantan Barat meningkat dari 65,16 tahun meningkat menjadi 71.02 tahun

untuk dapat menjalani hidup, sedangkan harapan lama sekolah meningkat dari 6.61 tahun menjadi 7,59 yang artinya tahun lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang adapun untuk rata-rata lama sekolah belum bisa dibandingkan karena pada tahun 2005 menggunakan metode baru dalam perhitungan IPM sehingga bukan angka rata-rata lama sekolah yang digunakan namun angka melek huruf.

2.5.2. Angka Kemiskinan

Garis Kemiskinan atau batas kemiskinan menurut BPS adalah representasi dari jumlah rupiah minimum yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pokok minimum makanan yang setara dengan 2.100 kkal/kapita/hari dan kebutuhan pokok bukan makanan. Garis Kemiskinan setiap Kabupaten dan Kota berbeda satu dengan yang lain, mengingat setiap kabupaten kota memiliki harga bahan pokok makanan dan non makanan yang berbeda-beda sehingga uang yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan non makanan juga akan menjadi berbeda di setiap kabupaten dan kota yang ada di seluruh NKRI.

Angka kemiskinan merupakan persentase penduduk yang berada dibawah garis Kemiskinan, dimana angka kemiskinan Kalimantan Barat di Tahun 2005 sebesar 14,24 persen mampu diturunkan sebesar 6,73 persen di tahun 2022 atau mampu diturunkan sebesar 7.51 poin atau 52.72 persen. Untuk kemiskinan selain dapat dilihat dari persentase penduduk miskin, BPS juga melihat kemiskinan dari kedalaman kemiskinan, keparahan kemiskinan dan juga garis kemiskinan, yang dapat dilihat capaiannya sebagai berikut:

Tabel 2. 139 Capaian Angka Kemiskinan Provinsi Kalimantan Barat berdasarkan Komponen Pembentuk Tahun Berjalan (2022)

No	Indikator Kinerja Makro	Capaian Kinerja Awal Periode Perencanaan (2005)	Capaian pada Tahun Berjalan (2022)	Pertumbuhan / Penurunan (%)	Ket
1	Angka Kemiskinan	14.24	6.73	-52.74	

2	Kedalaman Kemiskinan	2.44	1.04	-57.34	
3	Keparahan Kemiskinan	0.64	0.24	-62.50	
4	Garis Kemiskinan	124.804	520.660	417.18	

Berdasarkan tabel 2.3 diketahui bahwa kedalaman kemiskinan Provinsi Kalimantan Barat adalah sebesar 1.04 atau turun sebesar 57.34 persen dari tahun 2005 yang menunjukkan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan sebesar 1.04 persen, dan keparahan kemiskinan Provinsi Kalimantan Barat sebesar 0.24 persen atau turun sebesar 62.50 persen dari tahun 2005 yang mengindikasikan bahwa ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin sebesar 0.24 persen sedangkan garis kemiskinan sebesar lima ratus dua puluh ribu enam ratus enam puluh rupiah (Rp. 520.600,00) atau meningkat sebesar 417.18 persen dibanding tahun 2005.

Arah kebijakan yang telah dilakukan dalam menurunkan persentase penduduk miskin

Provinsi Kalimantan Barat adalah melalui percepatan peningkatan status kemandirian dan kemajuan desa berbasis kewilayahan (Indeks Desa Membangun KPH, Indeks Desa Membangun Perbatasan dan Indeks Desa Membangun di Pesisir), kolaborasi penanganan status kemandirian dan kemajuan desa serta sinkronisasi data. Karena dengan adanya peningkatan status desa mandiri maka terdapat indikator ekonomi yang telah dilaksanakan yang sejalan untuk mengurangi kemiskinan.

Arah kebijakan yang ditempuh sudah benar dimana jumlah Desa Mandiri tahun 2018 hanya 1 Desa Mandiri dan di tahun 2022 terealisasi sebanyak 586 desa mandiri dari jumlah desa sebanyak 2.148 di Kalimantan Barat.

2.5.3. Angka Pengangguran

Angka pengangguran yang digunakan adalah angka Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Barat, yang merupakan persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Pengangguran terjadi karena berbagai macam faktor, diantaranya karena terbatasnya lapangan kerja sementara jumlah penduduk tinggi, pendidikan dan

keterampilan yang rendah, angkatan kerja tidak dapat memenuhi persyaratan yang diminta dunia kerja, teknologi yang semakin modern, dan berbagai macam faktor lain.

Tingkat pengangguran terkait erat dengan siklus bisnis. Itu menurun selama ekspansi ekonomi dan meningkat selama resesi. Tetapi pengangguran tidak pernah nol. Bahkan ketika ekonomi sedang makmur.

Tabel 2. 140 Capaian Angka Pengangguran Provinsi Kalimantan Barat
Tahun Berjalan (2022)

No	Indikator Kinerja Makro	Capaian Kinerja Awal Periode Perencanaan (2005)	Capaian pada Tahun Berjalan (2022)	Pertumbuhan / Penurunan (%)	Keterangan
1	Angka Pengangguran	8.13	5.11	- 37.15	2010-2022 Menggunakan tahun dasar 2010

Angka pengangguran di tahun 2011 sudah menggunakan tahun dasar baru yaitu tahun 2010, untuk angka pengangguran mengalami penurunan di tahun 2022 sebesar 5.11 dibanding tahun awal perencanaan. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah dalam menurunkan angka pengangguran sudah baik terutama dalam upaya memperbaiki kualitas dan peningkatan daya saing tenaga kerja serta menciptakan hubungan industrial yang harmonis dan memperbaiki iklim ketenagakerjaan untuk mendorong investasi industri padat karya.

Kontribusi beberapa sektor dalam penyerapan tenaga kerja terdapat pada 3 sektor utama, yaitu:

- Sektor Pertanian yaitu jumlah pekerja sektor pertanian

- Sektor Manufaktur yaitu jumlah pekerja di sektor pertambangan, industri pengolahan, listrik, gas dan air bersih serta konstruksi (bangunan)
- Sektor Jasa, yaitu jumlah pekerja di sektor perdagangan, transportasi, keuangan, jasa perusahaan dan jasa perorangan.

Untuk itu kebijakan kedepan untuk meningkatkan daya saing tenaga kerja adalah melalui pengembangan program kemitraan antara pemerintah dengan dunia usaha dan pemanfaatan Balai Latihan Kerja agar kualitas lulusan pelatihan dan perluasan akses terhadap pelatihan termasuk pelatihan kewirausahaan.

2.5.4. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi juga disertai upaya-upaya perluasan dan keberpihakan kesempatan kerja kepada kelompok kurang mampu yang pada akhirnya dapat mengurangi tingkat kemiskinan dan memperkecil kesenjangan. Transformasi ekonomi melalui industrialisasi yang berkelanjutan menjadi kunci keberhasilan pembangunan. Kesemuanya ini diperkirakan akan dapat tercapai dengan asumsi: (1)

Perekonomian dunia terus mengalami pemulihan; (2) Tidak ada gejolak dan krisis ekonomi dunia baru; serta (3) Berbagai kebijakan yang telah ditetapkan dalam agenda pembangunan dapat terlaksana.

Di tengah perekonomian global yang masih dalam tahap pemulihan, kinerja perekonomian Kalimantan Barat masih terus menunjukkan tren peningkatan dalam beberapa waktu terakhir.

Kinerja perekonomian tersebut didorong oleh semakin membaiknya kondisi perekonomian lokal, sejalan dengan pertumbuhan yang membaik, tingkat pengangguran terbuka semakin berkurang dan tingkat kemiskinan juga menunjukkan tren penurunan. Pertumbuhan

ekonomi juga disertai upaya-upaya perluasan dan keberpihakan kesempatan kerja kepada kelompok kurang mampu yang pada akhirnya dapat mengurangi tingkat kemiskinan dan memperkecil kesenjangan.

Tabel 2. 141 Capaian Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Kalimantan Barat
Tahun Berjalan (2022)

No	Indikator Kinerja Makro	Capaian Kinerja Awal Periode Perencanaan (2005)	Capaian pada Tahun Berjalan (2022)	Pertumbuhan / Penurunan (%)	Keterangan
1	Pertumbuhan Ekonomi	3,73	5,07	135,92	

Dari tabel 2.5 terlihat bahwa pertumbuhan ekonomi terus tumbuh di Kalimantan Barat dimana terjadi pertumbuhan sebesar 135.92 persen. Hal ini menunjukkan bahwa arah kebijakan terkait peningkatan perbaikan perekonomian sudah berjalan. Program prioritas yang telah dilakukan dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi adalah:

1. Pembangunan infrastruktur untuk peningkatan daya saing daerah
2. Pengembangan pariwisata
3. Warung desa
4. Mendorong peningkatan ekspor

5. Pengembangan pusat pertumbuhan ekonomi baru di perbatasan
6. Optimalisasi pendapatan asli daerah
Peningkatan pendapatan asli daerah ekspor CPO
7. Optimalisasi PAD melalui PP nomor : 81 Tahun 2019 tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak kenaikan tarif royalti hasil tambang antara 3-10 persen
8. Optimalisasi PAD dari perusahaan yang menunggak PBB
9. Revitalisasi Kota (Pusat Kegiatan Lokal)

2.5.5. Pendapatan Per Kapita / PDRB Per Kapita

PDRB Per Kapita atau juga sering disebut Pendapatan Per Kapita merupakan gambaran pendapatan yang diterima oleh masing-masing penduduk dalam suatu daerah sebagai keikutsertaannya dalam proses produksi. Besaran PDRB Per Kapita diperoleh dari output

yang dihasilkan pada tahun tertentu dibagi jumlah penduduk pada tahun tersebut. Pencapaian Per Kapita ini sering digunakan oleh para ahli perencana wilayah, pengembangan wilayah, studi pembangunan, ekonomi dan lainnya untuk mengkaji kemajuan suatu wilayah.

Semakin besar Pendapatan Per Kapitanya, maka semakin besar juga kemungkinan wilayah itu

memiliki tingkat pembangunan dan pendapatan rata-rata penduduk yang tinggi.

Tabel 2. 142 Capaian PDRB Per Kapita Provinsi Kalimantan Barat Tahun Berjalan (2022)

No	Indikator Kinerja Makro	Capaian Kinerja Awal Periode Perencanaan (2005)	Capaian pada Tahun Berjalan (2022)	Pertumbuhan / Penurunan (%)	Keterangan
1	PDRB Per Kapita	8.566.175.88	46.161.328.88	140.95	2010-2022 Menggunakan Metode Baru dengan menggunakan tahun dasar 2010

Berdasarkan tabel 2.6 capaian PDRB Per Kapita sampai dengan tahun 2022 adalah sebesar Rp. 46.161.328.88 atau tumbuh sebesar 140.95 persen. Hal ini menunjukkan terjadi perbaikan ekonomi, namun di mulai tahun 2019 terjadi pandemic covid-19 yang melanda seluruh dunia termasuk Indonesia, sehingga pertumbuhan ekonomi Kalimantan Barat terjadi kontraksi sebesar 1.82. Kalimantan Barat mampu melakukan pemulihan ekonomi yang cukup cepat sehingga di Tahun 2022 pertumbuhan ekonomi

bisa tumbuh kembali seperti sebelum pandemic sebesar 5.07. Stimulus terhadap perekonomian dilakukan melalui diantaranya proses penyerapan belanja pemerintah dipercepat, penerimaan perpajakan ditingkatkan sehingga stimulus fiskal semakin tinggi. Selain itu, aktivitas sektor swasta yang tercermin dari pertumbuhan kredit perbankan yang terus meningkat juga menjadi pendorong bagi peningkatan pertumbuhan ekonomi yang otomatis meningkatkan PDRB per Kapita.

2.5.6. Ketimpangan Pendapatan

Pembangunan tidak hanya ditujukan untuk kelompok tertentu, melainkan untuk seluruh masyarakat, oleh karena itu pembangunan harus dapat memperkecil kesenjangan antar kelompok pendapatan maupun kesenjangan antar wilayah. Ketimpangan masih menjadi tantangan dalam mewujudkan pembangunan daerah yang lebih inklusif dan merata. Ditengah upaya keras dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi pemerintah daerah juga perlu

melaksanakan agenda pembangunan tanpa dibayangi permasalahan ketimpangan. Dalam mengukur ketimpangan salah satu alat yang digunakan adalah dengan gini ratio. Gini ratio juga dapat menjadi salah satu indikator dalam mengukur keberhasilan pembangunan pada suatu wilayah

Peningkatan PDRB Per Kapita serta Pertumbuhan Ekonomi yang positif tidak menjamin adanya sebuah pemerataan

peningkatan kesejahteraan masyarakat. Oleh sebab itu untuk mengukur peningkatan pembangunan suatu daerah selain melihat dari factor pertumbuhan ekonomi perlu dilihat pula tingkat pemerataannya yang dapat dilihat salah satunya melalui Indeks Gini (Gini Ratio). Indeks Gini secara luas digunakan untuk mengukur ketimpangan dan distribusi pendapatan. Cara untuk menganalisis distribusi pendapatan per orang adalah menggunakan kurva Lorenz. Kurva Lorenz menunjukkan hubungan kuantitatif antara persentase penduduk dengan persentase pendapatan yang mereka terima. Semakin jauh kurva Lorenz dari garis diagonal (pemerataan sempurna), maka semakin tinggi pula derajat ketidak merataan ditunjukkan. Keadaan yang paling ekstrim dari ketidakmerataan sempurna, misalnya keadaan dimana seluruh pendapatan hanya diterima oleh satu orang, akan ditunjukkan oleh berimpitnya kurva Lorenz tersebut dengan

sumbu horizontal bagian bawah dan sumbu vertical sebelah kanan.

Indeks Gini berkisar antara 0 hingga 1. Semakin tinggi indeks gini mendekati 1 maka menunjukkan ketimpangan pendapatan penduduk makin melebar atau mendekati ketimpangan sempurna. Berdasarkan indeks gini terdapat tiga kelompok ketimpangan yaitu : ketimpangan tinggi nilai koefisien indeks gini 0,5 atau lebih, sedang jika nilainya antara 0,30-0,49 dan rendah jika kurang dari 0,30.

Kebijakan utama dalam rangka meningkatkan pemerataan antar kelompok pendapatan diarahkan untuk mendukung pemberdayaan ekonomi masyarakat kurang mampu melalui penguatan kebijakan ketenagakerjaan dan meningkatkan akses terhadap lahan dan modal bagi penduduk miskin dan rentan, peningkatan konektivitas antar wilayah terutama antar wilayah perkoataan dan perdesaan serta wilayah-wilayah tertinggal dan khusus pada kantong kemiskinan.

Tabel 2. 143 Capaian Ketimpangan Pendapatan Provinsi Kalimantan Barat
Tahun Berjalan (2022)

No	Indikator Kinerja Makro	Capaian Kinerja Awal Periode Perencanaan (2005)	Capaian pada Tahun Berjalan (2022)	Pertumbuhan / Penurunan (%)	Keterangan
1	Ketimpangan Pendapatan	0.292	0.314	7.50	

Selain indikator makro diatas indicator lain yang perlu mendapat perhatian pada pembangunan kedepan adalah sebagai berikut :

1. Indek Desa Membangun

Perkembangan Indeks Desa Membangun di Provinsi Kalimantan Barat bersifat sangat

positif dimana dari 1 Desa Mandiri di tahun 2018 menjadi 586 desa di tahun 2022 namun masih ada 1.445 desa yang perlu ditingkatkan menjadi desa mandiri.

2. Konflik Sosial

Perlindungan terhadap masyarakat merupakan salah satu fungsi pemerintah untuk menjaga dan mengamankan masyarakat dari segala bentuk ancaman yang dapat membahayakan. Keamanan dan ketertiban masyarakat sangat berpengaruh dalam mendorong percepatan pembangunan di suatu daerah. Kondusifitas di suatu wilayah juga berperan dalam mendorong datangnya investasi di wilayah tersebut. Selama lima tahun terakhir (sampai dengan data tahun 2022), kondisi keamanan dan ketertiban umum di Kalimantan Barat cukup kondusif dengan digambarkan tidak terdapatnya kasus konflik sosial di masyarakat dan tentu akan terus dipertahankan. Selain selalu diupayakan mencegah kemungkinan faktor-faktor yang kemungkinan dapat menjadi pemicu terjadinya konflik seperti terkait dengan kesenjangan ekonomi dan social

3. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)

Sumberdaya alam memiliki kontribusi yang besar terhadap pembangunan ekonomi, Kalimantan Barat sebagai salah satu daerah yang memiliki sumberdaya alam yang banyak seperti hasil hutan, pertambangan, pertanian dan perkebunan perlu memperhatikan lingkungan dalam memanfaatkan sumber daya alamnya agar dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan. IKLH dapat digunakan untuk menilai kinerja program perbaikan kualitas lingkungan hidup. IKLH juga dapat digunakan sebagai bahan informasi dalam mendukung proses pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Perkembangan indeks kualitas lingkungan hidup di Kalimantan Barat tahun 2022 adalah 71,90 yang masih perlu di tingkatkan.

4. Prevelensi Stunting.

Prevelensi Stunting di Kalimantan Barat pada tahun 2022 berdasarkan data kementerian RI mencapai 27,8, lebih tinggi daripada Prevelensi Ballita Stunting Nasional sebesar 21,6. Untuk itu perlu untuk mendapat perhatian agar kualitas SDM Kalimantan Barat di masa depan mampu berdaya saing.

5. Indeks Infrastruktur

Infrastruktur dasar yang terus meningkat mampu menunjang kehidupan masyarakat yang jumlahnya terus bertambah agar dapat hidup layak. Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu program prioritas dalam upaya untuk mengurangi kesenjangan antar wilayah, meningkatkan pusat pertumbuhan ekonomi baru, peningkatan pemenuhan pelayanan dasar dan peningkatan daya saing daerah. Pembangunan infrastruktur tidak hanya bertumpu dan terpusat pada salah satu wilayah atau daerah dengan penduduk dan pertumbuhan ekonomi yang tinggi saja, melainkan berdasarkan aspek pemerataan pembangunan wilayah.

Indeks infrastruktur merupakan gabungan dari beberapa sektor atau bidang, baik itu perumahan dan permukiman, Bina Marga, Sumber Daya Air maupun energi listrik. Indeks infrastuktur merupakan salah cermin dari pada kondisi daya saing daerah, semakin daya saing tinggi maka kondisi infrastruktur akan semakin baik, namun apabila daya saing rendah maka kondisi infrastrukturnya semakin terbatas.

Berdasarkan hasil kajian dan penelitian Asia *Competitiveness Institute Lee Kuan Yew School of Public Policy National University of Singapore*, bahwa Daya Saing Kualitas Hidup dan Pembangunan Infrastruktur Provinsi Kalimantan Barat pada tahun 2022 menduduki peringkat 31 dari 34 Provinsi di Indonesia. Sebagaimana diketahui bahwa kondisi infrastruktur Kalimantan Barat pada dasarnya masih relatif terbatas, baik itu di sektor jalan dan jembatan, air bersih, sanitasi, energi listrik, sumberdaya air, serta infrastruktur pendukung lainnya.

6. Indeks Reformasi Birokrasi

Salah satu indicator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah adalah indeks reformasi birokrasi, walaupun di tahun 2022 capaian indeks reformasi birokrasi Kalimantan Barat B namun kondisi ini tetap harus diimbangi dengan perbaikan kinerja terus-menerus sebagai upaya memenuhi tuntutan masyarakat terhadap kinerja pemerintah untuk memberikan pelayanan umum yang

berkualitas, responsive dan berkeadilan yang selalu meningkat.

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa terjadi ketimpangan pendapatan yang bertambah sebesar 0,022 poin yang mengindikasikan bahwa pertumbuhan ekonomi belum inklusif atau belum merata.

Berdasarkan form 6 terkait Evaluasi Pencapaian RPJMD Periode Tahun 2005-2025 Provinsi Kalimantan Barat diketahui bahwa Provinsi Kalimantan Barat memperoleh kriteria penilaian peringkat kinerja tinggi (87,14 %) sesuai dengan tabel berikut :

Tabel 2. 144 Evaluasi Pencapaian RPJMD Periode 2005-2025 Provinsi Kalimantan Barat

No	Periodesasi RPJMD	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	Kriteria Realisasi Kinerja
1	2006-2008	90,78	Tinggi
2	2008-2013	84,64	Tinggi
3	2013-2018	84,47	Tinggi
4	2018-2023	88,68	Tinggi
Rata-Rata Capaian Kinerja RPJPD		87,14	Tinggi

2.6. Tren Demografi dan Kebutuhan Sarana Prasarana Pelayanan Publik

2.6.1. Analisis proyeksi kependudukan per lima tahun

2.6.1.1. Jumlah Total Penduduk 2025-2045

Dalam Perencanaan Pembangunan, manusia menjadi salah satu aspek yang diperhatikan, diakrenakan pembangunan bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat. Perencanaan pembangunan perlu memperhatikan

pertumbuhan penduduk pada tahun perencanaan. Pada tahun 2045 penduduk di Kalimantan Barat diproyeksikan mencapai 6.822,76 Ribu Jiwa. Lebih jelas dapat dilihat pada tabel 2.145

Tabel 2. 145 Proyeksi Pertumbuhan Penduduk Tahun 2025-2045

No	Kabupaten/ Kota	Jumlah Penduduk sesnsus 2020 (ribu jiwa)	Jumlah Penduduk tahun 2022 (ribu jiwa)	Tahun (ribu jiwa)				
				2025	2030	2035	2040	2045
1	Sambas	626,93	640.578	661,45	691,74	718,45	742,23	764
2	Mempawah	300,76	308.640	320,63	339,03	355,16	368,75	380
3	Sanggau	483,50	490.607	516,71	545,23	568,88	587,83	602
4	Ketapang	569,24	575.579	607,05	639,61	666,29	686,91	702
5	Sintang	420,17	429.357	449,21	474,68	496,99	516,24	533
6	Kapuas Hulu	251,92	263.090	269,05	284,27	297,57	308,93	318
7	Bengkayang	285,42	290.464	307,82	328,77	347,81	364,77	380
8	Landak	396,53	405.156	424,47	449,52	471,18	489,87	506
9	Sekadau	210,92	216.260	225,22	237,75	248,56	257,83	265
10	Melawi	227,74	209.673	246,92	263,82	278,21	290,06	299
11	Kayong Utara	126,04	128.415	137,29	147,98	157,84	166,84	175
12	Kubu Raya	607,02	611.223	660,37	710,67	756,92	799,13	837
13	Kota Pontianak	658,06	673.129	686,02	708,27	724,73	736,10	743
14	Kota Singkawang	234,16	239.875	253,81	271,99	288,79	304,67	320
Kalimantan Barat		5.398,41	5.482.046	5.766,02	6.093,33	6.377,38	6.620,16	6.822,76

Sumber: Proyeksi Penduduk Indonesia 2020-2045

2.6.1.2. Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur 2025-2045

Komposisi penduduk, terdiri dari usia. Usia penduduk perlu diketahui untuk melihat jumlah penduduk produktif, dan juga jumlah penduduk ketergantungan. Jika dilihat dari komposisi penduduk berdasarkan usia di Kalimantan Barat, jumlah penduduk usia produktif lebih besar daripada non produktif. Selain itu berdasarkan

analisis demografi Kalimantan Barat Bonus demografi terjadi pada tahapan dimana kondisi struktur umur penduduk menjadikan ketergantungan penduduk/Dependency Ratio (DR) berada pada tingkat yang rendah ($DR < 50$). Angka DR merupakan perbandingan antara jumlah penduduk usia produktif (15-64 tahun)

dengan non produktif (usia <15 dan usia >64 tahun). Angka DR menjelaskan seberapa banyak orang usia non produktif yang hidupnya harus ditanggung oleh kelompok usia produktif. Fenomena Bonus Demografi yang dihadapi di Kalbar akan terjadi pada periode 2019-2045 dan berada pada tahun puncak 2020 – 2025. Kalbar diperkirakan akan mengalami puncak bonus demografi (rasio ketergantungan dibawah 50

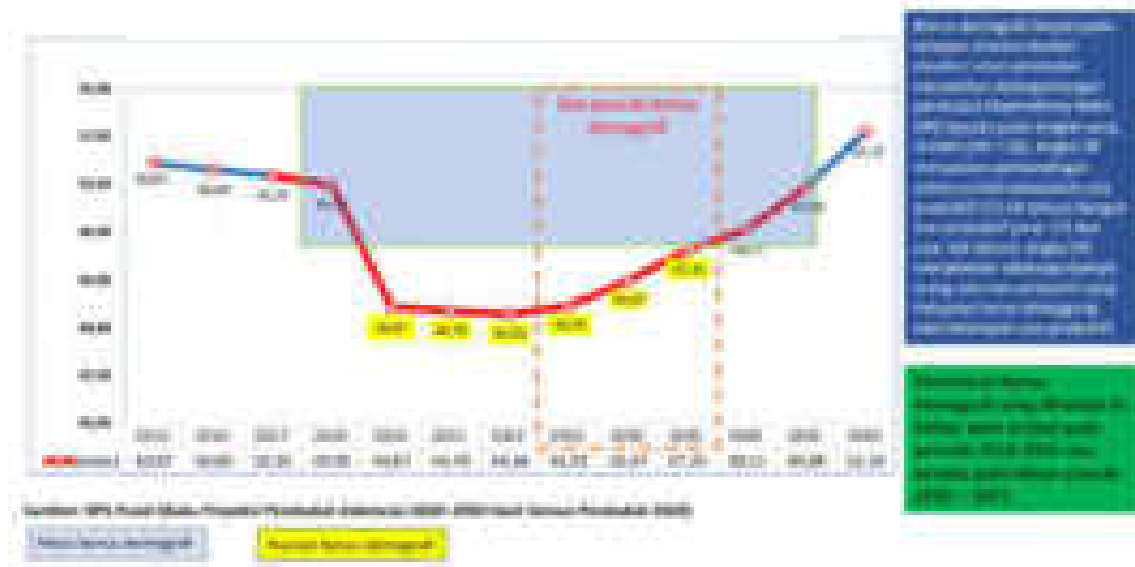
persen) hingga tahun 2037. Sasaran pertumbuhan ekonomi jangka panjang diperkirakan akan melambat seiring dengan selesainya momentum puncak bonus demografi sehingga agenda transformasi ekonomi harus berjalan secepat mungkin. Hal ini perlu menjadi perhatian, dikarenakan jika peluang bonus demografi tidak dimanfaatkan, Kalimantan Barat dapat terjebak dalam *middle trap income*.

Tabel 2. 146 Proyeksi Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur 2025-2045 (Ribuan Jiwa)

Umur	2025	2030	2035	2040	2045
(1)	(7)	(12)	(17)	(22)	(27)
0–4	502,83	488,41	474,82	464,95	457,84
5–9	469,14	501,29	487,02	476,60	469,08
10–14	462,51	468,48	500,62	523,83	541,60
15–19	471,31	461,33	467,34	473,49	478,07
20–24	472,37	469,59	459,73	452,09	446,56
25–29	479,19	471,38	468,71	467,25	466,19
30–34	468,25	478,02	470,33	463,54	458,60
35–39	454,76	466,16	476,02	483,26	488,66
40–44	423,21	451,29	462,76	470,34	476,00
45–49	386,76	417,60	445,54	467,15	483,73
50–54	335,01	378,53	409,10	432,46	450,51
55–59	272,73	323,27	365,81	399,83	426,92
60–64	215,12	257,28	305,73	347,62	382,15
65–69	156,43	195,75	235,14	269,28	297,60
70–74	104,99	133,61	168,48	200,40	227,81
75+	91,43	131,34	180,24	228,06	271,42
Total	5.766,03	6.093,33	6.377,38	6.620,17	6.822,74

Sumber: Proyeksi Penduduk Indonesia 2020-2050

Gambar 2. 25 Angka Ketergantungan Kalimantan Barat 2015-2022 dan Proyeksi 2025-2045



Sumber: Proyeksi Penduduk Indonesia 2020-2050

2.6.2. Proyeksi Kebutuhan Sarana dan Prasarana

Pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana dalam pembangunan daerah memiliki fungsi untuk meningkatkan aksesibilitas dan konektivitas antarwilayah yang akan meningkatkan kesejahteraan dan kesempatan masyarakat, dengan memenuhi kebutuhan pelayanan publik; dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan yang berkelanjutan. Pembangunan sarana prasarana dilakukan diupayakan sejajar dengan dinamika pertumbuhan penduduk dan dinamika perekonomian daerah yang diproyeksikan. Selain itu ada beberapa target SDG's yang memerlukan pembangunan sarana dan prasarana wilayah untuk pencapaiannya di tingkat provinsi dan kabupaten/kota adalah sebagai berikut:

- Target 6.1: Pada tahun 2030, mencapai akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua. Indikatornya adalah proporsi populasi yang menggunakan layanan air minum yang dikelola dengan aman.
- Target 6.2: Pada tahun 2030, mencapai akses ke sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata untuk semua dan mengakhiri praktik buang air besar sembarangan, dengan memperhatikan kebutuhan perempuan dan perempuan dan anak-anak, dan mereka yang berada dalam situasi rentan. Indikatornya adalah proporsi populasi yang menggunakan layanan sanitasi yang dikelola dengan aman, termasuk fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air.

- Target 7.1: Pada tahun 2030, memastikan akses universal terhadap layanan energi yang terjangkau, andal, dan modern bagi semua. Indikatornya adalah proporsi populasi dengan akses ke listrik dan proporsi populasi dengan akses ke bahan bakar bersih untuk memasak.
- Target 9.1: Mengembangkan infrastruktur yang andal, berkelanjutan, tangguh, dan berkualitas, termasuk infrastruktur regional dan lintas batas, untuk mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan manusia, dengan fokus pada akses yang terjangkau dan merata untuk semua. Indikatornya adalah proporsi populasi yang dilayani oleh jalan yang dapat dilalui sepanjang tahun, proporsi angkutan barang yang menggunakan kereta api atau jalan raya, dan proporsi angkutan penumpang yang menggunakan kereta api atau jalan raya.
- Target 11.1: Pada tahun 2030, memastikan akses bagi semua terhadap perumahan yang memadai, aman, dan terjangkau serta layanan dasar dan meningkatkan permukiman kumuh. Indikatornya adalah proporsi populasi perkotaan yang tinggal di permukiman kumuh, permukiman tidak resmi, atau permukiman yang tidak memadai.
- Target 11.2: Pada tahun 2030, memberikan akses ke sistem transportasi yang aman, terjangkau, dapat diakses, dan berkelanjutan bagi semua, meningkatkan keselamatan jalan, terutama dengan memperluas transportasi umum, dengan perhatian khusus

pada kebutuhan orang-orang yang berada dalam situasi rentan, perempuan, anak-anak, orang-orang penyandang disabilitas, dan orang-orang lanjut usia. Indikatornya adalah proporsi populasi yang memiliki akses mudah ke transportasi umum, dengan perhatian khusus pada orang-orang yang berada dalam situasi rentan, perempuan, anak-anak, orang-orang penyandang disabilitas, dan orang-orang lanjut usia.

Proyeksi kebutuhan sarana dan prasarana di Provinsi Kalimantan Barat hingga tahun 2045 dilandasi standar pelayanan sarana dan prasarana serta target-target SDG'S 2030 dan skenario ekonomi yang disusun dalam rangka mencapai Visi Indonesia Emas 2045 dan RPJPN 2025-2045. Proyeksi kebutuhan sarana dan prasarana dapat dilakukan juga dengan diasumsikan proyeksi pertumbuhan penduduk (%) merupakan batas bawah atau batas alamiah pertumbuhan ekonomi dan proyeksi pertumbuhan ekonomi (%) merupakan batas atas kebutuhan pembangunan sarana prasarana, maka kebutuhan pembangunan sarana prasarana merupakan bagian dari indikator makro pertumbuhan ekonomi. Dari struktur perekonomian dari sisi pendekatan lapangan usaha, diinterpretasikan bahwa yang berkaitan dengan pembangunan sarana prasarana dilihat dari indikator makro adalah lapangan usaha:

- Pengadaan Listrik dan Gas
- Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang
- Informasi dan Komunikasi

- Real Estate
- Konstruksi

irigasi, Air bersih dan sanitasi adalah sebagai berikut:

Berdasarkan hal tersebut, maka proyeksi kebutuhan Sarana dan Prasarana Listrik, Jalan,

Gambar 2. 26 Proyeksi Kebutuhan Sarana dan Prasarana Listrik, Jalan, Irigasi, Air Bersih dan Sanitasi

N O	Indikator Kinerja	2018	2019	2020	2021	2022	2025	2030	2035	2040	2045	Keterangan
1	Rasio Elektrifikasi	83,00	98,68	92,00	93,00	99,58	100	100	100	100	100	Target SDG's 2030
2	Persentase Panjang Jalan Provinsi Kondisi Mantap	49,71	56,81	60,05	66,94	72,28	95	100	100	100	100	
3	Persentase irigasi Provinsi dalam kondisi baik	46,76	53,79	53,68	55,84	56,90	60	75	100	100	100	Sd tahun 2035 Lahan Sawah Beririgasi dalam Kondisi Baik Sd Tahun 2045 terdapat peningkatan Lahan Sawah Beririgasi sebanyakha
4	Persentase rumah tangga berakses air minum	55,20	66,62	65,32	68,79	68,79	70	100	100	100	100	Target SDG's 2030 : 100 %

5	Persentase rumah tangga berakses sanitasi	48,38	61,2 3	63,7 9	50, 42	50, 00	65	100	100	100	100	Target SDG's 2030 : 100 %
6	Persentase Penduduk yang terlayani sistem air limbah yang memadai	47,52	61,2 3	61,8 2	50, 42	62, 23	70	100	100	100	100	Target SDG's 2030 : 100 %

Sumber : Bappeda Provinsi Kalimantan Barat, Dinas PUPR Kalbar dan Target SDG's 2030

2.6.2.1. Listrik dan Gas

Rasio Elektrifikasi Kalbar diharapkan sudah 100% pada tahun 2025 atau dimulainya tahapan I pembangunan 2025-2045. Selanjutnya untuk mendorong laju pertumbuhan ekonomi Kalimantan Barat sehingga dapat keluar dari *middle income trap* maka di perlukan peningkatan konsumsi listrik perkapita rumah tangga dan penyediaan listrik bagi aktivitas ekonomi terutama dalam melaksanakan hilirisasi Sumber Daya Alam Kalimantan Barat terutama sektor unggulan Kalimantan Barat seperti Pertambangan dan perkebunan.

Diharapkan pada tahun 2045 konsumsi perkapita pertahun Rumah Tangga di Kalimantan Barat telah mencapai 2500 kwh (setara dengan konsumsi perkapita per tahun rumah tangga di Singapura pada tahun 2019) dan diharapkan peningkatan konsumsi listrik rumah tangga mendorong produktivitas rumah tangga Kalimantan Barat terutama dalam

pengembangan Usaha Mikro dan Kecil. Pada tahap I Pembangunan Jangka Panjang Kalbar 2025-2045, Kalimantan Barat peningkatan penyediaan listrik diutamakan untuk hilirisasi CPO dimana pada tahun 2022 total CPO Kalbar yang diolah didalam daerah sebesar 10% dari produksi total CPO Kalbar pada tahun tersebut. Diharapkan pada tahun 2045, diatas 70 persen total produksi CPO Kalimantan Barat telah dapat diolah di Kalimantan Barat. Sedangkan untuk hilirisasi bauksit menjadi alumina dan alumina menjadi alumunium ingot diperlukan pasokan 0,15 GWh per 1 juta ton alumina dan 3640 GWh per 260.000 ton alumunium (setara kapasitas produksi alumunium pertahun PT. Inalum). Untuk itu pada tahapan kedua pembangunan daerah Kalbar 2030 – 2034, Kalimantan Barat telah mampu menyediakan pasokan listrik dari energi baru dan terbarukan (EBT) sebesar 3640 GWh untuk hilirisasi alumina Kalbar menjadi

aluminium. Kebutuhan listrik yang perlu diantisipasi adalah kebutuhan untuk operasional dan pengembangan pelabuhan Kijing beserta peningkatan aktivitas ekonomi disekitarnya dan pusat-pusat pertumbuhan lainnya seperti Kawasan Industri, pengembangan perkotaan antara lain Kota Pontianak dan sekitarnya, Kota Singkawang, dan Kota Sintang.

Selain penyediaan listrik untuk energi rumah tangga, usaha dan industri, diharapkan Kalimantan Barat juga mendapat jaringan gas dimana pada saat ini masih menggunakan gas LPG dalam tabung baik komersial maupun subsidi. Jaringan pipa gas Kalimantan Barat mengacu pada Rencana Tata Ruang Provinsi Kalimantan Barat.

Rencana Pengembangan Jaringan Infrastruktur Ketenagalistrikan berdasarkan RTRW Kalimantan Barat adalah sebagai berikut:

- 1) Gardu Induk (GI) berupa GI Kendawangan, GI Tayan, GI Ngabang, GI Sintang, GI Ketapang, GI Sukadana, GI Cendana (Jeruju), GITET Bengkayang, GI PLTU 1 Kalbar, GI PLTU 2 Kalbar, GI PLTU 3 Kalbar, GI Kota Baru, GI Sei Raya, GI Siantan, GI Singkawang, GI Parit Baru, GI Mempawah (Senggiring), GI Sambas, GI Sandai, GI Sekadau, GI Sanggau, GI Kota Baru 2, GI Nanga Pinoh, GI Ambawang, GI Entikong, GI Badau, GI Cemara, GI Rasau, GI Sukamara, GI Putussibau dan GI Jongkong
- 2) Pembangkit Listrik antara lain : PLTN Semesak/ Pantai Gosong 350 MW, PLTU Kalbar 1 2x100MW IPP, PLTU 1 Parit Baru (FTP1) 2x50MW, PLTU 2 Pantai Kura-

kura(FTP1) 2x27,5MW, PLTU 3 Parit Baru (FTP2) 2x50MW, PLTU Ketapang 2x10MW, PLTU TIMIKA Site PLTU Ketapang 2x10MW, PLTU IPP Ketapang 2x6MW, PLTU Sanggau, PLTU Sintang 3x7MW, PLTG/MG Pontianak Peaker 100MW, PLTG MPP Kalbar 100 MW, PLTG Siantan, PLTA-Sei-Pinoh1-Nanga Kelawai, PLTM Mahap, PLTM / PLTA Kalis, PLTM Jitan, PLTMH Batu Menang, PLTD dan PLTS

- 3) Jaringan Transmisi Tenaga Listrik berupa jaringan saluran udara tegangan tinggi (SUTT) menghubungkan: Ambawang-TX, Bengkayang – Ngabang, Bengkayang – Jagoibabang, Kendawangan – Sukamara, Ketapang – Kendawangan, Ketapang – Sukadana, Mempawah – Singkawang, Nanga Pinoh - Kota Baru, Pangkalan Bun – Sukamara, Parit Baru - Kota Baru, Parit Baru - Kota Baru, Parit Baru – Mempawah, PLTU 2 - PLTU 3, PLTU 2 - Singkawang – Mempawah, PLTU IPP Kalbar 1 – Singkawang, Sandai - TX – Sukadana, Sanggau – Sekadau, Sekadau – Sintang, Sekayam – Sanggau, Siantan - Sei Raya, Siantan – Tayan, Singkawang – Bengkayang, Singkawang – Sambas, Sintang – Badau, Sintang - Nanga Pinoh, Sintang – Putussibau, Tayan – Ngabang, Tayan – Sandai dan Tayan – Sanggau

Kebutuhan daya listrik di Kalimantan Barat pada tahun 2025 di proyeksikan mencapai 2.031.320.796 VA/watt. Kebutuhan Daya listrik terbesar berada di Kota Pontianak yaitu mencapai 241.679.129 VA/watt diikuti

Kabupaten Sambas yaitu sebesar 233.023.323 VA/watt. Kebutuhan daya listrik pada tahun 2045 mencapai 2.403.603.031 VA/watt. Untuk lebih jelasnya mengenai kebutuhan daya listrik di Kalimantan Barat dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2. 147 Proyeksi Kebutuhan Daya Listrik di Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2025-2045

No	Kabupaten/ Kota	Kebutuhan Daya Listrik (VA/Watt)				
		2025	2030	2035	2040	2045
1	Sambas	233.023.323	243.694.238	253.103.948	261.480.598	268.999.810
2	Mempawah	112.955.277	119.437.444	125.119.908	129.907.970	133.814.369
3	Sanggau	182.032.627	192.079.985	200.411.683	207.088.864	212.142.207
4	Ketapang	213.858.656	225.329.273	234.728.415	241.992.214	247.265.723
5	Sintang	158.252.940	167.225.808	175.085.435	181.866.938	187.643.435
6	Kapuas Hulu	94.784.073	100.145.952	104.831.431	108.832.090	112.136.283
7	Bengkayang	108.442.421	115.822.931	122.530.565	128.505.718	133.721.737
8	Landak	149.537.244	158.362.150	165.992.788	172.576.211	178.103.911
9	Sekadau	79.343.129	83.757.344	87.565.617	90.831.317	93.522.667
10	Melawi	86.987.858	92.941.588	98.011.065	102.186.383	105.407.058
11	Kayong Utara	48.366.123	52.132.121	55.605.717	58.776.297	61.621.776
12	Kubu Raya	232.642.848	250.363.119	266.656.608	281.527.923	294.784.582
13	Kota Pontianak	241.679.129	249.517.619	255.316.340	259.321.569	261.801.430
14	Kota Singkawang	89.415.148	95.819.810	101.738.310	107.334.167	112.638.043

No	Kabupaten/ Kota	Kebutuhan Daya Listrik (VA/Watt)				
		2025	2030	2035	2040	2045
	Kalimantan Barat	2.031.320.7 96	2.146.629.3 81	2.246.697.8 29	2.332.228.2 59	2.403.603.0 31

Sumber: Analisis Tim Pokja Saprass Bappeda Prov. Kalbar, 2023

2.6.2.2. Jalan dan Peningkatan Aksesibilitas dan Konektivitas Antar Wilayah dan Antara Pusat Pertumbuhan

Peningkatan aksesibilitas dan konektivitas antar wilayah baik dalam skala daerah provinsi/kabupaten dan kota, nasional maupun regional (dengan wilayah Negara tetangga) akan memudahkan perpindahan orang dan barang, serta pertukaran informasi dan ide. Peningkatan aksesibilitas dimaksudkan adalah upaya-upaya peningkatan ukuran kemudahan atau kenyamanan untuk mencapai atau menggunakan suatu lokasi, fasilitas, atau layanan. Aksesibilitas dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti waktu tempuh, biaya, usaha, dan ketersediaan prasarana dan sarana transportasi. Konektivitas dapat meningkatkan aksesibilitas suatu wilayah, karena memudahkan perpindahan orang dan barang, serta pertukaran informasi dan ide. Konektivitas juga dapat mempengaruhi pembangunan, integrasi, dan kerjasama antarwilayah. Secara singkat, aksesibilitas menekankan pada kemudahan mencapai atau menggunakan sesuatu, sedangkan konektivitas menekankan pada hubungan atau keterkaitan antara sesuatu.

Pusat pertumbuhan ekonomi adalah wilayah yang memiliki pertumbuhan ekonomi yang sangat pesat dan berpengaruh terhadap wilayah

sekitarnya. Pusat pertumbuhan ekonomi biasanya memiliki industri, infrastruktur, dan fasilitas yang lengkap dan modern. Pusat pertumbuhan ekonomi dapat mendorong pembangunan dan kesejahteraan di wilayah lain. Beberapa teori yang mendukung konsep pusat pertumbuhan ekonomi dan koridor ekonomi di suatu wilayah adalah:

- Teori pusat pertumbuhan Perroux, yang menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak terjadi secara merata di semua wilayah, tetapi hanya di wilayah tertentu yang disebut sebagai pusat pertumbuhan atau kutub pertumbuhan.
- Teori pusat pertumbuhan Christaller, yang menyatakan bahwa pusat pertumbuhan adalah wilayah yang memiliki fungsi pelayanan bagi wilayah sekitarnya. Pusat pertumbuhan dapat dibedakan menjadi beberapa tingkatan berdasarkan jenis dan jumlah pelayanan yang ditawarkan.
- Teori pusat pertumbuhan Hirschman, yang menyatakan bahwa pusat pertumbuhan adalah wilayah yang memiliki sektor unggulan yang dapat menimbulkan efek pengganda dan penyebaran terhadap sektor-

sektor lainnya. Pusat pertumbuhan dapat mendorong pertumbuhan daerah belakangnya melalui hubungan antarwilayah. Koridor ekonomi adalah kawasan yang menghubungkan dua atau lebih pusat pertumbuhan ekonomi. Koridor ekonomi dapat berupa jalur transportasi, komunikasi, energi, atau perdagangan yang memfasilitasi arus barang, jasa, modal, dan orang antara pusat-pusat pertumbuhan ekonomi. Koridor ekonomi dapat meningkatkan integrasi, kerjasama, dan daya saing di suatu wilayah.

Sarana dan prasarana wilayah memiliki peranan yang sangat penting dalam meningkatkan konektivitas dan aksesibilitas antar pusat pertumbuhan ekonomi sehingga membentuk koridor ekonomi. Pembangunan sarana dan prasarana wilayah akan mendorong integrasi dua atau lebih pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dengan membentuk koridor ekonomi dalam suatu wilayah yang menghubungkan antar pusat pertumbuhan ekonomi sehingga memudahkan pergerakan barang, jasa, modal, dan orang antara pusat-pusat pertumbuhan ekonomi. Hal tersebut akan meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan daya saing wilayah wilayah yang terhubung dengan pusat-pusat pertumbuhan menjadi koridor ekonomi. Pembangunan sarana dan prasarana wilayah juga akan mendorong integrasi, kerjasama, dan keseimbangan pembangunan antara wilayah perkotaan dan pedesaan, serta antara wilayah pesisir, pedalaman dan perbatasan serta antara wilayah utara dan selatan Kalimantan Barat.

Selain itu Pembangunan sarana dan prasarana wilayah akan membuka peluang investasi, pariwisata, industri, dan pertanian di wilayah-wilayah yang sebelumnya terisolasi atau kurang berkembang serta menyediakan pelayanan publik yang merata dan berkualitas bagi masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, keamanan, dan keadilan.

1) Konektivitas dan Aksesibilitas Antar Kota dan Wilayah Serta Pusat Pertumbuhan di Provinsi Kalimantan Barat

Pembangunan infrastruktur memegang peranan penting dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Di Kalimantan Barat, fokus utamanya adalah kebutuhan infrastruktur yang memadai. Meskipun upaya nyata telah dilakukan untuk memperbaiki jaringan jalan dan transportasi, masih banyak wilayah yang sulit dijangkau, terutama wilayah pedalaman yang kaya akan sumber daya alam. Investasi dalam pengembangan pelabuhan, jalan, jembatan dan jaringan transportasi sungai sangatlah penting. Hal ini akan meningkatkan aksesibilitas, memperlancar distribusi produk pertanian, perkebunan, dan pertambangan, serta memperkuat konektivitas antar wilayah. Proyek dukungan kebutuhan infrastruktur jalan dan jembatan terutama pada koridor-koridor ekonomi yang telah terbentuk secara alamiah di Kalimantan Barat. Dukungan kebutuhan infrastruktur jalan dan jembatan hingga tahun 2045 adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 148 Dukungan Infrastruktur Transportasi Jalan Untuk Pengembangan Pusat-Pusat Pertumbuhan Ekonomi dan Pusat-Pusat Produksi Bahan Baku Hingga Tahun 2045

No.	Nama Ruas Jalan	Jarak Km	Usulan Rencana		Status Eksisting
			Orde	Kelas Jalan	
Koridor Utara					
1.	Temajok - Merbau	49,97	III	II	Jl. Nas
2.	Tanah Hitam - Merbau	25,60	III	II	Jl. Prov
3.	Simpang Bantan II – Tanah Hitam	14,91	III	II	Jl. Prov
4.	Simpang Bantan I – Simpang Bantan II (Sange Mange)	10,02	III	II	Jl. Prov
5.	Tanjung Harapan - Sambas	12,32	II	II	Jl. Nas
6.	By Pass Sambas	6,11	II	II	Jl. Nas
7.	Sambas - Tebas	19,90	II	II	Jl. Nas
8.	Tebas - Singkawang	49,72	I	II	Jl. Nas
9.	Bts Kota Singkawang – Sei Duri	49,09	I	II	Jl. Nas
10.	Sei Duri – Bts Kota Mempawah	20,87	I	II	Jl. Nas
11.	Bts Kota Mempawah – Sei Pinyuh	15,77	I	I	Jl. Nas
12.	Sei Pinyuh – Bts Kota Pontianak	42,61	I	I	Jl. Nas
13.	Jln. Khatulistiwa (Pontianak)	6,82	I	I	Jl. Nas

No.	Nama Ruas Jalan	Jarak Km	Usulan Rencana		Status Eksisting
			Orde	Kelas Jalan	
14.	Jln. Budi Utomo		I	I	Jl. Kota Ptk
15.	Jln. 28 Oktober		I	I	Jl. Kota Ptk
16.	Jln. Sultan Hamid II (Jln. Perintis Kemerdekaan Pontianak)	3,44	I	I	Jl. Nas
17.	Jln. TOL Pontianak - Singkawang	141,36	I	I	Korporasi
Koridor Tengah					
1.	Jln. Major Aliyang (Pontianak)	6,93	I	I	Jl. Nas
2.	Bts. Kota Pontianak – Sp. Ampar /Tayan	94,43	I	I	Jl. Nas
3.	Sosok _ Sp. Ampar/Tayan	41,26	I	I	Jl. Nas
4.	Sidas - Tanjung	70,27	II	I	Jl. Nas
5.	Tanjung – Bts. Kota Sanggau	37,36	II	II	Jl. Nas
6.	Jln. Sudirman (Sanggau)	4,58	II	II	Jl. Nas
7.	Jln. A. Yani (Sanggau)	1,43	II	II	Jl. Nas

No.	Nama Ruas Jalan	Jarak Km	Usulan Rencana		Status Eksisting
			Orde	Kelas Jalan	
8.	Jln. R.E. Martadinata (Sanggau)	2,20	II	II	Jl. Nas
9.	Bts. Kota Sanggau - Sekadau	41,78	II	II	Jl. Nas
10.	Sekadau - Tebelian	69,01	II	II	Jl. Nas
11.	Tebelian – Bts. Kota Sintang	69,01	II	II	Jl. Nas
12.	Jln. Lintas Melawi (Sintang)	1,77	III	II	Jl. Nas
13.	Jln. Oevaang Oeray (Sintang)	4,54	III	II	Jl. Nas
14.	Bts. Kota Sintang – Sp. Nangasilat (Bongkong)	54,96	III	II	Jl. Nas
15.	Sp. Nangasilat – Sp. Sejiram	43,80	III	II	Jl. Nas
16.	Sp. Sejiram – Nanga Tepuai	42,63	III	II	Jl. Nas
17.	Nanga Tepuai – Nanga Semangut	58,22	III	II	Jl. Nas
18.	Nanga Semangut – Bts Kota Putusibau	57,23	III	II	Jl. Nas
19.	Tebelian – Nanga Pinoh	57,35	III	II	Jl. Nas
20.	Nanga Pinoh – Ela Hilir	51,70	III	IIIC	Jl. Nas
21.	Ela Hilir – Bts Prov. Kalteng	46,00	III	IIIC	Jl. Nas
22.	Semuntai - Kedukul	60,00	III	IIIC	Non Status
23.	Sei Pinyuh - Sebadu	44,61	III	IIIA	Jl. Nas

No.	Nama Ruas Jalan	Jarak Km	Usulan Rencana		Status Eksisting
			Orde	Kelas Jalan	
24.	Sebadu - Sidas	57,82	III	IIIA	Jl. Nas
25.	Sekadau - Rawak	20,15	III	IIIB	Jl. Prov
26.	Rawak – Nanga Taman	17,50	III	IIIB	Jl. Prov
28.	Nanga Taman – Nanga Mahap	21,15	III	IIIB	Jl. Prov
Koridor Selatan					
1.	Simpang Ampar/Tayan – Awal Jembatan Tayan	6,95	II	II	Jl. Nas
2.	Awal Jembatan Tayan – Sp. Piasak	5,38	II	II	Jl. Nas
3.	Sp. Piasak - Teraju	29,50	II	II	Jl. Nas
4.	Teraju – Bts. Balai Berkuak	47,90	II	II	Jl. Nas
5.	Bts. Balai Berkuak – Aur Kuning	67,53	II	II	Jl. Nas
6.	Aur Kuning - Sandai	40,40	II	II	Jl. Nas
7.	Sandai – Nanga Tayap	41,20	II	II	Jl. Nas
8.	Nanga Tayap – Batas Prov Kalteng	60,95	II	II	Jl. Nas
9.	Nanga Tayap – Sungai Kelik	21,69	III	IIIA	Jl. Nas
10.	Sungai Kelik - Siduk	61,58	III	IIIA	Jl. Nas
11.	Siduk - Ketapang	60,69	III	IIIA	Jl. Nas

No.	Nama Ruas Jalan	Jarak Km	Usulan Rencana		Status Eksisting
			Orde	Kelas Jalan	
12.	Nanga Tayap (Simpang Betenung) – Tumbang Titi	36,50	III	IIIA	Jl. Prov
13.	Tumbang Titi - Tanjung	31,05	III	IIIA	Jl. Prov
14.	Tanjung - Marau	21,30	III	IIIA	Jl. Prov
15.	Marau – Air Upas	35,77	III	IIIA	Jl. Prov
16.	Air Upas – Manis Mata	36,60	III	IIIA	Jl. Prov
17.	Batas Kota Ketapang - Pesaguan	23,16	I-II	II	Jl. Prov
18.	Pesaguan - Kendawangan	65,00	I-II	II	Jl. Prov
19.	Siduk - Sukadana	21,70	III	IIIA	Jl. Prov
20.	Sukadana – Tl. Batang	49,50	III	IIIA	Jl. Prov
21.	Tl. Batang – Seponti Jaya	28,47	III	IIIC	Jl. Kab
22.	Tl. Melanau – Perawas – Simpang Dua	75,99	III	IIIB	Non Status
Koridor dan Akses Perbatasan					
1.	Sp. Temajuk – Sp. Tanjung	61,88	III	IIIB	Jl. Nas
2.	Aruk – Sp. Take	53,61	III	IIIB	Jl. Nas

No.	Nama Ruas Jalan	Jarak Km	Usulan Rencana		Status Eksisting
			Orde	Kelas Jalan	
3.	Sp. Take – Sp. Sontas	106,02	III	IIIB	Jl. Nas
4.	Sp. Balai Karangan - Rasau	98,32	III	IIIB	Jl. Nas
5.	Rasau – Sp. Nanga Kantuk	104,59	III	IIIB	Jl. Nas
6.	Rasau – Jasa – Bts, Negara	25,84	III	IIIB	Jl. Nas
7.	Bts. Serawak - Entikong	2,62	II	II	Jl. Nas
8.	Entikong – Sp. Balai Karangan	19,17	II	II	Jl. Nas
9.	Sp. Balai Karangan - Kembayan	36,30	II	II	Jl. Nas
10.	Kembayan - Tanjung	36,27	II	II	Jl. Nas
11.	Bts. Serawak – Aruk – Sp. Tanjung	11,58	III	II	Jl. Nas
12.	Sp. Tanjung - Galing	40,89	III	II	Jl. Nas
13.	Galing – Tanjung Harapan	20,00	III	II	Jl. Nas
14.	Tanjung Kerja - Putusibau	37,54	III	IIIA	Jl. Nas
15.	Mataso (Benua Martinus) – Tanjung Kerja	55,50	III	IIIA	Jl. Nas
16.	Lanjak – Mataso (Benua Martinus)	26,05	III	IIIA	Jl. Nas
17.	Nanga Badau - Lanjak	45,50	III	IIIA	Jl. Nas

No.	Nama Ruas Jalan	Jarak Km	Usulan Rencana		Status Eksisting
			Orde	Kelas Jalan	
18.	Bts. Sarawak – Nanga Badau	3,72	III	IIIA	Jl. Nas
19.	Anjungan - Karangan	38,46	III	II	Jl. Nas
20.	Karangan – Simpang Tiga	32,48	III	II	Jl. Nas
21.	Simpang Tiga - Bengkayang	16,61	III	II	Jl. Nas
22.	Bengkayang – Sanggau Ledo	59,06	III	II	Jl. Nas
23.	Sanggau Ledo - Seluas	30,80	III	II	Jl. Nas
24.	Seluas – Batas Serawak	14,43	III	II	Jl. Nas
25.	Batas Kota Singkawang - Bengkayang	52,23	III	II	Jl. Prov
25.	Silat Hilir – Sungai Antu – Senaning (atau langsung ke Badau via perkebunan KS?) Nama Lain: Sp. Nanga Kantuk – pelabuhan penyeberangan Perigi Kiri	66,59	III	IIIC	Non Status

Catatan:

- Sebagian panjang ruas jalan yang sudah konstruksi, panjang ruas sesungguhnya blm ada data (Mhn bantuan analisis spatial kira2 panjang jln riil; (khusus Silat Hilir – Senaning mhn juga penentuan simpul akhir jalan);
- Orde Jalan menunjukkan kepentingan atas dukungan infrastruktur terhadap perkiraan besaran bangkitan ekonomi;
- Kelas jalan dimaksud merupakan standar teknis sesuai Permen PUPR No. 05/PRT/M/2018 tentang Penetapan Kelas Jalan Berdasarkan Fungsi dan Intensitas Lalu Lintas serta Daya Dukung Menerima Muatan Sumbu Terberat dan Dimensi Kendaraan Bermotor;
- Diperlukan analisis spesifik kemudian koreksi terhadap masing-masing ruas jalan terkait kelayakan Trase dan Geometri Jalan untuk pergerakan kendaraan angkut untuk konfigurasi sumbu roda untuk Truk Rigid dan Kereta Penarik (Truk Gandeng);
- Penamaan ruas Jalan Nasional sesuai Kpts Menteri PUPR No.430/KPTS/M/2022 tentang Penetapan Ruas Jalan Dalam Jaringan Jalan Arteri Primer (JAP) dan Jalan Kolektor Primer-1 (JKP-1);
- Penamaan ruas Jalan Provinsis sesuai Kpts Gubernur Kalbar No. 841/DPUPR/2022 tentang Ruas-Ruas Jalan Menurut Status dan Fungsinya Sebagai Jalan Provinsi di Kalimantan Barat.

Tabel 2. 149 Jalan Kolektor Primer di Provinsi Kalimantan Barat

A. Jalan Kolektor Primer yang merupakan Jalan Nasional

No.	Nama Ruas	Keterangan
1.	By Pass Sambas	
2.	Tanjung Harapan – Sambas	
3.	Galing – Tanjung Harapan	
4.	Sp. Tanjung – Galing	a
5.	Sp. Temajuk – Sp. Tanjung	a, b
6.	Temajuk – Merbau	a
7.	Bts. Serawak – Aruk – Sp. Tanjung	a
8.	Aruk – Sp. Take	a
9.	Sp. Take – Sp. Sontas	a, b
10.	Sp. Balai Karangan – Rasau	a, b
11.	Rasau – Jasa – Bts. Negara	a, b
12.	Rasau – Sp. Nanga Kantuk	a, b
13.	Anjungan – Karangan	
14.	Karangan – Simpang Tiga	
15.	Simpang Tiga – Bengkayang	
16.	Bengkayang – Sanggau Ledo	

No.	Nama Ruas	Keterangan
17.	Sanggau Ledo – Seluas	
18.	Seluas – Batas Serawak	a
19.	Bts. Kota Sanggau – Sekadau	
20.	Sekadau – Tebelian	
21.	Tebelian – Nanga Pinoh	
22.	Nanga Pinoh – Ela Hilir yang juga dikenal dengan nama ruas Nanga Pinoh – Ella Hilir	
23.	Ela Hilir – Bts. Prov. Kalteng yang juga dikenal dengan nama ruas Ella Hilir - Bts. Prov. Kalteng	b
24.	Tebelian – Bts. Kota Sintang	
25.	Jln. Lintas Melawi (Sintang)	
26.	Jln. Oevaang Oeray (Sintang)	
27.	Bts. Kota Sintang – Sp. Nangasilat (Bongkong) yang juga dikenal dengan nama ruas Bts. Kota Sintang – Sp. Nanga Silat	
28.	Sp. Nanga Silat – Sp. Sejiram yang juga dikenal dengan nama ruas Sp. Nanga Silat – Sp. Sejiram	
29.	Sp. Sejiram – Nanga Tepuai	
30.	Nanga Tepuai – Nanga Semangut	
31.	Nanga Semangut – Bts. Kota Putussibau	a
32.	Putussibau – Nanga Era	a

No.	Nama Ruas	Keterangan
33.	Jln. A. Yani (Putussibau)	a
34.	Jln. Kom. Yos Sudarso (Putussibau)	a
35.	Jln. D.I. Panjaitan (Putussibau)	a
36.	Jln. Gajah Mada (Putussibau)	a
37.	Jln. Kirin Durian (Putussibau)	a
38.	Tanjung Kerja – Putussibau	a
39.	Mataso (Banua Martinus) – Tanjung Kerja	a
40.	Lanjak – Mataso (Banua Martinus)	a
41.	Lanjak – Danau Sentarum	a
42.	Nanga Badau – Lanjak yang juga dikenal dengan nama ruas Badau – Lanjak	a
43.	Bts. Serawak – Nanga Badau yang juga dikenal dengan nama ruas Bts. Serawak – Badau	a

Keterangan:

- melewati KSN Kawasan Perbatasan Negara yang meliputi 14 kecamatan (Paloh, Sajingan Besar, Jagoi Babang, Siding, Entikong, Sekayam, Ketungau Hulu, Ketungau Tengah, Puring Kencana, Badau, Batang Lupar, Embaloh Hulu, Putussibau Utara, dan Putussibau Selatan).
- sebagian masih merupakan Rencana Umum Jaringan Jalan Nasional.

B. Jalan Kolektor Primer bagian dari Rencana Umum Jaringan Jalan Nasional (Kode Ruas B;16)

No.	Nama Ruas	Keterangan ^{a)}
1.	Nanga Ella Ilir – Bts. Prov. Kalimantan Barat / Bts. Prov. Kalimantan Tengah yang juga dikenal dengan nama ruas Ella Hilir - Bts. Prov. Kalteng	
2.	Sp. Temajuk – Sp. Tanjung	a
3.	Sp. Take – Sp. Sontas	a
4.	Sp. Balai Karangan – Rasau	a
5.	Rasau – Jasa – Sungai Kelik yang juga dikenal dengan nama ruas Rasau – Jasa – Bts. Negara	a
6.	Rasau – Sp. Nanga Kantuk	a
7.	Sp. Nanga Kantuk – Nanga Badau yang juga dikenal dengan nama ruas Sp. Nanga Kantuk – Badau	a
8.	Nanga Era – Bts. Prov. Kalimantan Barat/Bts. Prov. Kalimantan Timur	a
9.	Merbau – Mentibar (Merbau-Tebas)	a
10.	Mentibar – Tanah Hitam (Merbau-Tebas)	a
11.	Tanah Hitam – Aruk Parak (Merbau-Tebas) yang juga dikenal dengan nama ruas Tanah Hitam – Arung Parak (Merbau-Tebas)	a
12.	Aruk Parak – Pinang Merah (Merbau-Tebas) yang juga dikenal dengan nama ruas Arung Parak – Pinang Merah (Merbau-Tebas)	
13.	Pinang Merah - Sp. Danau (Parit 3) (Merbau-Tebas)	

14.	Sp. Danau (Parit 3) – Sentebang/Dungun Laut (Merbau-Tebas)	
15.	jalan akses Jembatan Sei Sambas Besar	
16.	jalan akses Pelabuhan Sintete (Sambas)	

Keterangan: Telah ditetapkan dalam Kepmen 367 huruf B

C. Jalan Kolektor Primer bagian dari Rencana Umum Jaringan Jalan Nasional (Kode Ruas C; 24)

No.	Nama Ruas	Keterangan ¹⁾
1.	jalan akses Pelabuhan Paloh (Sambas)	jalan akses Pelabuhan PP Paloh/Sakura (Sambas)
2.	Jalan Terminal Induk (Singkawang)	jalan akses Terminal Singkawang (Singkawang)
3.	jalan akses KI Landak	jalan akses KI Mandor
4.	jalan akses Pelabuhan Pontianak Terminal Jungkat	jalan akses Terminal Umum Pelabuhan Pontianak Baru (Jungkat)
5.	Sungai Durian – Rasau Jaya	jalan akses Pelabuhan Penyeberangan Rasau Jaya (Kubu Raya)
6.	Tanjung Kapuas – Segole – Penyeladi	Tanjung Kapuas – Segole – Penyeladi
7.	jalan akses Bandar Udara Tebelian (Sintang)	jalan akses Bandar Udara Tebelian (Sintang)
8.	Semubuk – Sintang	Sintang – Semubuk
9.	Semubuk – Sp. Ng. Merakai	Semubuk – Seputau III
10.	Sp. Ng. Merakai – Senangan Kecil	Seputau III - Sp. Ng. Merakai
11.	Senangan Kecil – Sp. Mengerat	Sp. Ng. Merakai – Sp. Mengerat
12a.	Jalan Penjara (Putussibau)	

No.	Nama Ruas	Keterangan ¹⁾
12b.	Jalan Adisucipto (Putussibau)	jalan akses Bandar Udara Pangsuma (Kapuas Hulu)
13a.	Siduk – Sukadana	Siduk – Teluk Batang (Pelabuhan Teluk Batang)
13b.	Sukadana – Teluk Batang	
14.	Jalan Sisingamangaraja (Kota Ketapang)	jalan akses Bandar Udara Rahadi Oesman (Ketapang)
15.	Jalan Gajah Mada (Kota Ketapang)	jalan akses Pelabuhan PP Ketapang (Ketapang)
16.	Jalan Jembatan Pawan I (dalam kota Ketapang)	Jalan Jembatan Pawan (Kota Ketapang)
17.	Jalan WR. Supratman (dalam kota Ketapang)	Jalan WR. Supratman (Kota Ketapang)
18.	Jalan AR. Hakim (dalam kota Ketapang)	Jalan AR. Hakim (Kota Ketapang)
19.	Jalan Rahadi Ismail (dalam kota Ketapang)	Jalan Rahadi Ismail (Kota Ketapang)
20.	Batas Kota Ketapang – Pesaguan	Ketapang – Pesaguan
21.	Pesaguan – Kendawangan	Pesaguan – Kendawangan
22.		Kendawangan – Airhitam
23.		Airhitam – Bts. Prov. Kalimantan Barat/Bts. Prov. Kalimantan Tengah

Keterangan:

1) nama ruas dalam Kepmen PUPR No. 367/KPTS/M/2023 tentang Rencana Umum Jaringan Jalan Nasional

D. Jalan Kolektor Primer yang merupakan Jalan Provinsi

No.	Nama Ruas	Keterangan ¹⁾
1.	Tanah Hitam – Merbau	
2.	Simpang Bantanan II (Sange Mange) – Tanah Hitam	
3.	Simpang Bantanan I – Sp. Bantanan II (Sange Mange)	
4.	Telok Kalong - Simpang Bantanan II (Sange Mange)	
5.	Jalan Tabrani (dalam kota Sambas)	
6.	Jalan Gusti Hamzah (dalam kota Sambas)	
7.	Jalan Ahmad Marzuki (dalam kota Sambas)	
8.	Jalan Sultan Safiuddin (dalam kota Sambas)	
9.	Jalan Pembangunan (dalam kota Sambas)	
10.	Batas Kota Sambas – Subah	
11.	Subah – Ledo	
12.	Jalan Bambang Ismoyo (dalam kota Singkawang)	
13.	Jalan Sudirman (dalam kota Singkawang)	
14.	Jalan Pahlawan (dalam kota Singkawang)	
15.	Batas Kota Singkawang – Bengkayang	
16.	Jalan Jerendeng (dalam kota Bengkayang)	
17.	Bengkayang – Batas Kabupaten Landak/Bengkayang	

No.	Nama Ruas	Keterangan ¹⁾
18.	Batas Kabupaten Bengkayang/Landak – Serimbu	
19.	Ngabang – Serimbu	
20.	Sidas – Simpang Tiga	
21.	Nahaya – Simpang Amboyo Selatan	
22.	Simpang Pak Mayam – Nahaya	
23.	Jalan Ya' M. Sabran (Simpang Sultan Hamid II – Tugu Alianyang)	
24.	Jalan Hasanuddin (dalam kota Pontianak)	
25.	Jalan HRA. Rachman (dalam kota Pontianak)	
26.	Jalan Husein Hamzah (dalam kota Pontianak)	
27.	Jalan Imam Bonjol (dalam kota Pontianak)	
28.	Jalan Adi Sucipto (dalam kota Pontianak)	
29.	Jalan Sei Raya Dalam I	
30.	Batas Pontianak – Sungai Durian	
31.	Batas Kota Pontianak – Sungai Kakap	
32.	Kembayan – Balai Sebut	
33.	Balai Sebut – Balai Sepuak	
34.	Balai Sepuak – Semubuk	

No.	Nama Ruas	Keterangan ¹⁾
35.	Bodok – Meliau	
36.	Sekadau – Rawak	
37.	Rawak – Nanga Taman	
38.	Nanga Taman – Nanga Mahap	
39.	Batas Kota Nanga Pinoh (Simpang Tahlud) – Simpang Pintas	
40.	Simpang Pintas – Sayan	
41.	Sayan – Kota Baru	
42.	Kota Baru – Nanga Soka	
43.	Simpang Medang – Nanga Mau	
44.	Nanga Mau – Tebidah	
45.	Tebidah – Bunyau	
46.	Bunyau – Serawai	
47.	Simpang Sejiram – Semitau	
48.	Semitau – Suhaid	
49.	Nanga Tayap (Simpang Betenung) – Tumbang Titi	
50.	Tumbang Titi – Tanjung	
51.	Tanjung – Marau	
52.	Marau – Air Upas	

No.	Nama Ruas	Keterangan ¹⁾
53.	Air Upas – Manis Mata	
54.	Simpang Sei Gantang – Teluk Batu	
55.	Teluk Batu – Simpang Jemayas	

E. Jalan Kolektor Primer Akses Simpul Transportasi Regional ^{a)}

No.	Nama Ruas	Keterangan
1.	jalan akses Bandar Udara Paloh (Sambas)	b
2.	jalan akses Dermaga Penyeberangan antarprovinsi Sintete (Sambas)	
3.	jalan akses Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat dan Pelabuhan Sungai Pemangkat (Sambas)	
4.	jalan akses Bandar Udara Singkawang (Singkawang)	
5.	jalan akses Pelabuhan Perikanan Pantai Sungai Rengas (Kubu Raya)	
6.	Jln. Gusti M. Saunan (jalan akses Pelabuhan Sungai dan Pelabuhan Perikanan Pantai Teluk Batang, Kayong Utara)	
7.	jalan akses Dermaga Penyeberangan antarprovinsi Tembilok (Ketapang);	
8.	Gonis Rabu – Pelabuhan Sungai Sungai Asam (Sekadau)	
9.	Miau Merah (Sp. Nanga Silat) – Pelabuhan Sungai Perigi Kanan/Nanga Silat (Kapuas Hulu)	
10.	jalan akses Pelabuhan Sungai Muara Kubu/Kelang Kubu (Kubu Raya)	

Keterangan:

- penetapan ruas jalan berdasarkan Pasal 9 ayat (6) dan (7) serta Pasal 19 UU No. 2/2022 tentang Jalan dan merupakan jalan kolektor primer JKP-4 jika belum ditetapkan sebagai jalan nasional atau jalan provinsi.
- berada di dalam KSN Kawasan Perbatasan Negara

F. Jalan Kolektor Primer Strategis Provinsi ^{a)}

No.	Nama Ruas	Keterangan
1.	Temajuk – Bts. Serawak (Sambas)	b
2.	Pakit Mulau – Pintas Keladan (Sekadau – Sintang)	b
3.	Nanga Kantuk – Sungai Antu (Kapuas Hulu)	b
4.	Jln. Kom. Yos Sudarso (Pontianak)	c
5.	jalan akses Pelabuhan Pontianak Terminal Nipah Kuning	c
6.	jalan akses Jembatan Kapuas III (Kubu Raya – Mempawah)	c
7.	Pontianak – Sebangki (Pontianak – Kubu Raya – Landak)	c
8.	Jln. Sungai Raya Dalam II (Pontianak-Kubu Raya)	c
9.	Lingkar Luar Barat Perkotaan Pontianak (Kubu Raya)	c
10.	Lingkar Luar Selatan Perkotaan Pontianak (Kubu Raya)	c
11.	Rasau Jaya – Kubu (Kubu Raya)	d
12.	Asam Besar – Jembatan Asam Besar (Bts. Prov. Kalimantan Tengah)	e
13.	Teluk Melano – Simpang Dua (Kayong Utara – Ketapang)	f
	Baram – Nanga Mahap (Ketapang – Sekadau)	f

Keterangan:

- merupakan jalan kolektor primer JKP-4 jika belum ditetapkan sebagai jalan nasional atau jalan provinsi.
- jalan akses melewati KSN Kawasan Perbatasan Negara.
- jalan strategis provinsi penunjang pertumbuhan ekonomi di KSP Kawasan Metropolitan Pontianak Raya berdasarkan Pasal 9 ayat (7) UU No. 2/2022 tentang Jalan.
- jalan mitigasi bencana menuju Gunung Ambawang.
- jalan eksisting penghubung Kecamatan Manis Mata Kabupaten Ketapang dengan Kabupaten Sukamara Kalimantan Tengah.

- jalan lintas kabupaten penunjang Pelabuhan Pengumpul Teluk Batang.
- G. Jalan Kolektor Primer Dalam Kabupaten ^{a)}

No.	Nama Ruas	Kete- rangan
1.	Telok Kalong – Sekura – Simpang Empat (Sambas)	b
2.	Sambas – Sebambang – Tengguli (Sambas)	
3.	Sebambang – Pelabuhan Sungai Sejangkung (Sambas)	b
4.	Sentebang – Pelabuhan Sungai Sungai Batang (Sambas)	b
5.	Parit Baru – Sungai Tapah (Sambas)	
6.	Selakau – Selakau Tua (Sambas)	
7.	Sungai Pangkalan II – Monterado – Samalantan (Bengkayang)	
8.	Babane – Papan Uduk (Bengkayang)	
9.	Sayung – Teriak (Bengkayang)	
10.	Sanggau Ledo – Pisak (Bengkayang)	
11.	Simpang Siding (Merendeng) – Siding (Bengkayang)	
12.	Senakin – Sompak – Karangan (Landak)	
13.	Pahauman – Sebangki (Landak)	
14.	Ngabang – Meranti – Darit (Landak)	
15.	Simpang Kuala Behe – Kuala Behe (Landak)	
16.	Simpang Sebangki – Sebangki (Landak)	

No.	Nama Ruas	Keterangan
17.	Pasir – Sui. Pinggan – Toho (Mempawah)	
18.	Peniti – Segedong (Mempawah)	
19.	Kuala Dua – Pelabuhan Sungai Sukalanting (Kubu Raya)	b
20.	Pelabuhan Sungai Tanjung Harapan – Permata (Kubu Raya)	b
21.	Sungai Kakap – Pelabuhan Sungai Parit Sarem (Kubu Raya)	b
22.	Pelabuhan Sungai Sungai Nipah – Selat Remis (Kubu Raya)	b
23.	Teluk Batang – Pelabuhan Sungai Seponti Jaya (Kayong Utara)	b
24.	Tanjung Satai – Pelabuhan Sungai Kemboja (Kayong Utara)	b
25.	Pelang – Sungai Melayu – Tumbang Titi (Ketapang)	
26.	Tanjung (Pangkalan Suka) – Periang (Ketapang)	
27.	Simpang Sedawak – Sukaraja (Ketapang)	
28.	Sandai – Menyumbung (Ketapang)	
29.	Simpang Noyan (Lubuk Sabuk) – Noyan (Sanggau)	
30.	Pusat Damai – Bonti (Sanggau)	
31.	Semuntai – Kedukul – Balai Sebut (Sanggau)	
32.	Pelabuhan Sungai Sunyat – Padak – Balai Sepuak (Sekadau)	b
33.	Padak (Maboh Permai) – Pelabuhan Sungai Belitang Dua (Sekadau)	b

No.	Nama Ruas	Keterangan
34.	jalan akses Jembatan Melawi II – Tekelak (Melawi)	
35.	Batu Buil – Tiong Keranjik (Melawi)	
36.	Kota Baru – Ulak Muid (Melawi)	
37.	Nanga Ella Hilir – Menukung (Melawi)	b
38.	Menukung – Bunyau (Melawi)	b
39.	Lengkenat – Tanjung Ria (Sintang)	b
40.	Simpang Tempunak – Nanga Tempunak (Sintang)	b
41.	Semubuk – Pelabuhan Sungai Nanga Ketungau (Sintang)	b
42.	Kebong – Nanga Dedai (Sintang)	b
43.	Pelabuhan Sungai Nanga Serawai – Nanga Kemangai (Sintang)	b
44.	Pelabuhan Sungai Perigi Kiri/Nanga Silat – Sekedau (Kapuas Hulu)	b
45.	Sekedau – Batu Ampar (Kapuas Hulu)	
46.	Simpang Dangkan – Dangkan Kota (Kapuas Hulu)	
47.	Kenerak – Pelabuhan Sungai Selimbau (Kapuas Hulu)	b
48.	Simpang Adung – Pelabuhan Sungai Jongkong Pasar (Kapuas Hulu)	b
49.	Boyan Tanjung – Pelabuhan Sungai Bunut Hilir (Kapuas Hulu)	b
50.	Temuyuk – Nanga Suruk (Kapuas Hulu)	

No.	Nama Ruas	Keterangan
51.	Putussibau – Bika – Pelabuhan Sungai Embaloh Hilir (Kapuas Hulu)	b
52.	Simpang Mataso – Banua Martinus (Kapuas Hulu)	

Keterangan:

- jalan kolektor primer (JKP-4) yang ditetapkan berdasarkan Pasal 5 ayat (3) huruf d Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 3/PRT/M/2012 Pedoman Penetapan Fungsi Jalan dan Status Jalan mengingat Pasal 19 dan 20 UU No. 2/2022 tentang Jalan.
- akses pelabuhan sungai atau dermaga penyeberangan.

2) Koridor Ekonomi Utara

Kota Pontianak yang secara alami telah membentuk Kawasan Perkotaan Metropolitan dengan wilayah disekitarnya sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN) satu-satunya di Kalimantan Barat dan merupakan pusat pertumbuhan utama ekonomi Provinsi Kalimantan Barat dengan fungsi sebagai pusat pemerintahan, perdagangan dan jasa,

pendidikan, pelabuhan dan industri. Sejalan dengan peningkatan jumlah penduduk dan aktivitas ekonomi, Kota Pontianak telah berkembang pesat sehingga sebagian industry berbasis SDA seperti crumb rubber telah merelokasi sebagian pabriknya di luar Kota Pontianak karena isu mendekati bahan baku dan masalah lingkungan.

Gambar 2. 27 Koridor Ekonomi Utara Kalbar



Sejalan dengan penyelesaian pembangunan dan operasional Pelabuhan Kijing Tahap Inisial di Kabupaten Mempawah, maka fungsi pelabuhan Kontainer (*Container Port*) di kota Pontianak akan pindah ke pelabuhan Kijing. Hal ini akan membentuk pusat pertumbuhan ekonomi baru di

Kalimantan Barat, yaitu Pelabuhan Kijing dan wilayah disekitarnya yang akan berkembang menjadi pusat logistik dan industri baru di Kalbar. Diperlukan peningkatan aksesibilitas dari Kota Pontianak ke Pelabuhan Kijing dan sebaliknya berupa jalan Tol hingga ke Kota Singkawang

yang merupakan pusat pertumbuhan ekonomi dengan basis pariwisata dan perdagangan. Selain itu Perlu segera dibangun *outer ring road* beserta jembatan Kapuas 3 dan *outer ring kanal*, untuk mengatasi pergerakan orang dan barang dari dan ke wilayah Kota Pontianak dan kawasan sekitarnya sehingga Kota Pontianak dan sekitarnya sebagai PKN tetap mampu mengakselerasi pertumbuhan ekonomi wilayah Kalimantan Barat.

Peningkatan akses dari dan ke kawasan industri serta sentra produksi pangan di daerah pedalaman terutama Kabupaten Landak dan peningkatan aksesibilitas dari wilayah di kabupaten Bengkayang ke Kota Singkawang dan Kota Sambas sangat diperlukan untuk Penguatan koridor ekonomi utara.

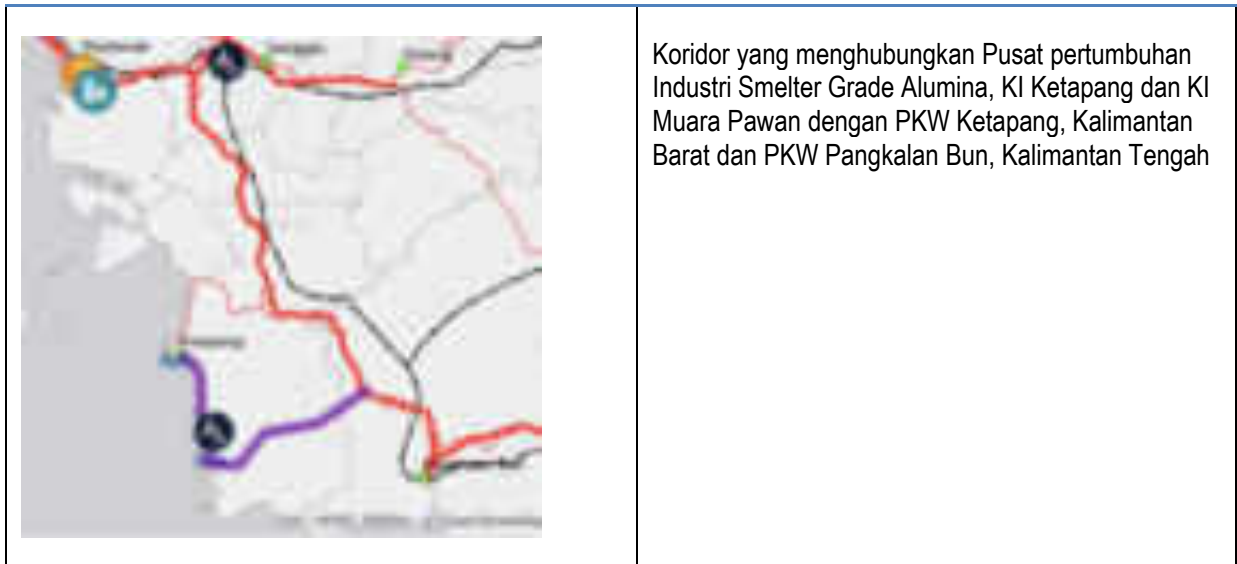
Pengembangan aksesibilitas antara pusat-pusat pertumbuhan dengan wilayah-wilayah pendukungnya perlu diperkuat dengan pengembangan moda transportasi selain jalan kelas I dan II di arteri primer dan kolektor primer yang dapat dilalui angkutan container 40 feet,

juga pembangunan rel kereta api, sehingga angkutan barang dan orang menjadi lebih efisien dan murah terutama untuk mencapai sasaran nasional Biaya Logistik (*Logistic coast*) sebesar 9% di tahun 2045.

3) Koridor Ekonomi Selatan

Koridor ekonomi Selatan Kalimantan Barat menghubungkan pusat-pusat pertumbuhan di sepanjang Kota Ketapang dan Kendawangan berupa Industri Smelter Grade Alumina dan Kawasan Industri Ketapang dan Industri lainnya yang sedang dalam proses investasi. Koridor ini juga mempunyai potensi berkembang hingga ke wilayah Kalimantan Tengah. Koridor Ekonomi Selatan akan mengungkit percepatan pertumbuhan ekonomi di wilayah Kabupaten Ketapang, Kabupaten Kayong Utara hingga wilayah perbatasan diantara Provinsi Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah. Koridor Ekonomi Selatan juga akan berkembang hingga ke wilayah Kabupaten Kayong Utara dan menyatu dengan Pusat Pertumbuhan ekonomi di wilayah Tayan dan sekitarnya.

Gambar 2. 28 Koridor Ekonomi Selatan



4) Konektivitas Kalbar dengan IKN dan Kalimantan Bagian Timur sebagai bagian Superhub Nasional

Saat ini baru jalur selatan dari Pontianak melalui Tayan ke Kalteng -Kalsel-IKN yang dalam keadaan baik. Jalur angkutan udara tidak ada yang langsung ke Kalimantan Bagian Timur dan harus transit di Jakarta atau Surabaya.

Penguatan dan pengembangan konektivitas dan aksesibilitas dari Kalimantan Bagian Barat ke Timur perlu segera dibangun hingga 20 tahun kedepan (Darat : Jalan & Kereta Api; Udara ; Laut). Kalimantan Barat harus memanfaatkan pusat pertumbuhan IKN untuk pengembangan kesejahteraan wilayahnya.



5) Konetivitas Kalbar dengan Wilayah Sub Regional ASEAN Timur (Sarawak, Sabah, dan Brunei Darussalam)

Pengembangan industry dan perdagangan antar negara serta *crossborder tourism* di Kalimantan Barat merupakan salah satu peluang percepatan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan Kalimantan Barat. Saat ini, Kalimantan Barat yang berbatasan darat dengan wilayah Sarawak-Sabah, Malaysia dan Brunei Darusalam, yang mempunyai GDP per kapita jauh lebih tinggi daripada Kalimantan Barat, mempunyai aksesibilitas dan konektivitas yang sangat baik. Terdapat 3 (tiga) PLBN yang sudah diresmikan dan dioperasikan, yaitu PLBN Entikong, Kabupaten Sanggau, PLBN Badau, Kabupaten Kapuas Hulu dan PLBN Aruk, Kabupaten Sambas dan 2 (dua) PLBN sedang dalam proses

pembangunan (PLBN Jagoi Babang, Kabupaten Bengkayang dan PLBN Sei Kelik, Kabupaten Sintang).

Diharapkan pada tahun 2025-2029, 5 (lima) PLBN di Kalimantan Barat yang telah dan sedang dibangun Pemerintah dapat diopersionalisasikan seluruhnya. Selain itu pada periode yang sama, dibutuhkan pembangunan PLBN di Temajok, Kabupaten Sambas untuk mempercepat pengembangan *Cross Border Tourism* antara DPP Sambas-Singawang Kalimantan Barat dengan Sarawak, Malaysia.

PLBN Entikong, PLBN Badau dan PLBN Aruk dilengkapi dengan Terminal Barang Internasional / TBI dimana TBI Entikong, Kabupaten Sanggau sudah selesai dibangun dan belum beroperasi; dan 2 (dua) TBI sedang dalam proses pembangunan.



Terminal Barang Internasional (TBI) adalah fasilitas yang digunakan untuk mengatur arus ekspor dan impor antara Indonesia dan negara tetangga. Pembangunan TBI di Kalimantan Barat

bermanfaat dalam memudahkan distribusi barang antarnegara, sehingga dapat meningkatkan perdagangan dan investasi. Selain itu mendukung penumbuhan dan

pengembangan kawasan ekonomi khusus (KEK) dan kawasan industri yang berpotensi meningkatkan nilai tambah dan lapangan kerja di wilayah perbatasan, menyediakan fasilitas dan infrastruktur transportasi yang modern, aman, dan nyaman bagi masyarakat perbatasan, dan

menjaga kedaulatan dan keamanan negara dengan mengawasi dan mengendalikan arus barang yang keluar masuk wilayah Indonesia.

Selanjutnya untuk mengetahui kebutuhan pengembangan jaringan transportasi di Provinsi Kalimantan Barat, dapat di lihat sebagai berikut:

Tabel 2. 149 Pengembangan Jaringan Prasarana Transportasi Provinsi Kalimantan Barat
Terminal Penumpang dan Barang

No	Eksisting	Pengembangan
I	TERMINAL PENUMPANG: 1. Terminal Tipe A Sungai Ambawang 2. Terminal Pasar Sambas (Sesuai SK Gubernur) 3. Terminal Pasiran Singkawang (Melayani AKDP); 4. Terminal Ngabang (Melayani AKDP); 5. Terminal Mempawah (Melayani AKDP); 6. Terminal Batulayang Pontianak (Melayani AKDP); 7. Terminal Sanggau (Melayani AKDP); 8. Terminal Lawang Kuari Sekadau (Melayani AKDP); 9. Terminal Sido Mulyo Nanga Pinoh (Sesuai SK Gubernur); 10. Terminal Pemangkat (Melayani AKDP) 11. Terminal Tayan (Melayani AKDP) 12. Terminal Entikong (Melayani AKDP) 13. Terminal Kedamin, Kapuas Hulu (Sesuai SK Gubernur) 14. Terminal Sungai Ukoi, Sintang (Sesuai SK Gubernur); dan 15. Terminal Pemangkat (Melayani AKDP)	1. Pembangunan Terminal tipe A di Singkawang 2. Pembangunan Terminal tipe A di Putussibau 3. Pembangunan Terminal tipe B di Bengkayang 4. Pembangunan Terminal tipe B di Sukadana 5. Pembangunan Terminal tipe B di Aruk Sambas 6. Pembangunan Terminal tipe B di Jagoi Babang Bengkayang 7. Pembangunan Terminal Tipe B di Sungai Kelik Sintang 8. Pembangunan Terminal tipe B di
II.	TERMINAL BARANG:	

No	Eksisting	Pengembangan
	1. Terminal Barang Internasional (TBI) di Entikong, Kab. Sanggau 2. Terminal Barang Internasional TUKS PT. Citrakarya Sentosa Mandiri di Badau	1. Pembangunan Terminal barang internasional di PKSN Badau 2. Pembangunan Terminal barang internasional di PKSN Aruk 3. Rencana terminal barang internasional di PKSN Jagoi babang 4. Rencana terminal barang internasional di PKSN Sungai Kelik. 5. Pengembangan terminal barang dan dryport Terminal Kijing 6. Pembangunan Terminal barang di Pontianak, 7. Pembangunan Terminal Barang di Sungai Ambawang Kubu Raya, Kota Pontianak dan 8. Pembangunan Terminal Barang di Singkawang

Jaringan Prasarana Transportasi Sungai dan Penyeberangan

No	Eksisting	Pengembangan
I	PELABUHAN SUNGAI 1. Pelabuhan Sungai Kapuas Indah (Kota Pontianak) 2. Pelabuhan Sungai Kapuas Besar (Kota Pontianak) 3. Pelabuhan Sungai Seng Hie (Kota Pontianak) 4. Pelabuhan Sungai Raya (Kab. Kubu Raya) 5. Pelabuhan Sungai Rasau Jaya (Kab. Kubu Raya) 6. Pelabuhan Sungai Sungai Durian (Kab. Kubu Raya) 7. Pelabuhan Sungai Terentang (Kab. Kubu Raya) 8. Pelabuhan Sungai Sukulanting (Kab.	1. Pengembangan Pelabuhan sungai Rantau Panjang di Kabupaten Kayong Utara 2. Pengembangan Pelabuhan sungai terpadu di Sanggau

No	Eksisting	Pengembangan
	Kubu Raya) 9. Pelabuhan Sungai Sungai Radak (Kab. Kubu Raya) 10. Pelabuhan Sungai Muara Tiga (Kab. Kubu Raya) 11. Pelabuhan Sungai Teluk Batang (Kab. Kayong Utara) 12. Pelabuhan Sungai Teluk Melano (Kab. Kayong Utara) 13. Pelabuhan Sungai Sukadana (Kab. Kayong Utara) 14. Pelabuhan Sungai Dusun Besar (Kab. Kayong Utara) 15. Pelabuhan Sungai Durian Sebatang (Kab. Kayong Utara) 16. Pelabuhan Sungai Seponti Jaya (Kab. Kayong Utara) 17. Pelabuhan Sungai Nanga Pinoh (Kab. Melawi) 18. Pelabuhan Sungai Serawai (Kab. Sintang) 19. Pelabuhan Sungai Jongkong (Kab. Kapuas Hulu)	
II	PELABUHAN PENYERANGAN : 1. Pelabuhan Penyeberangan Sintete Pemangkat 2. Pelabuhan Penyeberangan Ketapang 3. Pelabuhan Penyeberangan Sungai Ayak Sekadau 4. Pelabuhan Penyeberangan Sunyat Sekadau 5. Pelabuhan Penyeberangan Sumpit Sambas 6. Pelabuhan Penyeberangan Ciremai Sambas 7. Pelabuhan Penyeberangan Tanjung Harapan Sambas 8. Pelabuhan Penyeberangan Telok Kalong	1. Pelabuhan penyeberangan Seponti Jaya (Kab. Kayong Utara) 2. Pelabuhan penyeberangan Muara Tiga (Kab. Kubu Raya) 3. Pelabuhan penyeberangan Labai (Kab. Ketapang) 4. Pelabuhan penyeberangan Sumber Agung (Kab. Kubu Raya)

No	Eksisting	Pengembangan
	Sambas 9. Pelabuhan Penyeberangan Rasau Jaya (Kab. Kubu Raya) 10. Pelabuhan Penyeberangan Sumber Agung (Kab. Kubu Raya) 11. Pelabuhan Penyeberangan Teluk Batang (Kab. Kayong Utara) 12. Pelabuhan Penyeberangan Seponti Jaya (Kab. Kayong Utara)	

Jaringan Prasarana Transportasi Laut

No	Eksisting	Pengembangan
	1. Pelabuhan Pontianak (internasional) 2. Pelabuhan Ketapang (nasional) 3. Pelabuhan Sintete (nasional) 4. Pelabuhan Merbau Paloh (nasional) 5. Pelabuhan Kendawangan (nasional) 6. Pelabuhan Teluk Melano (nasional) 7. Pelabuhan Teluk Air (nasional) 8. Pelabuhan Padang Tikar (regional) 9. Pelabuhan Mempawah (Regional) 10. Pelabuhan Tanjung Satai (regional)	1. Pengembangan Terminal Kijing 2. Pengembangan Pelabuhan Teluk Batang

Jaringan Prasarana Transportasi Udara

No	Eksisting	Pengembangan
	BANDAR UDARA 1. Pengembangan Bandara Supadio 2. Bandara Rahadi Osman Ketapang 3. Bandara Tebelian Sintang 4. Bandara Pangsuma Putussibau 5. Bandara Nanga Pinoh	1. Rencana Pembangunan Bandar Udara Singkawang di Kota Singkawang; 2. Rencana Pembangunan Bandar Udara Sukadana di Kabupaten Kayong Utara; 3. Rencana Pembangunan Bandar Udara Karimata di Kabupaten Kayong Utara; dan

No	Eksisting	Pengembangan
		4. Rencana Pembangunan Bandar Udara di Kabupaten Bengkayang.

Jaringan Prasarana Transportasi Kereta Api

Jaringan Transportasi Kereta Api Kalimantan Barat mengacu pada Rencana Induk Perkeretaapian Nasional

Jaringan Pelayanan Transportasi Jalan

No	Eksisting	No	Pengembangan
ALBN			
1.	Pontianak – Kuching	1.	Trayek Singkawang – Sambas - Kuching
2.	Pontianak – Sarawak – Brunei Darussalam	2.	Trayek Putussibau – Kuching
		3.	Trayek Sintang – Kuching
AKAP			
1.	Sungai Ambawang – Pangkalan Bun	1.	Trayek Sungai Ambawang - Palangkaraya
		2	Trayek Sungai Ambawang - Ibu Kota Negara (IKN)
AKDP			
1.	Pontianak (BT. Layang) – Pemangkat	1.	Trayek Sukadana – Ketapang
2.	Kubu Raya (ALBN) – Sanggau	2.	Trayek Jagoi Babang - Aruk
3.	Kubu Raya (ALBN) – Sekadau	3.	Trayek Sungai Ambawang – Jagoi Babang
4.	Kubu Raya (ALBN) – Sintang	4.	Trayek Sei Ambawang – Pelabuhan Paloh
5.	Sintang – Entikong	5.	Pengembangan Angkutan Massal sebagai pengumpan/Feeder Terminal Penumpang Tipe B di setiap Ibu kota Kabupaten/Kota
6.	Singkawang – Sambas		

No	Eksisting	No	Pengembangan
7.	Singkawang - Sei. Duri		
8.	Entikong – Bengkayang		
9.	Bengkayang - Nanga Pinoh		
10.	Singkawang – Bengkayang		
11.	Singkawang – Seluas		
12.	Pontianak (BT. Layang) – Sambas		
13.	Pontianak (BT. Layang) - Sanggau Ledo		
14.	Pontianak (BT. Layang) – Ketapang		
15.	Kartiasa - Pontianak (BT. Layang)		
16.	Nanga Pinoh - Pontianak (BT. Layang)		
17.	Sintang – Putussibau		
18.	Pontianak (BT. Layang) – Putussibau		
19.	Sei. Ambawang - Nanga Badau		
20.	Badau - Sei. Ambawang		
21.	Sei. Ambawang – Semitau		
22.	Singkawang - Ketapang		
23.	Singkawang – Entikong		

No	Eksisting	No	Pengembangan
24.	Singkawang – Sintang		
25.	Singkawang - Pontianak (Batu Layang)		
26.	Singkawang – Aruk		
27.	Tayan - Pontianak (Batu Layang)		
28.	Sintang – Kartiasa		
29.	Sambas – Putussibau		
30.	Sambas – Sintang		
31.	Nanga Pinoh - Singkawang		
32.	Terminal Sei. Ambawang - Terminal Batu Layang		
33.	Terminal Sei. Ambawang - Jeruju/RS. Sultan Syarif Abdurrahman		
34.	Bandara Supadio - Kota Baru		
35.	Bandara Supadio – Bengkayang		
36.	Bandara Supadio – Singkawang		
37.	Bandara Supadio - Jalan Pahlawan		
38.	Bandara Supadio - Terminal Batu Layang		
39.	Bandara supadio – Sambas		

No	Eksisting	No	Pengembangan
40.	Ngabang - Pontianak (BT. Layang)		
41.	Pontianak (Terminal Ambawang) Sanggau		
42.	Pontianak (BT. Layang) – Darit		
43.	Pontianak (BT. Layang) – Seluas		
44.	Karangan - Pontianak (BT. Layang)		
45.	Pontianak (BT. Layang) - Balai Bekuak		
46.	Pontianak (BT. Layang) - Nanga Mahap		
47.	Pontianak (BT. Layang) – Bengkayang		
48.	Sompak - Pontianak (BT. Layang)		
49.	Sandai - Pontianak (BT. Layang)		
50.	Segedong - Pontianak (BT. Layang)		
51.	Singkawang – Seluas		
52.	Tebas - Pontianak (BT. Layang)		
53.	Singkawang - Sungai Duri		
54.	Singkawang – Serukam		
55.	Singkawang - Teluk Suak		

No	Eksisting	No	Pengembangan
56.	Singawang – Kartiasa		
57.	Singawang – Kilawit		
58.	Sungai Duri - Pontianak (BT. Layang)		
59.	Sambas – Entikong		
60.	Singawang – Pangliban		
61.	Sanggau Ledo – Singawang		
62.	Singawang – Monterado		
63.	Pontianak – Temajok		
64.	Sambas - Aruk		

Jaringan Pelayanan Transportasi Sungai Danau dan Penyeberangan

No	Eksisting	Pengembangan
I	TRAYEK ANGKUTAN PENYEBERANGAN	
1.	Lintasan Penyeberangan Nasional Sintete-Natuna	
2.	Lintasan Penyeberangan Nasional Ketapang Manggar Bangka Belitung	
3.	Lintasan Penyeberangan Bardan – Siantan (menghubungkan jalan nasional)	
4.	Lintasan Penyeberangan Sungai Asam-Sunyat (menghubungkan jalan nasional)	

No	Eksisting	Pengembangan
5.	Lintasan Penyeberangan Sumpit -Ciremai (menghubungkan jalan nasional)	
6.	Lintasan Penyeberangan Tj Harapan-Teluk Kalong (menghubungkan jalan Provinsi)	
7.	Lintasan Penyeberangan Rasau Jaya – Teluk Batang	
8.	Lintasan Penyeberangan Sumber Agung – Seponti Jaya	
II	TRAYEK ANGKUTAN SUNGAI	
1.	Pontianak – Teluk Batang	
2.	Pontianak – Sukadana	
3.	Pontianak – Sungai Radak – Buntut Limbung	
4.	Pontianak – Terindak	
5.	Pontianak – Dusun	
6.	Rasau Jaya – Teluk Melano	
7.	Rasau Jaya-Teluk Batang	
8.	Terminal Induk Sungai Raya-Ketapang	

Jaringan Pelayanan Transportasi Laut

No	Eksisting	No	Pengembangan
1.	Pontianak - Ketapang	1.	Pontianak – Tambelan, Kepulauan Riau
3.	Pelabuhan Pontianak – Singapura		
4.	Pelabuhan Pontianak – Malaysia		
5.	Pelabuhan Pontianak – India		
6.	Pelabuhan Pontianak – Pakistan		
7.	Pelabuhan Pontianak – Bangladesh		
8.	Pelabuhan Pontianak – China		
9.	Pelabuhan Pontianak – Vietnam		
10.	Pelabuhan Pontianak – Filipina		
11.	Pelabuhan Pontianak – Thailand		
12.	Pelabuhan Pontianak – Korea Selatan		
13.	Pelabuhan Pontianak – Taiwan		
14.	Pelabuhan Sintete – Malaysia		
15.	rute Tg. Priok – Belinyu – Batam – Letung – Tarempa – Natuna – Midai – Serasan – Pontianak - Surabaya		
16.	Tambelan - Pd. Tikar - Telok Batang – Karimata – Ketapang – Manggar - Toboali/Sadai		

17.	Kijang – Tambelan – Pontianak - Serasan – Subi - Selat Lampa – Ranai - P. Laut – Sedanau – Midai – Tarempa - Kuala Maras/Letung		
18.	Pontianak – Ketapang		
19.	Penyeberangan Pontianak – Tanjung Priuk Jakarta		
20.	Penyeberangan Pontianak – Tanjung Mas Semarang		
21.	Penyeberangan Pontianak – Tanjung Perak Surabaya		

Jaringan Pelayanan Transportasi Udara

No	Eksisting	No	Pengembangan
1.	Pontianak – Jakarta	1.	Pontianak – Kuching
2.	Pontianak – Surabaya	2.	Pontianak – Kuala Lumpur
3.	Pontianak – Sintang	3.	Pontianak – Singapura
4.	Pontianak – Ketapang	4.	Pontianak – Brunei Darussalam
5.	Pontianak – Putussibau	5.	Pontianak - Pangkalan Bun
6.	Pontianak – Batam	6.	Pontianak - Palangkaraya
7.	Pontianak – Solo	7.	Pontianak – Banjarmasin
8.	Pontianak - Yogyakarta	8.	Pontianak - Balikpapan/IKN
9	Nanga Pinoh – Pontianak (Perintis)	9.	Pontianak – Samarinda

No	Eksisting	No	Pengembangan
10	Nanga Pinoh – Ketapang (Perintis)	10.	Pontianak - Medan
11	Sintang – Ketapang (Perintis)	11.	Pontianak - Makasar
12	Sintang – Putussibau (Perintis)	12.	Pontianak – Bali
		13.	Pontianak – Palembang
		14.	Pontianak – Tambelan
		15.	Pontianak-Bandung
		16.	Pontianak-Semarang
		17.	Singkawang – Putussibau
		18.	Singkawang – Batam
		19.	Singkawang -Kertajati
		20.	Singkawang – Jakarta
		21.	Singkawang – Balikpapan/IKN
		22.	Sintang - Jakarta
		23.	Sintang – Balikpapan/IKN
		24.	Ketapang - Jakarta
		25.	Nanga Pinoh - Pontianak
		26.	Nanga Pinoh - Pontianak
		27.	Nanga Pinoh - Singkawang

No	Eksisting	No	Pengembangan
		28.	Nanga Pinoh - Ketapang
		29.	Nanga Pinoh - Palangkaraya
		30.	Singkawang – Sintang
		31.	Singkawang – Nanga Pinoh
		32.	Singkawang – Ketapang
		33.	Singkawang – Putussibau
		34.	Singkawang – Tambelan (kepri)
		35.	Singkawang – Dabo (kepri)
		36.	Singkawang – Letung (Kepri)
		37.	Singkawang – Natuna (kepri)
		38.	Singkawang – Pangkalan Bun
		39.	Ketapang - Nanga Pinoh
		40.	Nanga Pinoh - Pontianak
		41.	Ketapang - Sintang
		42.	Sintang – Putussibau

2.6.2.3. Irigasi

Kalimantan Barat adalah salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki lahan rawa yang luas dan potensial untuk pertanian. Produktivitas pertanian terutama padi, erat kaitannya dengan

kondisi irigasi lahan petaniannya. Kondisi irigasi di Kalbar (Kalimantan Barat) masih kurang memadai untuk mendukung lahan baku sawah dan lahan pertanian pangan berkelanjutan

(LP2B). Lahan baku sawah adalah lahan yang memiliki potensi untuk ditanami padi, sedangkan LP2B adalah lahan yang ditetapkan oleh pemerintah untuk diusahakan secara berkelanjutan untuk komoditas pangan. Irigasi berperan penting dalam meningkatkan produktivitas dan kualitas tanaman pangan, terutama padi, yang merupakan komoditas utama di Kalbar. Namun, irigasi di Kalbar masih menghadapi beberapa permasalahan, seperti kerusakan saluran, intrusi air laut, banjir, dan kekeringan. Untuk mengatasi hal ini, pemerintah dan pemerintah daerah telah melakukan berbagai upaya, seperti rehabilitasi jaringan irigasi, pembangunan embung dan irigasi perpompaan, penguatan kelembagaan petani, dan penerapan teknologi pertanian sesuai dengan karakteristik setempat. Dengan perbaikan irigasi diharapkan produktivitas

2.6.2.4. Sarana Air Minum dan Sanitasi Layak

Sumber air minum yang dikelola dengan aman adalah sumber air minum yang terlindung, berlokasi di dalam atau halaman rumah, tersedia setiap saat, dan memenuhi syarat kualitas air minum. Tahun 2022 persentase rumah tangga berakses air minum sebesar 68,79% dengan proporsi populasi yang menggunakan sumber air minum yang dikelola dengan aman di Provinsi Kalimantan Barat adalah sebesar 80,43. Target tahun 2030 untuk indikator SDG's air minum yang aman di provinsi Kalimantan Barat adalah mencapai 100% proporsi populasi yang menggunakan sumber air minum yang dikelola dengan aman %. Demikian juga untuk persentase rumah tangga berakses sanitasi dan

pertanian di Kalbar dapat meningkat dan mencapai kemandirian dan kedaulatan pangan. Pada tahun 2022, persentase irigasi provinsi dalam kondisi baik adalah 56,90 persen dan diproyeksikan pada tahun 2025 telah mencapai 60%. Untuk mendukung ketersediaan pangan di Kalimantan Barat, maka pada tahun 2035 seluruh lahan sawah beririgasi dalam kondisi baik (100 %), terutama pada lahan sawah di lahan pertanian pangan berkelanjutan yang saat ini sudah pada tahap penetapan (kabupaten Sambas) dan sedang dalam proses penetapan di seluruh Kabupaten dan Kota kecuali Kota Pontianak. Diharapkan dengan adanya perbaikan irigasi dan perlindungan lahan pertanian, produktivitas dan ketersediaan pangan di Kalbar dapat meningkat dan mencapai kedaulatan pangan

persentase penduduk yang terlayani sistem air limbah yang memadai, Target tahun 2030 untuk indikator SDG's kedua indikator tersebut diharapkan terpenuhi sebesar 100%.

Selanjutnya di proyeksikan akan meningkat kebutuhan air bersih di pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru terutama di Kawasan Pelabuhan Kijing dan Kawasan Industri di Kalimantan Barat. Pusat-pusat pertumbuhan ekonomi tersebut membutuhkan pembangunan dan pengembangan SPAM yang dapat mengakomodir kebutuhan air bersih di daerah tersebut. Pembangunan SPAM diselaraskan dengan sumber daya air. Untuk itu konservasi

sumber daya air (air permukaan dan air tanah) menjadi hal yang krusial dan penting. Berdasarkan hasil proyeksi, pada tahun 2025 kebutuhan air di Kalimantan Barat mencapai 67.778.582.750 Liter. Kebutuhan terbesar berada pada Kota Pontianak yaitu

22.535.757.000 liter. Pada tahun 2045 Kebutuhan Air Bersih di Kalimantan Barat mencapai 206.577.355.704 liter. Untuk lebih jelasnya mengenai kebutuhan air bersih di Kalimantan Barat pada tahun 2045 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 150 Proyeksi Kebutuhan Air Bersih di Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2025-2045

No	Kabupaten/ Kota	Kebutuhan Air Bersih (Liter/Tahun)				
		2025	2030	2035	2040	2045
1	Sambas	21.728.632. 500	22.723.659. 000	23.601.082. 500	24.382.176. 629	25.083.317. 622
2	Mempawah	7.899.521.6 25	8.352.851.6 25	8.750.254.5 00	9.085.107.3 60	9.358.301.1 98
3	Sanggau	16.973.923. 500	17.910.805. 500	18.687.708. 000	19.310.332. 361	19.781.539. 460
4	Ketapang	19.941.592. 500	21.011.188. 500	21.887.626. 500	22.564.951. 124	23.056.687. 837
5	Sintang	11.067.411. 375	11.694.928. 500	12.244.591. 125	16.958.473. 595	17.497.112. 252
6	Kapuas Hulu	6.628.719.3 75	7.003.702.1 25	7.331.380.8 75	7.611.166.7 26	7.842.245.3 06
7	Bengkayang	7.583.915.2 50	8.100.070.8 75	8.569.168.8 75	8.987.040.9 43	9.351.822.9 66

No	Kabupaten/ Kota	Kebutuhan Air Bersih (Liter/Tahun)				
		2025	2030	2035	2040	2045
8	Landak	10.457.879. 625	11.075.049. 000	11.608.697. 250	12.069.108. 612	16.607.584. 106
9	Sekadau	5.548.857.7 50	5.857.565.6 25	6.123.897.0 00	6.352.283.5 77	6.540.503.0 46
10	Melawi	6.083.491.5 00	6.499.865.2 50	6.854.398.8 75	7.146.399.5 56	7.371.637.2 95
11	Kayong Utara	3.382.482.3 75	3.645.857.2 50	3.888.783.0 00	4.110.517.4 08	4.309.515.7 87
12	Kubu Raya	21.693.154. 500	23.345.509. 500	24.864.822. 000	26.251.521. 528	27.487.659. 858
13	Kota Pontianak	22.535.757. 000	23.266.669. 500	23.807.380. 500	24.180.854. 506	24.412.093. 097
14	Kota Singkawang	6.253.243.8 75	6.701.153.6 25	7.115.063.6 25	7.506.409.5 92	7.877.335.8 75
Kalimantan Barat		67.778.582. 750	177.188.875 .875	185.334.854 .625	196.516.343 .516	206.577.355 .704

Sumber: Analisis Tim Pokja Saprass Bappeda Prov. Kalbar, 2023

Produksi air limbah di Kalimantan Barat pada tahun 2025 mencapai 367.733.880 liter/ hari. Produksi air limbah tertinggi pada tahun 2025 berada di Kota Pontianak yaitu 49.393.440 liter/hari diikuti dengan Kabupaten Sambas

mencapai 47.624.400 liter/hari. Pada tahun 2045 produksi air limbah di Kalimantan Barat diproyeksikan mencapai 452.772.286 liter/hari. Untuk lebih jelasnya mengenai Proyeksi Produksi

Air Limbah Kalimantan Barat tahun 2025 – 2045.

Dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 151 Proyeksi Air Limbah Kalimantan Barat Tahun 2025-2045

No	Kabupaten/ Kota	Produksi Air Limbah (Liter/Hari)				
		2025	2030	2035	2040	2045
1	Sambas	47.624.400	49.805.280	51.728.400	53.440.387	54.977.135
2	Mempawah	17.314.020	18.307.620	19.178.640	19.912.564	20.511.345
3	Sanggau	37.203.120	39.256.560	40.959.360	42.324.016	43.356.799
4	Ketapang	43.707.600	46.051.920	47.972.880	49.457.427	50.535.206
5	Sintang	24.257.340	25.632.720	26.837.460	37.169.257	38.349.835
6	Kapuas Hulu	14.528.700	15.350.580	16.068.780	16.682.009	17.188.483
7	Bengkayang	16.622.280	17.753.580	18.781.740	19.697.624	20.497.146
8	Landak	22.921.380	24.274.080	25.443.720	26.452.841	36.400.184
9	Sekadau	12.161.880	12.838.500	13.422.240	13.922.813	14.335.349
10	Melawi	13.333.680	14.246.280	15.023.340	15.663.341	16.157.013
11	Kayong Utara	7.413.660	7.990.920	8.523.360	9.009.353	9.445.514
12	Kubu Raya	47.546.640	51.168.240	54.498.240	57.537.581	60.246.926
13	Kota Pontianak	49.393.440	50.995.440	52.180.560	52.999.133	53.505.957
14	Kota Singkawang	13.705.740	14.687.460	15.594.660	16.452.405	17.265.394

No	Kabupaten/ Kota	Produksi Air Limbah (Liter/Hari)				
		2025	2030	2035	2040	2045
	Kalimantan Barat	367.733.880	388.359.180	406.213.380	430.720.753	452.772.286

Sumber: Analisis Tim Pokja Saprass Bappeda Prov. Kalbar, 2023

Air limbah terdiri dari *blackwater* dan *greywater*. Sistem pengolahan limbah yang biasa dilakukan oleh masyarakat yakni mengolah *blackwater* dalam tangki septik dan diresapkan ke dalam tanah atau dibuang ke saluran umum. Sedangkan, *greywater* langsung dialirkan ke saluran drainase. *Greywater* yang dibuang secara terus menerus ke dalam saluran drainase dapat menimbulkan masalah bagi badan air karena zat organik yang terkandung dapat terdegradasi oleh mikroorganisme, menghasilkan lumpur dan gas. Akumulasi lumpur

di dalam drainase menyebabkan pendangkalan dan berkurangnya volume saluran sehingga melebihi kapasitas apabila terjadi hujan.

Produksi Limbah *greywater* di Kalimantan barat pada tahun 2025 mencapai 275.800.410 liter/hari dengan jumlah proyeksi Limbah *Greywater* 37.045.080 liter/hari diikuti Kabupaten Sambas 35.718.300 liter/hari. Produksi Limbah *greywater* di Kalimantan barat pada tahun 2045 mencapai 339.579.215 liter/detik. Untuk lebih jelasnya mengenai Proyeksi Produksi Limbah *Greywater* dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 152 Proyeksi Produksi Limbah *Greywater* (Liter/Hari)

No	Kabupaten/ Kota	Produksi Limbah <i>Greywater</i> (Liter/Hari)				
		2025	2030	2035	2040	2045
1	Sambas	35.718.300	37.353.960	38.796.300	40.080.290	41.232.851
2	Mempawah	12.985.515	13.730.715	14.383.980	14.934.423	15.383.509
3	Sanggau	27.902.340	29.442.420	30.719.520	31.743.012	32.517.599
4	Ketapang	32.780.700	34.538.940	35.979.660	37.093.070	37.901.405

No	Kabupaten/ Kota	Produksi Limbah Greywater (Liter/Hari)				
		2025	2030	2035	2040	2045
5	Sintang	18.193.005	19.224.54 0	20.128.095	27.876.943	28.762.376
6	Kapuas Hulu	10.896.525	11.512.93 5	12.051.585	12.511.507	12.891.362
7	Bengkayang	12.466.710	13.315.18 5	14.086.305	14.773.218	15.372.860
8	Landak	17.191.035	18.205.56 0	19.082.790	19.839.631	27.300.138
9	Sekadau	9.121.410	9.628.875	10.066.680	10.442.110	10.751.512
10	Melawi	10.000.260	10.684.71 0	11.267.505	11.747.506	12.117.760
11	Kayong Utara	5.560.245	5.993.190	6.392.520	6.757.015	7.084.136
12	Kubu Raya	35.659.980	38.376.18 0	40.873.680	43.153.186	45.185.194
13	Kota Pontianak	37.045.080	38.246.58 0	39.135.420	39.749.350	40.129.468
14	Kota Singkawang	10.279.305	11.015.59 5	11.695.995	12.339.303	12.949.045
Kalimantan Barat		275.800.41 0	291.269.3 85	304.660.03 5	323.040.565	339.579.215

Dalam dokumen RTRW Provinsi Kalimantan Barat direncanakan Sistem penyediaan air minum (SPAM) terdiri atas SPAM jaringan perpipaan yang meliputi unit air baku, unit

produksi, unit distribusi, dan unit pelayanan; dan SPAM bukan jaringan perpipaan yang meliputi sumur dangkal, sumur pompa, bak

penampungan air hujan (PAH), terminal air, dan bangunan penangkap mata air.

Pengembangan SPAM jaringan perpipaan dilaksanakan oleh penyelenggara SPAM untuk melayani PKN, PKSN, PKW, PKLs, PKL, KSP, Pelabuhan Utama, dan Bandar Udara Pengumpul Primer. Pengembangan SPAM jaringan perpipaan untuk melayani PKSN, PKL, dan KSP dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain dilaksanakan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 atau penggantinya dan kelayakan tentang ketersediaan unit air baku. Sistem pengelolaan air limbah diutamakan pengembangannya di PKN, PKW, PKLs, dan

2.6.2.5. Perumahan Layak

Ketersediaan rumah di Kalimantan Barat pada pada tahun 2020 mencapai 1.249.460 unit. Jumlah rumah terbanyak berada pada kabupaten Sambas dengan 192.028 unit atau sekitar 15,37% dari jumlah rumah, diikuti dengan Kota Pontianak yang memiliki rumah sebanyak 149.937 unit atau 12 % dari jumlah rumah. Pada tahun 2023 terdapat 201.780 unit rumah dengan kategori Rumah Tidak layak Huni (RTLH). RTLH terbanyak berada di Kabupaten Sanggau dengan jumlah 44.326 unit atau sekitar 21,97% dari total RTLH di Kalimantan Barat.

Berdasarkan hasil proyeksi, kebutuhan rumah di Kalimantan Barat pada tahun 2023 mencapai 1.405.833 unit dengan kebutuhan rumah

PKL yang berpenduduk lebih dari 20.000 (dua puluh ribu jiwa). Pengembangan sistem pengelolaan air limbah dapat dikembangkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun diutamakan pengembangannya di PKN, PKW, PKLs, dan PKL yang berpenduduk lebih dari 30.000 (tiga puluh ribu jiwa) serta KSP penghasil limbah bahan berbahaya dan beracun. Pengembangan sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun dapat dikembangkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

terbesar berada di Kota Pontianak yaitu sebesar 168.868 atau sekitar 12, 01% dari kebutuhan rumah di Kalimantan Barat. Pada tahun 2025 kebutuhan perumahan di Kalimantan Barat pada tahun 2025 mencapai 1.441.505 unit meningkat 35.672 unit dari tahun 2023. Permasalahan yang terjadi saat ini tidak hanya kebutuhan unit fisik perumahan, tetapi proses kepemilikan hunian tersebut menjadi permasalahan karena peningkatan harga rumah tidak diimbangi dengan peningkatan pendapatan. Untuk lebih jelasnya mengenai kebutuhan perumahan di Kalimantan Barat tahun 2025 – 2045 dapat dilihat pada tabel Proyeksi Jumlah Kebutuhan Rumah di Kalimantan Barat 2025-2045 di bawah ini.

Tabel 2. 153 Proyeksi Jumlah Kebutuhan Rumah di Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2025-2045

No	Kabupaten/ Kota	Jumlah unit Rumah Tahun 2020 *)	Jumlah unit RTLH 2023 *)	Tahun (Kebutuhan Rumah dalam unit)					
				2023 (Baseline, Proyeksi)	2025	2030	2035	2040	2045
1	Sambas	192.028	42.299	162.045	165.363	172.935	179.613	185.557	190.893
2	Mempawah	64.288	6.729	78.198	80.158	84.758	88.790	92.188	94.960
3	Sanggau	144.977	44.326	125.985	129.178	136.308	142.220	146.958	150.544
4	Ketapang	121.349	33.002	148.130	151.763	159.903	166.573	171.727	175.469
5	Sintang	68.985	13.287	109.505	112.303	118.670	124.248	129.060	133.159
6	Kapuas Hulu	59.928	12.069	65.600	67.263	71.068	74.393	77.232	79.576
7	Bengkayang	47.177	8.123	74.745	76.955	82.193	86.953	91.193	94.894
8	Landak	79.496	15.700	103.398	106.118	112.380	117.795	122.467	126.390
9	Sekadau	48.262	7.835	54.930	56.305	59.438	62.140	64.457	66.367
10	Melawi	56.433	10.022	59.875	61.730	65.955	69.553	72.515	74.801
11	Kayong Utara	25.985	4.664	33.215	34.323	36.995	39.460	41.710	43.729
12	Kubu Raya	136.423	2.242	159.813	165.093	177.668	189.230	199.783	209.191

No	Kabupaten/ Kota	Jumlah unit Rumah Tahun 2020 *)	Jumlah unit RTLH 2023 *)	Tahun (Kebutuhan Rumah dalam unit)					
				2023 (Baseline, Proyeksi)	2025	2030	2035	2040	2045
13	Pontianak	149.937	83	168.868	171.505	177.068	181.183	184.025	185.785
14	Singkawang	54.192	1.399	61.528	63.453	67.998	72.198	76.169	79.932
Kalimantan Barat		1.249.460	201.780	1.405.833	1.441.505	1.523.333	1.594.345	1.655.041	1.705.691

Sumber : Analisis Tim Pokja Sapras Bappeda Prov. Kalbar, 2023

*) Dinas Perkim Prov. Kalbar, 2023: <https://data.kalbarprov.go.id/dataset/data-rumah-tidak-layak-huni-di-provinsi-kalimantan-barat-2023> di akses 24/12/2023 jam 12:48 wib

Rumah sederhana merupakan rumah yang diperuntukan ke Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Tipe rumah sederhana adalah tipe kurang dari $\leq$ Tipe 90. Kebutuhan rumah sederhana di Kalimantan Barat pada tahun 2025 mencapai 720.753 unit dengan kebutuhan terbesar berada di Kota Pontianak (85.753 unit),

Kabupaten Kubu Raya (82.546 unit) dan Kabupaten Sambas (82.681 unit). Kebutuhan rumah sederhana pada tahun 2045 mencapai 852.846 unit. Untuk lebih jelasnya mengenai kebutuhan Rumah Sederhana di Kalimantan Barat 2025-2045 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2. 154 Proyeksi Jumlah Kebutuhan Rumah Sederhana di Provinsi Kalimantan Barat

Tahun 2025-2045

No	Kabupaten/ Kota	Kebutuhan Rumah Sederhana (Unit)				
		2025	2030	2035	2040	2045
1	Sambas	82.681	86.468	89.806	92.778	95.446
2	Mempawah	40.079	42.379	44.395	46.094	47.480
3	Sanggau	64.589	68.154	71.110	73.479	75.272

No	Kabupaten/ Kota	Kebutuhan Rumah Sederhana (Unit)				
		2025	2030	2035	2040	2045
4	Ketapang	75.881	79.951	83.286	85.864	87.735
5	Sintang	56.151	59.335	62.124	64.530	66.580
6	Kapuas Hulu	33.631	35.534	37.196	38.616	39.788
7	Bengkayang	38.478	41.096	43.476	45.596	47.447
8	Landak	53.059	56.190	58.898	61.233	63.195
9	Sekadau	28.153	29.719	31.070	32.229	33.184
10	Melawi	30.865	32.978	34.776	36.258	37.400
11	Kayong Utara	17.161	18.498	19.730	20.855	21.865
12	Kubu Raya	82.546	88.834	94.615	99.892	104.595
13	Kota Pontianak	85.753	88.534	90.591	92.012	92.892
14	Kota Singkawang	31.726	11.333	36.099	38.084	39.966
Kalimantan Barat		720.753	739.000	797.173	827.520	852.846

Sumber : Analisis Tim Pokja Sapras Bappeda Prov. Kalbar, 2023

Rumah menengah merupakan rumah dengan tipe 90 – tipe 300. Kebutuhan rumah menengah di Kalimantan Barat pada tahun 2025 mencapai 480.502 unit dengan kebutuhan terbesar berada di Kota Pontianak (57.168 unit), Kabupaten Sambas (55.121 unit) dan Kabupaten Kubu Raya (55.031 unit). Kebutuhan rumah menengah pada tahun 2045 mencapai 568.564 unit. Untuk lebih jelasnya mengenai kebutuhan Rumah Menengah di Kalimantan Barat 2025-2045 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2. 155 Proyeksi Jumlah Kebutuhan Rumah Menengah di Provinsi Kalimantan Barat
Tahun 2025-2045

No	Kabupaten/ Kota	Kebutuhan Rumah Menengah (Unit)				
		2025	2030	2035	2040	2045
1	Sambas	55.121	57.645	59.871	61.852	63.631
2	Mempawah	26.719	28.253	29.597	30.729	31.653
3	Sanggau	43.059	45.436	47.407	48.986	50.181
4	Ketapang	50.588	53.301	55.524	57.242	58.490
5	Sintang	37.434	39.557	41.416	43.020	44.386
6	Kapuas Hulu	22.421	23.689	24.798	25.744	26.525
7	Bengkayang	25.652	27.398	28.984	30.398	31.631
8	Landak	35.373	37.460	39.265	40.822	42.130
9	Sekadau	18.768	19.813	20.713	21.486	22.122
10	Melawi	20.577	21.985	23.184	24.172	24.934
11	Kayong Utara	11.441	12.332	13.153	13.903	14.576
12	Kubu Raya	55.031	59.223	63.077	66.594	69.730
13	Kota Pontianak	57.168	59.023	60.394	61.342	61.928
14	Kota Singkawang	21.151	22.666	24.066	25.390	26.644
Kalimantan Barat		480.502	507.778	531.448	551.680	568.564

Sumber : Analisis Tim Pokja Sapras Bappeda Prov. Kalbar, 2023

Rumah Mewah merupakan rumah dengan tipe 300 ke atas. Kebutuhan rumah mewah di

Kalimantan Barat pada tahun 2025 mencapai 240.251 unit dengan kebutuhan terbesar berada

di Kota Pontianak (28.584 unit), Kabupaten Sambas (27.560 unit) dan Kabupaten Kubu Raya (27.515 unit). Kebutuhan rumah mewah pada tahun 2045 mencapai 284.282 unit. Untuk lebih

jelasan mengenai kebutuhan Rumah Mewah di Kalimantan Barat 2025-2045 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2. 156 Proyeksi Jumlah Kebutuhan Rumah Mewah di Kalimantan Barat 2025-2045

No	Kabupaten/ Kota	Kebutuhan Rumah Mewah (Unit)				
		2025	2030	2035	2040	2045
1	Sambas	27.560	28.823	29.935	30.926	31.815
2	Mempawah	13.360	14.126	14.798	15.365	15.827
3	Sanggau	21.530	22.718	23.703	24.493	25.091
4	Ketapang	25.294	26.650	27.762	28.621	29.245
5	Sintang	18.717	19.778	20.708	21.510	22.193
6	Kapuas Hulu	11.210	11.845	12.399	12.872	13.263
7	Bengkayang	12.826	13.699	14.492	15.199	15.816
8	Landak	17.686	18.730	19.633	20.411	21.065
9	Sekadau	9.384	9.906	10.357	10.743	11.061
10	Melawi	10.288	10.993	11.592	12.086	12.467
11	Kayong Utara	5.720	6.166	6.577	6.952	7.288
12	Kubu Raya	27.515	29.611	31.538	33.297	34.865
13	Kota Pontianak	28.584	29.511	30.197	30.671	30.964
14	Kota Singkawang	10.575	11.333	12.033	12.695	13.322
Kalimantan Barat		240.251	253.889	265.724	275.840	284.282

Sumber: Analisis Tim Pokja Supras Bappeda Prov. Kalbar, 2023

Pemenuhan kebutuhan rumah di Kalimantan Barat dapat dilakukan dengan penyediaan

Rumah Susun, terutama pada daerah-daerah yang memiliki aktivitas ekonomi tinggi dan

merupakan pusat-pusat aktivitas masyarakat. Berdasarkan hasil proyeksi kebutuhan penambahan Rumah di Kalimantan Barat pada tahun 2025 mencapai 161.449 unit dan meningkat 191.037 unit pada tahun 2045. Untuk

lebih jelasnya mengenai kebutuhan rumah di Kalimantan Barat dapat dilihat pada tabel Proyeksi Kebutuhan Penambahan Rumah di Kalimantan Barat tahun 2025 – 2045 di bawah ini.

Tabel 2. 157 Proyeksi Kebutuhan Penambahan Rumah di Kalimantan Barat
Tahun 2025 - 2045

No	Kabupaten/ Kota	Backlog Rumah (Unit)				
		2025	2030	2035	2040	2045
1	Sambas	18.521	19.369	20.117	20.782	21.380
2	Mempawah	8.978	9.493	9.944	10.325	10.636
3	Sanggau	14.468	15.266	15.929	16.459	16.861
4	Ketapang	16.997	17.909	18.656	19.233	19.653
5	Sintang	12.578	13.291	13.916	14.455	14.914
6	Kapuas Hulu	7.533	7.960	8.332	8.650	8.913
7	Bengkayang	8.619	9.206	9.739	10.214	10.628
8	Landak	11.885	12.587	13.193	13.716	14.156
9	Sekadau	6.306	6.657	6.960	7.219	7.433
10	Melawi	6.914	7.387	7.790	8.122	8.378
11	Kayong Utara	3.844	4.143	4.420	4.672	4.898
12	Kubu Raya	18.490	19.899	21.194	22.376	23.429
13	Kota Pontianak	19.209	19.832	20.292	20.611	20.808

14	Kota Singkawang	7.107	7.616	8.086	8.531	8.952
Kalimantan Barat		161.449	170.613	178.567	185.365	191.037

Sumber: Analisis Tim Pokja Sapras Bappeda Prov. Kalbar, 2023

Selain upaya rehabilitasi rumah tidak layak di Kalimantan Barat, juga diperlukan persiapan untuk merehabilitasi rumah-rumah yang terkena dampak bencana, mengingat Kalimantan Barat rawan terhadap bencana banjir, angin puting beliung, longsor dan gelombang pasar. Rehabilitasi rumah juga diproyeksikan akan diperlukan untuk rumah-rumah yang

terkena proyek pemerintah seperti pelebaran trase jalan, karena pada umumnya perkembangan pemukiman secara alamiah di Kalimantan Barat mengikuti sepanjang kanan-kiri jalan (corridor development). Pembangunan perumahan Guru juga diperlukan untuk mendukung proses pendidikan terutama di daerah terpencil, terdalam dan perbatasan.

2.6.2.6. Sarana Pendidikan

Kebutuhan TK/ PAUD di Kalimantan Barat pada tahun 2025 mencapai 4.613 unit dengan kebutuhan terbesar berada pada Kota Pontianak dengan kebutuhan mencapai 549 unit. pada tahun 2045 Kebutuhan TK/ PAUD mencapai 5.458 unit dengan kebutuhan terbesar berada pada Kabupaten Kubu Raya yaitu 669 unit. Kebutuhan taman bacaan di Kalimantan Barat pada tahun 2025 mencapai 2.306 unit dengan

kebutuhan terbesar berada pada Kota Pontianak yaitu sebesar 274 unit. Pada tahun 2045 kebutuhan Taman Bacaan di Kalimantan barat mencapai 2.729 unit dengan kebutuhan terbesar berada pada Kabupaten Kubu Raya yaitu sebesar 335 unit. untuk lebih jelasnya mengenai Proyeksi Kebutuhan TK/ PAUD dan Taman Bacaan dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel 2. 158 Proyeksi Kebutuhan TK/ PAUD dan Taman Bacaan di Kalimantan Barat Tahun 2025-2045

No	Kabupaten/ Kota	TK/ PAUD					Taman Bacaan				
		2025	2030	2035	2040	2045	2025	2030	2035	2040	2045
1	Sambas	529	553	575	594	611	265	277	287	297	305
2	Mempawah	257	271	284	295	304	128	136	142	148	152
3	Sanggau	413	436	455	470	482	207	218	228	235	241

No	Kabupaten/ Kota	TK/ PAUD					Taman Bacaan				
		2025	2030	2035	2040	2045	2025	2030	2035	2040	2045
4	Ketapang	486	512	533	550	562	243	256	267	275	281
5	Sintang	359	380	398	413	426	180	190	199	206	213
6	Kapuas Hulu	215	227	238	247	255	108	114	119	124	127
7	Bengkayang	246	263	278	292	304	123	132	139	146	152
8	Landak	340	360	377	392	404	170	180	188	196	202
9	Sekadau	180	190	199	206	212	90	95	99	103	106
10	Melawi	198	211	223	232	239	99	106	111	116	120
11	Kayong Utara	110	118	126	133	140	55	59	63	67	70
12	Kubu Raya	528	569	606	639	669	264	284	303	320	335
13	Kota Pontianak	549	567	580	589	595	274	283	290	294	297
14	Kota Singkawang	203	218	231	244	256	102	109	116	122	128
Kalimantan Barat		4613	4875	5103	5296	5459	2308	2439	2551	2649	2729

Jumlah Sekolah Dasar di Kalimantan Barat pada tahun 2022 adalah 4.877 unit dengan jumlah terbanyak berada di Kabupaten Ketapang yaitu 564 unit. Kabupaten Kubu Raya merupakan kabupaten kedua yang memiliki jumlah SD terbanyak yaitu 545 unit. Kebutuhan Sekolah Dasar pada tahun 2025 di Kalimantan Barat

mencapai 3.603 dengan kebutuhan terbesar berada di Kota Pontianak dengan Kebutuhan sebesar 429 unit. pada tahun 2045 kebutuhan SD di Kalimantan Barat mencapai 4.263 unit. Untuk lebih jelasnya mengenai Proyeksi Kebutuhan SD di Kalimantan Barat tahun 2025-2045 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 159 Proyeksi Kebutuhan SD di Kalimantan Barat tahun 2025-2045

No	Kabupaten/ Kota	Baseli ne 2022	Kebutuhan SD (unit)				
			2025	2030	2035	2040	2045
1	Sambas	456	413	432	449	464	477
2	Mempawah	240	200	212	222	230	237
3	Sanggau	484	323	341	356	367	376
4	Ketapang	564	379	400	416	429	439
5	Sintang	469	281	297	311	323	333
6	Kapuas Hulu	426	168	178	186	193	199
7	Bengkayang	284	192	205	217	228	237
8	Landak	470	265	281	294	306	316
9	Sekadau	241	141	149	155	161	166
10	Melawi	266	154	165	174	181	187
11	Kayong Utara	115	86	92	99	104	109
12	Kubu Raya	545	413	444	473	499	523
13	Kota Pontianak	206	429	443	453	460	464
14	Kota Singkawang	111	159	170	180	190	200
Kalimantan Barat		4.877	3.603	3.809	3.985	4.135	4.263

Jumlah Sekolah Menengah Pertama di Kalimantan Barat pada tahun 2022 adalah 1.698 unit dengan jumlah terbanyak berada di Kabupaten Kubu Raya yaitu 252 unit. Kabupaten Ketapang merupakan kabupaten kedua yang memiliki jumlah SMP terbanyak yaitu 175 unit. Kebutuhan Sekolah Menengah Pertama pada tahun 2025 di Kalimantan Barat mencapai 1.202

dengan kebutuhan terbesar berada di Kota Pontianak dengan Kebutuhan sebesar 143 unit. Pada tahun 2045 kebutuhan SMP di Kalimantan Barat mencapai 1.419 unit. Untuk lebih jelasnya mengenai Proyeksi Kebutuhan SMP di Kalimantan Barat tahun 2025-2045 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 160 Proyeksi Kebutuhan SMP di Kalimantan Barat Tahun 2025-2045

No	Kabupaten/ Kota	Baseline 2022	Kebutuhan SMP (unit)				
			2025	2030	2035	2040	2045
1	Sambas	161	138	144	150	155	159
2	Mempawah	96	67	71	74	77	79
3	Sanggau	133	108	114	119	122	125
4	Ketapang	175	126	133	139	143	146
5	Sintang	144	94	99	104	108	111
6	Kapuas Hulu	119	56	59	62	64	66
7	Bengkayang	93	64	68	72	76	79
8	Landak	118	88	94	98	102	105
9	Sekadau	69	47	50	52	54	55
10	Melawi	124	51	55	58	60	62
11	Kayong Utara	48	29	31	33	35	36
12	Kubu Raya	252	138	148	158	166	174

13	Kota Pontianak	119	143	148	151	153	155
14	Kota Singkawang	47	53	57	60	63	67
Kalimantan Barat		1.698	1.202	1.271	1.330	1.378	1.419

Jumlah Sekolah Menengah Atas di Kalimantan Barat pada tahun 2022 adalah 1.698 unit dengan jumlah terbanyak berada di Kabupaten Kubu Raya yaitu 252 unit. Kabupaten Ketapang merupakan kabupaten kedua yang memiliki jumlah SMA terbanyak yaitu 175 unit. Kebutuhan Sekolah Menengah Atas pada tahun 2025 di Kalimantan Barat mencapai 1.202

dengan kebutuhan terbesar berada di Kota Pontianak dengan Kebutuhan sebesar 143 unit. Pada tahun 2045 kebutuhan SMA di Kalimantan Barat mencapai 1.419 unit. Untuk lebih jelasnya mengenai Proyeksi Kebutuhan SMA di Kalimantan Barat tahun 2025-2045 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 161 Proyeksi Kebutuhan SMA di Kalimantan Barat tahun 2025-2045

No	Kabupaten/ Kota	Baseline 2022	Kebutuhan SMA (unit)				
			2025	2030	2035	2040	2045
1	Sambas	161	138	144	150	155	159
2	Mempawah	96	67	71	74	77	79
3	Sanggau	133	108	114	119	122	125
4	Ketapang	175	126	133	139	143	146
5	Sintang	144	94	99	104	108	111
6	Kapuas Hulu	119	56	59	62	64	66
7	Bengkayang	93	64	68	72	76	79
8	Landak	118	88	94	98	102	105

No	Kabupaten/ Kota	Baseline 2022	Kebutuhan SMA (unit)				
			2025	2030	2035	2040	2045
9	Sekadau	69	47	50	52	54	55
10	Melawi	124	51	55	58	60	62
11	Kayong Utara	48	29	31	33	35	36
12	Kubu Raya	252	138	148	158	166	174
13	Kota Pontianak	119	143	148	151	153	155
14	Kota Singkawang	47	53	57	60	63	67
Kalimantan Barat		1.698	1.202	1.271	1.330	1.378	1.419

Tabel 2. 162 Kebutuhan Perguruan Tinggi

Kebutuhan Perguruan Tinggi di Kalimantan Barat pada tahun 2025 berjumlah 82 unit. Kebutuhan Perguruan Tinggi terbanyak berada di Kota Pontianak yaitu 10 Perguruan Tinggi. Sedangkan Kabupaten Kayong Utara merupakan Kabupaten yang membutuhkan Perguruan Tinggi paling kecil yaitu 2 Unit. Kebutuhan Perguruan Tinggi di Kalimantan Barat pada tahun 2045 berjumlah 97 unit. Kebutuhan Perguruan Tinggi terbanyak berada di Kabupaten Kubu Raya yaitu 12 Perguruan Tinggi. Sedangkan Kabupaten Kayong Utara merupakan Kabupaten yang membutuhkan Perguruan Tinggi paling kecil yaitu 2 Unit.

Tabel 2. 162 Proyeksi Kebutuhan Perguruan Tinggi di Kalimantan Barat

Tahun 2025 - 2045

No	Kabupaten/ Kota	Tahun				
		2025	2030	2035	2040	2045
1	Sambas	9	10	10	11	11
2	Mempawah	5	5	5	5	5
3	Sanggau	7	8	8	8	9
4	Ketapang	9	9	10	10	10
5	Sintang	6	7	7	7	8
6	Kapuas Hulu	4	4	4	4	5
7	Bengkayang	4	5	5	5	5
8	Landak	6	6	7	7	7

9	Sekadau	3	3	4	4	4
10	Melawi	4	4	4	4	4
11	Kayong Utara	2	2	2	2	2
12	Kubu Raya	9	10	11	11	12
13	Kota Pontianak	10	10	10	11	11
14	Kota Singkawang	4	4	4	4	5
Kalimantan Barat		82	87	91	95	97

Sumber : Hasil analisis tahun 2024

2.6.2.7. Sarana Kesehatan

1. Puskesmas

Pada tahun 2022 jumlah Puskesmas di Kalimantan Barat adalah 244 unit. Puskemas terbanyak berada pada Kabupaten Sambas yaitu 28 unit diikuti dengan Kabupaten Kapuas Hulu yaitu 24 unit. Kebutuhan Puskemas di Kalimantan Barat pada tahun 2025 adalah 48 unit dan sampai tahun 2045 mencapai 57 unit. Berdasarkan hal tersebut dapat dikatakan bahwa ketersediaan puskemas di Kalimantan Barat telah

memenuhi SNI, hanya saja perlu peningkatan fasilitas, tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan sesuai dengan Permenkes Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat agar tingkat pelayanan kesehatan dapat menjangkau seluruh masyarakat. Untuk lebih jelasnya mengenai Proyeksi Jumlah Kebutuhan Puskesmas di Kalimantan Barat 2025-2045 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2. 162 Proyeksi Jumlah Kebutuhan Puskesmas di Kalimantan Barat 2025-2045

No	Kabupaten/ Kota	Baseline 2022	Kebutuhan Puskesmas (unit)				
			2025	2030	2035	2040	2045
1	Sambas	28	6	6	6	6	6
2	Mempawah	17	3	3	3	3	3
3	Sanggau	16	4	5	5	5	5
4	Ketapang	14	5	5	6	6	6

No	Kabupaten/ Kota	Baseline 2022	Kebutuhan Puskesmas (unit)				
			2025	2030	2035	2040	2045
5	Sintang	19	4	4	4	4	4
6	Kapuas Hulu	24	2	2	2	3	3
7	Bengkayang	21	3	3	3	3	3
8	Landak	22	4	4	4	4	4
9	Sekadau	12	2	2	2	2	2
10	Melawi	11	2	2	2	2	2
11	Kayong Utara	11	1	1	1	1	1
12	Kubu Raya	20	6	6	6	7	7
13	Kota Pontianak	20	6	6	6	6	6
14	Kota Singkawang	9	2	2	2	3	3
Kalimantan Barat		244	48	51	53	55	57

Sumber: Analisis Tim Pokja Sapras Bappeda Prov. Kalbar, 2023

2. Puskesmas Pembantu

Puskesmas Pembantu merupakan jaringan pelayanan puskesmas yang berperan memberikan pelayanan kesehatan secara permanen di suatu lokasi dalam wilayah kerja Puskesmas. Jumlah puskesmas pembantu di Kalimantan Barat pada tahun 2022 adalah 794 unit dengan jumlah terbanyak berada di Kabupaten Kapuas Hulu. Secara Keseluruhan kebutuhan Puskesmas Pembantu di Kalimantan

Barat memiliki jumlah yang cukup. Kebutuhan Puskemas Pembantu pada tahun 2025 adalah 192 unit dan tahun 2045 adalah 227 unit. Namun hanya Kota Pontianak yang jumlah puskesmas pembantunya memerlukan penambahan. Berdasarkan SNI 03-1733-2004 Tata cara perencanaan lingkungan perumahan di perkotaan, Kota Pontianak membutuhkan 23 unit pada tahun 2025 dan pada tahun 2045

membutuhkan 25 unit sementara jumlah yang tersedia adalah 6 unit.

Keberadaan Puskesmas Pembantu sebagai pendukung Puskesmas perlu didukung dengan fasilitas, tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan sesuai dengan Permenkes Nomor 43

Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat agar pelayanan kesehatan dapat menjangkau seluruh masyarakat. Untuk lebih jelasnya mengenai Proyeksi Jumlah Kebutuhan Puskesmas Pembantu di Kalimantan Barat 2025-2045 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2. 163 Proyeksi Jumlah Kebutuhan Puskesmas Pembantu di Kalimantan Barat
Tahun 2025-2045

No	Kabupaten/ Kota	Baseline 2022	Kebutuhan Puskesmas Pembantu (unit)				
			2025	2030	2035	2040	2045
1	Sambas	76	22	23	24	25	25
2	Mempawah	57	11	11	12	12	13
3	Sanggau	64	17	18	19	20	20
4	Ketapang	20	20	21	22	23	23
5	Sintang	59	15	16	17	17	18
6	Kapuas Hulu	143	9	9	10	10	11
7	Bengkayang	98	10	11	12	12	13
8	Landak	56	14	15	16	16	17
9	Sekadau	58	8	8	8	9	9
10	Melawi	43	8	9	9	10	10
11	Kayong Utara	26	5	5	5	6	6
12	Kubu Raya	68	22	24	25	27	28

No	Kabupaten/ Kota	Baseline 2022	Kebutuhan Puskesmas Pembantu (unit)				
			2025	2030	2035	2040	2045
13	Kota Pontianak	6	23	24	24	25	25
14	Kota Singkawang	20	8	9	10	10	11
Kalimantan Barat		794	192	203	213	221	227

Sumber: Analisis Tim Pokja Supras Bappeda Prov. Kalbar, 2023

3. Klinik Bersalin/ Rumah Bersalin

Rumah bersalin adalah sebuah institusi kesehatan yang menyediakan pelayanan oleh ahli profesional dan peralatan spesialis untuk pemeriksaan kesehatan ibu hamil dan persalinan, rawat inap dalam jangka waktu yang dibutuhkan, serta rawat jalan bagi ibu hamil dan bayi. Rumah bersalin mengakomodasi kebutuhan kesehatan ibu hamil mulai dari awal kehamilan sampai proses persalinan dan pemulihan diri setelah persalinan serta pasca persalinan. Rumah bersalin memiliki berbagai program yang mendukung kegiatan medisnya, diantaranya adanya sarana untuk informasi dan konsultasi serta pemeriksaan baik dari segi fisik, psikis maupun sosial yang diperuntukkan terutama bagi kaum ibu hamil. Pada tahun 2022 jumlah klinik bersalin/ rumah bersalin di Kalimantan Barat adalah 6 unit yang terdapat di Kota Pontianak 2 unit, Kabupaten Kubu Raya 2 unit, kabupaten Kapuas Hulu 1 unit dan Kota Singkawang 1 unit. Kebutuhan Klinik Bersalin/ Rumah Bersalin di Kalimantan Barat pada tahun 2025 mencapai 192 unit dan tahun 2045 mencapai 227 unit. Untuk lebih jelasnya mengenai Kebutuhan Klinik Bersalin/ Rumah Bersalin di Kalimantan Barat 2025-2045 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2. 164 Proyeksi Jumlah Kebutuhan Klinik Bersalin/ Rumah Bersalin di Kalimantan Barat 2025-2045

No	Kabupaten/ Kota	Baseline 2022	Kebutuhan Klinik Bersalin (unit)				
			2025	2030	2035	2040	2045
1	Sambas	-	22	23	24	25	25
2	Mempawah	-	11	11	12	12	13

No	Kabupaten/ Kota	Baseline 2022	Kebutuhan Klinik Bersalin (unit)				
			2025	2030	2035	2040	2045
3	Sanggau	-	17	18	19	20	20
4	Ketapang	-	20	21	22	23	23
5	Sintang	-	15	16	17	17	18
6	Kapuas Hulu	1	9	9	10	10	11
7	Bengkayang	-	10	11	12	12	13
8	Landak	-	14	15	16	16	17
9	Sekadau	-	8	8	8	9	9
10	Melawi	-	8	9	9	10	10
11	Kayong Utara	-	5	5	5	6	6
12	Kubu Raya	2	22	24	25	27	28
13	Kota Pontianak	2	23	24	24	25	25
14	Kota Singkawang	1	8	9	10	10	11
Kalimantan Barat		6	192	203	213	221	227

Sumber : Analisis Tim Pokja Saprass Bappeda Prov. Kalbar, 2023

4. Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu)

Posyandu (Pos Pelayanan Terpadu) adalah salah satu program kesehatan masyarakat yang dicanangkan oleh pemerintah Indonesia untuk meningkatkan kesehatan ibu dan anak di wilayah perkotaan dan pedesaan. Kebutuhan Posyandu di Kalimantan Barat pada tahun 2025 mencapai

4.613 unit. Berdasarkan hasil proyeksi, Kota Pontianak membutuhkan posyandu terbanyak yaitu 549 unit. pada tahun 2045 kebutuhan posyandu di Kalimantan Barat mencapai 5.458 unit. untuk lebih jelasnya mengenai kebutuhan Posyandu di Kalimantan Barat dapat dilihat pada

tabel Proyeksi Jumlah Kebutuhan Posyandu di Kalimantan Barat 2025-2045 berikut ini.

Tabel 2. 165 Proyeksi Jumlah Kebutuhan Posyandu di Kalimantan Barat 2025-2045

No	Kabupaten/ Kota	Baseline 2022	Kebutuhan Posyandu (unit)				
			2025	2030	2035	2040	2045
1	Sambas		529	553	575	594	611
2	Mempawah		257	271	284	295	304
3	Sanggau		413	436	455	470	482
4	Ketapang		486	512	533	550	562
5	Sintang		359	380	398	413	426
6	Kapuas Hulu		215	227	238	247	255
7	Bengkayang		246	263	278	292	304
8	Landak		340	360	377	392	404
9	Sekadau		180	190	199	206	212
10	Melawi		198	211	223	232	239
11	Kayong Utara		110	118	126	133	140
12	Kubu Raya		528	569	606	639	669
13	Kota Pontianak		549	567	580	589	595
14	Kota Singkawang		203	218	231	244	256

No	Kabupaten/ Kota	Baseline 2022	Kebutuhan Posyandu (unit)				
			2025	2030	2035	2040	2045
	Kalimantan Barat		4.613	4.875	5.102	5.296	5.458

Sumber : Analisis Tim Pokja Saprass Bappeda Prov. Kalbar, 2023

5. Balai Pengobatan/ Poliklinik

Klinik merupakan pelayanan medis dasar dan/atau spesialis yang diselenggarakan oleh lebih dari satu jenis tenaga kesehatan dan dipimpin oleh seorang tenaga medis. Tenaga medis adalah dokter, dokter spesialis, dokter gigi atau dokter gigi spesialis. Sementara balai pengobatan merupakan tempat pemeriksaan kesehatan di bawah pengawasan mantri kesehatan/tenaga medis dan merupakan tempat untuk memberikan pelayanan medik dasar secara rawat jalan. Pelayanan terutama bersifat kuratif dan preventif. Balai pengobatan umum merupakan fasilitas kesehatan kecil yang hanya

melayani pasien rawat jalan, diantaranya yaitu balai pengobatan mata, balai pengobatan penyakit paru, balai pengobatan anak, dan balai pengobatan gigi.

Jumlah Balai Pengobatan/Poliklinik di Kalimantan Barat pada tahun 2022 mencapai 244 unit. Kebutuhan Balai Pengobatan/Poliklinik pada tahun 2025 mencapai 2.306 unit, sehingga membutuhkan penambahan sejumlah 2.062 unit dan pada tahun 2045 mencapai 2.729 unit. Untuk lebih jelasnya mengenai Proyeksi Jumlah Kebutuhan Balai Pengobatan/ Poliklinik di Kalimantan Barat 2025-2045 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 166 Proyeksi Jumlah Kebutuhan Balai Pengobatan/Poliklinik di
Kalimantan Barat 2025-2045

No	Kabupaten/ Kota	Baseline 2022	Kebutuhan bali Pengobatan/ Poliklinik (unit)				
			2025	2030	2035	2040	2045
1	Sambas	28	265	277	287	297	305
2	Mempawah	17	128	136	142	148	152
3	Sanggau	16	207	218	228	235	241
4	Ketapang	14	243	256	267	275	281
5	Sintang	19	180	190	199	206	213
6	Kapuas Hulu	24	108	114	119	124	127
7	Bengkayang	21	123	132	139	146	152
8	Landak	22	170	180	188	196	202
9	Sekadau	12	90	95	99	103	106
10	Melawi	11	99	106	111	116	120
11	Kayong Utara	11	55	59	63	67	70
12	Kubu Raya	20	264	284	303	320	335
13	Kota Pontianak	20	274	283	290	294	297
14	Kota Singkawang	9	102	109	116	122	128
Kalimantan Barat		244	2.306	2.437	2.551	2.648	2.729

Sumber : Analisis Tim Pokja Saprass Bappeda Prov. Kalbar, 2023

6. Apotek

Apotek adalah sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktek kefarmasian oleh Apoteker (Permenkes No 73 Thn 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek). Jumlah Apotek yang tersedia di Kalimantan Barat pada tahun 2022 adalah 167 unit. Berdasarkan hasil proyeksi, kebutuhan apotek di Kalimantan Barat mencapai 192 unit, sehingga membutuhkan penambahan 25 unit apotek. Tahun 2045 kebutuhan apotek di Kalimantan Barat mencapai 227 unit. untuk lebih jelasnya mengenai proyeksi Kebutuhan Apotek dapat dilihat pada tabel Proyeksi Jumlah Kebutuhan Balai Apotek di Kalimantan Barat 2025-2045 di bawah ini.

Tabel 2. 167 Proyeksi Jumlah Kebutuhan Balai Apotek di Kalimantan Barat 2025-2045

No	Kabupaten/ Kota	Baseline 2022	Kebutuhan Apotek (unit)				
			2025	2030	2035	2040	2045
1	Sambas	22	22	23	24	25	25
2	Mempawah	7	11	11	12	12	13
3	Sanggau	6	17	18	19	20	20
4	Ketapang	8	20	21	22	23	23
5	Sintang	11	15	16	17	17	18
6	Kapuas Hulu	22	9	9	10	10	11
7	Bengkayang	15	10	11	12	12	13
8	Landak	5	14	15	16	16	17
9	Sekadau	5	8	8	8	9	9
10	Melawi	7	8	9	9	10	10
11	Kayong Utara	5	5	5	5	6	6
12	Kubu Raya	14	22	24	25	27	28

No	Kabupaten/ Kota	Baseline 2022	Kebutuhan Apotek (unit)				
			2025	2030	2035	2040	2045
13	Kota Pontianak	27	23	24	24	25	25
14	Kota Singkawang	13	8	9	10	10	11
Kalimantan Barat		167	192	203	213	221	227

Sumber: Analisis Tim Pokja Spras Bappeda Prov. Kalbar, 2023

2.6.2.8. Persampahan

Proyeksi timbulan sampah di Kalimantan Barat pada tahun 2025 mencapai 2.043.885,43 ton dengan Kota Pontianak menghasilkan timbulan sampah terbesar yaitu 243.174,01 ton diikuti Kabupaten Sambas dengan proyeksi timbulan sampah mencapai 234.464,67 ton. Pada tahun 2045 proyeksi timbulan sampah di Kalimantan

Barat mencapai 2.418.470,29 ton, dengan timbulan terbesar berada di Kabupaten Kubu Raya yaitu 296.607,94 ton diikuti Kabupaten Sambas dengan timbulan 270.663,68 ton. Untuk lebih jelasnya mengenai proyeksi timbulan sampah di Kalimantan Barat tahun 2025 -2045 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 168 Proyeksi Timbulan Sampah di Kalimantan Barat 2025-2045

No	Kabupaten/ Kota	Proyeksi Timbulan Sampah (Ton)				
		2025	2030	2035	2040	2045
1	Sambas	234.464,67	245.201,59	254.669,50	263.097,96	270.663,68
2	Mempawah	113.653,95	120.176,21	125.893,83	130.711,50	134.642,07
3	Sanggau	183.158,57	193.268,08	201.651,31	208.369,79	213.454,39
4	Ketapang	215.181,46	226.723,03	236.180,30	243.489,03	248.795,16
5	Sintang	159.231,80	168.260,17	176.168,41	182.991,86	188.804,09
6	Kapuas Hulu	95.370,35	100.765,40	105.479,86	109.505,26	112.829,89

7	Bengkayang	109.113,18	116.539,34	123.288,47	129.300,58	134.548,86
8	Landak	150.462,19	159.341,68	167.019,52	173.643,66	179.205,56
9	Sekadau	79.833,90	84.275,42	88.107,25	91.393,15	94.101,14
10	Melawi	87.525,91	93.516,47	98.617,30	102.818,45	106.059,04
11	Kayong Utara	48.665,29	52.454,58	55.949,66	59.139,85	62.002,93
12	Kubu Raya	234.081,84	251.911,72	268.305,99	283.269,29	296.607,94
13	Kota Pontianak	243.174,01	251.060,99	256.895,57	260.925,58	263.420,78
14	Kota Singkawang	89.968,22	96.412,49	102.367,60	93.902,84	113.334,75
Kalimantan Barat		2.043.885,34	2.159.907,15	2.260.594,57	2.332.558,81	2.418.470,29

Sumber : Analisis Tim Pokja Saprass Bappeda Prov. Kalbar, 2023

Proyeksi Kebutuhan bak sampah skala RW di Kalimantan Barat pada tahun 2025 mencapai 2.306 unit dengan jumlah terbanyak berada pada Kota Pontianak yaitu 274 unit diikuti Kabupaten Kubu Raya dengan kebutuhan 264 unit. Pada

tahun 2045 Kebutuhan bak sampah skala RW di Kalimantan Barat mencapai 2.729 unit. untuk lebih jelasnya mengenai kebutuhan bak sampah skala RW di Kalimantan Barat dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 169 Proyeksi Kebutuhan bak Sampah Skala RW di Kalimantan Barat 2025-2045

No	Kabupaten/ Kota	Kebutuhan Bak Sampah Skala RW (Unit)				
		2025	2030	2035	2040	2045
1	Sambas	265	277	287	297	305
2	Mempawah	128	136	142	148	152
3	Sanggau	207	218	228	235	241

No	Kabupaten/ Kota	Kebutuhan Bak Sampah Skala RW (Unit)				
		2025	2030	2035	2040	2045
4	Ketapang	243	256	267	275	281
5	Sintang	180	190	199	206	213
6	Kapuas Hulu	108	114	119	124	127
7	Bengkayang	123	132	139	146	152
8	Landak	170	180	188	196	202
9	Sekadau	90	95	99	103	106
10	Melawi	99	106	111	116	120
11	Kayong Utara	55	59	63	67	70
12	Kubu Raya	264	284	303	320	335
13	Kota Pontianak	274	283	290	294	297
14	Kota Singkawang	102	109	116	122	128
Kalimantan Barat		2.306	2.437	2.551	2.648	2.729

Sumber: Analisis Tim Pokja Saprass Bappeda Prov. Kalbar, 2023

Proyeksi Kebutuhan bak sampah skala Kelurahan di Kalimantan Barat pada tahun 2025 mencapai 192 unit dengan jumlah terbanyak berada pada Kota Pontianak yaitu 23 unit diikuti Kabupaten Kubu Raya dengan kebutuhan 22

unit. Pada tahun 2045 Kebutuhan bak sampah skala RW di Kalimantan Barat mencapai 227 unit. untuk lebih jelasnya mengenai kebutuhan bak sampah skala Kelurahan di Kalimantan Barat dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 170 Proyeksi Kebutuhan bak Sampah Skala Kelurahan di Kalimantan Barat 2025-2045

No	Kabupaten/ Kota	Kebutuhan Bak Sampah Skala Kelurahan (Unit)				
		2025	2030	2035	2040	2045
1	Sambas	22	23	24	25	25
2	Mempawah	11	11	12	12	13
3	Sanggau	17	18	19	20	20
4	Ketapang	20	21	22	23	23
5	Sintang	15	16	17	17	18
6	Kapuas Hulu	9	9	10	10	11
7	Bengkayang	10	11	12	12	13
8	Landak	14	15	16	16	17
9	Sekadau	8	8	8	9	9
10	Melawi	8	9	9	10	10
11	Kayong Utara	5	5	5	6	6
12	Kubu Raya	22	24	25	27	28
13	Kota Pontianak	23	24	24	25	25
14	Kota Singkawang	8	9	10	10	11
Kalimantan Barat		192	203	213	221	227

Sumber : Analisis Tim Pokja Saprass Bappeda Prov. Kalbar, 2023

Proyeksi Kebutuhan bak sampah skala Kecamatan di Kalimantan Barat pada tahun 2025 mencapai 48 unit dengan jumlah terbanyak

berada pada Kota Pontianak, Kabupaten Sambas dan Kabupaten Kubu Raya yaitu masing-masing 6 unit. Pada tahun 2045

Kebutuhan bak sampah skala RW di Kalimantan Barat mencapai 57 unit. untuk lebih jelasnya mengenai kebutuhan bak sampah skala

Kecamatan di Kalimantan Barat dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 171 Proyeksi Kebutuhan bak Sampah Skala Kecamatan di Kalimantan Barat 2025-2045

No	Kabupaten/ Kota	Kebutuhan Bak Sampah Skala Kecamatan (Unit)				
		2025	2030	2035	2040	2045
1	Sambas	6	6	6	6	6
2	Mempawah	3	3	3	3	3
3	Sanggau	4	5	5	5	5
4	Ketapang	5	5	6	6	6
5	Sintang	4	4	4	4	4
6	Kapuas Hulu	2	2	2	3	3
7	Bengkayang	3	3	3	3	3
8	Landak	4	4	4	4	4
9	Sekadau	2	2	2	2	2
10	Melawi	2	2	2	2	2
11	Kayong Utara	1	1	1	1	1
12	Kubu Raya	6	6	6	7	7
13	Kota Pontianak	6	6	6	6	6
14	Kota Singkawang	2	2	2	3	3

No	Kabupaten/ Kota	Kebutuhan Bak Sampah Skala Kecamatan (Unit)				
		2025	2030	2035	2040	2045
	Kalimantan Barat	48	51	53	55	57

Sumber : Analisis Tim Pokja Supras Bappeda Prov. Kalbar, 2023

Dalam dokumen RTRW Kalimantan Barat rencana sistem jaringan persampahan provinsi diarahkan berdasarkan kawasan pembangunan yang meliputi:

- 1) Kawasan perkotaan Singkawang yang meliputi Kota Singkawang, Kabupaten Sambas, dan Kabupaten Bengkayang;
- 2) KAMPORA yang meliputi Kota Pontianak, Kabupaten Mempawah, Kabupaten Landak, dan Kabupaten Kubu Raya

- 3) Kawasan perkotaan Ketapang yang meliputi Kabupaten Ketapang dan Kabupaten Kayong Utara;

- 4) Kawasan perkotaan Sanggau yang meliputi Kabupaten Sanggau dan Kabupaten Sekadau;

- 5) Kawasan perkotaan Sintang yang meliputi Kabupaten Sintang, Kabupaten Melawi, dan Kabupaten Kapuas Hulu.

2.6.2.9. Sarana Informasi dan Komunikasi

Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) memiliki hubungan yang sangat penting dengan transformasi ekonomi menuju Indonesia Emas 2045. TIK dapat menjadi katalisator utama dalam mendorong kemajuan perekonomian daerah dengan meningkatkan

daya saing, produktivitas, inovasi, dan inklusivitas. TIK juga dapat membantu Kalimantan Barat mencapai target-target pembangunan yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 2024-2045.

Tabel 2. 172 Persentase Penduduk Daerah Perkotaan menurut Provinsi, 2010-2035

Provinsi	Tahun					
	2010	2015	2020	2025	2030	2035
Kalimantan Barat	30,2	33,1	36,2	39,8	43,7	47,9
Kalimantan Tengah	33,5	36,6	40,2	44,1	48,3	52,9
Kalimantan Selatan	42,1	45,1	48,4	52,0	55,8	59,8

Kalimantan Timur	63,2	66,0	68,9	71,8	74,8	77,7
INDONESIA	49,8	53,3	56,7	60,0	63,4	66,6

Sumber : BPS, 2017

Kalbar berdasarkan proyeksi penduduk hingga tahun 2035, masih didominasi di daerah pedesaan. Sehingga peranan desa tidak dapat ditinggalkan dalam transformasi ekonomi di Kalimantan Barat dan Regional Kalimantan 2025-2045. Peranan desa sebagai resource based kota terutama sumberdaya alam perlu ditingkatkan sehingga kesejahteraan desa-kota dapat dikurangi dan tumbuh aktivitas ekonomi di desa yang mendukung kota sebagai pusat pertumbuhan dan menahan laju urbanisasi serta dalam rangka mengoptimalkan pemanfaatan

sumberdaya di pedesaan bagi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Sedangkan di perkotaan masih terdapat tekanan pengangguran dan peningkatan kesejahteraan. Salah satu kunci pemerataan pembangunan dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di Kalimantan Barat adalah pembangunan sarana Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) hingga seluruh wilayah pedesaan. Proyeksi kebutuhan jangkauan telekomunikasi di desa di Provinsi Kalbar dapat dilihat pada table berikut

Tabel 2. 173 Proyeksi Jangkauan Telekomunikasi Desa di Prov Kalbar tahun 2025 - 2045

KONDISI	REALISASI TAHUN					PROYEKSI TAHUN				
	2019	2020	2021	2022	2023	2025	2030	2035	2040	2045
Desa Blankspot	275	252	190	140	80					
Sinyal Lemah	893	922	924	914	831					
Sinyal Kuat	863	857	917	977	1138					
Internet Kantor Desa	598	858	1105	1400	1593					
Internet Warga	866	1082	1229	1433	1746					
Jumlah Desa	2031	2031	2031	2031	2049					

Sumber : Dinas Kominfo Provinsi Kalimantan Barat, 2024

Diharapkan pada tahun 2030 seluruh desa di Kalimantan Barat tidak ada blankspot dan dengan sinyal kuat. TIK memiliki banyak manfaat di wilayah pedesaan Kalimantan Barat, seperti:

2. Meningkatkan akses informasi dan layanan teknologi yang berkaitan dengan bidang pertanian, perikanan, kesehatan, pendidikan, dan lain-lain.
3. Meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan masyarakat pedesaan melalui sistem promosi penjualan, pemasaran, dan distribusi produk lokal secara online.
4. Meningkatkan kapasitas dan keterampilan masyarakat pedesaan dalam menggunakan TIK dan internet, sehingga dapat meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan mereka dalam pembangunan.
5. Meningkatkan kolaborasi dan sinergi antara masyarakat pedesaan dengan pihak-pihak lain, seperti pemerintah, swasta, akademisi, dan komunitas pegiat internet, dalam mendukung pengembangan internet pedesaan yang berkelanjutan dan bermanfaat.

2.6.2.10. Sarana Mitigasi Kebencanaan

Upaya pengurangan risiko bencana yang efektif dapat dilakukan adalah melalui mitigasi non struktural, melalui upaya menumbuh kembali kearifan lokal khususnya dalam menghadapi bencana banjir dan bencana kebakaran hutan dan lahan yang seringkali melanda sejumlah daerah di Kalimantan Barat. Kesiapsiagaan ini diharapkan sebagai bagian penerapan *Early Warning System* (system peringatan dini) berbasis masyarakat dilokasi yang rentan terhadap bencana. Secara struktural upaya mitigasi bencana berupa pemasangan *Early Warning System* (EWS) dan rambu-rambu jalur evakuasi dan rambu-rambu peringatan masih belum terpasang dan dilaksanakan dengan baik, kondisi ini tentu akan semakin memperburuk penanganan bencana apalagi masih banyaknya masyarakat dan para pihak terkait lainnya yang masih belum memahami, belum siap dan tanggap saat kejadian bencana.

Untuk itu diperlukan kerangka peraturan daerah yang kuat dan keterpaduan kelembagaan yang adaptif; disertai Peningkatan kesiapsiagaan dan pengelolaan risiko bencana sesuai proyeksi termasuk membangun dan memperkuat sistem peringatan dini (EWS bencana); Peningkatan kualitas Tata Kelola Penanggulangan Bencana yang profesional, transparan dan akuntabel; Penanganan darurat bencana yang cepat dan andal; dan Pemulihan infrastruktur, pelayanan public dan penghidupan masyarakat pasca bencana yebih baik dan aman. Selain itu perlu di bentuk Desa Tangguh bencana dan lokasi-lokasi yang kan menjadi titik-titik evakuasi. Penentuan titik-titik evakuasi diharapkan didukung dengan depot logistik. Pengembangan pusat logistik difokuskan pada pusat-pusat kawasan sehingga proses distribusi logistik pada saat terjadi bencana dapat cepat dilakukan.

2.7. Pengembangan Pusat Pertumbuhan Wilayah

Pusat Pertumbuhan Wilayah secara hirarki terdiri atas Pusat Kegiatan Nasional (PKN), Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN), Pusat Kegiatan Wilayah (PKW), dan Pusat Kegiatan Lokal (PKL). PKN adalah Kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala internasional, nasional atau beberapa provinsi. Terdapat satu PKN yakni PKN Pontianak terdiri atas seluruh Kota Pontianak, sebagian wilayah kecamatan Kecamatan Sungai Ambawang, sebagian wilayah Kecamatan Sungai Raya, dan sebagian wilayah Kecamatan Sungai Kakap di Kabupaten Kubu Raya, serta sebagian wilayah Kecamatan Jongkat di Kabupaten Mempawah.

PKN tersebut di atas, ditetapkan sebagai:

- Kawasan perkotaan yang berfungsi sebagai simpul utama transportasi skala nasional atau melayani beberapa provinsi
- Kawasan perkotaan yang berfungsi sebagai pusat kegiatan industri dan jasa skala nasional atau melayani beberapa provinsi; dan/atau
- Kawasan perkotaan yang berfungsi sebagai simpul utama kegiatan ekspor-impor atau pintu gerbang menuju kawasan internasional;
- Kawasan perkotaan yang berada di pesisir yang berfungsi sebagai pelabuhan hub internasional dan pintu gerbang ekspor hasil kegiatan kelautan dan perikanan

PKW adalah Kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa kabupaten/kota. PKW terdiri atas:

- a) Sambas di Kabupaten Sambas;
- b) Singkawang di Kota Singkawang;
- c) Mempawah di Kabupaten Mempawah;

- d) Ketapang di Kabupaten Ketapang;
- e) Sanggau dan Entikong di Kabupaten Sanggau;
- f) Entikong di Kabupaten Sanggau;
- g) Sintang di Kabupaten Sintang; dan
- h) Putussibau di Kabupaten Kapuas Hulu.

PKSN adalah Kawasan perkotaan yang ditetapkan untuk mendorong pengembangan kawasan perbatasan negara. PKSN terdiri atas:

- a) Temajuk (Paloh) dan Aruk di Kabupaten Sambas;
- b) Jagoi Babang di Kabupaten Bengkayang;
- c) Entikong di Kabupaten Sanggau;
- d) Sungai Kelik (Jasa) di Kabupaten Sintang; dan
- e) Badau di Kabupaten Kapuas Hulu

PKSN tersebut di atas, ditetapkan sebagai:

- Pusat perkotaan yang berpotensi sebagai pos pemeriksaan lintas batas dan berfungsi sebagai pintu gerbang internasional yang menghubungkan dengan negara tetangga;
- Pusat perkotaan yang merupakan simpul utama transportasi yang menghubungkan wilayah sekitarnya; dan/ atau
- pusat perkotaan yang merupakan pusat pertumbuhan ekonomi yang dapat mendorong perkembangan kawasan di sekitarnya.

PKW tersebut di atas, ditetapkan sebagai:

- Kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai simpul transportasi yang melayani skala provinsi atau beberapa kabupaten;
- Kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai pusat kegiatan industri

dan jasa yang melayani skala provinsi atau beberapa kabupaten;

- Kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai simpul kedua kegiatan ekspor-impor yang mendukung pkn; dan/atau
- Kawasan perkotaan yang berada di pesisir yang berfungsi atau berpotensi mendukung ekonomi kelautan nasional.

PKL adalah Kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten/kota atau beberapa kecamatan. PKL terdiri atas:

- a. Selakau, Pemangkat, Tebas, Sentebang, Sekura, dan Liku di Kabupaten Sambas;
- b. Sungai Duri, Samalantan, Bengkayang, Sanggau Ledo, dan Jagoi Babang di Kabupaten Bengkayang;
- c. Sungai Pinyuh, Anjongan, dan Sungai Kunyit di Kabupaten Mempawah;
- d. Karangan, Pahauman, Ngabang, dan Darit di Kabupaten Landak;
- e. Sungai Kakap, Rasau Jaya, dan Kubu di Kabupaten Kubu Raya;
- f. Teluk Batang, Sukadana, dan Tanjung Satai di Kabupaten Kayong Utara;
- g. Kendawangan, Manis Mata, Tumbang Titi, Sandai, dan Balai Berkuak di Kabupaten Ketapang;
- h. Tayan, Sosok, Kembayan, Balai Karangan, dan Pusat Damai di Kabupaten Sanggau;
- i. Sekadau, Nanga Mahap, Sungai Ayak, dan Balai Sepuak di Kabupaten Sekadau;
- j. Nanga Pinoh, Kota Baru, dan Nanga Ella di Kabupaten Melawi;

k. Nanga Merakai, Nanga Sepauk, Nanga Mau, dan Nanga Serawai di Kabupaten Sintang; dan

l. Nanga Silat, Semitau, Tepuai, dan Badau di Kabupaten Kapuas Hulu;

PKL tersebut di atas, ditetapkan sebagai:

- Kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai simpul transportasi yang melayani skala kabupaten atau beberapa kecamatan;
- Kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai pusat kegiatan industri dan jasa yang melayani skala kabupaten atau beberapa kecamatan; dan/atau
- Kawasan perkotaan yang berada di pesisir berfungsi atau berpotensi mendukung ekonomi kelautan lokal.

Selanjutnya Pusat Pertumbuhan Wilayah didukung dengan Kawasan Strategis Provinsi (KSP). Kawasan Strategis Provinsi adalah merupakan bagian wilayah provinsi yang diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup wilayah provinsi di bidang ekonomi, sosial budaya, sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi dan/atau lingkungan hidup. Deliniasi kawasan strategis provinsi berbentuk poligon dan bersifat indikatif. Kawasan strategis provinsi ditetapkan berdasarkan kriteria:

- a. Mendukung tujuan penataan ruang wilayah provinsi;
- b. Tidak bertentangan dengan kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah provinsi;

- c. Berdasarkan nilai strategis dari aspek eksternalitas, akuntabilitas dan efisiensi penanganan kawasan;
- d. Kesepakatan Masyarakat berdasarkan kebijakan terhadap tingkat kestrategisan kawasan yang ditetapkan di wilayah provinsi;
- e. Berdasarkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup wilayah provinsi;
- f. Memperhatikan faktor-faktor di dalam tatanan ruang wilayah provinsi yang memiliki kekhususan;
- g. Menyebutkan dan memperhatikan kawasan strategis nasional yang berada di wilayah provinsi;
- h. Dapat berhimpitan dengan kawasan strategis nasional, namun harus memiliki kepentingan/kekhususan yang berbeda serta harus ada pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi yang jelas;
- i. Mempertimbangkan kapasitas fiskal daerah dan kemampuan pemerintah daerah provinsi untuk bekerja sama dengan badan usaha dan/atau masyarakat;
- j. Dapat merupakan kawasan yang memiliki nilai strategis lainnya yang sesuai dengan kepentingan pembangunan wilayah provinsi;
- k. Dapat berupa kawasan yang berada pada satu kabupaten/kota atau lintas kabupaten/kota; dan
- l. Mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan

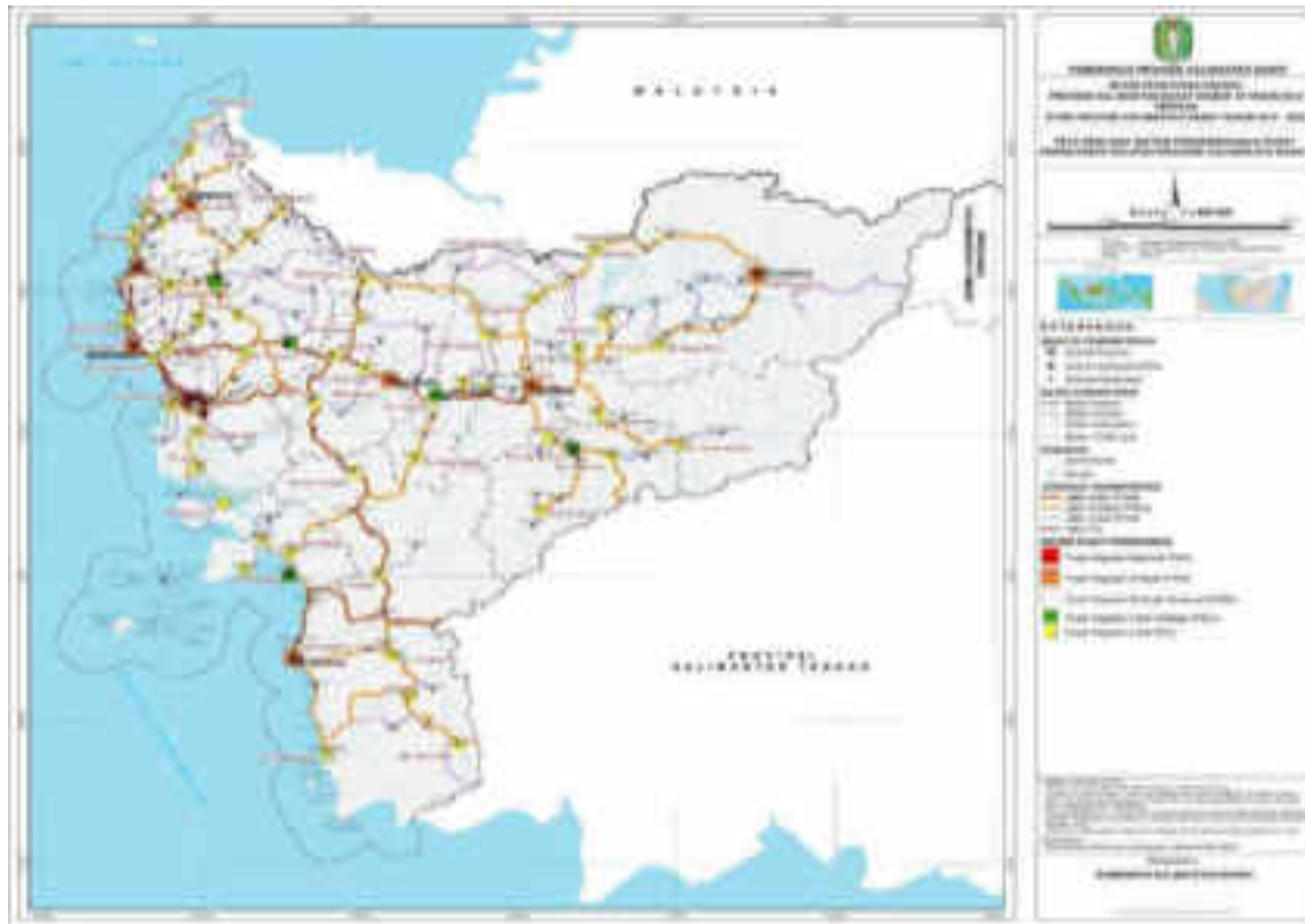
Pusat Pertumbuhan Wilayah sinergi dengan KSP
Dari Sudut Kepentingan Pertumbuhan Ekonomi dengan kriteria:

- memiliki potensi ekonomi cepat tumbuh;
- memiliki sektor unggulan yang dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi provinsi;
- memiliki potensi ekspor;
- memiliki pusat kegiatan yang mempunyai pengaruh terhadap sektor dan pengembangan wilayah;
- didukung jaringan prasarana dan fasilitas penunjang kegiatan ekonomi;
- ditetapkan untuk mempercepat pertumbuhan kawasan tertinggal;
- ditetapkan untuk mempertahankan tingkat produksi sumber energi dalam rangka mewujudkan ketahanan energi;
- memiliki pusat kegiatan pengelolaan, pengolahan dan distribusi bahan baku menjadi bahan jadi;
- memiliki kegiatan ekonomi yang memanfaatkan teknologi tinggi;
- memiliki fungsi untuk mempertahankan tingkat produksi pangan dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan. Kawasan strategis ini dapat ditetapkan sebagai Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B)
- memiliki pusat pengembangan produk unggulan; dan/atau
- memiliki pusat kegiatan perdagangan dan jasa

Berdasarkan kriteria tersebut, KSP dari Sudut Kepentingan Pertumbuhan Ekonomi terdiri atas:

- a. Kawasan Metropolitan Pontianak Raya;
- b. Kaw. Pelabuhan Sungai Kunyit;
- c. Kaw. Pariwisata Pesisir Kab. Sambas - Kota Singkawang - Kab. Bengkayang;
- d. Kaw. Perikanan dan Pariwisata Pulau Maya – P. Pelapis dan sekitarnya;
- e. Kaw. Industri Ketapang dan sekitarnya;
- f. Kaw. Industri Tayan-Toba dan sekitarnya.

Gambar 2. 29 Rencana Pusat Kegiatan Wilayah



Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2025-2045

Gambar 2. 30 Sebaran Pusat Kegiatan di Provinsi Kalimantan Barat



Gambar 2. 31 Sebaran Pusat Kegiatan di Provinsi Kalimantan Barat



PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

3.1. PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DI KALIMANTAN BARAT

Catatan evaluasi RPJPD 2005-2025 menunjukkan indikator kinerja urusan penyelenggaraan pemerintah daerah Provinsi Kalimantan Barat **mengalami peningkatan**. Kondisi ini tetap harus diimbangi dengan perbaikan kinerja terus-menerus dari waktu ke waktu, seiring tuntutan masyarakat terhadap kinerja pemerintah dan standar kehidupan masyarakat yang selalu meningkat.

Di sisi lain perubahan dan dinamika global baik terkait politik, ekonomi, demografi, lingkungan menjadi tantangan yang memerlukan tindakan preventif dan adaptif yang cepat dan tepat.

Dalam 20 tahun terakhir IPM Provinsi Kalimantan Barat hanya meningkat sebesar 7,75% dari 65,40 (2004) menjadi 70,47 (2023).

Angka ini menunjukkan ada berbagai kendala dari komponen pembentuk IPM tersebut. Aspek pendidikan HLS 12,67 dan RLS 7,71 yang menunjukkan tingkat pengetahuan masyarakat masih rendah yang disebabkan akses dan kualitas pendidikan belum merata. Aspek kesehatan yang ditunjukan dengan angka harapan hidup (AHH = 73,71) tertahan karena derajat kesehatan masyarakat rendah. Aspek kesejahteraan yang diukur melalui pengeluaran per kapita (PPP= 9,810,000) dipengaruhi rendahnya rata-rata pendapatan per kapita Kalimantan Barat. Secara umum, hal tersebut menggambarkan permasalahan pembangunan dan kualitas kehidupan masyarakat di Kalimantan Barat. Untuk lebih detail, Bab ini akan menguraikan setiap permasalahan utama pembangunan disertai faktor-faktor penghambatnya sebagai berikut:

3.1.1. Degradasi Lingkungan Hidup dan Ancaman Perubahan Iklim

Sebagai wilayah yang kaya akan keanekaragaman hayati, dalam beberapa dekade terakhir, Kalimantan Barat menghadapi tantangan krisis iklim yang memprihatinkan mulai dari degradasi hutan, pembalakan liar, kebakaran hutan hingga polusi udara.

Berdasarkan **Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) tahun 2015-2019**, perolehan data Kalimantan Barat cenderung mengalami penurunan dari 75,88 menjadi

65,92. Selama 4 tahun belakangan, IKLH tersebut mengalami periode naik-turun mulai dari 70,07 (2020); 72,90 (2021); dan 71,90 (2022). **Penurunan IKLH dapat disebabkan oleh berbagai faktor**, termasuk aktivitas manusia yang merusak lingkungan, deforestasi, polusi udara dan air, perubahan iklim, dan praktik-praktik yang tidak berkelanjutan dalam pemanfaatan sumber daya alam, peningkatan urbanisasi, industrialisasi, masifnya alih

fungsi lahan untuk kegiatan pembangunan dan perekonomian (perkebunan kelapa sawit, pertambangan, industri kayu yang tidak berkelanjutan), pengolahan limbah industri yang tidak sesuai standar, penggunaan api dalam manajemen pertanian serta metode pengeringan gambut yang menyebabkan kebakaran hutan dan lahan, hingga pertanian yang tidak berkelanjutan juga dapat berkontribusi terhadap penurunan kualitas lingkungan. Hal ini tercermin pada rincian perolehan IKLH tahun 2022, dimana Indeks Kualitas Air (55,52); Indeks Kualitas Udara (90,90); Indeks Kualitas Lahan (59,05); dan Indeks Kualitas Air Laut (63,30).

Peningkatan degradasi lingkungan hidup dan ancaman perubahan iklim di Kalimantan Barat perlu mendapatkan perhatian serius karena dapat berdampak negatif pada keberlanjutan ekosistem, kesehatan masyarakat, dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. **Salah satu contoh masalah yang berdampak luas tersebut adalah kasus banjir di Kabupaten Sintang pada tahun 2021.** Banjir dimaksud diakibatkan hujan ekstrem sehingga debit air di Sungai Kapuas dan Melawi meluap. Banjir di Sintang tersebut menjadi yang terbesar dan terlama sejak tahun 1963. Resiko banjir tersebut juga disebabkan oleh penebangan hutan dan perubahan tata guna lahan yang tidak berkelanjutan, daerah resapan air yang berkurang, pendangkalan parit dan sungai

serta sempadan DAS Kapuas yang tidak dimanfaatkan sesuai fungsinya.

Selain bencana banjir, bencana lainnya akibat degradasi lingkungan dan perubahan iklim adalah kebakaran hutan dan lahan serta angin puting beliung.

Bencana banjir dan kebakaran hutan dan lahan umumnya terjadi sesuai musim yaitu hujan dan panas, dan mengalami puncaknya pada bulan September - Oktober terutama di lahan gambut. Melihat dari siklus bencana seharusnya mitigasi bencana sudah dapat disusun dengan tepat untuk mengurangi risiko dan dampak yang diakibatkan oleh bencana terhadap masyarakat di kawasan rawan bencana. Saat ini memang sudah ada Kajian Resiko Bencana Nasional Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2022 - 2026, namun rekomendasi yang ada belum dilakukan maksimal dan terintegrasi dengan berbagai pihak terkait.

Sampai saat ini para mitra penanggulangan bencana belum dikelola dengan optimal, masih bekerja secara parsial dan hanya berinteraksi ketika terjadi bencana. Mitra penanggulangan bencana hanya terlibat dalam evakuasi dan bantuan kepada korban bencana sedangkan tahap penanggulangan bencana lainnya seperti inventarisasi, evaluasi, pemulihan, rehabilitasi rekonstruksi seringkali hanya mengandalkan pemerintah setempat.

Selain dukungan lintas sektoral tersebut, upaya konservasi dan pelestarian hutan di Kalimantan Barat menjadi krusial untuk

menjaga keberlanjutan lingkungan. Pemerintah setempat dan organisasi lingkungan bekerja sama untuk mengimplementasikan kebijakan dan praktik-praktik yang mendukung pelestarian hutan, pengelolaan hutan yang berkelanjutan, dan rehabilitasi lahan yang rusak. Selain itu,

melibatkan masyarakat lokal, mendukung pengembangan ekonomi berkelanjutan, dan meningkatkan pengawasan terhadap kegiatan ilegal juga merupakan bagian dari upaya untuk mengurangi tingkat deforestasi, dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari upaya pencegahan dan mitigasi bencana.

3.1.2. Rendahnya Daya Saing SDM

Rendahnya daya saing SDM di Kalimantan Barat disebabkan beberapa faktor seperti akses dan kualitas pendidikan belum merata, derajat kesehatan masyarakat yang masih perlu ditingkatkan, kualitas SDM dan partisipasi kerja yang belum kompetitif, pendapatan per kapita di bawah rata-rata regional, tingkat kesejahteraan dan produktivitas daerah yang rendah.

Sebagai salah satu provinsi terbesar di Indonesia, Kalimantan Barat memiliki luas wilayah 1.13 kali lebih besar daripada Pulau Jawa, namun populasi penduduknya hanya 5.541.376 jiwa dengan kepadatan penduduk sebesar 38 jiwa per km² (BPS, 2022), tersebar di wilayah pembangunan yang terdiri dari daerah pesisir, pedalaman dan perbatasan. Pembangunan Provinsi Kalimantan Barat di masa depan ditujukan untuk menghadapi tantangan geografis dan disparitas wilayah tersebut, tetapi juga untuk meningkatkan kualitas SDM dan tingkat partisipasi kerja yang merupakan prasyarat dalam upaya pembangunan dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Hingga kini, kedua hal tersebut masih

menjadi masalah pokok yang menjadi penghambat bagi ketersediaan SDM berdaya saing.

Sebagai dampak dari tantangan geografis dan konsekuensi disparitas wilayah tersebut adalah terbatasnya akses dan kualitas pendidikan (**jumlah sekolah dan tenaga pendidik yang tidak merata, termasuk kualitas infrastruktur pendidikan yang kurang memadai di daerah pedalaman dan perbatasan**).

Menurut data BPS angka partisipasi sekolah pada tahun 2023 untuk umur 7-12 (SD) berada pada angka 98,81; umur 13-15 (SMP) 92,92, dan umur 16-18 (SMA) 69,25 serta umur 19-24 (Perguruan Tinggi) berada pada angka 25,08.

Berdasarkan data pada Ikhtisar Data Pendidikan 2022/2023 Kemendikbud tahun 2023 menampilkan jumlah siswa putus sekolah pada jenjang pendidikan SD 1.092 siswa/i atau sekitar 0.19 persen, untuk SMP 384 siswa/i atau 0.17 persen dan untuk jenjang SMA sebanyak 167 siswa/i atau 0,13 persen serta untuk pendidikan SMK sebanyak 223 atau 0,26 persen.

Selain **faktor sosio-kultural**, dimana banyak anak usia sekolah yang tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi disebabkan oleh **pilihan hidup untuk mencari pekerjaan daripada pendidikan, jumlah sekolah lanjutan** di beberapa wilayah juga **tidak dapat menampung** seluruh siswa yang lulus dari pendidikan di jenjang sebelumnya.

Di bidang pendidikan kejuruan, rendahnya penyerapan lulusan dari sekolah menengah kejuruan di dunia kerja mengindikasikan relevansi kejuruan dan kebutuhan tenaga kerja kurang selaras dan belum mampu memenuhi ekspektasi dan profesionalitas. Data Badan Pusat Statistik tahun 2022 menunjukkan bahwa **hanya 6,09 persen lulusan SMK yang diserap dunia kerja**. Angka ini masih jauh dari angka serapan lulusan SMA yang berada pada posisi 20,29 persen dari total penduduk Kalimantan Barat yang bekerja.

Secara regional, perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Regional Kalimantan di tahun 2023, yaitu: Kalimantan Barat (5,05 & 69,42); Kalimantan Timur (6,37 & 64,73*); Kalimantan Selatan (4,31 & 69,76); Kalimantan Tengah (4,10 & 67,18) dan Kalimantan Utara (4,01 & 67,62*). Berdasarkan data tersebut menunjukkan bahwa **TPT dan TPAK Kalimantan Barat masih menjadi salah satu yang tertinggi di kawasan Kalimantan**.

Data di atas selaras dengan data IPM 2020-2023, Kalimantan Barat rata-rata meningkat sebesar 0,82 persen per tahun. Tercatat, IPM Kalimantan Barat pada tahun 2022 berada di angka 69,71 sedangkan pada tahun 2023 mengalami peningkatan menjadi 70,47. Meskipun terjadi perubahan status IPM Kalimantan Barat dari “sedang” menjadi “tinggi” di tahun 2023 tersebut, namun **sangat disayangkan bahwa daya saing IPM Kalimantan Barat masih menempati urutan terbawah di Regional Kalimantan**, yaitu Kaltara (72,88), Kalteng (73,73), Kalsel (74,66) dan Kaltim (78,20).

Jika disandingkan dengan Indeks Daya Saing Daerah tahun 2022 yang dirilis oleh BRIN, yang mencakup 12 Pilar, termasuk di antaranya adalah Pilar 6 (Keterampilan) dan Pilar 8 (Pasar Tenaga Kerja), maka **daya saing di Provinsi Kalimantan Barat berada pada angka 2,94 dan masih di bawah rata-rata nasional (3,26)**, Kalteng (3,13), Kalsel (3,14), Kaltim (3,27) dan Kaltara (3,19).

Dengan **pertumbuhan ekonomi Kalimantan Barat yang juga masih berada di bawah rata-rata nasional**, serta **jumlah lapangan pekerjaan yang tidak sebanding dengan angkatan kerja**, hal ini juga turut mempengaruhi daya tawar terhadap tingginya rendahnya upah pekerja di Kalimantan Barat. Upah Minimum Provinsi (UMP) Kalimantan Barat pada tahun 2023 sebesar Rp.2.608.601,- meningkat 7,16 persen dari UMP tahun 2022 sebesar Rp.2.434.328,-. Namun **di Regional Kalimantan, UMP**

Kalimantan Barat berada di posisi **terendah** dibandingkan dengan Kalsel (Rp.3.149.977,-), Kalteng (Rp.3.181.013,-), Kaltim (Rp.3.201.396,-) dan Kaltara (Rp.3.251.702,-).

Secara makro, capaian PDRB Per Kapita Kalimantan Barat sampai dengan tahun 2022 adalah sebesar Rp. 46.161.328.88 atau **tumbuh sebesar 140.95 persen**, dari mulanya 8.566.175.88 pada tahun 2005. Hal ini sesungguhnya menunjukkan terjadi perbaikan ekonomi, meskipun di mulai tahun 2019 terjadi pandemic covid-19 yang melanda seluruh dunia termasuk Indonesia, sehingga pertumbuhan ekonomi Kalimantan Barat terjadi kontraksi sebesar 1.82. Kalimantan Barat mampu melakukan pemulihan ekonomi yang cukup cepat sehingga di Tahun 2022 pertumbuhan ekonomi bisa tumbuh kembali seperti sebelum pandemic sebesar 5.07

Di sisi lain, pendapatan per kapita Kalimantan Barat **selama 20 tahun terakhir memang mengalami peningkatan hingga 87% akan tetapi di tingkat regional maupun nasional masih di posisi rendah.**

Struktur perekonomian Kalimantan Barat yang didominasi sektor pertanian dimana *share* terhadap PDRB tersebut tidak terlalu besar. Rantai nilai yang belum selaras antara hilirisasi dan industrialisasi sektor pertanian membuat produk-produk pertanian kurang memiliki nilai tambah. Hal ini berkorelasi dengan **ketimpangan pendapatan yang secara umum tumbuh 7.5 persen selama**

17 tahun terakhir dari 0.292 (2005) menjadi 0.314 (2022).

Tinggi rendahnya pendapatan per kapita akan berdampak pada kemampuan daya beli masyarakat terhadap komoditas kebutuhan bahan pokok, dan secara tidak langsung pada capaian indeks standar hidup layak dan IPM.

Sangat disayangkan, Kalimantan Barat merupakan Provinsi dengan PDRB per kapita terendah di Pulau Kalimantan dikarenakan sebagian besar (45,26%) tenaga kerja di Kalimantan Barat bekerja di sektor pertanian. Dari segi produktivitas tenaga kerja Kalimantan Barat tersebut berada di urutan 25 dr 34 provinsi yaitu 58 juta pertahun, sangat jauh tertinggal dari produktivitas nasional yang rata-rata 86 juta menurut data Kementerian Tenaga Kerja Tahun 2021. DKI Jakarta menduduki posisi pertama produktivitas daerah dengan nilai 400 juta per tahun serta menjadi provinsi yang paling diminati investor.

Mencermati kondisi ini maka untuk meningkatkan produktivitas daerah, maka pemerintah daerah harus memiliki konsep pembangunan ekonomi yang jelas agar tenaga kerja yang ada dapat terserap dan berpartisipasi di sektor unggulan untuk memberikan nilai tambah pada produk barang/jasa yang dihasilkan. Selain hilirisasi dan industrialisasi, maka diperlukan pula diversifikasi ekonomi agar kegiatan perekonomian tidak hanya bergantung pada satu sektor tertentu saja. Adapun hal tersebut

perlu dikaitkan dengan konsep penyiapan tenaga kerja melalui pendidikan sekolah kejuruan dan perguruan tinggi serta lembaga informal yang sesuai dengan kebutuhan pasar, maupun SDM yang sehat dan handal. Menurut hasil survei status gizi Indonesia (SSGI) Kemenkes, secara nasional prevalensi stunting di Indonesia turun dari 24,4% di tahun 2021 menjadi 21,6% di 2022. Sejalan dengan nasional, **prevalensi stunting** di Kalimantan Barat juga turun sebanyak 2% dari 2021 ke 2022, namun **masih berada di atas angka rata-rata nasional** yaitu 27.8 persen pada tahun 2022 dimana pada tahun 2021 berada pada angka 29,8 persen. Sementara pada tahun 2023 ditargetkan turun menjadi 23%.

Sebaran dan jangkauan (rentang kendali) fasilitas kesehatan, tenaga kesehatan, jaminan kesehatan dan sumber daya lainnya tidak merata sehingga membatasi upaya preventif dan promotif pembangunan kesehatan, budaya hidup bersih dan sehat, termasuk juga pemenuhan alat kontrasepsi bagi pasangan usia subur.

Berdasarkan data BPS Provinsi Kalimantan Barat jumlah penduduk Kalimantan Barat 5.623 ribu jiwa, dimana 57,08 persen telah memiliki jaminan kesehatan BPJS dengan

rincian 32,39 BPJS PBI dan 24,68 BPJS non PBI serta 11,84 menggunakan Jamkesda dan 2,37 persen menggunakan asuransi kesehatan swasta lainnya.

Sedangkan **42,92 persen dari jumlah penduduk Kalimantan Barat tersebut belum memiliki jaminan kesehatan.**

Khususnya **kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan di Kalimantan Barat baru mencapai 34,55 persen (2023)**, sedangkan Angka Kecelakaan Kerja mencapai 3.333 kasus. Menanggapi hal tersebut, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dan BPJS Ketenagakerjaan Wilayah Kalimantan Barat telah menandatangani Nota Kesepakatan Bersama tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan pada tanggal 21 Februari 2023, untuk menjamin keberlangsungan dukungan terhadap program tersebut. Terkait dengan hal tersebut, perlu adanya konsolidasi antara pemerintah dan swasta, upaya pembangunan dalam mendukung kinerja pertumbuhan ekonomi lokal yang signifikan, pengendalian terhadap inflasi daerah, serta memberikan dukungan perlindungan hukum dan jaminan sosial terhadap para pekerja di Kalimantan Barat.

3.1.3. Tata Kelola Pemerintahan yang Belum Responsif Terhadap Dinamika dan Tuntutan Pelayanan Publik

Tata kelola pemerintahan selalu menjadi isu strategis dalam menilai kinerja pemerintahan di berbagai level. Dengan berbagai tuntutan publik terhadap perbaikan kinerja dan

layanan pemerintah, dengan segala dinamika lingkungan strategis dan perkembangan teknologi, pemerintah daerah diharapkan dapat membentuk organisasi yang *agile* dan

responsif. Namun, sejauh ini, kelembagaan pelayanan publik dinilai belum responsif terhadap dinamika dan tuntutan publik tersebut.

Masalah utama yang mengemuka adalah, **tumpang tindih (*overlapping*) regulasi di berbagai bidang**. Meskipun kewenangan antara pusat dan daerah telah dibagi sesuai ketentuan, namun banyaknya irisan dalam urusan pemerintahan kerap menjadi batu sandungan dalam implementasi di lapangan, yang bukan saja menyebabkan konflik kepentingan, tetapi juga kisruh dalam hubungan kelembagaan. Selain itu, banyak pula ditemukan regulasi yang disusun belum berdasarkan kajian ilmiah sehingga regulasi lebih banyak bersifat sementara, kurang berkelanjutan serta tidak komprehensif.

Kinerja organisasi pemerintah dianggap lamban, seiring pelayanan dan pembangunan terlaksana secara parsial dan menyebabkan banyak program/kegiatan yang tidak efektif dan tidak memberikan dampak yang signifikan terhadap kemajuan dan kesejahteraan masyarakat. Penyebab lainnya adalah SDM aparatur yang belum profesional serta upaya digitalisasi pemerintahan yang belum maksimal, inovasi pelayanan publik yang tidak berkelanjutan, pengelolaan arsip masih manual dan belum mengarah pada konsep *e-government*, *e-office* dan *paperless* secara menyeluruh, serta lemahnya pengawasan internal dan kapabilitas APIP dalam *early warning system* terkait upaya mengurangi penyelewengan serta

meningkatkan efektifitas dan efisiensi kinerja organisasi.

Terkait dengan hal tersebut di atas, pemerintah pusat dan daerah sebenarnya telah melakukan Reformasi Birokrasi baik yang bersifat general maupun tematik, namun implementasinya dirasakan belum maksimal. Budaya kerja, sistem kerja yang mengarah pada digitalisasi dan *agile*, profesionalisme ASN belum optimal dan merata di semua OPD, hingga status Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) yang tidak bertambah dan/atau tidak berkembang menjadi lebih baik.

Dalam mendukung segala kebijakan pembangunan dan Reformasi Birokrasi tersebut, tentunya harus didukung dengan proses dan mekanisme perencanaan yang didukung oleh data yang tepat dan akurat, dimana Kerangka kebijakan Satu Data Indonesia (SDI) diharapkan dapat mendukung langkah tersebut. Meski demikian, masih ditemukan berbagai sumber data yang tidak sama dari para produsen data di tingkat pemerintah daerah maupun instansi vertikal, kesulitan dalam pengumpulan dan pemeriksaan data, termasuk juga konsistensi dari keberlanjutan pemutakhiran data yang bersifat *By Name By Address* (BNBA), serta *Research & Development* (R&D) yang belum selaras dan tidak bisa digunakan sebagai rekomendasi kebijakan yang relevan dengan isu strategis dan prioritas sebagaimana tercantum di dalam dokumen perencanaan,

serta isu-isu berkembang lainnya pada tingkat global dan regional.

Seiring dengan pentingnya data BNBA, teknologi *geotagging* dan kebijakan publik yang bersifat inklusif dan tepat sasaran, implementasi program pembangunan menemui kendala terkait legalitas identitas kependudukan masyarakat Kalimantan Barat yang belum merata, seperti banyaknya penduduk yang belum memiliki dokumen resmi kependudukan atau belum memperbaharui keterangan/informasi individunya di kantor pemerintahan setempat. Hal tersebut berdampak pada keakuratan dan validitas data BNBA serta program pembangunan yang bertumpu pada data tersebut hingga potensi konflik sosial yang muncul akibat ketidaktepatan sasaran.

Dalam rangka pemutakhiran data BNBA yang diatur melalui Regsosek, pemerintah pusat mendukung adanya proses dan mekanisme yang diatur baik oleh pemerintah daerah melalui kontribusi pembiayaan dan kegiatan sesuai dengan kemampuan daerah masing-masing, tetapi juga upaya pemutakhiran yang

dilakukan secara individu dan *bottom-up* dari level desa. Langkah ini tidak hanya akan menguji partisipasi aktif masyarakat di desa, tetapi juga kontribusi masyarakat tersebut dalam implementasi program pembangunan di tingkat desa secara lebih luas.

Pembangunan desa pada era disrupsi ini jauh lebih menantang seiring dengan munculnya kebijakan program/kegiatan dan keuangan desa yang spesifik, meski diketahui bahwa di banyak desa di Kalimantan Barat, pengelolaan dana desa belum optimal dalam rangka peningkatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) belum berkembang, kurangnya SDM dalam pengelolaan dan memanfaatkan potensi sumber daya alam di desa akibat kesenjangan pendidikan dan urbanisasi, serta belum optimalnya peran pemerintahan desa dalam penyebaran dan penyediaan Teknologi Tepat Guna (TTG) yang mendukung pengolahan SDA di desa tersebut.

3.1.4. Kurangnya Konektivitas, Aksesibilitas dan Pemerataan Pembangunan

Pertambahan penduduk di Kalimantan Barat terus meningkat sehingga diperlukan infrastruktur dasar serta konektivitas infrastruktur untuk menunjang kehidupan masyarakat agar hidup layak dan pertumbuhan ekonomi.

Kalimantan Barat memiliki wilayah yang sangat luas yaitu mencapai 147.307,00 km² dan menjadi provinsi ke empat luas wilayah

terbesar di Indonesia. Untuk menghubungkan berbagai wilayah yang ada di Kalimantan Barat memerlukan jaringan infrastruktur yang memadai melalui pembangunan jalan dan dermaga, baik di daerah pesisir, pedalaman dan perbatasan. **Terkait dengan pemerataan pembangunan, bahwa keberadaan infrastruktur penting (pelabuhan, bandara, rumah sakit dan**

lainnya) yang berkualitas baik masih terkonsentrasi di kawasan pesisir (Kabupaten Sambas, Kota Singkawang, Mempawah, Kota Pontianak, Kabupaten Kuburaya dan Kabupaten Ketapang) daripada kabupaten lainnya yang berada di pedalaman dan perbatasan. Konektivitas tersebut juga termasuk **operasional PLBN baru (Aruk, Jagoi Babang, Badau) yang belum aktif** sehingga kemajuan perdagangan antar negara belum dapat dimaksimalkan.

Berdasarkan data BPS tahun 2022, total panjang jalan di Kalimantan Barat adalah 18.771 km, yang terbagi 2.288 km jalan kewenangan negara, 1.535 km kewenangan provinsi dan 14.948 km kewenangan kabupaten/kota. Namun, kenyataannya **banyak jalan yang belum dapat dibangun maupun dirawat** secara simultan dan berkesinambungan dari masing-masing tingkat kewenangan. Satu Data Kalbar tahun 2021 menunjukkan bahwa sepanjang **360.88 km jalan di provinsi Kalbar mengalami rusak dan 252.15 km mengalami rusak berat**.

Seiring pertumbuhan pendudukan dan pembangunan infrastruktur tersebut, maka **urbanisasi** dari desa ke perkotaan menjadi konsekuensi yang tidak terhindarkan, dan berpengaruh terhadap **meningkatnya jumlah kendaraan, kemacetan, namun tidak diimbangi dengan peningkatan kapasitas jalan**. Menurut Direktorat Lalu Lintas Polda Kalimantan Barat tahun 2021,

sebanyak 147.259, dimana sepeda motor merupakan jenis kendaraan bermotor terbanyak. Angka akan terus meningkat jika dilihat dari tren pertumbuhan kendaraan.

Sebagai dampak lanjutan dari urbanisasi tersebut, maka pengembangan kawasan perkotaan harus diimbangi dengan ketersediaan perumahan layak huni.

Sayangnya perumahan layak huni tidak dapat diakses oleh semua kalangan. Harga tanah, bangunan dan bahan bangunan di perkotaan terus meningkat sedangkan pendapatan masyarakat bersifat relatif menyesuaikan dengan pertumbuhan dan kondisi ekonomi. Penduduk dengan penghasilan menengah ke bawah akhirnya mendiami rumah - rumah di kawasan kumuh di area perkotaan karena ketidakmampuan ekonomi. Menurut Kementerian PUPR, **kawasan kumuh di Kalimantan Barat pada tahun 2019 seluas 3.426 ha**. Kebutuhan akan hunian yang meningkat juga menyebabkan **berkembangnya kawasan permukiman yang tidak sesuai dengan tata ruang** sehingga sulit memperoleh PSU yang layak.

Salah satu infrastruktur dasar yang harus terpenuhi dalam pembangunan infrastruktur tersebut di atas adalah air bersih dan sanitasi layak. Berdasarkan dashboard air minum tahun 2022 di Kalimantan Barat **lebih dari 70% dari 5.399.082 penduduk Kalimantan Barat sudah memiliki akses terhadap air minum layak** yang banyak diperoleh dari ledeng, air hujan, dan (sumur bor/pompa,

sumur terlindung dan mata air terlindung), **meskipun tidak semua sumber air tersebut dapat dikatakan aman** sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 492/MENKES/PER/1V/2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum. Berdasarkan kriteria tersebut, baru **sekitar 7% rumah tangga yang dapat mengakses air minum aman ini**. Banyak faktor yang menyebabkan kondisi ini, mulai dari **kurangnya infrastruktur pipa air bersih yang mencakup seluruh wilayah di Kalimantan Barat. Sumber air baku sudah tercemar limbah industri, pertanian, dan rumah tangga serta tingginya biaya operasional dan pemeliharaan sistem penyediaan air minum.**

Selain air minum, masyarakat juga harus memiliki akses sanitasi layak. Berdasarkan data BPS 2022, baru **77% rumah tangga di Kalimantan Barat yang mampu mengakses sanitasi layak**. Meski demikian instalasi pengolahan air limbah sendiri masih terbatas. Berdasarkan *open data* kementerian PUPR Tahun 2022, Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD), **Kalimantan Barat belum memiliki IPAL perkotaan, kawasan permukiman maupun skala kawasan**. Kendala tersebut disebabkan oleh Pembangunan IPAL memerlukan investasi besar, ruang serta pemeliharaan berkala agar dapat beroperasi dengan efisien.

Pengolahan air limbah terkait erat dengan pengolahan sampah. Bertambahnya jumlah

penduduk serta berjalannya kegiatan perekonomian akan meningkatkan konsumsi dan juga meningkatnya volume dan jenis sampah yang dihasilkan. Menurut DLHK Kota Pontianak tahun 2022, **Kota Pontianak sebagai ibu kota provinsi menghasilkan volume sampah rata-rata 350 - 400 ton perhari** dan memiliki tren meningkat. Jika tidak dapat dikelola dengan benar akan mencemari lingkungan termasuk penyebaran penyakit. Selama ini **praktek pengelolaan sampah masih konvensional** (kumpul-angkut-buang), belum mengadopsi konsep ekonomi sirkular—sebuah konsep yang memanfaatkan nilai ekonomi sampah secara maksimal dengan menerapkan *reduce, reuse, recycle* (3R).

Di sisi lain, ketersediaan energi mempengaruhi perekonomian daerah karena menjadi salah satu pertimbangan investor untuk berinvestasi. Proyeksi dari Dinas ESDM Kalbar, kebutuhan energi listrik pada tahun 2025 sebesar 3.006 MW sedangkan di tahun 2030 menjadi 4.046 MW dan di akhir tahun 2050 kebutuhan energi listrik sebesar 10.893 MW untuk rumah tangga dan industri. Dari proyeksi ini terjadi peningkatan 100% per 5 tahun sedangkan **saat ini kapasitas terpasang pembangkit Listrik yang ada di Kalimantan Barat menurut data BPS tahun 2021 hanya mampu menyuplai sebesar 809,23 MW**. Hal ini menunjukkan perlunya penambahan pembangkit listrik. Jika dilihat dari rasio elektrifikasi Kalbar sudah sangat baik yaitu mencapai 99% pada tahun 2022

menurut data dari kementerian ESDM. **Namun masih terdapat desa-desa yang belum berlistrik.** Menurut PT PLN Kalbar pada tahun 2023 **masih terdapat 435 desa yang belum berlistrik atau sekitar 30% dari total desa dan kelurahan.**

Saat ini kebutuhan dasar tidak hanya air, energi, transportasi perumahan, tetapi juga informasi dan komunikasi menjadi bagian yang integral dalam kehidupan masyarakat modern. Jangkauan telekomunikasi dan internet memang sudah mejangkau seluruh kawasan di perkotaan, tetapi masih terdapat desa-desa yang belum terjamah teknologi. Menurut Satu Data Kalbar tahun 2023, **sebanyak 453 desa belum memiliki**

fasilitas internet. informasi. Dinas Kominfo Provinsi Kalbar menyatakan bahwa **terdapat 140 desa *blank spot*** di tahun 2022. Daerah blank spot ini mengindikasikan bahwa Kalimantan Barat masih memiliki wilayah tertinggal, terdepan, terluar atau dikenal dengan 3T.

Faktor-faktor tersebut di atas menggambarkan kesimpulan awal bahwa kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana belum sebanding dengan pertumbuhan jumlah penduduk dan perkembangan wilayah yang mendukung terbentuknya wilayah Kalimantan Barat yang maju, sejahtera dan berkelanjutan.

3.1.5. Kualitas Kehidupan Masyarakat Masih Perlu Ditingkatkan

Peningkatan kualitas kehidupan masyarakat di Kalimantan Barat perlu mendapatkan perhatian yang serius dan tindakan yang nyata dari para pemangku kepentingan, karena merupakan tujuan akhir dari terwujudnya standar kelayakan hidup yang baik. Namun demikian, identifikasi masalah pembangunan mengenai hal tersebut perlu dilakukan melalui pemetaan masalah dan dinamika sosial yang berkembang seperti kesenjangan sosial antar kelompok, tingkat kesetaraan dan keadilan gender yang rendah, pembangunan kepemudaan yang belum optimal, pemajuan kebudayaan yang juga belum optimal, perlindungan masyarakat dan ketertiban umum, dan pemahaman terhadap kesatuan bangsa dan politik yang masih perlu ditingkatkan.

Dalam kehidupan sosial, **kesenjangan** pendapatan, terutama antara kelompok masyarakat miskin dan rentan miskin, dengan kelompok masyarakat mampu menimbulkan banyak “penyandang masalah kesejahteraan sosial” (PMKS). Selain itu, kelompok masyarakat miskin merupakan sasaran dari berbagai bantuan sosial, yang diberikan berdasarkan basis data penerima (saat ini adalah DTKS, P3KE dan tahun-tahun berikutnya kemungkinan REGSOSEK) sebagai panduan dalam distribusi bantuan sosial.

Sistem penyaluran bantuan sosial melibatkan berbagai pihak (modal sosial) mulai dari pemerintah pusat sampai daerah belum dilengkapi dengan petunjuk teknis yang jelas terutama waktu dan cara penyaluran bantuan

sosial memicu kesalahan komunikasi maupun interpretasi di tingkat penyalur dan penerima bantuan sosial. **Modal sosial ini juga belum dikelola dengan maksimal** melalui program-program pemberdayaan masyarakat sebagai Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS). Hal ini dapat dilihat dari **rendahnya keterlibatan dan inisiatif masyarakat** baik itu perseorangan maupun melalui yayasan atau kelembagaan untuk turut andil memulai proses kegiatan sosial guna memperbaiki kehidupan dan masyarakat secara mandiri, seperti contoh penanganan PKMS maupun Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS).

Dalam perspektif kesetaraan gender, **ketidaksetaraan antara laki-laki dan perempuan menyebabkan perempuan lemah dalam menegakan martabat serta mendapatkan hak-haknya untuk rasa aman, kesehatan dan pekerjaan.** Hubungan yang berat sebelah ini menyebabkan perempuan dan anak rentan terhadap berbagai tindak kekerasan (fisik dan/atau verbal), tekanan sosial dan ekonomi, seksual, bahkan pembatasan aktivitas yang merupakan bentuk kekerasan yang paling banyak dialami perempuan dalam rumah tangga dan keluarga.

Komnas Perempuan mencatat bahwa **kasus kekerasan** terhadap cenderung terus meningkat dari tahun ke tahun, salah satunya adalah **melalui perkawinan anak.** Perkawinan anak dianggap kekerasan karena membahayakan fisik dan psikis anak

perempuan yang belum siap untuk melahirkan bahkan kelahiran bayi dari perkawinan anak cenderung meningkatkan prevalensi stunting. Perkawinan anak juga merampas hak - hak anak untuk tumbuh dan berkembang serta mendapatkan pendidikan yang berkontribusi terhadap angka putus sekolah. Akhirnya Anak-anak belum memiliki kemampuan untuk memperoleh penghasilan sehingga menambah ketergantungan kepada keluarga yang akhirnya meningkatkan kemiskinan.

Selain rentan mendapatkan kekerasan, anak-anak juga paling mudah dieksploitasi. **Banyak anak-anak dipaksa bekerja dengan alasan untuk membantu perekonomian keluarga.** Angka pekerja anak di Kalimantan Barat juga masih tinggi termasuk di perkebunan sawit. Pemerintah Kalimantan Barat bahkan telah mengeluarkan **SE Gubernur Kalimantan Barat untuk Pencanangan Sektor Kelapa Sawit Terbebas dari Pekerja Anak.** Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 juga secara tegas telah melarang pengusaha untuk mempekerjakan anak dibawah umur untuk melindungi hak asasi anak. Melihat kondisi pekerja anak di Kalimantan Barat menunjukkan pemenuhan hak-hak anak belum optimal.

Pemenuhan hak terhadap anak tidak hanya untuk anak-anak yang terlahir normal tetapi juga anak-anak berkebutuhan khusus (ABK). Pemerintah Kalimantan Barat secara khusus telah berusaha memenuhi hak ini melalui

Perda No 4 Tahun 2015 tentang perlindungan anak. Namun **kasus kekerasan dan pelecehan terhadap ABK masih sering dijumpai** dimana pelaku merupakan orang-orang dari lingkungan di sekitar korban.

Selain rentan terhadap kekerasan, kelompok perempuan dan anak-anak juga sering menjadi **komoditas perdagangan manusia**.

Secara fisik perempuan dan anak-anak lebih lemah, kurang mampu membela diri sendiri menyebabkan mereka mudah dieksploitasi.

Stereotip bahwa perempuan merupakan komoditas yang dapat dipertukar dan diperjualbelikan juga mendorong terus meningkatnya angka perdagangan perempuan. Kalimantan Barat memiliki posisi yang rentan dalam jalur perdagangan manusia ini ke luar negeri. **Terdapat 5 kabupaten yang berbatasan langsung dengan negara tetangga Malaysia menjadikan Kalimantan Barat sebagai lokasi tujuan dan transit perdagangan manusia**. Luasnya wilayah Kalimantan Barat serta keterbatasan personil dari pihak berwenang tidak memungkinkan untuk mengawasi jalur keluar masuk orang di perbatasan terutama jalur-jalur ilegal secara terus menerus.

Ketidaksetaraan hubungan kekuasaan menyebabkan banyak perempuan di Indonesia belum mampu mengakses pendidikan dengan layak. Hal ini berpengaruh terhadap pengetahuan, wawasan maupun keterampilan mereka di dunia kerja yang akhirnya membatasi kesempatan perempuan

untuk bekerja. Data BPS menunjukkan bahwa partisipasi tenaga kerja perempuan selalu lebih rendah, tidak terkecuali di Kalimantan Barat. **Tercatat partisipasi tenaga kerja perempuan dari 2021 ke 2022 menurun sekitar 0,9 dari 53,43 menjadi 52,51**. Perempuan menjadi kelompok marjinal yang kerap mendapatkan diskriminasi dalam mencari pekerjaan khususnya persyaratan penerimaan karyawan yang lebih mengutamakan perempuan yang belum menikah.

Di lain pihak, meskipun Kalimantan Barat mengalami puncak bonus demografi tahun 2022-2025 (penduduk usia produktif lebih banyak dari penduduk usia non produktif), yang berarti generasi muda merupakan penduduk dominan, kebijakan pembangunan kepemudaan juga perlu diperhatikan, mengingat peran mereka sebagai agen perubahan.

Agar mampu menjalankan peran yang sangat besar dan memaksimalkan potensi yang dimiliki di tengah disrupsi dalam pembangunan, pemuda Kalimantan Barat harus memiliki keunggulan dari sisi pendidikan, penguasaan teknologi, olahraga dan prima secara fisik kesehatan, kepribadian yang matang serta cara berpikir yang maju. Oleh karena itu, pembangunan kepemudaan menjadi strategis untuk membentuk karakter, pembentukan kapasitas, dan daya saing pemuda dalam rangka menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas. Meski demikian, masih banyak tantangan yang

perlu dihadapi. Misalnya, **hanya sedikit cabang olahraga di Kalimantan Barat yang mampu berprestasi sampai ke tingkat nasional, serta kurangnya pembinaan bakat usia dini hingga menjadi atlet yang professional.** Salah satu alasannya disebabkan oleh keterbatasan ruang publik, fasilitas olahraga dan klub olahraga yang memadai dan menampung tumbuh-kembang bakat-bakat tersebut. Selain bakat, pengkaderan dan pembinaan atlet memerlukan pelatih - pelatih handal yang bersertifikasi juga ketersediaan sarana dan prasarana olahraga yang representatif dan berstandar nasional yang sampai saat ini baik kuantitas dan kualitas masih terbatas.

Selain potensi di bidang olahraga, pemuda juga memiliki potensi dalam mewujudkan kemandirian ekonomi melalui wirausaha muda. Faktanya, jumlah wirausaha saat ini relatif sedikit di Indonesia, termasuk Kalimantan Barat. Hanya 0,2% penduduk Indonesia yang terjun menjadi wirausaha, sedangkan roda ekonomi negara bergerak memerlukan minimal 2% wirausaha dari total jumlah penduduk. **Salah satu faktor utama kurangnya minat berwirausaha adalah keterbatasan dan akses mendapatkan informasi dan permodalan.** Adalah tugas pemerintah untuk menyediakan hal yang dibutuhkan tersebut, selain itu juga memperluas pilihan dan peluang bisnis rintisan yang ada.

Pemerintah secara tegas mengeluarkan kebijakan untuk pemajuan kebudayaan

melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017. Kebudayaan terletak di dalam kelompok masyarakat yang ada di berbagai daerah sehingga peran masyarakat yang difasilitasi oleh pemerintah daerah sangatlah penting, termasuk di Provinsi Kalimantan Barat. Tetapi sampai saat ini proses pemajuan kebudayaan masih belum menunjukkan hasil maksimal. Pemajuan kebudayaan meliputi berbagai tradisi lisan, manuskrip, adat istiadat, ritus, pengetahuan tradisional, Teknologi tradisional, seni, bahasa, permainan rakyat dan olahraga tradisional merupakan investasi untuk membangun masa depan dan peradaban bangsa. Untuk menjadikan Kalimantan Barat sebagai salah satu pusat kebudayaan maka literasi masyarakat harus ditingkatkan.

Masalahnya literasi masyarakat masih rendah. Menurut UNESCO, Indonesia berada pada urutan kedua dari bawah soal literasi dunia, artinya minat baca sangat rendah. Minat baca masyarakat sangat memprihatinkan, hanya 0,001%. Artinya, dari 1,000 orang Indonesia, hanya 1 orang yang rajin membaca. Selain karena kurangnya minat baca, kunjungan perpustakaan rendah juga disebabkan karena kurang koleksi buku baik kontemporer maupun klasik yang dimiliki perpustakaan juga terbatas. Buku-buku klasik banyak tersebar tersebar di masyarakat selama ini belum terdokumentasikan dengan baik. Di sisi lain layanan perpustakaan yang masih konvensional belum digital karena sarana prasarana serta kuantitas dan kualitas

SDM dalam mendorong perpustakaan berbasis IT terbatas. Hal ini mengharuskan pengunjung perpustakaan datang langsung ke perpustakaan untuk mencari berbagai referensi yang dibutuhkan.

Literasi politik juga sangat penting, mengingat tingkat literasi politik di Kalimantan Barat sampai saat ini masih cukup rendah. Tingkat literasi ini berbanding lurus dengan partisipasi politik masyarakat terutama dalam pemilu. Meskipun data KPU Kalimantan Barat menunjukkan kenaikan partisipasi pemilih pada tahun 2020 dalam pemilihan kepala daerah meningkat 4,1% dibanding 2015 (70,3%), tetapi **tingkat partisipasi ini belum optimal karena masih dibawah target nasional pada pemilu 2019 yang mencapai 77,5%.**

Literasi masyarakat di bidang politik masih rendah menyebabkan mudah terpengaruh dengan politik identitas sangat rawan menimbulkan **konflik SARA. Kalimantan Barat memiliki sejarah terkait konflik antar etnis**, meskipun saat ini kehidupan masyarakat sudah kembali normal, tetapi perbedaan yang ada antar kelompok sering dimanfaatkan terutama di tahun-tahun politik untuk kepentingan politik dengan mengusung identitas kelompok dari segi kesukuan maupun agama.

Kurangnya pendidikan politik ini juga menyebabkan etika dan budaya politik juga

rendah sehingga kampanye hitam bahkan hoaks sering ditemukan untuk membunuh karakter lawan politik bahkan ASN juga sering terlibat politik praktis selama masa kampanye.

Di sisi lain fungsi perlindungan masyarakat dan ketertiban dan ketentraman umum bukanlah semata-mata dilakukan pemerintah. Untuk mewujudkan masyarakat madani yang mandiri dalam menjalankan kegiatan sosial, ekonomi maupun politik maka perlu keterlibatan masyarakat di setiap aspek untuk mengurangi beban pemerintah.

Sayangnya tingkat keterlibatan masyarakat masih rendah, menyebabkan pemerintah masih memerlukan sumber daya termasuk aparatur cukup banyak untuk membantu masyarakat bertahan terhadap berbagai situasi baik bencana, krisis, instabilitas ekonomi, sosial dan politik. Kapasitas ASN yang bertugas di bidang linmas dan trantib dalam memahami tugas-tugasnya juga masih rendah, mengakibatkan lemah dalam penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah.

Pemahaman masyarakat terhadap politik diharapkan mendorong demokrasi dan akses masyarakat dalam perumusan kebijakan publik sehingga mampu menjadi kontrol terhadap penyelenggaraan pemerintahan.

3.1.6. Rendahnya Dukungan Terhadap Transformasi Ekonomi Berkelanjutan

Kalimantan Barat memiliki cadangan sumber daya alam yang berlimpah dari hutan,

pertambangan, pertanian dan perikanan. Namun, ketergantungan terhadap salah satu sektor akan menyebabkan kerentanan.

Salah satu contoh pada 10 Juni 2023, kebijakan pemerintah pusat secara resmi memberlakukan **larangan ekspor bijih bauksit**. Hal ini **menyebabkan turunnya pertumbuhan ekonomi Kalimantan Barat dari sektor pertambangan di triwulan ke 2 tahun 2023 sekitar 12,06%**.

Di sisi lain, pemerintah daerah **belum memiliki pola pengembangan hilirisasi dan industrialisasi yang bersifat kearifan lokal dan berwawasan lingkungan**. Hal ini menyebabkan ekstraksi sumber daya alam menjadi pilihan utama meningkatkan pertumbuhan ekonomi sehingga **eksploitasi berlebihan tidak dapat dihindari**.

Pola konsumsi energi dan sumber daya alam, praktek pertanian, kegiatan pembangunan dan ekonomi saat ini jauh dari kata berwawasan lingkungan. Menurut Laporan

Global Resources Outlook 2019, ekstraksi sumber daya alam memiliki andil sebesar 5% terhadap peningkatan gas rumah kaca menyebabkan hilangnya 90% keragaman hayati dan cadangan air tanah.

Sumber daya alam ini harus dimanfaatkan secara berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan manusia dan menjaga ketersediaannya di masa depan.

Pemanfaatan teknologi dan energi terbarukan di Kalimantan Barat juga masih sangat terbatas, dimana SDM yang menekuni bidang tersebut juga belum dikembangkan secara maksimal.

Bukan hanya terkait hal teknis, proses perencanaan dan pembangunan wilayah belum sepenuhnya memahami dan mempraktekkan prinsip-prinsip keberlanjutan (*sustainability*), SDGs dan ekonomi hijau secara luas di berbagai tingkatan pemerintah daerah, termasuk kerjasama lintas sektoral

3.2. ISU STRATEGIS PEMBANGUNAN DI KALIMANTAN BARAT

3.2.1. Penelaahan Isu Strategis dan Dokumen Perencanaan Pembangunan

Perumusan isu strategis pembangunan dilakukan dengan melihat permasalahan di daerah serta disinkronisasi dengan kebijakan perencanaan pembangunan lainnya dalam penyusunan RPJPD. Oleh karena itu dilakukan penelaahan terhadap dokumen perencanaan pembangunan nasional dan pembangunan daerah lain dalam rangka sinkronisasi kebijakan pembangunan nasional dan daerah, serta pembangunan antar daerah. Penelaahan dilakukan terhadap

kebijakan nasional yang berdampak dan harus dipedomani oleh daerah. Sementara penelaahan terhadap dokumen perencanaan pembangunan Daerah lainnya dilakukan dengan menelaah dampak pembangunan yang saling berpengaruh terhadap daerah lain dan harus dijabarkan dalam dokumen perencanaan. Melengkapi penelaahan terhadap dokumen perencanaan lainnya, pada proses penyusunan RPJPD Provinsi Kalimantan Barat 2025-2045 dilakukan juga

penelaahan terhadap isu internasional yang mempengaruhi Indonesia termasuk Provinsi Kalimantan Barat. Hal ini dimaksudkan agar perencanaan yang dihasilkan komprehensif dengan mempertimbangan kondisi eksternal

yang ada sebagai dinamika internasional, nasional dan regional.

Adapun isu dan dokumen perencanaan yang ditelaah antara lain:

3.2.2. Isu – Isu Global, Nasional dan Regional

3.2.2.1. Perkembangan Demografi dan Urbanisasi Global

Dinamika demografi mempengaruhi perekonomian dan sosial. Bertambahnya penduduk harus diimbangi ketersediaan produk barang/jasa untuk memastikan kebutuhan konsumsi penduduk terpenuhi sehingga dapat hidup layak. Peningkatan produksi barang/jasa akan memerlukan input dari sumber daya alam yang semakin menipis yang akhirnya menimbulkan degradasi lingkungan. Ini membutuhkan pengelolaan yang bertanggung jawab agar dapat diwariskan ke generasi selanjutnya. Persaingan untuk mengelola berbagai sumber daya alam pasti tidak dapat dielakan yang dapat menimbulkan friksi antar negara bahkan dalam masyarakat itu sendiri.

Pertambahan penduduk juga meningkatkan kebutuhan permukiman dan perumahan sementara lahan terbatas menyebabkan sulitnya mendapatkan perumahan layak huni dengan harga terjangkau di perkotaan terutama di negara-negara maju.

Peningkatan kebutuhan perumahan juga akan mendorong migrasi global dari negara penduduk padat ke negara yang penduduk sedikit. Pertambahan penduduk juga mendorong arus urbanisasi global dalam rangka mencari kehidupan yang layak baik itu pekerjaan, pendidikan serta fasilitas lainnya yang harus diantisipasi agar tidak menimbulkan slum area dan konsentrasi kepadatan penduduk di satu wilayah saja.

Pertambahan penduduk dan arus urbanisasi di sisi sosial menimbulkan masalah-masalah sosial. Pada kota-kota besar pengangguran, kemiskinan, daerah kumuh, kriminalitas cenderung akan meningkat bahkan dapat menyebabkan konflik sosial jika tidak diimbangi dengan jaminan sosial yang berkeadilan bagi penduduk. Sedangkan pada daerah perdesaan tingkat produktivitas menurun dan pembangunan melambat karena kurangnya penduduk usia produktif.

3.2.2.2. Perubahan Geopolitik dan Geoekonomi

Persaingan politik antar negara bahkan perang di belahan dunia lain akan mempengaruhi kondisi politik bahkan ekonomi seluruh dunia tidak terkecuali Indonesia. Persaingan untuk memperebutkan

sumber daya alam, batas wilayah, pasar barang/jasa menjadi pemicu konflik internasional. Perubahan konstelasi politik dunia juga akan mempengaruhi perubahan pemimpin ekonomi dunia termasuk

perdagangan dunia dimana ini juga akan mengubah komoditas ekspor yang akan menyesuaikan dengan pangsa dan selera pasar sesuai preferensi pemimpin ekonomi dunia.

Selain itu penduduk kelas menengah akan semakin bertambah di masa depan dimana tren pertumbuhan ini mengarah ke wilayah asia yang juga mengubah gaya hidup dan pola konsumsi yang semakin beragam. Perubahan perkembangan kelas menengah menciptakan peluang ekonomi dengan semakin beragamnya produksi barang/jasa yang dibutuhkan yang harus dimanfaatkan dengan sebaiknya. Kemampuan untuk membaca permintaan pasar menjadi sangat penting dilakukan agar mampu mengikuti perubahan selera konsumen.

Untuk mengikuti perkembangan dan perubahan ini pemerintah harus terus

berinovasi serta memanfaatkan teknologi untuk memastikan komoditas ekspor mendapatkan pasar stabil sehingga mampu bersaing dipasar internasional.

Kondisi politik dunia tidak stabil memicu kewaspadaan terutama pergerakan ekonomi dari para pelaku ekonomi dunia yang cenderung akan wait and see menyebabkan terhambatnya arus perdagangan global khususnya ekspor dan impor. Sementara banyak bahan baku industri masih sangat tergantung pada impor dari luar negeri. Agar tidak terimbas perlambatan ekonomi global pemerintah harus memantapkan perekonomian daerah melalui berbagai program pembangunan ekonomi dengan meningkatkan nilai tambah dari komoditas unggulan serta penyerapan tenaga kerja lokal.

3.2.2.3. Perkembangan Teknologi

Teknologi berkembang secara eksponensial menyebabkan disrupsi di berbagai sektor kehidupan. Hampir semua kegiatan telah menjadi digital, dimana jarak dan waktu bukan menjadi hambatan lagi. Agar mampu mengimbangi kemajuan teknologi perlu kesiapan dan adaptasi masyarakat dengan cepat melalui: **Pertama**, investasi pada sumber daya manusia yang berkualitas agar memiliki literasi teknologi dan digital serta pola pikir maju yang menerima perubahan cara, pola, waktu kerja secara terbuka. **Kedua**, pola belajar mengajar yang inovatif serta memungkinkan transfer ilmu

pengetahuan dari berbagai berbagai sumber. Penggunaan *big data*, *open science*, *artificial intelligence* menjadi bagian kemajuan teknologi di bidang pendidikan yang harus diterima dengan terbuka tetapi tetap mampu disaring dengan baik agar tidak menjadi boomerang bagi perkembangan mental dan pola pikir pelajar dan mahasiswa. **Ketiga**, kapasitas infrastruktur telekomunikasi dan internet harus terus ditingkatkan agar menjangkau seluruh wilayah sehingga tidak ada lagi daerah blankspot dan masyarakat yang tidak terjamah kemajuan teknologi. **Keempat**,

kemajuan teknologi mengubah perekonomian menjadi digital. Berkembangnya e-commerce, digital payment, digital banking, dan berbagai macam aspek dalam perekonomian yang menjadi digital perlu diantisipasi oleh pelaku usaha dalam daerah agar tetap mampu bersaing para pelaku usaha dari seluruh wilayah baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Di sisi lain pemerintah juga harus meningkatkan proteksi terhadap berbagai usaha yang masuk kedalam pasar digital agar tidak merugikan

pelaku usaha di dalam negeri dan daerah.

Kelima, perkembangan teknologi mempermudah arus informasi yang meningkatkan keingintahuan publik terhadap proses penyelenggaraan pemerintahan. Untuk memenuhi ekspektasi publik maka Pemerintah harus mampu bekerja secara transparan, efektif dan efisien, memberi pelayanan dengan cepat, mudah dan murah dengan menjadikan digitalisasi pemerintah sebagai salah satu prioritas pembangunan.

3.2.2.4. Perubahan Iklim, Penurunan Daya Tampung dan Daya Dukung Lingkungan

Bertambahnya penduduk memberikan peluang dan tantangan. Tantangan utama bertambahnya penduduk adalah bagaimana menyediakan pangan dan energi dengan kondisi lingkungan yang semakin terbatas daya dukung dan daya tampungnya. Di sisi lain perilaku konsumtif manusia terhadap energi ditambah aktivitas produksi barang/jasa menghasilkan emisi karbon yang merupakan penyumbang terbesar terhadap pemanasan global dan perubahan iklim. Meningkatnya suhu rata-rata dunia setiap tahunnya berdampak negatif tidak hanya terhadap manusia tetapi juga terhadap lingkungan serta keragaman hayati yang ada didalamnya.

Perubahan iklim dan pemanasan global menyebabkan berbagai wilayah rentan terhadap bencana alam. Siklus kemarau semakin panjang menyebabkan kekeringan dan kebakaran hutan dan lahan. Sebaliknya curah hujan yang ekstrim menyebabkan

banjir yang sangat lama sehingga menimbulkan berbagai penyakit bagi manusia serta menghambat kegiatan produktif.

Bertambahnya penduduk berarti semakin banyak aktivitas manusia memanfaatkan lingkungan dalam rangka kegiatan pembangunan dan ekonomi. Aktivitas memanfaatkan lingkungan maupun jasa lingkungan yang tersedia secara berlebihan berdampak pada melemahnya daya dukung dan menurunnya daya tampung lingkungan. Aktivitas ekstraksi sumber daya alam yang tidak terkendali menyebabkan kerusakan lingkungan ditambah perubahan iklim ekstrim yang tidak menentu dapat menimbulkan bencana alam berkepanjangan bahkan bencana kelaparan yang harus diantisipasi. Pembangunan berkelanjutan dan ramah lingkungan menjadi arah kebijakan utama. Dimulai dengan penyediaan energi yang dapat diperbaharui sebagai daya tarik

investasi dan input utama kegiatan hilirisasi dan industrialisasi. Perubahan struktur ekonomi konvensional menjadi *green economy* yang mengutamakan kesejahteraan

dan kesetaraan bagi seluruh penduduk Kalimantan Barat serta mengurangi kerusakan lingkungan dalam setiap aktivitas perekonomian.

3.2.2.5. Perpindahan Ibu Kota Negara Ke Pulau Kalimantan

Pembangunan Ibukota Nusantara (IKN) di pulau Kalimantan tepatnya di Kabupaten Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur membawa banyak manfaat bagi pembangunan di Kalimantan. Tetapi juga dampak perpindahan IKN ini paling banyak berdampak terhadap penduduk dan lingkungan.

Pembangunan kewilayahan di regional Kalimantan menjadi prioritas untuk mendukung eksistensi IKN. Hal ini harus ditindaklanjuti oleh Pemerintah Provinsi maupun Kabupaten/Kota yang ada di Kalimantan Barat dengan mempersiapkan infrastruktur, regulasi, sumber daya manusia, pembiayaan pembangunan yang direncanakan secara matang sesuai prioritas pembangunan.

Perpindahan ibu kota negara ke Kalimantan Timur juga memberikan tantangan yang harus diantisipasi agar tidak menjadi masalah di masa depan. Pengembangan sektor unggulan, pengembangan kawasan strategis serta pengembangan kawasan perkotaan akan mendorong peningkatan arus migrasi dan urbanisasi terutama tenaga kerja ahli dan terampil akan meningkat ke ibukota maupun daerah hub yang menjadi lokasi pengembangan dalam hal ini termasuk Kalimantan Barat. Arus urbanisasi ke IKN

akan menyebabkan marginalisasi penduduk lokal, dimana penduduk lokal di Kalimantan akan terdesak oleh pendatang dalam jumlah banyak. Disisi lain efek migrasi akan menciptakan segmentasi pasar kerja bahkan ketegangan sosial bahkan konflik karena perbedaan tingkat kesejahteraan antara penduduk lokal dan pendatang.

Jika sumber daya manusia di Kalimantan Barat tidak dipersiapkan dengan baik, dikhawatirkan tidak mampu bersaing dengan tenaga kerja lain. Investasi terhadap kualitas sumber daya manusia harus ditujukan agar memiliki literasi digital, penguasaan teknologi dan prima secara fisik kesehatan, kepribadian yang matang serta cara berpikir yang maju sehingga siap menghadapi persaingan dalam dunia kerja baik persaingan antar tenaga kerja maupun perubahan pola kerja yang akan semakin mengurangi kebutuhan tenaga kerja karena digantikan kemajuan teknologi. Tantangan lain adalah kebutuhan akan pangan, kawasan permukiman dan perumahan, serta ekstraksi sumber daya alam untuk kegiatan pembangunan dan ekonomi juga ikut meningkat dengan signifikan. Menurut KemenpanRB, jumlah ASN diperkirakan akan pindah ke IKN mencapai 17000 personil belum termasuk keluarga. Migrasi penduduk bahkan

mencapai 3 kali lipat sejak adanya IKN menurut data BPS (2020).

Adanya IKN dapat mengubah pola penggunaan lahan dari pertanian menjadi non-pertanian, sehingga ketersediaan pangan akan semakin berkurang dan akan semakin ketergantungan dari daerah lain sebagai pemasok utama pangan di Kalimantan Timur. Hal ini harus ditangkal oleh Provinsi Kalimantan Barat sebagai peluang untuk ikut berkontribusi terhadap pasokan pangan di Kalimantan. Peningkatan produksi pertanian khususnya pangan harus dijaga, melalui kebijakan ketahanan pangan dengan menetapkan pemanfaatan dan penggunaan lahan pertanian dituangkan dalam kebijakan tata ruang wilayah agar tidak digunakan untuk kepentingan lain. Selanjutnya meningkatkan Nilai Tukar Petani agar petani sejahtera sehingga dapat terus bekerja di sektor pertanian secara produktif. Meningkatnya jumlah penduduk harus diimbangi dengan ketersediaan kawasan permukiman dan perumahan yang layak. Kenaikan harga tanah menjadi tidak terhindari, menyebabkan sulitnya mendapatkan hunian yang layak dan terjangkau. Pola pembangunan hunian selama ini tersebar atau sprawl perlu dikaji ulang untuk menghemat ruang serta pembatasan zona permukiman. Pengembangan kawasan permukiman juga perlu memperhatikan kondisi alam, seperti kontur, sumber daya alam, sumber air, maupun kondisi kebudayaan yang ada.

Selain itu, perencanaan zonasi juga harus didasarkan pada prediksi kebutuhan, bukan berdasarkan pengembangan secara natural. Dengan demikian, zonasi menjadi kunci, menghadapi arus migrasi karena adanya IKN. Ancaman terhadap ekosistem hutan serta hilangnya keragaman hayati akibat ekstraksi sumber daya alam maupun pemanfaatan jasa lingkungan untuk kegiatan pembangunan dan ekonomi karena perpindahan IKN di seluruh wilayah perlu dipertimbangkan dengan serius. Kondisi hutan Kalimantan secara umum terus menunjukkan tren angka deforestasi yang tinggi. Kalimantan telah kehilangan sekitar 14,4 juta ha hutan selama kurun waktu 1973-2015. Faktor utamanya adalah ekspansi perusahaan perkebunan sawit sebesar 7,8 juta ha dan industri HTI 1,3 juta Ha. Data deforestasi hingga tahun 2017 masih menunjukkan adanya loss biodiversity secara nasional seluas 0,48 juta ha dimana 0,3 juta ha berada di kawasan hutan alam primer. Oleh karena itu, adanya IKN memberi peluang peningkatan kesejahteraan di Kalimantan Barat sangat besar tetapi trade off terhadap degradasi lingkungan juga besar. Pemerintah harus mampu menjaga pembangunan di Kalimantan Barat agar tetap memperhatikan keberlangsungan hutan beserta keragaman hayati yang ada melalui pemanfaatan sumber daya alam yang bertanggung jawab dengan melibatkan masyarakat lokal agar tercipta rasa tanggung jawab sosial untuk menjaga dan

mempertahankan kelestarian lingkungan hidup.

3.2.3. Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional

Penelaahan kebijakan pembangunan nasional yang ditetapkan dalam RPJPN merupakan salah satu identifikasi faktor-faktor eksternal yang bertujuan untuk mendapatkan butir-butir kebijakan pemerintah terpenting, yang berhubungan, dan berpengaruh langsung terhadap perencanaan pembangunan daerah dalam 20 (dua puluh) tahun ke depan. Hasil telaahan pada dasarnya dimaksudkan sebagai sumber utama bagi identifikasi isu-isu strategis. Kebijakan yang diidentifikasi dapat berupa peluang atau, sebaliknya, ancaman bagi daerah selama kurun waktu 20 (dua puluh) tahun yang akan datang.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 merupakan dokumen meliputi seluruh aspek pembangunan mulai dari gambaran hasil pembangunan 2 dekade lalu dan visi, misi, sasaran dan arah kebijakan 20 tahun mendatang.

Berdasarkan Dokumen RPJPN 2025-2045, isu dan tantangan pembangunan ke depan, yaitu:

- Rendahnya tingkat produktivitas di tengah peningkatan persaingan global
- Kualitas dan kuantitas SDM dalam penelitian belum memadai
- Deindustrialisasi dini dan produktivitas sektor pertanian yang masih rendah

- Belum optimalnya pemanfaatan potensi pariwisata
- Belum optimalnya pemanfaatan potensi ekonomi laut
- Rendahnya kontribusi UMKM dan koperasi pada penciptaan nilai tambah ekonomi
- Produktivitas tenaga kerja Indonesia relatif tertinggal
- Pembangunan belum sepenuhnya menerapkan prinsip berkelanjutan
- Rendahnya penggunaan EBT dan efisiensi energi
- Kualitas pendidikan yang masih rendah
- Belum meratanya akses jaminan sosial
- Disharmoni regulasi dan kelembagaan instansi yang terfragmentasi
- Belum meratanya kualitas pelayanan publik
- Tingginya laju kehilangan dan rendahnya pemanfaatan keanekaragaman hayati

Maka dari itu dalam RPJPN 2025-2045 dirumuskan visi “Indonesia Emas 2045: visi **“NEGARA NUSANTARA BERDAULAT, MAJU DAN BERKELANJUTAN”** dengan 3 sasaran utama yaitu pendapatan perkapita setara negara maju, kemiskinan menuju 0% dan ketimpangan berkurang serta kepemimpinan dan pengaruh di dunia internasional meningkat. Visi ini dijabarkan sebagai berikut:

3.2.3.1. Berdaulat

Di Tahun 2045 Indonesia adalah negara kesatuan yang memiliki kemandirian dan kewenangan untuk mengatur penuh seluruh aspek kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara di wilayahnya. Hal ini terlihat dari 1) semakin kuatnya **ketahanan** di aspek ekonomi, sosial, politik, pertahanan dan keamanan untuk melindungi kedaulatannya dari ancaman dan tantangan internal maupun

3.2.3.2. Maju

Indonesia 2045 maju secara perekonomian, masuk dalam 5 negara dengan pendapatan terbesar dunia yang berbasis pengetahuan dan inovasi dengan budaya nusantara sebagai dasar penggerak ekonomi. Maju diwujudkan melalui: 1) memiliki **daya** untuk memenuhi kebutuhan secara mandiri, mampu bersaing di tingkat domestik dan internasional, mampu menghadapi krisis ekonomi global, mampu memberikan jaminan sosial yang berkeadilan serta mampu berdiplomasi mempengaruhi politik

3.2.3.3. Berkelanjutan

Pembangunan ekonomi tinggi seimbang dengan pembangunan sosial serta menjamin keutuhan dan keberlanjutan lingkungan hidup. Kesejahteraan masyarakat merata dengan lingkungan hidup yang sehat dan lestari serta bebas polusi.

Untuk mencapai visi ini, terdapat 8 misi, yaitu:

- **Mewujudkan transformasi sosial**, bertujuan membangun manusia sehat, cerdas, kreatif, sejahtera, unggul dan berdaya saing

eksternal. 2) Mampu mempertahankan jati diri sebagai negara **kesatuan** yang menjunjung tinggi kerakyatan dan permusyawaratan perwakilan. 3) tidak tergantung negara lain karena mampu memenuhi kebutuhan dalam negeri secara **mandiri**. 4) mampu memberikan perlindungan dan rasa **aman** bagi rakyat dalam segala aspek kehidupan.

internasional. 2) **Modern** dalam infrastruktur, sistem pemerintahan dalam pemberian pelayanan publik berbasis teknologi mutakhir, digitalisasi serta ramah lingkungan. 3) **SDM Inovatif** yang mampu memanfaatkan IPTEK untuk mendorong dan menciptakan inovasi pelayanan maupun produk-produk berkualitas di berbagai sektor. 4) **Tangguh** dan kuat menghadapi berbagai krisis multidimensional. 5) Memberikan **keadilan** yang merata kepada seluruh rakyat Indonesia di berbagai aspek kehidupan.

- **Mewujudkan transformasi ekonomi**, bertujuan untuk meningkatkan produktivitas, penerapan ekonomi hijau, transformasi digital, integrasi ekonomi domestik dan global serta pembangunan perkotaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi
- **Mewujudkan transformasi tata kelola**, bertujuan membangun regulasi dan tata kelola yang berintegritas dan adaptif
- **Memantapkan supremasi hukum, stabilitas dan kepemimpinan**

Indonesia, bertujuan memantapkan stabilitas ekonomi, politik, hukum, keamanan nasional dan ketangguhan diplomasi

- **Memantapkan ketahanan sosial budaya dan ekologi**, bertujuan memperkuat pembangunan individu, keluarga, komunitas, masyarakat, pembangunan karakter dan lingkungan yang mampu menyeimbangkan trade off antara sosial budaya dan ekologi, mengoptimalkan modal sosial untuk menghadapi berbagai bencana, guncangan maupun perubahan serta mampu berpartisipasi dalam pembangunan dan menjaga keberlanjutan sumber daya alam.

- **Pembangunan kewilayahan**, bertujuan untuk meningkatkan pemerataan dan keadilan pembangunan yang diterjemahkan dari transformasi sosial, ekonomi dan tata kelola yang dilandasi supremasi hukum, stabilitas dan kepemimpinan Indonesia

- **Dukungan sarana prasarana berkualitas yang ramah lingkungan**, menjadi kunci pembangunan wilayah dan dan pilar pendukung transformasi

Kesinambungan pembangunan untuk mengawal Indonesia Emas, diwujudkan melalui kaidah pelaksanaan efektif dan pembiayaan pembangunan.

Kedelapan misi ini diwujudkan dalam 17 arah kebijakan Pembangunan nasional yaitu:

No	Misi	Arah Kebijakan
1	Transformasi Sosial	IE1 Kesehatan untuk semua IE2 Pendidikan berkualitas yang merata IE3 Perlindungan sosial yang adaptif
2	Transformasi Ekonomi	IE4 Iptek, inovasi dan produktivitas ekonomi IE5 Penerapan ekonomi hijau IE6 Transformasi digital IE7 Integrasi ekonomi domestik dan global IE8 Perkotaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi
3	Transformasi Tata Kelola	IE9 Regulasi dan tata kelola yang berintegritas dan adaptif
4	Supremasi Hukum, Stabilitas dan Kepemimpinan Indonesia	IE10 Hukum berkeadilan, keamanan nasional tangguh dan demokrasi substansial IE11 Stabilitas ekonomi makro IE12 Ketangguhan berdiplomasi dan pertahanan berdaya gentar kawasan
5	Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi	IE13 Beragama maslahat dan berkebudayaan maju IE14 Keluarga berkualitas, kesetaraan gender dan masyarakat inklusif IE15 Lingkungan hidup berkualitas IE16 Ketahanan energi, air dan kemandirian pangan IE17 Resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim

No	Misi	Arah Kebijakan
6	Mewujudkan Pembangunan Kewilayahan yang merata dan berkeadilan	
7	Mewujudkan Sarana dan Prasarana yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan	
8	Mewujudkan Kestinambungan Pembangunan	

Dalam dokumen tersebut juga menjabarkan arahan kebijakan pembangunan khusus di wilayah Kalimantan Barat yang meliputi:

- Pengentasan kemiskinan pada daerah afirmasi 3T melalui perlindungan sosial adaptif,
- Penyelesaian masalah *outstanding boundary problem* (OPB)
- Pengembangan pusat-pusat industri di wilayah Kalimantan (industri hijau, industri alumina dan logam lainnya) kawasan perbatasan negara dan kawasan hutan hujan tropis
- Pengembangan kawasan perkotaan (Kota Pontianak)
- Mendorong pemanfaatan energi baru dan energi terbarukan untuk memperbaiki bauran pembangkit listrik sebagai pasokan di wilayah Kalimantan
- Pengembangan pelabuhan - pelabuhan simpul utama (Kijing) yang mendukung pengembangan kawasan ekonomi sebagai economic hub IKN secara terpadu
- Pengembangan alur laut kepulauan Indonesia (ALKI) I secara optimal untuk menghubungkan rantai pasok/nilai domestik nasional dan global dengan pembangunan dan pengembangan jaringan konektivitas terpadu
- Pengembangan bandara (Supadio) yang terintegrasi dengan wilayah untuk mendukung pariwisata dan konektivitas daerah
- Pembangunan jalan tol, jalan trans Kalimantan terutama pada koridor perbatasan antar negara

3.2.4. Isu-Isu Strategis Dalam Daerah

Berdasarkan gambaran kinerja selama 2 dekade, masalah pembangunan yang dihadapi di Kalimantan Barat, serta telaahan isu-isu global, nasional, daerah serta

dokumen RPJPN 2025-2045, maka dapat dirumuskan 6 isu strategis daerah sebagai berikut:

3.2.4.1. Lingkungan Hidup dan Perubahan Iklim

Isu strategis lingkungan hidup dan perubahan iklim di Kalimantan Barat kerap menjadi

perhatian global mengingat dampaknya yang luas dan serius terhadap ekosistem lokal dan

keberlanjutan hutan di Kalimantan sebagai paru-paru dunia.

Pemecahan masalah untuk isu-isu ini perlu melibatkan tindakan kolaboratif, termasuk pengurangan emisi gas rumah kaca, pelestarian dan restorasi ekosistem, adaptasi terhadap perubahan iklim, pengembangan energi terbarukan, dan perubahan pola konsumsi dan produksi yang berkelanjutan. Kesadaran masyarakat, dukungan kebijakan, dan kerjasama internasional-regional merupakan faktor-faktor penting dalam mengatasi tantangan lingkungan hidup dan perubahan iklim ini.

Untuk melindungi keanekaragaman hayati dan fungsi ekosistem, kawasan konservasi di Kalimantan Barat harus dikelola secara khusus melalui penegakan hukum, dukungan terhadap praktik kehutanan secara ekologis dan sosial, partisipasi masyarakat dalam pengelolaan hutan berkelanjutan hingga proses penghijauan kembali (reboisasi dan rehabilitasi). Bersamaan dengan hal tersebut, langkah lainnya yang perlu diambil adalah perlindungan terhadap lahan gambut untuk mencegah degradasi gambut, termasuk upaya restorasi lahan gambut melalui penanaman kembali vegetasi asli dan pemulihan hidrologi, serta pengelolaan lahan gambut berkelanjutan.

Di sisi lain, perlindungan pesisir dan pulau kecil meliputi restorasi mangrove dan ekosistem pesisir lainnya dilakukan untuk mengatasi dampak bencana alam, perlu juga ditetapkan dalam kebijakan zonasi pesisir

yang mendukung pengelolaan sumber daya pesisir yang berkelanjutan (termasuk sektor perikanan). Demikian pula berlaku bagi kawasan konservasi laut dimaksudkan untuk melindungi ekosistem laut yang rentan terhadap perubahan iklim seperti kenaikan permukaan air laut dan cuaca ekstrem. Upaya tersebut tidak akan berhasil tanpa adanya peningkatan pendidikan dan kesadaran masyarakat di pesisir dan pulau-pulau kecil.

Ekstraksi Sumber Daya Alam (SDA) baik di darat maupun laut di Kalimantan Barat harus disesuaikan antara daya tampung dan daya dukung, hal ini bertujuan untuk mematuhi batas-batas yang wajar dalam pengelolaan ekosistem dan melibatkan para pemangku kepentingan dalam kerangka kerja holistik terhadap dampak ekstraksi sumber daya alam yang berlebihan. Penerapan prinsip-prinsip keberlanjutan akan membantu memastikan bahwa ekstraksi sumber daya alam tidak merusak ekosistem dan lingkungan hidup, sambil mempertahankan manfaat ekonomi dan sosial dalam jangka panjang.

Pemerintah Daerah di Kalimantan Barat juga perlu mengedepankan penanganan dan pengolahan limbah terpadu (limbah organik, berbahaya, cair, medis dan lainnya) secara efisien, aman dan berkelanjutan, melalui penggunaan teknologi inovatif dan penanganan krisis lingkungan secara kolaboratif dan bertanggungjawab.

Terkait dengan hal tersebut, langkah mitigasi dan adaptasi terhadap bencana alam dan perubahan iklim merupakan dua pendekatan utama untuk mengurangi dampak masalah yang akan muncul secara sistemik, terutama untuk mengurangi tekanan pada ekosistem dan pencegahan terhadap konflik sosial dan peningkatan infrastruktur tahan bencana. Mendukung hal dimaksud, upaya lain yang adaptif dan relevan akan melengkapi upaya-upaya di atas, antara lain, konsep pembangunan yang resilien; pengembangan varietas tanaman yang adaptif terhadap perubahan iklim; manajemen air terpadu untuk mendukung kawasan pertanian dan pengendalian banjir, pengembangan Early

3.2.4.2. SDM Berdaya Saing

Sumber Daya Manusia (SDM) yang berdaya saing menjadi isu strategis dalam meraih keunggulan kompetitif dalam pembangunan wilayah Kalimantan Barat yang terus berkembang. Kebutuhan akan SDM yang memiliki keterampilan, pengetahuan, dan karakter berakhlak yang sesuai dengan tuntutan pasar kerja serta kemajuan teknologi tidak dapat diabaikan. Oleh karena itu, kebijakan pemerintah daerah ditujukan untuk fokus pada pengembangan dan penguatan SDM menjadi langkah strategis untuk mencapai tujuan tersebut melalui pemerataan akses dan kualitas pendidikan di wilayah pesisir, pedalaman dan perbatasan di Kalimantan Barat yang didukung oleh mekanisme program pembiayaan di sektor pendidikan yang inklusif, investasi dalam

Warning System serta peningkatan kapasitas layanan tanggap bencana.

Demikian, penerapan konsep pembangunan di Kalimantan Barat diorientasikan kepada konsep pembangunan hijau dan pembangunan rendah karbon yang tentu saja membutuhkan perubahan paradigma dalam cara pandang penggunaan sumber daya dan perencanaan pertumbuhan ekonomi hijau di masa depan. Dengan pendekatan yang terintegrasi dan partisipasi semua pihak, model pembangunan tersebut diharapkan dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi lingkungan dan masyarakat di Kalimantan Barat.

pengembangan dan pelatihan guru dan kurikulum yang relevan, serta inovasi dalam pemanfaatan teknologi.

Dalam upaya mendukung pembentukan generasi yang unggul tersebut, penting untuk menjaga mutu dan relevansi pendidikan agar sejalan dengan tuntutan dan kebutuhan masa depan. Hal ini diwujudkan melalui standar kualitas pendidikan mencakup guru, kurikulum dan fasilitas pendidikan yang memadai yang menjembatani antara dunia pendidikan dan dunia nyata/usaha, dengan menekankan pada persiapan keterampilan yang relevan untuk masa depan, keterlibatan industri dan pembelajaran kontekstual yang mengintegrasikan teknologi dan literasi digital.

Harapan tersebut di atas membutuhkan pembinaan, pengembangan, pemanfaatan, dan perlindungan generasi muda di Kalimantan Barat yang menjadi tanggung jawab bersama seluruh elemen masyarakat. Upaya tersebut berfokus pada penyediaan jaminan akses yang setara terhadap pendidikan, pelatihan keahlian serta kewirausahaan bagi generasi muda. Selain itu, pemerintah daerah juga perlu menjamin hak terhadap pendidikan, perlindungan terhadap kesehatan mental dan dari eksploitasi (pekerja anak, perdagangan manusia bahkan eksploitasi seksual). Menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan positif generasi muda adalah langkah awal menuju masyarakat yang lebih baik dan lebih berdaya.

Ketersediaan lembaga pendidikan dan pelatihan yang berkualitas menjadi indikator bagi kemajuan pembangunan, perkembangan industri, dan pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Barat. Hal dimaksud bertujuan untuk membantu dalam mengembangkan profesionalisme, etika, dan nilai-nilai yang diperlukan dalam berbagai bidang, serta menjadi tempat untuk mendorong inovasi dan penelitian, menciptakan generasi yang mampu menghadapi tantangan masa depan.

Di sisi lain, kebijakan publik bukan hanya ditujukan untuk menciptakan SDM yang berdaya dan unggul, tetapi derajat kesehatan masyarakat juga menjadi perhatian yang serius bagi pemerintah daerah. Derajat

kesehatan masyarakat melibatkan evaluasi kondisi fisik, mental, dan sosial masyarakat sebagai indikator utama kesejahteraan. Derajat kesehatan mencakup tingkat penyakit, angka harapan hidup, akses terhadap pelayanan kesehatan, dan faktor-faktor lain (sosial-ekonomi, lingkungan, gaya hidup dan sistem kesehatan) yang berkontribusi pada kualitas hidup. Untuk mendukung hal tersebut, Kalimantan Barat perlu menekankan pentingnya pencegahan dan promosi kesehatan yang meliputi pencegahan penyakit dan promosi gaya hidup sehat. Selain itu, pendidikan memainkan peran sentral dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, yang didukung oleh kolaborasi antar-sektor dan partisipasi masyarakat.

Namun, secara spesifik, terdapat kelompok sosial tertentu yang rentan dan perlu menjadi target kebijakan publik terkait derajat kesehatan masyarakat, yaitu jaminan keselamatan dan perlindungan terhadap tenaga kerja. Hal dimaksud untuk memastikan bahwa pekerja bekerja dalam lingkungan yang aman dan sehat, mendukung kesejahteraan mereka dan keluarga. Para pekerja yang merasa aman dan dilindungi cenderung lebih produktif dan memiliki kinerja yang lebih baik. Jaminan keselamatan dan perlindungan adalah bentuk penghargaan terhadap hak asasi manusia, memastikan setiap individu memiliki hak untuk bekerja dalam kondisi yang layak. Upaya perlindungan terhadap kerangka kerja

dilakukan melalui kerangka kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja yang ketat untuk mencegah kecelakaan dan penyakit terkait pekerjaan, pengawasan dan inspeksi secara rutin untuk memastikan bahwa peraturan keselamatan diikuti dan diterapkan dengan baik.

Pada akhirnya, kebijakan mengenai SDM berdaya saing perlu keseimbangan. Dengan kata lain, membutuhkan faktor kesetaraan dan keadilan gender. Kesetaraan gender mengacu pada pemberian hak, tanggung jawab, dan peluang yang sama kepada semua individu, tanpa memandang jenis kelamin. Ini melibatkan penghapusan

3.2.4.3. Tata Kelola Pemerintah

Dalam rangka mendukung pembangunan di Kalimantan Barat yang maju, sejahtera dan berkelanjutan, tata kelola pemerintahan yang baik merupakan aspek penting dalam pelaksanaan otonomi daerah. Hal ini harus selaras dengan prinsip-prinsip demokrasi yang berlaku secara umum seperti akuntabilitas, transparansi, partisipasi serta koordinasi lintas sektor, sehingga membuka ruang yang lebih luas bagi masyarakat sipil dalam berkontribusi dan memantau penyusunan dan implementasi kebijakan publik.

Dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan sebagaimana yang diharapkan di atas, maka Pemerintah Daerah di Kalimantan Barat perlu berlandaskan pada kerangka regulasi yang tersusun berdasarkan kajian ilmiah sehingga terjadi keseimbangan substansi antara

diskriminasi berbasis gender di semua aspek kehidupan. Adapun Keadilan gender berkaitan dengan penyebaran keadilan sosial dan ekonomi antara gender. Ini termasuk pemberian hak yang sama dalam pekerjaan, pendidikan, dan partisipasi dalam pengambilan keputusan. Kesetaraan dan keadilan gender dapat meningkatkan partisipasi ekonomi, meningkatkan produktivitas, dan mengurangi kemiskinan di Kalimantan Barat. Selain itu, kontribusi positifnya dapat berpengaruh terhadap kesehatan dan kesejahteraan masyarakat, serta menciptakan lingkungan yang merangsang kreativitas dan inovasi.

dukungan akademis, praktik-praktik di lapangan dan perkembangan normatif yang berkembang.

Pembangunan wilayah di Kalimantan Barat diarahkan untuk mengacu kepada konsep “Tematik, Holistik, Integrasi dan Spasial (THIS)” dengan harapan dapat mengatasi permasalahan multidimensi sesuai dengan isu strategis dan prioritas daerah. Untuk menjaga keselarasan dan sinkronisasi antar kebijakan pemerintah pusat dan daerah sesuai dengan kewenangannya masing-masing, maka dokumen rencana pembangunan daerah harus selaras antara pusat dan daerah, termasuk di dalamnya adalah penyesuaian arah kebijakan dan isu-isu strategis lintas sektoral. Dalam penyusunan kebijakan publik dan dokumen perencanaan tersebut, maka Pemerintah

Daerah di Kalimantan Barat harus mengacu kepada Kebijakan Satu Data dan Kebijakan Satu Peta. Mekanisme ini perlu dilakukan secara konsisten dan kolaboratif untuk mendukung data driven policy making dan *evidencebased policy making*.

Guna mendukung hal tersebut, kelembagaan institusi pemerintah daerah di Kalimantan Barat didesain melalui penerapan inovasi yang berkelanjutan dan juga memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi yang mendukung digitalisasi pemerintahan dan pelayanan publik. Tujuan lebih lanjut dari hal tersebut adalah, bertambahnya Zona Integritas menuju WBK dan WBBM yang merepresentasikan wajah institusi

pemerintah daerah di Kalimantan Barat yang lebih baik dari tahun ke tahun. Kelembagaan inovatif tersebut seyogyanya harus ditopang oleh SDM aparatur profesional yang senantiasa ditingkatkan kuantitas dan kualitasnya agar berdaya saing dengan karakter berakhlak.

Perwujudan tata kelola pemerintahan sebagaimana diharapkan di atas, juga diimplementasikan pada level di desa, dimana status desa mandiri dan pengelolaan dana desa benar-benar dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat, sesuai dengan konsep Nawacita, dimana membangun Indonesia dari pinggiran.

3.2.4.4. Konektivitas dan Aksesibilitas Pemerataan Pembangunan

Pembangunan yang berkesinambungan dan inklusif memerlukan fokus pada konektivitas dan aksesibilitas sebagai dua elemen kunci. Konektivitas mengacu pada keterhubungan antar wilayah, baik melalui infrastruktur fisik maupun virtual, sedangkan aksesibilitas mencakup kemudahan dan ketersediaan layanan, informasi, dan peluang bagi semua lapisan masyarakat. Kedua aspek ini, ketika diintegrasikan dengan baik, mampu memainkan peran penting dalam mewujudkan pemerataan pembangunan. Hal tersebut dipandang sebagai salah satu isu strategis yang paling signifikan di Kalimantan Barat.

Infrastruktur transportasi dan komunikasi yang handal adalah tulang punggung konektivitas fisik. Sinergi pembangunan

jaringan transportasi yang terdiri dari jalan raya, jembatan, pelabuhan, dan bandara yang baik tidak hanya mempermudah mobilitas barang dan orang, tetapi juga membuka akses terhadap daerah yang sebelumnya terisolasi. Pembangunan infrastruktur ini di berbagai wilayah di Kalimantan Barat dapat membuka potensi ekonomi baru dan memperkuat integrasi pusat dan daerah. Apalagi dengan dibangunnya IKN di Kalimantan Timur, diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap pembangunan di Kalimantan Barat. Guna mendukung hal tersebut, maka perlu adanya peningkatan standar jaringan jalan dan jembatan di Kalimantan Barat. Tidak hanya untuk mendukung Jalan Trans-Kalimantan yang menghubungkan

Kalimantan Barat dan Provinsi Kalimantan lainnya, tetapi juga menghubungkan Kota Pontianak sebagai ibukota provinsi dengan Pusat Perdagangan dan Jasa di kabupaten/kota lainnya di Kalimantan Barat. Hal tersebut juga mencakup peningkatan status jalan mantap dan realisasi pembangunan tol yang menghubungkan Kota Pontianak dan Pelabuhan Internasional Kijing dan Kota Singkawang di masa depan.

Peningkatan standar tersebut perlu diiringi dengan integrasi antar moda transportasi untuk meningkatkan efisiensi, kenyamanan, dan kelancaran pergerakan orang dan barang melalui penggabungan berbagai jenis moda transportasi dalam satu sistem terpadu yang disebut *Transit Oriented Development* (TOD). Konsep ini menekankan kolaborasi antar moda, sehingga pengguna transportasi dapat dengan mudah beralih dari satu moda ke moda lainnya tanpa kesulitan. Konsep ini perlu dilengkapi dengan sistem pembayaran terpadu berbasis teknologi informasi dan komunikasi dan/atau internet of things (IoT), penyajian informasi secara real-time, hingga sistem logistik terpadu sebagai pusat distribusi barang.

Dalam rangka pengembangan sistem transportasi dan standar yang terpadu tersebut, maka standarisasi dan kelayakan moda transportasi merupakan dua aspek penting yang perlu diperhatikan. Proses standarisasi bertujuan untuk menciptakan kerangka kerja yang seragam dan dapat diterapkan pada berbagai moda transportasi,

sementara penilaian kelayakan membantu memastikan bahwa setiap moda transportasi memenuhi persyaratan teknis, ekonomis, dan lingkungan. Hal dimaksud mengacu kepada spesifikasi teknis, kelayakan teknis, perkembangan teknologi serta budaya berkendara yang berkembang serta dinamika aturan kebijakan yang berlaku.

Dalam ruang lingkup yang lebih luas, konektivitas dan aksesibilitas pemerataan pembangunan juga dipengaruhi oleh tata kelola kawasan perbatasan negara dan provinsi, dalam hal ini, perbatasan Indonesia – Malaysia yang berada di Kalimantan Barat. Terdapat 3 (tiga) PLBN yaitu Aruk (Sambas), Entikong (Sanggau) dan Nanga Badau (Kapuas Hulu) yang infrastrukturnya telah terbangun. Berikutnya, menyusul PLBN Jagoi Babang (Bengkayang) yang tengah dalam proses penyelesaian pembangunan. Namun, terlepas dari hal tersebut, seluruh PLBN tersebut perlu segera diaktivasi agar proses perpindahan masyarakat dan barang dari dan ke Malaysia dapat lancar. Aktivasi tersebut, tentu saja membutuhkan campur tangan dari Pemerintah Pusat sesuai kewenangan dari institusi terkait. Dalam skala yang lebih kecil, tata kelola kawasan tersebut juga perlu mencakup tata kelola sanitasi (sampah, drainase, air limbah) karena erat kaitannya dengan derajat kesehatan masyarakat di Kalimantan Barat.

Dalam pembangunan wilayah, ketahanan air dan energi menjadi semakin penting di tengah tantangan seperti perubahan iklim,

pertumbuhan populasi, urbanisasi, dan eksploitasi yang berlebihan terhadap sumber daya tersebut. Dalam konteks di Kalimantan Barat, pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) memiliki dampak luas tidak hanya bagi ekosistem, tetapi juga faktor sosial-ekonomi masyarakat di Kalimantan Barat yang menggantungkan hidupnya dari banyak aliran sungai. Di sisi lain, krisis energi listrik yang menyebabkan kurangnya pasokan listrik dan

harus mengimpor listrik dari Malaysia menyebabkan dorongan terhadap rencana pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir di Kalimantan Barat yang memiliki sumber daya uranium, saat ini dan masa depan, menjadi lebih masuk akal. Selain untuk memenuhi kebutuhan domestik, sumber energi tersebut juga dapat menyokong dampak pembangunan IKN di Provinsi Kalimantan lainnya.

3.2.4.5. Transformasi Ekonomi Berkelanjutan (Ekonomi Hijau dan Ekonomi Biru)

Transformasi ekonomi berkelanjutan adalah proses mengubah pola ekonomi suatu negara atau wilayah menuju model yang lebih ramah lingkungan, sosial, dan ekonomi dalam jangka panjang. Transformasi ini bertujuan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, seiring dengan upaya melindungi lingkungan alam. Dengan kekuatan ekonomi saat ini yang bertumpu di 2 (dua) sektor, yaitu perkebunan dan pertambangan, maka pembangunan wilayah di Kalimantan Barat diarahkan pada model ekonomi hijau dan ekonomi biru.

Beberapa aspek kunci dari model ekonomi hijau yang dapat diterapkan tersebut adalah kebijakan pro-lingkungan, kemitraan dan kolaborasi, pengembangan energi terbarukan, pertanian dan kehutanan yang berkelanjutan, industri berkelanjutan, transportasi yang terintegrasi dan berkelanjutan serta pengolahan limbah yang efisien. Sementara itu, model ekonomi biru merujuk kepada pendekatan pembangunan

ekonomi yang berfokus pada keberlanjutan dan keseimbangan antara pemanfaatan sumber daya laut dengan pelestarian ekosistem laut. Konsep ini menempatkan perhatian khusus pada pengelolaan sumber daya laut secara berkelanjutan, pemberdayaan masyarakat pesisir, dan penguatan ekonomi melalui sektor kelautan. Berdasarkan kebutuhan terhadap faktor pengungkit pembangunan wilayah di Kalimantan Barat berbasis ekonomi hijau, yaitu mencakup keberlanjutan hilirisasi dan industrialisasi SDA unggulan selaras dengan kebijakan nasional; pemanfaatan jasa lingkungan untuk memberikan manfaat pada ekosistem dan memberikan nilai tambah pada sektor ekonomi; diversifikasi sistem pasar yang merujuk pada upaya untuk meningkatkan variasi produk, layanan, atau aspek-aspek tertentu (produk dan layanan, pelanggan, geografis, rantai pasok, model bisnis, teknologi, keberlanjutan dan kemitraan dan pendanaan); mendorong investasi inklusif untuk memperluas aksesibilitas dan

partisipasi masyarakat dan/atau UMKM dalam kegiatan investasi; serta pengembangan wisata minat khusus sesuai preferensi pasar di sektor bahari, rimba dan budaya; peningkatan kualitas SDM melalui pendidikan, pelatihan keahlian terampil hingga pemberdayaan masyarakat untuk menciptakan tenaga kerja yang produktif; peningkatan relevansi antara kurikulum dan/atau dunia pendidikan dengan dunia usaha untuk menciptakan lebih banyak pengusaha; peningkatan produktivitas dan nilai tambah barang ekonomi melalui penguatan dan penerapan riset, teknologi dan inovasi; serta peningkatan upaya pemasaran produk unggulan daerah melalui metode MICE (Meeting, Incentive, Conference dan Exhibition) dan kanal daring.

Terkhusus untuk ekonomi biru, penerapan model ini di Kalimantan Barat dapat

3.2.4.6. Kualitas Kehidupan Masyarakat

Kualitas hidup masyarakat mencakup berbagai aspek kehidupan sehari-hari yang mencerminkan tingkat kesejahteraan dan kepuasan hidup suatu kelompok masyarakat. Kualitas hidup dapat diukur melalui indikator-indikator seperti taraf kesehatan, pendidikan, keamanan, akses terhadap layanan dasar, pekerjaan, lingkungan, dan aspek-aspek lain yang mempengaruhi kesejahteraan masyarakat.

Dalam perwujudan visi pembangunan jangka panjang di Kalimantan Barat, pertumbuhan penduduk yang terlalu cepat dapat

menggunakan pendekatan holistik untuk menggabungkan pertumbuhan ekonomi dengan keberlanjutan lingkungan laut dan pesisir. Hal tersebut meliputi pengembangan kawasan konservasi yang berkelanjutan, pengembangan dan/atau peningkatan (tipe) pelabuhan, pengembangan dan penerapan teknologi kelautan yang inovatif, pemberdayaan masyarakat pesisir dan pengembangan UMKM, hingga pengembangan diversifikasi ekonomi kelautan dan pariwisata bahari.

Dengan semakin meningkatnya isu-isu strategis terkait pembangunan berkelanjutan baik di Indonesia maupun Kalimantan Barat, maka penerapan model ekonomi hijau dan ekonomi biru secara holistik sangat masuk akal dan menjanjikan, mengingatkan pemerintah daerah memang perlu menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan kelestarian ekosistem.

menempatkan tekanan besar pada sumber daya ekonomi dan lingkungan. Sebaliknya, pertumbuhan penduduk yang terkendali memberikan kesempatan untuk merencanakan dan mengelola sumber daya secara lebih efisien, mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, serta dapat lebih mudah menyediakan layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.

Sejalan dengan hal tersebut, pertumbuhan penduduk dapat memiliki dampak yang signifikan terhadap kondusifitas masyarakat,

yaitu sejauh mana masyarakat dapat berfungsi secara efektif dan harmonis. Sehingga, dalam melaksanakan aktivitas sosial-ekonomi, masyarakat, dan bahkan para investor, dapat bekerja secara nyaman dan aman. Hal tersebut akan berimplikasi positif terhadap pertumbuhan ekonomi.

Dalam memenuhi kebutuhan masyarakat, perihal sandang, pangan dan papan, memang perlu mendapatkan perhatian yang prioritas sebab hal tersebut merupakan hajat hidup orang banyak. Pemerintah Daerah di Kalimantan Barat perlu memastikan bahwa masyarakat mendapatkan hunian yang terjangkau dan layak huni serta tepat sasaran. Area permukiman tersebut tentunya harus didukung oleh jaringan air bersih yang layak dan aman, serta diharapkan dapat mencakup seluruh wilayah Kalimantan Barat. Seiring pertumbuhan penduduk, kebutuhan akan sumber energi pun semakin besar sehingga perlu adanya diversifikasi sumber daya energi, mulai dari yang berbasis fosil, hingga potensi penggunaan nuklir atau energi terbarukan lainnya. Selain itu, kebutuhan terkait internet juga menjadi perhatian serius bagi pemerintah untuk memastikan tidak adanya area blank spot.

Sebagai prasyarat permukiman yang sehat tersebut, maka kebutuhan sanitasi yang layak dan aman menjadi kesatuan yang tak terpisahkan dari konsep permukiman dan pembangunan hijau. Pada tingkat individu, setiap anggota masyarakat berhak

mendapatkan akses terhadap pelayanan kesehatan yang lebih luas serta keanggotaan jaminan kesehatan dan sosial sebagaimana dipersyaratkan dalam peraturan perundang-undangan.

Di samping itu, setiap anak wajib belajar 9 tahun berhak mendapatkan akses dan fasilitas pendidikan yang mudah dijangkau dan lebih baik sehingga terciptanya generasi muda yang menyukai kegiatan belajar – mengajar. Pola pendidikan yang disusun mengedepankan pembelajaran yang adaptif dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi serta literasi digital.

Mengacu skenario yang bersifat positif, ketika ekonomi bertumbuh dengan baik, maka berbagai sektor diharapkan mampu menyediakan lapangan pekerjaan pada angkatan kerja yang tersedia. Tentu saja, hal ini membutuhkan kontribusi multi-dimensi dan kerjasama antara para pemangku kepentingan. Pemerintah, melalui sinkronisasi pusat dan daerah, perlu merangsang tingkat pertumbuhan ekonomi pada level yang diharapkan, terutama untuk memacu produksi komoditas bahan pokok (pangan dan non-pangan) agar meningkat, tersedia dan terjangkau. Tujuan selanjutnya, ketersediaan konsumsi masyarakat yang bergizi, berimbang, sehat dan aman (B2SA), serta menyediakan ruang berekspresi dan kreasi bagi lintas generasi sebagai perekat persatuan dan kesatuan dalam masyarakat di Kalimantan Barat.

Tabel 3. 1 Perumusan Isu Strategis Daerah

**“Kalimantan Barat Maju, Sejahtera,
dan Berkelanjutan”**

No	Masalah Pokok	Isu Strategis
1	Akses dan kualitas pendidikan masih rendah	Kualitas Kehidupan Masyarakat (Meningkatkan Pembangunan Manusia)
2	Pemajuan kebudayaan Kalimantan Barat Belum Optimal	
3	Derajat Kesehatan Masyarakat masih rendah	
4	Kesenjangan sosial antar kelompok masih tinggi	
5	Kesetaraan dan keadilan gender rendah	
6	Pemahaman Terhadap Kesatuan Bangsa dan Politik rendah	
7	Perlindungan Masyarakat dan Ketertiban dan Ketentraman Umum Belum Optimal	
8	Pencegahan dan Penanggulangan Bencana belum Optimal	
9	Pembangunan Kepemudaan Belum optimal	
9	Pendapatan perkapita masyarakat Kalbar masih rendah	Transformasi ekonomi berkelanjutan
10	Rendahnya Produktivitas Daerah	
11	Pembangunan ekonomi belum berwawasan lingkungan	
12	Kuantitas dan kualitas sarpras belum sebanding dengan jumlah penduduk dan perkembangan wilayah yang mendukung terbentuknya wilayah maju dan mandiri	Konektivitas dan pemerataan pembangunan
13	Tingginya Degradasi Lingkungan Hidup	Lingkungan Hidup dan perubahan iklim
14	Pencegahan dan penanggulan bencana belum optimal	
15	Kelembagaan pelayanan publik belum responsif menghadapi dinamika dan tuntutan publik	Tata Kelola Pemerintahan
16	Kualitas SDM dan partisipasi kerja yang masih rendah	SDM berdaya saing
17	Tingkat Kesejahteraan Pekerja Rendah	

Sumber: Analisis Tim, 2023

BAB IV

VISI DAN MISI

4.1. VISI

Visi merupakan suatu rangkaian kata yang di dalamnya terdapat impian, cita-cita atau sebuah nilai. Indonesia sendiri memiliki visi abadi yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 yang berbunyi, Bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Visi tersebut didukung oleh empat misi abadi, yang menjadi tujuan Bangsa Indonesia yaitu, melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Visi abadi ini kemudian diterjemahkan ke dalam Visi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025-2045 sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Bersatu, Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan, yang kemudian akan didukung oleh lima sasaran pokok, delapan misi pembangunan, tujuh belas arah pembangunan, dan empat puluh lima indikator.

Penentuan visi RPJPD Provinsi Kalimantan Barat berdasarkan Visi Abadi Bangsa Indonesia, Visi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional, tema pembangunan wilayah Kalimantan sebagai superhub ekonomi nusantara, karakteristik Wilayah Kalimantan Barat, dan beberapa hal berikut; 1) Pemetaan Permasalahan Nasional dan Daerah; 2) Isu Strategis Pembangunan

Kalimantan Barat 20 tahun ke depan; dan 3) Potensi Kalimantan Barat. Visi dan Misi Provinsi Kalimantan Barat juga memperhatikan maksud dan tujuan Penataan Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Barat dalam Rancangan Peraturan daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Barat adalah untuk mewujudkan ruang wilayah Provinsi Kalimantan Barat yang aman, nyaman, produktif, berkeadilan, dan berkelanjutan melalui peningkatan aksesibilitas dan penguatan konektivitas antar wilayah untuk meningkatkan kemandirian, daya saing dan kesejahteraan masyarakat secara merata serta terciptanya keseimbangan pertumbuhan dengan mengedepankan prinsip ekonomi hijau.

Tabel 4. 1 Perumusan Visi RPJPD Provinsi Kalimantan Barat

No	Isu Strategis	Pokok-Pokok Visi	Pernyataan Visi
1	Kualitas Kehidupan Masyarakat	Maju, Sejahtera	<i>“KALIMANTAN BARAT MAJU, SEJAHTERA, DAN BERKELANJUTAN”</i>
2	Transformasi Ekonomi Berkelanjutan	Maju, Sejahtera, Berkelanjutan	
3	Konektivitas dan Aksesibilitas Pemerataan Pembangunan	Maju, Sejahtera	
4	Lingkungan Hidup dan Perubahan Iklim	Berkelanjutan	
5	Sumber Daya Manusia Berdaya Saing	Maju, Sejahtera	
6	Tata Kelola Pemerintahan	Maju	

Sumber: Hasil Analisis Tim, 2023

Penyelarasan antara visi dan sasaran visi RPJPN dengan RPJPD Provinsi Kalimantan Barat 2025-2045 sebagai berikut:

Tabel 4. 2 Penyelarasan Provinsi Kalimantan Barat

No	Visi RPJPN 2025-4025	Visi RPJPD 2025-2046
1	Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Bersatu, Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan	Kalimantan Barat Maju , Sejahtera dan Berkelanjutan

Sumber: Hasil Analisis Tim, 2023

4.1.1. Sasaran Visi

Terwujudnya Kalimantan Barat Maju, Sejahtera, dan Berkelanjutan sejalan dengan Visi Indonesia Emas sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Bersatu, Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan. Hal ini tercermin dari peningkatan pendapatan per kapita, pengentasan kemiskinan dan ketimpangan, kepemimpinan dan pengaruh di dunia internasional meningkat, peningkatan daya saing sumber daya manusia, dan penurunan emisi GRK menuju net zero emission.

Sasaran pertama, pendapatan per kapita Kalimantan Barat meningkat menjadi 350,47 - 409,86 juta rupiah yang didorong oleh Indeks Ekonomi Biru Indonesia (IBEI) 134,61%, dan Peningkatan Kontribusi PDB Industri Pengolahan menjadi 28,63-37,57% pada tahun 2045.

Sasaran kedua, peningkatan pendapatan per kapita Kalimantan Barat juga diharapkan sejalan dengan dengan pengentasan kemiskinan dan ketimpangan di Kalimantan Barat, dimana pada tahun 2045 Tingkat Kemiskinan di Kalimantan Barat ditargetkan 0,08 - 0,58, yang diikuti dengan penurunan jumlah penduduk rentan miskin. Pada sasaran kedua juga diharapkan semakin memperkecil ketimpangan pendapatan antar penduduk di mana pada akhir perencanaan ditargetkan 0,253 - 0,304, dan Kontribusi PDRB Provinsi Kalimantan Barat pada nasional meningkat menjadi 1,66 pada akhir periode perencanaan, serta Pertumbuhan Ekonomi mencapai 6,05-7,63%.

Sasaran ketiga, sebagai beranda depan negara, Provinsi Kalimantan Barat juga perlu untuk meningkatkan kepemimpinan dan pengaruhnya di dunia internasional.

**“Kalimantan Barat Maju, Sejahtera,
dan Berkelanjutan”**

Kalimantan Barat juga diharapkan mampu melakukan diplomasi internasional dan pengaruh budaya, serta peran aktif dalam organisasi internasional terutama Sosek Malindo dan BIMP-EAGA. Hal ini terwujud dengan peningkatan indeks daya saing daerah menjadi 3,5 – 4.

Sasaran keempat, meningkatnya daya saing daerah dan kesejahteraan juga perlu didukung oleh peningkatan sumber daya manusia, dimana dalam hal ini dibentuk melalui peningkatan pendidikan, pelatihan, dan pengembangan, sikap dan etos kerja, penguasaan teknologi, inovasi dan kreativitas,

dan kesehatan yang diukur melalui peningkatan Indeks Modak Manusia (*Human Capital Index*) menjadi 0,64 pada tahun 20245.

Sasaran kelima, dalam pembangunan Kalimantan Barat Maju dan Sejahtera, perlu didukung oleh aspek keberlanjutan. Dimana aspek keberlanjutan ini didukung oleh pelestarian sumber daya alam dan lingkungan yang terwujud melalui penggunaan energi rendah karbon, kerangka ekonomi hijau dengan penurunan Intensitas Emisi GRK menjadi 100% pada akhir periode dan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup sebesar 83,24.

Tabel 4. 3 Sasaran Visi Provinsi Kalimantan Barat

No	Indikator	Target Provinsi	
		2025	2045
1	Peningkatan pendapatan per kapita		
a	PDRB per kapita (Rp Juta)	53 - 54,5	350,47 - 409,86
b	Indeks Ekonomi Biru Indonesia (IBEI)	38,87	134,61
c	Kontribusi PDB Industri Pengolahan (%)	16,50-17,40	28,63-37,57
2	Pengentasan kemiskinan dan ketimpangan		
a	Tingkat Kemiskinan (%)	5,65-6,15	0,08 - 0,58
b	Rasio gini (Indeks)	0,315-0,321	0,253 - 0,304
c	Kontribusi PDRB Provinsi (%)	1,35	1,66
d	Pertumbuhan Ekonomi	5,30-5,65	6,05-7,63
3	Kepemimpinan dan pengaruh di dunia internasional meningkat		
	Indeks Daya Saing Daerah	3	3,5-4
4	Peningkatan daya saing Sumber daya manusia		
	Indeks Modal Manusia	0,50	0,64
5	Penurunan emisi GRK menuju net zero emission		
a	Penurunan intensitas emisi GRK %	67,9	100
b	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	77,51	83,24

Sumber: SEB Menteri Dalam Negeri dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 600.2.1/3674/SJ; Nomor 2 Tahun 2024

Kalimantan Barat sebagai salah satu provinsi di Indonesia, diharapkan mampu untuk mendukung pembangunan dan kemajuan bangsa, melalui Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Barat, diharapkan selaras

dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional, sehingga tidak terjadi tumpang tindih kebijakan, serta kebijakan yang disusun dapat mendukung satu sama lain. Visi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Barat

2025-2045 diterjemahkan menjadi Kalimantan Barat Maju, Sejahtera dan Berkelanjutan.

4.1.2. Kalimantan Barat Maju

Kalimantan Barat Maju menunjukkan wilayah yang terus berkembang, bergerak mengikuti perubahan dan dinamika global untuk tampil menjadi unggul di berbagai bidang baik tangible maupun intangible yang berbasis pengetahuan, teknologi tinggi dan inovasi. Maju secara fisik ditandai dengan pertumbuhan ekonomi meningkat, pendapatan perkapita setara nasional melalui pergerakan ekonomi di segala sektor yang didukung hilirisasi dan industrialisasi berbasis

komoditas andalan Kalbar guna Kalbar menjadi Pusat Industri Hijau Bernilai Tambah. Kalbar maju secara non fisik juga dicirikan dengan perkembangan pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi dan inovasi secara eksponensial sebagai modal terbentuknya SDM kalbar yang unggul dan prima baik secara pendidikan, kesehatan, serta memiliki kepribadian yang matang dan cara berpikir yang maju tetapi tetap menghargai budaya dan karakteristik masyarakat lokal.

4.1.3. Kalimantan Barat Sejahtera

Sejahtera menggambarkan sebuah kondisi kehidupan masyarakat yang ideal. Dimana kesejahteraan merupakan kondisi individu yang merasa sejahtera dengan makna aman sentosa dan makmur. Keadaan ini menunjukkan bahwa individu bebas dari segala kekurangan, bebas dari bencana, bebas dari rasa takut, hidup berkecukupan, tidak kekurangan serta memiliki kemampuan/tangguh dalam mengatasi masalah. Begitu bermaknanya sejahtera bagi Kalimantan Barat namun untuk mencapai itu diperlukan syarat yang tidak hanya cukup

kecerdasan dan keterampilan baik bagi individu maupun kelompok tetapi juga kesehatan jasmani dan rohani yang dapat dicapai melalui kemudahan dan kesetaraan mengakses sumberdaya dan pelayanan sehingga mampu berdaya saing untuk menjadi generasi produktif yang mampu mengusahakan dan menciptakan kesejahteraan melalui pemanfaatan keunggulan diri maupun lingkungannya agar kesejahteraan dapat dirasakan bersama segenap masyarakat Kalimantan Barat.

4.1.4. Kalimantan Barat Berkelanjutan

Berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan,

kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan. Komitmen ini diwujudkan dengan pendekatan pembangunan berkelanjutan melalui Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB),

transformasi ekonomi berkelanjutan (*green economy dan blue economy*), kualitas sumber daya alam dan lingkungan hidup yang baik, kualitas kehidupan masyarakat yang baik, ditandai dengan pemerataan kesejahteraan masyarakat, lingkungan yang bebas polusi

baik udara, tanah, dan air. Kalimantan Barat yang berkelanjutan juga memiliki kemampuan untuk menghadapi dan beradaptasi terhadap berbagai krisis, baik krisis ekonomi, pangan, sosial, energi, air, udara, dan lainnya.

4.2. MISI

Misi adalah serangkaian hal yang dilakukan untuk mencapai sebuah visi. Penterjemahan visi Kalimantan Barat Maju, Sejahtera dan Berkelanjutan menjadi misi sejalan dengan RPJPN 2025-2045. Terdapat 8 misi yang

masing-masing penjelasan disesuaikan dengan karakteristik Kalimantan Barat. Perumusan visi dan misi dapat dilihat secara jelas pada table 4.4.

4.2.1. Transformasi Sosial

Mewujudkan transformasi sosial untuk membangun manusia yang sehat, cerdas, kreatif, sejahtera, unggul, dan berdaya saing. Transformasi sosial bertujuan untuk meningkatkan kualitas kehidupan manusia pada seluruh siklus hidup dan menciptakan masyarakat yang lebih sejahtera, adil, dan kohesif. Tercapainya transformasi sosial tersebut bertumpu kepada upaya pemenuhan pelayanan dasar dan menguasai ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi; membangun masyarakat yang inklusif bagi semua individu tanpa memandang latar belakang, identitas, disabilitas, dan status; melindungi dan mempromosikan hak asasi manusia termasuk hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya; mempromosikan pengembangan modal manusia dan modal

sosial budaya. Karena itu, transformasi sosial diarahkan untuk : mengatasi kemiskinan dan ketimpangan dalam berbagai bentuk; mempromosikan keadilan sosial agar setiap orang memiliki kesempatan yang sama terhadap pemenuhan pelayanan kesehatan, gizi, pendidikan, perlindungan dari kekerasan; mencapai pertumbuhan penduduk yang seimbang; membentuk sumber daya manusia yang pembangunan berwawasan lingkungan untuk menciptakan masa depan yang berkelanjutan bagi generasi mendatang; meningkatkan peran masyarakat, agama, dan kebudayaan sebagai penggerak pembangunan; dan mempromosikan keluarga berkualitas kesetaraan gender, dan masyarakat inklusif.

4.2.2. Transformasi Ekonomi

Mewujudkan transformasi ekonomi untuk meningkatkan produktivitas melalui

peningkatan inovasi iptek, ekonomi produktif (termasuk industri manufaktur, ekonomi dan

keuangan syariah, pertanian, ekonomi biru dan bioekonomi, pariwisata, ekonomi kreatif, UMKM dan koperasi, tenaga kerja, serta BUMN), penerapan ekonomi hijau, transformasi digital, integrasi ekonomi domestik dan global, serta pembangunan perkotaan dan perdesaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi. Transformasi ekonomi secara bertahap akan mengubah struktur ekonomi Kalimantan Barat dari yang berbasis pada komoditas bernilai tambah rendah, menjadi berbasis pada industri yang

bernilai tambah tinggi didukung oleh teknologi dan inovasi sehingga lebih produktif, efisien, dan berdaya saing tinggi. Transformasi ekonomi dilakukan melalui berbagai kebijakan pemerintah dan reformasi struktural, termasuk pengembangan sektor ekonomi, terutama industri manufaktur dan pertanian, penerapan transformasi hijau dan biru, penerapan teknologi informasi, investasi yang besar dalam riset dan inovasi, serta didukung pembangunan infrastruktur.

4.2.3. Transformasi Tata Kelola

Mewujudkan transformasi tata kelola untuk membangun regulasi dan tata kelola yang berintegritas dan adaptif. Tata kelola merupakan pengelolaan sektor publik yang efisien, efektif, akuntabel, didasarkan atas pertukaran informasi yang terbuka, transparan, serta mematuhi kerangka hukum. Transformasi tata kelola diperlukan dalam rangka memungkinkan pemerintah untuk bekerja dengan kerangka kerja yang lebih efektif dan akuntabel sehingga dapat

menyediakan pelayanan publik yang berkualitas. Tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik berkualitas akan semakin efektif dengan dukungan sistem penegakan hukum yang mengedepankan pencegahan terhadap aset negara, antara lain melalui mekanisme Deferred Prosecution Agreement yang transparan dan akuntabel berlandaskan pendekatan restoratif, korektif dan rehabilitatif.

4.2.4. Keamanan Daerah Tangguh, Demokrasi Substansial dan Stabilitas Ekonomi Makro Daerah

Memantapkan Keamanan Daerah Tangguh, Demokrasi dan Stabilitas Ekonomi Makro Daerah dengan memantapkan stabilitas ekonomi, politik, hukum dan keamanan

daerah, serta memperkuat ketangguhan diplomasi daerah di tingkat nasional dan membangun kekuatan pertahanan berdaya gentar kawasan.

4.2.5. Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi

Memantapkan ketahanan sosial budaya dan ekologi dengan memperkuat ketangguhan individual, keluarga, komunitas, masyarakat,

pembangunan karakter, dan lingkungan yang mampu menyeimbangkan hubungan timbal balik antara sosial budaya dan ekologi, serta

mengoptimalkan modal sosial budaya untuk tahan menghadapi berbagai bencana, perubahan dan guncangan, serta dapat

berpartisipasi dalam pembangunan dan menjaga keberlanjutan sumber daya alam.

4.2.6. Pembangunan Kewilayahan Yang Merata dan Berkeadilan

Pembangunan kewilayahan diwujudkan untuk meningkatkan pemerataan dan keadilan pembangunan melalui penerjemahan agenda transformasi sosial, ekonomi, dan tata kelola, yang dilengkapi dengan landasan transformasi

Keamanan Daerah Tangguh, Demokrasi Substansial dan Stabilitas Ekonomi Makro Daerah, serta ketahanan sosial budaya dan ekologi. Penerjemahan tersebut dilakukan sesuai karakteristik masing-masing wilayah.

4.2.7. Dukungan Sarana Prasarana Berkualitas Yang Ramah Lingkungan

Dukungan sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan menjadi faktor kunci pengembangan wilayah

sekaligus sebagai pilar pendukung agenda transformasi.

4.2.8. Kestinambungan Pembangunan Untuk Mengawal Indonesia Emas

Kestinambungan pembangunan untuk mengawal pencapaian Indonesia Emas yang diwujudkan melalui kaidah pelaksanaan yang efektif serta pembiayaan pembangunan.

Tabel 4. 4 Perumusan dan Penjelasan Misi RPJPD Provinsi Kalimantan Barat

Pernyataan Visi	Isu Strategis	Masalah Pokok	Misi	penjelasan misi
“KALIMANTAN BARAT MAJU, SEJAHTERA, DAN BERKELANJUTAN”	Kualitas Kehidupan Masyarakat	Akses dan kualitas pendidikan masih rendah	Transformasi Sosial	Mewujudkan transformasi sosial untuk membangun manusia yang sehat, cerdas, kreatif, sejahtera, unggul, dan berdaya saing. Transformasi sosial bertujuan untuk meningkatkan kualitas kehidupan manusia pada seluruh siklus hidup dan menciptakan masyarakat yang lebih sejahtera, adil, dan kohesif. Tercapainya transformasi sosial tersebut bertumpu kepada upaya pemenuhan pelayanan dasar dan menguasai ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi; membangun masyarakat yang inklusif bagi semua individu tanpa memandang latar belakang, identitas, disabilitas, dan status; melindungi dan mempromosikan hak asasi manusia termasuk hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya; mempromosikan pengembangan modal manusia dan modal sosial budaya. Karena itu, transformasi sosial diarahkan untuk : mengatasi kemiskinan dan ketimpangan dalam berbagai bentuk; mempromosikan keadilan sosial agar setiap orang memiliki kesempatan yang sama terhadap pemenuhan pelayanan kesehatan, gizi, pendidikan, perlindungan dari kekerasan; mencapai pertumbuhan penduduk yang seimbang; membentuk sumber daya manusia yang pembangunan berwawasan lingkungan untuk menciptakan masa depan yang berkelanjutan bagi generasi mendatang; meningkatkan peran masyarakat, agama, dan kebudayaan sebagai penggerak pembangunan; dan mempromosikan keluarga berkualitas kesetaraan gender, dan masyarakat inklusif.
		Derajat Kesehatan Masyarakat masih rendah		
	SDM berdaya saing	Kualitas SDM dan partisipasi kerja yang masih rendah		
		Tingkat Kesejahteraan Pekerja Rendah		
		Pembangunan Kepemudaan Belum optimal		

“Kalimantan Barat Maju, Sejahtera, dan Berkelanjutan”

Pernyataan Visi	Isu Strategis	Masalah Pokok	Misi	penjelasan misi
	Transformasi ekonomi berkelanjutan	Pendapatan perkapita masyarakat Kalbar masih rendah	Transformasi Ekonomi	Mewujudkan transformasi ekonomi untuk meningkatkan produktivitas melalui peningkatan inovasi iptek, ekonomi produktif (termasuk industri manufaktur, ekonomi dan keuangan syariah, pertanian, ekonomi biru dan bioekonomi, pariwisata, ekonomi kreatif, UMKM dan koperasi, tenaga kerja, serta BUMN), penerapan ekonomi hijau, transformasi digital, integrasi ekonomi domestik dan global, serta pembangunan perkotaan dan perdesaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi. Transformasi ekonomi secara bertahap akan mengubah struktur ekonomi Kalimantan Barat dari yang berbasis pada komoditas bernilai tambah rendah, menjadi berbasis pada industri yang bernilai tambah tinggi didukung oleh teknologi dan inovasi sehingga lebih produktif, efisien, dan berdaya saing tinggi. Transformasi ekonomi dilakukan melalui berbagai kebijakan pemerintah dan reformasi struktural, termasuk pengembangan sektor ekonomi, terutama industri manufaktur dan pertanian, penerapan transformasi hijau dan biru, penerapan teknologi informasi, investasi yang besar dalam riset dan inovasi, serta didukung pembangunan infrastruktur.
		Rendahnya Produktivitas Daerah Pembangunan ekonomi belum berwawasan lingkungan		
	Tata Kelola Pemerintahan	Kelembagaan pelayanan publik belum responsif menghadapi dinamika dan tuntutan publik	Transformasi Tata Kelola	Mewujudkan transformasi tata kelola untuk membangun regulasi dan tata kelola yang berintegritas dan adaptif. Tata kelola merupakan pengelolaan sektor publik yang efisien, efektif, akuntabel, didasarkan atas pertukaran informasi yang terbuka, transparan, serta mematuhi kerangka hukum. Transformasi tata kelola diperlukan dalam rangka memungkinkan pemerintah untuk bekerja dengan kerangka kerja yang lebih efektif dan akuntabel sehingga dapat menyediakan pelayanan publik yang berkualitas. Tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik berkualitas akan semakin efektif dengan dukungan sistem penegakan hukum yang mengedepankan pencegahan terhadap aset negara, antara lain melalui mekanisme Deferred Prosecution Agreement yang transparan dan akuntabel berlandaskan pendekatan restoratif, korektif dan rehabilitatif

“Kalimantan Barat Maju, Sejahtera, dan Berkelanjutan”

Pernyataan Visi	Isu Strategis	Masalah Pokok	Misi	penjelasan misi
		Perlindungan Masyarakat dan Ketertiban dan Ketentraman Umum Belum Optimal	Keamanan Daerah Tangguh, Demokrasi Substansial, dan Stabilitas Ekonomi Makro Daerah	Memantapkan supremasi hukum, stabilitas dan kepemimpinan Indonesia dengan memantapkan stabilitas ekonomi, politik, hukum dan keamanan daerah, serta memperkuat ketangguhan diplomasi daerah di tingkat nasional dan membangun kekuatan pertahanan berdaya gentar kawasan
		Pemahaman Terhadap Kesatuan Bangsa dan Politik rendah		
	Lingkungan Hidup dan perubahan iklim	Tingginya Degradasi Lingkungan Hidup	Ketahanan Sosial, Budaya dan Ekologi	Memantapkan ketahanan sosial budaya dan ekologi dengan memperkuat ketangguhan individual, keluarga, komunitas, masyarakat, pembangunan karakter, dan lingkungan yang mampu menyeimbangkan hubungan timbal balik antara sosial budaya dan ekologi, serta mengoptimalkan modal sosial budaya untuk tahan menghadapi berbagai bencana, perubahan dan guncangan, serta dapat berpartisipasi dalam pembangunan dan menjaga keberlanjutan sumber daya alam.
		Pencegahan dan penanggulangan bencana belum optimal		
	Kualitas Kehidupan Masyarakat	Kesenjangan sosial antar kelompok masih tinggi		
		Kesetaraan dan keadilan gender rendah		
		Pemajuan kebudayaan Kalimantan Barat Belum Optimal		
	Konektivitas dan pemerataan pembangunan	Kuantitas dan kualitas sarpras belum sebanding dengan jumlah penduduk dan perkembangan wilayah yang mendukung terbentuknya wilayah maju dan mandiri	Pembangunan kewilayahan yang merata dan berkeadilan	Pembangunan kewilayahan diwujudkan untuk meningkatkan pemerataan dan keadilan pembangunan melalui penerjemahan agenda transformasi sosial, ekonomi, dan tata kelola, yang dilengkapi dengan landasan transformasi Keamanan Daerah Tangguh, Demokrasi Substansial dan Stabilitas Ekonomi Makro Daerah, serta ketahanan sosial budaya dan ekologi. Penerjemahan tersebut dilakukan sesuai karakteristik masing-masing wilayah.
			Dukungan sarana prasarana berkualitas yang ramah lingkungan	Dukungan sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan menjadi faktor kunci pengembangan wilayah sekaligus sebagai pilar pendukung agenda transformasi.
			Kesinambungan pembangunan untuk mengawal Indonesia Emas	Kesinambungan pembangunan untuk mengawal pencapaian Indonesia Emas yang diwujudkan melalui kaidah pelaksanaan yang efektif serta pembiayaan pembangunan.

Sumber: Hasil Analisis Tim, 2023

4.2.9. Penyelarasan Misi RPJPN dan RPJPD Provinsi Kalimantan Barat

Berdasarkan RPJPN Tahun 2025-2045, jumlah misi sebanyak 8. Oleh karena itu terdapat 8 misi yang akan dicapai selama 20 penyelarasan misi antara RPJPN dengan tahun mendatang. Misi tersebut dapat RPJPD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2025-2045 disesuaikan dengan visi dan karakteristik 2045 sebagai berikut

Daerah dengan tetap menjaga substansi dan :

Tabel 4. 5 Penyelarasan Misi RPJP Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2025-2045 dan RPJP Nasional Tahun 2025-2045

No	RPJP Nasional Tahun 2025-2045		RPJP Daerah Provinsi Tahun 2025 – 2045
	Agenda	Misi	Agenda/Misi
1	Transformasi Indonesia	1. Transformasi Sosial	Transformasi Sosial
		2. Transformasi Ekonomi	Transformasi Ekonomi
		3. Transformasi Tata Kelola	Transformasi Tata Kelola
2	Landasan Transformasi	4. Supremasi Hukum, Stabilitas, dan Kepemimpinan Indonesia	Keamanan Daerah Tangguh, Demokrasi Substansial, dan Stabilitas Ekonomi Makro Daerah
3		5. Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi	Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi
4	Kerangka Implementasi Transformasi	6. Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkeadilan	Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkeadilan
5		7. Sarana dan Prasarana yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan	Sarana dan Prasarana yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan
6		8. Kestinambungan Pembangunan	Kestinambungan Pembangunan

Sumber: Analisis Tim, 2023

4.3. 17 ARAH PEMBANGUNAN KALIMANTAN BARAT 2025-2045

Berdasarkan 8 misi tersebut diturunkan menjadi 17 arah Pembangunan RPJP Nasional Tahun 2025-2045 yang harus diterjemahkan ke dalam RPJP Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2025-2045. Arah pembangunan RPJP Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2025-2045 harus berjumlah 17 (tujuh belas) dengan nomenklatur yang sama dengan RPJP

Nasional 2025-2045 kecuali 3 arah kebijakan yaitu:

1. IE10 yaitu "Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional Tangguh, dan Demokrasi Substansial" dan
2. IE11 yaitu "Stabilitas Ekonomi Makro", dapat disesuaikan nomenklaturnya dengan karakteristik Daerah.

3. IE12 yaitu “Ketangguhan Diplomasi Indonesia di Tingkat Global dan Membangun Kekuatan Pertahanan Berdaya Gentar Kawasan”

Ketiga arah pembangunan tersebut disesuaikan dengan karakteristik daerah yaitu untuk IE10 yaitu “Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional Tangguh, dan Demokrasi Substansial” diganti menjadi keamanan dan ketertiban umum daerah yang kondusif dan demokrasi substansial, sedangkan IE11 yaitu

“Stabilitas Ekonomi Makro”, disesuaikan menjadi stabilitas ekonomi makro daerah. IE12 yaitu “Ketangguhan Diplomasi Indonesia di Tingkat Global dan Membangun Kekuatan Pertahanan Berdaya Gentar Kawasan” diganti menjadi “Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Berdaya Gentar Kawasan”, hal ini didukung oleh posisi strategis Provinsi Kalimantan Barat yang berbatasan dengan Negara Malaysia.

Tabel 4. 6 Penyelarasan 17 Arah (Tujuan) Pembangunan RPJP Daerah Tahun 2025-2045 dengan RPJP Nasional Tahun 2025-2045

RPJP Nasional Tahun 2025-2045		RPJP Daerah Provinsi Tahun 2025 – 2045	
Transformasi	Arah Pembangunan	Transformasi	Arah Pembangunan
(1)	(2)	(3)	(4)
Sosial	IE1. Kesehatan untuk Semua	Sosial	IE1. Kesehatan untuk Semua
	IE2. Pendidikan Berkualitas yang Merata		IE2. Pendidikan Berkualitas yang Merata
	IE3. Perlindungan Sosial yang Adaptif		IE3. Perlindungan Sosial yang Adaptif
Ekonomi	IE4. Iptek, inovasi dan produktivitas ekonomi	Ekonomi	IE4. Iptek, inovasi dan produktivitas ekonomi
	IE5. Penerapan ekonomi hijau		IE5. Penerapan ekonomi hijau
	IE6. Transformasi digital		IE6. Transformasi digital
	IE7. Integrasi ekonomi domestik dan global		IE7. Integrasi ekonomi domestik dan global
	IE8. Perkotaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi		IE8. Perkotaan dan Perdesaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi
tata kelola	IE9. Regulasi dan tata kelola yang berintegritas dan adaptif	tata kelola	IE9. Regulasi dan tata kelola yang berintegritas dan adaptif
Supremasi Hukum, Stabilitas dan	IE10. Hukum berkeadilan, keamanan nasional tangguh dan demokrasi substansial	Keamanan Daerah Tangguh, Demokrasi Substansial,	IE10. Keamanan dan ketertiban umum daerah yang kondusif dan

**“Kalimantan Barat Maju, Sejahtera,
dan Berkelanjutan”**

RPJP Nasional Tahun 2025-2045		RPJP Daerah Provinsi Tahun 2025 – 2045	
Transformasi	Arah Pembangunan	Transformasi	Arah Pembangunan
Kepemimpinan Indonesia		dan Stabilitas Ekonomi Makro Daerah	demokrasi substansial
	IE11. Stabilitas ekonomi makro		IE11. Stabilitas ekonomi makro daerah
	IE12. Ketangguhan Diplomasi dan pertahanan berdaya gentar kawasan		IE12. Ketangguhan diplomasi dan pertahanan berdaya gentar kawasan
Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi	IE13. Beragama masalahat dan berkebudayaan maju	Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi	IE13. Beragama masalahat dan berkebudayaan maju
	IE14. Keluarga berkualitas, kesetaraan gender dan masyarakat inklusif		IE14. Keluarga berkualitas, kesetaraan gender dan masyarakat inklusif
	IE15. Lingkungan hidup berkualitas		IE15. Lingkungan hidup berkualitas
	IE16. Ketahanan energi, air dan kemandirian pangan		IE16. Ketahanan energi, air dan kemandirian pangan
	IE17. Resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim		IE17. Resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim
Mewujudkan Pembangunan Kewilayahan yang merata dan berkeadilan		mewujudkan Pembangunan Kewilayahan yang merata dan berkeadilan	
Mewujudkan Sarana dan Prasarana yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan		Sarana dan Prasarana yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan	
Mewujudkan Kestinambungan Pembangunan		Kestinambungan Pembangunan	

4.4. INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN KALIMANTAN BARAT TAHUN 2025-2045

17 arah kebijakan diatas dijabarkan menjadi 45 arah kebijakan serta meta data yang diperlukan. Penyelarasan antara 45 indikator nasional dengan provinsi Kalimantan Barat sebagai perubahan indikator juga akan mempengaruhi berikut:

Tabel 4. 7 Penerjemahan 45 (Empat Puluh Lima) Indikator Utama Pembangunan Nasional ke Daerah

No	RPJP Nasional Tahun 2025-2045	RPJP Daerah Provinsi Tahun 2025-2045
	Misi /Arah Pembangunan/ Indikator Utama	Misi/Arah Pembangunan/ Indikator Utama
(1)	(2)	(3)
	Transformasi Sosial	Transformasi Sosial
IE1	Kesehatan untuk Semua	Kesehatan untuk Semua
1	Usia Harapan Hidup (UHH) (tahun)	1.Usia Harapan Hidup (UHH) (tahun)
2	Kesehatan Ibu dan Anak:	2.Kesehatan Ibu dan Anak:
	a) Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup)	a) Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup)
	b) Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)	b) Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)
3.	Insidensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	Penanganan Tuberkulosis: a. Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (treatment coverage) (%)* b. Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate) (%)*
4	Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (%)	4. Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (%)
IE2	Pendidikan Berkualitas yang Merata	Pendidikan Berkualitas yang Merata
5.	Hasil Pembelajaran :	5. Hasil Pembelajaran : :
	a) Rata-rata Nilai PISA	a)Persentase kabupaten/kota yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk*: i) Literasi Membaca ii) Numerasi b)Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk*: i) Literasi Membaca ii) Numerasi
	a-i Membaca	
	a-ii Matematika	
	a-iii Sains	
	b) Rata-rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun (tahun)	c) Rata-Rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun (tahun)
	c) Harapan Lama Sekolah (tahun)	d) Harapan Lama Sekolah (tahun)
6	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Tinggi (%)	6. Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi (%)*
7	Persentase pekerja lulusan pendidikan menengah dan tinggi yang bekerja di bidang keahlian menengah tinggi (%)	7. Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah dan Tinggi yang Bekerja di Bidang Keahlian Menengah Tinggi (%)
IE3	Perlindungan Sosial yang Adaptif	Perlindungan Sosial yang Adaptif

No	RPJP Nasional Tahun 2025-2045	RPJP Daerah Provinsi Tahun 2025-2045
	Misi /Arah Pembangunan/ Indikator Utama	Misi/Arah Pembangunan/ Indikator Utama
(1)	(2)	(3)
8	Tingkat Kemiskinan (%)	8. Tingkat Kemiskinan (%)
9	Cakupan kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (%)	9. Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Provinsi (%)
10	Persentase penyandang disabilitas bekerja di sektor formal (%)	10. Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja di Sektor Formal (%)
	Transformasi Ekonomi	Transformasi Ekonomi
IE4	Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi	Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi
11	Rasio PDB Industri Pengolahan (%)	11. Rasio PDRB Industri Pengolahan (%)
12	Pengembangan Pariwisata:	12. Pengembangan Pariwisata
	a) Rasio PDB Pariwisata (%)	a) Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (%)*
	b) Devisa Pariwisata (miliar USD)	b) Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara (Hotel Berbintang) (Ribu Orang)*
13	Proporsi PDB Ekonomi Kreatif (%)	13. Proporsi Investasi Pelaku Ekonomi Kreatif Terhadap Total Investasi Kalimantan Barat
14	Produktivitas UMKM, Koperasi, BUMN	14. Produktivitas UMKM, Koperasi, BUMD
	a) Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah (%)	a-i) Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah Non Pertanian pada Level Provinsi (%) a-ii) Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah pada Level Provinsi (%)
	b) Rasio kewirausahaan (%)	b) Rasio Kewirausahaan Daerah (%)
	c) Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDB (%)	c) Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB (%)
	d) Return on Asset (ROA) BUMN (%)	d) Return on Asset (ROA) BUMD (%)
15	Penciptaan Lapangan Kerja yang Baik	15. Penciptaan Lapangan Kerja yang Baik
	a) Tingkat Pengangguran terbuka	a) Tingkat Pengangguran terbuka
	b) Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal (%)	b) Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal (%)
16	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)	16. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)
17	Tingkat Penguasaan IPTEK	17. Indeks Inovasi Daerah
IE 5	Penerapan Ekonomi Hijau	Penerapan Ekonomi Hijau
18	Tingkat Penerapan Ekonomi Hijau	18. Tingkat Penerapan Ekonomi Hijau
	a) Indeks Ekonomi Hijau	a) Indeks Ekonomi Hijau Daerah
	b) Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer (%)	b) Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer (%)

No	RPJP Nasional Tahun 2025-2045	RPJP Daerah Provinsi Tahun 2025-2045
	Misi /Arah Pembangunan/ Indikator Utama	Misi/Arah Pembangunan/ Indikator Utama
(1)	(2)	(3)
IE 6	Transformasi Digital	Transformasi Digital
19	Indeks Daya Saing Digital di Tingkat Global (peringkat)	19. Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi
IE 7	Integrasi Ekonomi Domestik dan Global	Integrasi Ekonomi Domestik dan Global
20	Biaya Logistik (% PDB)	20. Koefisien Variasi Harga Antar Wilayah Tingkat Provinsi
21	Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDB)	21. Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB)
22	Ekspor Barang dan Jasa (% PDB)	22. Ekspor Barang dan Jasa (% PDRB)
IE8	Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi	Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi
23	Kota dan Desa Maju, Inklusif, dan Berkelanjutan	23. Kota dan Desa Maju, Inklusif, dan Berkelanjutan
	a) Proporsi Kontribusi PDRB Wilayah Metropolitan terhadap Nasional (%)	a) Proporsi Kontribusi PDRB Wilayah Metropolitan terhadap Nasional (%)
	b) Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan (%)	b) Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan (%)
	c) Persentase Desa Mandiri (%)	c) Persentase Desa Mandiri (%)
	Transformasi Tata Kelola	Transformasi Tata Kelola
IE9	Regulasi dan Tata kelola yang Berintegritas dan Adaptif	Regulasi dan Tata kelola yang Berintegritas dan Adaptif
24	Indeks Materi Hukum	24. Indeks Reformasi Hukum *
25	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	25. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
26	Indeks Pelayanan Publik	26. Indeks Pelayanan Publik
27.	Anti Korupsi	27. Indeks Integritas Nasional
	a) Indeks Integritas Nasional	
	b) Indeks Persepsi Korupsi	
	Supremasi Hukum, Stabilitas, dan Kepemimpinan Indonesia	Keamanan Daerah Tangguh, Demokrasi Substansial, dan Stabilitas Ekonomi Makro Daerah
IE 10	Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional Tangguh, dan Demokrasi Substansial	Keamanan dan ketertiban umum daerah yang kondusif dan Demokrasi Substansial
28	Indeks Pembangunan Hukum	28. Persentase Capaian Pelaksanaan Aksi HAM
29	Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya (%)	29. Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya (%)

**“Kalimantan Barat Maju, Sejahtera,
dan Berkelanjutan”**

No	RPJP Nasional Tahun 2025-2045	RPJP Daerah Provinsi Tahun 2025-2045
	Misi /Arah Pembangunan/ Indikator Utama	Misi/Arah Pembangunan/ Indikator Utama
(1)	(2)	(3)
30	Indeks Demokrasi Indonesia	30. Indeks Demokrasi Provinsi
IE 11	Stabilitas Ekonomi Makro	Stabilitas Ekonomi Makro Daerah
31	Rasio Pajak terhadap PDB (%)	31. Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%)
32	Tingkat Inflasi (%)	32. Tingkat Inflasi (%)
33	Pendalaman/Intermediasi Sektor Keuangan	33. Pendalaman/Intermediasi Sektor Keuangan
	a) Aset Perbankan/PDB (%)	a) Total Dana Pihak Ketiga/PDRB (%) *
	b) Aset Dana Pensiun/PDB (%)	b) Aset Dana Pensiun/PDRB (%)
	c) Aset Asuransi/PDB (%)	c) Nilai Transaksi Saham Per Provinsi Berupa Nilai Rata-rata Tahunan*
	d) Kapitalisasi Pasar Modal/PDB (%)	d) Total Kredit/PDRB (%)
	e) Total Kredit/PDB (%)	
34	Inklusi Keuangan (%)	34. Inklusi Keuangan (%)
IE 12	Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Berdaya Gentar Kawasan	Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Berdaya Gentar Kawasan
35	Asia Power Index (Diplomatic Influence) 35. Disesuaikan dengan karakteristik daerah, dalam rumpun Arah Pembangunan (IE) yang sam	35. Jumlah Kerjasama (<i>Sister Province/Sister City</i>)
36	Asia Power Index (Military Capability)	36. Persentase Penurunan Konflik SARA
	Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi	Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi
IE13	Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju	Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju
37	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	37. Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)
38	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	38. Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)
IE14	Keluarga Berkualitas, Kesenjangan Gender, dan Masyarakat Inklusif	Keluarga Berkualitas, Kesenjangan Gender, dan Masyarakat Inklusif
39	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga	39. Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga
40	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	40. Indeks Ketimpangan Gender (IKG)
IE 15	Lingkungan Hidup Berkualitas	Lingkungan Hidup Berkualitas
41	Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	41. Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Daerah
42	Kualitas Lingkungan Hidup	42. Kualitas Lingkungan Hidup

No	RPJP Nasional Tahun 2025-2045	RPJP Daerah Provinsi Tahun 2025-2045
	Misi /Arah Pembangunan/ Indikator Utama	Misi/Arah Pembangunan/ Indikator Utama
(1)	(2)	(3)
	a) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	a) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah
	b) Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman (%)	b) Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman (%)
	c) Timbunan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah (%)	c) Pengelolaan Sampah • Timbunan Sampah Terolah di Fasilitas pengolahan Sampah (%) • Proporsi Rumah Tangga (RT) dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah (% RT)*
IE 16	Berketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan	Berketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan
43	Ketahanan Energi, Air, dan Pangan	43. Ketahanan Energi, Air, dan Pangan
	a. Ketahanan Energi	a. Ketahanan Energi
	- Indeks Ketahanan Energi	- Konsumsi Listrik per Kapita (kWh)* - Intensitas Energi Primer (SBM/Rp milyar)*
	b. Prevalensi ketidakcukupan pangan (%)	b. Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (<i>Prevalence of Undernourishment</i>) (%)
	c. Ketahanan Air	c. Ketahanan Air
	- Kapasitas Tampung Air (m ³ /kapita)	- Kapasitas Air Baku (m ³ /detik)*
	- Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan (%)	- Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan (%)
IE17	Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim	Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim
44	Proporsi Kerugian Ekonomi Langsung Akibat Bencana Relatif terhadap PDB (%)	44. Indeks Risiko Bencana (IRB)
45	Persentase Penurunan Emisi GRK (%)	45. Persentase Penurunan Emisi GRK (%)
	a. Kumulatif	a. Kumulatif
	b. Tahunan	b. Tahunan

Sumber: SEB Menteri Dalam Negeri dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 600.2.1/3674/SJ; Nomor 2 Tahun 2024

BAB V

ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN POKOK

5.1 ARAH KEBIJAKAN

Arah kebijakan yang disusun dengan kerangka kerja pembangunan per lima tahun dalam rangka pencapaian visi daerah. Pentahapan per lima tahun mengacu pada

tahap dan tematik pembangunan dalam RPJP Nasional Tahun 2025-2045 yang disesuaikan dengan karakteristik daerah.

5.1.1. Arah Kebijakan Periode 2025-2029: Perkuatan Pondasi Transformasi

- a. **Transformasi Sosial;** Penuntasan pemenuhan pelayanan dasar, kesehatan, Pendidikan dan perlindungan sosial, peningkatan kualitas SDM untuk meningkatkan manusia produktif.
- b. **Transformasi Ekonomi;** Hilirisasi sumber daya unggulan, pengembangan pusat-pusat ekonomi baru serta penyediaan energi mendukung industrialisasi.
- c. **Transformasi Tata Kelola;** Peningkatan pelayanan publik berbasis teknologi informasi
- d. **Keamanan Daerah Tangguh, Demokrasi Substansial dan Stabilitas Ekonomi Makro Daerah;** pengembangan budaya hukum mengedepankan kepastian, keadilan, pemanfaatan, dan perdamaian berlandaskan pancasila, lembaga demokrasi yang kuat berbasis nilai serta menjaga stabilitas harga menjaga daya beli masyarakat
- e. **Ketahanan Sosial Budaya Dan Ekologi;** Peningkatan peran keluarga dan nilai agama untuk membangun modal sosial kalimantan barat yang tangguh menghadapi perubahan dan bencana
- f. **Pembangunan Kewilayahan Yang Merata Dan Berkeadilan;** Peningkatan pembangunan wilayah potensi ekonomi tinggi melalui optimalisasi pemanfaatan infrastruktur yang ada dan penyiapan pembentukan Daerah Otonom Baru
- g. **Sarana dan Prasarana Yang Berkualitas Dan Ramah Lingkungan;** Penuntasan pemenuhan pelayanan dasar (pendidikan, kesehatan, infrastruktur termasuk listrik dan micro grid) terutama pada wilayah dengan prioritas tinggi untuk mengurangi ketimpangan
- h. **Kesinambungan Pembangunan;** peningkatan tata kelola fiskal dalam pembiayaan pembangunan daerah

5.1.2. Arah Kebijakan Periode 2030-2034: Akselerasi Transformasi

- a. **Transformasi Sosial;** Penguatan pembangunan manusia inklusif dan SDM berkualitas
- b. **Transformasi Ekonomi;** Peningkatan produktivitas daerah melalui optimalisasi pusat-pusat pertumbuhan dan sumber-sumber ekonomi baru dengan pemanfaatan teknologi digital di berbagai aspek yang didukung transisi energi fosil ke energi baru dan terbarukan.

- c. **Transformasi Tata Kelola**; Kelembagaan pemerintah yang kolaboratif dan adaptif didukung ASN profesional yang Sejahtera
- d. **Keamanan Daerah Tangguh, Demokrasi Substansial dan Stabilitas Ekonomi Makro Daerah**; Peningkatan keamanan dan ketertiban daerah melalui pelaksanaan penegakan hukum yang modern serta mendorong partisipasi masyarakat yang lebih bermakna
- e. **Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi**; Penguatan lingkungan pendukung dan akses partisipasi inklusif yang memastikan keluarga mampu berfungsi dengan baik, menciptakan generasi yang mampu mengakuisisi teknologi untuk menghadapi berbagai perubahan dan bencana
- f. **Pembangunan Kewilayahan Yang Merata dan Berkeadilan**; Percepatan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dan peningkatan konektivitas fisik dan kualitas digital serta Penataan Daerah melalui Pembentukan Daerah Otonom Baru.
- g. **Sarana dan Prasarana Yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan**; Percepatan peningkatan kualitas pelayanan dasar untuk menyiapkan manusia berdaya saing diseluruh wilayah Kalimantan Barat
- h. **Kesinambungan Pembangunan**; Optimalisasi sumber pendanaan pemerintah dan pengembangan sumber pendanaan non pemerintah.

5.1.3. Arah Kebijakan Periode 2035-2039: Ekspansi Global

- a. **Transformasi Sosial**; Penguatan daya saing SDM menjadi semakin produktif dan inovatif serta keberlanjutan kesejahteraan Masyarakat.
- b. **Transformasi Ekonomi**; Penguatan daya saing ekonomi tinggi serta perluasan jaringan kelistrikan melalui interkoneksi dan smart grid.
- c. **Transformasi Tata Kelola**; Kelembagaan yang adaptif didukung ASN yang kompeten dan sejahtera serta penyederhanaan regulasi berbasis teknologi informasi modern.
- d. **Keamanan Daerah Tangguh, Demokrasi Substansial dan Stabilitas Ekonomi Makro Daerah**; Pengembangan sistem pemberantasan korupsi yang berkualitas dan sistem keamanan dan ketertiban daerah serta peningkatan kebebasan sipil dan kesetaraan yang terjamin.
- e. **Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi**; Terwujudnya manusia, keluarga masyarakat yang tangguh, tersedianya instrumen kebijakan ekonomi hijau daerah, pengurangan pencemaran lingkungan dan penerapan energi bersih dan penanganan limbah terpadu.
- f. **Pembangunan Kewilayahan Yang Merata dan Berkeadilan**; Peningkatan konektivitas kualitas regional dan internasional untuk mendorong ekspansi global terutama pada wilayah pusat-pusat pertumbuhan yang didukung dengan pengembangan energi baru terbarukan

dengan memanfaatkan letak geografis sebagai Beranda Depan Negara yang terhubung langsung negara-negara ASEAN, serta sesuai dengan potensi dan karakteristik Kalimantan Barat serta Pemenuhan akses pelayanan dasar secara merata di seluruh wilayah Kalimantan Barat.

g. **Sarana dan Prasarana Yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan;** Perluasan

cakupan pelayanan dasar yang berkualitas dan ramah lingkungan melalui pemanfaatan iptek yang modern.

h. **Kesinambungan Pembangunan;** Peningkatan, pemanfaatan, perluasan cakupan sektor menggunakan sumber dana non pemerintah di daerah serta pembiayaan pembangunan melalui kerjasama internasional.

5.1.4. Arah Kebijakan Periode 2040-2045: Perwujudan Indonesia Emas

a. **Transformasi Sosial;** Manusia Kalimantan Barat yang sejahtera, adaptif, berakhlak mulia, berbudaya maju, unggul, dan berdaya saing.

b. **Transformasi Ekonomi;** Kalimantan Barat menjadi provinsi berpendapatan tinggi melalui semakin besarnya SDM dan inovasi Kalimantan Barat yang berdaya saing global.

c. **Transformasi Tata Kelola;** Tercapainya regulasi dan tata kelola yang berintegritas dan adaptif.

d. **Keamanan Daerah Tangguh,** demokrasi substansial dan stabilitas ekonomi makro daerah; Penegakan hukum yang terpadu dan akuntabel berkeadilan, berkeadaban, bebas korupsi didukung masyarakat damai, taat hukum dan demokratis.

e. **Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi;** Terwujudnya kehidupan manusia, keluarga, masyarakat yang berkualitas, tangguh dalam menghadapi berbagai perubahan dan bencana, berdaya dan mampu berkontribusi dalam pembangunan

secara inklusif serta menjadi pusat percontohan penyelenggaraan ekonomi hijau dan pembangunan rendah karbon di Indonesia.

f. **Pembangunan Kewilayahan Yang Merata dan Berkeadilan;** Menjaga ketersediaan infrastruktur dan energi terintegrasi, berkualitas, berkelanjutan di seluruh wilayah Kalimantan Barat serta tata kelola yang andal untuk menjaga pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan pelayanan dasar berkualitas.

g. **Sarana dan Prasarana Yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan;** Masyarakat Kalimantan Barat memiliki pelayanan dasar yang berkualitas dan ramah lingkungan melalui pemanfaatan iptek yang modern.

h. **Kesinambungan Pembangunan;** Sinergi pembiayaan pemerintah dan non pemerintah semakin meningkat baik nasional maupun internasional.

Tabel 5. 1 Arah Kebijakan RPJPD

Misi	PERKUATAN PONDASI TRANSFORMASI 2025-2029	AKSELERASI TRANSFORMASI 2030-2034	EKSPANSI GLOBAL 2035-2039	PERWUJUDAN KALBAR EMAS 2040- 2045
Transformasi Sosial	Penuntasan pemenuhan pelayanan dasar, kesehatan, Pendidikan dan perlindungan sosial, peningkatan kualitas SDM untuk meningkatkan manusia produktif.	Penguatan pembangunan manusia inklusif dan SDM berkualitas	Penguatan daya saing SDM menjadi semakin produktif dan inovatif serta keberlanjutan kesejahteraan Masyarakat	Manusia Kalimantan Barat yang sejahtera, adaptif, berakhlak mulia, berbudaya maju, unggul, dan berdaya saing.
Transformasi Ekonomi	Hilirisasi sumber daya unggulan, pengembangan pusat-pusat ekonomi baru serta penyediaan energi mendukung industrialisasi	Peningkatan produktivitas daerah melalui optimalisasi pusat-pusat pertumbuhan dan sumber-sumber ekonomi baru dengan pemanfaatan teknologi digital di berbagai aspek yang didukung transisi energi fosil ke energi baru dan terbarukan	Penguatan daya saing ekonomi tinggi serta perluasan jaringan kelistrikan melalui interkoneksi dan smart grid.	Kalimantan Barat menjadi provinsi berpendapatan tinggi melalui semakin besarnya SDM dan inovasi Kalimantan Barat yang berdaya saing global
Transformasi Tata Kelola	Peningkatan pelayanan publik berbasis teknologi informasi	Kelembagaan pemerintah yang kolaboratif dan adaptif didukung ASN profesional yang Sejahtera	Kelembagaan yang adaptif didukung ASN yang kompeten dan sejahtera serta penyederhanaan regulasi berbasis teknologi informasi modern	Tercapainya regulasi dan tata kelola yang berintegritas dan adaptif
Keamanan Daerah Tangguh, Demokrasi Substansial dan Stabilitas Ekonomi Makro Daerah	Pengembangan budaya hukum mengedepankan kepastian, keadilan, pemanfaatan, dan perdamaian berlandaskan Pancasila, lembaga demokrasi yang kuat berbasis nilai serta menjaga stabilitas harga menjaga daya beli masyarakat	Peningkatan keamanan dan ketertiban daerah melalui pelaksanaan penegakan hukum yang modern serta mendorong partisipasi masyarakat yang lebih bermakna	Pengembangan sistem pemberantasan korupsi yang berkualitas dan sistem keamanan dan ketertiban daerah serta peningkatan kebebasan sipil dan kesetaraan yang terjamin	Demokrasi substansial dan stabilitas ekonomi makro daerah; Penegakan hukum yang terpadu dan akuntabel berkeadilan, berkeadaban, bebas korupsi didukung masyarakat damai, taat hukum dan demokratis
Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi	Peningkatan peran keluarga dan nilai agama untuk membangun modal sosial kalimantan barat yang tangguh menghadapi perubahan dan bencana	Penguatan lingkungan pendukung dan akses partisipasi inklusif yang memastikan keluarga mampu berfungsi dengan baik, menciptakan generasi yang mampu mengakuisisi teknologi untuk menghadapi berbagai perubahan dan bencana	Terwujudnya manusia, keluarga masyarakat yang tangguh, tersedianya instrumen kebijakan ekonomi hijau daerah, pengurangan pencemaran lingkungan dan penerapan energi bersih dan penanganan limbah terpadu	Terwujudnya kehidupan manusia, keluarga, masyarakat yang berkualitas, tangguh dalam menghadapi berbagai perubahan dan bencana, berdaya dan mampu berkontribusi dalam pembangunan secara inklusif serta menjadi pusat percontohan penyelenggaraan ekonomi hijau dan pembangunan rendah karbon di Indonesia.
Pembangunan Kewilayahan Yang Merata dan Berkeadilan	Peningkatan pembangunan wilayah potensi ekonomi tinggi melalui optimalisasi pemanfaatan infrastruktur yang ada dan penyiapan pembentukan Daerah Otonom Baru.	Percepatan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dan peningkatan konektivitas fisik dan kualitas digital serta Penataan Daerah melalui Pembentukan Daerah Otonom Baru	Peningkatan konektivitas kualitas regional dan internasional untuk mendorong ekspansi global terutama pada wilayah pusat-pusat pertumbuhan yang didukung dengan pengembangan energi baru terbarukan dengan memanfaatkan letak geografis	Menjaga ketersediaan infrastruktur dan energi terintegrasi, berkualitas, berkelanjutan di seluruh wilayah Kalimantan Barat serta tata kelola yang andal untuk menjaga pertumbuhan

“Kalimantan Barat Maju, Sejahtera, dan Berkelanjutan”

Misi	PERKUATAN PONDASI TRANSFORMASI 2025-2029	AKSELERASI TRANSFORMASI 2030-2034	EKSPANSI GLOBAL 2035-2039	PERWUJUDAN KALBAR EMAS 2040- 2045
			sebagai Beranda Depan Negara yang terhubung langsung negara-negara ASEAN, serta sesuai dengan potensi dan karakteristik Kalimantan Barat serta Pemenuhan akses pelayanan dasar secara merata di seluruh wilayah Kalimantan Barat.	ekonomi yang tinggi dan pelayanan dasar berkualitas
Sarana dan Prasarana Yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan	Penuntasan pemenuhan pelayanan dasar (pendidikan, kesehatan, infrastruktur termasuk listrik dan micro grid) terutama pada wilayah dengan prioritas tinggi untuk mengurangi ketimpangan	Percepatan peningkatan kualitas pelayanan dasar untuk menyiapkan manusia berdaya saing diseluruh wilayah Kalimantan Barat	Perluasan cakupan pelayanan dasar yang berkualitas dan ramah lingkungan melalui pemanfaatan iptek yang modern	Masyarakat Kalimantan Barat memiliki pelayanan dasar yang berkualitas dan ramah lingkungan melalui pemanfaatan iptek yang modern
Kesinambungan Pembangunan	peningkatan tata kelola fiskal dalam pembiayaan pembangunan daerah	Optimalisasi sumber pendanaan pemerintah dan pengembangan sumber pendanaan non pemerintah	Peningkatan, pemanfaatan, perluasan cakupan sektor menggunakan sumber dana non pemerintah di daerah serta pembiayaan pembangunan melalui kerjasama internasional.	Sinergi pembiayaan pemerintah dan non pemerintah semakin meningkat baik nasional maupun internasional.

5.2 SASARAN POKOK

Sasaran pokok RPJPD Tahun 2025-2045 merupakan gambaran kinerja daerah dalam pencapaian pembangunan yang menggambarkan secara langsung terwujudnya Visi RPJPD Tahun 2025-2045 Provinsi Kalimantan Barat. Visi RPJPD Provinsi Kalimantan Barat 2025-2045 adalah “KALIMANTAN BARAT MAJU, SEJAHTERA, DAN BERKELANJUTAN”, dengan sasaran yang ingin dicapai pada masing-masing visi sebagai berikut:

1. Kalimantan Barat Maju ingin mencapai sasaran pokok yaitu terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang terus meningkat, pendapatan perkapita setara nasional, SDM unggul dan berdaya saing, lptek & Inovasi, digitalisasi berkembang pesat pendidikan berkualitas dan merata, implementasi green economy, penyediaan sumber EBT, masyarakat mandiri secara ekonomi, pengembangan komoditas endemik spesifik daerah, berkembangnya pusat-pusat kegiatan dan optimalisasi potensi dan keunggulan daerah.
2. Kalimantan Barat Sejahtera dengan sasaran terwujudnya Angka Kemiskinan Rendah menuju 0%, Kondusifitas Wilayah, IPM Tinggi, ketersediaan Jaminan Kesehatan & Sosial, Angka Pengangguran Rendah, Infrastruktur Dasar Terpenuhi, terpenuhinya hak dasar masyarakat, tata kelola pemerintahan dan regulasi terintegrasi berbasis sistem informasi di

semua level pemerintahan, adanya sinergi pembiayaan pembangunan melalui ekonomi syariah

3. Kalimantan Barat Berkelanjutan diwujudkan dengan terwujudnya pemanfaatan jasa lingkungan yang seimbang dan bernilai ekonomi, perlindungan hutan, lahan gambut, pesisir dan pulau kecil, penanganan dan pengolahan limbah terpadu, pembangunan rendah karbon serta ekstraksi SDA sesuai daya tampung dan daya dukung, serta tangguh mengatasi bencana dan perubahan dari berbagai aspek.

Jika dikaji lebih lanjut, berbagai sasaran ini sudah termasuk di dalam 5 sasaran visi serta dapat disederhanakan menjadi 6 sasaran pokok sebagai berikut:

1. Mewujudkan SDM Kalimantan Barat Unggul dan Berdaya Saing.
2. Mewujudkan ekonomi kalimantan barat yang maju, inklusif, dan berkelanjutan berbasis iptekin.
3. Mewujudkan pemenuhan infrastruktur dasar dan strategis di kalimantan barat.
4. Mewujudkan kalimantan barat yang aman dan kondusif.
5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang adaptif, agile, dan berbasis teknologi informasi di semua level pemerintahan.

6. Mewujudkan lingkungan yang lestari dan ketangguhan terhadap bencana dan berbagai perubahan di segala aspek.

Tabel 5. 2 Sasaran Pokok

No	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Indikator Utama Pembangunan	Target	
				Baseline 2025	Target 2045
1	2	3	4	5	6
1	Mewujudkan SDM Kalimantan Barat Unggul dan Berdaya Saing	Kesehatan untuk semua	1. Usia Harapan Hidup	74,03	79,58
			2. Kesehatan ibu dan anak		
			a. angka kematian ibu (per 100.000 kelahiran hidup)	120	20
			b. Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)	21,8	6,8
			3. Insidensi tuberkulosis (per 100.000 penduduk)		
			a. Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (treatment coverage) (%)	90	95
			b. Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate) (%)	88,74	98
			4. Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (%)	91,6	99,5
		Pendidikan berkualitas dan merata	5. Hasil pembelajaran		
			a. Persentase kabupaten/kota yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk:		
			i. Literasi Membaca	7,14-14,29	64,29-71,43
			ii. Numerasi	0,00 – 7,14	57,14-64,29
			b. Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk:		
			i. Literasi Membaca	30,47-32,47	66,24-68,24
			ii. Numerasi	18,63-20,63	58,10-60,10
			c. rata-rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun (tahun)	8,44	10,70-10,71
			d. harapan lama sekolah	12,91-12,92	14,27-14,33
			6. Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi (%)	8,76	9,76-10,21
			7. Persentase pekerja lulusan pendidikan menengah dan tinggi yang bekerja di bidang keahlian menengah tinggi (%)	73,64	85
		Perlindungan sosial dan adaptif	8. Tingkat kemiskinan (%)	5,65-6,15	0,08-0,58
			9. Cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan (%)	59,56	84,4
			10. Persentase penyandang disabilitas di sektor formal (%)	25	50
2				16,50-17,40	28,63-37,57

No	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Indikator Utama Pembangunan	Target	
				Baseline 2025	Target 2045
1	2	3	4	5	6
	Mewujudkan ekonomi kalimantan barat yang maju berbasis iptekin	Iptek, inovasi, dan produktivitas ekonomi	11. Rasio PDRB Industri pengolahan (%)		
			12. Pengembangan pariwisata		
			a. Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (%)*	2,42	4,11
			b. Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara (Hotel Berbintang) (ribu orang)*	23,18	83,33
			13. Proporsi Investasi Pelaku Ekonomi Kreatif Terhadap Total Invenstasi di Kalimantan Barat		
			14. Produktivitas UMKM, Koperasi, BUMD		
			a. Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah Non Pertanian pada Level Provinsi (%)	13,43	17,68
			b. proporsi jumlah usaha kecil dan menengah	1,74	4,43
			c. Rasio kewirausahaan (%)	3,26	9,74
			d. Rasio volume usaha koperasi terhadap PDRB (%)	3,86	5,11
			e. Return on asset (ROA) BUMD (%)	4,47	5,34
			15. Penciptaan Lapangan Kerja yang Baik		
			a. Tingkat Peangguran Terbuka (%)	4,73-4,86	1,97-2,98
			b. Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal (%)	44	90
			16. Tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan (%)	57,02	70,10
			17. Inovasi Daerah	45	65
		Penerapan ekonomi hijau	18. Tingkat penerapan ekonomi hijau		
			a. Indeks ekonomi hijau	69,47	89,68
			b. Porsi EBT Bauran Energi Primer	38	94,96
		Transformasi digital	19. Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi	6	7,5
		Integrasi Ekonomi Domestik dan Global	20. Koefisien Variasi Harga Antar Wilayah Tingkat Provinsi	10,46	5,7
			21. Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB)	32,17	33,53
			22. Ekspor Barang dan Jasa (% PDRB)	16,67	22,89
3	Mewujudkan pemenuhan infrastruktur dasar dan strategis di kalimantan barat	Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi	23. Kota dan Desa Maju, Inklusif, dan Berkelanjutan		
			a. Proporsi Kontribusi PDRB Wilayah Metropolitan terhadap Nasional (%) Disesuaikan dengan karakteristik daerah, dalam rumpun Arah Pembangunan (IE) yang sama	0	N/A
				70,33	100

**“Kalimantan Barat Maju, Sejahtera,
dan Berkelanjutan”**

No	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Indikator Utama Pembangunan	Target	
				Baseline 2025	Target 2045
1	2	3	4	5	6
4	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berbasis sistem informasi di semua level pemerintahan	Regulasi dan Tata kelola yang Berintegritas dan Adaptif	b. Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan (%)		
			c. Persentase Desa Mandiri (%)	1,56	11,49
			24. Indeks Reformasi Hukum	70	100
			25. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	3,7	5
5	Mewujudkan kalimantan barat yang aman dan kondusif	Keamanan dan ketertiban umum daerah yang kondusif dan demokrasi substansial	26. Indeks Pelayanan Publik	4,42	5
			27. Indeks Integritas Nasional	79,99	96,36
			28. Persentase Capaian Pelaksanaan Aksi HAM	40	75
			29. Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya (%)	73,07	90,45
		Stabilitas Ekonomi Makro Daerah	30. Indeks Demokrasi Provinsi	Tinggi	Tinggi
			31. Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%)	1,7	2,6
			32. Tingkat Inflasi (%)	3,1-3,7	1-3,1
			33. Pendalaman/Intermediasi Sektor Keuangan		
			a. Total Dana Pihak Ketiga/PDRB (%) *	28,9	66,8
			b. Aset Dana Pensiun/PDRB (%)	0,26	3,57
			c. Nilai Transaksi Saham Per Provinsi Berupa Nilai Rata-rata Tahunan*	6.331.992,70	35.375.429,37
			d. Total Kredit/PDRB (%)	26,6	62,3
			34. Inklusi Keuangan (%)	90,4	98,86
		Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Berdaya Gentar Kawasan	35. Jumlah Kerja Sama Provinsi/Kabupaten/Kota Kembar (Sister Province/Sister City)	2	6
			36. Persentase penurunan konflik SARA	0	0
		Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju	37. Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	56,28 - 56,37	64,96-65,79
			38. Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	79,78 - 79,85	87,41 - 88,2
		Keluarga Berkualitas, Kesenjangan Gender, dan Masyarakat Inklusif	39. Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga	65,95 - 65,96	70,69 - 70,70
			40. Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	0,493 – 0,492	0,237 – 0,226
6	Mewujudkan lingkungan yang lestari dan ketangguhan terhadap bencana dan berbagai perubahan di segala aspek	Lingkungan Hidup Berkualitas	41. Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Daerah	0,465	0,627
			42. Kualitas Lingkungan Hidup		
			a. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	77,51	83,24
			b. Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman (%)	3,38	50,00
			c. Pengelolaan Sampah		

No	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Indikator Utama Pembangunan	Target	
				Baseline 2025	Target 2045
1	2	3	4	5	6
			i. Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah (%)	8	90
			ii. Proporsi Rumah Tangga (RT) dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah (% RT)	24	100
		Berketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan	43. Ketahanan Energi, Air, dan Pangan		
			a. Ketahanan Energi		
			i. Konsumsi Listrik per Kapita (kWh)*	700	1.510
			ii. Intensitas Energi Primer (SBM/Rp milyar)*	180	110
			b. Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment) (%)	13,44	0,27
			c. Ketahanan Air		
			i. Kapasitas Air Baku (m3/detik)*	1,84	7,58
			ii. Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan (%)	38,92	100
		Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim	44. Indeks Risiko Bencana (IRB)	113,86	96,96-82,47
			45. Persentase Penurunan Emisi GRK (%)		
			a. Kumulatif	25,22	59,83
			b. Tahunan	43,62	100

Sumber: SEB Menteri Dalam Negeri dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 600.2.1/3674/SJ; Nomor 2 Tahun 2024

5.2.1. Arah Pembangunan Daerah

Arah Pembangunan Daerah merupakan strategi daerah dalam mencapai tujuan pembangunan daerah dan berkontribusi terhadap pencapaian tujuan pembangunan nasional jangka panjang yang sesuai dengan karakteristik dan potensi wilayah. Arah Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Barat disusun berdasarkan kondisi geografis, sosial, ekonomi, potensi wilayah, dan

arah pembangunan nasional, di mana Kalimantan Barat diarahkan menjadi “Beranda Depan Negara dan Pusat Industri Hijau Bernilai Tambah”. Hal ini didukung oleh potensi pengembangan kawasan perbatasan dengan adanya PLBN terbangun dan operasional. Adapun Arah Pembangunan Kalimantan Barat sebagai berikut:

5.2.1.1. Transformasi Sosial

Selama dua dekade mendatang, pembangunan di Kalimantan Barat akan mengalami perubahan signifikan yang memerlukan transformasi sosial

yang mendalam. Ini mencakup perubahan dalam struktur, institusi, nilai, norma, dan perilaku masyarakat. Beberapa perubahan

besar yang dihadapi termasuk perubahan demografis, kemajuan teknologi, perubahan iklim, ketegangan geopolitik, pergeseran ekonomi, dan kemajuan budaya. Transformasi sosial akan menjadi kunci untuk menghadapi tantangan-tantangan ini, memungkinkan masyarakat untuk menanggapi dan beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan yang terjadi. Adapun Arah Pembangunan Transformasi Sosial adalah beberapa hal berikut:

1. *Kesehatan untuk Semua*; Pembangunan kesehatan bertujuan agar setiap penduduk dapat hidup sehat, kebijakan pembangunan kesehatan diarahkan untuk meningkatkan upaya kesehatan dan memperkuat sistem kesehatan. Kebijakan untuk meningkatkan upaya kesehatan, ditekankan pada kebijakan untuk mewujudkan sistem kesehatan yang tangguh dan responsif. Selain itu, kesehatan untuk semua diwujudkan melalui peningkatan layanan kesehatan dengan fasilitas kesehatan di wilayah pedalaman dan daerah terpencil mendapat perhatian lebih untuk memastikan pemerataan akses layanan kesehatan. Pembangunan kesehatan juga diarahkan melalui pengembangan kebijakan keluarga berencana secara komprehensif untuk mencapai penduduk tumbuh seimbang, melalui pengendalian dan pencegahan kehamilan berisiko.
2. *Pendidikan Berkualitas yang Merata*; Pendidikan berperan sentral dalam peningkatan kualitas hidup manusia serta mewujudkan kehidupan masyarakat dan

bangsa yang bermartabat. Taraf pendidikan penduduk yang meningkat mampu menciptakan SDM unggul dan berdaya saing. Untuk mencapai sasaran pembangunan 2045, kebijakan pendidikan diarahkan pada pendidikan yang inklusif dan adaptif serta peningkatan kualitas dan relevansi pendidikan dengan tuntutan global berbasis prinsip pendidikan sepanjang hayat (*lifelong learning*), selain itu pendidikan berkualitas dan merata juga dilakukan melalui Peningkatan Akses Pendidikan di mana pemerintah daerah bekerja keras untuk meningkatkan kualitas dan akses pendidikan di seluruh wilayah, baik di kota maupun di pedesaan, agar seluruh masyarakat memiliki kesempatan yang sama. Pembangunan SDM, salah satu fokus utama adalah membangun Indeks Modal Manusia dengan menitikberatkan pada peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan tenaga kerja agar lebih kompetitif dalam menghadapi persaingan global.

3. *Perlindungan Sosial yang Adaptif*; ditujukan untuk percepatan pengentasan kemiskinan dan memperluas perlindungan yang menyeluruh bagi seluruh penduduk sesuai kerentanan yang dijalankan dengan prinsip berkeadilan dan inklusif. Untuk menjaga kesinambungan, keberlanjutan, serta ketercapaian kebijakan menuju transformasi sosial yang holistik, diperlukan indikator utama pengukur keberhasilan. Perlindungan Sosial yang Adaptif juga diwujudkan melalui Program Kesejahteraan Sosial, di mana

Transformasi sosial di Kalimantan Barat juga mencakup peningkatan program-program kesejahteraan sosial untuk mengatasi kemiskinan, meningkatkan sanitasi, dan akses air bersih.

Arah transformasi sosial ini diharapkan mampu menciptakan masyarakat Kalbar yang lebih inklusif, berkelanjutan, dan berdaya saing tinggi.

5.2.1.2. Transformasi Ekonomi

Selama dua dekade ke depan, pembangunan ekonomi di Kalimantan Barat akan menghadapi perubahan signifikan yang memerlukan transformasi ekonomi. Perubahan besar ini mencakup perubahan dalam struktur demografis, kemajuan teknologi, perubahan iklim, serta pergeseran geopolitik dan geoekonomi. Selain itu, transformasi ekonomi juga penting untuk membantu Indonesia dalam hal ini juga Provinsi Kalimantan Barat, keluar dari status negara berpendapatan menengah dengan mengarahkan perekonomian pada nilai tambah ekspor yang lebih tinggi. Pelaksanaan transformasi ini akan membantu negara dan masyarakat beradaptasi dengan perubahan tersebut, meningkatkan efisiensi dan produktivitas ekonomi, serta memperkuat sektor-sektor ekonomi potensial untuk tumbuh dan berkembang. Adapun Arah Pembangunan Transformasi Ekonomi adalah beberapa hal berikut:

1. *Iptek, inovasi dan produktivitas ekonomi*; Iptek dan inovasi menjadi pendorong untuk tidak hanya menjaga, melainkan juga mempercepat keberlanjutan produktivitas sektor-sektor ekonomi dan memperkuat struktur ekonomi dalam jangka panjang. Indonesia diharapkan akan mengambil peran sebagai salah satu pusat

pengembangan iptek dan inovasi di Kawasan Asia dan dunia, terutama dalam bidang kemaritiman, biodiversitas, teknologi material, serta kebencanaan dan mitigasi bencana. Industrialisasi (industri pengolahan) sebagai penggerak utama pertumbuhan ekonomi yang berdaya saing global. Dalam mewujudkan tujuan tersebut, arah kebijakan pengembangan industri pengolahan mencakup: hilirisasi industri prioritas, penguatan industri dasar prioritas, pengembangan industri berbasis teknologi-menengah dan tinggi prioritas. Pemerintah juga mendorong lahirnya startup lokal yang dapat memberikan solusi bagi permasalahan lokal sekaligus membuka lapangan pekerjaan baru di era digital.

2. *Penerapan ekonomi hijau*; Penerapan ekonomi hijau dalam transformasi ekonomi ditujukan agar pertumbuhan ekonomi yang tinggi sejalan dengan meningkatnya daya dukung dan daya tampung lingkungan agar berkelanjutan. Transisi energi diarahkan untuk pemanfaatan energi bersih, efisien dan terbarukan. Percepatan implementasi ekonomi sirkular bertujuan untuk mengurangi penggunaan materi input produksi (resource efficiency). Pembiayaan untuk mendukung Ekonomi Hijau diarahkan

untuk mempercepat terwujudnya investasi hijau di berbagai sektor

3. *Transformasi digital*; Untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045 utamanya melalui transformasi ekonomi memerlukan pengarusutamaan transformasi digital melalui pengembangan super platform, percepatan transformasi digital, dan produksi talenta digital. Selain itu transformasi digital juga ditandai dengan meningkatnya adopsi teknologi di seluruh sektor, Kalimantan Barat mendorong digitalisasi baik di sektor bisnis, pendidikan, maupun pemerintahan untuk meningkatkan efisiensi dan aksesibilitas layanan publik.
4. *Integrasi ekonomi domestik dan global*; Integrasi ekonomi domestik dan global akan

mendorong peningkatan produktivitas perekonomian dalam negeri yang terintegrasi dan mendukung partisipasi dalam rantai pasok global. Kekuatan besar Indonesia memainkan peran kunci sebagai *economic powerhouse* yang terlibat aktif dan berperan besar dalam produksi komoditas bernilai tambah tinggi.

5. *Perkotaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi*; Pengembangan wilayah metropolitan sebagai pusat jasa dan perdagangan yang maju sehingga dapat menjadi hub ekonomi nasional dan global, termasuk pengembangan Ibu Kota Nusantara (IKN) sebagai superhub ekonomi sekaligus menjadi kota yang inklusif dan berkelanjutan

5.2.1.3. Transformasi Tata Kelola

Tata kelola mengacu pada pengelolaan sektor publik yang harus efisien, efektif, dan akuntabel, dengan dasar pertukaran informasi yang terbuka dan transparan serta kepatuhan terhadap kerangka hukum. Transformasi tata kelola diperlukan agar pemerintah dapat beroperasi dengan kerangka kerja yang lebih efektif dan akuntabel, sehingga dapat memberikan pelayanan publik yang berkualitas. Tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas akan semakin efektif dengan dukungan sistem penegakan hukum yang menekankan pencegahan dan perlindungan aset negara, termasuk melalui mekanisme perjanjian penuntutan yang transparan dan akuntabel, serta pendekatan restoratif, korektif, dan rehabilitatif. Tujuan dari

transformasi tata kelola adalah menciptakan lingkungan kelembagaan yang mendukung tercapainya regulasi dan tata kelola yang terintegrasi dan adaptif.

Adapun Arah Pembangunan Transformasi Tata Kelola melalui *Regulasi dan tata kelola yang berintegritas dan adaptif*; bertujuan untuk mewujudkan regulasi dan tata kelola yang berintegritas dan adaptif, mewujudkan kelembagaan yang efektif, mewujudkan proses bisnis yang adaptif serta mewujudkan manajemen talenta, arah kebijakan difokuskan pada penguatan manajemen talenta ASN, mewujudkan layanan publik yang berkualitas dan inklusif, mewujudkan pelayanan strategis yang berkualitas

5.2.1.4. Keamanan Daerah Tangguh, Demokrasi Substansial dan Stabilitas Ekonomi Makro Daerah

Untuk mewujudkan visi Kalimantan Barat maju sejahtera dan berkelanjutan 2045 keberhasilan transformasi secara menyeluruh baik di tataran nasional maupun daerah perlu didorong oleh penciptaan Keamanan Daerah Tangguh, Demokrasi Substansial dan Stabilitas Ekonomi Makro Daerah. sebagai faktor pengampun visi Kalimantan Barat maju sejahtera berkelanjutan 2045, arah pembangunannya terdiri dari:

1. *Keamanan dan ketertiban umum daerah yang kondusif dan demokrasi substansial*; terwujudnya supremasi hukum yang berkeadilan, berkepastian, bermanfaat, dan berlandaskan hak asasi manusia. Keamanan dan ketertiban daerah diarahkan menuju keselamatan masyarakat Kalimantan Barat, Pembangunan demokrasi diarahkan pada terwujudnya demokrasi

substansial yang mengemban amanat rakyat.

2. *Stabilitas ekonomi makro daerah*; diarahkan untuk mewujudkan kesinambungan fiskal, serta menjaga stabilitas moneter dan sektor keuangan disesuaikan dengan kebutuhan pembangunan dan memperhatikan tingkat utang yang menjamin keberlanjutan fiskal serta pada peningkatan kualitas belanja dan upaya mewujudkan anggaran kesejahteraan (*well-being budget*)
3. *Ketangguhan Diplomasi dan Perthanan Berdaya Gentar Kawasan*. Hal ini didukung oleh letak geografis Kalimantan Barat yang berbatasan dengan Negara Malaysia dan kerja sama Sosial Ekonomi Malaysia Indonesia (Sosek Malindo).

5.2.1.5. Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi

Ketahanan sosial, budaya, dan ekologi yang kokoh merupakan dasar penting untuk mencapai transformasi sosial, ekonomi, dan tata kelola. Ketahanan ini mencakup kemampuan individu, masyarakat, serta lingkungan sekitar untuk bertahan dan menjaga keseimbangan dalam menghadapi berbagai perubahan dan guncangan, sehingga daya dukung dan daya tampung lingkungan tetap terjaga secara berkelanjutan, dan setiap individu dapat berkontribusi secara positif dalam pembangunan.

Hubungan timbal balik antara sistem sosial, budaya, dan ekologis selalu berupaya mencari

keseimbangan, membentuk ketahanan sosial budaya dan ekonomi antara manusia dan lingkungan. Kehidupan dalam ekosistem harus saling menguntungkan dan mendukung keberlanjutan bersama. Peningkatan jumlah penduduk dan aktivitas ekonomi mengakibatkan eksploitasi dan kerusakan lingkungan yang terus berlanjut, sedangkan kemampuan pemulihan alam tidak secepat laju kebutuhan tersebut. Perubahan iklim dan bencana juga memberikan dampak nyata, merugikan ekonomi, penghidupan, tempat tinggal, bahkan nyawa. Selain itu, globalisasi menyebabkan pelemahan nilai-nilai positif seperti kejujuran,

empati, kesukarelaan, dan toleransi di sebagian kelompok masyarakat, serta perubahan pola interaksi yang semakin individualistik. Hal ini berkontribusi pada degradasi moral, konflik, ketidakamanan, dan ketidaknyamanan yang mengancam harmoni sosial dan kebersihan di keluarga serta masyarakat, serta merusak lingkungan.

Ketahanan sosial, budaya, dan ekologi bergantung pada keseimbangan antara kemampuan sumber daya alam dan lingkungan untuk beradaptasi dan terus menyediakan jasa lingkungan. Ini juga mencakup pembangunan manusia yang beretika, bermoral, dan berbudaya serta berkeluarga yang berkualitas dalam mengelola sumber daya dan lingkungan. Upaya ini bertujuan untuk mencegah konflik sosial dan kerusakan alam, sehingga generasi mendatang dapat menikmati hasil pembangunan dan merasakan kualitas hidup yang baik. Arah pembangunan ini terdiri dari:

1. *Beragama maslahat dan berkebudayaan maju*; Penguatan peran agama sebagai landasan spiritual, etika, moral, dan modal dasar pembangunan. Pemajuan dan pelestarian kebudayaan untuk memperkuat karakter, memperteguh jati diri bangsa, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta memantapkan peran dan posisi Indonesia dalam mempengaruhi arah perkembangan peradaban dunia
2. *Keluarga berkualitas, kesetaraan gender dan masyarakat inklusif*; Peningkatan ketangguhan individu, keluarga dan masyarakat untuk memastikan terbentuknya

sumber daya manusia berkualitas sebagai motor penggerak pembangunan. Penguatan Pengarusutamaan Gender (PUG) dan inklusi sosial untuk memastikan tidak ada satu orang pun yang tertinggal dalam pembangunan (*no one left behind*).

3. *Lingkungan hidup berkualitas*; Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup untuk peningkatan kualitas hidup, produktivitas, dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Perkuatan pembangunan infrastruktur untuk mencegah dan meminimalkan kerusakan alam serta mengendalikan pencemaran lingkungan. Penguatan efektivitas tata kelola kawasan konservasi darat dan laut dalam mewujudkan kelestarian keanekaragaman hayati Kalimantan Barat. Pengembangan pemanfaatan keanekaragaman hayati secara berkelanjutan sebagai modal dasar pembangunan Kalimantan Barat. Lingkungan hidup berkualitas juga dapat diwujudkan melalui Kesadaran Lingkungan, dengan adanya perkembangan pesat di sektor perkebunan dan pertambangan, muncul tantangan dalam hal keberlanjutan lingkungan. Ada tekanan yang kuat untuk mengadopsi praktik-praktik ekonomi yang ramah lingkungan dan lestari. Penanganan Perubahan Iklim, isu kebakaran hutan dan penggundulan hutan menjadi fokus utama, sehingga perlu adanya regulasi yang tegas dalam menjaga kelestarian alam Kalimantan Barat.

4. *Ketahanan energi, air dan kemandirian pangan*; Untuk memastikan kemandirian pangan didukung dengan ketahanan energi dan air dilakukan pendekatan terpadu FEW Nexus (*Food, Energy, Water*). Efisiensi dan efektivitas pendayagunaan sumber daya air, transformasi sistem pangan menuju eco-region sistem pangan yang berkelanjutan, sehat dan tangguh berbasis sumber daya dan kearifan lokal. Integrasi pangan akuatik sebagai bagian dari sistem pangan untuk menyediakan pangan yang cukup, beragam, bergizi, seimbang, sehat, dan aman.
5. *Resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim*; Pembangunan rendah karbon dilakukan untuk mencapai penurunan emisi GRK, pembangunan berketahanan iklim untuk menekan potensi kerugian ekonomi akibat perubahan iklim. Penanggulangan bencana didasarkan pada karakteristik dan kondisi bencana di Kalimantan Barat.

5.2.2. Arah Kebijakan Transformasi

Arah kebijakan menggambarkan upaya transformasi penurunan dari RPJPN 2025-2045 untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional serta menggambarkan upaya transformasi yang spesifik dengan kebutuhan/karakteristik daerah dan mendukung tercapainya visi daerah. Arah kebijakan Transformasi menurut Provinsi Kalimantan Barat dapat dilihat pada tabel 5.3

Tabel 5. 3 Arah Kebijakan Transformasi dalam Rancangan RPJP Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2025-2045

No	Transformasi/ Landasan Transformasi	Arah Kebijakan Transformasi	Periode			
			2025- 2029	2030- 2034	2035- 2039	2040- 2045
1	Transformasi Sosial	Perluasan upaya promotif-preventif dan pembudayaan perilaku hidup sehat.				
2		Pemenuhan tenaga kesehatan yang berkelanjutan didukung peningkatan produksi dan kompetensinya (termasuk tenaga kesehatan spesialis), serta afirmasi di daerah 3TP.				
3		Pemerataan akses pelayanan kesehatan berkualitas disertai inovasi pelayanan, terutama di daerah perbatasan.				
4		Percepatan wajib belajar 13 tahun (1 tahun prasekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah).				
5		Peningkatan akses dan kualitas pendidikan vokasi untuk menyediakan tenaga kerja dengan talenta terampil dan berpengalaman sesuai potensi terutama perkebunan, pertambangan, industri dan pariwisata, serta keterkaitan dengan DUDI yang dikembangkan melalui skema <i>education to employment</i> .				
6		Pemanfaatan dan pemutakhiran rutin data Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) untuk program pusat maupun daerah dan desa agar tepat sasaran.				
7		Peningkatan kolaborasi antar pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat dan dunia usaha dalam penyediaan perumahan.				
8		Pengentasan kemiskinan ekstrem pada daerah afirmasi 3TP di seluruh Wilayah melalui perlindungan sosial adaptif.				
9		Peningkatan akses pendidikan, terutama untuk daerah yang masih belum terjangkau termasuk perbatasan dan terpencil dengan mengembangkan sistem pembelajaran jarak jauh melalui pemanfaatan TIK, penyediaan asrama siswa dan guru, dan penguatan sekolah terbuka.				
10		Penuntasan <i>stunting</i> dan percepatan eliminasi malaria melalui pendekatan integrasi multisektor dan rekayasa lingkungan habitat vektor.				
11		Pemerataan kualitas antarsatuan pendidikan untuk memastikan lulusan dengan kualitas yang setara dan tingkat kebermanfaatan tinggi.				
12		Percepatan peningkatan partisipasi Pendidikan tinggi dan pengembangan maupun pembukaan baru perguruan tinggi dan pengadaan prodi berstandar internasional berbasis riset dan bidang keilmuan khusus (STEAM) yang sesuai dengan kluster ekonomi potensial masa depan melalui kemitraan bersama perguruan tinggi global.				
13		Peningkatan kualitas dan kompetensi tenaga pendidik yang modern dan adaptif.				
14		Perencanaan, penganggaran melalui APBD dan APBDes, serta komitmen daerah yang lebih berpihak untuk program perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi, terutama melalui pemenuhan SPM sosial.				
15		Pengembangan perlindungan sosial adaptif bagi seluruh masyarakat terutama kelompok rentan, terutama untuk daerah yang menghadapi resiko bencana dan perubahan iklim, melalui antara lain upaya pro aktif mendukung perluasan cakupan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi usia pekerja, pengembangan perlindungan sosial daerah yang responsif, integrasi program perlindungan sosial daerah dengan program pemberdayaan ekonomi, program ketenagakerjaan, pencegahan dan penanggulangan bencana, serta program terkait perubahan iklim.				
16		Peningkatan akses rumah layak huni dan terjangkau sesuai dengan karakteristik wilayah.				

“Kalimantan Barat Maju, Sejahtera, dan Berkelanjutan”

No	Transformasi/ Landasan Transformasi	Arah Kebijakan Transformasi	Periode			
			2025- 2029	2030- 2034	2035- 2039	2040- 2045
17		Perluasan cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan khususnya bagi pekerja bukan penerima upah dan rentan, dan perlindungan pensiun bagi lansia miskin dan tidak mampu.				
18		Mendorong pemenuhan dan akses penduduk terhadap perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi yang terintegrasi, komprehensif, dan memiliki cakupan yang inklusif, terutama untuk daerah 3T.				
19		Pengembangan teknologi dan kualitas sumber daya konstruksi dalam rangka penegakan standar keandalan bangunan.				
20		Memastikan lingkungan yang inklusif, termasuk perlindungan sosial, kegiatan ekonomi, infrastruktur, dan pemenuhan hak bagi penduduk lansia (terutama di wilayah dengan penuaan penduduk yang lebih cepat - setidaknya 10% penduduk adalah lansia) dan penyandang disabilitas.				
21	Transformasi Ekonomi	Pengembangan pusat-pusat industri melalui (i) hilirisasi komoditi unggulan Kalimantan terutama kelapa sawit, batu bara, migas, bauksit, lignit, dan migas, dan (ii) pengembangan industri berbasis teknologi tinggi dan berkelanjutan, seperti industri <i>oleochemicals</i> dan <i>petrochemicals</i> .				
22		Pembangunan ketenagalistrikan diarahkan untuk (i) pemenuhan pasokan listrik rendah karbon terintegrasi dengan industri melalui pemanfaatan sumber energi tersedia; (ii) pemanfaatan energi baru dan energi terbarukan untuk memperbaiki bauran pembangkit listrik dan pemenuhan kebutuhan listrik; termasuk PLTN dan PLTA (iv) pengembangan dekarbonisasi pembangkit fosil melalui cofiring dan peralihan menjadi pembangkit terbarukan; (iii) pengembangan sistem interkoneksi untuk meningkatkan kestabilan dan keandalan pasokan listrik; (iv) pengembangan teknologi digital untuk jaringan listrik cerdas (<i>smart grid</i>) guna mendukung peningkatan keandalan dan upaya dekarbonisasi pasokan tenaga listrik; (v) pengembangan sistem ketenagalistrikan skala kecil (<i>isolated mini/micro-grid</i>) untuk memperluas penyediaan layanan yang lebih berkualitas; (vi) pengembangan sistem penyimpanan/ cadangan energi; (vii) perluasan pemanfaatan elektrifikasi rumah tangga dan sektor transportasi; (viii) pengembangan penelitian dan pengembangan serta kapasitas SDM ketenagalistrikan bersertifikat; dan (ix) pengembangan skema pendanaan dan pembiayaan serta kebijakan subsidi tepat sasaran serta tarif dan harga listrik yang berkelanjutan.				
23		Pengembangan industri hijau bernilai tambah tinggi dan berkelanjutan untuk meningkatkan nilai tambah dan kompleksitas industri.				
24		Pengembangan basis sektor-sektor ekonomi baru yang didorong berbagai pengembangan inovasi, seperti biosimilar dan vaksin, protein nabati, dan energi terbarukan.				
25		Pengembangan kawasan sentra produksi pangan terpadu, modern, dan berkelanjutan untuk pemenuhan konsumsi pangan dan gizi, penguatan cadangan pangan nasional, dan peningkatan kesejahteraan petani.				
26		Pelaksanaan pelatihan <i>reskilling</i> dan <i>upskilling</i> dan transisi <i>school-to-work</i> .				
27		Industrialisasi koperasi melalui hilirisasi komoditas unggulan daerah, penguatan proses bisnis dan kelembagaan, serta adopsi teknologi.				
28		Peningkatan produktivitas BUMD.				

No	Transformasi/ Landasan Transformasi	Arah Kebijakan Transformasi	Periode			
			2025- 2029	2030- 2034	2035- 2039	2040- 2045
29		Penyediaan perumahan yang layak dan terjangkau di KI, KEK, dan kawasan strategis lainnya, khususnya untuk pekerja.				
30		Kemudahan perizinan dalam proses penyediaan perumahan.				
31		Pembangunan ekosistem digital yang perlu dilakukan dalam rangka transformasi digital yaitu: (i) penuntasan dan penguatan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK) melalui upaya memperluas jaringan broadband hingga menjangkau ke seluruh pelosok. (ii) peningkatan utilisasi dan pemanfaatan TIK di berbagai sektor prioritas melalui upaya meningkatkan digitalisasi di sektor strategis (utamanya untuk mendukung kawasan perairan dalam membantu perekonomian nelayan dan kepentingan pelayaran); serta (iii) peningkatan fasilitas pendukung transformasi digital melalui upaya meningkatkan literasi digital bagi masyarakat, menciptakan keamanan informasi dan siber serta kemampuan SDM digital atau <i>digital skill</i> (antara lain melalui pelatihan talenta digital dasar, menengah, dan tinggi, serta kepemimpinan digital).				
32		Pengembangan destinasi wisata potensial dengan pelibatan mitra lokal untuk meningkatkan nilai tambah pariwisata dan penyerapan tenaga kerja, seperti ekowisata kelas dunia yang berbasis aset alam, seperti Temajuk, maupun destinasi MICE dan perkotaan.				
33		Peningkatan rantai nilai global melalui skema-skema kerja sama regional dengan Malaysia termasuk pada pengembangan kawasan perbatasan.				
34		Pengembangan kawasan perkotaan, termasuk wilayah Metropolitan, yang terintegrasi, cerdas, hijau, dan berkelanjutan berbasis karakter wilayah dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung.				
35		Peningkatan keterkaitan UMKM pada rantai nilai industri domestik dan global, melalui peningkatan akses ke sumber daya produktif (termasuk pembiayaan dan pemasaran), penerapan teknologi dan kemitraan usaha.				
36		Peningkatan keterlibatan masyarakat adat dalam forum perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.				
37		Pengembangan <i>smart government</i> serta penguatan kapasitas aparatur daerah dan lembaga dalam hal manajemen data dan keamanan informasi, kapasitas digital SDM ASN, dan pengelolaan aset daerah.				
38		Percepatan digitalisasi layanan publik dan pelaksanaan audit SPBE untuk penguatan aspek pemerintahan digital.				
39	Transformasi Tata Kelola	Pengawasan proses pengembangan karier, promosi mutasi ASN dan manajemen kinerja dengan pemanfaatan teknologi informasi.				
40		Peningkatan partisipasi bermakna masyarakat sipil (dan masyarakat adat, jika ada) dalam penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan.				
41		Peningkatan respons terhadap laporan pelayanan publik masyarakat.				
42		Penguatan integritas partai politik.				
43		Peningkatan pencegahan dan pemberantasan korupsi melalui pendidikan anti korupsi. Transparansi proses perencanaan, penganggaran, dan pengadaan jasa-jasa; serta transparansi layanan perizinan berbasis digital.				
44		Peningkatan kapasitas fiskal daerah melalui Intensifikasi pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD), pemanfaatan pembiayaan alternatif antara lain KPBU, CSR, dana jasa ekosistem dan pasar karbon, peningkatan				

“Kalimantan Barat Maju, Sejahtera, dan Berkelanjutan”

No	Transformasi/ Landasan Transformasi	Arah Kebijakan Transformasi	Periode			
			2025- 2029	2030- 2034	2035- 2039	2040- 2045
	Keamanan Daerah Tangguh, Demokrasi Substansial dan Stabilitas Ekonomi Makro Daerah	kualitas belanja daerah untuk mendukung potensi komoditas unggulan, optimalisasi pemanfaatan Transfer ke Daerah (TKD), sinergi perencanaan dan penganggaran prioritas daerah dengan prioritas nasional.				
45		Optimasi regulasi, termasuk proses praregulasi yang memadai di daerah.				
46		Penyelesaian permasalahan <i>Outstanding Boundary Problems</i> (OBP).				
47		Peningkatan keamanan untuk mengurangi tingkat kriminalitas lokal dan lintas batas.				
48		Penguatan pengendalian inflasi daerah.				
49		Penguatan pendidikan yang berbasis kerukunan antar etnis dan agama.				
50	Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi	Pengembangan nilai-nilai luhur budaya lokal serta kearifan lokal dalam berbagai aktivitas sosial serta pendidikan karakter khususnya generasi muda.				
51		Rehabilitasi hutan dan reklamasi lahan bekas tambang serta penghambatan laju deforestasi.				
52		Peningkatan mitigasi struktural dan nonstruktural dalam penanggulangan bencana, termasuk adaptasi perubahan iklim.				
53		Peningkatan pengakuan dan penghormatan pada lembaga-lembaga adat dan hak ulayat masyarakat.				
54		Perlindungan masyarakat lokal dan promosi budaya melalui pengembangan area pusat budaya sebagai destinasi wisata bernilai ekonomi tinggi.				
55		Pengembangan diversifikasi pangan.				
56		Peningkatan ketahanan keluarga dan lingkungan pendukung berbasis kearifan lokal.				
57		Pembangunan irigasi baru terutama pada sawah tadah hujan eksisting dan area dengan kategori lahan sesuai sepenuhnya.				
58		Pengembangan area yang didedikasikan sebagai <i>retarding basin</i> .				
59		Pembangunan <i>check dam</i> pengendali aliran sedimen untuk menjamin keberlanjutan fungsi sungai sebagai alur pelayaran.				
60		Reformasi pengelolaan sampah terintegrasi dari hulu ke hilir.				
61		Peningkatan ketangguhan, sistem peringatan dini, kesiapsiagaan dan respons terhadap bencana.				
62		Pemberdayaan perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia melalui penguatan kapasitas, kemandirian, kemampuan dalam pengambilan keputusan, serta peningkatan partisipasi di berbagai bidang pembangunan.				
63		Pembangunan bendungan yang diprioritaskan terintegrasi dengan Pengembangan Kawasan.				
64		Ketahanan energi dengan pendekatan terpadu <i>FEW Nexus</i> .				
65		Pengembangan solusi berbasis alam (<i>natural based solution</i>) untuk pengendalian bencana, khususnya bencana banjir dan kebakaran hutan.				
66		Penyediaan ruang publik yang inklusif sebagai wahana interaksi sosial antarwarga dan ekspresi budaya.				
67		Pelestarian bentang alam (sungai, gunung, bukit, dan hutan) yang dapat membentuk identitas wilayah, serta perlindungan keanekaragaman hayati dan penguatan ekosistem lingkungan berbasis kearifan lokal.				

“Kalimantan Barat Maju, Sejahtera, dan Berkelanjutan”

No	Transformasi/ Landasan Transformasi	Arah Kebijakan Transformasi	Periode			
			2025- 2029	2030- 2034	2035- 2039	2040- 2045
68		Penguatan upaya mempertahankan ekosistem alami berupa hutan daratan dan bakau serta luasan hutan sebagai tempat wilayah jelajah satwa (<i>home range</i>) dan konektivitas spesies yang dilindungi di antaranya Orang Utan Borneo dan Gajah Kalimantan, Burung Enggang.				
69		Perencanaan tata ruang dengan mempertimbangkan daya dukung, daya tampung lingkungan hidup, luasan hutan, wilayah jelajah satwa spesies dilindungi, serta risiko bencana.				
70		Penguatan pengarusutamaan <i>gender</i> dan inklusi sosial dalam pembangunan Wilayah Kalimantan.				
71		Penguatan karakter dan jati diri bangsa.				
72		Pemenuhan hak dan perlindungan anak, perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia melalui pengasuhan dan perawatan, pembentukan resiliensi, dan perlindungan dari kekerasan, termasuk perkawinan anak dan perdagangan orang.				
73		Penyiapan dukungan teknis pembangunan jalan tol, penyelesaian jalan Trans Kalimantan terutama pada koridor perbatasan antarnegara, serta pengembangan jalan termasuk jalan daerah dan jalan perbatasan sebagai bagian transportasi multimoda untuk menjangkau seluruh Wilayah.				
74		Pengembangan angkutan sungai untuk distribusi logistik serta akses ke simpul utama transportasi.				
75	Implementasi Transformasi	Pengembangan pasokan listrik terintegrasi dengan industri melalui pemanfaatan sumber energi tersedia.				
76		Penuntasan RDTR kab/kota dan Kawasan Perbatasan Negara.				
77		Pengembangan bandara yang terintegrasi dengan pengembangan wilayah serta pengembangan bandara perairan dan <i>seaplane</i> (termasuk untuk mendukung pariwisata dan konektivitas daerah afirmasi).				
78		Tersedianya lembaga pelaksana penyelenggara SPAM yang berkinerja baik dan optimal				
79		Pelaksanaan pengawasan kualitas air minum.				
80		Optimalisasi lahan untuk penyediaan hunian vertikal (sewa dan milik) yang terpadu dengan layanan dasar permukiman, termasuk sistem transportasi publik.				
81		Peningkatan pelaksanaan reforma agraria.				
82		Penyediaan air siap minum melalui jaringan perpipaan dan akses sanitasi melalui sistem terpusat di wilayah perkotaan.				
83		Pengembangan pengetahuan dan teknologi yang efektif dan efisien dalam pemenuhan akses air minum aman sesuai karakteristik daerah.				
84		Penanganan permukiman kumuh melalui pemugaran komprehensif, peremajaan kota secara inklusif, serta permukiman kembali untuk mewujudkan kota tanpa permukiman kumuh.				
85		Penerapan bauran pendanaan dalam meningkatkan akses pembiayaan perumahan masyarakat untuk memperoleh hunian layak, aman, terjangkau, dan berkelanjutan.				
86		Fasilitasi penyediaan akses perumahan layak dan terjangkau untuk daerah kepulauan dan afirmasi.				

“Kalimantan Barat Maju, Sejahtera, dan Berkelanjutan”

No	Transformasi/ Landasan Transformasi	Arah Kebijakan Transformasi	Periode			
			2025- 2029	2030- 2034	2035- 2039	2040- 2045
87		Pengelolaan sampah terpadu untuk mencapai minimasi residu melalui pengumpulan dan pemilahan sejak dari sumber dan seluruh sampah terangkut dan terolah di fasilitas pengolahan sampah (minimal sepertiganya melalui daur ulang).				
88		Pengembangan pelabuhan-pelabuhan, seperti Pelabuhan Kijing yang dikembangkan secara terpadu (pelabuhan simpul domestik dan secara bertahap sebagai hub internasional) untuk mendukung pengembangan kawasan ekonomi.				
89		Pemanfaatan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) I secara optimal untuk menghubungkan rantai pasok/nilai domestik nasional dan global dengan pembangunan dan pengembangan jaringan konektivitas yang terpadu.				
90		Pengembangan transportasi perkotaan termasuk sistem angkutan umum massal di wilayah metropolitan serta kota-kota besar dan sedang yang andal dan modern dalam melayani penumpang dengan proyeksi perkembangan penduduknya, seperti di Pontianak maupun kota-kota lainnya.				
91		Penyediaan akses air minum aman serta sanitasi aman, berkelanjutan, dan inklusif sesuai karakteristik daerah.				
92		Sinkronisasi substansi dan periodisasi dokumen perencanaan pusat dan daerah.				
93		Sinkronisasi periodisasi RPJPD dan RTRW Provinsi.				
94		Peningkatan akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah berdasarkan sasaran Prioritas Nasional				
95		Penguatan pengendalian pembangunan melalui penerapan manajemen risiko.				
96		Peningkatan sistem elektronik terpadu dan tata kelola data pembangunan.				
97		Pengembangan pembiayaan inovatif, termasuk KPBU dan <i>blended finance</i> .				
98		Eliminasi praktik Buang Air Besar Sembarangan (BABS) di seluruh rumah tangga melalui pemecuan perubahan perilaku masyarakat yang didukung oleh penyediaan sarana dan prasarana rantai layanan air minum dan sanitasi yang aman.				

5.2.2.1. Indikator Utama Pembangunan Daerah

Indikator Utama Pembangunan Daerah merupakan alat ukur untuk melihat pencapaian dari tujuan pembangunan daerah serta kontribusi terhadap tujuan pembangunan nasional jangka panjang. Indikator Utama Pembangunan Daerah harus berjumlah 45 (empat puluh lima) sama dengan RPJP Nasional Tahun 2025-2045. Beberapa Indikator telah dilakukan penyelarasan antara lain:

- a. IE10 Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional Tangguh, dan Demokrasi Substansial diselaraskan menjadi

Keamanan Dan Ketertiban Umum Daerah Yang Kondusif Dan Demokrasi Substansial. Indikator diselaraskan menjadi Persentase Penegakan Hukum Daerah

- b. IE12 Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Berdaya Gentar Kawasan diselaraskan menjadi Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Berdaya Gentar Kawasan. Indikator pada IE12 ini diselesarakan menjadi Jumlah Kerjasama (*Sister Province/ Sister City*) dan Persentase Penurunan Konflik SARA.

Tabel 5. 4 Indikator Utama Pembangunan (45 Indikator) RPJPD 2025-2045

No	Indikator	Target Provinsi	
		2025	2045
TRANSFORMASI SOSIAL			
IE1	Kesehatan untuk Semua		
1	Usia Harapan Hidup	74.03	79.58
2	Kesehatan ibu dan anak		
a	angka kematian ibu (per 100.000 kelahiran hidup)	120	20
b	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)	21,8	6,8
3	Insidensi tuberkulosis (per 100.000 penduduk)		
a	Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (<i>treatment coverage</i>) (%)	90	95
b	Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (<i>treatment success rate</i>) (%)	88,74	98
4	Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (%)	91,6*	99,5
IE2	Pendidikan Berkualitas yang Merata		
5	Hasil pembelajaran		
a	Persentase kabupaten/kota yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk:		
i	Literasi Membaca	7,14 - 14,29	64,29 - 71,43
ii	Numerasi	0,00 - 7,14	57,14 - 64,29

No	Indikator	Target Provinsi	
		2025	2045
b	Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk:		
i	i. Literasi Membaca	30,47-32,47	66,24-68,24
ii	ii. Numerasi	18,63-20,63	58,10-60,10
c	Rata-rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun (tahun)	8,44	10,70 - 10,71
d	Harapan Lama Sekolah (tahun)	12,91 - 12,92	14,27 - 14,33
6	Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi (%)	8,76	9,76 - 10,21
7	Persentase pekerja lulusan pendidikan menengah dan tinggi yang bekerja di bidang keahlian menengah tinggi (%)	73,64	85
IE3	Perlindungan Sosial yang Adaptif		
8	Tingkat kemiskinan (%)	5,65 - 6,15	0,08-0,58
9	Cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan (%)	59,56	84,4
10	Persentase penyandang disabilitas di sektor formal (%)	25	50
TRANSFORMASI EKONOMI			
IE4	IpTek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi		
11	Rasio PDRB Industri pengolahan (%)	16,50 - 17,40	28,63 - 37,57
12	Pengembangan pariwisata		
a	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (%)*	2,42	4,11
b	Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara (Hotel Berbintang) (ribu orang)*	23,18	83,33
13	Proporsi Investasi Pelaku Ekonomi Kreatif Terhadap Total Investasi Kalimantan Barat		
14	Produktivitas UMKM, Koperasi, BUMD		
a	Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah Non Pertanian pada Level Provinsi (%)	13,43	17,68
b	Proporsi jumlah usaha kecil dan menengah pada Level Provinsi (%)	1,74	4,43
c	Rasio Kewirausahaan Daerah (%)	3,26	9,74
d	Rasio volume usaha koperasi terhadap PDB (%)	3,86	5,11
e	Return on asset (ROA) BUMD (%)	4,47	5,34
15	Penciptaan Lapangan Kerja yang Baik		
a	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	4,73 - 4,86	1,97 - 2,98
b	Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal (%)	44	90
16	Tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan (%)	57,02	70,10

**“Kalimantan Barat Maju, Sejahtera,
dan Berkelanjutan”**

No	Indikator	Target Provinsi	
		2025	2045
17	Tingkat penguasaan Iptek Disesuaikan dengan karakteristik daerah, dalam rumpun Arah Pembangunan		
	Indeks Inovasi Daerah	45	65
IE5	Penerapan Ekonomi Hijau		
18	Tingkat penerapan ekonomi hijau		
a	Indeks ekonomi hijau	69,47	89,68
b	Porsi EBT Bauran Energi Primer	38,00	94,96
IE6	Transformasi Digital		
19	Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi	6	7.5
IE7	Integrasi Ekonomi Domestik dan Global		
20	Koefisien Variasi Harga Antar Wilayah Tingkat Provinsi	10,46	5,7
21	Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB)	32,17	33,53
22	Ekspor Barang dan Jasa (% PDRB)	16,67	22,89
IE8	Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi		
23	Kota dan Desa Maju, Inklusif, dan Berkelanjutan	0	N/A
a	Proporsi Kontribusi PDRB Wilayah Metropolitan terhadap Nasional (%)		
b	Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan (%)	70,33	100,00
c	Persentase Desa Mandiri (%)	1,56	11,49
TRANSFORMASI TATA KELOLA			
IE9	Regulasi dan Tata kelola yang Berintegritas dan Adaptif		
24	Indeks Reformasi Hukum	70	100
25	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	3,7	5,0
26	Indeks Pelayanan Publik	4,42	5,00
27	Indeks Integritas Nasional	79,99	96,36
IE10	Keamanan dan ketertiban umum daerah yang kondusif dan Demokrasi Substansial		
28	Persentase Capaian Pelaksanaan Aksi HAM	40	75
29	Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya (%)	73,07	90.45
30	Indeks Demokrasi Provinsi	Tinggi	Tinggi
IE11	Stabilitas Ekonomi Makro Daerah		
31	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%)	1.7	2.6
32	Tingkat Inflasi (%)	3,1 - 3,7	1,0 - 3,1
33	Pendalaman/Intermediasi Sektor Keuangan		
a	Total Dana Pihak Ketiga/PDRB (%) *	28,9	66,8

No	Indikator	Target Provinsi	
		2025	2045
b	Aset Dana Pensiun/PDRB (%)	0,26	3,57
c	Nilai Transaksi Saham Per Provinsi Berupa Nilai Rata-rata Tahunan*	6.331.992,70	35.375.429,37
d	Total Kredit/PDRB (%)	26,6	62,3
34	Inklusi Keuangan (%)	90,4	98,86
IE12	Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Berdaya Gentar Kawasan		
35	Jumlah Kerja Sama (<i>Sister Province/Sister City</i>)	2	6
36	Persentase Penurunan Konflik SARA	0	0
KETAHANAN SOSIAL BUDAYA DAN EKOLOGI			
IE13	Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju		
37	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	56,28 - 56,37	64,96 - 65,79
38	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	79,78 - 79,85	87,41 - 88,2
IE14	Keluarga Berkualitas, Kesenjangan Gender, dan Masyarakat Inklusif		
39	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga	0,493 – 0,492	0,237 - 0,226
40	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	0,493 – 0,492	0,237 - 0,226
IE15	Lingkungan Hidup Berkualitas		
41	Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Daerah	0,465	0,627
42	Kualitas Lingkungan Hidup		
a	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	77,51	83,24
b	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman (%)	3,38	50,00
c	Pengelolaan Sampah		
-	Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah (%)	8	90
-	Proporsi Rumah Tangga (RT) dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah (% RT)	24	100
IE16	Berketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan		
43	Ketahanan Energi, Air, dan Pangan		
a	Ketahanan Energi		
-	Konsumsi Listrik per Kapita (kWh)*	700	1.510
-	Intensitas Energi Primer (SBM/Rp milyar)*	180	110
b	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment) (%)	13,44	0,27
c	Ketahanan Air		
-	Kapasitas Air Baku (m3/detik)*	1.84	7.58
-	Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan (%)	38,92	100
IE17	Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim		
44	Indeks Risiko Bencana (IRB)	113,86	96,96-82,47

No	Indikator	Target Provinsi	
		2025	2045
45	persentase Penurunan Emisi GRK (%)		
a	Kumulatif	25.22	59.83
b	Tahunan	43.62	100

Sumber: SEB Menteri Dalam Negeri dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 600.2.1/3674/SJ; Nomor 2 Tahun 2024

5.3 PEMBANGUNAN WILAYAH MENUJU KALIMANTAN BARAT MAJU, SEJAHTERA, DAN BERKELANJUTAN

Terwujudnya Kalimantan Barat Maju, Sejahtera, dan Berkelanjutan sejalan dengan Visi Indonesia Emas sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Bersatu, Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan. Hal ini tercermin dari peningkatan pendapatan per kapita, pengentasan kemiskinan dan ketimpangan, kepemimpinan dan pengaruh di dunia internasional meningkat, peningkatan daya saing sumber daya manusia, dan penurunan emisi GRK menuju net zero emission.

Kalimantan Barat juga memiliki tema pembangunan wilayah sebagai **“Beranda Depan Negara dan Pusat Industri Hijau Bernilai Tambah”**. Dalam mewujudkan pembangunan wilayah, faktor pendorong yang penting adalah pembangunan sarana dan prasarana, utamanya konektivitas, ketenagalistrikan, teknologi informasi dan komunikasi, serta sarana dan prasarana dasar. Pengembangan wilayah di Kalimantan Barat didasari oleh karakteristik wilayah, kondisi geografis, ekoregion, memiliki Pusat Kegiatan Nasional atau Pusat Kegiatan Wilayah, memiliki pusat layanan kesehatan

(RS), memiliki pusat layanan pendidikan (Univ/Akademi).

Pengembangan Pembangunan Wilayah di Kalimantan Barat juga dilatar belakangi oleh persebaran penduduk yang tidak merata. Selain itu pengembangan wilayah juga memperhatikan posisi realtif ekonomi sektoral di Provinsi Kalimantan Barat. Posisi relatif ekonomi sektoral di Kalimantan Barat sendiri hanya memiliki dua sektor keunggulan komparatif (sketor basis) dan keunggulan kompetitif (daya saing) secara nasional yaitu sektor pertanian dan sektor perdagangan. Meskipun demikian, sektor industri memiliki kontribusi yang besar dalam PDRB Kalbar (bolanya besar menandakan jumlah mininal dalam PDRB yang memiliki daya saing meski bukan sebagai basis. Selain itu sektor pertambangan/penggalan, akomamin dan industri sebagai sektor berdaya saing nasional namun bukalah sektor basis dan kontrubusi terhadap PDRB adalah kecil (bola hijau kecil). Pengembangan wilayah Kalimantan Barat sendiri terbagi menjadi 5 (lima) kluster kewilayahan, dengan tema pengembangan wilayah masing-masing.

Gambar 5. 1 Analisis Posisi Relatif Ekonomi Sektoral



5.3.1. KLUSTER 1 PONTIANAK-KUBU RAYA-MEMPAWAH

5.3.1.1. Analisis Potensi dan Posisi Relatif Ekonomi Sektoral Kluster 1

Kluster 1 terdiri dari Kota Pontianak, Kabupaten Kubu Raya, dan Kabupaten Mempawah, kluster ini memiliki posisi geografis yang berdekatan, dan memiliki potensi ekonomi strategis. Kota Pontianak sendiri merupakan Ibu Kota Provinsi Kalimantan Barat (PKN), Kabupaten Kubu Raya memiliki Bandar Udara Supadio, dan Pelabuhan Kijing berada di Kabupaten Mempawah. Pusat kluster satu berada di Kota Pontianak. Kluster ini memiliki permasalahan wilayah berupa banjir dan kebakaran hutan dan lahan. Kawasan

prioritas pada kluster ini terdiri dari: Kawasan Metropolitan Pontianak, Kawasan Pelabuhan Sungai Kunyit, Kawasan Konservasi Perairan Daerah Kubu Raya, KHK Fungsi Lindung, KPPN Sandaniang dan KPPN Rasau.

Kota Pontianak sendiri memiliki sektor keunggulan komparatif dan kompetitif berupa Sektor Transportasi dan Informasi & Komunikasi, sektor ini pula berkontribusi cukup besar pada PDRB Kalimantan Barat sehingga dapat dikatakan sektor unggulan. Sektor Perdagangan & Jasa sendiri juga

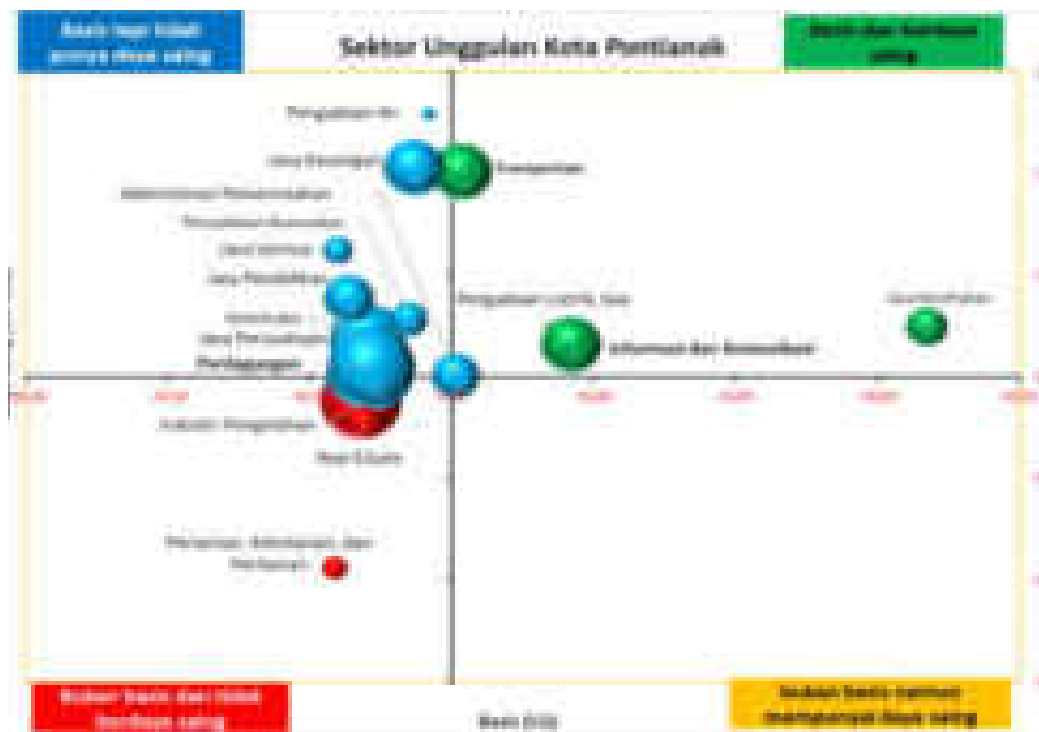
menjadi sektor basis sehingga berpotensi sebagai pendorong ekonomi daerah.

Sektor yang mempunyai keunggulan komparatif dan kompetitif di Kabupaten Kubu Raya adalah Industri Pengolahan. Sektor transportasi sendiri merupakan sektor basis tetapi tidak memiliki daya saing. Sektor pertanian, perdagangan dan konstruksi bukan merupakan sektor basis di Kabupaten Kubu Raya, tetapi mempunyai daya saing dan cenderung meningkat, sehingga mempunyai potensi untuk menjadi pendorong ekonomi daerah.

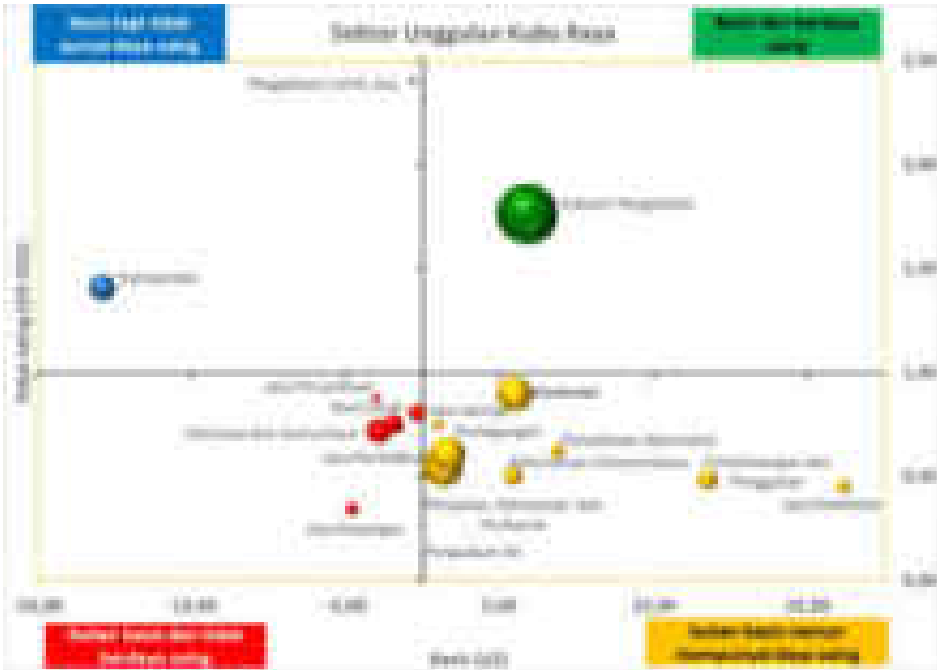
Sektor perdagangan berkontribusi besar dalam PDRB, serta memiliki keunggulan komparatif dan kompetitif. Sedangkan sektor konstruksi, transportasi, dan pertambangan mempunyai daya saing tinggi sehingga berpotensi menjadi pendorong ekonomi daerah. Sektor industri dan pengolahan dalam PDRB merupakan sektor basis namun tidak berdaya saing atau cenderung menurun produktivitasnya.

Pengembangan industri pengolahan perlu menjadi perhatian pada kluster 1, dikarenakan posisi dan peran strategisnya di Provinsi Kalimantan Barat.

Gambar 5. 2 Analisis Posisi Relatif Ekonomi Sektoral Kota Pontianak



Gambar 5. 3 Analisis Posisi Relatif Ekonomi Sektoral Kab. Kubu Raya



Gambar 5. 4 Analisis Posisi Relatif Ekonomi Sektoral Kab. Mempawah



Sumber: Analisis Tim, 2024

5.3.1.2. **Highlight Arah Kebijakan Pengembangan Wilayah Kluster 1**

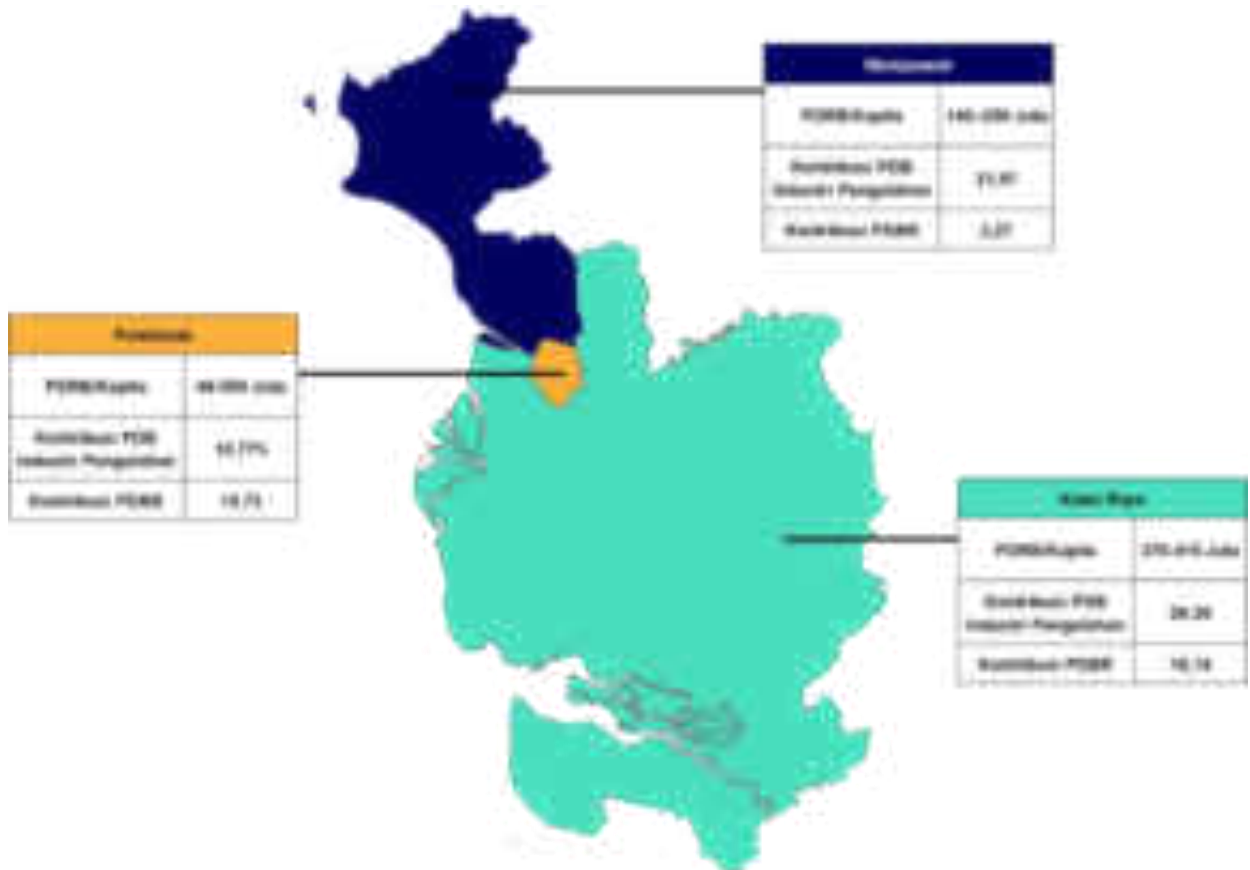
Kluster 1 terdiri dari Kota Pontianak, Kabupaten Kubu Raya, dan Kabupaten Mempawah diarahkan menjadi **Pusat**

Industri dan Jasa Regional Berdaya Saing yang Menghubungkan Wilayah Indonesia Barat dan ASEAN. Adapun beberapa

highlight kebijakan wilayah pada kluster ini terdiri dari:

1. Pengembangan Pelayanan Kesehatan Modern
2. Pengembangan pusat-pusat industri melalui hilirisasi komoditas kelapa sawit, karet, hasil hutan, bahan tambang, perikanan yang berbasis teknologi tinggi dan berkelanjutan
3. Pengembangan sektor-sektor ekonomi baru yang didorong berbagai pengembangan inovasi seperti kosmetik, protein nabati, mangrove
4. Pengembangan smart government serta penguatan kapasitas aparatur daerah dan lembaga dalam hal manajemen data dan keamanan informasi, kapasitas digital SDM ASN dan pengelolaan aset daerah
5. Peningkatan kapasitas fiskal daerah
6. Penyediaan ruang publik yang inklusif sebagai wahana interaksi sosial antarwarga dan ekspersi budaya
7. Pengembangan pelabuhan simpul utama untuk mendukung pengembangan kawasan ekonomi Kalbar khususnya Pelabuhan Kijing.
8. Pengembangan pembiayaan inovatif termasuk KPBU dan *blended finance*
9. Percepatan pemenuhan infrastruktur dasar

Gambar 5. 5 Kluster 1 (Kota Pontianak – Kab. Kubu Raya – Kab. Mempawah)



5.3.2. KLUSTER 2 SINGKAWANG-SAMBAS-BENGKAYANG

5.3.2.1. Analisis Potensi dan Posisi Relatif Ekonomi Sektoral Kluster 2

Kluster 2 terdiri dari Kota Singkawang, Kabupaten Sambas, dan Kabupaten Bengkayang, dengan pusat kluster berada di Kota Singkawang, yang memiliki fungsi kawasan sebagai PKW. Sebagai daerah pesisir, dan kondisi topografi yang beragam, kluster ini memiliki potensi pariwisata baik pantai maupun perbukitan, serta air terjun (riam). Serta psosisnya yang strategis, yang merupakan Gerbang Negara Indonesia, dikarenakan berbatasan langsung dengan Negara Malaysia. Terdapat 2 PLBN pada kulster ini yaitu PLBN Aruk (Sambas) dan PLBN Jagoi Babang (Bengkayang). Permasalahan wilayah pada kluster ini berupa banjir dan abrasi pantai. Kluster ini memiliki beberapa kawasan prioritas diantaranya, KSPN Singkawang-Sambas, Kawasan Kota Tua Singkawang, Kawasan Konservasi Perairan Daerah (KKPD) Paloh dan sekitarnya, KPPD Randayan dan sekitarnya, KPPN Ledo, dan Cagar Alam Nyiut-Penrinssen.

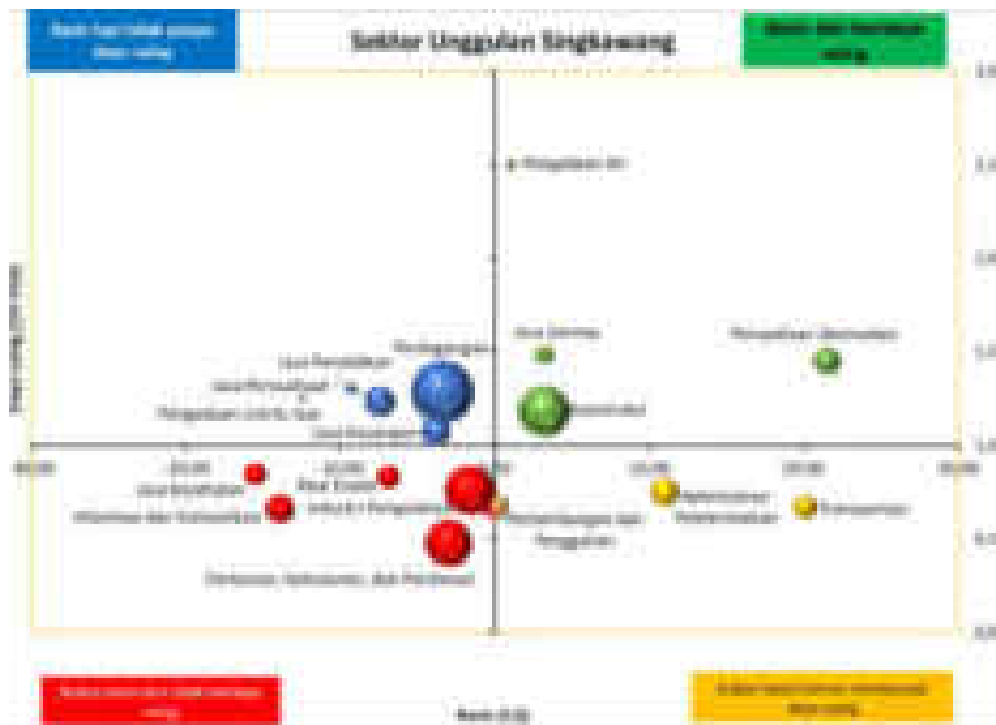
Kota Singkawang sendiri meiliki keunggulan komparatif dan keunggulan kopetitif pada sektor penyediaan akomodasi, akan tetapi kontribusinya pada PDRB relative kecil, sehingga sektor tersebut berpotensi menjadi sektor unggulan di Kota Singkawang. Sektor perdagangan sendiri merupakan sektor basis dan berkontribusi besar terhadap PDRB,

sehingga menjadi pendorong ekonomi daerah. Sektor Industri Pengolahan, Informasi dan Komunikasi, real estate dan Pertanian Kota Singkawang tidak mempunyai daya saing atau berkecenderungan menurun produksinya dan bukan sektor basis.

Kabupaten Bengkayang memiliki ekonomi sektoral yang relative sedikit, sektor unggulan yang mempunyai keunggulan komparatif dan kompetitif adalah Perdagangan. Sektor pertanian berkontribusi paling besar pada PDRB, sehingga menjadi penopang perekonomian, tetapi berkencenderungan menurun produksinya setiap tahun, hal ini perlu menjadi perhatian.

Sektor unggulan yang memiliki keunggulan komparatif dan kompetitif di Kabupaten Sambas adalah sektor pertanian, kehutan dan perikanan. Sektor perdagangan sendiri berkontribusi relative besar dalam PDRB, tetapi berkencenderungan menurun daya saingnya. Sektor indsutri pengolahan berkontribusi relative besar dalam PDRB namun tidak menjadi sektor basis dan tidak berdaya saing, sehingga hal ini perlu menjadi perhatian, mengingat adanya Kawasan Peruntukan Industri di Kabupaten Sambas. Sektor transportasi berpotensi menjadi pendorong ekonomi daerah, dikarenakan meiliki daya saing cukup tinggi dibandingkan dengan sektor lainnya.

Gambar 5. 6 Analisis Posisi Relatif Ekonomi Sektoral Kota Singkawang



Gambar 5. 7 Analisis Posisi Relatif Ekonomi Sektoral Kabupaten Bengkayang



Gambar 5. 8 Analisis Posisi Relatif Ekonomi Sektoral Kabupaten Sambas



Sumber: Analisis Tim, 2024

5.3.2.2. **Highlight Arah Kebijakan Pengembangan Wilayah Kluster 2**

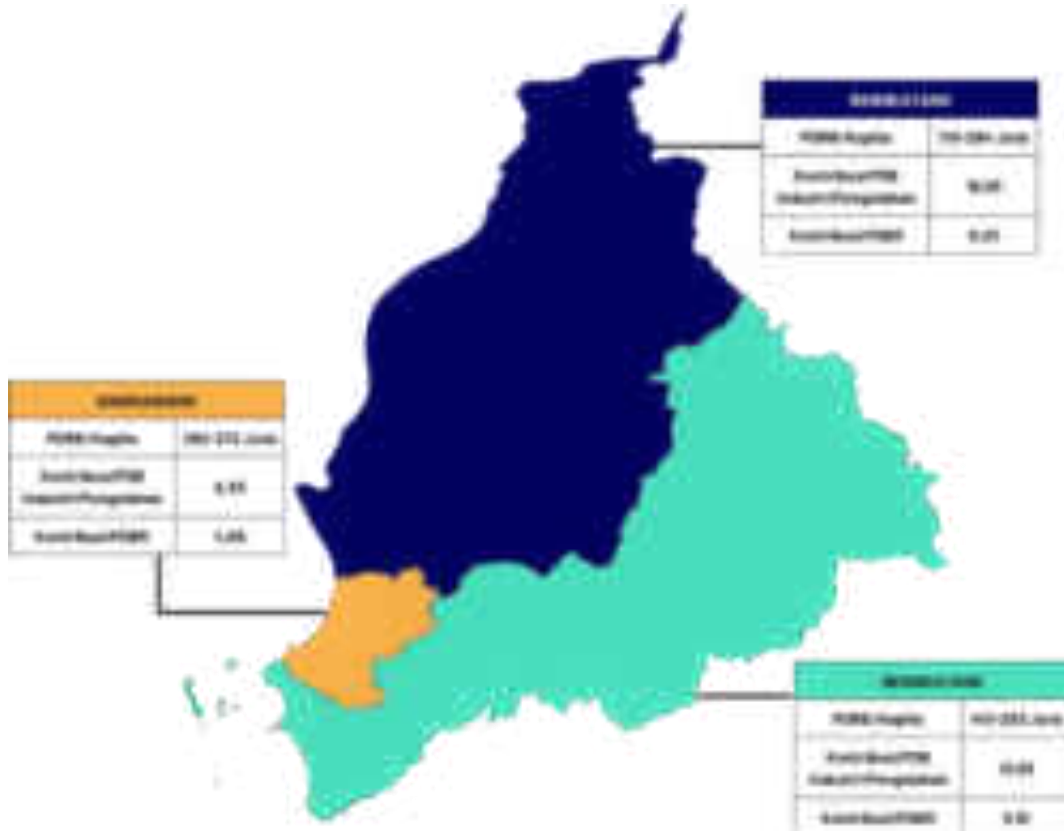
Kluster 2 diarahkan menjadi **Pusat Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Domestik, Sekaligus Lumbung Pangan Daerah Serta Pusat Pengembangan Ekonomi Biru, Energi Baru Terbarukan dan Desa Global Yang Berkelanjutan**. Adapun beberapa *highlight* kebijakan wilayah pada kluster ini terdiri dari:

1. Percepatan peningkatan partisipasi pendidikan tinggi dan pengembangan maupun pembukaan baru perguruan tinggi serta pengadaan prodi Perguruan tinggi (STEAM) yang sesuai komoditas unggulan wilayah
2. Pengembangan pusat-pusat industri pariwisata dan jasa, serta hilirisasi komoditas kelapa sawit dan perikanan
3. Pengembangan kawasan sentra produksi pangan terpadu, modern, dan berkelanjutan
4. Percepatan digitalisasi pelayanan publik dan penguatan aspek pemerintahan digital
5. Penyelesaian permasalahan outstanding Boundary Problems (OBP)
6. Perencanaan tata ruang dengan mempertimbangkan daya dukung daya tampung lingkungan hidup luasan hutan wilayah jelajah satwa spesies dilindungi serta risiko bencana
7. Optimalisasi sumber daya air dan pengembangan teknologi yang efektif dan efisien dalam pemenuhan akses air minum aman
8. Pengembangan pembiayaan inovatif termasuk KPBU dan *blended finance*
9. Percepatan pemenuhan infrastruktur dasar
10. Pengembangan pusat-pusat pertumbuhan baru di Kawasan perbatasan dan pemenuhan akses

layanan dasar, infrastruktur dasar dan konektivitas

11. Penegasan batas wilayah negara dan penguatan sistem pertahanan dan keamanan di wilayah perbatasan

Gambar 5. 9 Kluster 2 (Kota Singkawang – Kab. Bengkayang – Kab. Sambas)



5.3.3. KLUSTER 3 LANDAK-SANGGAU-SEKADAU

5.3.3.1. Analisis Potensi dan Posisi Relatif Ekonomi Sektoral Kluster 3

Kluster 3 terdiri dari Kabupaten Landak, Kabupaten Sanggau, dan Kabupaten Sanggau, pusat kluster berada di Kabupaten Sanggau yang memiliki fungsi kawasan sebagai PKW. Kluster ini memiliki tipologi perbatasan negara di PLBN Entikong (sanggau), dan pedalaman. Pada kluster ini memiliki permasalahan wilayah berupa longsor, *illegal logging*, dan *illegal mining*. Kluster 3 memiliki daya saing kawasan berupa PLBN Entikong, Jembatan Tayan &

Semuntai, Jalan Trans Kalimantan Lintas Selatan dan Tengah, dan Interkoneksi Sistem Khatulistiwa. Kawasan Strategis pada kluster 3 terdiri dari Kawasan Peruntukan Industri Tayan, Kawasan Ekowisata Danau Laet, Koridor Ekonomi Entikong-Sosok-Tayan-Toba, serta Tahura Pandan Puloh (Bukit Jamur).

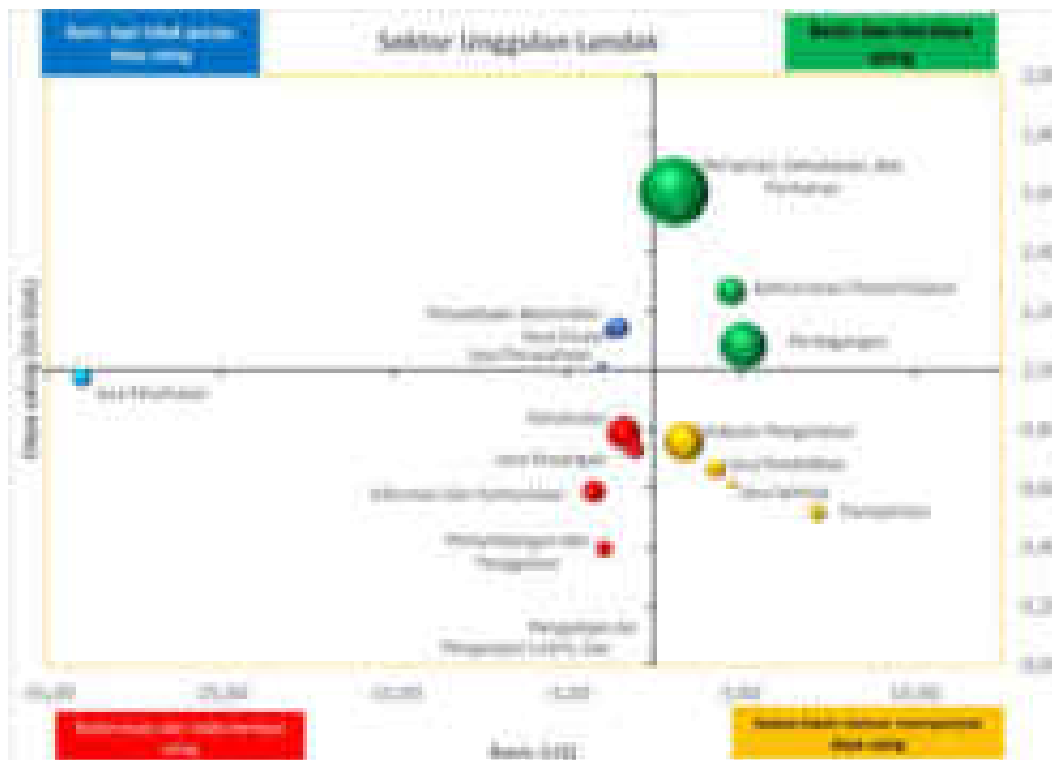
Ekonomi sektoral di Kabupaten Landak terdiri dari sektor pertanian dan perdagangan yang berkontribusi cukup besar pada PDRB

Kabupaten Landak, serta memiliki keunggulan komparatif dan kompetitif. Sektor penyediaan akomodasi *real estate* dan jasa perusahaan memiliki kontribusi yang cukup kecil dalam PDRB namun termasuk sektor basis sehingga kedepannya perlu meningkatkan daya saingnya agar dapat menjadi sektor unggulan Kabupaten Landak. Sektor Industri Pengolahan sendiri berkontribusi cukup besar dalam PDRB dan berdaya saing sehingga mempunyai potensi untuk menjadi pendorong ekonomi daerah. Sektor unggulan di Kabupaten Sanggau adalah sektor pertanian, kehutanan dan perikanan yang berkontribusi besar pada PDRB dan sektor basis namun berkecenderungan menurun daya saingnya. Sektor industri pengolahan berkontribusi relatif besar dalam PDRB namun bukan

menjadi sektor basis dan tidak berdaya saing. Sektor Jasa Keuangan dan Transportasi berpotensi mendorong ekonomi daerah karena mempunyai daya saing cukup tinggi dan dapat ditingkatkan lagi kontribusinya dalam PDRB Sanggau.

Kabupaten Sekadau memiliki sektor unggulan berupa pertanian, kehutnana, dan perikanan yang juga memiliki keunggulan komparatif dan kompetitif. Sektor perdagangan memiliki kontribusi yang cukup besar dalam PDRB namun cenderung menurun daya saingnya, dan tidak lagi menjadi sektor basis di Kabupaten Sekadau. Sektor Jasa Keuangan, Jasa Pendidikan dan Transportasi berpotensi mendorong ekonomi daerah karena mempunyai daya saing cukup tinggi dan dapat ditingkatkan lagi kontribusinya dalam PDRB Sekadau.

Gambar 5. 10 Analisis Posisi Relatif Ekonomi Sektoral Kabupaten Landak



**“Kalimantan Barat Maju, Sejahtera,
dan Berkelanjutan”**

Gambar 5. 11 Analisis Posisi Relatif Ekonomi Sektoral Kabupaten Sanggau



Gambar 5. 12 Analisis Posisi Relatif Ekonomi Sektoral Kabupaten Sekadau



Sumber: Analisis Tim, 2024

5.3.3.2. *Highlight* Arah Kebijakan Pengembangan Wilayah Kluster 3

Kluster 2 diarahkan menjadi **Pusat Industri Hijau Bagi Komoditas Unggulan Daerah Sekaligus Lumbung Pangan Daerah** .

Adapun beberapa *highlight* kebijakan wilayah pada kluster ini terdiri dari:

1. Penuntasan stunting dan percepatan eliminasi malaria melalui pendekatan integrasi multisektor dan rekayasa lingkungan habitat vektor
2. Pengembangan kawasan sentra produksi pangan terpadu, modern, dan berkelanjutan
3. Pengembangan industri hijau bernilai tambah tinggi dan berkelanjutan dengan komoditas sawit
4. Optimalisasi regulasi termasuk pre-regulasi
5. Peningkatan kemandirian untuk mengurangi tingkat kriminalitas lokal dan lintas batas
6. Pelestarian bentang alam yang dapat membentuk identitas wilayah serta perlindungan keanekaragaman hayati dan penguatan ekosistem lingkungan berbasis kearifan lokal
7. Pengelolaan sumber daya air berkelanjutan bertumpu pada pengembangan teknologi yang efektif dan efisien
8. Peningkatan akuntabilitas kinerja pemda berdasarkan sasaran prioritas
9. Percepatan pemenuhan infrastruktur dasar

Gambar 5. 13 Kluster 3 (Kab. Landak – Kab. Sanggau – Kab. Sekadau)



5.3.4. KLUSTER 4 SINTANG-MELAWI-KAPUAS HULU

5.3.4.1. Analisis Potensi dan Posisi Relatif Ekonomi Sektoral Kluster 4

Kluster ini terdiri dari Kabupaten Sintang, Kabupaten Melawi, dan Kabupaten Kapuas Hulu, dengan pusat kluster berada di Kabupaten Sintang yang memiliki fungsi wilayah sebagai PKW. Kluster ini memiliki daya saing kawasan berupa PLBN Badau, Jalan Pararel Perbatasan Putussibau-Badau, Bandar Udara Tebelian, Desa Wisata Nanga Pari, Belaban Ella, Sepadan, dan Kemitraan Non Pemerintah (CSO/NGO). Kluster ini memiliki kawasan prioritas berupa Kawasan *Heart of Borneo* (termasuk di dalamnya Taman Nasional Danau Sentarum, Taman Nasional Betung Kerihun, Taman Nasional Bukit Baka-Bukit Raya, Kawasan Ekosistem Muller, dan lainnya), Kawasan Sub DAS Ketungau Bagian atas (Hulu), Kawasan Industri Sungai Ringin, Kawasan Agropolitan Kapuas Hulu, dan Kawasan perkotaan Kelam. Selain memiliki daya saing dan kawasan strategis, kluster ini memiliki permasalahan wilayah berupa deforestasi, banjir, dan desa gelap gulita.

Kabupaten Sintang memiliki sektor unggulan berupa pertanian, kehutanan, dan perikanan yang memiliki keunggulan komparatif dan kompetitif. Sektor penyediaan akomodasi perdagangan informasi dan komunikasi dan konstruksi memiliki kontribusi yang besar dalam perekonomian Kabupaten Sintang, namun daya saingnya cenderung menurun dibandingkan kabupaten lainnya. Industri pengolahan berkontribusi besar dalam PDRB

dan memiliki daya saing, sehingga dapat menjadi pendorong ekonomi di Kabupaten Sintang.

Kabupaten Melawi, tidak memiliki sektor unggulan, hanya saja sektor administrasi pemerintahan mempunyai keunggulan komparatif dan kompetitif. Sektor pertanian memiliki kontribusi yang paling besar dalam PDRB Kabupaten Melawi, tetapi bukan merupakan sektor basis, dan tidak memiliki daya saing, sehingga tidak dapat menjadi pendorong ekonomi daerah. Selain itu terdapat sektor perdagangan yang berkontribusi cukup besar dalam PDRB Kabupaten Melawi, tetapi daya saingnya cenderung menurun. Hal-hal ini perlu menjadi perhatian, diakrenakan Kabupaten Melawi dinilai belum dapat mandiri secara ekonomi, dan masih bergantung pada pemerintah daerah.

Kabupaten Kapuas Hulu memiliki sektor yang memiliki keunggulan komparatif dan kompetitif yaitu sektor Administrasi Pemerintahan dan Jasa Perusahaan., tetapi sektor ini tidak dapat menjadi sektor unggulan. Sektor pertanian memiliki kontribusi besar dalam PDRB dan termasuk dalam sektor basis, sehingga dapat menjadi sektor unggulan, sektor ini pula perlu didorong daya saingnya, agar dapat lebih unggul dari daerah lain. Sektor Perdagangan dan Industri Pengolahan dan Penyediaan Akomodasi mempunyai daya saing dan

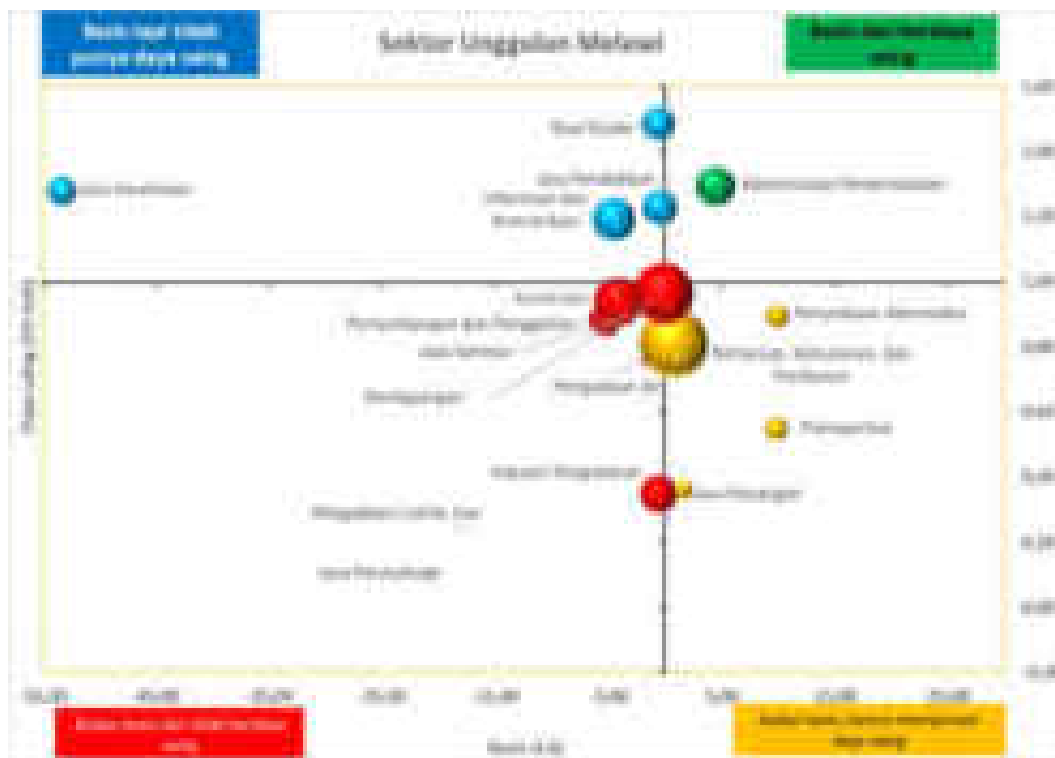
**“Kalimantan Barat Maju, Sejahtera,
dan Berkelanjutan”**

berkontribusi cukup besar mempunyai potensi untuk menjadi pendorong ekonomi daerah.

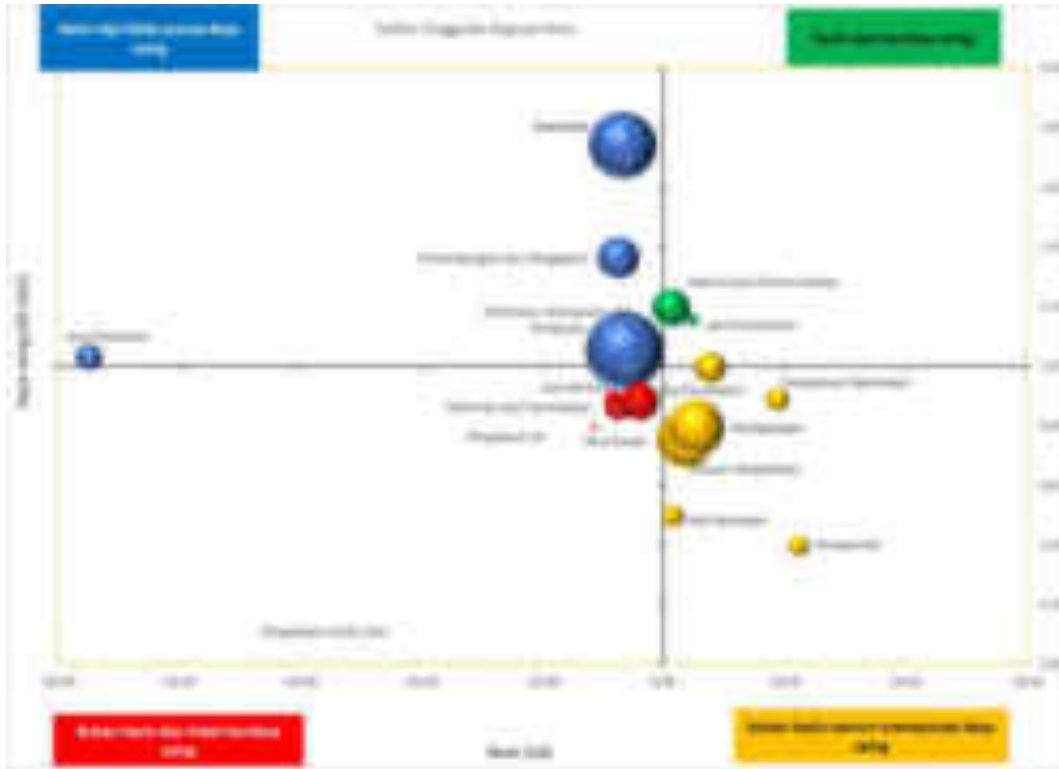
Gambar 5. 14 Analisis Posisi Relatif Ekonomi Sektoral Kabupaten Sintang



Gambar 5. 15 Analisis Posisi Relatif Ekonomi Sektoral Kabupaten Melawi



Gambar 5. 16 Analisis Posisi Relatif Ekonomi Sektoral Kabupaten Kapuas Hulu



Sumber: Analisis Tim, 2024

5.3.4.2. **Highlight Arah Kebijakan Pengembangan Wilayah Kluster 4**

Kluster ini memiliki tema pengembangan wilayah sebagai **Pusat Pengembangan Ekonomi Hijau Serta Koridor Akses Menuju IKN**, dengan *highlight* arah kebijakan sebagai berikut:

1. Penuntasan stunting dan percepatan eliminasi malaria melalui pendekatan integrasi multisektor dan rekayasa lingkungan habitat vektor
2. Pengembangan pusat-pusat industri melalui hilirisasi komoditas kelapa sawit, hasil hutan, perikanan yang berbasis teknologi tinggi dan berkelanjutan
3. Pengembangan *smart goverment* serta penguatan kapasitas aparatur daerah dan lembaga dalam hal manajemen data dan

keamanan informasi, kapasitas digital SDM ASN dan pengelolaan aset daerah

4. Peningkatan kapasitas fiskal daerah melalui intensifikasi pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD) pemanfaatan pembiayaan alternatif antara lain KPBU, CSR, jasa ekosistem dan pasar karbon
5. Pembangunan bendungan yang diprioritaskan terintegrasi dengan pengembangan kawasan
6. Percepatan pemenuhan infrastruktur dasar
7. Pengembangan pembiayaan inovatif termasuk KPBU dan blended *finace*

8. Pengentasan Kemiskinan Ekstrem
melalui perlindungan sosial adaptif

Gambar 5. 17 Kluster 4 (Kab. Sintang – Kab. Melawi – Kab. Kapuas Hulu)



5.3.5. KLUSTER 5 KETAPANG – KAYONG UTARA

5.3.5.1. Analisis Potensi dan Posisi Relatif Ekonomi Sektoral Kluster 5

Kluster 5 terdiri dari Kabupaten Ketapang dan Kabupaten Kayong Utara, dengan pusat kluster di Kabupaten Ketapang, dengan fungsi kawasan PKW. Kluster ini memiliki permasalahan wilayah berupa banjir, abrasi pantai, dan kebakaran hutan dan lahan. Kluster ini memiliki daya saing kawasan berupa Interkonteksi Sistem Khatulistiwa, Pelabuhan Teluk Batang, Jalan Trans Kalimantan Lintas Selatan, Bandar Udara Rahadi Oesman, Smelter Alumina, dan Gardu Induk Kendawang. Kawasan Strategis pada kluster ini berupa Taman Nasional Gunung Palung, SAL Karimata, Cagar Alam

Muara Kendawangan, Kawasan Industri Ketapang, KKPD Kayong Utara dan KKPD Ketapang.

Sektor yang mempunyai keunggulan komparatif (sektor basis) dan keunggulan kompetitif (daya saing) secara provinsi yaitu sektor Pertanian dan berkontribusi cukup besar dalam PDRB, artinya sektor tersebut merupakan Sektor Unggulan. Sektor Perdagangan dan sektor Industri memiliki kontribusi yang besar dalam PDRB Kayong Utara yang memiliki daya saing meski bukan sebagai basis. Sektor Penyediaan akomodasi dan Jasa Lainnya dapat terus berkembang

**“Kalimantan Barat Maju, Sejahtera,
dan Berkelanjutan”**

karena secara sebagai basis dan mempunyai daya saing, hanya kontribusinya pada PDRB relative kecil.

Gambar 5. 18 Analisis Posisi Relatif Ekonomi Sektoral Kabupaten Kayong Utara



Gambar 5. 19 Analisis Posisi Relatif Ekonomi Sektoral Kabupaten Ketapang



5.3.5.2. *Highlight* Arah Kebijakan Pengembangan Wilayah Kluster 5

Kluster lima memiliki tema pengembangan wilayah sebagai **Pusat Pengembangan Ekonomi Biru dan Hilirisasi SDA**, dengan *highlight* arah kebijakan wilayah sebagai berikut:

1. Peningkatan akses dan kualitas pendidikan vokasi untuk menyediakan tenaga kerja dengan telanta terampil dan berpengalaman sesuai potensi serta keterkaitan dengan DUDI yang dikembangkan melalui skema education to employment
2. Pengembangan industri biru bernilai tambah tinggi dan berkelanjutan serta destinasi pariwisata potensial
3. Pengembangan *smart government* serta penguatan kapasitas aparatur daerah dan lembaga dalam hal manajemen data dan keamanan informasi, kapasitas digital SDM ASN dan pengelolaan aset daerah
4. Peningkatan kapasitas fiskal daerah melalui intensifikasi pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD) pemanfaatan pembiayaan alternatif antara lain KPBU, CSR, jasa ekosistem dan pasar karbon
5. Peningkatan rehabilitasi hutan dan lahan, khusus tambang serta penghambatan laju deforestasi
6. Pemanfaatan alur laut kepulauan indoneisa ALKI I secara optimal untuk menghubungkan rantai pasok/nilai doimestik nasional dan global
7. Pengembangan pembiayaan inovatif termasuk KPBU dan *blended finance*
8. Percepatan pemenuhan infrastruktur dasar

Gambar 5. 20 Kluster 5 (Kabupaten Ketapang – Kabupaten Kayong Utara)



BAB VI

PENUTUP

6.1. Kaidah Pelaksanaan

Visi Kalimantan Barat Maju, Sejahtera dan Berkelanjutan 2045 terwujud melalui partisipasi semua pelaku pembangunan, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJD) Kalimantan Barat harus dijadikan acuan oleh seluruh pelaku pembangunan, termasuk pihak swasta dan organisasi masyarakat sipil dalam melaksanakan strategi transformasi pembangunan sesuai peran masing-masing

melalui kaidah pelaksanaan. Kaidah pelaksanaan mencakup konsistensi perencanaan dan pendanaan, kerangka pengendalian, sistem insentif dan mekanisme perubahan. Cakupan tersebut menjadi instrumen pengaman (safeguarding) untuk memastikan terwujudnya Visi dan Misi RPJD Kalimantan Barat Tahun 2025-2045 sesuai dengan cita-cita masyarakat Kalimantan Barat.

6.2. Konsistensi Perencanaan Pendanaan

Konsistensi antar dokumen perencanaan pembangunan serta sinkronisasinya dengan kebijakan pendanaan diperlukan untuk memastikan perencanaan yang berkualitas, kesesuaian pelaksanaan pembangunan dengan perencanaannya serta ketersediaan pendanaan dan pemanfaatannya secara optimal. Perencanaan yang berkualitas merupakan kunci bagi pelaksanaan pembangunan untuk mencapai tujuan secara berkelanjutan. Perencanaan yang berkualitas juga diperlukan untuk memberikan pedoman yang jelas bagi seluruh pelaku pembangunan,

baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun pelaku nonpemerintah.

Upaya menjamin konsistensi perencanaan dan pendanaan juga perlu didukung dengan penguatan mekanisme pengambilan keputusan yang cermat dan tegas. Hal tersebut dilakukan, khususnya untuk menentukan prioritas pembangunan Nasional sampai dengan level proyek/keluaran, serta memastikan pelaksanaannya. Penguatan mekanisme proses utamanya dilakukan dengan penekanan pada kolaborasi dan partisipasi aktif seluruh pelaku pembangunan

6.2.1. Keterkaitan RPJD dengan Perencanaan Pembangunan Pemerintah Pusat dan Kabupaten/Kota

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2025-2045 yang memiliki posisi menengah dalam perencanaan pembangunan Nasional, yang tertinggi

adalah RPJPN dan RPJD selanjutnya menjadi pedoman bagi dokumen perencanaan turunannya. Dokumen perencanaan pembangunan meliputi

Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) baik di tingkat pusat maupun daerah. Dokumen perencanaan tersebut harus menjadi pedoman bagi penyusunan anggaran pemerintah di tingkat Kabupaten/Kota.

Konsistensi antara RPJPD 2025-2045 dengan dokumen perencanaan turunannya adalah sebagai berikut:

- Sinkronisasi periodisasi dan substansi dilakukan dalam penjabaran RPJPD 2025-2045 ke RPJPD Kabupaten/Kota dan RPJMD. Periodisasi RPJPD 2025-2045 mengikuti RPJPN, misi (agenda) pembangunan Kalimantan Barat berikut upaya transformatif prioritas mempedomani muatan RPJPN 2025-2045.
- RPJPD 2025-2045 bersifat jangka panjang sehingga memberikan arah pembangunan jangka panjang dan khusus memuat upaya transformatif untuk mencapai Kalimantan Barat Maju, Sejahtera dan Berkelanjutan 2045. Hal-hal lain yang bersifat spesifik pusat tidak dimuat di RPJPD 2025-2045, serta yang bersifat rencana strategis 5 tahunan semua SKPD dimuat ke dalam RPJMD dan RPJMD Kabupaten/Kota dengan memperhatikan kondisi masing-masing daerah.
- Arah (Tujuan) Pembangunan Kalimantan Barat dan indikator dalam RPJPD 2025-

2045 mempedomani RPJPN 2025-2045 dan menjadi pedoman dalam penentuan sasaran dan indikator prioritas pembangunan Kalimantan Barat dalam RPJMD dan menjadi pedoman bagi RPJPD Kabupaten/Kota untuk menentukan sasaran, arah kebijakan dan indikator pembangunan.

- Sasaran dan indikator prioritas daerah pada RPJMD menjadi pedoman sasaran dan indikator prioritas pembangunan Kalimantan Barat pada RKPD, sasaran dan indikator strategis/program pada rencana strategis SKPD (Renstra SKPD), serta tujuan dan sasaran pada RPJMD Kabupaten/Kota.
- Sasaran dan indikator strategis/program Renstra SKPD menjadi pedoman dalam menyusun sasaran dan indikator program pada rencana kerja SKPD (Renja SKPD), sedangkan tujuan dan sasaran pada RPJMD Kabupaten/Kota menjadi pedoman bagi Pemerintah Kabupaten/Kota dalam menyusun sasaran program RKPD.
- Sasaran dan indikator prioritas pembangunan Kalimantan Barat pada RKPD juga dipedomani dalam menyusun sasaran dan indikator program Renja SKPD dan sasaran program RKPD Kabupaten/Kota. Indikator prioritas pembangunan Kalimantan Barat dilaksanakan melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) SKPD yang pada gilirannya dipergunakan

sebagai penilaian akuntabilitas kinerja SKPD.

- Dokumen RPJPD, dokumen RPJMD dan dokumen RKPD menjadi pedoman dalam penyusunan rencana pembangunan sektoral (Provinsi dan Kabupaten/Kota) seperti rencana induk/master plan/grand strategi Kalimantan Barat, peta jalan atau sebutan lainnya terkait perencanaan pembangunan Kalimantan Barat.
- Dokumen RPJPD 2025-2045 menjadi pedoman visi, misi dan program bagi pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat, anggota DPR RI, serta anggota DPD RI, serta anggota DPRD Provinsi dan

Kabupaten/Kota serta pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota.

Pencapaian sasaran pembangunan Kalimantan Barat juga harus didukung dengan kebijakan kelembagaan, regulasi serta pendanaan dan investasi. Sebagai upaya mempercepat pencapaian sasaran pembangunan Kalimantan Barat juga ditentukan proyek prioritas pembangunan Kalimantan Barat pada RPJMD dan RKPD. Proyek prioritas pembangunan Kalimantan Barat tersebut dilengkapi dengan ukuran keberhasilan yang mendukung tercapainya sasaran prioritas pembangunan Kalimantan Barat.



6.2.2. Penerapan Prinsip Kerangka Kerja Logis Dalam Perencanaan Pembangunan

Penyusunan RPJPD 2025-2045 dan dokumen perencanaan turunannya menerapkan prinsip Kerangka Kerja Logis (KKL) pembangunan. Pemanfaatan KKL ditujukan agar intervensi kebijakan relevan

dengan tujuan pembangunan yang telah direncanakan. Penyusunan KKL juga mendukung pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pembangunan. Penggunaan KKL dilakukan dengan menerapkan pendekatan

Tematik, Spasial, Holistik dan Integratif sebagai berikut:

- Tematik adalah penentuan tema-tema prioritas dalam suatu jangka waktu perencanaan, serta mampu menjawab tujuan pembangunan.
- Spasial adalah penjabaran beberapa program pembangunan terkait dalam satu kesatuan wilayah.
- Holistik adalah penjabaran tematik program pembangunan ke dalam perencanaan yang komprehensif, mulai dari hulu sampai ke hilir dalam suatu rangkaian kegiatan dengan memperhatikan pengarusutamaan pembangunan, yang mencakup pengarusutamaan gender dan inklusi sosial, ekonomi hijau, transformasi digital, tujuan pembangunan berkelanjutan, serta kebencanaan.

- Integratif adalah keterpaduan pelaksanaan program dari berbagai pemangku kepentingan pembangunan (kementerian/lembaga/daerah/pemangku kepentingan lainnya) serta keterpaduan berbagai sumber pendanaan.

Kerangka Kerja Logis menggambarkan input-proses-output-outcome-impact.

Sasaran utama pembangunan dalam RPJP Nasional yang bersifat impact-outcome, harus diterjemahkan dengan baik hingga ke level input. Pendetailan sasaran tersebut dilakukan melalui dokumen turunannya, meliputi rencana pembangunan jangka menengah dan jangka pendek, baik untuk perencanaan pemerintah pusat maupun daerah.



Sumber: Kementerian PPN/ BAPPENAS, 2023, (diolah)

Sebagai alat ukur ketercapaian sasaran pembangunan, KKL dilengkapi Indikator kinerja pada setiap tingkatannya. Pemilihan

indikator kinerja setidaknya menerapkan kriteria Specific, Measurable, Achievable. Result-Oriented/Relevant dan Time-Bound

(SMART) sehingga mampu menjamin kesinambungan indikator dalam dokumen perencanaan pembangunan Nasional, Kalimantan Barat dan Kabupaten/Kota. Dalam memastikan kesinambungan pembangunan, seluruh indikator RPJPD 2025-2045 harus

menjadi bagian dari RPJMD dan seluruh indikator RPJMD harus menjadi bagian dari Renstra SKPD. Indikator RPJMD juga harus didukung oleh indikator pada RPJMD Kabupaten/Kota sesuai dengan karakteristik kewilayahan masing-masing.

6.2.2.1. Skema Pendanaan dan Penganggaran

Pencapaian sasaran pembangunan Kalimantan Barat dalam RPJPD, RPJMD dan RKPD, perlu didukung dengan sinkronisasi antara perencanaan dan pendanaan pembangunan. Selain itu optimalisasi pemanfaatan berbagai sumber pendanaan pembangunan, baik yang bersumber dari pemerintah maupun nonpemerintah perlu dilakukan secara lebih inovatif, integratif dan tepat sasaran. Dalam rangka mengoptimalkan pemanfaatan sumber pendanaan

pembangunan, dilakukan peningkatan kualitas belanja dan pembiayaan prioritas pembangunan yang sesuai dengan tahapan pembangunan. Selain melakukan efisiensi dan peningkatan efektivitas dalam belanja, pemerintah juga dapat memanfaatkan pendanaan pembangunan yang bersumber dari pinjaman, hibah dan penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) untuk penganggaran pencapaian prioritas pembangunan secara berkelanjutan.

6.2.2.2. Kerangka Pengendalian → Termasuk Manajemen Resiko

Undang-undang di bidang keuangan negara membawa implikasi perlunya sistem pengelolaan keuangan negara yang lebih akuntabel dan transparan di dalam menjamin tercapainya sasaran pembangunan daerah. Hal ini baru dapat dicapai jika seluruh tingkat pimpinan menyelenggarakan kegiatan pengendalian atas keseluruhan kegiatan di daerah dan di instansi masing-masing. Dengan demikian maka penyelenggaraan kegiatan pada suatu Instansi Pemerintah mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan sampai dengan pertanggungjawaban harus dilaksanakan secara tertib, terkendali serta efisien dan efektif.

RPJPD sebagai dokumen perencanaan 20 (dua puluh) tahunan dilaksanakan pengendaliannya melalui pengendalian terhadap dokumen jangka menengah dan dokumen jangka pendek. Pengendalian tersebut dilakukan terhadap kemungkinan risiko-risiko yang akan terjadi dalam upaya mencapai target tujuan dan target sasaran yang telah ditetapkan. Dalam sistem pemerintah daerah, tujuan pemerintah daerah secara jelas tertuang antara lain dalam dokumen perencanaan daerah yang idealnya memperhatikan dokumen perencanaan nasional (RPJPN). Tujuan pemerintah daerah dapat dikelompokkan ke dalam 3 (tiga) jenis, yaitu tujuan strategis pemerintah daerah yang

tertuang dalam dokumen RPJMD, tujuan strategis Perangkat Daerah yang tertuang dalam dokumen Renstra Perangkat Daerah dan tujuan pada tingkat kegiatan/operasional yang tertuang dalam dokumen Renja Perangkat Daerah.

Pengendalian terhadap kemungkinan adanya risiko-risiko dalam rangka mencapai target kinerja tujuan dan sasaran pembangunan daerah tersebut dilakukan dalam 2 (dua) tahapan pengendalian, yaitu pada tahapan perencanaan dan tahapan pelaksanaan. Dalam rangka menjamin tercapainya sasaran pembangunan Kalimantan Barat serta mendukung pencapaian pembangunan Nasional, diperlukan pengendalian yang kontinu dan partisipatif dengan memanfaatkan

sistem elektronik terpadu dan tata kelola data pembangunan.

Pengendalian dilaksanakan melalui kegiatan pemantauan, evaluasi, dan manajemen risiko yang dilakukan pada tahapan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Aktivitas pengendalian didukung oleh sistem elektronik yang terintegrasi dari tahap perencanaan hingga pelaksanaan. Sistem elektronik terpadu juga diintegrasikan dengan tata kelola data pembangunan yang mendorong kebijakan pembangunan berbasis bukti. Kerangka pengendalian RPJPD 2025-2045 mengacu pada pengendalian RPJP Nasional 2025-2045 lebih detail adalah sebagaimana Gambar berikut.

Gambar 6. 1 Kerangka Pengendalian RPJPD 2025-2045



Pengendalian RPJPD mengacu RPJP Nasional dilaksanakan melalui pengendalian jangka menengah dan jangka pendek yang hasilnya disampaikan kepada Kepala

Daerah (Gubernur/Bupati/Walikota). Berdasarkan tahapan pelaksanaannya, ruang lingkup pengendalian pembangunan Nasional terbagi menjadi dua bagian.

a. Pengendalian Perencanaan.

Pengendalian pada tahap perencanaan bertujuan memastikan konsistensi perencanaan pembangunan, meningkatkan kualitas desain proyek prioritas pembangunan Nasional dan daerah, serta menjamin ketersediaan alokasi anggaran, baik dari pemerintah maupun nonpemerintah. Pengendalian ini dilakukan berdasarkan hasil evaluasi perencanaan jangka menengah dan jangka pendek.

Pengendalian jangka menengah mencakup :

- 1) Konsistensi penjabaran perencanaan pada setiap dokumen perencanaan meliputi konsistensi rumusan tujuan dan sasaran pembangunan berikut indikator kinerja, konsistensi kebijakan yang dituangkan dalam program yang relevan hingga pada rumusan kegiatan indikatif yang mendukung pencapaian target tujuan perencanaan pembangunan. Konsistensi penjabaran ini dilakukan antar dokumen perencanaan yang meliputi; Konsistensi Dokumen RPJPD dengan RPJPN, RPJMD dengan RPJMN, RKPD dengan RKP dan RPJMD, Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD, Renja Perangkat Daerah dengan RKPD dan Renstra Perangkat Daerah.
- 2) Penentuan prioritas pembangunan daerah yang diimplementasikan

dalam program-program prioritas dengan indikator keberhasilan yang terukur dan memiliki waktu.

- 3) konsistensi perencanaan dan penganggaran. dan
- 4) identifikasi risiko perencanaan pembangunan dan mitigasinya. Risiko secara sederhana dapat dipahami sebagai segala kemungkinan kejadian yang dapat mengancam pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan sehingga pembangunan tidak bias dirasakan dampaknya oleh masyarakat. Berdasarkan hal tersebut, perlu dilakukan identifikasi berdasarkan indikator kinerja sasaran dengan menentukan penyebab, dampak, kategori dan sumber risiko sehingga bias dirumuskan rencana tindak pengendalian yang bertujuan untuk menurunkan level risiko terhadap pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan.

b. Pengendalian Pelaksanaan.

Pengendalian pada tahap pelaksanaan bertujuan untuk menjamin implementasi pembangunan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Pengendalian ini dilaksanakan melalui pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rencana jangka menengah dan jangka pendek. Pemantauan dan evaluasi tersebut mencakup: (i) Pemantauan terhadap prioritas pembangunan daerah; (ii)

Pemantauan terhadap mitigasi risiko dalam pencapaian target tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang dilakukan; (iii) Evaluasi pencapaian sasaran prioritas pembangunan daerah; dan (iv) Evaluasi pencapaian sasaran Indikator Kinerja Utama, Indikator Kinerja Daerah dan Indikator Kinerja Program yang mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah.

Untuk memperkuat dan menunjang efektivitas penyelenggaraan pengendalian dalam rangka menjamin tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan daerah, perlu didukung dengan regulasi agar pelaksanaan pengendalian berjalan dengan efektif dan tepat sasaran. Tatanan regulasi tersebut

menyinerigikan regulasi terkait pemantauan, evaluasi pengendalian, manajemen risiko pembangunan dan manajemen kinerja. Sinergi regulasi ini diperlukan untuk menjaga konsistensi pelaksanaan pengendalian dengan kinerja yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah. Selanjutnya untuk menjaga kualitas pengendalian yang dilakukan, regulasi pengendalian ini dievaluasi secara berkala dan disesuaikan dengan kebijakan tertinggi yang berlaku.

Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan dokumen RPJPD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2025-2045 melalui manajemen risiko pembangunan daerah dan nasional sebagai bagian dari upaya pencapaian sasaran pembangunan di Provinsi Kalimantan Barat.

6.2.3. Sistem Insentif

Keberhasilan pencapaian sasaran pembangunan Kalimantan Barat maupun Nasional memerlukan partisipasi aktif dari seluruh pelaku pembangunan. Pelaku pembangunan meliputi unsur pemerintah dan nonpemerintah seperti dunia usaha, lembaga penelitian dan kelompok masyarakat lainnya. Untuk mendorong partisipasi aktif semua unsur pelaku pembangunan, perlu diciptakan sistem insentif yang baik. Sistem insentif ini diharapkan dapat meningkatkan keterlibatan pelaku pembangunan secara luas dan partisipatif sehingga dapat mempercepat

pencapaian sasaran prioritas pembangunan Kalimantan Barat dan Nasional. Untuk pelaku pembangunan unsur pemerintah, sistem insentif diintegrasikan di dalam sistem manajemen kinerja dan sistem manajemen anggaran. Pemberian insentif dilaksanakan berdasarkan kinerja K/L/D terhadap pencapaian sasaran pembangunan Nasional. Kinerja diukur antara lain dari aspek konsistensi perencanaan, konsistensi perencanaan dan pendanaan, pencapaian indikator.

6.2.4. Mekanisme Perubahan

Dokumen perencanaan yang adaptif memerlukan ruang penyesuaian atas faktor

yang tidak dapat dikendalikan. Dalam keadaan kahar (force majeure) yang meliputi

perubahan geopolitik, geoekonomi dan bencana, serta penyimpangan pencapaian sasaran pembangunan yang signifikan dari tahapan-tahapan sebelumnya sehingga tidak memungkinkan pencapaian sasaran pembangunan jangka panjang, target RPJP Nasional dan Daerah dapat dimutakhirkan melalui RPJM Nasional dan Daerah.

Pemutakhiran target ini dilakukan berdasarkan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan. Penerapan kaidah pelaksanaan didukung oleh

pemanfaatan transformasi digital melalui penggunaan sistem elektronik terpadu dan tata kelola data pembangunan pada seluruh tahapan siklus pembangunan. Sistem elektronik terpadu tersebut bertujuan untuk meningkatkan efisiensi operasional dan ketangkasan proses bisnis perencanaan dan pelaksanaan RPJP Nasional Tahun 2025-2045. Adapun tata kelola data bertujuan untuk meningkatkan kualitas kebijakan melalui pemanfaatan data referensi yang sama.

6.2.5. Komunikasi Publik

Komunikasi publik sangat penting untuk mewujudkan sistem pemerintahan yang dinamis, transparan, responsif, dan komunikatif. Dengan komunikasi publik yang baik, diharapkan kebijakan dan program pemerintah dapat dengan mudah dipahami oleh publik dan dapat mengundang partisipasi publik dalam perencanaan, pelaksanaan, serta pengendalian kebijakan pembangunan. Prinsip dasar komunikasi publik terdiri dari tiga hal pokok, yaitu: (i) struktur dan tata kelola komunikasi lintas sektor dan daerah yang objektif, akuntabel, inovatif dan profesional; (ii) penyediaan informasi yang akurat, transparan, tepat waktu, menarik dan dapat dimanfaatkan oleh para pihak secara mudah dan murah; serta (iii) keterlibatan semua kelompok masyarakat secara demokratis berbasis data yang valid dengan metode komunikasi yang sesuai kebutuhan publik yang beragam. Komunikasi publik RPJP Nasional 2025-2045 berprinsip "tidak ada yang tertinggal" (no one left behind) dan partisipasi yang bermakna

(meaningful participation). Komunikasi publik melibatkan tiga pemangku kepentingan utama, yaitu Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah dan masyarakat. Komunikasi kepada Kementerian/Lembaga (K/L) dilakukan melalui musyawarah atau rapat koordinasi agar K/L dapat memberikan masukan terhadap prioritas pembangunan, sedangkan komunikasi kepada pemerintah daerah dilakukan secara berjenjang mulai dari musyawarah Desa/Kelurahan, Kabupaten/Kota dan Provinsi untuk membangun pemahaman dan partisipasi. Selanjutnya, komunikasi kepada masyarakat umum termasuk swasta, media, akademisi, organisasi masyarakat sipil diaspora, pemuda dan kelompok rentan seperti perempuan, anak, penyandang disabilitas dan lansia dilakukan melalui berbagai metode komunikasi yang memudahkan masyarakat memahami dan berpartisipasi dalam pembangunan dengan memberikan masukan, kritik atau dukungan. Komunikasi publik

dilaksanakan dengan mengutamakan keterbukaan, menjamin akses yang luas, jelas, tepat, cepat dan objektif. Dengan demikian komunikasi publik dapat mendorong

partisipasi publik yang lebih bermakna dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pembangunan.

6.3. PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN

Upaya untuk mewujudkan Visi Kalimantan Barat 2045 memerlukan kapasitas pembiayaan yang memadai. Peningkatan kapasitas pembiayaan dilakukan melalui pengembangan inovasi pembiayaan, baik berupa perluasan sumber-sumber pembiayaan, penerapan skema atau mekanisme pelaksanaan yang baru, hingga optimalisasi peran sektor keuangan.

Peningkatan kapasitas pembiayaan sektor publik dilakukan melalui perluasan sumber-sumber dan pengembangan inovasi skema pembiayaan yang mencakup : (i) penguatan perencanaan pembiayaan yang meliputi : penataan regulasi dan pembentukan kelembagaan yang adaptif, pemanfaatan teknologi digital dalam proses bisnis dan pengembangan inovasi mekanisme pelaksanaan (delivery mechanism) yang mendukung ruang gerak untuk mendapatkan skema pembiayaan yang berdampak (impact investment); (ii) perluasan kerja sama bilateral, multilateral dan kerja sama keuangan lainnya untuk mengembangkan sumber-sumber pembiayaan, terutama pembiayaan inovatif dengan syarat dan ketentuan yang paling menguntungkan dan yang mendukung kerja sama ekonomi lainnya; (iii) penguatan dan perluasan berbagai instrumen dalam kerangka kerja sama pemerintah dan badan usaha,

khususnya pada aspek regulasi, tata kelola dan kelembagaan menuju model private financial initiative yang mencakup sektor infrastruktur publik, utilitas dan infrastruktur sosial; (iv) penerapan skema-skema pembiayaan yang mendukung pemberdayaan industri dalam negeri dan mendorong alih teknologi; (v) optimalisasi pemanfaatan aset melalui sekuritisasi aset (asset securitization), daur ulang aset (asset recycling), tukar guling aset (asset offset) hingga pemanfaatan peningkatan nilai aset yang dihasilkan dari investasi, aktivitas dan kebijakan di suatu kawasan (asset value capture).

Peningkatan kapasitas pembiayaan sektor nonpublik dilakukan melalui: (i) pemanfaatan instrumen pendanaan jangka panjang (antara lain : dana pensiun, asuransi, instrumen di pasar modal, dan Sovereign Wealth Fund); (ii) inovasi produk pembiayaan syariah yang disusun berdasarkan prinsip sewa-menyewa, jual beli dan bagi hasil; (iii) inovasi pembiayaan untuk merespon perubahan iklim yang mencakup berbagai jenis pembiayaan hijau, biru dan sirkular; (iv) produk pembiayaan berbasis transaksi, seperti bursa karbon, bursa plastik ataupun bursa tematik lainnya; (v) serta penguatan bauran pendanaan (blended financing) melalui pemanfaatan dana yang bersifat katalitik seperti dana filantropi,

dana sosial korporasi maupun dana keagamaan, termasuk jaminan yang seluruhnya ditujukan untuk mengurangi risiko finansial bagi partisipasi sektor non publik dalam pembangunan Nasional.

Peningkatan kapasitas pembiayaan sektor publik dan nonpublik perlu diikuti dengan manajemen investasi yang berkualitas sehingga kapasitas pembiayaan yang ada dapat digunakan secara optimal. Beberapa langkah penguatan manajemen investasi publik tersebut mencakup: (i) penajaman identifikasi investasi publik dalam setiap periode jangka menengah; (ii)

penyempurnaan proses penyiapan dan penilaian proyek investasi publik; (iii) penyelarasan prioritas investasi publik skala Nasional dan daerah; (iii) modernisasi pemantauan dan pengendalian pelaksanaan investasi publik; (iv) pelibatan swasta dan masyarakat dalam siklus investasi publik; (v) penyempurnaan kerangka regulasi, tata kelembagaan dan organisasi serta kapasitas sumber daya manusia manajemen investasi publik; dan (vi) penguatan transparansi dan akuntabilitas atas seluruh aspek investasi publik.

6.4. KESIMPULAN

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2025-2045 merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode dua puluh tahun terhitung sejak Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2045. RPJPD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2025–2045 yang berisi visi, misi, sasaran pokok dan arah pembangunan jangka panjang merupakan pedoman di dalam penyelenggaraan pembangunan daerah pada Tahun 2025-2045. RPJPD ini merupakan pedoman bagi calon gubernur dan calon wakil gubernur dalam menyusun visi, misi dan program prioritas yang akan menjadi dasar dalam penyusunan RPJMD lima tahunan.

RPJPD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2025-2045 juga merupakan pedoman dalam:

1. Penyusunan RTRW Provinsi Kalimantan

Barat, RPJMD Provinsi Kalimantan Barat, RKPD Provinsi Kalimantan Barat, Renstra SKPD, Rencana Kerja SKPD serta dokumen perencanaan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah lainnya di Provinsi Kalimantan Barat;

2. Menjamin terwujudnya intergrasi, sinkronisasi dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah daerah maupun antar Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
3. Mendukung koordinasi antar pemangku kepentingan dalam pencapaian visi dan misi daerah serta Nasional;
4. Mewujudkan keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan;
5. Mewujudkan tercapainya penggunaan sumberdaya secara efisien, efektif,

**“Kalimantan Barat Maju, Sejahtera,
dan Berkelanjutan”**

berkeadilan dan berkelanjutan.
Keberhasilan pembangunan daerah dalam mewujudkan visi : **“KALIMANTAN BARAT MAJU, SEJAHTERA DAN BERKELANJUTAN”** perlu didukung oleh :
(1) komitmen dari kepemimpinan daerah

yang kuat dan demokratis; (2) konsistensi kebijakan pemerintah daerah; (3) keberpihakan kepada rakyat; dan (4) peran serta masyarakat dan dunia usaha secara aktif di Provinsi Kalimantan Barat